

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL TAHUN KE-5, *CALL FOR PAPER* DAN PAMERAN
HASIL PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT
KEMENRISTEKDIKTI RI

EKONOMI & SOSIAL

PENGEMBANGAN RISTEK DAN PENGABDIAN
MENUJU HILIRISASI INDUSTRI

YOGYAKARTA, 16 - 17 OKTOBER 2019

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
2019

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL TAHUN KE-5, *CALL FOR PAPER* DAN PAMERAN
HASIL PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT
KEMENRISTEKDIKTI RI

PENGEMBANGAN RISTEK DAN PENGABDIAN
MENUJU HILIRISASI INDUSTRI

Cetakan Tahun 2019

Katalog Dalam Terbitan (KDT):

Prosiding Seminar Nasional dan *Call For Paper*
Pengembangan Ristek dan Pengabdian menuju Hilirisasi Industri
LPPM UPNVY

1.444 hlm; 21 x 29.7 cm.
ISBN: 978-602-5534-47-8

LPPM UPNVY PRESS

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
LPPM UPNVY Gd. Rektorat Lantai 4
Jl. Padjajaran 104 (Lingkar Utara), Condong Catur, Yogyakarta 55283
Telpon (0274) 486733, ext 154
Fax. (0274) 486400

www.lppm.upnyk.ac.id
Email: lppm@upnyk.ac.id

Penata Letak : Dedi Fatchurohman Hermawanto
Nanik Susanti
Desain Sampul : Sri Utami

Distributor Tunggal
LPPM UPNVY Gd Rektorat Lantai 4
Jln. Padjajaran 104 (Lingkar Utara), Condong Catur, Yogyakarta 55283
Telpon (0274) 486733, ext 154
Fax. (0274) 486400

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit.

DAFTAR REVIEWER
SEMINAR NASIONAL TAHUN KE-5, CALL FOR PAPER DAN PAMERAN
HASIL PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT
KEMENRISTEKDIKTI RI
16 - 17 OKTOBER 2019
LPPM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA

1. Prof. Dr. Ir. Sari Bahagiarti K, M.Sc. (UPNVY)
2. Prof. Dr. Didit Welly Udjianto, M.S. (UPNVY)
3. Prof. Dr. Arief Subyantoro, M.S. (UPNVY)
4. Prof. Dr. Danisworo, M.Sc. (UPNVY)
5. Prof. Dr. Bambang Prastistho, M.Sc. (UPNVY)
6. Ptof. Dr. Suwardjono, M.Sc. (UGM)
7. Prof. Dr. Jogiyanto Hartono, M.Sc. (UGM)
8. Prof. Dr. Sucy Kuncoro, M.Si (UNNES)
9. Prof. Bambang Subroto, M.M. (Brawijaya)
10. Prof. Ahmad Sudiro (Brawijaya)
11. Prof. Idayanti, M.Si. (UNHAS)
12. Dr. Ardhito Bhinadi, M.Si. (UPNVY)
13. Dr. Ir. Heru Sigit Purwanto, M.T. (UPNVY)
14. Dr. Sri Suryaningsum, S.E., M.Si., Ak (UPNVY)
15. Dr. Mahreni, M.T. (UPNVY)
16. Dr. Hendro Widjanarko, S.E, M.M. (UPNVY)
17. Dr. Joko Susanto, M.Si. (UPNVY)
18. Dr. Rahmat Setiawan, M.Si. (UNAIR)
19. Dr. Rahmad Sudarsono, M.Si. (UNPAD)
20. Prayudi, S.I.P., M.A., Ph.D. (UPNVY)

**SAMBUTAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UPN “Veteran” Yogyakarta dapat menyelenggarakan Seminar Nasional Tahun Ke-5, *Call Paper* dan Pameran hasil Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti RI. Tema Seminar Tahun ini adalah “Pengembangan Ristek dan Pengabdian Menuju Hilirisasi Industri” Seminar Nasional Tahun Ke-5, *Call Paper* dan Pameran Hasil Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti RI diselenggarakan dengan tujuan untuk mempertemukan berbagai pihak, yaitu Pemerintah, Industri, masyarakat dan Perguruan Tinggi dalam membangun bangsa yang tangguh berbasis penelitian di semua bidang disiplin ilmu baik sosial humaniora maupun saintek. Kegiatan Seminar Nasional ini juga merupakan salah satu wahana untuk penyebarluasan hasil-hasil penelitian dan kajian yang telah dilakukan oleh dosen-dosen, serta saling bertukar informasi untuk meningkatkan mutu baik penelitian maupun pengabdian masyarakat. Lebih dari itu, melalui seminar diharapkan pula terjadi komunikasi yang baik antara pemerintah, dunia industri, masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga riset, sehingga tercipta sinergi yang bersifat implementatif.

Pada kesempatan ini para peneliti, pengabdian, akademisi dan praktisi telah berhimpun di dalam seminar ini untuk menyampaikan makalah hasil-hasil penelitian dan pengabdianannya. Makalah-makalah tersebut selanjutnya dituangkan dalam sebuah prosiding. Diharapkan prosiding ini dapat bermanfaat, turut menambah informasi, dan memperluas pengetahuan mengenai penelitian pengabdian dan semoga Allah SWT meridhoi semua langkah baik kita.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Yogyakarta, 16 Oktober 2019

Rektor

Dr. Mohamad Irhas Effendi, M.S.
NIP. 19621219 198803 1 001

**KATA PENGANTAR KEPALA LP2M
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

1. Yth. Bapak Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta
2. Yth. Bapak Dr. Ir. Jumain Appe, M.Si (Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kemenristekdikti RI)
3. Yth. Bapak Dr. Muhammad Dimiyati (Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti RI)
4. Yth. Bapak Budi G Sadikin (Direktur Utama PT. Inalum)
5. Yth. Bapak Ir. Milawarma, M.Eng (Komisaris Independen PT. Timah)
6. Yth. Bapak Dr. Suprajarto (Alumni FEB UPN “Veteran” Yogyakarta)

Puja dan Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, karunia, nikmat, dan segala anugerah serta kekuatannya, sehingga kita senantiasa diberikan semangat untuk terus memperbaiki diri guna mewujudkan pengabdian sebagai masyarakat akademik yang memiliki kepedulian atas berbagai permasalahan bangsa sesuai dengan kapasitas kita masing masing. Sholawat dan salam kami haturkan atas junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberi pencerahan yang penuh dengan ilmu dan pengetahuan seperti sekarang ini.

Seminar Nasional, *Call Paper* dan Pameran Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristekdikti RI ini untuk memperkokoh sinergi Pemerintah, Industri, Masyarakat dan Perguruan Tinggi dalam membangun bangsa yang tangguh berbasis penelitian semua bidang disiplin ilmu, bidang penelitian Sosial Humaniora, Sains Teknologi dan Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu wahana penyebarluasan hasil-hasil penelitian dan kajian yang dilakukan berbagai pihak untuk saling tukar menukar informasi dalam rangka peningkatan mutu penelitian dan pengembangan pendidikan tinggi. Seminar Nasional ini juga sebagai rangkaian monev internal terakhir bagi peneliti dan pengabdian penerima dana eksternal dari Kemenristekdikti RI dan dana internal UPN “Veteran” Yogyakarta. Lebih dari itu, melalui kegiatan ini juga diharapkan terpenuhinya prinsip tata kelola Pemerintah, Industri, dan Perguruan Tinggi akan memperkokoh martabat bangsa dan terjadi komunikasi antara dunia Industri, Perguruan Tinggi, serta lembaga – lembaga penelitian.

Seminar Nasional, *Call Paper* dan Pameran hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti RI dengan topik “Pengembangan Ristek dan Pengabdian Menuju Hilirisasi Industri” ini diikuti oleh praktisi dan akademisi dari Perguruan Tinggi – Perguruan Tinggi terkemuka di Indonesia, baik bidang Sosial Humaniora, Sains Teknologi dan Pengabdian Masyarakat dengan jumlah naskah yang masuk lebih dari 180 naskah.

Akhir kata, semoga Semnas dan *Call Paper* ini bermanfaat dan saya menghaturkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak, khususnya peserta seminar dan call paper serta seluruh pelaksana kegiatan atas peran sertanya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Yogyakarta, 16 Oktober 2019
Kepala LP2M

Dr. Ir. Heru Sigit Purwanto, M.T
NIP. 19581202 199203 1 001

DAFTAR ISI
 EKONOMI DAN SOSIAL

	Halaman
Halaman Judul	i
Daftar Reviewer	iii
Sambutan Rektor	iv
Kata Pengantar Kepala LP2M	v
Daftar isi	vii
Perceived Enjoyment, Compatibility Dan Social Influence Dalam Adopsi Media Sosial	747
Dyah Sugandini, Mohamad Irhas Effendi, Yuni Istanto, Rahajeng Arundati, Esti Dwi Rahmawati	
Peran Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Pemberantasan Hoaks	756
Muhammad Edy Susilo, Subhan Afifi, Senja Yustitia	
Development Of Tourism In The South Coastal Of Special Region Of Yogyakarta	765
Noto Pamungkas, Rusherlisyani, Raden Hendri Gusaptono, Latifah Dianing Putri, Ulfah Rahmawati, Adiwirastu Nuralamsyah, Aryani Muji Kirana Putri	
Analisis Karakteristik Nelayan Tradisional Berdasar Jenis Dan Klasifikasi Nelayan, Kelompok Kerja, Jenis Perairan, Teknologi, Aspek Keterampilan Profesi, Sistem Navigasi Dan Komunikasi	775
Sabihaini, Awang Hendrianto Pratomo, Heru Cahya Rustamaji, Sudaryatie	
Perkembangan Batik Sleman	781
Sri Suryaningsum, Raden Hendri Gusaptono, Sri Luna Murdianingrum, Alifa Nida Maharani, Rakyan Widowati Tanjung	
Memetakan Kemampuan Literasi Media Digital Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Desa Maguwoharjo, Yogyakarta	791
Dewi Novianti, Siti Fatonah	
Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Aspek Perpajakan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Bantul	800
Dwi Sudaryati, Sucahyo Heriningsih, Lita Yulita Fitriyani	
Upaya Diplomasi Perbatasan Indonesia Dalam Menyelesaikan Persoalan Perbatasan Di Tanjung Datu, Kalimantan Barat	808
Iva Rachmawati	
Analisis Kepemimpinan Spiritual, Perilaku Kerja Spiritual, Dan Kesadaran Lingkungan Terhadap <i>Environmental Passion</i>	823
Yuni Siswanti, Ahmad Muhsin, Laila Nafisah	

Pemetaan Objek Wisata Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Di Dlingo, Bantul Ninik Probosari, Sri Kussujaniatun, Anis Siti Hartati	832
Analisis Kota Yogyakarta Sebagai Kota Kreatif: Pendekatan Sinergitas Quadro Helix Prayudi, Kartika Ayu Ardhanariswari, Ninik Probosari	839
Model Manajemen Risiko Bencana Berbasis Komunitas Melalui Uji Publik Rencana Kontinjensi Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Puji Lestari, Eko Teguh Paripurno, Arif Rianto Budi Nugroho	850
Implementasi Kurikulum Berbasis Kkni Menuju Era Revolusi Industri 4.0: Telaah Literatur Sri Astuti, Zuhrohtun, Kunti Sunaryo	857
Spillovers Produktivitas Pekerja Di Jawa Tengah Joko Susanto, Didit Welly Udjiyanto	865
Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Lima Desa Di Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro) Lita Yulita Fitriyani, Marita, Windyastuti, Mustholihul Absor	875
Kritik Arus Bawah: Studi Wisata Festival Di Perbatasan Sota, Merauke Machya Astuti Dewi, Iva Rachmawati, Sri Issundari, Meilan Sugiarto	883
Adopsi Aplikasi Berbasis Android Bela Yudha Darasta, Aprilivianto, Dyah Sugandini, Mohamad Irhas Effendi	892
Loyalitas Pada Wisata Heritage: Studi Kasus Pada Wisatawan Candi Prambanan Esti Dwi Rahmawati, Yulia Aji Puspitasari, Yuni Istanto, Dyah Sugandini	901
Kebijakan Indonesia Dalam Mewujudkan Industri Hijau (Green Industry) Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo Asep Saepudin, Sri Muryantini, Herra Dwi Maghfiroh	910
Pengaruh Self-Efficacy Terhadap Motivasi Berprestasi Mahasiswa Jurusan Manajemen Berbasis Kkni Ayn Warsiki, Tri Mardiana	921
Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Konsumen Situs Pemesanan Tiket Dan Hotel Online Pegipegi Danang Yudhiantoro, Ign Agus Suryono, Karyono	927
Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Umkm Di Daerah Istimewa Yogyakarta) Hari Kusuma Satria Negara, Dian Indri Purnamasari	939

Kajian Teoretis Tentang Manajemen Laba Dan Implikasinya Terhadap <i>Credit Rating</i>	947
Indra Kusumawardhani , Windyastuti	
Model Sosialisasi Dan Internalisasi Nilai-Nilai Bela Negara Di Kalangan Mahasiswa Upn "Veteran" Yogyakarta Untuk Mewujudkan "Kampus Bela Negara"	959
Isbandi Sutrisno, Sigit Tripambudi	
Budaya Komunikasi Masyarakat Sangiran Dalam Upaya Pelestarian Situs Arkeologi Sangiran Sebagai Warisan Budaya Dunia	972
Kurnia Arofah, Basuki Agus Suparno	
Keakuratan Model Prediksi Fraud Pada Industri Perbankan	980
Sri Astuti, Marita, Sucahyo Heriningsih	
Kebijakan Irregular Maritime Arrivals (Imas) Australia Dan Dampaknya Terhadap Indonesia Tahun 2010-2018	989
Muharjono, Hikmatul Akbar	
Kausalitas Antara Investasi Asing Dan Kemiskinan Di Indonesia	997
Purwiyanta, Ambar Puji Harjanto	
Upaya Reunifikasi Korea Dan Perkembangan Hubungan Antar Korea	1007
Reza Prima Yanti, Anik Yuniarti	
Transmisi Kebijakan Moneter Dengan Sasaran Akhir Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia	1015
Rini Dwi Astuti, Sri Rahayu Budi Hastuti	
Kontestasi Berita Hoax Pemilu Presiden Tahun 2019 Di Media Daring Dan Media Sosial	1022
Rudi Wibowo, Edwi Arief Sosiawan, Ratnawati, M.Si	
Pengembangan Model Pengambilan Keputusan Multi Kriteria Pada Perusahaan Jasauntuk Menentukan <i>Trade-Off</i> Dari Tujuan Perusahaan Yang Saling Berkonflik Menggunakan Metode <i>Single Objective Approach</i>	1032
Sutrisno, Dyah Rachmawati Lucitasari	
Desentralisasi Fiskal Dan Dampaknya Terhadap Ketimpangan Pembangunan Di Pulau Jawa Tahun 2001-2017	1039
Wahyu Dwi Artaningtyas, Asih Sriwinarti	
Strategi Pengembangan Desa Berbasis Potensi Lokal	1049
Eko Murdiyanto, Budiarto, Vandrias Dewantoro	
Migran Penduduk Dari Desa Sumbermulyo Beserta Hubungannya Dengan Daerah Asal	1056
Lukmono Hadi, Arif Wibawa	

Grand Desain Pengembangan Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal (Studi Kasus Di Desa Salamrejo Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo)	1062
Nanik Dara Senjawati, Indah Widowati, Sugiman Setyo Wardoyo	
Potensi Dan Permasalahan Bumdes Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Bantul (Studi Di Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul)	1070
Abdul Ghofar, Dwi Hari Laksana, Teguh Kismantoroedji	
Potensi Desa Wisata Di Sleman Menuju Muslim Friendly Tourist Village	1076
Eny Endah Pujiastuti, Adi Soeprapto, Sriyono, Simon Pulung Nugroho, Fery Dwi Jadmiko, Amira Fauzia Luberti	
Strategi Pengembangan Penatakelolaan Dan Sistem Informasi Akuntansi Pada UKM Sebagai Upaya Keefektifan Pengendalian Manajemen Dan Implikasinya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	1082
Hiras Pasaribu, Nur Suhascaryo, Alp. Yuwidianoro, Ida Ayu Purnama, Afni Sirait	
Analisis Tingkat Kedisiplinan Mahasiswa Dalam Menghadiri Perkuliahan Pada Jurusan Manajemen Feb Upn “Veteran” Yogyakarta	1093
Ignatius Agus Suryono, Sudaryatie, Sri Kussujaniatun, Anis Sitihartati	
Pemetaan Model Pembelajaran Pancasila Pada Perguruan Tinggi Di Daerah Istimewa Yogyakarta	1098
Saptopo Bambang Ilkodar, Lestanta Budiman, Hastangka	
Kajian Potensi Usaha Produk Pasta Pewarna Alami ‘Indigo’ Di Kabupaten Bantul Berbasis Kemampuan Pengembangan Keterlekatan Jejaring Kerjasama	1106
Titik Kusamantini, Krisnandini Wahyu Putri, Darban Haryanto	
Kajian Perilaku Sivitas Akademika Terhadap Sampah Di Lingkungan Upn “Veteran” Yogyakarta	1113
Andi Sungkowo, Ika Wahyuning Widiarti, Farida Afriani Astuti, Titi Tiara Anasstasia	
Potensi Kekayaan Intelektual Para Dosen UPN Veteran Yogyakarta 2012-2019	1123
Ari Wijayani, Ninik Probosari	
Peningkatan Mutu Akreditasi Program Studi Melalui Percepatan Waktu Penyelesaian Tugas Akhir Dan Kuliah Kerja Profesi Mahasiswa	1130
Budiarto, Agus Santosa	
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Layanan Akademik Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi	1134
Hiras Pasaribu, Alp. Yuwidianoro, Siti Rokhimah, Indah Kartika Sandhi, Gita Astyka Rahmanda	

Respon Mahasiswa Ftm Upn "Veteran" Yogyakarta Terhadap Fasilitas Non-Kurikuler Ditinjau Dari Survei Kepuasan Parkir Dan Ruang Publik	1143
Joko Soesilo, Suranto, Peter Eka Rosadi, Soraya Faranisya, Fajar Puspo Dewi	
Model Internalisasi <i>Soft Skill</i> Bela Negara Bagi Mahasiswa Fisip Melalui Kegiatan Terintegratif Dan Berkelanjutan	1152
Machya Astuti Dewi, Asep Saepudin, Muharjono, Indro Herry Mulyanto, Kurnia Arofah	
Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (Spmi) Sebagai Upaya Meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Upn "Veteran" Yogyakarta	1162
Meilan Sugiarto, Sri Woro Ediningsih, Siswanti, Herlina Jayadianti, Puji Lestari, Bambang Wisaksono	
Pengembangan Model Optimalisasi Peran Lppm Upn "Veteran" Yogyakarta Dalam Meningkatkan Kinerja Penelitian Dosen Melalui Sinergitas Sinta	1166
Prayudi, Hendro Widjanarko	
Inkubator Bisnis Teknologi Sebagai Upaya Meningkatkan Technology Entrepreneurship Di Perguruan Tinggi	1176
Sadeli, Hastho Joko Nur Utomo, Muhammad Fathi Rauf	
Studi Penelusuran Alumni Teknik Industri Upn "Veteran" Yogyakarta Sebagai Sarana Input Perbaikan Berkelanjutan Program Studi Teknik Industri	1184
Sadi, Dyah Rachmawati Lucitasari, Muhammad Shodiq Abdul Khannan	
Profil Lulusan Dan Korelasi Antara Toefl Dan Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Dengan Masa Tunggu Program Studi Ekonomi Pembangunan	1192
Sri Rahayu Budi Hastuti, I Ketut Nama	
Analisis Penguatan Internal Penelitian Perguruan Tinggi	1203
Sri Suryaningsum	
Fasilitas Aplikasi Web Dapat Membangun Suasana Akademik Untuk Menciptakan Word Of Mouth Mahasiswa Prodi Magister Manajemen	1211
Wisnalmawati, Istiana Rahatmawati, Purbudi Wahyuni	

PERCEIVED ENJOYMENT, COMPATIBILITY DAN SOCIAL INFLUENCE DALAM ADOPSI MEDIA SOSIAL

Dyah Sugandini, Mohamad Irhas Effendi, Yuni Istanto, Rahajeng Arundati, Esti Dwi
Rahmawati

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi untuk menjelaskan perceived enjoyment, compatibility dan social influence dalam setting media sosial. Penelitian ini menggunakan 100 responden yang sudah menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini tidak membatasi responden dalam hal gender maupun latar belakang responden lainnya. Data dianalisis dari rata-rata jawaban responden yang diperoleh selama penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa item yang digunakan untuk mengukur perceived enjoyment, compatibility dan social influence menunjukkan jawaban yang relatif sangat tinggi. Penelitian ini bisa menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dalam memprediksi adopsi inovasi teknologi informasi dengan menggunakan variabel perceived enjoyment, compatibility dan social influence.

PENDAHULUAN

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah secara signifikan berkembang pesat dalam dekade terakhir. TIK merupakan alat penanganan informasi terkait dengan aplikasi dan layanan yang digunakan untuk memproduksi, menyimpan, memproses, mendistribusikan dan bertukar informasi (Rouse, 2005). TIK terdiri dari ponsel, komputer, perangkat tablet, perangkat keras, perangkat lunak atau jaringan. Perkembangan TIK telah memberikan manfaat bagi banyak sektor di masyarakat seperti dalam bisnis, pendidikan dan kehidupan pribadi (Condie & Munro, 2007; Line et al., 2011). Teknologi ini memberikan manfaat kepada pengguna dalam bentuk aksesibilitas dan pengelolaan informasi dengan cara yang lebih cepat dan mudah. TIK juga telah merambah ke dalam aplikasi smartphone.

Smartphone secara dramatis telah mengubah kehidupan sehari-hari dan strategi bisnis. Kemajuan teknologi dalam komputasi smartphone dapat melakukan penyimpanan, kemampuan transmisi, melakukan konektivitas global dengan berbagai layanan. Smartphone didefinisikan sebagai perangkat seluler atau ponsel yang memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan telepon, mengirim dan menerima email, mengunduh file, menyediakan koneksi internet dan menggunakan aplikasi. Smartphone biasanya memiliki layar sentuh dan sistem operasi yang mampu menjalankan aplikasi yang diunduh (Aldhaban, 2012; Park & Chen, 2007; Pheeraphuttharakoon, 2015). Contoh merek smartphone saat ini adalah Apple iPhone, ponsel Samsung Galaxy, yang menawarkan sistem operasi seperti, Windows Phone atau Sistem Operasi Android (Verkasalo et al., 2010). Smartphone memberi pengguna kenyamanan dan tambahan nilai yang menarik serta mendorong evolusi dan pengembangan perdagangan elektronik (e-commerce) untuk bisnis skala kecil. Pendekatan penjualan ritel melalui seluler telah menyediakan aksesibilitas yang diperluas, konten yang diperbarui tepat waktu, dan pengalaman baru bagi konsumen. Meskipun sistem dan arsitektur e-commerce berbasis android telah dihadirkan, namun riset untuk mengeksplorasi niat konsumen untuk mengadopsi Aplikasi berbasis Android masih sedikit dilakukan (Jang, Chang, Liu & Lai, 2018).

Aplikasi berbasis Android pada smartphone pertama kali diluncurkan pada bulan Oktober 2008. Kebangkitan platform ini semakin meroket dan berkembang sangat baik. Ponsel Android menyumbang lebih dari setengah dari semua penjualan smartphone pada kuartal ketiga tahun 2011. Adopsi aplikasi berbasis Android digunakan untuk melakukan hal-hal seperti transaksi perbankan, layanan pembayaran, mengakses Internet, dan menginstal berbagai aplikasi (Tchakount'e, Dayang, Nlong & Check, 2014). Perusahaan saat ini diizinkan untuk menawarkan berbagai layanan melalui smartphone dalam memenuhi beragam kebutuhan konsumen. Layanan yang difasilitasi oleh smartphone ini mengandalkan aplikasi khusus dalam memberikan layanan yang diminta oleh pengguna dan konsumen. Pada 29 Maret 2017, ada sekitar 2.800.000 Aplikasi yang tersedia di Google Play Store dan sekitar 2.200.000 Aplikasi di App Store Apple (Statista.com, 2017; Jang et al., 2018). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *perceived enjoyment*, *compatibility* dan *social influence* dalam adopsi sosial media di smartphone.

TINJAUAN PUSTAKA

Media Sosial

Platform media sosial merupakan ruang demokratis yang dapat digunakan untuk berekspresi, membangun atau mempertahankan hubungan, afiliasi, dan kepercayaan. Media sosial memungkinkan sebuah pemikiran, komentar dan pendapat untuk dibagikan kepada orang lain yang memiliki kepentingan bersama atau berbeda dari diri mereka sendiri (Arshad & Akram, 2018). Pemasaran Media Sosial biasanya memanfaatkan situs media sosial untuk meningkatkan visibilitas di Internet dan mempromosikan produk dan layanan. Situs media sosial bermanfaat untuk membangun jejaring sosial (dan bisnis), dan untuk bertukar ide dan pengetahuan. Jejaring media sosial adalah bagian dari tren yang dikenal sebagai Web 2.0, yang mengacu pada perubahan pengguna dan pengembang perangkat lunak menggunakan Web (Lau, 2017). Ini adalah sebuah penggunaan Web yang lebih kolaboratif yang meningkatkan pertukaran kreativitas dan pengetahuan. Pemasaran Media Sosial merupakan cara interaktif yang digerakkan pengguna untuk membantu pengguna lain berpartisipasi dan berkolaborasi melalui Web melalui aplikasi dan layanan. Karena itu penting bahwa konten dapat diakses oleh pengguna; pengguna harus dapat membuat, berbagi, mencampur, dan menggunakan kembali konten (Wilcox & Cameron, 2010). Media social memberi kebebasan untuk memilih, membuat, dan berbagi informasi dengan alasan mereka sendiri. Esensi kebebasan memungkinkan suara dari kelompok minoritas berkesempatan untuk mengekspresikan ide dan pendapat mereka kepada orang lain.

Perceived enjoyment (Persepsi kenyamanan)

Perceived enjoyment adalah sejauh mana aktivitas menggunakan sistem tertentu dianggap menyenangkan bagi diri penggunanya, selain dari konsekuensi kinerja yang dihasilkan dari penggunaan sistem. TAM 3 dapat memprediksi 53% niat untuk menggunakan dan 31-36% dari penggunaan aktual (Venkatesh & Bala, 2008) sementara UTAUT dapat meramalkan niat adopsi hingga 70% (Venkatesh et al., 2003). Namun, faktor-faktor baru seperti *playfulness* dan *enjoyment* juga telah dimasukkan ke TAM yang baru. Penelitian yang dilakukan oleh Venkatesh, et al., (2003) menunjukkan bahwa persepsi kenyamanan dapat mempengaruhi adopsi smartphone untuk orang dewasa dan orang yang lebih tua. Sebuah smartphone yang memiliki kapasitas tambahan seperti menghubungkan orang dengan teman dan keluarga, memainkan musik, menonton video, memasang dan memainkan game dan menjelajahi beberapa konten yang menghibur. Smartphone dapat menjadi perangkat yang memberikan kesenangan bagi orang dewasa yang lebih tua. Kenikmatan yang dirasakan

ditemukan secara signifikan mempengaruhi tujuan penggunaan teknologi baru (Davis, et al., 1992). Verkasalo et al., (2010) mengemukakan bahwa untuk beberapa fitur smartphone seperti layanan internet seluler dan game ponsel, *perceived enjoyment* secara signifikan mempengaruhi adopsi. Nimrod (2011) menganalisis penggunaan teknologi dalam forum online dan menemukan bahwa warga senior juga mempertimbangkan kesenangan ketika menggunakan teknologi baru bagi sesama komunitasnya.

Compatibility (kesesuaian)

Compatibility dalam teori *Dol*, didefinisikan sebagai smartphone yang kompatibel dengan gaya hidup penggunanya (Rogers, 1998). Beberapa peneliti sebelumnya seperti Teo dan Pok (2003) mempelajari ponsel yang mendukung WAP dalam pengguna internet dan menegaskan bahwa kompatibilitas dapat memengaruhi sikap dan perilaku pengguna. Kompatibilitas juga dikonfirmasi dalam adopsi perdagangan mobile (Wu & Wang, 2005) dan studi mobile banking (Lin, 2011) yang dilakukan di Taiwan. Dalam industri perawatan kesehatan, kompatibilitas terintegrasi dan dikonfirmasi dalam sistem perawatan kesehatan menggunakan perangkat seluler (Wu et al., 2007). Xue et al., (2012) menerapkan kompatibilitas untuk belajar mengakses informatika kesehatan melalui smartphone dan mengkonfirmasi bahwa kompatibilitas mempengaruhi niat untuk menggunakan pada wanita yang berumur lebih dari 50 tahun di Singapura.

Perspektif tradisional menyatakan bahwa smartphone biasanya dianggap sebagai ponsel kompatibel dengan gaya hidup pelaku bisnis. Smartphone dapat digunakan oleh setiap individu, termasuk orang dewasa yang lebih tua. Smartphone dapat digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengoperasikan bisnis dan untuk menghubungi teman dan keluarga.

Social influence (Pengaruh sosial)

Pengaruh sosial dalam model *Unified Theory of Acceptance and Use of The Technology (UTAUT)* dapat didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang memandang bahwa orang lain penting bagi mereka. Pengaruh sosial biasanya bisa berasal dari keluarga, teman terutama yang dekat dengan mereka (Venkatesh et al., 2012). Penelitian sebelumnya yang terkait dengan adopsi menunjukkan bahwa pengaruh sosial penting bagi adopsi teknologi. Riset sebelumnya yang dilakukan menunjukkan bahwa pengaruh sosial berpengaruh terhadap adopsi 3G di Cina (Chong et al., 2012); adopsi aplikasi online pada smartphone (Shi, 2009), penerimaan Aplikasi Smartphone (Lee et al., 2012); dan adopsi aplikasi smartphone (Verkasalo et al., 2010).

Pengaruh Sosial adalah tingkat di mana seseorang mempersepsikan bahwa saran orang lain penting untuk menggunakan sistem baru. Faktor ini mirip dengan norma subjektif dari *Theory of Reasoned Action (TRA)*, *Technology Acceptance Model (TAM)*, *Theory of Planned Behavior (TPB)* dan *Difusi of Inovation (Dol)*. Hubungan pengaruh sosial dan niat berperilaku menurut TAM2 bisa dimoderasi oleh jenis kelamin, usia, kesukarelaan, dan pengalaman. Beberapa penelitian menggunakan TAM2 atau TAM yang diperluas untuk menyelidiki adopsi teknologi yang terkait dengan smartphone. Lu et al., (2005) mempelajari layanan internet nirkabel melalui teknologi mobile dan menemukan bahwa pengaruh sosial dan inovasi pribadi memengaruhi manfaat dan kemudahan penggunaan. Selanjutnya, kegunaan dan kemudahan penggunaan mempengaruhi niat adopsi. Rouibah et al., (2011) menganalisis adopsi kamera-ponsel yang dipasarkan dalam e-shopping dan menemukan bahwa norma subjektif, kemudahan penggunaan dan kegunaan kamera mempengaruhi adopsi kamera-ponsel melalui e-shopping. Ducey (2013) mempelajari adopsi perangkat tablet dan menemukan bahwa persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, norma subjektif, kompatibilitas, dan kehandalan tablet mempengaruhi niat untuk mengadopsi tablet. Persepsi manfaat, persepsi

kemudahan penggunaan, kualitas konten seluler, dan kualitas penampilan seluler berpengaruh pada niat untuk menggunakan panduan pariwisata seluler (Pheeraphuttharangkoon, 2015).

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Responden

Hasil penelitian ini dapat mengumpulkan 100 responden dengan berbagai karakteristik yang didasarkan pada jenis kelamin, usia, pendidikan, dan tujuan menggunakan aplikasi media sosial. Hasil tabulasi data deskripsi responden dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik responden

Karakteristik responden	Jumlah	Karakteristik responden	Jumlah
Jenis kelamin: Laki-laki Perempuan	65% 35%	Tujuan menggunakan media sosial: Pembelian online Pencarian informasi tentang layanan Pencarian informasi tentang produk	45% 33% 22%
Usia: ≤ 20 tahun 21 - 40 tahun ≥ 41 tahun	60% 22% 18%		
Pendidikan: SMA S1 S2 S3	48% 47% 3% 2%	Penghasilan: ≤ Rp. 1.000.000 Rp. 1000.000 – Rp. 2.500.000 ≥ Rp. 2.500.000	52% 23% 25%

Hasil analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan beberapa variabel yang bisa mempengaruhi adopsi media sosial, yaitu perceived enjoyment, compatibility dan social influence

Perceived enjoyment

Gambaran umum responden tentang perceived enjoyment dapat dilihat dalam tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Perceived enjoyment

Indikator keunggulan relatif	Rerata	Kategori
Saya menemukan kesenangan menggunakan media sosial di smartphone (Shin, 2007).	4,76	Sangat Senang
Saya berpikir bahwa menggunakan media sosial itu menyenangkan (Verkasalo et al., 2010).	4,52	Sangat Senang
Saya senang menggunakan media sosial untuk mendukung aktifitas yang saya lakukan (Verkasalo et al., 2010).	4,72	Sangat Senang
Rata-rata jawaban responden	4,67	Sangat Senang

Compatibility

Gambaran umum responden tentang persepsi kesesuaian menggunakan media sosial menggunakan smartphone dapat dijelaskan dalam tabel tiga sebagai berikut:

Tabel 3. Compatibility

Indikator Kemudahan Menggunakan	Rerata	Kategori
Saya percaya bahwa menggunakan media sosial melalui smartphone cocok untuk saya (Koenig-Lewis et al., 2010).	4,56	Sangat sesuai
Saya percaya bahwa menggunakan media sosial melalui smartphone akan sesuai dengan gaya hidup saya (Koenig-Lewis et al., 2010).	4,72	Sangat sesuai
Menggunakan media sosial melalui smartphone cocok dengan gaya pekerjaan saya (Park & Chen, 2007).	4,52	Sangat sesuai
Saya pikir bahwa menggunakan media sosial melalui smartphone sangat cocok dengan cara saya bekerja (Park & Chen, 2007)	4,66	Sangat sesuai
Rata-rata jawaban responden	4,615	Sangat sesuai

Social influence (Pengaruh sosial)

Gambaran umum responden tentang social influence dalam menggunakan media sosial melalui smartphone dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4. Social Influence

Indikator Keterlihatan	Rerata	Kategori
Pendapat orang-orang penting bagi saya dalam mempertimbangkan penggunaan media sosial. (Misalnya, teman dan keluarga) (Shin, 2007).	4,43	Media sosial dianggap penting
Teman dan keluarga mempengaruhi perilaku dalam menggunakan media sosial (Venkatesh et al., 2012).	4,23	Media sosial dianggap penting
Orang-orang seusia saya dan seprofesi dengan saya mengharapkan saya menggunakan media sosial melalui smartphone (Shin, 2007).	4,22	Media sosial dianggap penting
Saya ingin menggunakan media sosial melalui smartphone karena teman saya banyak yang melakukannya (Verkasalo et al., 2010).	4,33	Media sosial dianggap penting
Rata-rata jawaban responden	4,30	Media sosial dianggap penting

Pembahasan

Penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi beberapa variabel penyebab terjadinya adopsi media sosial menggunakan smartphone. Hasilnya menunjukkan bahwa persepsi kesenangan, persepsi kesesuaian dan dorongan teman memiliki jawaban yang positif. Responden menyatakan bahwa mereka sangat nyaman dan senang menggunakan media sosial

bagi kehidupannya sehari-hari. Wawancara secara mendalam kepada beberapa pelanggan smartphone menjelaskan bahwa mereka menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan teman-temannya, juga ada yang menggunakan media sosial sebagai sarana menjual produk-produk yang dimilikinya selain itu media sosial juga digunakan untuk mengunggah beberapa foto maupun dokumen yang dimilikinya pada dunia maya. Seluruh responden menyatakan bahwa mereka semua memiliki akun media sosial, seperti facebook dan instagram. Kedua platform digital ini sangat digemari pelanggan karena bisa untuk berkomunikasi secara online, secara viral dengan menampilkan dokumen, gambar maupun video. Cara penggunaan dua platform digital ini juga dianggap paling mudah dan pelanggan banyak yang merasa puas menggunakan platform-platform media sosial ini. Banyak informasi yang bisa pelanggan cari melalui media sosial. Mulai dari informasi tentang destinasi wisata, informasi tentang kuliner, informasi tentang buku, film, game dan yang lainnya.

Media sosial menjadi sebuah aplikasi yang dibutuhkan oleh pelanggan, karena pelanggan banyak dimudahkan untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Media sosial dianggap sangat nyaman terbukti sangat dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden atas pertanyaan *perceived enjoyment* yang relatif tinggi. Responden juga mempersepsikan bahwa penggunaan media sosial tidak membutuhkan penyesuaian atas aktifitas kesehariannya. Media sosial dianggap sangat sesuai dengan gaya hidup pelanggan di masa sekarang, dan sesuai dalam aktifitas sehari-hari. Pengaruh teman dan keluarga dalam menggunakan media sosial relatif sangat besar. Pemakaian platform media sosial oleh kawan atau keluarga juga dijadikan acuan responden dalam memilih media sosial yang digunakan. Di samping itu, pendapat teman maupun keluarga dalam mengadopsi media sosial juga sangat berpengaruh. Responden sering menyesuaikan platform media sosial yang digunakan oleh rekan seprofesi untuk mempermudah komunikasi dan menyelesaikan berbagai macam pekerjaan mereka.

KESIMPULAN

Adopsi media sosial berbasis smartphone sudah menjadi sebuah kebutuhan. Berbagai platform media sosial sudah banyak diadopsi oleh pelanggan, dua jenis platform yang paling banyak digunakan oleh responden dalam penelitian ini adalah facebook dan instagram. Responden menyatakan bahwa kedua platform digital ini paling mudah digunakan dan banyak manfaatnya. Responden juga menunjukkan bahwa menggunakan media sosial merupakan pekerjaan yang menyenangkan dan sesuai dengan gaya hidup masa sekarang. Meskipun keputusan menggunakan media sosial juga banyak dipengaruhi oleh orang lain, yang dalam penelitian ini pengaruh terbesar adalah keluarga dan teman.

REKOMENDASI UNTUK PENELITIAN SELANJUTNYA

Penelitian ini merupakan penelitian awal dalam bentuk eksploratori untuk mengungkapkan fakta terkait dengan variabel kesenangan, kesesuaian dan pengaruh orang lain dalam menggunakan media sosial. Beberapa variabel lain yang belum dieksplorasi dalam penelitian ini seperti kualitas media sosial, kredibilitas media sosial dan faktor lainnya masih bisa dieksplorasi lebih lanjut. Penelitian ini masih bersifat deskriptif, sehingga disarankan bisa dilanjutkan dengan penelitian kausalitas yang menunjukkan hubungan antar variabel kesenangan, kesesuaian dan pengaruh orang lain dalam adopsi media sosial.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang telah mendanai riset ini melalui Hibah Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi. Ucapan terima kasih penulis sampaikan juga kepada LPPM Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta yang telah memfasilitasi riset ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldhaban, F. (2012). "Exploring the Adoption of Smartphone Technology : Literature Review". In: PICMET '12. Portland, OR, USA, pp. 2758–2770.
- Arshad, M., & Akram, M. S. (2018). "Social Media Adoption by the Academic Community: Theoretical Insights and Empirical Evidence From Developing Countries". *International Review of Research in Open and Distributed Learning*. Vol. 19, Number 3, pp. 244-262.
- Chong, A.Y-L., Ooi, K-B., Lin, B., & Bao, H. (2012). "An empirical analysis of the determinants of 3G adoption in China". *Computers in Human Behavior*. Vol. 28(2), pp. 360–369. Available at: <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0747563211002135>
- Chun, H., Lee, H., & Kim, D. (2012). "The integrated model of smartphone adoption: Hedonic and utilitarian value perceptions of smartphones among Korean college students". *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*. Vol. 15, pp. 473-479, 2012.
- Condie, R., & Munro, B. (2007). "The impact of ICT in schools". A landscape review. Coventry.
- Davis, F.D., Bagozzi, R.P., & Warshaw, P.R. (1992). "Extrinsic and intrinsic motivation to use computers in the workplace". *Journal of Applied Social Psychology*. Vol. 22, pp. 1111–1132.
- Ducey, A. (2013). "Predicting tablet computer use: an extended technology acceptance model". University of South Florida.
- Jang, Yu-Teng. J., Chang, S. E., Liu, A. Y., Lai, K. (2018). "Understanding consumers' intention of adopting Smartphone-facilitated Service Apps in Mobile-enhanced retailing business". *International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning*. Vol. 8, Number 1, March 2018. doi: 10.17706/ijeeee.2018.8.1.26-33
- Koenig-Lewis, N., Palmer, A., & Moll, A., (2010). "Predicting young consumers' take up of mobile banking services". *International Journal of Bank Marketing*. Vol. 28, pp. 410-432.
- Lau, W. W. F. (2017). Effects of social media usage and social media multitasking on the academic performance of university students. *Computers in Human Behavior*, 68, 286–291. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.11.043>
- Lee, S. Y. (2014). "Examining the factors that influence early adopters' smartphone adoption: The case of college students". *Telematics and Informatics*. Vol. 31, pp. 308-318.
- Lin, H-F. (2011). "An empirical investigation of mobile banking adoption: The effect of innovation attributes and knowledge-based trust". *International Journal of Information Management*. Vol. 31(3), pp. 252–260. <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S026840121000099X>.
- Lu, J., Yao, J.E., & Yu, C-S. (2005). "Personal innovativeness, social influences and adoption of wireless Internet services via mobile technology". *The Journal of Strategic Information Systems*. Vol. 14(3), pp. 245–268. <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0963868705000399>
- Nimrod, G. (2011). 'The fun culture in seniors' online communities.'. *The Gerontologist*51(2), pp. 226–37. Available at: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21030471> [Accessed:

- 28 November 2014].
- Park, Y. & Chen, J. V. (2007). "Acceptance and adoption of the innovative use of smart phone". *Industrial Management & Data Systems* 107(9). pp. 1349–1365. Available at: <http://www.emeraldinsight.com/10.1108/02635570710834009> [Accessed: 3 April 2012].
- Pheeraphuttharangoon, S. (2015). "The adoption, use and diffusion of Smartphones among adults over fifty in the UK". Thesis, Business School, University of Hertfordshire.
- Rogers, M. (1998). *The Definition and Measurement of Innovation*. Melbourne.
- Rouibah, K., Abbas, H., & Rouibah, S. (2011). "Factors affecting camera mobile phone adoption before e-shopping in the Arab world". *Technology in Society*. Vol. 33(3-4), pp. 271–283. <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0160791X11000455>.
- Rouse, M. (2005). "ICT (information and communications technology or technologies)". [Online] Available at: <http://searchcio-midmarket.techtarget.com/definition/ICT>.
- Shi, W. (2009). "An empirical research on users' acceptance of smart phone online application software". *International Conference on Electronic Commerce and Business Intelligence*. pp. 106–110. <http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=5189497>
- Shin, D-H. (2007). "User acceptance of mobile Internet: Implication for convergence technologies". *Interacting with Computers*. Vol. 19, pp.472-483, 2007.
- Statista.com. (2017). Number of apps available in leading app stores as of March 2017. Statista.com. Retrieved from the website: <https://www.statista.com/statistics/276623/number-of-apps-available-in-leading-app-stores/>.
- Tchakount'e, Dayang, Nlong & Check, 2014
- Tchakount'e, Franklin., D, V., Nlong, M. J., & Check, N. (2014). "Understanding of the behaviour of Android Smartphone users in Cameroon application of the security". *Journal of Information Security and Applications*. Vol 1, Number 2. DOI: 10.15764/ISA.2014.02002
- Teo, T. S. H., & Pok, S. H. (2003). "Adoption of WAP-enabled mobile phones among Internet users. Omega". *The International Journal of Management Science*. Vol. 31(6), pp. 483-498
- Venkatesh, V., & Bala, H. (2008). "Technology acceptance model 3 and a research agenda on interventions". *Decision sciences*. Vol. 39(2), pp. 273–315. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-5915.2008.00192.x/full>.
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). "User acceptance of information technology: Toward a unified view". *Management Information Systems (MIS)*. Vol. 27, pp. 425-478.
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly*, 27(3), 425-478
- Venkatesh, V., Thong, J., & Xu, X. (2012). "Consumer acceptance and use of information technology: extending the unified theory of acceptance and use of technology". *MIS Quarterly*. Vol. 36, pp. 157-178
- Verkasalo, H. (2010). "Analysis of smartphone user behavior". In: 2010 Ninth International Conference on Mobile Business and 2010 Ninth Global Mobility Roundtable (ICMB-GMR). IEEE, pp. 258–263.
- Wilcox, D., & Cameron, G. (2010). *Public relations: Strategies and tactics* (9th ed.). Boston: Allyn & Bacon.

- Wu, J-H., & Wang, S-C. (2005). “What drives mobile commerce?: An empirical evaluation of the revised technology acceptance model”. *Information & Management*. Vol. 42, pp. 719-729.
- Wu, Y., Tao, Y., & Yang, P. (2007). “Using UTAUT to explore the behavior of 3G mobile communication users”. *IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management*. pp. 199–203. <http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=4419179>
- Xue, L., Yen, C.C., Chang, L., Chan, H.C., Tai, B.C., & Tan, S.B. (2012). “An exploratory study of ageing women’s perception on access to health informatics via a mobile phone-based intervention”. *International journal of medical informatics*. Vol. 81(9), pp. 637–48. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22658778>.

PERAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DALAM PEMBERANTASAN HOAKS

Muhammad Edy Susilo, Subhan Afifi, Senja Yustitia
Program Studi Ilmu Komunikasi UPN “Veteran” Yogyakarta
edysusilo@upnyk.ac.id

Abstract

Hoax or fake news in Indonesia are increasing along with the use of social media. Towards the 2019 general elections, the intensity of political hoaks is increasingly widespread. Hoax can target anyone, but are intended specifically for competing candidates. Hoax have the potential to cause conflict in society and break up national unity. The government has done many things to eradicate hoaks. However, eradication involve many stakeholders, one of them is civil society organizations. The Research question is how the role of civil society organizations in Indonesia in eradicating hoaks. The study was conducted with qualitative methods. Data obtained from various civil society organizations that relevant to the topics. The results showed that all organizations that studied, they all support to eradicate hoaks. Hoaks are counterproductive in the life of the nation and state. All organizations have also done many things in accordance with their fields. However, they also have limitations. Government is the most responsible for hoax eradication. In this study, there is one finding interesting about Islamic organizations that feel unfairly treated in hoax eradication. This should be a concern for the government if they are really serious about eradicating hoaxes.
Keywords: hoax, civil society organization, election, conflict

PENDAHULUAN

Internet adalah media yang yang memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan media-media yang ada sebelumnya. Perbedaan paling kentara dari media ini adalah sifat interaktifitasnya. Hal ini tidak dimiliki oleh media massa yang justru memiliki sifat searah. Pada masa lalu, khalayak atau audiens hanya menjadi objek saja dari sebuah media. Arus feedback kepada media sangat sedikit atau bahkan tidak ada.

Hal ini berbeda dengan internet di mana pengguna menjadi aktor yang aktif. Ia bukan hanya penerima pesan melainkan bisa menjadi pengirim pesan atau bahkan produsen pesan. Bahkan, istilah khalayak menjadi tidak relevan lagi atau paling tidak perlu didefinisikan kembali.

Data hasil penelitian Polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2019 tumbuh 10,12 persen. Data lapangan ini diambil selama periode Maret hingga 14 April 2019. Saat ini, dari total populasi sebanyak 264 juta jiwa penduduk Indonesia, ada sebanyak 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8 persen yang sudah terhubung ke internet.

Naiknya angka pengguna internet di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal seperti semakin luasnya jaringan internet, semakin murah biaya internet dan semakin tingginya penetrasi kepemilikan telepon genggam cerdas. Jika pada awal kemunculan internet di Indonesia umumnya orang mengakses internet dari komputer kantor dan warung internet,

maka kini internet lebih sering diakses melalui telepon genggam atau gawai. Dengan perubahan ini, maka semakin membuka peluang untuk menggunakan internet di manapun. Pada saat menyebut “internet”, sebenarnya masih merujuk pada pengertian yang umum. Internet yang merupakan singkatan dari interconnection network adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung satu dengan lainnya dengan menggunakan standar [sistem global Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite \(TCP/IP\)](#) sebagai protokol pertukaran paket (packet switching communication protocol) untuk melayani pengguna di seluruh dunia.

Media internet memiliki banyak fasilitas seperti world wide web, email, search engine, social networking dan sebagainya. Masing-masing fasilitas memiliki kelebihan yang bisa digunakan oleh pengguna. Dengan kelebihan internet yang revolusioner, maka kehadirannya telah banyak mengubah kebiasaan dalam hidup sehari-hari.

Salah satu fasilitas di internet yaitu social networking telah membuka kesempatan bagi berbagai platform media sosial. Media Sosial adalah sekelompok aplikasi berbasis Internet yang dibangun di atas dasar ideologis dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan pembuatan dan pertukaran User Generated Content (Kaplan & Haenlein 2010: 61). Contoh media sosial adalah facebook, instagram, twitter, youtube dan lainnya.

Ada dua karakteristik umum yang membantu untuk mendefinisikan media sosial. Pertama, media sosial memungkinkan beberapa bentuk partisipasi. Media sosial tidak pernah sepenuhnya pasif, meskipun terkadang situs jejaring sosial seperti Facebook ada pengguna yang hanya melihat secara pasif apa yang diposkan orang lain. Biasanya, minimal, profil harus dibuat yang memungkinkan adanya potensi interaksi. Kedua, dan sejalan dengan sifat partisipatif mereka, media sosial melibatkan interaksi (Manning, 2014). Jika mengikuti karakteristik ini, maka messenger atau instant messaging seperti whatsapp dan line juga termasuk dalam media sosial.

Berdasarkan hasil riset Wearesosial Hootsuite yang dirilis Januari 2019 pengguna [media sosial](#) di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi. Jumlah tersebut naik 20% dari survei sebelumnya. Sementara pengguna media sosial mobile (gadget) mencapai 130 juta atau sekitar 48% dari populasi.

Besarnya populasi, pesatnya pertumbuhan pengguna internet dan telepon merupakan potensi bagi ekonomi digital nasional. Hasilnya, muncul e-commerce, transportasi online, toko online dan bisnis lainnya berbasis internet di tanah air. Ini akan menjadi kekuatan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara (Databoks, 2019).

Namun selain sisi positif dari media sosial, muncul pula dampak negatif yakni maraknya hoaks atau kabar bohong. Fake news adalah berita bohong, berita buatan atau berita palsu yang sama sekali tidak dilandaskan dengan fakta, kenyataan atau kebenaran (Syuhada, 2017). Hoaks bisa berupa hal-hal yang sifatnya jokes, atau hal-hal yang serius. Bidang yang dijadikan hoaks juga merentang dari masalah ekonomi, politik, budaya, keamanan sampai dengan bencana alam, kesehatan dan peristiwa sehari-hari.

Pada dasarnya, hoaks bukanlah sesuatu yang baru. Berita palsu sudah lama ada seiring dengan potensi manusia untuk berbohong. Namun, dengan adanya internet dan media sosial, intensitas penyebaran hoaks menjadi semakin tinggi. Media sosial yang memiliki sifat terbuka membuat siapa pun bisa melihat dan menyebarkan hoaks yang dilihatnya.

Berdasarkan medium yang dipakai, hoax bisa muncul dalam bentuk tulisan, gambar, video atau gabungan di antara ketiganya. Namun karena kemudahan pembuatannya, hoaks yang berupa tulisan lebih mudah ditemukan. Hoaks yang berupa tulisan banyak ditemukan di messenger seperti Whatsapp

Pada awal kemunculan media sosial, terdapat keyakinan “no picture, hoax”. Artinya pembaca memerlukan “bukti” berupa gambar agar lebih meyakinkan dan informasi tersebut adalah asli, bukan hoaks. Namun saat ini slogan tersebut tidak lagi relevan karena berita dengan gambar pun tetap potensial bermuatan hoaks. Kemampuan editing yang meningkat dan berbagai macam pilihan aplikasi untuk mengedit gambar memungkinkan orang membuat gambar yang masuk dalam kategori hoaks. Hoaks dengan gambar pada umumnya tetap menggunakan tulisan juga.

Selanjutnya, bentuk hoaks yang ketiga adalah hoaks yang berupa audio visual. Editing audio visual sudah berkembang sedemikian pesat. Membuat sebuah adegan bisa menggunakan digital imaging atau efek-efek tertentu yang membuat sebuah adegan seolah-olah nyata. Terkadang ada hoaks yang berupa audio visual yang sedemikian canggih editingnya sehingga masyarakat tidak menyadari kalau itu adalah kabar bohong. Untuk kasus seperti ini, pihak kepolisian memerlukan forensik digital yang juga canggih.

Di Indonesia, hoaks yang terjadi di media sosial sering berdampak pada kehidupan nyata. Di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, beredar hoaks mengenai penculikan anak untuk dijual organ tubuhnya. Akibat hoaks tersebut, seorang pria berusia 53 tahun yang diduga sebagai penculik tewas dikeroyok oleh warga (Sinaga, 2017). Informasi provokatif di media sosial juga menyebabkan konflik antarkelompok masyarakat di kota Samarinda (Aditya, 2017). Contoh-contoh ini hanyalah dua dari begitu banyak dampak buruk hoaks di masyarakat.

Di bidang politik, hoaks juga menyebar dengan cepat. Apalagi pada tahun 2019, Indonesia menggelar peristiwa politik penting yakni Pemilihan Umum. Para aktor politik maupun partai politik yang menjadi sasaran hoaks. Namun yang paling banyak menjadi sasaran hoaks adalah kandidat yang berkompetisi dalam Pemilihan Presiden yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Hoaks pada mereka berdua sampai bersifat pada pembunuhan karakter (character assassination).

Hoaks adalah ancaman nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hoaks merajalela di media sosial salah satunya karena rendahnya digital literacy masyarakat. Tanpa ada rasa skeptis, sebagian pengguna memercayai Pusaran hoaks yang menerpa masyarakat bisa menyebabkan masyarakat terpecah dan memunculkan konflik di dunia nyata. Hal ini sudah dapat dirasakan di masyarakat.

Menghadapi banyak hoaks yang sempat membuat suasana panas di masyarakat, pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab sudah melakukan banyak hal. Namun kenyataannya, hoaks tidak mereda. Hoaks dan cuitan di twitter turun secara alamiah sejak pengumuman hasil Pemilu dan semakin turun ketika Mahkamah Konstitusi mengumumkan hasil gugatan pemilu 2019 oleh kubu Prabowo-Sandy.

Dalam pemberantasan hoaks dibutuhkan partisipasi dari berbagai pihak atau stakeholders. Pemerintah tidak bisa sendirian memberantas hoaks karena permasalahan hoaks sedemikian kompleks. Secara tentatif, stakeholders yang terlibat adalah pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil (civil society organization, CSO), provider media sosial, media dan masyarakat luas. Tanpa upaya dari semua stakeholders mungkin hoaks akan semakin membahayakan masyarakat.

Civil society atau masyarakat madani dalam istilah Nurcholis Madjid, adalah salah satu hal yang digagas untuk mengembangkan kehidupan demokrasi. Frans Magniz Suseno menganggap bahwa Civil society dianggap mengandung nilai-nilai ideal yang ingin diwujudkan dalam sistem politik di Indonesia. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain: kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self generating), keswadayaan (self supporting), mandiri terhadap negara dan keterikatan dengan norma-norma dan nilai-nilai hukum yang diikuti oleh

warganya (2000).

Sementara itu, CSO adalah kelompok dan jaringan yang berbeda-beda berdasarkan ukuran, struktur dan platform mulai dari organisasi non-pemerintah internasional, dan gerakan sosial massa hingga organisasi lokal kecil (Cooper,2018). CSO adalah salah satu saluran bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Hubungan antara negara dengan CSO idealnya adalah interdependensi, saling membutuhkan satu sama lain. Untuk kondisi di Indonesia, di mana mayoritas beragama Islam, maka posisi CSO keislaman memegang peranan penting, termasuk dalam pemberantasan hoaks.

Hal itulah yang menjadi latar belakang dari tulisan ini. Mengingat upaya pemberantasan hoaks oleh pemerintah sudah banyak ditulis, maka tulisan ini memilih pertanyaan penelitian, bagaimana peran civil Society Organization dalam pemberantasan hoaks di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memosisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian dalam (Moleong,2017). Nazir menjelaskan metode deskriptif adalah sebagai berikut: Metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (2011).

Subjek penelitian ini adalah para aktivis CSO yaitu dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia, Jaringan Pegiat Literasi Digital (Network of Digital Literacy Activist) dan untuk triangulasi sumber, dipilih perwakilan dari Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia cabang Yogyakarta. Data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam, penelusuran dokumentasi dan referensi.

Analisis data menurut Miles dan Huberman dilakukan dengan tiga tahap. Pertama, pengumpulan data, dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi; Kedua, reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan ; Ketiga, penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan; keempat, penarikan kesimpulan, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dengan memfokuskan pada pemecahan masalah penelitian (Sugiyono, 2007).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

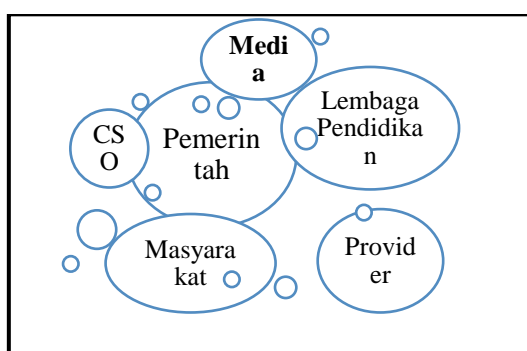
Hoaks di media sosial berkembang seiring dengan berkembangnya media sosial. Hoaks menjadi semakin serius untuk diperhatikan ketika ia berhimpitan dengan kepentingan politik dan ekonomi. Apa yang terjadi menjelang Pemilu 2019 sudah membuktikan hal tersebut, yakni bagaimana hoaks sudah menjadi sumber konflik di masyarakat.

Pengakuan pemerintah atas arti penting hoaks dibuktikan ketika pemerintah men-take down media sosial pada tanggal 22—25 Mei 2019. Saat itu, terjadi kerusuhan di Jakarta menyusul pengumuman Mahkamah Konstitusi atas kekalahan gugatan pasangan Calon

Presiden Wakil Presiden Prabowo—Sandiaga. Setelah melakukan tindakan tersebut, pemerintah mengklaim bahwa jumlah hoaks menurun drastis dan eskalasi kerusuhan terus berkurang.

Meskipun setelah pemilu jumlah hoaks telah menurun, namun kemunculan hoaks pada masa yang akan datang perlu dicermati dan diantisipasi. Berdasarkan polanya, hoaks politik marak menjelang peristiwa politik seperti pemilu nasional maupun pemilihan kepala daerah. Pemilu adalah peristiwa politik reguler, oleh karena itu, diperlukan strategi untukantisipasi hoaks pada masa yang kan datang.

Pemerintah tidak bisa bergerak sendiri dalam memberantas hoaks. Pemerintah perlu menggandeng stakeholders lain untuk melakukan hal ini. Stakeholders yang dimaksud adalah:



Gambar 1. Stakeholders Pemberantasan Hoaks

Tulisan ini hanya berfokus pada aktivitas CSO dalam pemberantasan hoaks. Peran pemerintah dalam hal ini sudah banyak ditulis. Peran CSO perlu untuk dimunculkan agar tampak peran serta masyarakat dan proses deokratisasi di Indonesia.

Mafindo adalah organisasi yang didirikan pada tanggal 19 November 2016. Mafindo adalah CSO anti hoax dan memulai sebagai gerakan akar rumput online sejak 2015. Saat ini telah memelopori banyak inisiatif anti hoaks, seperti crowdsourced hoax busting, edukasi literasi digital untuk publik, CekFakta.com, dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran tentang hoax dan bahayanya.

Dalam menjalankan aktivitasnya, menurut narasumber Septiaji Eko Nugroho menyatakan Mafindo banyak menggandeng media dan CSO yang lain. Ini adalah sebuah upaya dari bawah bersifat swadaya. CSO ini juga sering bekerja sama dengan pemerintah, akan tetapi tidak pernah dan tidak rencana untuk mendapatkan pendanaan dari pemerintah. Hal ini dilakukan untuk menjaga independensi lembaga dari intervensi pemerintah. Berikut peran dan inisiatif dari Mafindo di bidang cek fakta:

Kolaborasi CekFakta.com, kerjasama Mafindo dan 24 media online yang tergabung dalam Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan situs antihoax TurnBackHoax.ID (Mafindo), Stophoax.ID (Kominfo)

Kolom CekFakta media pers (Tirto, Kompas, Tempo, Liputan6, Detik, Opini, RRI Pro3FM, KBR

Kanal media sosial, fan page Forum Anti Fitnah Hasut dan Hoax dengan 70ribu teman dan fan page Indonesian Hoaxes dengan 250ribu teman

Enam lembaga sebagai third party factchecker di facebook yaitu Tirto,Liputan6, Mafindo, Tempo, Kompas, AFP-Indonesia

Kolaborasi whatsapp dan Mafindo: Whatsapp Hoax Buster di nomor 08874676701

Digital tools: Hoax buster tools, Yudhistira, NLP-anti Hoax, Whatsapp Hoax Buster

Bidang edukasi juga menjadi perhatian dari Mafindo karena hasilnya akan berupa peningkatan digital literacy masyarakat. Bidang edukasi yang sudah dilakukan adalah kolaborasi siberkreasi Gerakan Nasional Literasi Digital (100 lebih lembaga, organisasi masyarakat sipil). Sementara di bidang riset, sudah dilakukan kolaborasi dengan Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi)

Mafindo juga bergerak dari sisi penyimpanan bigdata. Saat ini gudang data antihoaks yang telah terbangun. Proyek yang dikerjakan adalah Big Data AIS Kominfo-cyber Drone9 database hoaks (tunbackhoax.ID dan CekFakta.com)

Mafindo bekerja sama dengan facebook untuk memberikan tanda flag atas sebuah konten di media sosial itu. Sebuah unggahan yang setelah dicek kebenaran faktanya menunjukkan bahwa ia merupakan hoaks, bisa diberi tanda flag oleh Mafindo. Flag artinya ada warning atas pesan tersebut. Konten yang sudah di-flag akan di-demote oleh facebook sehingga tidak terlihat oleh pengguna lain. Mafindo akan mempublikasikan di situs mereka mengapa artikel itu di-flag. Dan ketika publik hendak men-share informasi hoaks tersebut, akan ada peringatan, bahwa informasi tersebut telah dilaporkan sebagai hoaks.

Mafindo sering mendapat protes dari pemilik konten yang telah di-flag. Karena, ketika sebuah artikel telah di-flag, dampaknya akan sangat merepotkan. Postingan mereka tidak dapat dilihat lagi dan pada akhirnya tidak akan menjadi media iklan yang memberikan keuntungan materi. Tapi itulah resiko jika mereka mengunggah postingan yang bermuatan hoaks. Namun jika keberatan dengan flag dari Mafindo, mereka bisa mengajukan banding di fact checker. Selama ini, Mafindo juga menjadi target sasaran karena banyak yang tidak puas dengan flag di fan page-nya.

Kelemahan yang dimiliki Mafindo adalah cara kerjanya yang masih manual sehingga memakan waktu yang lama. Kecepatan kerja Mafindo tidak bisa mengimbangi arus hoaks yang besar. Bahkan sebuah konfirmasi bahwa sebuah postingan merupakan hoaks terasa tidak sebanding dengan dampak paparan hoaks tersebut sebelumnya. Artinya, hoaks sudah terlanjur menyebar dan dipercaya, sementara konfirmasinya tidak mendapat perhatian yang besar.

Untuk meningkatkan kinerjanya, Mafindo mencoba mengarahkan cara kerjanya dengan menggunakan Artificial Intelligence (AI) pada masa yang akan datang. Dengan AI cara kerja menjadi lebih enak karena jika ada jawabannya di database, maka bisa langsung dijawab. Hal ini berbeda dengan cara kerja manual yang mengharuskan menunggu antrian untuk mendapatkan jawaban. Namun problem yang lebih besar adalah jauh lebih besar lagi pengguna internet yang tidak bertanya.

Peran serta perguruan tinggi dalam literasi digital salah satunya tergabung dalam Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi). Japelidi beranggotakan kalangan akademisi dan pegiat literasi digital yang tersebar di 32 perguruan tinggi di 12 kota di Indonesia. Japelidi berupaya menguatkan kemampuan literasi digital masyarakat. Kepedulian itu bukan hanya diwujudkan secara verbal saja, tetapi bagaimana melakukan kegiatan untuk mengoptimalkan literasi digital guna meminimalisasi dampak-dampak negatif dari media digital.

Japelidi telah melakukan penelitian tentang gerakan literasi digital di 9 kota yakni; Yogyakarta, Salatiga, Semarang, Surakarta, Malang, Bandung, Banjarmasin, Bali, dan Jakarta. Penelitian ini telah dilakukan sejak April 2017 sampai dengan 2018 dengan tujuan memetakan gerakan literasi digital yang telah ada di masyarakat beberapa tahun terakhir.

Koordinator Japelidi, Novi Kurnia, Ph.D. menyatakan dengan melakukan pemetaan terhadap problem penggunaan digital, Japelidi menyusun penyusunan 10 kompetensi literasi digital. Sepuluh kompetensi literasi digital, yakni kemampuan mengakses secara teknis,

menyeleksi, memahami, menganalisa, memverifikasi, mengevaluasi, mendistribusikan, memproduksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi.

Sayangnya, Japelidi belum dijumpai kemitraan sinergis yang berkesinambungan di antara pelaku gerakan. Berkait ragam kegiatan, Japelidi merekomendasikan pentingnya mengeksplorasi lebih banyak bentuk kegiatan. Selain memperbanyak ragam, metode penyampaian juga harus disesuaikan dengan kelompok sasaran.

Data Japelidi menunjukkan bahwa keluarga belum tercatat menjadi mitra kegiatan literasi. Keterlibatan orang tua tercatat hanya 12.23%. Padahal orang tua sangat penting perannya, sebab dari orang tua lah anak pertama kali mengenal media digital di usia balita. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Japelidi merekomendasikan literasi digital dimulai dari level keluarga, lalu ke institusi pendidikan, dan masyarakat.

Pada level keluarga, orang tua diharapkan menjadi panutan dengan mendampingi dan melibatkan anak untuk merumuskan kesepakatan bersama dalam mengakses media digital. Pada level lembaga pendidikan, kurikulum perlu diintegrasikan dengan visi kegiatan berbasis literasi digital. Misalnya untuk mata kuliah literasi digital di perguruan tinggi, mahasiswa dilibatkan dalam pembuatan beragam program literasi digital dengan beragam kelompok sasaran. Maka guru-dosen dan murid-mahasiswa dapat memahami konsep literasi digital seutuhnya, sehingga mampu menjadi agen bagi masyarakat di sekitarnya.

Pada level masyarakat, perlu ada kolaborasi dengan berbagai kelompok warga, baik secara swadaya atau bekerja sama dengan media, perguruan tinggi, atau korporasi. Pada level negara, pemerintah diharapkan memelihara sistem informasi digital yang demokratis. Makna demokratis dalam konteks literasi digital ini adalah bagaimana pemerintah mampu merumuskan regulasi yang menghargai hak asasi manusia dalam berhubungan dengan teknologi komunikasi.

Sementara itu, partisipasi dari CSO di bidang keagamaan yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tidak dapat diragukan lagi. Kedua organisasi ini seperti pilar yang menjaga keutuhan bangsa.

Narasumber dari NU, Syafiq Ali, Departemen Komunikasi dan Media, menyatakan bahwa hal yang diperlukan dalam menekan hoaks adalah edukasi publik agar publik lebih melek media, informasi, dan digital. Untuk memiliki kemampuan seperti itu tidak mudah, karena tidak semua orang kan punya kemampuan fact checking. Nantinya diharapkan orang-orang punya kemampuan sendiri untuk fact checking Mereka punya kesadaran untuk mengecek dari sumber lain. Seperti dalam ranah agama, mereka dilatih untuk tidak memercayai dari satu riwayat saja.

NU sudah banyak membuat konten-konten yang positif itu. Misalnya ada banyak orang berkampanye memakai argumen keislaman untuk membenci orang lain, maka akan diklarifikasi. Salah satunya, NU memiliki web islami.co. Syafiq memberi perumpamaan, jika ada orang-orang yang pekerjaannya melempar sampah dan sampahnya beracun, maka kita harus memproduksi air yang memang sehat. NU sudah menghasilkan puluhan ribu artikel dan berbagai video. Namun Syafiq mengakui bahwa hal tersebut belum memadai untuk merespons persoalan yang ada. Untuk kalangan internal, NU memiliki pelatihan, yaitu Madrasah Kader. Materi-materi sosial media dan literasi media diajarkan di madrasah itu.

Muhammadiyah menunjukkan perannya dalam pemberantasan hoaks dengan memberikan literasi kepada anggotanya dan juga masyarakat luas. Muhammadiyah juga menerbitkan buku Fiqih Informasi yang berisi panduan bagaimana umat harus menggunakan media sosial. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan bahwa perumusan fiqih informasi menemukan signifikansi dan urgensinya karena menjadi bagian dari upaya untuk

meningkatkan perhatian, kepedulian dan penyikapan terhadap persoalan-persoalan aktual dan krusial yang menyangkut hajat hidup publik, termasuk kepentingan umat Islam, sebagai bentuk keterlibatan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Buku ini bisa diakses dalam bentuk hard copy maupun soft copy.

Selain buku, narasumber Prof Dr. Dadang Kahmad, M.Si sebagai Ketua PP Muhammadiyah Bidang Komunikasi dan Informasi menyatakan bahwa Muhammadiyah menunjukkan bahwa warganya tidak menjadi penyebar hoaks dan menjadi warga yang tercerahkan secara digital. Muhammadiyah concern mengembangkan konten berbasis digital, di antaranya aplikasi chatting, messengerMU dan aplikasi MUVON. Aplikasi yang terakhir disebut adalah sebuah aplikasi mobile berbasis teknologi Over the Top, yang dikembangkan atas kerjasama antara TV Muhammadiyah dengan Digital Media Corp dan Digital Creative Asia. MUVON memiliki makna 'Muhammadiyah Vision' di mana penciptaan Aplikasi Mobile MUVON dilandasi oleh visi mengembangkan ekosistem gaya hidup halal (halal life style).

Sementara itu narasumber dari MIUMI, Ustadz Ridwan Hamidi menyoroti pentingnya keadilan dalam pemberantasan hoaks. Narasumber menyatakan bahwa selama ini pemerintah terkesan tidak adil dalam pemberantasan hoaks. Umat Islam yang cenderung menjadi korban hoaks, persekusi dan hate speech justru menjadi pihak yang disudutkan.

Dalam Pemilu 2019 muncul narasi mengenai persaingan dua ideologi: nasionalis versus Islam. Kelompok Islam sering dibenturkan dengan ideologi nasionalis. Beberapa tuduhan yang gencar ditujukan pada Umat Islam adalah Anti NKRI, anti Pancasila, anti Bhineka Tunggal Ika, Radikal, Intoleran, Teroris dan Makar.

Narasumber juga menyoroti bagaimana media sosial sering menghapus postingan (auto delete) tentang ulama Indonesia. Akun yang sering mem-posting mengenai ulama tersebut di-suspen selama tiga hari. Hal itu amat merugikan dan semakin memperkuat keyakinan bahwa umat Islam selama ini disudutkan dan dirugikan.

KESIMPULAN

Di tengah pusaran hoaks yang beredar, sudah ada banyak partisipasi dari civil society di Indonesia untuk menumpas atau setidaknya mengurangi peredarannya. Hal ini adalah sebuah praktek yang baik dalam sebuah negara yang demokratis. Meskipun demikian, langkah CSO dalam pemberantasan hoaks memiliki kendala. CSO tidak memiliki kekuasaan sampai dengan penindakan. Hal yang bisa dilakukan adalah pada level pencegahan dan pengawasan. Di luar itu, maka CSO tidak memiliki kewenangan.

Pihak yang paling berwenang dan bertanggung jawab dalam pemberantasan hoaks adalah pemerintah. Pemerintah memiliki semua sumber daya untuk memberantas hoaks. Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa muncul ketidakpercayaan pada pemerintah karena pemerintah bersikap tidak adil. Hal ini amat penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah. Terlebih lagi, dalam kontestasi pemilu atau pemilihan kepala daerah, setiap calon akan memanfaatkan media sosial untuk berkampanye. Dalam proses ini, amat mungkin mereka secara sengaja atau tidak menggunakan informasi yang tidak benar atau bisa diategorikan sebagai hoaks. Pemerintah sebagai wasit harus tegas terhadap semua pihak yang sedang berkompetisi.

REFERENSI

APJII, 2019, Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 171 Juta Jiwa", <https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa>, diakses Agustus 2019

- Manning, Jimmie. 2014, Social media, definition and classes of. In K. Harvey (Ed.), Encyclopedia Of Social Media And Politics (pp. 1158-1162). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Andreas M. Kaplan , Michael Haenlein, 2010 Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media, Business Horizons · February 2010
- Databoks, 2019, Berapa Pengguna Media Sosial Indonesia?,
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/08/berapa-pengguna-media-sosial-indonesia> , diakses Agustus 2019
- Aditya, Nur, 2017, Warga di Samarinda nyaris bentrok gara-gara kabar hoax, retrieved from <https://www.merdeka.com/peristiwa/warga-di-samarinda-nyaris-bentrok-gara-gara-kabar-hoax.html>, accessed March 26, 2019
- Sinaga, Edo, 2017, Seorang Kakek Tewas Dihakimi Warga, retrieved from https://kbr.id/nasional/03-2017/isu_hoax_penculikan_anak_di_kalbar_makan_korban_seorang_kakek_tewas_dihakimi_massa/89442.html
- Moleong, Lexy, 2017, Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi), Remaja Rosda Karya, Bandung
- Nazir, Moh, 2011, Metode Penelitian, Galia Indonesia, Jakarta
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung
- Suseno, Franz Magnis, 2000, “Strategi Pembentukan Masyarakat Madani”, dalam Membongkar Mitos Masyarakat Madani, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE SOUTH COASTAL OF SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

1Noto Pamungkas, 2 Ruserlisyani, 3 Raden Hendri Gusaptono, 4 Latifah Dianing Putri,
5 Ulfah Rahmawati, 6 Adiwirastu Nuralamsyah, 7 Aryani Muji Kirana Putri

1,2,4,5,6 Department of Accounting, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

3 Department of Management, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

Email: notopamungkas@upnyk.ac.id, herlissantosa@yahoo.com, tono_hendri@yahoo.com,

latifahdp1708@gmail.com, ulfahrahmawati5@gmail.com, adwirastu@gmail.com,

aryanikirana11@gmail.com

Abstract

Indonesia has a long coastline with a length of 81,000 km and stretches along its coastal area which has various potentials that can be utilized for sustainable development. Therefore, in the presence of several potentials found in the coastal region, it occurs in the coastal area of the Special Region of Yogyakarta where it has several potential coastal tourism that can be developed. But in its development, various kinds of problems arise related to its coastal area. These problems if not followed up will affect the sustainability and existence of coastal tourism. Based on this, the research aims to provide direction for the development of coastal tourism in Yogyakarta in realizing the sustainability of coastal areas in the form of development concepts, policies and management and regional financing. The research approach used in this study is quantitative and qualitative approaches. The qualitative approach in this study was carried out in mapping potential and problems and conditions that existed in the area in determining the direction of coastal tourism development in Yogyakarta through descriptive analysis methods. While the quantitative approach taken is in determining priority locations that will be developed as coastal tourism in Bantul Regency, Kulon Progo Regency and Gunung Kidul Regency by looking at its sustainability through scoring and weighting methods.

Index Terms — development, potential, tourism, coastal.

INTRODUCTION

The coastal area has the potential that consists of uniqueness and natural beauty that can be an attraction for tourist areas that can be developed and produce positive areas for improving coastal areas. Coastal tourism development itself basically focuses on landscapes, ecosystem characteristics, cultural art characteristics and community characteristics as the basic strength of each region. Reactions to tourism development can consist of degraded negative implications of the environment related to the development of resources for tourism, so that sustainable development and development of marine resources is needed that takes into account the needs of the current generation while maintaining the needs of future generations. The development of sustainable marine tourism can also have positive implications for Coastal Environmental sustainability.

Coastal areas in the Special Region of Yogyakarta in Bantul Regency, Kulon Progo Regency and Gunung Kidul Regency have several potential coastal tourism that can be

developed. The coastal area is a leading area of economic development that has a fast growing economic potential. The potential of coastal tourism is a visual attraction for the Special Region of Yogyakarta which can have positive implications in economic development and support the functions of trade and services for the city.

The Special Region of Yogyakarta has several natural tourism potentials in the form of stretches of beach and sea such as Kukup beach, Baron beach, Sepanjang beach, Drini beach, Glagah beach, Congot beach, Depok beach, Parangtritis beach and many more. Besides that, the potential of coastal tourism in Yogyakarta is also supported by the existence of very abundant fisheries in the presence of developed ponds and Fish Auction Places which support trade activities for the community and surrounding fishermen. This can support the potential of fisheries in the coastal areas of the Special Region of Yogyakarta, abundant with the existence of developed ponds and fish auction places that support trade activities for the community and fishermen around. This can support the potential of fisheries in the coastal areas of Bantul, Kulon Progo and Gunung Kidul.

But in its development, various kinds of problems arise related to its coastal area. These problems if not followed up will affect the sustainability and existence of coastal tourism. Wahyudi (2009) said that in the past two decades, coastal erosion and abrasion has caused a decline in coastlines in various coastal areas that threaten the lives and livelihoods of coastal communities.

One of the causes of abrasion in the area is the loss of the green belt of the beach, especially the mangrove forests around it. This will have a direct impact on the loss of spawning places and fish maintenance. Besides that, the coastal tourism potential will also be disrupted because abrasion also causes sea level rise and raises rob in the surrounding area. Furthermore, this will have an indirect impact that can threaten the destruction of coastal areas where the marine ecosystem will be reduced so that it will affect the catch and income of the coastal communities of Bantul, Kulon Progo and Gunung Kidul who are active around them. If the problem is not immediately addressed, it will affect the sustainability coastal tourism, especially related to the loss of sustainability in the preservation of the coastal area, which is one of the main sources of income for coastal communities in Bantul Regency, Kulon Progo Regency and Gunung Kidul Regency.

Based on the problems and potential of the coastal areas of the Special Region of Yogyakarta, it is necessary to develop sustainable coastal areas with the development of tourism with the concept of sustainable coastal tourism. Therefore, in this study we will look at the issues of developing coastal tourism in the Special Region of Yogyakarta so that the development of coastal areas remains one of the natural tourism resources that can create sustainability in economic, environmental and social terms.

DETAILS EXPERIMENTAL

2.1. The concept of Sustainable Coastal Tourism

The concept of sustainable coastal tourism is tourism that can meet the needs of tourists and tourist destinations in the present, while protecting and encouraging similar opportunities in the future. In the WTO (1980) sustainable tourism leads to the management of all resources in such a way that economic, social, aesthetic needs can be fulfilled while maintaining cultural integrity, biodiversity essential ecological processes and life support systems.

Regulation of the Minister of Culture and Tourism Number: Km. 67 / Um. 001 / Mkp / 2004 concerning General Guidelines for Tourism Development states that sustainable tourism development is development that is able to meet the needs of tourists and communities in the current destination areas while maintaining and increasing the opportunity to fulfill needs in the future. Sustainable tourism development is imaged as a benchmark in regulating resources so that economic, social and aesthetic needs are achieved, while maintaining the cultural integrity of processes and biodiversity. Furthermore, sustainable tourism can be achieved if growth is in harmony between ecology, economy and social as well as related agencies.

Commonwealth Coastal Action Program (1997) states that sustainable coastal tourism is tourism development that pays attention to conservation areas and the resulting ecological community changes, including protection of wildlife and maintaining the quality of life in the environment for generations to be come. So the development of sustainable tourism is closely related to the friendliness of the surrounding environment.

Principles of Sustainable Coastal Tourism:

- The principle of balance
- Tourism management must be based on a commitment to a balance pattern between economic, socio-cultural and conservation development.
- Principles of Community Participation
- Involve the community in managing tourism businesses.
- Principles of Conservation

Having concern, responsibility and commitment to environmental preservation (nature and culture). Development must be carried out responsibly and follows ecological principles and is sensitive and respects the socio-cultural values and religious traditions of the local community.

Principle of Integration

Management considers the condition of the ecosystem and is synergized with the development of various sectors.

Principles of Law Enforcement

Tourism management must be developed in accordance with existing rules, and implemented with law enforcement and applicable regulations to ensure legal certainty in tourism management.

2.2. Research Methods

The qualitative approach in this study was carried out in mapping the potential and problems and conditions of regional exclusion in determining the direction of coastal tourism development in Bantul Regency, Kulon Progo Regency and Gunung Kidul Regency through descriptive analysis methods. While the quantitative approach taken is in determining priority locations that will be developed as coastal tourism in Bantul Regency, Kulon Progo Regency and Gunung Kidul Regency by looking at its sustainability through scoring and weighting methods. The analysis used includes:

Selection Analysis of the Location of Development of Sustainable Coastal Tourism. Contains selection of priority locations on coastal tourism in the analysis used, among others:

Analysis of Selection of the Location of Development of Sustainable Coastal Tourism. Contains selection of priority locations on coastal tourism in Bantul Regency, Kulon Progo Regency and Gunung Kidul Regency which are suitable to be developed as Sustainable Coastal Tourism.

Table.I : Coastal Tourism Sustainable Indicators

INDICATOR	DESCRIPTION
Sustainable Coastal Tourism (SCT)	
1. Conservation of the area that is able to protect and maintain coastal tourism ecosystems.	a. Manage fisheries and marine resources without damaging or endangering the ecosystem. b. Preserving mangrove forests as a green belt of coastal areas to prevent abrasion. c. Managing good quality and quantity of water that can maintain the number and type of aquatic biota. d. The involvement of the government, the private sector and the community in the management of coastal resources.
2. Community empowerment of the economic contribution of coastal communities through the utilization of coastal tourism potential.	a. Develop and create jobs in line with coastal potential that is able to provide continuous income (not seasonal) b. Encouraging the development of trade businesses and supporting services for other coastal tourism activities c. Helping increase community knowledge and skills such as training to empower the community in utilizing coastal tourism d. Instill public awareness in preserving the coastal environment e. Develop local cultural attractions as a tourist attraction
3. Increasing the number of visitors to the location of coastal tourism.	a. The panoramic beauty of the coast as an embryo of natural tourist attractions b. Economic facilities that support tourist attraction c. The physical condition of the beach that supports visitors' activities in traveling
4. A strong and sustainable culture of local society as a visitor's attraction.	a. There is a typical life of fishermen. b. There is local culture that is carried out regularly as a visitor's attraction

Analysis of Potential Mapping and Problems in the Location of Development of Sustainable Coastal Tourism. Contains the exploration of potential and problems related to the development of Sustainable Coastal Tourism in selected locations by looking at factors physically and non-physically. Physical in the form of infrastructure supporting tourism development while non-physical in the form of institutions in tourism development.

Analysis of the Policy for Development of Sustainable Coastal Tourism. Contains the excavation of coastal tourism development policies in selected locations by looking at the Tourism Development Master Plan in Bantul Regency, Kulon Progo Regency and Gunung Kidul Regency. The things that will be examined are related to the physical and non-physical regulation policies of selected locations by looking at the indicators of success in developing sustainable coastal tourism.

Analysis of the Forms of Sustainable Coastal Tourism Development. Containing details of the policy analysis on the development of sustainable coastal tourism in selected locations and then given recommendations in the form of developing Sustainable Coastal Tourism in selected locations both physically and non-physically.

RESULTS AND DISCUSSION

The selection of priority locations for the Sustainable Coastal Tourism development is carried out quantitatively through scoring at tourist locations in Bantul Regency, Kulon Progo Regency and Gunung Kidul Regency. Scoring is done by assessing tourist sites in Bantul Regency, Kulon Progo Regency and Gunung Kidul Regency based on the indicators of the Sustainable Coastal Tourism and the potential and problems that exist in coastal tourism sites of the Special Region of Yogyakarta based on the indicators of the Sustainable Coastal Tourism and the potential and problems in coastal tourist sites of the Special Region of Yogyakarta. For more details, the results of location scoring can be seen in Table.II.

Based on the results of the scoring above, the priority location for the development of the selected Sustainable Coastal Tourism is Coastal Tourism Kukup and Congot.



Fig.1. Kukup Beach

Table.II : Scoring Tour Locaton Of Kukup Coastal And Congot Coastal

No.	INDICATOR	LOCATIONS	
		Coastal Tourism Kukup	Coastal Tourism Congot
1.	Environmental sector	Regional conservation that is able to protect and conserve coastal ecosystems.	a. The absence of mangrove forests to protect the coast. a. There are a lot of mangrove trees in the dike and the canals water
SCORE		1	2
2.	Economic sector	Community empowerment of the economic contribution of coastal communities through the utilization of coastal tourism potential.	a. Community participation in the management of coastal tourism has not contributed a great deal. b. There is a Joint Business Group for Fishermen and Agriculture as a form of community empowerment. c. There are people who have traditional values / traditions of coastal communities. a. There are no community participation in management. b. No society is more concerned about the development of the area. c. The existence of a fishing village.
SCORE		3	2
No.	INDICATOR	LOCATIONS	
		Coastal Tourism Kukup	Coastal Tourism Congot
3.	Economic sector	Increased number of visitors to the coastal tourist location	a. Have natural scenery with large rocks. b. There is a Giant Aquarium that contains various types of marine life. c. The existence of aquaculture areas that have the potential of marine fisheries and there are two fish auction places that are quite large. a. There are pond and fish auction places aquaculture that provide economic contributions to the surrounding community b. A gentle coastal slope supports the presence of a boat dock.
SCORE		3	2
4.	Social sector	A strong local culture and sustainable as a visitor attraction.	a. The existence of sea alms ceremony (nyadran) combined with other traditional cultures such as leather puppet performances, gamelan, and traditional dance. a. There is no special culture in the tourist area.
SCORE		3	1
TOTAL SCORE		10	7

The physical potential of Kukup Beach is in the form of a beautiful natural panorama with large rocks and the presence of a viewing post increasingly attracts tourists to come to visit. Tourists can also visit the Giant Aquarium which contains various types of marine life on Kukup Beach. In addition there are aquaculture areas that have the potential of marine fisheries and there are 2 large enough fish auction places to support the community's economy. The form of community empowerment on Kukup Beach is reflected in the presence of joint business group.

The problems found in the Kukup coast tourism area are poor facilities for accommodation and public facilities, such as lodging in the form of inns with simple buildings, only three and places of worship in the form of three prayer rooms.

The form of development of the Sustainable Coastal Tourism physically in the Kukup Coast Coastal Area is based on the potential and existing problems as follows:

Attractions

Natural scenery with beautiful large rocks

Pulau Karang is connected with a bridge

Sea Aquarium

Ornamental fish traders

Larangan and apostolic ceremonies

Amenity

Accommodation and general facilities are still lacking

Lodging place is a simple guesthouse

Parking lots for buses, cars and motorbikes are quite extensive

Bathroom or toilet

Place of worship in the form of a prayer room

Sellers of souvenirs and handicrafts from shells

Accessibility

Good road conditions

Public transportation facilities are still difficult

Limited tourist pick up transportation

Motorcycle taxi transportation

Based on the potential and problems in Kukup Beach, then the SWOT analysis is as follows:

Strengths

Many various marine biota.

Having a beautiful natural panorama.

Support of the surrounding community.

Weakness

Means of Transportation to difficult objects.

Limited facilities and infrastructure.

Opportunities

There is an opportunity to become a rosary cultural tour in Kemandang village.

Beautiful natural conditions make it possible to attract tourists.

Threats

Lack of caring for tourists and the surrounding community about beach cleanliness.

Competition with tourist objects in other districts.



Fig.2. Congot Beach

Congot beach tourist area has physical potential in the form of a fishing village and fish auction places which can be the center of the community's economic activities and sloping beach conditions so that it can support the development of these activities. The existence of aquaculture areas and ship piers can also support the development of tourism activities in the Congot beach Area so that a tourist area that has diverse attractions can be created.

While the problems found in the Congot Coastal Coastal Area are not yet well-codified with visitors' needs such as the presence of good infrastructure and the absence of supporting public facilities that can support visitor tourism activities.

Based on the potential and problems of developing Congot beach, the physical development of Sustainable Coastal Tourism in the Congot Coast Coastal Area is as follows:

Attractions

Enjoy Sunrise, sunset

Beach scenery

As a location for photography, filmmaking

New Year's Eve

Fishing place

Amenities

Food stalls

Garbage dump

Public toilet

Worship place

Accessibility

Road conditions are still good

There are directions to get to Congot Beach

Availability of parking spaces

The presence of public transportation

Based on the potential and problems at Congot Beach, the SWOT analysis can be as follows:

Strengths

Congot beach has many tourist objects in it so tourists will not only get beach tourism

Suitable facilities for tourists, such as spacious parking lots, bathrooms.

Location of tourist attractions that are still natural so that tourists will not be bored during the trip because they are treated to beautiful natural scenery.

Weakness

Lack of media promotion that shows the number of tourist objects on the beach so that the tourism potential on Congot beach is less exposed

Lack of care in several public facilities such as bathrooms and tourist boats

There is no shop that specifically sells merchandise/ souvenirs typical of the Congot beach.

Opportunities

Congot beach is a beach in Kulon Progo that has many types of fish

Many business opportunities that can still be utilized by the surrounding community or outside entrepreneurs.

Threats

Other beaches that have more beautiful views

Other attractions that are easier to reach with better travel routes.

CONCLUSIONS

Sustainable Coastal Tourism is a tourism development concept that can meet the needs of tourists or tourist destinations in the present, while supporting and supporting opportunities in the future by utilizing the potential of the Coastal region which has unique characteristics and diverse natural resources. The Special Region of Yogyakarta has a Coastal area with considerable tourism potential. Coastal Areas in the Special Region of Yogyakarta are in 3 Regencies namely Bantul Regency, Kulon Progo Regency and Gunung Kidul Regency.

ACKNOWLEDGMENTS

This article was from research which funded by Ministry of Research, Technology, and High Education Republic Indonesia. Thank you for all who participated in this research.

REFERENCES

- American Heritage Dictionary. "Definition, 50", Backlinks to repository.usu.ac.id, 6, 2012-12-13. 2012.
- Budiharsono S., "Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan". Pradnya Paramita: Jakarta, 2001.
- Damanik, J dan Weber, H.F. "Perencanaan Ekowisata: Dari Teori ke Aplikasi". Penerbit Andi. Yogyakarta. Drumm, A dan Moore, A. 2006.
- Departemen Kelautan dan Perikanan. "Pedoman Umum Kelembagaan Tempat Pelelangan Ikan". Direktorat Pemasaran Dalam Negeri. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2002.
- Dahuri, Rokhmin. "Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu". Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2001.
- Iqbal, Hasan. "Metode Penelitian dan Aplikasinya". Cetakan pertama. Jakarta. : Ghalia Indonesia. 2002.
- Johannes, H., Diposaptono, Sugianto. "Strategi Adaptasi dan Mitigasi Bencana Pesisir Akibat Perubahan Iklim Terhadap Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil". 2011.
- Moleong, L.J. "Metodologi Penelitian Kualitatif". Bandung: PT. Remaja. 2004.

- Siti Nurisyah. “Rencana pengembangan Fisik Kawasan Wisata Bahari di Wilayah Pesisir Indonesia”. *Bulletin Taman dan Lanskap Indonesia*. Perencanaan, Perancangan dan Pengelolaan. Volume 3, Nomor 2, 2000. 1998.
- Soegiarto A. “Pedoman Umum Pengelolaan Wilayah Pesisir”. Lembaga Oseanologi Nasional, Jakarta. 1976.
- Soemarwoto, Otto.. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan. 1987.
- Sons, Inc. Kusmayadi, Endar Sugiarto. “Metodologi Penelitian dalam Bidang. Kepariwisata”. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2000.
- Sorensen JC, Mc Creary. “Coastal: Institutional Arrangements for Management of Coastal Resources”. Berkeley: University of California of Berkeley. 1990.
- Splillane, J.J. “Pariwisata Indonesia Sejarah dan Prospeknya”. Yogyakarta: Kanisius. 1987.
- Supriharyono, “Konservasi Sumberdaya Hayati di Wilayah Pesisir Tropis”. *Pustaka Pelajar*. Yogyakarta. 2007.
- UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
- Yoeti, Oka A. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa. 1985.

ANALISIS KARAKTERISTIK NELAYAN TRADISIONAL BERDASAR JENIS DAN KLASIFIKASI NELAYAN, KELOMPOK KERJA, JENIS PERAIRAN, TEKNOLOGI, ASPEK KETERAMPILAN PROFESI, SISTEM NAVIGASI DAN KOMUNIKASI

1*Sabihaini, 2Awang Hendrianto Pratomo, 3Heru Cahya Rustamaji and 4Sudaryatie

1,4 Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Yogyakarta

2,3 Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Industri UPN “Veteran” Yogyakarta

Email: sabihaini@upnyk.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini melakukan pemetaan terhadap karakteristik jenis dan klasifikasi nelayan. Karakteristik jenis dan klasifikasi nelayan yang diamati adalah berdasar klasifikasi nelayan, kepemilikan sarana, klasifikasi kelompok kerja, perairan, teknologi, keterampilan, sistem navigasi dan sistem komunikasi yang digunakan nelayan. Hasil pemetaan ini digunakan untuk merancang disain prototype sistem navigasi nelayan produk teknologi tepat guna. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa Klasifikasi Nelayan Pantai Depok Berdasar Kelompok Kerja, dibedakan kedalam kelompok nelayan perorangan, nelayan kelompok usaha bersama, dan nelayan perusahaan; klasifikasi nelayan berdasar jenis perairan, meliputi nelayan pantai, nelayan tanpa perahu, dan nelayan pantai dan nelayan tanpa perahu; klasifikasi nelayan berdasar teknologi termasuk nelayan tradisional; klasifikasi nelayan berdasar aspek keterampilan profesi, nelayan formal dan nelayan non formal; sistem navigasi, sistem navigasi yang digunakan dengan menggabungkan antara alam, feeling, dan insting; sistem komunikasi yang digunakan nelayan adalah hp-receiver ada juga yang menggandakan pada teman. Kata Kunci: Nelayan Tradisional, Jenis dan Klasifikasi Nelayan, Kelompok Kerja, Jenis Perairan, Teknologi, Aspek Keterampilan Profesi, Sistem Navigasi Dan Komunikasi

PENDAHULUAN

Riset ini merupakan bagian dari proses sosialisasi awal, dilakukan setelah dan atau bersamaan dengan kegiatan kunjungan informal ke kelompok-kelompok strategis di tingkat desa/kelurahan (lobby kelompok strategis) (Lembaga Pengkajian Masyarakat Universitas Gadjah Mada (2011). Kondisi sosial budaya dan sosial ekonomi yang perlu ditemukan dan atau perlu diorientasi adalah mencakup beberapa kondisi seperti: karakteristik nelayan tradisional berdasar jenis dan klasifikasi nelayan, kelompok kerja, jenis perairan, teknologi, aspek keterampilan profesi, sistem navigasi dan komunikasi. Tujuan dari pemetaan ini sebagai langkah awal pengenalan lokasi sasaran program dan pemahaman fasilitator terhadap kondisi masyarakat nelayan tradisional. Hasil pemetaan ini digunakan untuk merancang disain prototype sistem navigasi nelayan produk teknologi tepat guna. Produk teknologi tepat guna yang dihasilkan dari penelitian ini akan dimanfaatkan dalam meningkatkan tangkapan ikan nelayan serta nelayan tradisional.

Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional, serta dapat meningkatkan kontribusi sektor perikanan bagi ekonomi daerah dan nasional, serta memberdayakan nelayan tradisional dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai data Base pengelolaan masyarakat nelayan tradisional di Pesisir Pantai Kabupaten Bantul DIY.

Manfaat Kegiatan :

- Kegiatan ini dapat memberikan kontribusi praktis dalam upaya mewujudkan kampung nelayan sebagai Minapolitan.
- Memberikan kontribusi kepada nelayan tentang upaya peningkatan penghasilan.
- Memberikan kontribusi kepada kampung nelayan terhadap tata niaga perikanan laut.
- Adanya suatu best practice terhadap adopsi teknologi bagi nelayan tradisional dalam meningkatkan kesejahteraan untuk dapat diterapkan bagi pengambil kebijakan. Melalui : Sosialisasi, Pendampingan, dan Evaluasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat statistik deskriptif. Pengumpulan data menggunakan metode observasi langsung. Data primer diperoleh langsung dari para nelayan tradisional yang ada di pantai Depok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Nelayan Pantai Depok berdasar Karakteristik Jenis dan Klasifikasi Nelayan Karakteristik jenis dan klasifikasi nelayan yang diamati dalam penelitian berdasar klasifikasi nelayan, kepemilikan sarana, klasifikasi kelompok kerja, perairan, teknologi, keterampilan, sistem navigasi dan sistem komunikasi yang digunakan nelayan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Jenis dan Klasifikasi Nelayan

Jenis dan Klasifikasi Nelayan	Frekwensi (Orang)	Persentase (%)
Berdasar Jenis Nelayan		
Nelayan penuh	15	42.9
Nelayan sambilan utama	12	34.2
Nelayan sambilan tambahan	9	25.7
Jumlah	36	100
Berdasar Kepemilikan_Sarana		
Nelayan penggarap	22	61.1
Juragan/pemilik	14	38.9
Jumlah	36	100.0
Berdasar kelompok kerja		
Nelayan perorangan	12	33.3
Nelayan kelompok usaha bersama	23	69.7
Nelayan perusahaan	1	3.0
Jumlah	36	100.0

Berdasar Peraian		
Nelayan pantai	29	81.3
Nelayan tanpa perahu	4	11.1
Nelayan pantai dan Nelayan tanpa perahu	3	8.3
Jumlah	36	100.0
Berdasar Teknologi		
Nelayan tradisional	36	100.0
Jumlah	36	100.00
Berdasar Keterampilan		
Nelayan formal	26	72.2
Nelayan non formal (orang tua/turun temurun	10	27.8
Jumlah	36	100.0
Sistem Navigasi		
Alam	1	3.0
Insting	2	6.1
Feeling	8	24.2
Alam,Feeling, Insting	19	57.6
Feeling dan GPS	1	2.8
GPS	1	2.8
Kompas	1	2.8
Jumlah	36	100.00
Sistem Komunikasi		
HP—receiver	29	0.81
GPS, Navigasi	-	-
tidak menggunakan 1dan 2	7	0.19
Jumlah	36	100.00

Dari Tabel 1 dapat diuraikan bahwa nelayan yang ada di pantai Depok dapat dibedakan berdasar jenisnya, yaitu nelayan penuh, nelayan sambilan utama, nelayan sambilan tambahan. Dikatakan nelayan penuh apabila sebagian besar pendapatan seseorang berasal dari kegiatan penangkapan ikan (Mubyarto, 2002:18), karena nelayan tersebut mata pencarian pokoknya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat pantai Depok yang masuk dalam kategori nelayan penuh sebanyak 15 nelayan (42.9%). Nelayan penuh ini hanya memiliki satu mata pencaharian, yaitu sebagai nelayan. Mereka menggantungkan hidupnya dengan pekerjaannya sebagai nelayan dan tidak memiliki pekerjaan dan keahlian selain menjadi seorang nelayan. Dengan kata lain, nelayan penuh yaitu nelayan yang seluruh waktu kerjanya dihabiskan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan.

Tipe nelayan sambilan utama ini adalah masyarakat pantai Depok yang menjadikan nelayan sebagai pekerjaan utama tetapi memiliki pekerjaan lainnya untuk tambahan penghasilan. Jadi, profesi utamanya yaitu sebagai nelayan akan tetapi memiliki pekerjaan sampingan sebagai tambahan penghasilan. Jumlah nelayan yang masuk tipe nelayan ini

sebanyak 12 nelayan (34.2%). Nelayan yang dikelompokkan ke dalam tipe nelayan sambilan tambahan yaitu nelayan yang umumnya memiliki pekerjaan lain selain nelayan sebagai sumber penghasilan. Pekerjaan sebagai nelayan hanya untuk tambahan penghasilan. Jumlah nelayan tipe ini yang ada di pantai Depok sebanyak 9 nelayan (25.7%).

Berdasar UU bagi hasil perikanan nelayan dikelompokkan berdasar kepemilikan sarana penangkapan ikan, yaitu nelayan penggarap dan nelayan juragan (pemilik). Nelayan penggarap adalah nelayan atau orang yang menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan laut, bekerja dengan sarana penangkapan ikan milik orang lain. Nelayan yang masuk kelompok ini sebanyak 22 nelayan (61.1 %). Sedangkan nelayan juragan (pemilik) merupakan orang yang memiliki perahu dan alat-alat penangkapan ikan yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan, namun dioperasikan oleh orang lain. Nelayan ini sebanyak 14 nelayan (38.9%). Apabila pemilik tersebut tidak melaut maka disebut juragan atau pengusaha. Jika pemilik tersebut juga bekerja melaut menangkap ikan maka dapat disebut sebagai nelayan yang sekaligus pemilik kapal.

- Klasifikasi Nelayan Pantai Depok Berdasar Kelompok Kerja

Nelayan pantai Depok, berdasar kelompok kerja dapat dibedakan kedalam kelompok nelayan perorangan, nelayan kelompok usaha bersama, dan nelayan perusahaan. Nelayan perorangan yaitu nelayan yang memiliki peralatan tangkap ikan sendiri, tapi dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain. Jumlah nelayan perorangan ini sebanyak 12 nelayan (33.3 %). Nelayan perorangan ini adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap ikan sendiri, dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain. Nelayan kelompok usaha bersama yang disingkat KUB yang ada di pantai Depok sebanyak 23 nelayan (69.7%). Nelayan KUB ini dibentuk dari gabungan beberapa nelayan yang beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang nelayan. Dengan demikian KUB yang ada di pantai Depok baru ada 2 KUB. Kegiatan usaha nelayan ini terorganisir karena tergabung dalam KUB non-badan hukum. Kelompok nelayan perusahaan atau ada jugayang menggunakan sebutan nelayan pekerja atau pelaut perikanan yang terikat dengan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan badan usaha perikanan perusahaan hanya ada satu (3.3%).

- Klasifikasi Nelayan Berdasar Jenis Perairan

Nelayan pantai Depok dapat dibedakan berdasar jenis perairan, meliputi nelayan pantai, nelayan tanpa perahu, dan nelayan pantai dan nelayan tanpa perahu. Nelayan pantai sebanyak 29 nelayan (81.3 %) adalah nelayan yang menjalankan aktivitas menangkap ikan pada perairan laut yang tidak jauh dari pantai. Termasuk nelayan tanpa perahu 4 (11.1%) nelayan pantai serta nelayan tanpa perahu 3 (8.3%). Nelayan pantai Depok termasuk nelayan pantai yang menangkap ikan tidak jauh dari pantai berjarak sekitar 3 mill dari pantai dan termasuk nelayan penangkap ikan tradisional.

- Klasifikasi Nelayan Berdasar Teknologi

Nelayan pantai Depok termasuk nelayan tradisional 36 (100%). Nelayan tradisional menggunakan teknologi penangkapan yang sederhana dengan peralatan penangkapan ikan dioperasikan secara manual dengan tenaga manusia. Kemampuan jelajah operasional terbatas pada perairan pantai yang hanya berjarak sekitar 3 mill dari pantai. Yang membedakan nelayan modern dengan nelayan tradisional pada teknologi

penangkapan yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional. Namun, ukuran modernitas bukan semata-mata karena penggunaan motor untuk menggerakkan perahu, melainkan juga besar kecilnya motor yang digunakan serta tingkat eksploitasi dari alat tangkap yang digunakan. Perbedaan modernitas teknologi alat tangkap juga akan berpengaruh pada kemampuan jelajah operasional nelayan (MY).

- Kalasifikasi Nelayan Berdasar Aspek Keterampilan Profesi

Nelayan formal adalah nelayan yang memiliki keterampilan secara sistematis akademis dan bersertifikasi atau berijazah profesi menangkap ikan yang didapat dari belajar dan berlatih. Namun nelayan pantai Depok keterampilan yang mereka miliki bukan berasal dari dari akademis melainkan dari para nelayan asal Cilacap. Nelayan formal yang ada di pantai Depok sebanyak 26 nelayan (72.2%). Sedangkan nelayan yang berasal dari orang tua atau turun temurun sebanyak 10 nelayan (27.8%) yang disebut sebagai nelayan nelayan non formal. Dengan kata lain, nelayan non formal merupakan nelayan yang memiliki keterampilan profesi menangkap ikan yang diturunkan atau dilatih dari orang tua atau generasi pendahulu secara non-formal.

Sistem Navigasi

System navigasi yang digunakan nelayan, yaitu alam, feeling, insting sebanyak 19 nelayan (57.6%). Sedangkan nelayan yang hanya menggunakan feeling 8 orang (24.2%), insting 2 orang (6.1 %), yang menggunakan feeling dan GPS, GPS, dan Kompas masing-masing hanya 1 orang (2.8%). Dengan demikian kebanyakan nelayan menggunakan system navigasi dengan menggabungkan alam, feeling, insting. Biasanya nelayan pada malam hari menggunakan fungsi bintang dan siang hari menggunakan daratan, artinya selama daratan masih nelayan lihat itu daerah jelajahnya dan matahari untuk melihat waktu.

Sistem Komunikasi

Sistim komunikasi yang digunakan nelayan adalah HP—receiver (81%) dan belum ada nelayan yang yang menggunakan GPS, Navigasi, ada 7 nelayan tidak menggunakan HP—receiver (19%). Berarti ada 7 nelayan yang tidak menggunakan sistem komunikasi. Nelayan ini hanya mengandalkan kepada temannya yang satu perahu.

KESIMPULAN

Masyarakat pantai Depok yang masuk dalam kategori nelayan penuh sebanyak 15 nelayan (42.9%). Nelayan penuh ini hanya memiliki satu mata pencaharian, yaitu sebagai nelayan. Nelayan sambilan utama sebanyak 12 nelayan (34.2%), tipe nelayan sambilan tambahan sebanyak 9 nelayan (25.7%). Nelayan dikelompokkan berdasar kepemilikan sarana penangkapan ikan, yaitu Nelayan penggaraf sebanyak 22 nelayan (61.1 %), nelayan juragan (pemilik) sebanyak 14 nelayan (38.9%). Berdasar kelompok kerja dapat dibedakan kedalam kelompok nelayan perorangan 12 nelayan (33.3 %), nelayan kelompok usaha bersama yang disingkat KUB 23 nelayan (69.7%), dan nelayan pekerja atau pelaut perikanan yang terikat dengan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan badan usaha perikanan perusahaan hanya ada satu (3.3%). Nelayan pantai Depok dapat dibedakan berdasar jenis perairan, meliputi nelayan pantai 29 nelayan (81.3 %), nelayan tanpa perahu 4 (11.1%), serta nelayan tanpa perahu 3 (8.3%). Nelayan pantai Depok termasuk nelayan tradisional 36 (100%). Berdasar Aspek Keterampilan Profesi, ada Nelayan formal yang ada di pantai Depok sebanyak 26 nelayan

(72.2%). Sedangkan nelayan turun temurun sebanyak 10 nelayan (27.8%).

Sistem navigasi yang digunakan nelayan, yaitu alam, feeling, insting sebanyak 19 nelayan (57.6%), feeling 8 orang (24.2%), insting 2 orang (6.1 %), masing-masing hanya 1 orang (2.8%) yang menggunakan feeling dan GPS, GPS, dan Kompas. Kebanyakan nelayan menggunakan system navigasi dengan menggabungkan alam, feeling, insting. Biasanya nelayan pada malam hari menggunakan fungsi bintang dan siang hari menggunakan daratan, artinya selama daratan masih nelayan lihat itu daerah jelajahnya dan matahari untuk melihat waktu. Sistem komunikasi yang digunakan nelayan adalah HP—receiver (81%). Namun, 7 nelayan yang tidak menggunakan sistem komunikasi. Nelayan ini hanya mengandalkan kepada temannya yang satu perahu.

Acknowledgement

Penelitian ini didukung oleh: Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018 Nomor: 202 / SP2H / LT / DRPM / 2019, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Hasil Penelitian Laboratorium Pertanian UGM, 2011, Tentang Pemetaan Masyarakat Desa di Jawa Tengah
Mubyarto, 2002, Membangkitkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Gerakan Koperasi: Peran Perguruan tinggi”. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Thn I, No 6

PERKEMBANGAN BATIK SLEMAN

Sri Suryaningsum¹), Raden Hendri Gusaptono²), Sri Luna Murdianingrum³), Alifa Nida Maharani⁴), Rakyan Widowati Tanjung⁵)

1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

4Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada

5Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

email: srisuryaningsum@upnyk.ac.id , tono_hendri@yahoo.com , luna_sri@ymail.com,

alifanida99@mail.ugm.ac.id, rakyan.widhowati.t@mail.ugm.ac.id

Abstract

This research uses a qualitative analysis approach. Data of this research obtained collected from direct observation of batik motifs, the development process, and batik production in the batik centre of Sleman Regency. The results of the research conducted from January to June 2019 are to find out how the history of batik in Sleman Regency and what its development has been to date. Review the motives and meanings contained in Sleman batik. Batik in Sleman Regency is in the time of growing and developing. Now, Sleman able to develop batik motifs and production with the support of the government, the community, and other institutions. The geographical situation of Sleman consists of lowlands and highlands, giving rise to various batik motifs that occur adapted to their environmental conditions. With the development of time and technology, it also influences the development of the Sleman batik development process. Batik themes in Sleman include the motifs of salak, elephant, and eel. Sleman batik colours tend to be dark because Sleman does not have a coastal area. Sleman Batik Development continues done through batik training. Sleman batik creation contest. The government carries out a cultural festival. Establishment of Small and Medium Industries (IKM). Sleman Batik continues processed into various new products such as bags and others. The government is expected to increasingly supportive the promotion and development of Sleman batik motifs. Maintain ongoing training for batik makers. Incorporating Sleman Batik crafts in local content must be in public and private schools.

Keywords: Batik Sleman, History of Batik, Design of Batik, The Meaning of Sleman Batik.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki kebudayaan yang beraneka ragam, salah satunya adalah batik (Suryaningsum, 2017). Batik merupakan karya seni lukis dan tulis yang dilukiskan dalam sebuah kain (Suryaningsum, 2017). Kata batik berasal dari kata aamba yang berarti kain lebar dan kata titik. Sehingga batik berarti gambar titik-titik membentuk pola yang indah pada kain lebar (Suryaningsum, et al., 2019).

Awalnya batik terikat pada aturan yang mencakup status pemakai, tatakrama dan tatacara penggunaan, serta ragam hias dan perlambangan yang ada pada motif batik (Anas, et al., 1997). Batik hanya digunakan oleh keluarga Keraton Yogyakarta dan Surakarta, namun kini batik telah digunakan oleh berbagai kalangan (Suryaningsum, 2017). Bahkan pada 2 Oktober

2009 batik telah ditetapkan sebagai World Heritage oleh UNESCO (Suryaningsum, 2017).

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang perkembangannya sangat pesat. Dengan adanya perguruan tinggi negeri dan swasta di Sleman menyebabkan masuknya pendatang-pendatang dari luar Yogyakarta. Pendatang yang masuk ke Sleman dikhawatirkan akan mempengaruhi eksistensi batik khas Sleman dan tergantikan oleh kain-kain yang berasal dari daerah atau negara lain. Oleh karena itu penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat mengetahui seperti apa sejarah dan perkembangan Batik Sleman serta dapat memberikan saran bagi perkembangan Batik Sleman selanjutnya.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada, karena penelitian ini lebih memfokuskan pada sejarah dan perkembangan Batik Sleman, sedangkan pada penelitian-penelitian sebelumnya berfokus pada perkembangan teknologi canting (Ramadhani, 2015), proses pembuatan batik (Muamalah, 2017), dan pengelolaan limbah batik (Yulianto, et al., 2009).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari hingga Juni 2019 berlokasi di sentra batik Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pada penelitian ini digunakan pendekatan analisis kualitatif, sehingga dapat menjelaskan fenomena yang ada dengan mendalam melalui penjelasan berupa kalimat (Rahardjo, 2010).

Data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung pada motif batik, proses pengembangan dan produksi batik di Kabupaten Sleman. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- Keadaan Geografis dan Demografi Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman adalah salah satu kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis Kabupaten Sleman terletak di 110° 33' 00" dan 110° 13' 00" Bujur Timur, 7° 34' 51" dan 7° 47' 30" Lintang Selatan. Dengan luas daerah sebesar 574,82 Km² Kabupaten Sleman berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah di bagian utara; di bagian selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul; sedangkan pada bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah; dan di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah (Pemerintah Kabupaten Sleman, 2019). Secara administratif Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan yang memiliki 86 desa dan 1.212 dusun (Pemerintah Kabupaten Sleman, 2019). Wilayah Kabupaten Sleman memiliki ketinggian antara kurang dari 100 mdpl hingga lebih dari 1000 mdpl dengan kemiringan antara 0% hingga lebih dari 40%. Kabupaten Sleman beriklim tropis basah dengan musim hujan antara bulan November hingga April dan musim kemarau antara bulan Mei hingga Oktober. Dengan keadaan seperti berikut sebagian besar wilayah Kabupaten Sleman merupakan lahan subur yang digunakan sebagai lahan pertanian maupun perkebunan (Pemerintah Kabupaten Sleman, 2019).

- Keadaan Ekonomi Kabupaten Sleman

Pada temu kangen Mantan Bupati dan Wakil Bupati Purna Bhakti Praja, Sri Purnomo selaku Bupati Sleman mengungkapkan bahwa perkembangan ekonomi Kabupaten Sleman secara makro mengalami peningkatan. Kemajuan ekonomi di Kabupaten Sleman semakin merata. Pemerataan tersebut dapat dilihat melalui indeks gini Kabupaten Sleman sebesar 0,390.

Kemiskinan yang ada di Kabupaten Sleman juga turun menjadi 9,48%. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pembinaan usaha, pembiayaan dana penguatan modal bagi UKM, penempatan kerja, kemudahan peayanan ijin usaha, dan lain sebagainya (Umaiyah, 2018).

Sejarah Batik Sleman

Batik Sleman tergolong sebagai batik kontemporer atau batik modern yang diciptakan oleh pengusaha batik Sleman Nakula Sadewa, bernama Bambang Sumardiyono. Pada awalnya Pemerintah Kabupaten Sleman sudah menciptakan motif batik Sleman Sembada. Namun motif tersebut tidak dapat digunakan oleh seluruh masyarakat, melainkan hanya boleh digunakan oleh pegawai pemerintahan, guru, dan pegawai negeri sipil lainnya di Kabupaten Sleman. Dengan keadaan tersebut Bambang Sumardiyono mendapat ide untuk menciptakan motif batik khas Kabupaten Sleman yang dapat digunakan oleh seluruh kalangan. Lalu muncullah batik motif Sleman dengan motif khasnya yaitu gajah (Santi, 2018).



Gambar 1. Batik Motif Sleman

Bambang Sumardiyono memilih motif gajah karena terinspirasi oleh arti kata Sleman itu sendiri. Kata Sleman berasal dari kata Liman yang berarti gajah. Diperkirakan pada masa Kerajaan Mataram Kuno wilayah Sleman yang berada di lereng Merapi adalah wilayah Kunjarakunja (ibukota) yang dikenal sebagai daerah asal gajah (Kartodirdjo, 1975).

Geografis Batik

Kabupaten Sleman tidak memiliki daerah pesisir, hanya terdapat dataran rendah dan dataran tinggi. Sehingga motif batik yang ada di Kabupaten Sleman berupa motif flora dan fauna dari darat dan berwarna gelap, seperti misalnya motif Batik Sleman Sembada yang polanya seperti gunung, batik Sleman yang bermotif gajah, batik bermotif salak, dan lain sebagainya.

Perda Mengenai Batik

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 memuat adanya dua museum batik di provinsi DIY, yaitu berlokasi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul serta diadakan Festival Jogja Kota Batik Dunia.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Batik Sleman memuat pengertian Batik Sleman; tujuan penetapan tata kelola Batik Sleman; unsur dasar Batik Sleman; teknis memodifikasi Batik Sleman; lomba desain motif Batik Sleman; kepemilikan hak cipta Batik Sleman dipegang oleh Pemerintah Daerah; mengatur sistem produksi, pemanfaatan, pemasaran, dan perizinan Batik Sleman; hak, kewajiban, dan larangan dalam produksi, pemanfaatan dan pemasaran Batik Sleman; sanksi jika melanggar; kerjasama produksi Batik Sleman; promosi Batik Sleman; asosiasi pembatik Sleman; pembinaan dan pengawasan Batik Sleman.

Lampiran Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Batik Sleman memuat nama dan gambar motif Batik Sleman.

Motif Batik Khas Sleman

Pada awalnya batik khas suatu daerah adalah batik yang sudah turun temurun dari nenek moyang, namun dengan adanya perkembangan zaman meimbulkan munculnya motif-motif baru. (Suryaningsum, 2018). Begitu pula yang terjadi di Sleman, berikut beberapa motif batik khas Sleman.

Motif Sinom Parijotho Salak



Gambar 2. Motif Sinom Parijotho Salak

Motif Sinom Parijotho berasal dari pemenang Lomba Desain Batik Sleman Tahun 2012 yang ditetapkan menjadi motif batik khas Kabupaten Sleman. Dalam motif sinom pariyotho terinspirasi dari tangkai, daun, dan bunga pariyotho serta daun dan bunga salak. Tanaman pariyotho adalah tanaman asli lereng Gunung Merapi berupa tanaman dedaunan. Tanaman Pariyotho hanya dapat tumbuh di ketinggian lebih dari 2.000 meter dari permukaan laut. Buah dari tanaman pariyotho sangat diminati kaum bangsawan untuk dimakan sebagai rujak. Tanaman Pariyotho selain dapat dikonsumsi juga memiliki beberapa manfaat, sehingga tanaman ini dapat melambungkan kemakmuran. Namun kini tanaman pariyotho sudah sangat sulit di temukan. Penciptaan motif batik ini salah satunya dimaksudkan sebagai aksi pelestarian tanaman yang hampir punah ini. Proses pewarnaan kain batik motif pariyotho di Dusun Plalangan Desa Pendowoharjo Kabupaten Sleman masih menggunakan pewarna alami yang berasal dari tanaman.

Motif Salak Pondoh



Gambar 3. Motif Daun dan Bunga Salak



Gambar 4. Motif Daun, Bunga, dan Buah Salak



Gambar 5. Motif Buah dan Daun Salak

Salak pondoh adalah salah satu jenis salak yang merupakan tanaman perkebunan khas Kabupaten Sleman. Motif salak pondoh dapat terdiri dari daun salak, bunga salak, serta buah salak itu sendiri. Salak menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat di Kabupaten Sleman. Bahkan dengan semakin berkembangnya produk-produk yang dihasilkan dari salak mengakibatkan perekonomian masyarakat semakin meningkat pula. Sehingga motif batik salak

pondoh ini selain melambangkan salak yang merupakan tanaman khas Sleman juga melambangkan kesuburan, kemakmuran, serta kesejahteraan yang adil dan merata pada kehidupan masyarakat Kabupaten Sleman.

Motif Belut dan Salak



Gambar 6. Motif Belut dan Salak

Selain salak, di Kabupaten Sleman juga terkenal dengan kripik belut dan olahan belut lainnya. Batik ini terinspirasi dari dua makanan yang terkenal dari Kabupaten Sleman, yaitu belut dan salak. Seperti batik salak pondoh, batik ini menggambarkan kesuburan, kemakmuran, serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sleman.

Motif Gajah



Gambar 7. Motif Gajah Kombinasi Parang Rusak Barong

Seperti yang telah diungkapkan dalam sejarah Batik Sleman, motif gajah dipilih sebagai motif batik khas Sleman karena terinspirasi oleh arti kata Sleman itu sendiri. Kata Sleman berasal dari kata Liman yang berarti gajah. Diperkirakan pada masa Kerajaan Mataram Kuno wilayah Sleman yang berada di lereng Merapi adalah wilayah Kunjarakunja (ibukota) yang

dikenal sebagai daerah asal gajah (Kartodirdjo, 1975). Selain itu gajah juga menggambarkan kekuatan namun di belakang kekuatan itu juga terdapat sifat lemah lembut kepada siapapun.

Peran Pemerintah

Peran Pemerintah Sleman dalam perkembangan Batik Sleman cukup besar. Pemerintah Sleman telah mengesahkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Batik Sleman yang memuat pengertian Batik Sleman; tujuan penetapan tata kelola Batik Sleman; unsur dasar Batik Sleman; teknis memodifikasi Batik Sleman; lomba desain motif Batik Sleman; kepemilikan hak cipta Batik Sleman dipegang oleh Pemerintah Daerah; mengatur sistem produksi, pemanfaatan, pemasaran, dan perizinan Batik Sleman; hak, kewajiban, dan larangan dalam produksi, pemanfaatan dan pemasaran Batik Sleman; sanksi jika melanggar; kerjasama produksi Batik Sleman; promosi Batik Sleman; asosiasi pembatik Sleman; pembinaan dan pengawasan Batik Sleman. Dalam lampiran peraturan tersebut juga termuat nama dan gambar motif Batik Sleman. Pemerintah Sleman mengadakan Lomba Desain Batik Sleman dan Sleman Fashion Festival agar Batik Sleman semakin dikenal oleh masyarakat luas (Suryaningsum, et al., 2019).

Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan Gebyar Batik Sleman 2018 untuk mempertahankan predikat World Crafts Council (WWC) sebagai kota batik dunia yang telah empat tahun diterima Yogyakarta dan juga dalam rangka untuk mendukung Jogja International Batik Biennale (JIBB). Gebyar Batik Sleman 2018 yang dilaksanakan di Hotel Alana Yogyakarta ini terdapat berbagai kegiatan, seperti bazar dan pameran dari Industri Kecil dan Menengah (IKM) di wilayah Kabupaten Sleman dan kabupaten lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Fashion show hasil-hasil produk batik. Talkshow interaktif mengenai batik. Kegiatan yang paling menarik adalah workshop “Ayo Membatik”. Workshop ini merupakan kolaborasi antara asosiasi batik dan IKM batik dengan tujuan untuk memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat umum dan siswa sekolah mengenai proses dalam membatik. Pada kegiatan “Ayo Membatik” ini masyarakat umum dan siswa sekolah diajarkan membatik, mulai dari menggambar pola pada kain, menorehkan malam (lilin yang digunakan dalam membatik), mewarnai kain batik, hingga proses pelorodan atau proses menghilangkan malam yang ada pada kain batik dengan cara memasukkan kain ke air panas.

Peran Aktor Lain

Penting pula untuk mencintai produk batik, bukan hanya menyukainya saja (Suryaningsum, 2018). Perhatian khusus dari berbagai aktor seperti pemerintah maupun swasta sangat diperlukan dalam menjadikan batik sebagai mata pencaharian (Suryaningsum, et al., 2016). Aktor lain selain pemerintah juga sudah mendukung perkembangan Batik Sleman.

Bambang Sumardiyono selaku pemilik Industri Batik Sleman Nakula Sadewa telah menciptakan batik khas Sleman yang bermotif gajah. Bambang juga memasarkan batik khas Sleman hingga ke pasar internasional, seperti Jepang, Amerika, Rusia, Latvia, Jerman, serta beberapa negara di Asia Tenggara. Untuk memenuhi pasar internasional Bambang mempertahankan penggunaan pewarna alam dan peningkatan kualitas batik yang ia produksi.

Sleman telah memiliki asosiasi batik Sleman, yaitu Mukti Manunggal. Asosiasi batik yang berlokasi di Papringan, Bedog RT 6 RW 25 Trihanggo, Gamping, Sleman ini didirikan pada tanggal 27 Januari 2015 dan diresmikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman pada tahun 2016. Pada awal berdiri anggota asosiasi tersebut terdiri dari ibu rumah tangga, pencari rumput, petani, dan pedagang. Jumlah kelompok pengrajin batik dan pembatik

mandiri meningkat setelah didirikannya Mukti Manunggal.

Kabupaten Sleman adalah salah satu tujuan utama ketika akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Keberadaan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Sleman yang sangat banyak jumlahnya juga berpengaruh pada perkembangan batik yang ada di Kabupaten Sleman.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta memberikan kesempatan bagi civitas akademiknya untuk menerima pendanaan serta mempublikasikan penelitiannya mengenai batik.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Kelompok Batik Sekar Jatim melakukan pelatihan membatik bagi pemula agar terciptanya regenerasi pembatik di Sleman.

Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) Universitas Islam Indonesia sejak tahun 2014 mendukung perkembangan batik tulis di Dusun Plalangan, Desa Pandowoharjo, Sleman dengan cara memfasilitasi pelatihan membatik di dusun tersebut. Kini dengan pendampingan dari DPPM UII hasil produksi dari pengrajin batik Dusun Plalangan sudah dijual melalui e-commerce.

Perkembangan perhotelan yang ada di Kabupaten Sleman juga membawa Grand Keisha by Horison Yogyakarta pada tanggung jawab sosialnya berupa kerja sama dengan Asosiasi Mukti Manunggal. Hotel ini memberikan tempat khusus bagi ibu-ibu PKK dari Sleman bernama Batik Corner. Di Batik Corner pengunjung hotel dapat secara langsung belajar membatik dan juga dapat membeli batik Sleman yang ada di tempat tersebut.

Sebagian besar hotel berbintang di Kabupaten Sleman telah menyediakan tempat khusus untuk menjual batik dan/atau menjual kerajinan lainnya yang merupakan hasil karya dari pengrajin Sleman. Beberapa hotel di Sleman juga sudah menggunakan unsur-unsur batik di dalam hotelnya.

Penelitian dan Pengembangan Produk Batik Sleman

Pemerintah berharap motif-motif batik yang ada di Kabupaten Sleman semakin beragam. Sehingga motif-motif yang ada di Kabupaten Sleman juga terus dikembangkan sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Batik Sleman. Selain motif, Batik Sleman juga mulai dikembangkan menjadi beberapa produk, seperti tas, baju, dompet, dan lain sebagainya. Karena pasar luar negeri lebih menyukai batik dengan pewarna alam, maka dalam pembuatan batik Sleman akan lebih sering menggunakan pewarna alam.

KESIMPULAN

Kabupaten Sleman telah memiliki batik khas, yaitu batik Sinom Parijoto. Motif Batik Sleman antara lain adalah motif gajah, salak, dan belut. Warna dari batik-batik yang ada di Sleman kebanyakan berwarna gelap, karena Sleman hanya terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi, sedangkan biasanya batik-batik yang berwarna cerah berada pada daerah-daerah pesisir.

Pemerintah Kabupaten Sleman mengharapkan adanya perkembangan motif-motif batik dari Kabupaten Sleman. Hasil produksi Batik Sleman juga diharapkan dapat lebih dikenal oleh masyarakat lokal maupun internasional. Pemerintah melaksanakan berbagai kegiatan sehingga dapat mendukung tercapainya hal-hal tersebut. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman telah melaksanakan Sleman Fashion Festival. Pemerintah juga mengadakan

Lomba Desain Batik Sleman. Telah diadakan pula kolaborasi pemerintah dengan pengrajin batik untuk mengadakan rangkaian kegiatan pada acara Gebyar Batik Sleman 2018.

Bambang Sumardiyono selaku pemilik Industri Batik Sleman Nakula Sadewa telah menciptakan batik khas Sleman yang bermotif gajah. Bambang juga memasarkan batik khas Sleman hingga ke pasar internasional.

Pengrajin batik Sleman telah memiliki asosiasi batik Sleman, yaitu Mukti Manunggal. Keberadaan Mukti Manunggal mengakibatkan adanya peningkatan kuantitas pengrajin batik Sleman.

Keberadaan perguruan tinggi negeri dan swasta di Kabupaten Sleman juga memberikan kontribusi bagi perkembangan batik Sleman, seperti yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Gadjah Mada yang bekerjasama dengan Kelompok Batik Sekar Jatis, Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) Universitas Islam Indonesia.

Perkembangan perhotelan yang ada di Kabupaten Sleman juga membawa Grand Keisha by Horison Yogyakarta pada tanggung jawab sosialnya berupa kerja sama dengan Asosiasi Mukti Manunggal. Hotel ini memberikan tempat khusus bagi ibu-ibu PKK dari Sleman bernama Batik Corner. Di Batik Corner pengunjung hotel dapat secara langsung belajar membatik dan juga dapat membeli batik Sleman yang ada di tempat tersebut.

Sebagian besar hotel berbintang di Kabupaten Sleman telah menyediakan tempat khusus untuk menjual batik dan/atau menjual kerajinan lainnya yang merupakan hasil karya dari pengrajin Sleman. Beberapa hotel di Sleman juga sudah menggunakan unsur-unsur batik di dalam hotelnya.

Kegiatan-kegiatan tersebut telah membantu dalam perkembangan dan pemasaran batik Sleman. Batik Sleman dinilai masih dapat berkembang dan melebarkan pasarnya, sehingga disarankan pemerintah lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan dan memasarkan batik Sleman, serta lebih sering lagi melakukan pelatihan mengenai batik Sleman, melaksanakan lomba batik Sleman, melaksanakan dan mengikuti festival batik Sleman. Diharapkan pemerintah juga mewajibkan muatan lokal membatik motif Batik Sleman di sekolah negeri maupun swasta.

Ucapan Terimakasih

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang didanai oleh Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

REFERENSI

- Anas, B., Hasanudin, Panggabean, R., dan Sunarya, Y.. 1997. Batik. Yayasan Harapan Kita. Jakarta.
- Kartodirdjo, S.. 1975. Sejarah Nasional Indonesia II. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Muamalah, N. A.. 2017. Kerajinan Ikat Celup di Batik Parang Kaliurang Sleman Yogyakarta. <http://digilib.isi.ac.id/1754/>.
- Pemerintah Kabupaten Sleman. 2019. Letak dan Luas Wilayah. <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>.
- Pemerintah Kabupaten Sleman. 2019. Topografi. <http://www.slemankab.go.id/profil->

- kabupaten-sleman/geografi/topografi.
Pemerintah Kabupaten Sleman. 2019. Wilayah Administratif. <http://www.slemankab.go.id/wilayah-administratif>.
- Rahardjo, M.. 2010. Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif. <https://www.uin-malang.ac.id/r/100601/jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html>.
- Ramadhani, R.. 2015. Teknologi Canting Pantograph untuk Meningkatkan Efisiensi Produksi Batik Tulis. *Khazanah: Jurnal Mahasiswa UII*. 9.
- Santi, S.. 2018. Sejarah Motif Batik Sleman. <https://infobatik.id/sejarah-motif-batik-sleman/>.
- Suryaningsum, S.. 2017. Batik Tulis untuk Wisata dan Perekonomian. <http://www.lintasmedika.com/2017/05/batik-tulis-untuk-wisata-dan-perekonomian/>.
- Suryaningsum, S.. 2017. Empat Jenis Motif Batik Pilihan Kahiyang Ayu. <http://www.lintasmedika.com/2017/12/empat-jenis-motif-batik-pilihan-kahiyang-ayu/>.
- Suryaningsum, S.. 2017. Peningkatan Kesejahteraan dengan Batik. <http://www.lintasmedika.com/2017/05/peningkatan-kesejahteraan-dengan-batik/>.
- Suryaningsum, S.. 2017. Perbatikan Nusantara 1. <http://www.lintasmedika.com/2017/07/perbatikan-nusantara-1/>.
- Suryaningsum, S.. 2018. Makna di Balik Motif Batik Wayang. <http://www.lintasmedika.com/2018/01/makna-dibalik-motif-batik-wayang/>.
- Suryaningsum, S.. 2018. Motif Batik Jokowi Kapal Karam dan Gunungan. <http://www.lintasmedika.com/2018/01/motif-batik-jokowi-kapal-karam-dan-gunungan/>.
- Suryaningsum, S., Effendi, I. M. dan Gusaptono, H. R.. 2016. Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pertamina Terhadap Perbatikan.
- Suryaningsum, S., Gusaptono, H. R., Murdianingrum, L. S., Wulan, S. M. A. P. N., Tanjung, W. R.. 2019. Analisis Perkembangan Batik Bantul. dalam proses publikasi di Litbang Bantul.
- Suryaningsum, S., Murdianingrum, L. S., Gusaptono, H. R., Ilham, M., Maharani, N. A., Wulan, S. M. A. P. N., Tanjung, W. R., Darusdati, S. A., Syaifullah, M., Putri, M. B.. 2019. Analisis Pilihan Strategi Batik Kabupaten Sleman. Penelitian penulis tahun 2019 dibiayai oleh Pendanaan Kemenristek Dikti.
- Umadiyah, S.. 2018. Perkembangan Ekonomi Sleman Alami Peningkatan. <https://jogja.tribunnews.com/2018/05/10/perkembangan-ekonomi-sleman-alami-peningkatan>.
- Yulianto, A., Hakim, L., Purwaningsih, I. dan Pravitasari, A. V.. 2009. Pengolahan Limbah Cair Industri Batik pada Skala Laboratorium dengan Menggunakan Metode Elektrokoagulasi. *Jurnal Teknologi Lingkungan*. 5 (1): 11.
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Batik Sleman.
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Batik Sleman.
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022.

MEMETAKAN KEMAMPUAN LITERASI MEDIA DIGITAL IBU-IBU RUMAH TANGGA DI DESA MAGUWOHARJO, YOGYAKARTA

Dewi Novianti, Siti Fatonah

UPN “Veteran” Yogyakarta , UPN “Veteran” Yogyakarta
dewinoviantiupn916@gmail.com, ona_cahaya@yahoo.co.id

Abstract

The ability of digital media literacy housewife in the village of Maguwoharjo, Yogyakarta Indonesia is still low. Identifying media literacy skills for mothers needs to be done to provide media literacy education. This study uses methods; Interviews, focus group discussion, and media content analysis. The results of the study are mothers-housewives who use digital media only limited to entertainment, communication with family and people close, and little to the things that are knowledge. There are still mothers who are not able to apply smartphones or gadgets. They struggled to monitor the content that the kids had consumed. The role of mothers in child mentoring when interacting with the media is still very minimal. Many digital media applications are unknown and have not been optimal in assisting their children in consuming digital media.

key words; Digital media literacy, housewives

PENDAHULUAN

Di era digital saat ini hampir setiap orang berkomunikasi dan bertukar informasi melalui media social. Kemampuan kita untuk beradaptasi dengan Web sebagaimana ia beradaptasi kita akan menentukan masa depannya dan masa depan kita sendiri (Earnshaw & Vince, 2007).

Media digital atau media social berdampak positif dan negative. Dampak positif media sosial antara lain; sebagai media penyimpanan informasi, media sosial dapat menyambung tali silaturahmi memudahkan bagi orang yang memiliki sanak family yang jauh, dan mempermudah berbelanja. Dampak negative media social; terjadi tindak kejahatan, Susah bersosialisasi dengan orang sekitar, seseorang lebih mementingkan diri sendiri, Media sosial dapat membuat anak-anak dan remaja menjadi lalai dan juga tidak bisa membagi waktu karena terlalu asik dengan dunia maya (IDCloudHost, 2018). Dampak negative lainnya adalah menurunnya tingkat kesehatan, menjadi individualis, sikap acuh terhadap orang-orang di sekeliling, terjadinya cyber-bullying, banyak kejahatan yang berasal dari sosial media (Heru, 2020). Media social adalah label untuk teknologi digital yang memungkinkan orang untuk terhubung, berinteraksi, menghasilkan, dan mengembangkan konten pesan (dua, 2018). Konten-konten dari media baru ini tidak bisa dianggap hanya sebagai hiburan saja, akan tetapi ada banyak konten yang meresahkan seperti seksualitas, kekerasan, eksploitasi tubuh wanita, fenomena bully, kriminalitas, berita hoax, dan informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya (Novianti & Fatonah, 2018). Dampak negative ini yang membuat peneliti resah terutama terhadap anak-anak. Ibu-ibu rumah tangga dipilih sebagai nara sumber penelitian karena ibu-ibu rumah tangga sebagai pilar keluarga. Ibu-ibu rumah tangga merawat dan mendidik anak-anaknya supaya sukses dan berakhlak mulia. Oleh karena itu penting untuk mengidentifikasi kemampuan literasi media digital pada Ibu-Ibu Rumah Tangga khususnya di desa

Maguwoharjo, Yogyakarta.

Yogyakarta merupakan kota pendidikan di Indonesia (Kompasiana.com, 2016) namun sayangnya masih banyak penduduknya yang belum mengetahui literasi media digital, seperti di desa Maguwoharjo, Yogyakarta. Penduduk desa Maguwoharjo masih sederhana, di mana sebagian penduduknya bekerja sebagai petani dan masih ada yang berpendidikan rendah hanya sampai sekolah dasar. Pendidikan berkorelasi dengan kemampuan literasi media. Peneliti mengidentifikasi kemampuan literasi media digital ibu-ibu rumah tangga di desa Maguwoharjo, Yogyakarta, Indonesia.

Literasi media adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi dalam berbagai bentuk media. Literasi media merupakan seperangkat perspektif yang digunakan secara aktif saat mengakses media masa untuk menginterpretasikan pesan yang dihadapi (Aspen Institute, 1992). Aspek penting dalam media digital adalah orang dapat terhubung dengan mudah. Tiga element yang saling terkait: Pertama, menghubungkan dengan informasi (orientasi, eksplorasi, fokus, mencari), kedua, berinteraksi dengan informasi (berpikir kritis, mengevaluasi) ketiga, memanfaatkan informasi (mentransformasikan, komunikasi, menerapkan)(Knobel, 2008).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif (Sutopo, 2001). Pendekatan kualitatif berada di bawah perspektif interpretive/constructivis dan critical (Neuman, 2000). Penelitian ini masuk dalam kategori constructivis social research. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara mendalam dengan instrumen Interview guide, observasi, dan Focus group discussion. Sedangkan data sekunder berupa analisis isi dan studi pustaka. Narasumber adalah 20 ibu-ibu rumah tangga di desa Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta.

PEMBAHASAN

Globalisasi membuat teknologi berkembang sangat pesat. Tentu hal ini memiliki dampak tersendiri bagi masyarakat. Pada era ini, masyarakat harus sadar bahwa media merupakan salah satu hal yang penting. Setiap manusia memiliki cara pandang yang berbeda terkait suatu hal. Cara pandang dipengaruhi oleh lingkungan, masyarakat, gaya hidup.

Smartphone memiliki dampak positif dan negative. Dampak negative dari smartphone tidak dapat sepenuhnya dihilangkan. Namun setidaknya kita dapat meminimalisir adanya dampak negative tersebut.

20 orang Ibu-ibu rumah tangga yang menjadi subyek penelitian merupakan kelompok Dharma Wanita di desa Maguwoharjo. Kelompok Dharma Wanita memiliki program kerja pendidikan, ekonomi, dan social budaya (“Program Kerja,” 2011). Tujuan utama Dharma Wanita adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga. Program pendidikan diantaranya Ibu-ibu rumah tangga mendampingi dan merawat anak-anak mereka. Aktivitas sehari-hari di samping sebagai ibu rumah tangga, juga bekerja sebagai petani dan buruh. Mereka menggunakan sebagian besar waktu untuk keluarga dan bekerja. Mereka menggunakan waktu untuk berinteraksi dengan smartphone adalah disela-sela kesibukkan mereka. Aplikasi-aplikasi dalam smartphone banyak yang belum diketahui, sehingga mereka menggunakan smartphone masih terbatas.

Penelitian ini mengidentifikasi ada dua permasalahan; pertama, ibu-ibu rumah tangga sibuk dengan rutinitas sehingga tidak begitu paham bagaimana menggunakan media digital. Kalaupun dapat menggunakan smartphone tetapi hanya sebatas membaca atau mengirim

informasi sederhana dan tidak bisa mengakses lebih mendalam dan melihat historis atau riwayat konten yang telah diakses, atau dengan kata lain gagap teknologi. Ibu-Ibu Rumah tangga tidak mengetahui dampak negatif dari media digital ini. Seringkali yang terjadi adalah anak lebih pandai menggunakan smartphone atau gadget dibanding ibunya, sehingga ibu tidak bisa memantau anak telah mengakses apa saja melalui smartphonenya. Kedua, anak-anak mereka menghabiskan banyak waktu hanya untuk mengonsumsi media tetapi tidak memiliki kemampuan memfilter atau self control terhadap konten media tersebut, sehingga menyebabkan dampak narcotizing disfunction media muncul.

Beberapa hal peta kemampuan literasi media social ibu-ibu rumah tangga di desa Maguwoharjo, Yogyakarta.

Table 1. kepemilikan smartphone

kepemilikan smartphone	jumlah
Memiliki	14
Tidak memiliki	6

14 orang ibu-ibu memiliki smartphone sendiri dan 6 orang lainnya tidak memiliki smartphone sendiri. Ibu-ibu yang memiliki smartphone sendiri bisa menggunakan lebih leluasa dibanding dengan ibu-ibu yang tidak memiliki smartphone sendiri. Ibu-ibu yang tidak memiliki smartphone bukan berarti tidak bisa sama sekali tidak menggunakannya, tetapi mereka meminjam milik keluarganya seperti smartphone suami atau anaknya. Ada yang smartphonenya milik bersama dalam satu keluarga, sehingga mereka menggunakannya secara bergantian. Ibu-ibu kesulitan dalam mengontrol dan melacak apa saja yang telah dilihat anak-anaknya dalam internet, seperti youtube. Ibu-ibu tidak mengerti cara menggunakan historis dalam youtube facebook. Hal ini menyebabkan anak-anak menjadi lepas control.

Table 2. Berapa Lama Memiliki Smartphone

Waktu kepemilikan	jumlah
Kurang dari satu tahun	2
1-2 tahun	4
Tidak diisi	4
3-4 tahun	5
5 tahun	5

Kepemilikan smartphone kurang dari satu tahun sebanyak dua orang, artinya ibu tersebut baru saja bisa menggunakan smartphone. Empat orang memiliki smartphone selama antara satu sampai dua tahun. Empat ibu-ibu tidak menjawab karena tidak memiliki smartphone secara pribadi. Empat orang telah menggunakan smartphone selama tiga sampai empat tahun. Lima orang menyatakan telah menggunakan smartphone selama lima tahun. Semakin lama memiliki smartphone, maka semakin pandai menggunakannya. Kalau melihat informasi pengguna smartphone di Indonesia termasuk tinggi. Empat dari 10 orang penduduk di Indonesia yang menggunakan ponsel cerdas menurut survey lembaga Pew Research Center. Kondisi ini menandai tingkat kepemilikan smartphone yang masih rendah, di antara negara-negara berkembang lainnya (BeritaSatu.com, 2019). Ibu-ibu di desa Maguwoharjo sebagian termasuk diantara yang tidak menggunakan smartphone, sehingga desa Maguwoharjo termasuk kategori rendah dalam penggunaan smartphone.

Table 3. Durasi Menggunakan Smartphone

Durasi	0 – 1 jam	1 – 2 jam	2 – 3 jam	3 – 4 jam	5 jam
Jumlah	6	5	1	4	4

Ada enam ibu-ibu yang durasi menggunakan smartphone selama 0 sampai dengan satu jam dalam sehari. Ada lima ibu-ibu yang durasi menggunakan smartphone selama satu sampai dengan dua jam dalam sehari. Ada satu ibu yang durasi menggunakan smartphone selama dua sampai dengan tiga jam dalam sehari. Ada empat ibu-ibu yang durasi menggunakan smartphone selama tiga sampai dengan empat jam dalam sehari. Dan Ada dua ibu-ibu yang durasi menggunakan smartphone selama lima jam dalam sehari. Durasi penggunaan smartphone beragam. Yang paling banyak adalah 0 sampai dengan 1 jam dalam sehari. Ibu-ibu berinteraksi dengan smartphone berdasarkan kebutuhan masing-masing. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Baran & Davis (2000) individu masyarakat diasumsikan bahwa dalam mengonsumsi media akan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan personal individu bersangkutan. Karena itu, setiap individu akan mempunyai perhatian, minat, dan keinginan berbeda terhadap media karena dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis individual dan pada gilirannya mempengaruhinya dalam mengonsumsi media massa. Dalam kaitan ini, fakta empirik tampaknya memang menunjukkan relevansinya dengan asumsi individual differences theory tadi. Ibu-ibu desa Maguwoharjo menggunakan smartphone di pagi hari setelah menyelesaikan rutinitas keluarga, kemudian di sore hari ketika pulang dari kerja. Ada pula yang menggunakan smartphone di malam hari ketika akan tidur.

Table 4. Tujuan Menggunakan Smartphone

Kode	Pilihan jawaban
	komunikasi
	Mencari informasi
	Mencari hiburan
	Mencari pengetahuan

Tabel 5. Jawaban Ibu-Ibu Rumah Tangga

Kode jawaban	jumlah
menjawab a	6
menjawab b	2
menjawab a, b, d	1
menjawab a c	
menjawab a b	
menjawab a d	
Tidak menjawab	
menjawab d	
Menjawab semuanya	

Jawaban yang muncul beragam. Jawaban tujuan menggunakan smartphone untuk komunikasi sebanyak enam orang. Jawaban tujuan menggunakan smartphone untuk komunikasi dan hiburan delapan orang. Beberapa menjawab kombinasi lebih dari satu pilihan jawaban. Fungsi media sebagai pengetahuan adalah dampak positif dari media digital. Banyak pengetahuan berharga yang bisa didapat dari internet seperti informasi pendidikan, pelajaran sekolah, kesehatan, cara mendidik anak, berbagai tutorial yang bermanfaat untuk ibu-ibu rumah tangga. Konten media sosial diantaranya; user generated conten, podcast, livestreaming in facebook, dan infografis (Coach, 2018). Hal ini disebabkan ibu-ibu tersebut belum mengetahui literasi digital sehingga konten-konten baru belum diketahui. Dengan demikian perlu melakukan pendidikan literasi media bagi ibu-ibu rumah tangga. Seperti yang dikatakan oleh Yoram Eshet-Alkalai Penggunaan literasi sinkronik dengan teks digital tidak terbatas pada anak-anak saja, tetapi juga dapat ditemukan di bidang pelatihan orang dewasa. Ini ditunjukkan dalam berbagai program komputer untuk mempelajari keterampilan mengetik. Dalam program ini, peserta didik bekerja di lingkungan digital sinkronis: Mereka diminta mengetik teks yang diproyeksikan pada monitor. Sementaramengetik, mereka melihat aksinya menyala pada keyboard yang disimulasikan, dan umpan balik audio otomatis memberi tahu mereka tentang kesalahan (lihat contoh di:

http://www.21stsoftware.com/SS_Typing.htm).

Dalam sebuah penelitian tentang literasi digital yang dilakukan dalam kelompok usia campuran, Eshet (2002) menemukan bahwa literasi foto-visual orang dewasa, sebagaimana diwakili oleh kemampuan mereka untuk memecahkan kode antarmuka pengguna grafis, jauh lebih rendah daripada peserta yang lebih muda.(Eshet, 2004).

Table 6. peraturan penggunaan smartphone dalam keluarga

Aturan	jumlah
Ada	5
Tidak ada	15

Peneliti mengidentifikasi dengan pertanyaan adakah semacam peraturan yang disepakati dalam keluarga Ibu-ibu untuk menggunakan/tidak menggunakan Smartphone? Yang menjawab ya lima orang dan yang menjawab tidak 15 orang. Peraturan dalam menggunakan smartphone di keluarga masih banyak belum diterapkan. Perautaran bisa berupa batasan waktu menggunakan smartphone, saat makan bersama, hindari menjawab telpon dan pesan, saat menikmati waktu bersama anak hindari mengecek handphone, dan batasi penggunaan handphone (Fimela.com, 2018). Ibu-ibu memanfaatkan smartphone sebagai alat komunikasi. Komunikasi dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan relasi kerja. Namun ibu-ibu belum mengetahui bahwa apa yang telah dishare akan memviral. Pemahaman menshare informasi secara berhati-hati belum diketahui. Kehati-hatian dalam menshare berita atau informasi menjadi penting.

Table 7. Penggunaan Akun Media Social

cKode	account	person
A	facebook	2
B	twitter	0
C	instagram	1
D	who doesn't answer	9
F	Google +	5
G	Path	0
H	LinkedIn	0

Penggunaan akun media social ibu-ibu rumah tangga di desa Maguwoharjo, Yogyakarta masih kurang. Tidak satupun ibu-ibu yang menggunakan twitter, path dan linkedIn. Bahkan ada sembilan orang yang tidak menjawab, ini berarti tidak menggunakan media social sama sekali. Facebook dua orang, Instagram satu orang, dan google+ lima orang. Ketika peneliti melakukan wawancara dengan ibu-ibu rumah tangga, mereka mengatakan bahwa anak-anak mereka lebih pandai menggunakan smartphone dari pada mereka. Bahkan anak-anak dari ibu-ibu tersebut telah menggunakan akun-akun media social dengan lancar. Ibu-ibu tidak bisa memantau konten-konten apa saja yang telah dikonsumsi oleh anak-anak mereka. Durasi waktu penggunaan internet pada anak kurang dikontrol. Interaksi bermain dengan teman-teman sepulang sekolah menjadi berkurang. Anak-anak lebih pandai menggunakan smartphone dari pada ibu-ibunya, sehingga Ibu-ibu meminta bantuan anak-anaknya untuk mencari informasi-informasi atau berita-berita yang mereka butuhkan. Seperti resep masakan, informasi kesehatan, aplikasi taxi online, keagamaan, berita terkini, dan lain-lain.

Table 8. Group/Komunitas Virtual Di Media Sosial

Virtual Group / Community on Social Media	jumlah
Ada	13
Tidak ada	7

Dari 20 nara sumber, yang menjawab memiliki grup atau komunitas di media social ada 13 orang. tujuh orang tidak memiliki grup atau komunitas di media social. Grup atau komunitas di media social sebagai wahana komunikasi dan interaksi di dunia maya. Informasi-informasi menjadi sangat cepat dan mudah manakala seseorang memiliki grup. Fungsi grup atau komunitas media social diantaranya; untuk bersosialisasi, mempertemukan dengan teman lama, mendapatkan teman baru, menghibur, menyalurkan hobi, berbagai macam informasi terbaru, untuk meminta bantuan, mencari uang dengan berjualan(Yana, 2015).

Table 9. Aktivitas komunikasi melalui internet

Pilihan aktivitas	kode	personil
Komunikasi internet (skype, chatrooms, instant messanging)	A	3
Mengirim dan menerima emails	B	1
Streaming video and music	C	
Television web	D	
Radio web	E	
Bermain game on line	F	
Penjelajahan web (mencari informasi termasuk barang atau jasa)Siapa yang menjawab	G	
Melamar pekerjaan	H	
Download files (video, audio, images, reading material, applications)	I	1
Layanan perbankan	J	
E-learning	K	
Layanan pemerintah (mis. Paspor, pajak, kesehatan, dll.)	L	
Lainnya: buka google dalam membantu anak-anak mengerjakan pekerjaan rumah	M	1
tidak menjawab		7
Menjawab	A, G	1
Menjawab	C, G	1
Menjawab	A, B	1
Menjawab	A, F	1

Aktivitas ibu-ibu melalui internet masih sangat rendah. Yang melakukan Komunikasi melalui internet (skype, chatrooms, instant messanging) hanya 1 orang dari total 20 orang. Yang menjawab Mengunduh file (video, audio, gambar, bahan baca, aplikasi) hanya 1 orang. Yang menjawab lainnya seperti membuka google dalam membantu anak mengerjakan PR hanya 1 orang. Sementara yang tidak menjawab sama sekali sebanyak 7 orang, ini artinya sebagian besar ibu-ibu rumah tangga desa Maguwoharjo, Yogyakarta tidak melakukan aktivitas apapun melalui internet. Ada pula yang menjawab kombinasi, itupun masing-masing jawaban hanya 1 orang saja. Aplikasi yang paling banyak digunakan adalah whatsapp.

SIMPULAN

Delapan macam identifikasi mengenai kemampuan literasi media digital pada ibu-ibu Rumah tangga di desa Maguwoharjo, Yogyakarta memaparkan bahwa tingkat penggunaan media digital dalam hal ini smartphone masih rendah. Rendahnya tingkat literasi media digital ini disebabkan diantaranya; pertama, factor pendidikan yang masih rendah. Ada beberapa ibu-ibu yang hanya sampai pendidikan sekolah dasar. Pendidikan rendah berkorelasi pada kephahaman dalam menggunakan smartphone. Kedua, factor ekonomi rendah. Factor ekonomi ini bisa dilihat dari pekerjaan ibu-ibu sebagai buruh dan petani penggarap dimana

penghasilannya masih tergolong rendah. Masih ada ibu-ibu yang belum memiliki smartphone sendiri. Penggunaan satu smartphone untuk bersama dalam keluarga, sehingga keleluasaan penggunaan smartphone menjadi berkurang. Ketidakmampuan untuk membeli smartphone secara sendiri sehingga menyebabkan rendahnya kemampuan menggunakan smartphone. Ketiga, anak-anak lebih pandai dalam menggunakan smartphone dari pada ibu-ibu mereka. Hal ini menyebabkan anak-anak kurang mendapat control dari ibu-ibu mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kemenristekdikti yang telah memberikan bantuan dana melalui skim Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi, serta LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta yang telah mengkoordinir penelitian dan membantu publikasi ilmiah hasil riset.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspen institute. (1992). Aspen Institute Report of the National Leadership Conference on Media Literacy | Center for Media Literacy | Empowerment through Education | CML MediaLit Kit TM |. Retrieved July 12, 2019, from <https://www.medialit.org/reading-room/aspen-institute-report-national-leadership-conference-media-literacy>
- Baran, Stanley and Dennis K Davis. 2000. Mass communication theory. Wadsworth: Canada
- BeritaSatu.com. (2019). Penetrasi Smartphone di Indonesia Masih Rendah. Retrieved July 12, 2019, from [beritasatu.com website: https://www.beritasatu.com/digital/536846/penetrasi-smartphone-di-indonesia-masih-rendah](https://www.beritasatu.com/digital/536846/penetrasi-smartphone-di-indonesia-masih-rendah)
- Coach, B. (2018, July 30). KONTEN DAN KONTEN MEDIA DI ERA TEKNOLOGI DIGITAL. Retrieved July 12, 2019, from [Billionaire Coach website: https://billionairecoach.co.id/marketing/konten-dan-konten-media-di-era-teknologi-digital](https://billionairecoach.co.id/marketing/konten-dan-konten-media-di-era-teknologi-digital)
- dua, P. (2018, December 15). Media Sosial : Pengertian, Ciri-Ciri dan Fungsinya Menurut Para Ahli Lengkap. Retrieved July 12, 2019, from [MateriSekolah.Co.Id website: https://materisekolah.co.id/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli-lengkap/](https://materisekolah.co.id/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli-lengkap/)
- Earnshaw, R., & Vince, J. (2007). Digital Convergence - Libraries of the Future. Springer Science & Business Media.
- Eshet, Y. (2004). Digital Literacy: A Conceptual Framework for Survival Skills in the Digital era. *Journal of Educational Multimedia and Hypermedia*, 13(1), 93–106.
- Fimela.com. (2018). Aturan Screen Time Bagi OrangTua, Yuk Menjadi Role Model untuk Si Kecil. Retrieved July 12, 2019, from [fimela.com website: https://www.fimela.com/parenting/read/3809238/aturan-screen-time-bagi-orangtua-yuk-menjadi-role-model-untuk-si-kecil](https://www.fimela.com/parenting/read/3809238/aturan-screen-time-bagi-orangtua-yuk-menjadi-role-model-untuk-si-kecil)
- Heru. (2017, October 14). 20 Dampak Negatif Dari Media Sosial. Retrieved July 13, 2019, from [PakarKomunikasi.com website: https://pakarkomunikasi.com/dampak-negatif-dari-media-sosial](https://pakarkomunikasi.com/dampak-negatif-dari-media-sosial)
- IDCloudHost, M. (2018, May 27). Dampak Positif Dan Negatif Dari Penggunaan Media Sosial. Retrieved July 11, 2019, from [IDCloudHost website: https://idcloudhost.com/dampak-positif-dan-negatif-dari-penggunaan-media-sosial/](https://idcloudhost.com/dampak-positif-dan-negatif-dari-penggunaan-media-sosial/)
- Knobel, M. (2008). *Digital Literacies: Concepts, Policies and Practices*. Peter Lang.
- Kompasiana.com. (2016). Yogyakarta, Indonesia sebagai Kota Pendidikan: Antara Jargon dan Realita. Retrieved July 11, 2019, from [KOMPASIANA website: https://kompasiana.com](https://kompasiana.com)

- <https://www.kompasiana.com/bastianwidyatama/56d17c1ad17a61e23c15e0f0/Yogyakarta, Indonesia-sebagai-kota-pendidikan-antara-jargon-dan-realita>
- Neuman, W Lawrence. 2000. *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches*. fourth edition. Boston : Allyn and Bacon.
- Novianti, D., & Fatonah, S. (2018). Literasi Media Digital di Lingkungan Ibu-Ibu Rumah Tangga di Yogyakarta, Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 16(1). Retrieved from <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/2678>
- Program Kerja. (2011, November 15). Retrieved July 12, 2019, from Dharma Wanita Persatuan website: <http://dwpprovdkj.org/program-kerja/>
- Sutopo, HB. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS PRESS
- Yana, Y. (2015, February 12). 10 Manfaat Sosial Media di Berbagai Bidang. Retrieved July 12, 2019, from Manfaat.co.id website: <https://manfaat.co.id/10-manfaat-sosial-media-di-berbagai-bidang>

PEMAHAMAN PERANGKAT DESA TERHADAP ASPEK PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN BANTUL

Dwi Sudaryati, Sucahyo Heriningsih, Lita Yulita Fitriyani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN "Veteran" Yogyakarta

dwi.sudaryati@upnyk.ac.id, heriningsih_s@yahoo.com, lita.yulita@upnyk.ac.id

Abstract

The Central Government's policy on the transfer of Village Funds continues to increase significantly, this is a potential tax cut and collection. Law No. 6 of 2014 concerning Villages (Village Law) makes the role of village officials, very important to regulate and manage village finances, including the taxation aspects. However, village apparatus do not fully understand and understand aspects of taxation in village financial management. This study aims to determine the understanding of village apparatus on tax aspects in village financial management, which includes tax collection and deduction. This research was conducted in villages in Bantul Regency which had BUMDes in accordance with data from the Ministry of Home Affairs (Prodeskel) of 35 villages. Respondents in this study are village apparatus involved in village financial management, including village heads, village secretaries, and village treasurers. This study uses primary data in the form of questionnaires and interviews. The results showed that village apparatus in Bantul Regency fully understand the implementation of taxation aspects in village financial management.

Keywords: Taxation Aspects, Village Financial Management and Village Officials

PENDAHULUAN

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta dapat meminimalisir permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya. UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Dana Desa yang diperoleh oleh setiap pemerintah desa yang cukup besar, tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadi penyelewengan. Kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Pemerintah Desa harus mampu prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua kegiatan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan. Dalam Pengelolaan Keuangan Desa juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 yang diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 menyatakan bahwa Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan

pajak terhadap pengeluaran kas Desa dan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa termasuk dalam urusan pajak.

Beberapa penelitian terkait pemahaman aspek perpajakan desa antara lain penelitian Subandi dan Fadil (2018), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan pajak, pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak Bendahara Desa di Kota Batu. Penelitian Sakina (2017) tentang pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh bendahara desa dalam pengelolaan dana desa ditinjau dari asas kepatuhan di Kecamatan Berbah, Sleman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban bendahara desa di Kecamatan Berbah, Sleman belum memenuhi kepatuhan materiil dan formil karena banyak hambatan, seperti faktor internal dari pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa, peran fiskus yang hanya memberitahukan jatuh tempo pembayaran pajak dan pelaporan pajak ke bendahara desa tanpa sosialisasi lebih lanjut dan beberapa faktor lainnya. Penelitian tentang perpajakan di daerah juga dilakukan oleh Alabede, et.al., (2011), Djawadi, et.al (2013), Huda, dkk (2018), Kiow, et. al. (2017) dan Syaifullah (2015). Hasil penelitian Syaifullah (2015), menunjukkan bahwa aparat desa Sungai Ambawang belum sepenuhnya memahami dan memahami pelaksanaan akuntansi desa dalam hal ini dari: (1) Administrasi, (2) Pelaporan dan (3) Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana desa terkait dengan implementasi UU No. 6 tahun 2014. Penelitian ini didasarkan pada fenomena yang peneliti simpulkan bahwa belum sepenuhnya perangkat desa mengetahui dan memahami akuntansi desa dalam implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014. Penelitian Indrianasari (2018) tentang Implementasi Perpajakan Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Pada Desa Kutorenom Kecamatan Sukodono) menunjukkan bahwa pengenaan pajak dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 belum sepenuhnya dilaksanakan di Kutorenon-Sukodono.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten yang terbaik dalam mengelola dana desa. Pengelolaan dana desa yang baik diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, termasuk didalamnya aspek perpajakan. Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman aparatur desa terhadap aspek perpajakan dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bantul, sehingga pemerintah desa dapat memanfaatkan sumber daya manusia aparatur desa dalam hal pengelolaan aspek pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

- Teori Agency

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principals dan agents. Pihak principals adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agent, untuk melakukan semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Mecking, 1976). Pada pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud principal adalah rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- **Pemahaman Aparatur Desa**

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses pembuatan cara memahami (Em Zul, Fajri & Ratu Aprilia Senja, 2008). Beberapa jenis pemahaman menurut Sumarno (2010) yaitu : (1) Polya, membedakan empat jenis pemahaman : Pemahaman mekanikal, yaitu dapat mengingat dan menerapkan sesuatu secara rutin atau perhitungan sederhana; Pemahaman induktif, yaitu dapat mencobakan sesuatu dalam kasus sederhana dan tahu bahwa sesuatu itu berlaku dalam kasus serupa; Pemahaman rasional, yaitu dapat membuktikan kebenaran sesuatu; dan Pemahaman intuitif, yaitu dapat memperkirakan kebenaran sesuatu tanpa ragu-ragu, sebelum menganalisis secara analitik. (2) Polattsek, membedakan dua jenis pemahaman: Pemahaman komputasional, yaitu dapat menerapkan sesuatu pada perhitungan rutin/ sederhana, atau mengerjakan sesuatu secara algoritmik saja; Pemahaman fungsional, yaitu dapat mengkaitkan sesuatu dengan hal lainnya secara benar dan menyadari proses yang dilakukan. (3) Copeland, membedakan dua jenis pemahaman : Knowing how to, yaitu dapat mengerjakan sesuatu secara rutin; Knowing, yaitu dapat mengerjakan sesuatu dengan sadar akan proses yang dikerjakan. (4) Skemp, membedakan dua jenis pemahaman: Pemahaman instrumental, yaitu hafal sesuatu secara terpisah atau dapat menerapkan sesuatu pada perhitungan rutin/ sederhana; Pemahaman relasional, yaitu dapat mengkaitkan sesuatu dengan hal lainnya secara benar dan menyadari proses yang dilakukan.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota (UU No.6 Tahun 2014). Menurut Pasal 49 UU No.6 Tahun 2014, Perangkat Desa/aparatur desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, Pemahaman aparatur desa adalah sejauhmana aparatur desa (orang yang meenyelenggarakan pengelolaan keuangan desa) mengerti atau dapat menjawab pertanyaan tentang apa, mengapa, bagaimana aspek perpajakan dilaksanakan di desa.

- **Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan mulai berlaku sejak tanggal 8 Mei 2018. Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pasal 2 Permendagri No.20 Tahun 2018 menyebutkan Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan demikian Pengelolaan Keuangan Desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung diantaranya oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai. Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pasal 30 Permendagri No.20 Tahun 2018 menyebutkan Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan Basis Kas. Basis Kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa. Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

- **Aspek Perpajakan**

Menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo, (2013) : “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” Ada minimal dua tujuan atau fungsi pajak yang dikemukakan Suandy (2016) yaitu :

- Fungsi Budgetair / Financial, yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
- Fungsi Regulerend / Fungsi Mengatur, yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.
- Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, pasal 58 ayat 1 sampai 4 mengatur tentang aspek perpajakan desa yang antara lain:
- Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa.
- Pemotongan pajak meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemotong pajak adalah istilah yang digunakan pemungut pajak penghasilan Pemotong pajak dan pemungut pajak merupakan istilah yang berbeda. Pemotong pajak digunakan untuk PPh Pasal 21 dan 23, sedangkan pemungut pajak digunakan untuk PPN dan PPh Pasal 22. Misal pengeluaran untuk gaji, upah, honorarium (imbalan kerja atau jasa) sewa, bunga, dividen, royalti (imbalan penggunaan harta atas modal). Bendahara diwajibkan untuk memotong PPh atas pembayaran terhadap penerima. Jenis-jenis PPh, ada PPh perorangan (PPh 21) dan PPh badan (PPh 23).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan terhadap penyerahan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak oleh pengusaha. Prinsip dasar cara pemungutan PPN adalah penjual atau pengusaha kena pajak (PKP) memungut pajak dari si pembeli. Pembeli pada waktu menjual memungut PPN terhadap pembeli berikutnya. Penjual atau PKP wajib menerbitkan faktur pajak minimal dua rangkap. Lembar kedua untuk PKP penjual namanya pajak. Keluaran dan lembar pertama untuk PKP pembeli—namanya Pajak Masukan. Tarif PPN pada umumnya adalah 10 % (sepuluh persen) dari harga jual selanjutnya yang harus dibayar oleh pembeli adalah 110 % (seratus sepuluh persen).

Setiap penerimaan dan pengeluaran pajak dicatat oleh bendahara dalam Buku Pembantu Kas Pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bersifat objektif. Penelitian ini dilakukan di desa di Kabupaten Bantul yang memiliki BUMDes sesuai dengan data dari Kemendagri (Prodeskel) sejumlah 35 desa. Responden dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa, antara lain Kepala desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan Desa. Objek penelitian ini adalah Aspek Perpajakan dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik non random sampling, yakni tidak memberikan kesempatan yang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara, dan kuesioner. Dalam wawancara penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh data, karena peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis untuk datanya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 105 ke responden. Jumlah tersebut berasal dari 35 desa yang tersebar di Kabupaten Bantul yang memiliki BUMDes. Hal ini sebagai pertimbangan dalam penelitian ini sebab desa yang memiliki BUMDes tentu harus mampu mengelola keuangan desanya dengan baik termasuk aspek perpajakannya. Setiap desa diberikan tiga kuisisioner, yaitu untuk perangkat yang berfungsi sebagai lain Kepala desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan Desa. Pengembalian kembali dari kuisisioner tersebut berjumlah 100%. Hal ini dikarenakan peneliti memberikan langsung kuisisioner tersebut dan menunggu hasil kuisisioner tersebut diselesaikan. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan informasi mengenai responden. Informasi tersebut meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, dan pengalaman penyuluhan pajak. Dari 105 kuisisioner yang ada, jenis kelamin dari responden adalah, 52 orang berkelamin perempuan dan 53 responden berjenis kelamin laki-laki. Umur responden berkisar dari 40 tahun sampai dengan 49 tahun. Rata-rata pendidikan terakhir dari responden adalah D3 dan mayoritas adalah SMA.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa hampir 90% responden menjawab “sudah pernah” mendapatkan sosialisasi tentang pajak desa. Data penelitian juga menunjukkan bahwa rata-rata responden sudah mendapatkan sosialisasi tentang pajak desa sebanyak 3 kali, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten maupun oleh Kantor Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat desa sudah mendapatkan pengertian, informasi dan pembinaan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan desa dan perundang-undangan yang berlaku didalamnya. Dengan demikian, perangkat desa sudah memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Menurut Sudrajat (2015) sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Penelitian Jannah (2016) juga membuktikan bahwa sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan.

Pemahaman perangkat desa tentang aspek perpajakan dapat dilihat dari 2 hal yaitu kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh desa dan pengetahuan tentang jenis-jenis pajak yang boleh dipungut oleh desa. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan memerlukan pemahaman terkait kewajiban perpajakan. Berikut tabel 3.1 menampilkan data tentang pemahaman kewajiban perpajakan desa.

Tabel 3.1 Pemahaman Kewajiban Perpajakan

NO	Pemahaman Kewajiban Perpajakan	STP	TP	P	SP
1	PPKD sebagai pemotong dan atau pemungut pajak harus mempunyai NPWP.	0%	1,0%	49,5%	49,5%
2	PPKD melakukan pemotongan dan atau pemungutan atas transaksi yang terjadi	6,7%	1,9%	54,3%	37,1%
3	PPKD menyetorkan pajak yang telah dipotong dan atau dipungut ke kas negara	0%	1,9%	35,2%	62,9%
4	PPKD melaporkan pemotongan dan atau pemungutan pajak ke KPP tempat bendahara terdaftar	0%	2,9%	61,0%	36,2%
5	PPKD memberikan bukti potong/pungut kepada pihak yang dipotong atau dipungut	1,0%	0%	57,1%	41,9%

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa mayoritas responden yang merupakan perangkat desa, sudah memahami kewajiban perpajakan desa. Hal ini terlihat dari jumlah rata responden yang menjawab paham (P) sebanyak 51,42% dan sangat paham (SP) sebanyak 45,52%. Dengan demikian bahwa perangkat desa dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, akan berlaku sebagai pemotong pajak dan/atau pemungut pajak. Pemotongan pajak dan/atau pemungutan pajak akan dilakukan oleh PPKD atas transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan dan pemungutan. Walaupun demikian, masih ada beberapa perangkat desa yang masih tidak paham tentang kewajiban perpajakan desa. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa perangkat desa masih memiliki masa kerja dibawah 1 tahun, sehingga yang bersangkutan masih dalam proses pemahaman implementasi peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel 3.2 Pemahaman Jenis Pajak

NO	Pemahaman Jenis Pajak yang dipungut	STP	TP	P	SP
1	PPH Pasal 21 merupakan Pajak yang dipotong atas pembayaran berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain yang diterima oleh Orang Pribadi.	0%	6,7%	59,0%	34,3%
2.	PPH Pasal 22 adalah Pajak yang dipungut dari Pengusaha/Toko atas pembayaran atas pembelian barang dengan nilai pembelian diatas Rp. 2.000.000,- tidak terpecah-pecah. Tarifnya adalah 1,5% jika rekanan ber-NPWP, jika belum punya NPWP dipungut 3% atau 100% lebih tinggi.	0%	3,8%	61,9%	34,3%
3	PPH Pasal 23 adalah Pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima rekanan atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan atau bangunan), serta imbalan jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultan dan jasa lain. Tarifnya untuk penghasilan atas jasa adalah 2% jika rekanan ber-NPWP, jika belum punya NPWP dipungut 4% atau 100% lebih tinggi.	0%	1,0%	65,7%	33,3%

4	PPh Pasal 4 ayat 2, Pajak yang dipotong atas pembayaran : Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (Tarif 5%) Persewaan tanah dan atau bangunan (tarif 10%) Jasa Konstruksi (perencana, pelaksana, pengawas konstruksi)	0%	4,8%	76,2%	19,0%
5	Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pemungutan atas pembelian Barang/ Jasa Kena Pajak yang jumlahnya diatas Rp. 1.000.000,- tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.serta rekanan harus sudah PKP dan sudah mempunyai nomor seri faktur pajak.	0%	1,0%	69,5%	29,5%

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa rata-rata responden menjawab sangat tidak paham (STP) 0%, tidak paham (TP) 3,46%, paham (P) sebanyak 66,46% dan sangat paham (SP) sebanyak 30,08%. Hal ini berarti perangkat desa memahami aspek perpajakan terkait pengelolaan APBN/APBD yang ditanganinya termasuk jenis-jenis pajak yang dipungut oleh desa. Oleh karena itu, selain tanggung jawab pemanfaatan/pengeluaran dana untuk pembangunan desa, aparatur desa memiliki tanggung jawab juga untuk mengamankan penerimaan negara melalui pemungutan/pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Potensi perpajakan yang ada di desa sangat bervariasi, tergantung dari jenis transaksi yang merupakan obyek pajak, atau transaksi atas pengadaan barang/jasa yang dapat dikenakan pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Perangkat desa di Kabupaten Bantul sudah memiliki pemahaman yang baik tentang aspek perpajakan dalam pengelolaan keuangan desa. Desa yang memiliki BUMDes sudah bisa melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik. Pemahaman tentang pajak yang sangat penting bagi perangkat desa, perlu ditingkatkan lagi seiring dengan perkembangan transaksi ekonomi yang terjadi di desa. Adanya belanja barang dan jasa dari desa, akan memberikan dampak ekonomi di pedesaan dan meningkatkan omzet para pelaku usaha, sehingga akan meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan penerimaan pajak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis sampaikan kepada Kemenristek Dikti, LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta dan semua pihak yang telah berperan serta dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alabede, James O.; Zaimah Bt. Zainol Ariffin and Kamil Md Idris. 2011. Determinants of Tax Compliance Behaviour: A Proposed Model for Nigeria International Research Journal of Finance and Economics ISSN 1450-2887 Issue 78 (2011) © EuroJournals Publishing, Inc. <http://www.internationalresearchjournaloffinanceandconomics.com>
- Djawadi, Behnud Mir; Fahr, René (2013) : The impact of tax knowledge and budget spending influence on tax compliance, IZA Discussion Papers, No. 7255, Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn.
- EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja. 2008. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Edisi Revisi, Cet.3., Semarang: Difa Publishers.

- Huda, Mokhamad Khoirul; Agus Yudha Hernoko and Ninis Nugraheni. 2018. The Problematic of Provincial Tax Collection as Local Own-source Revenue in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* (Print ISSN: 1544-0036; Online ISSN: 1544-0044).
- Indrianasari, Neny Tri. 2018. Implementasi Perpajakan Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Pada Desa Kutorenom Kecamatan Sukodono). *ASSETS : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*. Vol 2 No 2 (2018): Juli 2018 E-ISSN : 2598-6074, P-ISSN : 2598-2885.
- Jannah, Shofuro Zahrotul. 2016. "Pengaruh Pengetahuan, Penghasilan, Manfaat Atas NPWP, Sanksi, dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP (Studi Di KPP Pratama Surakarta)". Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Kiow, Tan Swee ; Mohd Fuad Mohd Salleh and Aza Azlina Bt Md Kassim. 2017. The Determinants of Individual Taxpayers' Tax Compliance Behaviour in Peninsular Malaysia. *International Business and Accounting Research Journal* Volume 1, Issue 1, February 2017, 26-43. <http://ibarj.com>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Sakina, Sesty Milla. 2017. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Oleh Bendahara Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Ditinjau dari Asas Kepatuhan Di Kecamatan Berbah, Sleman. Universitas Gadjah Mada
- Subandi, Hendi dan Mohamad Irvanuddin Ibnu Fadhil. 2018. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kota Batu. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 03, No. 01 (2018): 1-16
- Syaifullah, Muhammad. 2015. Understanding of Village Apparatus on Implementation Accounting Villages. *International Journal of Science and Research (IJSR) ISSN (Online): 2319-7064 Index Copernicus Value (2015): 78.96 | Impact Factor (2015): 6.391*
- Suandy, Erly. 2016. *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta : Salemba Empat
- Sudrajat, Ajat, dan Arles Parulian Ompusunggu. 2015. "Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak". *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP*, Vol. 2, No. 2, Desember 2015.
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wahyudi, H. 2017. Efek mediasi kepatuhan wajib pajak pada pengaruh pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 1(1), 29-38. DOI: 10.5281/zenodo.1098485.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

UPAYA DIPLOMASI PERBATASAN INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN PERSOALAN PERBATASAN DI TANJUNG DATU, KALIMANTAN BARAT

Iva Rachmawati , Machya Astuti Dewi

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, UPN 'Veteran' Yogyakarta
iva.rachma@gmail.com , machya@upnyk.ac.id

Abstract

This article intends to review the efforts of border diplomacy undertaken by Indonesia in maintaining the Indonesia-Malaysia border in Tanjung Datu, Paloh Subdistrict, Sambas Regency, West Kalimantan. Tanjung Datu is one of the Indonesia-Malaysia borders which still leaves obstacles because at the Tanjung Datu border in Camar Bula, Malaysia no longer recognizes it as part of the OBP or the Outstanding Boundary Problems. While at the Tanjung Datu border in Gosong Niger, it still leaves concern because there are some efforts made by Malaysia to change the country's borders. Both the border in Gosong Niger and in Camar Bulan, both of which have raised issues that affect good relations between the two countries. Through a qualitative approach based on direct observation study, documentation and in-depth interviews with several parties related to Indonesian border diplomacy, this article suggests that border diplomacy conducted by Indonesia does not involve many important actors at the subnational level related to the implementation of border diplomacy. Some miscommunications and misinformation took place so that Indonesia's border diplomacy was not carried out optimally.

Keywords: Border Diplomacy, Camar Bulan, Gosong Niger, Subnational Actors.

PENDAHULUAN

Perbatasan Tanjung Datu merupakan perbatasan Indonesia yang terletak pada ujung utara Kalimantan Barat. Perbatasan ini masih menyisakan persoalan dengan munculnya sejumlah isu aneksasi teritori Indonesia oleh Malaysia beberapa waktu lalu. Baik isu Camar Bulan maupun Gosong Niger, keduanya selalu memicu hubungan yang tidak harmonis antara Indonesia dan Malaysia. Isu Camar Bulan pertama di singgung oleh seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat, TB Hasanudin, yang menyampaikan bahwa Malaysia mencaplok wilayah Indonesia. Pernyataan ini menjadi isu yang relatif panas antara Indonesia dan Malaysia pada waktu itu. Dia mengatakan bahwa Malaysia telah mengambil 1400 hektar wilayah Indonesia di Camar Bulan dan 80.000 m² di Tanjung Datu (Gultom, 2001). Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, juga menyatakan bahwa 1440 hektar wilayah Indonesia masuk ke wilayah Malaysia karena Malaysia mengabaikan nomor wilayah A88-A156, yang menjadi milik Kabupaten Paloh. Dia mengakui bahwa dia telah mendapatkan informasi bahwa Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) harus memasukkan Camar Bulan ke wilayah Malaysia. Dia dengan paksa meminta ini tidak ditandatangani karena sangat merugikan Indonesia, terutama wilayah administrasi Kalimantan Barat (Suara Pembaruan 11 Oktober 2011).

Sementara itu, isu Gosong Niger yang menyeruak di tahun 2005 dapat dilihat sebagai upaya Malaysia dalam melakukan penguasaan efektif (effective occupation) atas Gosong Niger.

Upaya effective occupation Malaysia atas Gosong Niger adalah dengan menyebutnya sebagai wilayah konservasi alam milik Malaysia dan Malaysia pun telah menetapkan wilayah tersebut sebagai taman nasional laut milik Malaysia. Atas dasar berita tersebut, pemerintah Indonesia melakukan peninjauan secara langsung di Gosong Niger. Namun, kapal yang digunakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan survei justru dihadang oleh Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM). Mereka hanya diizinkan untuk melihat kawasan Gosong Niger dari luar apung yang dibangun saat masa penjajahan Belanda. Pada tahun 2014, persoalan di Gosong Niger pun mencuat kembali dengan didirikannya sebuah mercusuar oleh Malaysia di titik koordinat 02.05.053 N-109.38.370 E Bujur Timur, atau sekitar 900 meter di depan patok SRTP 1 (patok 01) di Tanjung Datu, Kalimantan Barat. TNI segera mengirimkan KRI Sutedi Senoputra (SSA) Lambung 378 dan pesawat angkut yang terdiri dari Kodam dan pasukan Angkatan Laut (AL) untuk menghentikan aktivitas tersebut karena tindakan tersebut tergolong illegal ([Sucipto 2014](#)).

Berulangnya persoalan di Tanjung Datu menjadi alasan ditulisnya rtikel ini guna mengetahui diplomasi perbatasan yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam mengelola wilayah perbatasannya.

KAJIAN TEORITIK

Kajian mengenai diplomasi perbatasan masih sangat sedikit dilakukan oleh sejumlah akademisi. Hal ini menyebabkan sedikit kesulitan untuk mengukur sejauhmana sebuah diplomasi publik diselenggarakan oleh negara. Namun demikian, dengan merunut dari kajian dan konsep yang masih terbatas tersebut, pada sub bagian telaah mengenai konsep diplomasi perbatasan ini dapat dimulai untuk memahami diplomasi perbatasan dari asal katanya. Diplomasi sendiri merupakan seni dalam mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai dalam hubungannya dengan negara lain (Roy, 1999). Namun demikian ada juga yang berpendapat bahwa dalam rangka menyelenggarakan kepentingan nasional terhadap negara lain ini bukan hanya persoalan bagaimana kepentingan nasional itu diselenggarakan atau diupayakan melainkan diplomasi juga berbicara mengenai bagaimana kebijakan itu dibuat. Brian White (dalam Baylis dan Smith, 2001:325) menegaskan ini dengan mengatakan bahwa, diplomasi merupakan aktifitas pemerintah yang tidak hanya merupakan pembuatan kebijakan luar negeri tertentu, melainkan juga merupakan keseluruhan pembuatan kebijakan sekaligus pelaksanaannya. Sementara, perbatasan adalah garis yang membagi wilayah dimana negara dapat menyelenggarakan kedaulatan teritorialnya secara penuh. Perbatasan tidak hanya memisahkan wilayah yang dimiliki oleh komunitas yang berbeda tetapi juga memastikan keamanan masing-masing wilayah yang bersangkutan (Caflish, 2006).

Merujuk pada dua konsepsi tersebut, Oegroseno (2006) menyimpulkan bahwa diplomasi perbatasan adalah pelaksanaan politik luar negeri dalam rangka penanganan masalah perbatasan yang mencakup batas wilayah negara darat dan laut serta pengelolaan berbagai masalah perbatasan yang berdimensi internasional. Rachmawati dan Fauzan (2012) menguatkan bahwa diplomasi perbatasan merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk menjamin kedaulatannya. Upaya pemerintah dalam rangka menyelenggarakan diplomasi perbatasan ini tentunya tidak dapat kemudian hanya dilihat dari segi hukum dan keamanannya saja, melainkan juga harus dilihat dari segi sosial ekonominya. Sementara Djalal (2012) mencatat bahwa perbatasan negara meliputi darat, laut dan udara.

Secara lebih spesifik Henrikson (2000) menjelaskan bahwa diplomasi perbatasan merupakan upaya yang tidak saja dilakukan oleh negara tetapi juga aktor non negara untuk memelihara hubungan yang harmonis antara negara yang saling berbatasan. Diplomasi

perbatasan hanya mungkin diselenggarakan melalui apa yang disebutnya sebagai diplomasi *bon voisinage* atau *good neighborhood diplomacy*. Pertama, setiap negara harus secara sadar mengakui adanya persoalan penting dalam perbatasan negara. Dengan demikian, setiap negara saling memberikan perhatian yang penuh atas persoalan perbatasan negara. Kedua, setiap negara harus memiliki pengelolaan yang terorganisir dan undang-undang yang jelas mengenai batas negara. Dengan begitu, terdapat hubungan yang terkelola dengan baik mengenai perbatasan negara melalui insitusi-institusi tersebut. Ketiga, sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Friedrich Ratzel, bahwa batas negara adalah "organ periferal" dari suatu negara maka, sudah seharusnya pergesekan kepentingan mengenai perbatasan negara dihindari melalui manajemen bersama. Efektivitas sebagian besar hubungan lintas batas bilateral di seluruh dunia biasanya dapat diperkuat oleh bilateral, atau bahkan multilateral atau sistem kerja sama lintas batas.

Catatan penting dari Henrikson (2000:123) adalah diplomasi yang berfokus pada perbatasan harus mengoordinasikan kepentingan pusat dan pinggiran dalam mengelola batas negara. Dengan kata lain, baik dari pemerintah pusat maupun pinggiran, harus dapat menemukan penyesuaian dalam pengelolaan perbatasan terkait dengan kepentingan bersama dengan negara tetangga. Ide untuk melibatkan subnasional aktor ini datang dari Duchacek sebagai akademisi yang mengusulkan keterlibatan paradiplomasi dalam penyelenggaraan diplomasi perbatasan yaitu keterlibatan pemerintah daerah dalam hubungan internasional, melalui pembentukan kontak formal dan informal, bilateral atau multilateral, dengan pihak asing (Duchacek, 1990). Gagasan mengenai keterbukaan komunikasi telah memberikan dukungan yang signifikan kepada mereka untuk berkontribusi pada hubungan antar negara. Hak istimewa untuk melakukan perjanjian dan kerja sama antar negara tanpa kehadiran pemerintah pusat adalah pengakuan atas peran mereka (Bradsahaw 1998, Jordan dan Khanna.1995). Jumlah perjanjian dan kebijakan yang telah menjadi bagian dari yurisdiksi pemerintah daerah, menyatakan tingkat otonomi mereka mengenai pemerintah pusat (Martínez, 2018). Bahkan, Cornago mencatat bahwa mereka memiliki peran penting dalam isu politik dan keamanan antar negara. Dengan demikian, mereka tidak hanya memberi kontribusi penting dalam isu sosial dan ekonomi saja (Cornago, 2009, Sergounin 1999, Aranda dan Salinas 2017).

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan di perbatasan Indonesia yaitu di Dusun Camar Bulan dan Gosong Niger di Desa Temajok, Kabupaten Paloh, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia dengan menggunakan metode survei langsung dan metode wawancara mendalam terhadap sejumlah responden terkait. Mereka adalah pejabat lokal di Temajuk dan Dusun Camar Bulan. Wawancara mendalam juga dilakukan dengan perwira militer perbatasan dan petugas di Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah. Guna melengkapi analisa terhadap data maka studi literatur dan dokumen dipergunakan untuk melengkapi riset terhadap pengelolaan perbatasan Tanjung Datu ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Camar Bulan dan Gosong Niger di Tanjung Datu

Persoalan perbatasan Indonesia-Malaysia di Tanjung datu seringkali mengalami miskomunikasi. Hal ini terjadi karena pemahaman yang keliru mengenai apa yang disebut dengan perbatasan Tanjung Datu. Hal ini tidak saja terjadi pada pemahaman dan penyebutan yang dilakukan oleh media massa dan elit politik tetapi juga penyebutan oleh sejumlah

akademisi. Peta Tanjung Datu oleh M. Fatmasari (2018) yang dimuat dalam repository Universitas Hasanudin pada laman <http://repository.unpas.ac.id/33730/7/BAB%20III.pdf> menunjukkan sebuah peta dengan judul “Masalah Tanjung Datu” namun ia hanya merujuk pada enclave Camar Bulan. Demikian pula dengan tulisan Hadiwijoyo (2011), yang menunjuk enclave Camar Bulan sebagai konflik perbatasan Tanjung Datu. Sedangkan Mursito (2012) menyebutkan bahwa “ ... Penduduk yang berada di OBP Tanjung Datu tersebut adalah penduduk Desa Temajuk sebanyak 493 KK dan luas lebih kurang 4.750 Km² (jumlah penduduk kurang lebih 1.883 jiwa”. Hal yang sama juga disampaikan oleh Juru bicara Kemhan RI Hartind Asrin yang menyebutkan bahwa “Penduduk yang berada di OBP Tanjung Datu tersebut adalah penduduk Desa Temajuk sebanyak 493 KK dan luas lebih kurang 4.750 Km² (jumlah penduduk kurang lebih 1.883 jiwa) terdiri dari dua Dusun yaitu Dusun Camar Wulan dan Dusun Maludin,“(.”Pemerintah Bahas Perbatasan RI–Malaysia”. Merdeka.com <https://www.merdeka.com/politik/pemerintah-bahas-perbatasan-ri-malaysia.html>. Diakses Agustus 2019). Hal ini membingungkan masyarakat Camar Bulan dan birokrat lokal karena Tanjung Datu merupakan kawasan tidak berpenduduk karena merupakan kawasan hutan di dataran tinggi yang berada di ujung Kalimantan Barat (In-depth interview, Uray Willy, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Sambas, Sambas April 2019, Sambas, Maret 2019, In-depth Interview, Herlin, penduduk lokal, Camar Bulan, in Maret 2019).

Kesalahpahaman juga seringkali terjadi atas Gosong Niger yang terletak di ujung kawasan Tanjung Datu. Gosong Niger seringkali dipahami sebagai pulau oleh elit politik dan juga media (“Djoko Suyanto: Pulau Gosong Niger Masuk NKRI”. Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/news/read/123461/djoko-suyanto-pulau-gosong-niger-masuk-nkri>. Diakses Agustus 2019, “Soal Pulau Gosong Niger, RI akan Buat Suar Terapung”. DetikNews.com. <https://news.detik.com/berita/d-602028/soal-pulau-gosong-niger-ri-akan-buat-suar-terapung->. Diakses Agustus 2019), akibatnya seringkali terjadi kesalahan persepsi atas pengelolaan kawasan perbatasan yang juga termasuk dalam kawasan Tanjung Datu tersebut. Kesalahan-kesalahan pengertian semacam ini menjadi satu pekerjaan rumah tersendiri sesungguhnya bagi upaya diplomasi perbatasan negara karena kesalahpahaman dapat dengan mudah menimbulkan sentiment negatif di kedua negara.

Pelurusan pemahaman atas hal ini perlu dilakukan dengan merunut kembali konvensi yang menjadi dasar dari upaya untuk menarik garis batas antara Indonesia Malaysia saat ini. Pada dokumen yang disebut sebagai Traktat London 1891 menyebutkan bahwa perbatasan antara Inggris dan Belanda di Kalimantan Barat didasarkan atas watershed yang ditarik dari Pulau Sebatik dan berakhir di kawasan Tanjung Datu. Pada bagian utara watershed berada di bawah yurisdiksi Inggris dan kawasan yang berada di sebelah selatan watershed berada di bawah yurisdiksi Belanda.

“the boundary-line shall follow the watershed of the rivers running to the south-west and west coasts, north of Tanjung Datoe, and of those running to the west coast south of Tanjung Datoe, the south coast, and the east coast south of 4 ' 10^o north latitude” (Rizki dan Merdekawati 2016: 410).

Dari International Boundary Study (1965) Traktat London tersebut diterjemahkan merujuk pada apa yang telah diaplikasikan di lapangan. Studi ini juga tidak mempergunakan nama ‘Camar Bulan’ atau Gosong Niger melainkan Tanjung Datu yang terbentang dari Pulau Sebatik hingga Tanjung Datu.

The boundary starts on the east coast at latitude 4° 10' N. After the island of Sebatik is divided, the boundary crosses the waters between the island and the mainland in a sinuous line following the median of the Tamboe and Sikapal channels to the Sikapal range which

forms the water divide between the Serudong and Simengaris rivers. On the peak of Api mountain, the boundary returns to the water divide for an additional 78 miles northwestward and then northward to the South China Sea at Tanjung Datu (International Boundary Study 1965:7-8)

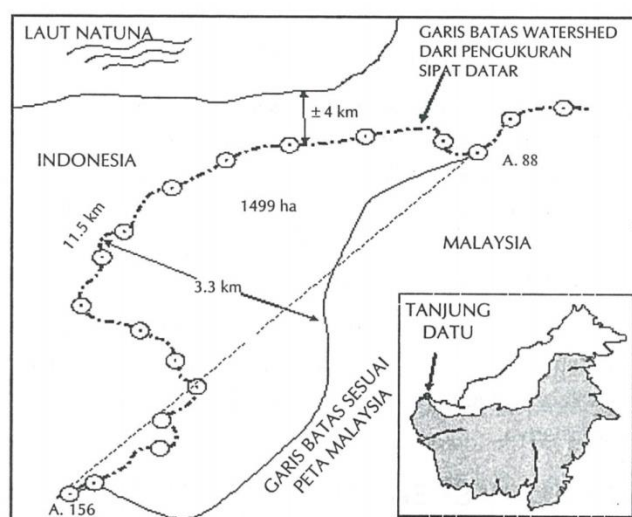
Dengan demikian, persoalan Tanjung Datu meliputi dua isu perbatasan yang seringkali muncul yaitu Enclave Camar Bulan dan Gosong Niger yang keduanya terletak di ujung Kalimantan Barat. Penyebutan tersebut harus diperjelas mengingat perkembangan penyelesaian antara Indonesia dan Malaysia masih terus berlangsung dengan lebih mendetail pada kawasan-kawasan tertentu. Traktat ini masih meninggalkan 10 OBP bagi Indonesia (masalah Camar Bulan yang sementara diterima pada tahun 2011 belum diratifikasi oleh DPR) dan 9 OBP bagi Malaysia (karena menganggap bahwa Camar Bulan telah selesai). Ketidakjelasan semacam ini seringkali mengakibatkan kekeliruan dan informasi yang tidak tepat bagi masyarakat umum yang tidak memahami persoalan perbatasan secara mendalam dan mengakibatkan sentiment negatif yang tidak perlu yang berdampak pada hubungan bilateral Indonesia Malaysia.

Camar Bulan dan Upaya Diplomasi Perbatasan

Kawasan yang sering disebut sebagai kaawasan konflik Camar Bulan sesungguhnya merupakan enclave seluas 1.499 ha yang terletak di Dusun Camar Bulan, Desa Tamajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Enclave ini terletak menjorok di wilayah Indonesia yang terbentang dari patok A. 88 hingga A. 156 (Lihat Gambar 1). Kawasan ini berupa lahan kosong tanpa penduduk dan bagi Malaysia kawasan ini diperuntukkan bagi hutan lindung. Pernyataan yang menyebutkan bahwa kawasan ini berpenduduk adalah sama sekali tidak benar. Namun demikian, lahan ini pernah dimanfaatkan sebagai area pertanian oleh sejumlah penduduk yang dikenal dengan Kelompok 31. Mereka menanam lada, karet, pisang dan sejumlah tanaman produktif lainnya pada kawasan tersebut dan seorang membuat rumah tinggal. Pada tahun 2017, pemerintah Sarawak meminta meninggalkan kawasan tersebut karena sesuai dengan MoU tahun 2011, enclave tersebut diakui sebagai milik Malaysia.

Sebagai bagian dari Traktat London 20 Juni 1891 yang ditandatangani 28 September 1915 Camar Bulan dan Gosong Niger telah melampaui sejumlah perjanjian demarkasi pasca kemerdekaan. Mengacu pada Direktorat Topografi Angkatan Darat, perjalanan penyelesaian perbatasan di Kalimantan Barat telah dilakukan sejak tahun 1973 hingga 2000 dengan menghasilkan 20.311 pilar termasuk di kawasan Tanjung Datu. Penyelesaian perbatasan telah melalui 3 tahap, yaitu pertama adalah adanya proses survey penentuan wilayah demarkasi pada tahun 1973 dimana disepakati oleh kedua negara untuk mempergunakan perjanjian antara Inggris dan Belanda. Tahapan selanjutnya adalah kedua negara melakukan survey bersama dari tahun 1973-1976 dengan mempergunakan metode watershed yang berhasil menyepakati sejumlah patok perbatasan dan membangun sejumlah pilar (pada Pasal 1 Memorandum of Understanding of Demarcation Survey of International Boundary between the Government of Indonesia and the Government of Malaysia 1976 yaitu:

- Pilar I : Titik patok A 98 sampai A 156
- Titik patok A 231 sampai C 1
- Titik patok G sampai H 1
- Pilar II : Titik patok D 001 sampai D 186
- Titik patok D 186 sampai D 300



Gambar 1. Camar Bulan (Sumber: Suryo Sakti Hadiwijoyo 2011.)

Setelah proses survey dilakukan oleh tim survey kedua negara secara bersama-sama maka kedua negara bersepakat untuk menetapkan patok dan selanjutnya menandatangani Memorandum of Understanding pada tahun 1976. Namun, pihak dari Indonesia meminta izin untuk menunda penandatanganan MoU dikarenakan tim survei dari Indonesia ingin kembali menindaklanjuti dan mempertimbangkan isi dari perjanjian perbatasan tersebut dikarenakan berdasarkan hasil dari proses survei demarkasi, ditemukan bahwa wilayah Malaysia lebih menjorok ke wilayah Indonesia. Setelah dipertimbangkan pada saat itu tidak adanya masalah yang akan mengganggu kepentingan Indonesia, masing-masing negara sepakat untuk menandatangani perjanjian perbatasan tersebut dua tahun kemudian yaitu pada 18 November 1978 di Semarang yang dituangkan pada Memorandum of Understanding of Demarcation Survey of International Boundary between the Government of Indonesia and the Government of Malaysia 1976.

Terkait dengan area Tanjung Datu sendiri, pertemuan Indonesia Malaysia diselenggarakan di Kinabalu untuk menyepakati perbatasan Tanjung Datu pada patok nomor A1-A98 pada tahun 1976. MoU kedua diselenggarakan pada tahun yang sama di Yogyakarta menyepakati patok A156 – A 231. Sedangkan MoU ketiga disepakati di Semarang pada tahun 1978 untuk patok A98-A156 (Enclave Camar Bulan tercatat berada pada patok A88-A156). Mengacu Rizki dan Merdekawati (2016) terdapat 221 penanda perbatasan yang membentang dari ujung Tanjung datu hingga Camar Bulan dengan berbagai kondisi. Ada yang sebagian masih cukup baik namun ada sebagian lain yang berada dalam kondisi yang kurang baik/rusak.

Setelah perjanjian tersebut berlaku sejak tahun 1978, pihak Indonesia sudah melakukan survei lanjutan mengenai patok-patok perbatasan pada tahun 1973 dan diulang kembali pada tahun 1976 dan tahun 1978 dengan hasil yang identik. Pada proses peninjauan kembali tersebut tim survei dari Indonesia masih dilakukan dengan orang-orang yang sama, yaitu staf yang melakukan survei pada saat proses demarkasi pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1978. Dalam hal ini proses peninjauan kembali demarkasi tidak ada masalah. Namun, pada saat melakukan survei lanjutan mengenai batas wilayah di Tanjung Datu pada tahun 2001, tim survei yang pada saat itu dilakukan dengan staf yang baru menemukan permasalahan. Permasalahan timbul dikarenakan titik garis wilayah perbatasan yang lebih menjorok ke Indonesia sehingga menguntungkan wilayah Malaysia. Titik garis tersebut

sebenarnya telah di survei pertama kali pada tahun 1976 oleh tim survei sebelumnya, lalu dikaji secara mendalam selama dua tahun oleh Indonesia pada saat itu dan disepakati melalui MoU tahun 1976. MoU ini dipermasalahkan karena telah menggunakan metode watershade dalam menentukan wilayah demarkasi perbatasan. Pada saat tim survei tahun 2001 mencari kembali titik patok menggunakan watershade, mereka tidak dapat menemukan. Namun, saat mengukur ulang menggunakan penarikan garis lurus, patok demarkasi dapat ditemukan. Alasan inilah yang menyebabkan pihak Indonesia mengklaim bahwa MoU perbatasan pada tahun 1976 ini terdapat kesalahan dan harus dilakukan peninjauan kembali atas perjanjian perbatasan tersebut. Hal ini dimungkinkan dengan adanya pembatalan perjanjian dengan alasan *fundamental of circumstances* yang merujuk pada Pasal 62 ayat 1 VCLT 1969. Tim surveyor juga menjelaskan bahwa sifat MoU dalam perjanjian perbatasan ini bersifat *non-legally binding* karena tidak ada persetujuan dari pihak lembaga negara (Dewan Perwakilan Rakyat) serta penggunaan nomenklatur dari MoU yang dianggap mereka tidak mempunyai daya ikat dalam sahnya perjanjian internasional

Perundingan kembali dilakukan pada tahun 2011 atas permasalahan yang timbul pada tahun 2001. Dengan mendasarkan diri pada pasal peninjauan kembali sebuah kesepakatan, yaitu Pasal 48 VCLT 1969, maka Indonesia meminta perubahan atau dimungkinkannya pembatalan terhadap isi perjanjian MoU 1976. Pada tahun 2011, tim yang terdiri dari Kementerian atau Lembaga terkait, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Mabes TNI serta Badan Informasi Geospasial telah membuat kajian atau pembahasan mengenai masalah penentuan demarkasi wilayah di Tanjung Datu. Selain itu, dilaksanakan pula rapat koordinasi tingkat Menteri di Kementerian Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) yang dipimpin oleh Menteri Polhukam pada 20 Oktober 2011 yang secara khusus membahas mengenai permasalahan yang terjadi di Tanjung Datu. Kesimpulan yang didapat dari rapat koordinasi tersebut antara lain:

- a. Penentuan wilayah demarkasi antara Indonesia dan Malaysia di Tanjung Datu, Kalimantan Barat, menggunakan metode watershade.
- b. Sesuai dengan Traktat pada tahun 1891 pasal 3, proses demarkasi didasarkan pada garis batas yang mengikuti watershade. Survei bersama dilakukan tahun 1976 dan diulang tahun 1978 dengan hasil yang identik.
- c. Pandangan untuk merubah MoU dari aspek hukum internasional tidak memiliki dasar hukum yang kuat mengingat:
 - 1) MoU tahun 1978 merupakan kesepakatan dari hasil survei untuk mengimplementasikan traktat tahun 1891 pasal 3 yang telah menetapkan garis batas berdasarkan watershade bukan garis lurus.
 - 2) MoU tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak.
 - 3) VCLT 1969 tentang Perjanjian Internasional menegaskan bahwa perjanjian perbatasan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tidak dapat dibatalkan

Sayangnya, hasil kesepakatan ini tidak disosialisasikan dengan baik. Bahkan KK Sosek Malindo yang merupakan forum komunikasi Indonesia Malaysia yang telah didirikan semenjak tahun 1983 untuk mengelola kawasan perbatasan pun tidak mampu menjadi corong informasi kepada aktor subnasional pada level bawah. Sehingga, pejabat di daerah pun dari tingkat propinsi (gubernur) hingga tingkat bawah baik camat maupun kepala desa tidak mengetahui hasil dari kesepakatan ini. Dari in-depth interview yang dilakukan terhadap sejumlah pejabat lokal baik di kabupaten maupun desa, mereka mengaku tidak pernah memperoleh informasi

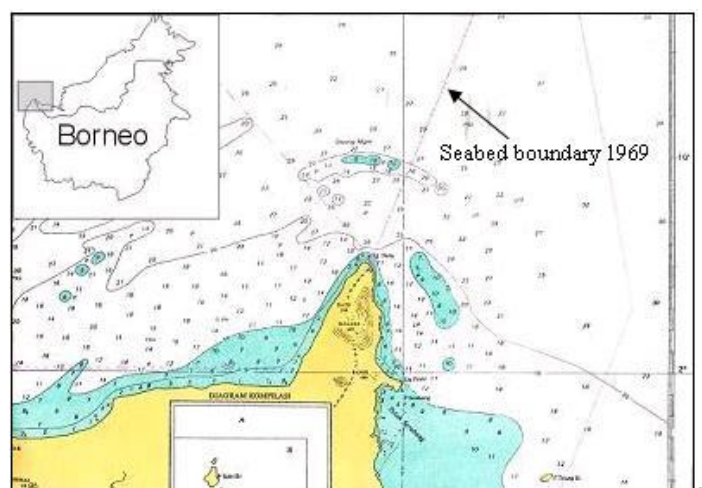
mengenai hal tersebut (In-depth interview, Uray Willy, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Sambas, Sambas April 2019). Meski demikian, beberapa anggota Kelompok 31 menyatakan tahu bahwa enclave tersebut merupakan milik Malaysia dan sewaktu-waktu mereka dapat diminta meninggalkan lahan (In-depth interview, Ibrahim, penduduk lokal, Camar Bulan, Maret 2019). Apa yang terjadi adalah justru isu aneksasi yang muncul pasca MoU 2011 yang menyatakan enclave Camar Bulan milik Malaysia.

Upaya Diplomasi Perbatasan Gosong Niger

Isu kedua yang melingkupi perbatasan di Tanjung Datu adalah isu Gosong Niger. Persoalan ini dimulai ketika Malaysia mulai melakukan effective occupation di kawasan Gosong Niger. Dasar pengklaiman Malaysia adalah peta sepihak yang dibuat oleh Malaysia pada tahun 1979. Dalam peta ini, Malaysia telah memasukkan Gosong Niger ke dalam wilayahnya dengan menarik garis dasar median antara garis dasar Malaysia dan garis dasar perairan Indonesia. Gosong Niger yang disebut sebagai Permatang Naga (oleh Malaysia) bahkan dimasukkan dalam bagian promosi dan kegiatan wisata di sekitar Teluk Melano (Sarawak). Klaim sepihak ini dilakukan Malaysia pada awal tahun 2005. Mereka berargumen bahwa penetapan Gosong Niger sebagai Taman Nasional Laut sudah dilakukan sejak lama dan Gosong Niger merupakan salah satu area konservasi alam milik Malaysia. Kawasan inipun sering digunakan masyarakat Sarawak untuk memancing dan juga sebagai salah satu tujuan wisata yang paling diminati oleh wisatawan asing (Jayanto 2015: 626, Arsana 2006). Tentu saja ini berbeda dengan perhitungan Indonesia yang mengacu pada UNCLOS, bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dan Malaysia adalah negara pantai. Sebagai negara kepulauan, Indonesia diperbolehkan untuk menghitung batas terluar laut teritorial dengan jarak 12 mil dari garis pangkal, dan garis 200 mil merupakan batas ZEE. Gosong Niger hanya berjarak sekitar 5,5 mil dari garis pangkal, yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki posisi lebih kuat daripada Malaysia.

Gosong Niger sendiri, berdasarkan analisis geografis, analisis yuridis dan hasil plotting pada peta laut nomor: 420 yang diterbitkan oleh Dinas Oseanografi TNI AL dan Bakorsurtanal merupakan gundukan pasir yang selalu terendam air. Gosong Niger bukan merupakan pulau atau karang. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai sandbar atau banks atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Gosong. Gundukan ini kemudian dikenal sebagai Gosong Niger atau Niger Banks.

Garis perbatasan wilayah perairan Indonesia dan Malaysia di kawasan Tanjung Datu dan Laut Cina Selatan telah diatur dalam Persetujuan Batas Landas Kontinen Indonesia dan Malaysia 1969. Berdasar perjanjian Landas Kontinental tanggal 27 Oktober tahun 1969 dan diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 89 Tahun 1969, terdapat titik koordinat Timur (LCS 21-25) untuk posisi Gosong Niger yang membelah garis batas permukaan hingga dasar laut antar negara, di mana 2/3 blok bagian berada di teritorial Indonesia atau sepanjang lebih kurang 5 Nm (9 km) masuk wilayah Indonesia dan lebih kurang 0,8 Nm (1.4 km) milik Malaysia (Lihat Gambar 2).



Gambar 2. Gosong Niger

Sumber: I Made Andi Arsana. 2006. "Gosong Niger: Is it Another Ambalat?" <http://geo-boundaries.blogspot.com/2006/03/gosong-niger-is-it-another-ambalat.html>.

Diakses Agustus 2019,

Menurut Arsana (2006) sebetulnya pembagian wilayah sudah cukup jelas karena 2/3 dari dasar laut ada di sisi Indonesia. Namun, karena informasi yang terbatas maka aktifitas kapal angkatan laut Malaysia yang melakukan patrol di sekitar Niger Gosong dan tidak mengizinkan nelayan Indonesia untuk menangkap ikan di kawasan tersebut dianggap telah melanggar garis batas negara. Terlebih lagi ketika nelayan tradisional pada umumnya tidak tahu bahwa ada sebagian wilayah yang berada di bawah kedaulatan Indonesia karena mereka dapat melihat kapal Malaysia parkir di daerah itu hampir setiap hari. Akibatnya, nelayan Indonesia tidak memiliki akses ke sumber daya alam di sekitar Gosong Niger dan beranggapan Malaysia telah melakukan provokasi.

Indonesia sendiri telah mengatur landasan hukum bagi perbatasannya laut melalui UU No.6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia yang merupakan pembaharuan dari UU No.4 Prp Tahun 1960. PP No.38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia kemudian disusun sebagai undang-undang pelaksana dari UU No 6 Tahun 1996 tersebut.. Terkait dengan Persetujuan Batas Landas Kontinen Indonesia dan Malaysia 1969, maka ketentuan PP No.38 Tahun 2002 menjadi pelengkap dan pembaharuan, untuk mencantumkan posisi letaknya dalam daftar titik dasar dan titik koordinat wilayah-wilayah yang belum terdaftar dalam ketentuan sebelumnya. Dalam ketentuan PP No.38 Tahun 2002, sebagai langkah sepihak dari pemerintah Indonesia terhadap batas Gosong Niger telah terdaftar pada titik dasar (TD) No. 35 yang terletak pada koordinat 02'05' 10" LU dan 109° 38'43"BT, yang ditetapkan berdasarkan garis air rendah (low water line).

Titik koordinat di pantai pantai Tanjung Datu merupakan titik yang penting bagi laut Indonesia karena ia dapat dijadikan eksistensi Titik Dasar (base point) maupun Titik Landasan (reference point), guna menarik demarkasi terluar yang akan melewati atau memuat teritorial Gosong Niger berada di dalamnya. Kesadaran akan pentingnya menjaga garis batas negara mendorong Indonesia untuk membangun mercusuar baru untuk menggantikan mercusuar peninggalan Belanda yang telah berumur lebih dari 128 tahun dan sudah tidak lagi berfungsi sejak tahun 1978. Pada tahun 2006, sebuah mercusuar dengan perlengkapan modern dibangun kembali oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut setinggi 43 meter yang dapat

menjangkau sejauh 20 nautical mile laut x 1852 m, pada ketinggian 166.13 meter di kawasan hutan lindung lereng Gunung Datu. Selain itu juga dibangun 3 unit suar apung di atas dangkalan Niger Gosong wilayah perairan Tanjung Datu pada jarak 5,5 nautical mile laut dari daratan (10,185 km) seluas 50 ha. Kawasan dangkalan Niger Gosong secara fisik terendam air laut kedalaman antara 8 sampai dengan 10 meter (Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2015).

Aktifitas Malaysia di area ini sangat agresif. Pada Januari 2011, sebuah tim yang dipimpin Perwira Pelaksana KRI Teluk Sabang, Kapten Ujang Dharmadi berhasil mendarat dan mengidektifikasi patok-patok batas hingga mercusuar di perbatasan. Malaysia membangun suar pertamanya setinggi 10 meter pada 1987, karena padam maka, dibangun lagi suar baru setinggi 7 meter pada 1990. Suar ini telah masuk dalam Daftar Suar Inter-nasional tahun 2004. Pada saat itu, tim Ujang Dharmadi berhasil menemukan hilangnya patok A1 sampai A3 yang menjadi titik ukur wilayah laut Indonesia. Pada survey tersebut tim juga menemukan bahwa Jawatan Ukur dan Pemetaan Malaysia telah membuat patok sendiri di Tanjung Datu. Patok tersebut dibuat di puncak batu setinggi 6 meter, berjarak sekitar seratusan meter dari patok A4 milik Indonesia. Tapi patok baru ini masuk ke wilayah Indonesia sekitar delapan meter. Menurut Dharmadi, bila titik ini dijadikan titik pangkal garis untuk mengukur landas kontinen, wilayah laut Indonesia akan menyusut (“Pulau Gosong: Hilang Patok Di Ekor Kalimantan”. <http://www.kalbariana.web.id/pulau-gosong-hilang-patok-di-ekor-kalimantan/>. Diakses Agustus 2019).

Selain mengubah patok, Malaysia juga pernah mendirikan menara suar setinggi 14 m di dataran Tanjung Datuk pada tahun 2014 namun segera dihentikan secara mandiri karena melanggar garis batas negara. Menurut Kapuspen Mabes TNI Mayjen Fuad Basya, pihak Malaysia menancapkan fondasi untuk mercusuar pada kordinat 2 derajat 05'53" Lintang Utara dan 109 derajat 38'37" Bujur Timur. Lokasi itu adalah wilayah perairan di ujung barat daya Pulau Kalimantan. Titik itu terletak sekira 900 meter di depan patok STRP 1 yang terletak di wilayah Indonesia, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas (“RI Desak Malaysia Hentikan Pembangunan”. <https://www.republika.co.id/berita/koran/kesra/14/05/26/n60t2312-ri-desak-malaysia-hentikan-pembangunan>. Diakses Agustus 2019).

Segera setelah mendapatkan laporan dari TNI, Kementerian Luar Negeri segera mengkoordinasikan untuk menyelenggarakan pertemuan tim teknis Indonesia dan Malaysia guna membicarakan kelanjutan kasus pembangunan mercusuar di Tanjung Datuk. Dipilih karena dianggap opsi yang terbaik ketimbang penyelesaian yang bersifat politis (Syahni, 2014) Pasca pertemuan tersebut, Malaysia segera membongkar kembali pondasi mercusuar yang dibangunnya tersebut berdasar hasil kesepakatan teknis kedua belah negara.

Penentuan garis batas laut tidak hanya terkait dengan garis batas antar negara saja melainkan juga terkait dengan penyelenggaraan kedaulatan negara. Kedaulatan negara bermakna pada hak untuk mengelola segala sumber daya alam yang ada di dalamnya baik sumber daya ilaut berupa ikan juga sumber daya mineral. Merujuk Bupati Samas terdahulu, Burhanudin A. Rasyid, lokasi Gosong Niger terindikasi mengandung kekayaan alam berupa minyak dan gas bumi (Equator 2006 dalam Palupi 2007). Hal ini juga didukung oleh pendapat Usman, mantan Camat Paloh, yang menyatakan pernah dilakukan riset terhadap potensi Gosong Niger yang menunjukkan bahwa kawasan tersebut memiliki potensi bijih besi yang cukup besar. Ia juga menganggap Malaysia sengaja membangun mercusuar dan menahan kapal-kapal nelayan agar ia dapat menguasai laut di utara Tanjung Datu (In-depth interview, Usman, mantan Camat Paloh Telok Keramat, Maret 2019).

Tidak jauh berbeda dengan isu Camar Bulan, isu Gosong Niger pun masih menjadi

persoalan yang tidak terlalu banyak dipahami oleh sejumlah subnational actor di tingkat bawah (propinsi-desa). Ketidaktransparan pengelolaan kawasan perbatasan menimbulkan kesimpangsiuran informasi yang menjadikan pengelolaan isu perbatasan tidak tepat. Sebagai negara yang berdampingan, Indonesia dan Malaysia memiliki klaim wilayah laut saling tumpang tindih (*overlapping claim*) yang tentan menjadi isu yang rawan tanpa didukung oleh transparansi informasi dan persamaan persepsi antara pusat dan subnational actor pada pemerintah lokal. Indonesia telah memasukkan . Salah satu upaya yang dilakukan untuk mempersamakan persepsi dalam pengelolaan kawasan perbatasan dengan memasukkan Desa Temajak ke dalam Kawasan Strategis Nasional dan Rencana Zonasi WP-3-K (Tata Ruang Laut). Propinsi Kalimantan Barat juga menetapkan Gosong Niger dan perairan Tanjung Datuk sebagai kawasan konservasi dan zona pemanfaatan lain, sekaligus KSNT dalam konteks Beranda Depan Negara. Hal ini tentu perlu segera diselenggarakan dengan mengikutsertakan pemerintah lokal, komunitas lokal serta media, mengingat merekalah yang menjadi aktor terdepan dalam isu perbatasan.

Subnational actor perlu selalu diikutsertakan dalam upaya diplomasi perbatasan, guna menjadi kesalahan pemahaman atas pengelolaan kawasan perbatasan. Sejalan dengan Henrikson (2000) diplomasi yang berfokus pada perbatasan harus mengoordinasikan kepentingan pusat dan pinggiran dalam mengelola batas negara. Dengan kata lain, baik dari pemerintah pusat maupun pinggiran, harus dapat menemukan penyesuaian dalam pengelolaan perbatasan terkait dengan kepentingan bersama. Persoalan abrasi pantai Camar Bulan yang terus menggerus pantai Camar Bulan hingga tinggal 700 meter saja jaraknya dari patok terluar enclave Camar Bulan mengakibatkan kekecewaan yang besar karena hal ini tidak segera direspon oleh pemerintah pusat. Upaya pendudukan enclave Camar Bulan menjadi salah satu alternative bagi mereka untuk mempertahankan ruang tinggal mereka yang semakin menyempit.

Pemahaman yang keliru atas isu-isu terkait dengan perbatasan dapat segera diatasi seperti pemahaman mengenai Gosong Niger dan pengelolannya yang tidak sejalan dengan kajian akademis.

“Iya dulu pulau kecil yang terkena abrasi ... (Gosong Niger) Lumayan besar, perkiraan saya sekitar lima hektar. Tapi dihajar oleh abrasi dan kita tidak pernah melakukan riset ya mestinya kalo riset itu ada untuk kepentingan pertahanan. Kalo itu masih muncul sebagai pulau bukan dalam bentuk gosong masih selamat kita itu dari batas Tanjung Datu Kita kehilangan titik untuk menarik garis karena abrasi. Saya ngga tau apakah masih memungkinkan untuk mereklamasi” (In-depth interview, Manto Saidi, Mantan Kepala BPPD Sambas, Pontianak, Maret 2019).

Seperti halnya pemahaman yang keliru atas pengelolan kawasan perbatasan di pada Gosong Niger, pemahaman yang keliru mengenai pengelolaan kawasan perbatasan di pada enclave Camar Bulan juga ditemukan.

“Banyak rakyat kita di sana. Kenapa? Ya karena itu harus kita kuasai. Artinya kita mau mengelola itu, yang ndak boleh kan mbakar ngrusak. Penduduk kita ini kan cari makan, hak asasi manusia. Kalo ngrusak apalagi untuk bisnis atau dijual ,, na itu ndak boleh. Kalo untuk berkebun tinggal disitu ndak masalah” (In-depth interview, Usman, mantan Camat Paloh Telok Keramat, Maret 2019).

Rachmawati dan Fauzan (2012) mencatatkan pentingnya kolaborasi antara faktor ekonomi, sosial dan hukum sebagai landasan institusionalisasi diplomasi perbatasan sebagaimana Henrikson (2000) menandai pentingnya institusionalisasi seperti undang-undang dan mekanisme yang jelas dalam kerjasama antarnegara. Namun keterlibatan subnational

actors (Duchacek 1990, Henrikson 2000, Cornago 2009, Martinez 2018) menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan dalam diplomasi perbatasan. Kelompok akademisi sebagai bagian penting dari pembangunan wacana mengenai pengelolaan kawasan perbatasan dan juga media sebagai corong utama informasi publik menjadi dua elemen yang juga penting dalam diplomasi perbatasan Indonesia.

KESIMPULAN

Diplomasi perbatasan Indonesia di Tanjung Datu masih mengalami keterbatasan. Sejumlah isu yang masih seringkali memperkeruh hubungan Indonesia Malaysia menjadi salah satu indikator penting dalam bagaimana diplomasi perbatasan telah diselenggarakan. Sejumlah diplomasi perbatasan antara Indonesia Malaysia terkait dengan perbatasan di Tanjung Datu diselenggarakan untuk menyelesaikan demarkasi di Camar Bulan dan Gosong Niger. Upaya penyelesaian demarkasi ini masih menyisakan ganjalan hingga tahun 2011 karena MoU tahun 2011 yang menyatakan bahwa enclave Camar bulan seluas 1.499 ha adalah milik Malaysia belum diratifikasi oleh DPR. Bagi sebagian besar elit, hal ini adalah kehilangan besar karena enclave tersebut menjorok masuk ke dalam teritori Indonesia dan menyisakan jarak hanya 700 meter saja dari bibir pantai Temajuk. Sementara penyelesaian garis batas negara di Gosong Niger perlu perhatian lebih mengingat Malaysia masih seringkali mencoba melakukan effective occupation pada kawasan tersebut. Meski tidak dapat dijadikan sebagai base line, Gosong Niger masih menjadi area yang penting bagi Indonesia.

Praktek diplomasi perbatasan yang diselenggarakan oleh Indonesia masih berifat state centric. Pengelolaan demarkasi negara masih diletakkan dalam ruang tertutup yang justru meninggalkan sejumlah aktor penting dalam diplomasi perbatasan. Akibatnya, ketidaktransparanan dan informasi yang keliru seringkali merwarnai pembicaraan perbatasan Indonesia Malaysia di Tanjung Datu (isu Camar Bulan dan Gosong Niger). Subnasional actors yang terdiri atas elit politik pada level propinsi hingga desa tidak secara langsung memperoleh akses pada pengelolaan perbatasan negara. Sementara KK Sosek Malindo yang diselenggarakan guna mengelola kawasan perbatasan Indonesia Malaysia pada isu sosial ekonomi tidak cukup mampu menjadi jembatan bagi segala informasi dan koordinasi dalam pengelolaan perbatasan.

Selain subnasional actors, yang juga disebut sebagai paradiplomacy oleh sejumlah akademisi, terdapat aktor penting dalam isu perbatasan Indonesia Malaysia, yaitu akademisi dan media. Terbatasnya informasi atas pengelolaan kawasan perbatasan mengakibatkan ketidakakuratan dalam penyebutan dan penyediaan data dalam beberapa studi akademis. Hal ini tentu menjadi rujukan yang tidak cukup jelas bagi mereka yang mengakses hasil studi tersebut. Sementara media juga tidak memberikan informasi yang valid atas pengelolaan kawasan perbatasan dan persoalan yang terjadi di Tanjung Datu. Diplomasi perbatasan sudah semestinya tidak lagi state centric demi terselenggaranya hubungan bilateral yang harmonis antar negara yang saling bertetangga dengan melibatkan sejumlah aktor penting, subnational actors, akademisi dan media.

UCAPAN TERIMAKASIH

Artikel ini merupakan bagian dari penelitian PTUPT Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, untuk itu kami mengucapkan terimakasih atas kesempatan dan dukungan yang diberikan kepada kami sehingga penelitian mengenai diplomasi perbatasan Indonesia ini dapat terselenggara. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta yang telah memberi dukungan kepada kami selama penelitian dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aranda, G. & Salinas, S. (2017). "Paradiplomacia Aymara: Empoderamiento En La Frontera [Aymara Paradiplomacy: Empowerment On The Border]". *Estudios Fronterizos*, 18(35), 90-106, DOI:10.21670/ref.2017.35.a05
- Arsana, I Made Andi. (2006). "[Gosong Niger: Is it Another Ambalat?](http://geo-boundaries.blogspot.com/2006/03/gosong-niger-is-it-another-ambalat.html)" <http://geo-boundaries.blogspot.com/2006/03/gosong-niger-is-it-another-ambalat.html>. Diakses Agustus 2019.
- Baylis, John dan Steven Smith (2001). "The Globalization of World Politics". New York: Oxford University Press.
- Biro Komunikasi dan Informasi Publik. (2015). "Menara Mercusuar Tanjung Datu, Mercusuar Terjauh di Kalimantan Barat". <http://dephub.go.id/post/read/menara-mercusuar-tanjung-datu,-mercusuar-terjauh-di-kalimantan-barat>, Diakses Agustus 2019.
- Bradshaw. M.J. (1998). "Going global: The Political Economy of Oil and Gas Development Offshore of Sakhalin," *Cambridge Review of International Affairs*, Vol. 12, no.1.
- Caflish, Lucius (2000). "A typology of Border", www.dur.ac.uk/resources/ibru/conferences/thailand/caflisch.pdf. Diakses Agustus 2019.
- Cornago, Noé. (2009). "Diplomacy And Paradiplomacy In The Redefinition Of International Security: Dimensions Of Conflict And Co-Operation". *Regional & Federal Studies*, 9: 1, 40 – 57 DOI: 10.1080/13597569908421070 .
- Djalal, Hasjim. (2012). "[Maritime Border Diplomacy](http://www.brill.com/9789004210701)". [Center for Oceans Law and Policy](http://www.brill.com/9789004210701), Volume: 16. Brill | Nijhoff
- Duchacek, Ivo (1990). "Perforated Sovereignities: Towards a Typology of New Actors in International Relations," in Hans J. Michelmann and Panayotis Soldatos, ed. *Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units*. Oxford: Oxford Press.
- Fatmasari, M (2018) "Masalah Tanjung Datu" <http://repository.unpas.ac.id/33730/7/BAB%20III.pdf> . Diakses Agustus 2019.
- Gultom, Aldi. (2011). "TB Hasanuddin: Klaim Malaysia di Camar Bulan dan Tanjung Datu Tidak Sesuai Peta Tua". *RMOL.id*. <https://rmol.co/dpr/read/2011/10/09/41852/>. Diakses April 2019
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. (2011). *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional* . Yogyakarta: .
- Henrikson, Alan K.(2000). """. *Facing Across Borders: The Diplomacy of BonVoisinage*. *International Political Science Review* (2000), Vol. 21, No. 2, 121–147
- Jayanto, Satria Dwi. (2014). "Upaya Pemerintah Indonesia Untuk Menyelesaikan Konflik Gosong Niger". *Journal Ilmu Hubungan Internasional*, 2014, 2(3): 625-640 ISSN 0000-0000, ejournal.hi.fisip-unmul.org.
- Jordan, A & Khanna, J.(1995) "Economic Interdependence and Challenges to the Nation-State: The Emergence of Natural Economic Territories in the Asia-Pacific". *International Journal of International Affairs*. Vol. 48.
- Martínez, Zepeda Roberto. (2018). "The Paradiplomacy of Subnational Governments In North America". *Ánfora*, 25(44), 17-41. Universidad Autónoma de Manizales. ISSN 0121-6538
- Mursito, Purwo. (2010). "Peran Arsip Dalam Mendukung Upaya Diplomasi Guna Penyelesaian Sengketa Perbatasan Camar Bulan Dan Tanjung Datu". *Jurnal Kearsipan*. VOL 7/ANRI/12/2012.
- Ogrosono, Arif Havas.(2006). *Makalah: Kebijakan Dasar Indonesia Dalam Penetapan Perbatasan Maritim*. Departemen Luar Negeri RI.

- Palupi, Fridainingtyas. (2007). "Eksistensi Garis Batas Landas Kontinen Antara Indonesia Dan Malaysia Di Gosong Niger Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional". <https://eprints.uns.ac.id/4005/1/55400906200909571.pdf>. Diakses Agustus 2019.
- Rachmawati, Iva and Fauzan. (2012). "Problem Diplomasi Perbatasan dalam Tata Kelola Perbatasan Indonesia-Malaysia". Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 16 . No.2 (2012).
- Rizki, Muhammad, and Merdekawati, Agustina. (2018). "The Significance of Boundary Construction at Land Border between Indonesia-Malaysia in Temajuk Village, Sambas Regency as Manifestations of Indonesia's Sovereignty" in The 1st International Conference on South East Asia Studies, 2016, KnE Social Sciences. p 405–423. DOI 10.18502/kss.v3i5.2346
- Roy, SL. (1995). Diplomasi. Jakarta: Rajawali Press.
- Sergounin. A. (1999). "The Bright side of Russia's Regionalism", PONARS Memo Series, no. 59: <http://www.fas.harvard.edu/~ponars/POLICY%20MEMOS/Sergounin59.html>. Diakses Agustus 2019.
- Sucipto. (2014). "Malaysia Bangun Mercusuar di Wilayah Sengketa, TNI Kirim Kapal Perang". SindaNews.Com. <https://nasional.sindonews.com/read/865962/14/malaysia-bangun-mercusuar-di-wilayah-sengketa-tni-kirim-kapal-perang-1400680494>. Diakses Agustus 2019.
- Syahni, Meidella, (2014). "Indonesia-Malaysia Akan Bertemu Bahas Koordinat Mercusuar di Tanjung Datuk", <https://nasional.kompas.com/read/2014/06/16/1527212/Indonesia-Malaysia.Akan.Bertemu.Bahas.Koordinat.Mercusuar.di.Tanjung.Datuk>. Diakses Agustus 2019
- (2011). "Dikabarkan Dicaplok Malaysia, Aktivitas TNI di Camar Bulan Meningkat". Suara Pembaharuan 11 Oktober 2011.
- .(2012)."Mensos Berpantung Cinta Temajuk". TribunBengkayang.com. <https://pontianak.tribunnews.com/2012/01/08/mensos-berpantun-cinta-temajok?page=2>. Diakses Agustus 2019.
- (2011)."Pemerintah Bahas Perbatasan RI–Malaysia". Merdeka.com <https://www.merdeka.com/politik/pemerintah-bahas-perbatasan-ri-malaysia.html>. Diakses Agustus 2019.
- (2006). "Djoko Suyanto: Pulau Gosong Niger Masuk NKRI". Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/news/read/123461/djoko-suyanto-pulau-gosong-niger-masuk-nkri>. Diakses Agustus 2019.
- (2006). "Soal Pulau Gosong Niger, RI akan Buat Suar Terapung". DetikNews.com. <https://news.detik.com/berita/d-602028/soal-pulau-gosong-niger-ri-akan-buat-suar-terapung->. Diakses Agustus 2019.
- (2014). "RI Desak Malaysia Hentikan Pembangunan". <https://www.republika.co.id/berita/koran/kesra/14/05/26/n60t2312-ri-desak-malaysia-hentikan-pembangunan>. Diakses Agustus 2019.
- (2011). "Pulau Gosong: Hilang Patok Di Ekor Kalimantan". <http://www.kalbariana.web.id/pulau-gosong-hilang-patok-di-ekor-kalimantan/>. Diakses Agustus 2019.

In-depth Interview:

In-depth Interview, Herlin, penduduk lokal, Camar Bulan, in Maret 2019

In-depth Interview, Manto Saidi, Mantan Kepala BPPD Sambas, Pontianak April 2019.

In-depth interview, Usman, Mantan Camat Paloh, at Kampong Telok Keramat, Maret 2019.

In-depth interview, Uray Willy, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Sambas, Sambas
April 2019.

In-depth Interview, Ibrahim, penduduk lokal, Camar Bulan, April 2019.

ANALISIS KEPEMIMPINAN SPIRITUAL, PERILAKU KERJA SPIRITUAL, DAN KESADARAN LINGKUNGAN TERHADAP ENVIRONMENTAL PASSION

1) Yuni Siswanti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN VY

yuni.siswanti@upnyk.ac.id

2) Ahmad Muhsin

Fakultas Teknik Industri UPN VY

ahmad.muhsin@upnyk.ac.id

3) Laila Nafisah

Fakultas Teknik Industri UPN VY

lailanafisah71@gmail.com

ABSTRACT

*From synthesizing theories of leadership, spirituality, and pro-environmental behavior, this research built and tested a theoretical model linking spiritual leadership with employee pro-environmental behavior via one moderating variable. Data were collected from 37 heads of families occupied Winongo Ex Station in the former railway line in Glondong Tirtonirmolo village, Kasihan Bantul, Yogyakarta after The earthquake that occurred on May 26, 2006 in Yogyakarta. The location occupied was the Sultan Ground (SG) land. In the course of time, the residents asked permission from the court to get the right to use the land or called Serat Kekancingan. The Yogyakarta Palace gave the answer that the Permit had been given to someone who in fact never lived, the land also became the object of buying and selling by irresponsible persons, and someone acted on behalf of the palace expert's interest and claimed to be the legitimate heir to the land. We use survey to collected data from 37 respondents and continue use Participatory Rural Appraisal method (PRA) (A. Muhsin, D. S. Hapsoro, and Y. Siswanti, 2018) which is packaged in the form of Focus Group Discussion (FGD) in its participatory approach. We found that, spiritual leadership positively affected workplace spirituality (H1 was supported). Workplace spiritually positively affected environmental passion (H2 was supported). Environmental awareness moderated the effect workplace spirituality and environmental passion (H3 was supported).
Keywords: Participatory Rural Appraisal, spiritual leadership, workplace spirituality, environmental passion, environmental awareness*

PENDAHULUAN

Menghadapi era perubahan seperti saat ini, tuntutan menjadi pimpinan semakin kompleks, termasuk bagaimana mengembangkan model kepemimpinan yang dinamis dan proaktif terhadap lingkungan dalam upaya meningkatkan kepeduliannya (Aguilera, Rupp, Williams., & Ganapathi, 2007). Perilaku pro terhadap lingkungan ini akan berdampak terhadap kesetiakawanan sosial diantara anggota organisasi (Dee Groot & Stage, 2009). Sejumlah penelitian terdahulu telah melakukan riset berkaitan dengan pengaruh kepemimpinan terhadap perilaku pro terhadap lingkungan (Goldstein, Chialdini, & Griskevicius, 2008;

Robertson & Barling, 2013). Hasil riset Stage & Vleg (2009) merekomendasikan untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh kepemimpinan spiritual terhadap perilaku pro lingkungan.

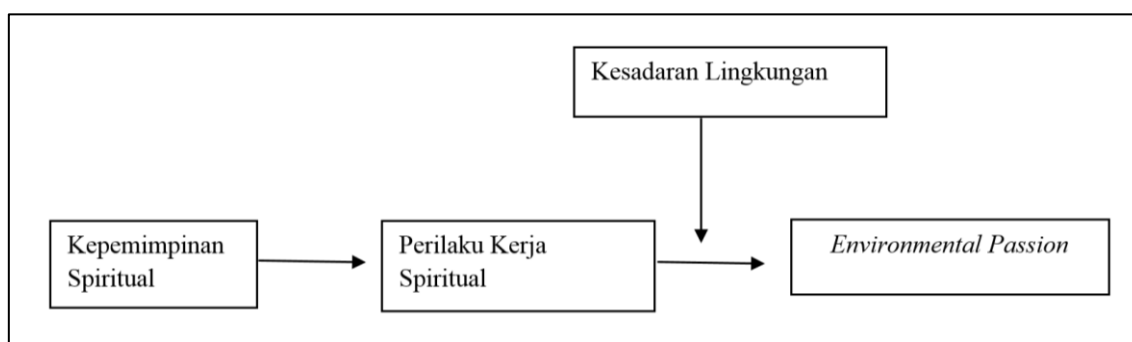
Menurut Turage et al., (2010), untuk melibatkan anggota organisasi dalam hal kepeduliannya terhadap lingkungan, dibutuhkan keseimbangan antara motivasi intrinsik dan environmental passion. Penelitian ini kemudian dilanjutkan untuk menguji efek moderasi kepedulian lingkungan dalam hubungan antara perilaku kerja spiritual dengan environmental passion.

KAJIAN TEORI

Menurut Duchon & Plowman (2005), pemimpin spiritual adalah pemimpin yang memiliki pemahaman lebih besar dalam hal spiritual personilnya, makna dan tujuan kerja, hubungan kuat dengan komunitasnya, serta kesejahteraan spiritual melalui panggilan hati dan keanggotaan diantara dirinya dengan anggota. Pemimpin yang spiritual akan selalu membantu anggota untuk memahami satu dengan yang lain, memberi makna dalam setiap perilakunya, memanggil anggota dengan hati, dan membawa anggota pada perilaku yang spiritual (Hudson, 2014). Perilaku kerja spritual dipahami sebagai perilaku yang keluar dari dalam hati individu untuk memberi makna dalam pekerjaannya dan memiliki rasa untuk menyempurnakan serta rasa senang untuk bergabung dalam komunitasnya (Giacalone & Jurkiewicz, 2003; Ashmosh & Duchon, 2000). Perilaku kerja yang spiritual akan berdampak positif terhadap environmental passion. Environmental passion adalah sebuah emosi positif yang membuat diri seseorang menjadi memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya (Robertson & Barling, 2013).

Kesadaran lingkungan (environmental awareness) adalah tingkatan pengetahuan individu terhadap lingkungan, kemampuan membawa perubahan positif terhadap lingkungan dalam bentuk mengubah dirinya menjadi peka tentang lingkungannya dan memahami masalah serta faktor penyebab terjadinya perubahan lingkungan (Madsen & Ulhoi, 2001). Kollmus & Agyeman, 2001 berargumen bahwa semakin bagus pemahaman individu terhadap lingkungan dan membawa perubahan positif pada lingkungannya, maka akan memperkuat pengaruh perilaku kerja spiritual individu terhadap environmental passion.

Menurut Gousse-Lessard, Vallerand, Carbonneau, and Lafreniere (2013), passion merupakan pemicu munculnya komitmen dan perubahan. Proses ini berlanjut menuju pada rasa keterikatan dan perhatian yang mendalam mengenai hal-hal yang dialaminya, termasuk dari lingkungan. Passion merupakan pengalaman emosi positif, seperti kebahagiaan dan kebanggaan. Pengalaman ini bisa jadi membuat individu masuk dalam perilaku mainstream. Menurut Gousse-Lessard et al., 2013, individu yang memiliki passion terhadap lingkungan menyebabkan yang bersangkutan mampu mendefinisikan dirinya sebagai seseorang pecinta lingkungan atau dengan kata lain dirinya sebagai pribadi yang siap menjaga keseimbangan lingkungan, bukan hanya melakukan perubahan lingkungan dari waktu ke waktu. Identitas diri sendiri ini menjadi sebuah prediktor dari perilaku pro terhadap lingkungan (pro-environmental behavior) (Whitmarsh & O'Neill, 2010).



Gambar 1. Model Penelitian

OBJEK PENELITIAN

Keluarga yang tidak memiliki lahan tetap dan menempati Ex Stasiun Winongo di bekas jalur kereta api Dusun Glondong Tirtonirmolo Kasihan Bantul Yogyakarta. Sejumlah 37 Kepala Keluarga (KK) ditentukan sebagai responden.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode survey, dengan pengambilan sampelnya adalah sensus (semua populasi dijadikan sampel). Kuesioner dibagikan dan diminta diisi oleh 37 KK sambil dijelaskan oleh peneliti bila ada instrumen yang kurang bisa dipahami responden. Metode survei ini melengkapi metode Participatory Rural Appraisal yang telah dilakukan peneliti di tahun pertama, diperkuat dengan proses FGD (Focus Group Discussion).

JENIS DATA DAN METODE PENGUMPULAN DATA

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh secara langsung melalui observasi, wawancara, survei, assesment serta pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti, dan juga melakukan survei penggalian data terhadap 5 daerah yang memiliki status tanah milik Kasultanan Mataram dengan mengambil daerah-daerah pembanding 3 di wilayah keraton Yogyakarta dan 2 di wilayah keraton Surakarta untuk mengetahui pola perijinan, pengelolaan, dan tata aturan penggunaan Sultan Ground di wilayah keraton. Data sekunder berupa data yang tersedia dari pemerintah Desa Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul Yogyakarta maupun BPS.

INSTRUMEN PENELITIAN

Kepemimpinan spiritual diukur dengan mengadopsi instrumen yang dikembangkan oleh Fry, Fitucci., & Cedillo, 2005, sebanyak 17 item. Perilaku kerja spiritual diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Milliman et al., 2003. Kesadaran lingkungan diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Gatersleben, Sleg, & Vlek (2002). Environmental passion diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Robertson & Barling (2013).

UJI INSTRUMEN

Instrumen diuji dengan uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item kuesioner adalah valid (dengan uji confirmatory factor analysis). Hasil uji validitas terlihat bahwa semua instrumen (17 item) variabel kepemimpinan spiritual adalah valid. Variabel perilaku kerja spiritual ada 5 item yang tidak valid, yakni item ke-117, 18, 19, 20,

dan 21. Kelima item tersebut tidak dilanjutkan pada olah data selanjutnya. Uji validitas untuk variabel Kesadaran Lingkungan (11 item) dan variabel Environmental Passion (6 item) semua valid. Hasil uji reliabilitas menunjukkan semua variabel yang diteliti adalah reliabel (Cronbach's Alpha di atas 0,6).

UJI HIPOTESIS

Untuk menguji hipotesis pertama, digunakan uji regresi sederhana (menguji pengaruh kepemimpinan spiritual terhadap perilaku kerja spiritual). Uji hipotesis kedua menggunakan hierarchical linear regression (HRA). Uji HRA ini digunakan untuk menguji apakah kesadaran lingkungan mampu meningkatkan pengaruh perilaku kerja spiritual terhadap environmental passion.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Diskriptif Responden

Tabel 1
Data Diskriptif Responden

No.	Keterangan	Persentase
1.	Usia	
	Lansia	66
	Remaja	31
	Dewasa	3
2.	Penduduk Asli / Pendatang	
	Penduduk Asli	50
	Pendatang	50
3.	Tingkat Pendidikan	
	Tidak sekolah	12
	SD	13
	SMP	19
	SMU	53
	Sarjana	3
4.	Pekerjaan	
	Tidak bekerja (lansia)	22
	Wiraswasta	41
	Buruh	19
	Pekerja	6
	Pensiun	6
	Ibu Rumah Tangga	6

Dusun Glondong berada di wilayah pemerintahan Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Yogyakarta. Dusun Glondong dibagi menjadi 3 RT dan memiliki organisasi kepemudaan Karang Taruna, PKK, serta banyak yang menjadi anggota Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI).

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis 1

ANOVAa

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.876	1	.876	13.012	.001b
	Residual	2.356	35	.067		
	Total	3.232	36			

a. Dependent Variable: Perilaku Kerja Spiritual (X2)

b. Predictors: (Constant), Kep.Spiritual (X1)

Coefficientsa

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.473	1.183		.399	.692
	Kep.Spiritual (X1)	.867	.240	.521	3.607	.001

a. Dependent Variable: Perilaku Kerja Spiritual (X2)

Uji Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa kepemimpinan spiritual berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kerja spiritual, terdukung. Hal ini terlihat dari koefisien signifikansi 0,001 ($< 0,05$).

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis 2

ANOVAa

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.342	1	.342	6.861	.013b
	Residual	1.743	35	.050		
	Total	2.085	36			

a. Dependent Variable: Environmental Passion (Y)

b. Predictors: (Constant), Perilaku Kerja Spiritual (X2)

Coefficientsa

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.379	.589		5.735	.000
	Perilaku Kerja Spiritual (X2)	.325	.124	.405	2.619	.013

Dependent Variable: Environmental Passion (Y)

Uji Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa perilaku kerja spiritual berpengaruh positif dan signifikan terhadap environmental passion, terdukung. Hal ini terlihat dari koefisien signifikansi 0,013 ($< 0,05$).

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis 3

Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.153	.606		6.857	.000
Perilaku Kerja Spiritual (X2)	-.316	.256	-.394	-1.236	.225
Interaksi	.097	.035	.891	2.800	.008

a. Dependent Variable: Environmental Passion (Y)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Hipotesis 1

Uji Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa kepemimpinan spiritual berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kerja spiritual, terdukung. Hal ini terlihat dari koefisien signifikansi 0,001 ($< 0,05$). Penelitian ini mendukung hasil riset Afsar, Badir., & Kiani (2016). Hasil ini menunjukkan bahwa peran pemimpin spiritual (khususnya Kepala Dukuh) di Dusun Glondhong dalam proses menuju perolehan surat kekancingan bagi warganya, mampu meningkatkan perilaku kerja spiritual anggota-anggotanya. Hal ini terlihat adanya sikap sabar, tidak emosional, namun tetap ada upaya memperoleh tujuan, serta tetap dalam koridor perilaku kerja yang tetap positif. Kekuatan pemimpin spiritual di Dusun Glondhong terlihat dari kemampuannya memahami setiap anggota dengan sangat baik, hubungan batin yang kuat antara kepala dukuh dengan setiap anggotanya atas dasar nilai-nilai spiritual. Dalam proses memperoleh surat kekancingan dari kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, peran kepala dukuh bagi setiap anggota (warga Dusun Glondhong), sangat vital. Kepemimpinan spiritual yang dilakukan kepala dukuh melalui indikator vision, altruistic love, hope / faith, serta inner life (spiritual practices) mampu menggerakkan warga Dusun Glondhong (yang memiliki nasib yang sama memperjuangkan status penggunaan tanah ex rel ketera api), untuk memiliki perilaku kerja spiritual. Perilaku kerja spiritual mengandung unsur: hubungan, pembagian wewenang, fleksibilitas, dan kepercayaan diikuti energi untuk memberi kekuatan individu dan meningkatkan motivasi intrinsik (Ryan & Deci, 2000).

Hasil Uji Hipotesis 2

Uji Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa perilaku kerja spiritual berpengaruh positif dan signifikan terhadap environmental passion, terdukung. Hal ini terlihat dari koefisien signifikansi 0,013 ($< 0,05$). Hasil penelitian ini mendukung penelitian Afsar, Badir., & Kiani (2016); Kataria, Garg, & Rastogi, 2012; Gousse-Lessard, Vallerand, Carbonneau, and Lafreniere (2013); Roberstson and Barling (2013); Bochner (1997). Emosi positif (berupa rasa senang dan bahagia) berpengaruh positif terhadap perilaku kerja dengan melihat perubahan lingkungan (Fineman, 1996). Environmental passion adalah sebuah emosi positif. Perilaku kerja yang spiritual ditunjukkan oleh individu dalam bentuk belajar dari pengalaman melalui beragam proses kerja yang pernah dilakukannya, memfasilitasi orang lain untuk memiliki passion tentang pekerjaannya. Ketika individu memiliki kekuatan rasa tentang pekerjaannya, maka hubungannya dengan orang lain semakin bagus, sehingga merasa lebih terikat secara

emosional dan lebih yakin akan tugas-tugasnya (Lips-Wiersma, 2003). Ini terlihat dari perilaku setiap warga di Dusun Glondhong yang terus berjuang memperoleh surat kekancingan dari pihak berwenang, tanpa meninggalkan tugasnya masing-masing (baik sebagai warga masyarakat, sebagai kepala keluarga, maupun sebagai anggota dari kepala dukuhnya). Dalam konteks ini, kekuatan hubungan batin antara kepala dukuh dan setiap anggota menimbulkan perilaku kerja spiritual yang bagus, sehingga berdampak positif terhadap pemahaman mereka tentang situasi terjadi di lingkungan mereka tinggal. Hasil penelitian Roberstson dan Barling (2013) menemukan bahwa individu yang memiliki kekuatan passion, perilakunya cenderung diarahkan untuk kepentingan sosial. Proses ini kemudian berlanjut sehingga individu yang bersangkutan memiliki upaya personal dan kontribusi dalam meningkatkan praktik-praktik menjaga keberlangsungan lingkungan.

Hasil Uji Hipotesis 3

Uji hipotesis 3 yang menyatakan bahwa kesadaran lingkungan mampu meningkatkan (memoderasi) pengaruh perilaku kerja spiritual terhadap environmental passion, terdukung. Hal ini terlihat dari koefisien signifikansi interaksi sebesar 0.008 ($< 0,05$). Hasil penelitian ini mendukung riset yang dilakukan (Madsen & Ulhøi, 2001). Peningkatan linier dalam hal memahami lingkungan menuju pada kesadaran lingkungan dan interaksinya dengan perilaku kerja spiritual dapat meningkatkan keterikatan seseorang untuk memiliki passion terhadap lingkungan. Dampak selanjutnya dalam hal ini adalah pada peningkatan perilaku yang pro terhadap lingkungan. Kesadaran pada lingkungan yang cukup tinggi dimiliki oleh warga Dusun Glondhong diwujudkan dalam bentuk: memahami secara baik tentang lingkungannya, kemampuan melakukan perubahan positif pada lingkungan tempat tinggalnya, serta menghargai masalah-masalah tentang lingkungan, dan faktor-faktor penyebabnya. Hasil FGD yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa setiap warga penghuni ex rel kereta api di Dusun Glondhong cukup memahami masalah yang sedang mereka hadapi, mengapa mereka harus mengalami masalah ini, serta bagaimana mengatasi masalah yang terjadi. Faktor-faktor lingkungan yang terjadi di luar diri mereka (baik yang pro maupun kontra), tidak mampu membendung cita-cita warga yang sangat kuat untuk memperoleh surat kekancingan dari kraton secara resmi.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

- Uji hipotesis 1 yang menyatakan bahwa kepemimpinan spiritual berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kerja spiritual, terdukung.
- Uji hipotesis 2 yang menyatakan bahwa perilaku kerja spiritual berpengaruh positif dan signifikan terhadap environmental passion, terdukung.
- Uji hipotesis 3 yang menyatakan bahwa kesadaran lingkungan mampu meningkatkan (memoderasi) pengaruh perilaku kerja spiritual terhadap environmental passion, terdukung.

SARAN

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat tingkat mikro (jumlah kecil), yakni pada warga yang menempati tanah eks rel kereta api di Dusun Glondhong Tirtonirmolo Kasihan Bantul Yogyakarta. Penelitian lanjutan sebaiknya memperluas lingkungannya pada wilayah kelurahan, kecamatan, kabupaten dan atau propinsi.

Pengambilan data dilakukan dalam cross sectional, yakni ketika bertemu dengan warga dusun Glondhong melalui proses FGD dan metode participatory rural appraisal (PRA).

Penelitian lanjutan perlu dilakukan secara time series (misalnya: pengambilan data kedua dilakukan kembali setelah 3 sampai 6 bulan setelah proses pengambilan data tahap pertama dilaksanakan). Hal ini dilakukan untuk melihat seberapa stabil responden dalam mengisi kuesioner dan /atau menjawab pertanyaan peneliti. Apabila hasilnya tidak jauh beda dengan tahap pertama, maka hasil penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muhsin, D. S. Hapsoro, and Y. Siswanti. (2018). "COMMUNITY-BASED POVERTY ALLEVIATION USING PARTICIPATORY RURAL APPRAISAL," *Russ. J. Agric. Socio-Economic Sci.*, vol. 6, no. June, pp. 112–118
- Bilal Afsar, Bilal., Badir, Yuosre ., & Kiani, Umar Safdar. (2016). Linking spiritual leadership and employee pro-environmental behavior: The influence of workplace spirituality, intrinsic motivation, and environmental passion . *Journal of Environmental Psychology* 45 (2016) 79-88.
- Aguilera, R. V., Rupp, D. E., Williams, C. A., & Ganapathi, J. (2007). Putting the S back in corporate social responsibility: a multilevel theory of social change in organizations. *Academy of Management Review*, 32, 836-863.
- Ashmos, D., & Duchon, D. (2000). Spirituality at work. *Journal of Management Inquiry*, 9, 134-145.
- Bochner, A. P. (1997). It's about time: narrative and the divided self. *Qualitative Inquiry*, 3, 418-438.
- De Groot, J. I., & Steg, L. (2008). Value orientations to explain beliefs related to environmental significant behavior how to measure egoistic, altruistic, and biospheric value orientations. *Environment and Behavior*, 40, 330-354.
- De Groot, J. I., & Steg, L. (2010). Relationships between value orientations, selfdetermined motivational types and pro-environmental behavioural intentions. *Journal of Environmental Psychology*, 30, 368-378.
- Duchon, D., & Plowman, D. A. (2005). Nurturing the spirit at work: Impact on work unit performance. *The Leadership Quarterly*, 16, 807-833.
- Fineman, S. (1996). Emotional subtexts in corporate greening. *Organization Studies*, 17, 479-500.
- Fry, L. W., Vitucci, S., & Cedillo, M. (2005). Spiritual leadership and army transformation: theory, measurement, and establishing a baseline. *The Leadership Quarterly*, 16, 835-862.
- Gatersleben, B., Steg, L., & Vlek, C. (2002). Measurement and determinants of environmentally significant consumer behavior. *Environment and Behavior*, 34, 335-362.
- Giacalone, R. A., & Jurkiewicz, C. L. (2003). *Handbook of workplace spirituality and organizational performance* (Me Sharpe).
- Goldstein, N. J., Cialdini, R. B., & Griskevicius, V. (2008). A room with a viewpoint: using social norms to motivate environmental conservation in hotels. *Journal of Consumer Research*, 35, 472-482.
- Gousse-Lessard, A. S., Vallerand, R. J., Carbonneau, N., & Lafrenière, M. A. K. (2013). The role of passion in mainstream and radical behaviors: a look at environmental activism. *Journal of Environmental Psychology*, 35, 18-29.
- Hudson, R. (2014). The question of theoretical foundations for the spirituality at work movement. *Journal of Management, Spirituality & Religion*, 11, 27-44.

- Kataria, A., Garg, P., & Rastogi, R. (2012). Employee engagement and organizational effectiveness: the role of organizational citizenship behavior. *International Journal of Business Insights & Transformation*, 6, 121-135.
- Kollmuss, A., & Agyeman, J. (2002). Mind the gap: why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? *Environmental Education Research*, 8, 239-260.
- Lips-Wiersma, M. (2003). Making conscious choices in doing research on workplace spirituality: utilizing the “holistic development model” to articulate values, assumptions and dogmas of the knower. *Journal of Organizational Change Management*, 16, 406-425.
- Madsen, H., & Ulhøi, J. P. (2001). Greening of human resources: environmental awareness and training interests within the workforce. *Industrial Management & Data Systems*, 101, 57-65.
- Milliman, J., Czaplewski, A. J., & Ferguson, J. (2003). Workplace spirituality and employee work attitudes: an exploratory empirical assessment. *Journal of Organizational Change Management*, 16, 426-447.
- Robertson, J. L., & Barling, J. (2013). Greening organizations through leaders' influence on employees' pro-environmental behaviors. *Journal of Organizational Behavior*, 34, 176e194.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: classic definitions and new directions. *Contemporary Educational Psychology*, 25, 54-67.
- Steg, L., & Vlek, C. (2009). Encouraging pro-environmental behaviour: an integrative review and research agenda. *Journal of Environmental Psychology*, 29, 309-317.
- Turaga, R. M. R., Howarth, R. B., & Borsuk, M. E. (2010). Pro-environmental behavior. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1185, 211-224.
- Whitmarsh, L., & O'Neill, S. (2010). Green identity, green living? the role of proenvironmental self-identity in determining consistency across diverse proenvironmental behaviours. *Journal of Environmental Psychology*, 30, 305-314.

PEMETAAN OBJEK WISATA DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DI DLINGO, BANTUL

Ninik Probosari, Sri Kussujaniatun, Anis Siti Hartati

Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN "Veteran" Yogyakarta

ninik1973@yahoo.co.id , sri.kussujaniatun@upnyk.ac.id , Anis.sitihartati@upnyk.ac.id

Abstract

The development of tourism sector is one of the efforts to excavate the revenue of Bantul regency. Dlingo subdistrict, Bantul has a potential for a high tourism sector. The tourism sector is very varied, even some local people who do not know about the potential tourism objects including tourist villages offered by Dlingo sub-district, such as Tourism village and nature tourism objects. If tourism in a region is mapped, it can know the types and potential of other natural tourism both in the stage of development and not yet developed, so that by the existence of tourism mapping can set the points Tourist attractions and make it easy for local and foreign tourists to choose the tourist attractions that they want to visit. The results of tourism mapping can determine the points of tourist attractions and make it easier for local and foreign tourists to choose the tourist attractions that they want to visit. Besides, the development of tourism potential will increase the income and income of the Community

Keywords: Tourism, Dlingo, Mapping, Tourism Site

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki berbagai macam potensi pariwisata, baik wisata alam maupun wisata budaya karena Indonesia memiliki bermacam-macam suku, adat-istiadat, dan kebudayaan serta karena letak geografis negara Indonesia sebagai negara tropis yang menghasilkan keindahan alam yang cukup potensial untuk dikembangkan dengan baik. Ternyata pariwisata dapat diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional.[1] Banyak juga objek wisata yang ada di Indonesia yang telah terkenal tidak hanya di dalam negeri maupun ke luar negeri. Oleh sebab itu pengembangan pariwisata di Indonesia dilakukan oleh seluruh wilayah di Indonesia maka dibentuklah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata di tingkat nasional dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah di tingkat daerah. Demikian juga dengan Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten di Indonesia juga memiliki banyak sekali tempat-tempat pariwisata yang bagus dan tidak kalah menarik dengan daerah yang lain. Kabupaten Bantul sebagai salah satu daerah di Yogyakarta yang memiliki potensi wisata cukup banyak dengan prospek ke depan sangat menjanjikan, meliputi objek wisata alam, wisata budaya/sejarah, pendidikan, taman hiburan dan sentra industri kerajinan. Menuju Bantul Smart City yang telah dicanangkan tahun 2018, Bantul masuk dalam 50 kabupaten dalam gerakan menuju 100 Smart City tahap kedua di Indonesia. Mewujudkan Bantul Smart City perlu dipenuhi fasilitas kebutuhan akses informasi dari dan untuk masyarakat. Kecamatan Dlingo saat ini menjadi pintu gerbang utama pariwisata khususnya Mangunan sebagai daerah tujuan wisata menawarkan berbagai daya tarik wisata alam hingga desa wisata yang pernah dikunjungi Obama Juni 2017, terakhir Presiden Jokowi pada 28 September 2018.

Program pembangunan Sektor Pariwisata didukung pemerintah dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata bersinergi dengan kalangan usaha pembangunan kepariwisataan. Pengembangan sektor pariwisata merupakan upaya untuk menggali pendapatan daerah dengan mendatangkan banyak wisatawan. Pemetaan pariwisata sangat penting dilakukan di wilayah Kecamatan Dlingo sehingga dapat menetapkan titik-titik lokasi tempat wisata dan mempermudah wisatawan lokal maupun mancanegara memilih tempat-tempat wisata yang ingin mereka kunjungi. Selain itu, pemetaan wisata juga memberikan peluang untuk meningkatkan devisa, sehingga penelitian awal berupa pemetaan potensi wisata alam ini menarik untuk dilakukan. Kecamatan Dlingo, Bantul memiliki potensi sektor kepariwisataan yang tinggi. Sektor pariwisata yang ditawarkan sangatlah bervariasi bahkan beberapa warga lokal ada yang belum mengetahui adanya potensi objek wisata termasuk desa wisata yang ditawarkan oleh Kecamatan Dlingo, seperti Desa wisata dan Objek wisata alam. Jika pariwisata pada suatu wilayah dipetakan, maka dapat mengetahui jenis-jenis dan potensi wisata alam lainnya baik yang masih dalam tahap perkembangan maupun yang belum dikembangkan, sehingga dengan adanya pemetaan pariwisata dapat menetapkan titik-titik lokasi tempat wisata dan mempermudah wisatawan lokal maupun mancanegara memilih tempat-tempat wisata yang ingin mereka kunjungi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, observasi lapangan dalam melakukan pemetaan potensi serta objek wisata. Data sekunder diperoleh dari data-data yang berkaitan dengan sektor pariwisata di Kecamatan Dlingo dan data primer diperoleh langsung dari responden. Responden dalam penelitian ini adalah pelaku industri wisata dikecamatan Dlingo, Bantul. Analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif statistik. Penggambaran performance pariwisata akan dapat memberikan gambaran bagaimana kinerja industri pariwisata tersebut selama ini. Dengan demikian kita akan mengetahui apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan. Pemetaan objek wisata berguna untuk melihat pemetaan lokasi objek wisata dan potensi wisata serta diharapkan dapat menjelaskan kinerja sektor pariwisata yang ada di Kecamatan Dlingo. Berdasarkan kinerja (performance) industri wisata tersebut selanjutnya dilakukan need assesment. Need assesment digunakan untuk mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan oleh pelaku industri wisata dalam upaya peningkatan kapasitas usaha.

KAJIAN PUSTAKA

Pariwisata dan Potensi Wisata

Pariwisata adalah aktivitas yang sangat kompleks (Fadahunsi, 2011; Bunruamkaew & Murayama, 2012). Sehingga memerlukan penanganan yang serius Berkembangnya suatu pariwisata dalam suatu daerah akan membawa perubahan pada daerah, yaitu bernilai positif jika pengembangan pariwisata dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang benar, yakni melalui perencanaan yang cermat dan matang supaya sesuai dengan kondisi setempat (Imran, 2012). Pariwisata merupakan salah satu sektor yang diharapkan akan dapat menjadi penghasil devisa utama, dan berperan dalam pengembangan wilayah. Menurut Pendit (2003) potensi wisata merupakan berbagai sumber daya yang terdapat disuatu daerah tertentu yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata, dengan kata lain potensi wisata adalah berbagai sumber daya yang dimiliki oleh suatu tempat dan dapat dikembangkan menjadi suatu atraksi wisata (tourist attraction) yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek-aspek lainnya. Wiseza (2017) juga menambahkan bahwa potensi wisata

adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata, dan merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut. Selain itu, Wiseza (2017) juga menambahkan mengenai potensi wisata, yaitu sebagai segala yang dimiliki oleh suatu daya tarik wisata dan berguna untuk mengembangkan industri pariwisata di daerah tersebut, jadi yang dimaksud dengan potensi wisata adalah sesuatu yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik sebuah objek wisata. Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan tentang pengembangan wisata oleh Vitasurya (2015) tentang kebijakan lokal untuk pembangunan berkelanjutan pada desa wisata di Kalibiru dan Desa Lopati, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gomez, et al. (2015) tentang pemetaan prioritas pada tujuan wisata wine dengan pendekatan empiris di lima bagian penghasil wine di Spanyol. Pemetaan potensi wisata yang berkaitan dengan akar kayu jati yang dilakukan di Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kota potensi dalam mengembangkan industri kreatif pariwisata serta desa wisata. Dalam menghadapi persaingan bisnis pariwisata, diperlukan adanya kreativitas dan inovasi.(Kussujaniatun,2017).

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA

Strategi pada prinsipnya berkaitan dengan persoalan: Kebijakan pelaksanaan, penentuan tujuan yang hendak dicapai, dan penentuan cara-cara atau metode penggunaan sarana-prasarana. Strategi selalu berkaitan dengan 3 hal yaitu tujuan, sarana, dan cara. Oleh karena itu, strategi juga harus didukung oleh kemampuan untuk mengantisipasi kesempatan yang ada. Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan pariwisata daerah, pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata.

Strategi perkembangan pariwisata yang menunjang pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal: Perlu ditetapkan beberapa peraturan yang berpihak pada peningkatan mutu pelayanan pariwisata dan kelestarian lingkungan wisata, bukan berpihak pada kepentingan pihak-pihak tertentu, Pengelola pariwisata harus melibatkan masyarakat setempat, Kegiatan promosi harus beraneka ragam, Perlu menentukan daerah tujuan wisata yang memiliki keunikan terutama yang bersifat tradisional dan alam., Perlu dilakukan pemerataan arus wisatawan bagi semua daerah tujuan wisata yang ada diseluruh Indonesia, Mengajak masyarakat sekitar daerah tujuan wisata agar menyadari peran, fungsi dan manfaat pariwisata serta merangsang mereka untuk memanfaatkan peluang - peluang yang tercipta bagi berbagai kegiatan yang dapat menguntungkan secara ekonomi, Sarana dan prasarana yang dibutuhkan perlu dipersiapkan secara baik untuk menunjang kelancaran pariwisata. misalnya dengan pengadaan perbaikan jalan, telepon, internet dan pusat pembelanjaan disekitar lokasi daerah wisata.

Dengan memperhatikan beberapa masukan ini kiranya dapat membantu bagi penyelenggara pariwisata yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Factor baik internal dan eksternal, pariwisata dapat menghasilkan pendapat yang luar biasa bagi suatu daerah terutama apabila dikelola dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian ini berupa pemetaan potensi objek wisata di Kecamatan Dlingo, Bantul.:

Desa Mangunan

BUKIT PANGUK KEDIWUNG

Alamat : Kediwung, Mangunan, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55783

Jam buka : Setiap hari buka 24 jam

BUKIT MOJO GUMELEM

Alamat : Kanigoro, Mangunan, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55783

Jam buka : Setiap hari 24 jam

TEBING WATU MABUR

Alamat : Lemahbang RT28, Lembah Bang, Mangunan, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55783

Jam buka : Setiap hari 24 jam

JURANG TEMBELAN

Alamat : Mangunan, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55783

Jam buka : Setiap hari 24 jam

KEBUN BUAH MANGUNAN

Alamat : Jl. Imogiri - Dlingo, Sukorame, Mangunan, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55783

Jam buka : Setiap hari 05.00-18.00

SERIBU BATU SONGGO LANGIT

Alamat : Jl. Hutan Pinus Nganjir, Sukorame, Mangunan, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55783

Jam buka : -

WATU GOYANG

Alamat : Cempluk Jalan WatuGoyang No.1 Cempluk, Griloyo, Mangunan, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55783

Jam buka : Setiap hari 24 jam

GARDU PANDANG GOA GAJAH

Alamat : Mangunan, RT.28, Lemahbang, Dlingo, Lembah Bang, Mangunan, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55783

Jam buka : Setiap hari 05.00-18.00

HUTAN PINUS ASRI

Alamat : Jl. Hutan Pinus Nganjir, Sukorame, Mangunan, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55783

Jam buka : Setiap hari 06.00-17.00

WISATA ALAM WATU LAWANG

Alamat : Cempuk, Mangunan, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55783

Jam buka : Setiap hari 24 jam

PUNCAK SONGGO LAGIT

Alamat : Jl. Imogiri - Dlingo, Sukorame, Mangunan, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55783

Jam buka : Setiap hari 06.00-17.00

GOA GAJAH

Alamat : Mangunan, Dlingo, Lembah Bang, Mangunan, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55783

Jam buka : Setiap hari 24 jam

Desa Muntuk

BUKIT LINTANG SEWU

Alamat : KarangAsem, Muntuk, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55783

Jam buka : Setiap hari 04.30-22.00

PUNCAK PINUS BECICI

Alamat : Gunungcilik, RT.07/RW.02, Gn. Cilik, Muntuk, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55783

Jam buka : Setiap hari 06.00-19.00

PINTOE LANGIT DAHROMO

Alamat : Jl. Dahromo, KarangAsem, Muntuk, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55783

Jam buka : Setiap hari 08.00-23.00

DESA WISATA GUNUNG CILIK

Alamat : Dusun GunungCilik, Banjarharjo II, Muntuk, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55783

Jam buka : Setiap hari 04.00-18.00

Desa Terong

WATU NGADEK

Alamat :Dusun Sendangsari, DesaTerong, KecamatanDlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Jam buka : -

HUTAN PINUS SENDANGSARI

Alamat : Jl. Dlingo-Patuk, Pantirejo, Terong, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55783

Jam buka : Setiap hari 06.30-23.00

WISATA OUTBOND GUNUNG MUNGKER

Alamat : Pencitrejo, Pantirejo, Terong, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55783

Jam buka : Setiap hari 08.00-23.00

Desa Jatimulyo

AIR TERJUN RANDUSARI

Alamat : Jl. Randusari, Banyuurip, Jatimulyo, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55783

Jam buka : Setiap hari 08.00-17.00

WISATA ALAM TRI PANJUNG

Alamat :Dodogan, Jatimulyo, Dlingo, Dodongan, Jatimulyo, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55783

Jam buka : -

Desa Dlingo

AIR TERJUR LEPO

Alamat : Dusun Pokoh, DesaDlingo, KecamatanDlingo, Pokoh I, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55783

Jam Buka : Setiap hari pukul 06.00 – 18.00

Telepon : 087838268776

RIVER TUBING MAHESA JAYA ADVENTURE

Alamat : Kebongsu 1, Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Jam Buka :Setaip hari pukul 06.00 – 16.00

Telepon : 081254488488

DESA WISATA GUNUNG CILIK

Alamat : Dusun Gunung Cilik, Muntuk, Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Derah Istimewa Yogyakarta

Jam Buka : Setiap hari 06.00 – 18.00

Telepon : 082329077770

EKOWISATA JATISARI SEROPAN 3

Alamat : Jl. Gua Jati Sari Seropan 3, Muntuk, Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupate Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Jam Buka : Setiap hari 04.00 – 19.00

Telepon : 081804911934

AIR TERJUN BANYU NIBO

Alamat : Sanggrahan 2, Muntuk, Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Jam Buka : -

Telepon : -

SPOT PINTOE LANGIT DAHROMO

Alamat : Jl. Daromo, Banjarharjo, Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Derah Istimewa Yogyakarta

Jam Buka : Setiap hari 08.00 – 23.00

Telepon : 089636678448

Desa Temuwuh

Desa Temuwuh belum menjadi tujuan desa wisata, namun potensi dari Desa Temuwuh yaitu UKM industri kayu/meubel berupa daun pintu, meja, kursi, rak kayu dan barang-barang dari kayu, serta perajin bunga palsu.

Dengan hasil pemetaan objek wisata ini maka dapat mengetahui jenis-jenis dan potensi wisata alam lainnya baik yang masih dalam tahap perkembangan maupun yang belum dikembangkan, sehingga dengan adanya pemetaan pariwisata dapat menetapkan titik-titik lokasi tempat wisata dan mempermudah wisatawan lokal maupun mancanegara memilih tempat-tempat wisata yang ingin mereka kunjungi.

PENUTUP

Pariwisata dapat menghasilkan pendapatan yang luar biasa bagi setiap daerah apabila mereka bisa mengelolanya dengan baik dan benar. Tetapi pengelolaan yang baik tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan awal tanpa adanya dukungan yang melatar belakangi pengelola tersebut. Berdasarkan pemetaan objek wisata maka peluang tercipta pengembangan sektor wisata yang masih tradisional dan alam perlu di manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sementara berbagai kendala dan tantangan yang ada terutama masalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan gangguan keamanan yang sering timbul, perlu disiasati dengan berbagai strategi agar kendala dan tantangan tidak menghambat perkembangan pariwisata di Indonesia. Serta jaminan perlindungan terhadap para wisatawan sehingga para wisatawan tidak ragu-ragu untuk mengunjungi daerah wisata yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Baker, Chris. 2006. Cultural Studies Teori & Praktik. Yogyakarta : Kreasi Wacana

Bunruamkaew, Khwanruthai and Murayama, Yuji. (2012). Land Use and Natural Resources Planning for Suitainable Ecotourism Using GIS in Surat Thanu, Thailand. Sustainability 2012,4, 412-429.

Dowling, RK and DA.Fennel. 2003. The Context of Ecotourism Policy and Planning. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta

Fadahunsi, J.T. Application of Geographical Information System (GIS) Technology to Tourism

- Management in Ile-Ife, Osun State, Negeria. *Pac. J. Sci. Technol.* 2011,2(13),274-283.
- Fafurida dan Dyah Maya Nihayah. 2011. Pengembangan Unit Usaha Industri Kecil Melalui Metode Pemetaan dan need Assessment. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan* 5 (1)
- Gomez, Mar, et al., (2015). Priority Maps at Wine Tourism Destinations: An empirical approach in Five Spanish Wine Regions. *Journal of Destination Marketing & Management* 4 (2015), 258-267.
- Hartati, Anis Siti., Kussujaniatun, Sri and Marita, 2019, Improving Society Empowerment Of Traditional Oil Minners at Old Wells Of Wonocolo, *ROJAS*, 3(87), March 2019 DOI 10.18551/rjoas.2019-03.40
- Imran, A. N., & West. 2012. Identifikasi Kapasitas Komunitas Lokal Dalam Pemanfaatan Potensi Ekowisata Bagi Pengembangan Ekowisata Di Kawah Cibuni. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 23, 85–102
- Kussujaniatun, Sri., Teguh Kismantoroaji and Hari Kusuma Satria Negara, 2017. Tourism Potential Mapping using Ethnographic Approach: A Case of Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 12: 5437-5442 DOI: 10.3923/jeasci.2017.5437.5442
- Mowforth, M., & Munt, I. (2007). *Tourism and Sustainability*. Great Britain: Taylor and Francis Books, Inc.
- Oka A. Yoeti ,Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1997.)hlm 4
- Pendit, N.S. 2003. *Ilmu Pariwisata, Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
- Prahasta, Eddy. (2001), *Konsep – Konsep Dasar Sistem Informasi Geografi, Informatika, Bandung*
- Prosiding SNATIF. 3. ISBN 978-602-1180-33-4
- Risteski M., Kosevski, J., &Arnaudov, K. (2012). Spatial Planning and Sustainable Tourism as Basic for Developing Competitive Tourist Destinations. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 44, 375-386.
- Sesotyaningtyas, Mega &Manaf, Asnawi.(2015). Analysis of Sustainable Tourism Village Development at Kutoharjo Village, Kendal Regency of Central Java. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 184, 273-280.
- Suryono.2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Vitasurya, Vicentia Reni. (2015). Local Wisdom for Sustainable Development of Rural Tourism, Case on Kalibiru and Lopati Village, Province of Daerah Istimewa Yogyakarta. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 216, 97-108.
- Wiseza, F. C. (2017). Faktor-Faktor Yang Mendukung Pengembangan Obyek Wisata Bukit Khayangan Di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Vol. 4, No. 1.
- Wulandari A., Utomo AP., Nugraha, F. (2016) Pemetaan Industri kecil dan menengah menggunakan system informasi geografis (SIG) berbasis web dikabupaten Kudus

ANALISIS KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI KOTA KREATIF: PENDEKATAN SINERGITAS QUADRO HELIX

Prayudi¹, Kartika Ayu Ardhanariswari², Ninik Probosari³

1,2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UPN “Veteran” Yogyakarta,
email: prayudi@upnyk.ac.id , ardhanariswari_ayu@yahoo.com

3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN “Veteran” Yogyakarta,
email: ninik1973@yahoo.com

Abstract

The purpose of this study is to analyse the development of Yogyakarta as creative city. The analysis was done based on the quadro helix model approach. Building the concept of quadro helix with producing creativity and innovation capability requires the participation of four sectors, namely government, academician, entrepreneur, and society. This framework emphasizes a societal responsibility of universities, in addition to their role of educating and conduction research. The quadruple helix model has been argued to include both the civil society and the users of innovation. Therefore, it requires an approach that combines the synergy between academicians, entrepreneurs, government, and society in aquadro helix model. The objective of this research is to develop a creativity model through a quadro helix model in improving innovation performance of the creative cities. Creative cities based on local potentials as regional excellence and identity need to be encouraged to increase added value and competitiveness, and be able to become the centre of growth for the surrounding area. Based on this background, an understanding of how the concept of creative city is applied in Indonesia's creative city is interesting to look at. In this research, the analysis was focused on Daerah Istimewa Yogyakarta that was as a creative city. This study used qualitative research method. This method systematically describes the facts or characteristics of a particular population or a particular field factually and accurately. Particularly, in-depth interview and focus group discussion were conducted to obtain detailed information from government, academics, and community groups. Findings of research indicate some challenges in the development of Yogyakarta as creative city. First was to identify the economic potentials of the city. Second was the existence of creative class within community. Third was the existence of supporting environment for the creativity of community to grow. Of these three challenges, the government of the City of Yogyakarta was slow in providing relevant infrastructures.

Keywords: creative city, creative community groups, quadro helix

1. PENDAHULUAN

Tumbuhnya Kota Kreatif masih perlu dukungan dari berbagai pihak, sehingga memiliki kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi kreatif di daerah. Untuk itu, pengembangan Kota Kreatif merupakan salah satu strategi untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Kota Kreatif berperan untuk mendukung ekosistem kondusif dalam pengembangan ekonomi kreatif. Untuk itu, pengembangan Kota Kreatif

haruslah dilakukan secara bersama-sama dan sinergi oleh lintas pemangku kepentingan yang melibatkan Pemerintah baik pusat maupun daerah, komunitas kreatif sebagai representasi masyarakat, akademisi dan para pelaku usaha. Kunci utama pengembangan Kota Kreatif adalah keterlibatan lintas pelaku, yaitu pemerintah, komunitas, akademisi dan pelaku usaha (quadro-helix) dalam berbagi tugas dan peran, sehingga menghasilkan upaya yang kolaboratif dan sinergis dalam penumbuhkembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi.

Parameter Kota Kreatif yang pertama adalah kota tersebut mampu mengembangkan potensi ekonomi kreatif. Kedua, adanya peran dan sinergi antara Pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat (komunitas). Ketiga, mempunyai strategi dan inovasi yang berkelanjutan dalam menciptakan kegiatan kreatif yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah. Kota Kreatif yang berbasis pada potensi lokal sebagai keunggulan dan identitas daerah perlu didorong untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing, serta mampu menjadi pusat pertumbuhan bagi daerah (hinterland) sekitarnya. Selain itu, sebuah Kota Kreatif juga harus dapat membangun ekosistem yang kondusif bagi pengembangan inovasi di daerah. Sebagai sebuah upaya untuk mendorong akselerasi pengembangan Kota Kreatif di Indonesia, diperlukan sinergi dan kolaborasi bersama quadro-helix sehingga masing-masing daerah mampu memetakan dengan jelas basis yang menjadi keunggulannya dan dapat menentukan langkah strategis dan prioritas program yang ideal sehingga mampu mendorong peningkatan ekonomi dan daya saing di daerah.

Pengembangan Kota Kreatif merupakan salah satu strategi untuk mencapai arahan Presiden untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Kota Kreatif berperan untuk mendukung ekosistem kondusif dalam pengembangan ekonomi kreatif. Untuk itu, pengembangan Kota Kreatif haruslah dilakukan secara bersama-sama dan sinergi oleh lintas pemangku kepentingan yang melibatkan Pemerintah baik pusat maupun daerah, komunitas kreatif sebagai representasi masyarakat, akademisi dan para pelaku usaha.

Selain pendekatan pada bidang sektoral sebagaimana yang dicetuskan oleh John Howknis, muncul peneliti lain yang membawa sebuah pendekatan berbeda bernama Charles Landry. Dalam pendekatan yang diusung oleh Charles Landry ini lebih mengetengahkan pendekatan yang berbasis spasial atau kewilayahan. Hasil pendekatan ini adalah teori mengenai kota kreatif dan pembentukannya. Landry percaya bahwa kota-kota di seluruh dunia sedang mengalami apa yang disebut sebagai masa transisi menuju sebuah pembaruan dari era industri lama. Untuk itu, pemberi nilai tambah pada kegiatan ekonomi saat ini berpindah bukan lagi pada barang yang diproduksi namun lebih kepada modal intelektual yang dimasukkan kedalam hasil produksi, baik yang berupa barang ataupun jasa.

Ada sejumlah hambatan yang menurut Landry akan menyulitkan sebuah kota untuk berkembang menjadi kota kreatif. Hambatan hambatan ini diantaranya adalah:

- Akuntabilitas
Akuntabilitas menjamin adanya aliran aspirasi yang lancar terkait pengembangan ekonomi kreatif di kota tersebut dari masyarakat ke pemerintah. Yang harus dikurangi dalam hal ini bukanlah akuntabilitas yang demikian. Namun yang harus dikurangi adalah akuntabilitas yang menjadi alasan untuk bertindak lambat. Akuntabilitas tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan respon yang lambat atau menghambat inovasi dengan alasan khawatir hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada.
- Birokrasi
Birokrasi seringkali memasukkan peraturan peraturan yang kompleks dan rumit dalam regulasi terkait perekonomian kreatif. Pengurusan perizinan, lisensi dan sebagainya

kadangkala masih menemui hambatan di sektor ini.

- **Pemikiran pendek**

Pemikiran yang pendek dari para politisi dan pembuat kebijakan seringkali menjadi penghambat perkembangan kreativitas. Hal ini dikarenakan seringkali mereka tidak dapat memberikan solusi jangka panjang dari permasalahan yang dihadapi dan perencanaan yang lebih visioner terkait perkembangan kota kreatif tersebut.

- **Patronase**

Patronase seringkali menjadi penghambat perkembangan kota kreatif mengingat pada umumnya patron menguasai akses terhadap sumber daya dan informasi. Hal ini membuat sejumlah orang lain menjadi sulit untuk mengembangkan kreativitasnya dan pada akhirnya menghambat perkembangan kota kreatif.

- **Mempersiapkan lingkungan kreatif**

Selain mengurangi sejumlah hambatan dalam perkembangan kota menjadi sebuah kota kreatif, kota juga perlu mempersiapkan beberapa hal yang dapat menjadi prekondisi dari sebuah kota kreatif. Hal tersebut diantaranya

- **Pemetaan proyek**

Dalam pengembangan kota kreatif, seringkali ditemukan sejumlah hambatan yang dapat menyebabkan proyek-proyek penunjang perkembangan kota kreatif menjadi gagal. Namun diluar itu, kegagalan ini harusnya dijadikan pembelajaran dengan melakukan pemetaan secara jelas mana proyek yang berhasil dan mana yang gagal dikembangkan oleh kota.

Disinilah peran individu kreatif menjadi sangat penting. Individu kreatif ini sendiri tentu memiliki latar kebudayaan dan berbeda beda. Latar belakang kebudayaan inilah yang dimanfaatkan oleh mereka untuk menciptakan suatu produk ekonomi guna dapat bertahan hidup di kota. Oleh karena itu, Landry mendefinisikan kota kreatif sebagai sebuah kota dimana ada aktivitas kebudayaan yang beragam yang menjadi bagian yang integral dari kegiatan ekonomi kota maupun fungsi sosial dari kota tersebut. Landry percaya bahwa ekonomi kreatif dapat dimulai dari pengembangan kota kreatif. Dalam tulisannya yang lain terkait kota kreatif, Landry menyebutkan bahwa ada dua hal yang perlu dilakukan oleh sebuah kota guna menjadi sebuah kota kreatif. Pertama adalah terkait bagaimana mengurangi sejumlah hambatan yang menghambat perkembangan kota menjadi kota kreatif dan mempersiapkan sebuah lingkungan yang kreatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pemahaman mengenai bagaimana konsep sinergitas komunikasi quadrohelix dapat diaplikasikan di kota-kota kreatif Indonesia menjadi menarik untuk diteliti atau dikaji. Quadro-Helix merupakan pilar utama yang berperan mendorong tumbuhnya industri kreatif yang meliputi empat sektor yaitu: government, business, academia dan civil society. Variabel intellectual diukur melalui indikator: pendampingan, konsep manajemen, jejaring. Variabel government diukur melalui indikator: peraturan pemerintah, undang-undang, kebijakan. Variabel business diukur melalui indikator: kerjasama, perlindungan HAKI, iklim bisnis. Variabel civil society diukur melalui indikator: user potensial, budaya, media komunikasi. Variabel kreativitas diukur melalui indikator: keorisinilan ide, keunikan ide, variasi ide, keluasan ide. Variabel innovation capability diukur melalui indikator: inovasi teknologi, inovasi produk, inovasi pasar, inovasi pelayanan.

Pemilihan Kota Yogyakarta sebagai objek kajian karena kota Yogyakarta memiliki potensi luar biasa di sektor industri kreatif ini. Dari 16 sektor industri kreatif, tersebut

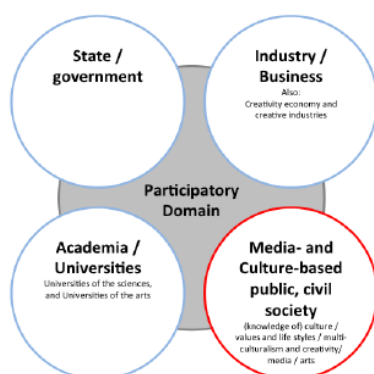
Kota Yogyakarta memiliki beberapa potensi unggulan unggulan seperti fashion, kerajinan, kuliner, dan seni pertunjukan. Oleh karena itu, dalam artikel penelitian ini akan dijawab bagaimana lembaga-lembaga pendidikan di DI Yogyakarta, seperti halnya Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Yogyakarta bisa seoptimal mungkin untuk mendorong pusat-pusat tumbuhnya ekonomi kreatif di Yogyakarta. Berbagai strategi ini diharapkan dapat mendorong pengembangan KOTA YOGYAKARTA sebagai salah satu sentra industri kreatif. Artikel penelitian ini akan mengungkap lebih jauh mengenai strategi pengembangan Kota Yogyakarta menuju Kota Kreatif dengan memperhatikan beberapa pendekatan yang ada dalam variabel quadro-helix meliputi intellectual, government, business dan civil soccity.

2. METODE PENELITIAN

Riset ini juga sesuai dengan penekanan peta jalan (road map) penelitian UPN Veteran dimana untuk riset bidang “Pengembangan Potensi Daerah” pada tahun 2016-2020 fokus pada “pengembangan industri kreatif”. Jika dihubungkan dengan kajian penelitian ini, model dan strategi kota kreatif yang dilakukan oleh berbagai kota di Indonesia, khususnya Yogyakarta bisa memberikan kontribusi bagi khasanah keilmuan dan kajian mengenai pengembangan kota kreatif dan dampaknya.

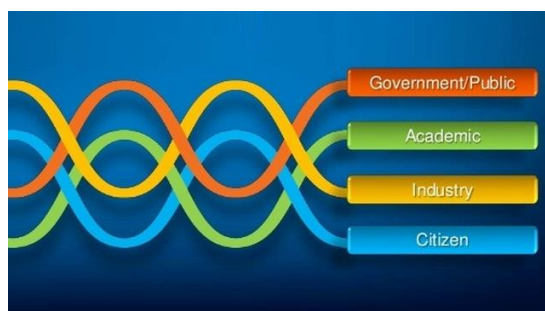
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode desriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15). Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas.

Pendekatan yang dilakukan dalam metode penelitian ini adalah



Gambar 1. Konsep Dasar Teori Quadro-Helix

menurut Kolehmainen pada Quadro Helix, Innovation and The Knowledge-Based Development



Gambar 2. Konsep Teoritik Quadro-Helix menurut Kolehmainen pada Quadro Helix, Innovation and The Knowledge-Based Development

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan penulis menggunakan beberapa cara, antara lain:

- **Observasi**
Adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan penulis (Ruslan, 2006: 35).
- **Wawancara**
Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara dilakukan kepada narasumber dengan cara mengajukan pertanyaan sesuai dengan Interview Guide yang ada secara langsung. Interview Guide berfungsi untuk memberikan bimbingan secara memokok apa-apa yang ditanyakan, menghindari kemungkinan melupakan beberapa persoalan yang relevan terhadap pokok-pokok penyelidikan. Interview Guide disini berfungsi sebagai panduan peneliti dalam proses wawancara (Ruslan, 2006 : 23).
- **Studi Pustaka**
Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.
Pada penelitian yang telah dilakukan, dari data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka, data tersebut akan dianalisis. Model analisis terhadap data yang diperoleh baik secara primer ataupun sekunder, dimana hasilnya akan disajikan dalam bentuk uraian dan tidak memakai kaidah-kaidah statistik. Langkah yang dilakukan penulis kemudian adalah menggabungkan data yang terdapat di lapangan untuk diolah dan disederhanakan, lalu disusun secara sistematis untuk kemudian pada akhirnya dilakukan penarikan kesimpulan. Metode Deskriptif merupakan suatu situasi proses dan gejala-gejala atau objek tertentu yang sedang diamati (Ruslan, 2008: 12).
Untuk kepentingan penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan teknik triangulasi data dalam mengembangkan validitas atas data penelitian yang dilakukan. Cara ini mengarahkan peneliti dalam mengumpulkan data, bahwa penulis wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia. Artinya, data yang sama atau sejenis, akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data yang

berbeda. Dengan demikian, apa yang diperoleh dari sumber yang satu bisa lebih teruji kebenarannya bilamana dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda (Sutopo, 2002: 79). Melalui teknik Triangulasi Data yang dilakukan sebagai pengembangan validitas data, maka peneliti dalam hal ini membandingkan data-data yang telah diperoleh dari penggunaan teknik yang memiliki sumber data berbeda tersebut. Selanjutnya didapat hasil yang lebih terpercaya dan dapat teruji kebenarannya.

Tabel 1. Variable dan Indikator Penelitian

No	Variable	Indikator
1.	Indikator Kota Kreatif	Pemeliharaan dan pengembangan potensi Ekonomi Kreatif Pemeliharaan Creative Class (golongan atau individu kreatif) Perencanaan dan pengembangan Lingkungan Kreatif
3.	Sinergi quadro-helix : Multi stekholder Pemerintah, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat	Peran Multiple Stakeholders Penunjukan atau pembuatan lembaga / badan yang bertanggung jawab sebagai koordinator dalam penerapan konsep kota kreatif Pembagian peran dalam penerapan konsep Diskusi publik mengenai visi, misi, dan strategi yang akan dan telah dijalankan Kebijakan maupun implementasinya dalam bidang ekonomi, social, budaya dan lingkungan.

3. PEMBAHASAN

3.1 Indikator Kota Kreatif di Yogyakarta

Teori industri kreatif sektoral yang dicetuskan oleh John Howkins. Howkins percaya bahwa kreativitas telah membagi dunia dalam pelbagai macam jalan berdasarkan cara seseorang mewujudkan kreativitasnya dalam wujud sesuatu yang dapat dijual sehingga memiliki nilai ekonomi. Oleh karenanya, guna mewujudkan ekonomi kreatif harus digunakan pembagian yang jelas pada produksi barang kreatif yang dihasilkan berdasarkan sektor sektornya. Untuk itu ia secara sistematis telah membagi industri kreatif menjadi 15 sektor berdasarkan pada beberapa parameter seperti input terhadap pendapatan negara, nilai tambah dari produk dan perbedaan produk dari produk produk yang telah ada sebelumnya. Adapun 15 sektor tersebut antara lain: Periklanan, arsitektur, seni, kerajinan, desain, fesyen, film, music, pertunjukan, penerbitan, piranti lunak, permainan, permainan komputer, riset dan pengembangan serta televisi dan radio.

Yogyakarta merupakan wilayah dengan segudang potensi ekonomi kreatif. Potensi tersebut terentang mulai dari sumber daya manusia hingga kultur tradisional yang melekat pada Yogyakarta. Tidak seperti kebanyakan wilayah di nusantara, Yogyakarta bisa dibilang sebagai wilayah yang minim akan sumber daya alam. Oleh karena itu, Yogyakarta tidak bisa menyandarkan perekonomiannya melalui industri-industri ekstraktif. Namun demikian, Yogyakarta memiliki tradisi budaya yang panjang, didukung oleh keberadaan kelompok-kelompok minoritas kreatif yang memiliki tradisi literati dan keilmuan yang tinggi, tersebar di berbagai disiplin keilmuan di 133 kampus, didukung oleh kalangan inovator muda di bidang industri kreatif berbasis kampus, terutama di bidang teknologi informasi (TI), yang berusaha di tengah-tengah kota dan di klaster-klaster kerajinan di pedesaan. Dengan kata lain, Yogyakarta

memiliki sumber daya manusia kreatif yang bisa menopang perekonomian Yogyakarta.

Sejak lama Yogyakarta telah menjadi destinasi wisata yang cukup terkenal. Wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun juga luar negeri. Keanekaragaman upacara keagamaan dan budaya dari pelbagai agama serta didukung oleh kreativitas seni dan keramahan masyarakat, membuat Yogyakarta mampu menciptakan produk-produk budaya dan pariwisata yang menjanjikan. Bentuk wisata di Yogyakarta sendiri meliputi wisata Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), wisata budaya, wisata alam, wisata minat khusus, yang dilengkapi dengan pelbagai fasilitas seperti resort, hotel, dan restoran.

Pada titik ini, kita bisa memahami bahwa Yogyakarta memiliki keunggulan dalam sektor ekonomi kreatif dan sektor pariwisata. Keunggulan Yogyakarta tersebut sejalan dengan semangat pemerintah pusat dalam mengembangkan perekonomian kreatif di Indonesia, yang diwujudkan melalui penempatan bersama sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam satu kementerian. Sinergi yang saling menguatkan antara kedua sektor tersebut pada dasarnya akan membawa kekhasan dalam pengembangan perekonomian Yogyakarta. Di satu sisi, Ekonomi kreatif mampu meningkatkan kualitas kepariwisataan menjadi daya tarik di destinasi pariwisata, serta menjadi media promosi bagi kepariwisataan. Sebaliknya, kemajuan pariwisata suatu destinasi umumnya diikuti dengan peningkatan permintaan akan karya kreatif. Konsep kegiatan wisata dapat didefinisikan dengan tiga faktor, yaitu harus ada *something to see*, *something to do*, dan *something to buy*. Dalam tiga komponen tersebut, ekonomi kreatif di Yogyakarta berperan sebagai *something to buy*.

Ekonomi kreatif merupakan salah satu penggerak utama kegiatan ekonomi Yogyakarta. Ekonomi kreatif Yogyakarta yang sebagian besar masih berada dalam klasifikasi industri kecil ini menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama sebagian warga Yogyakarta. Sejatinya, subsektor industri kreatif sebagaimana dikemukakan oleh Kemenparekraf telah tumbuh dan berkembang di Yogyakarta sejak lama, jauh sebelum keluar Instruksi Presiden No. 6 tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Hal ini bertambah menarik ketika kita menyadari bahwa persebaran ekonomi kreatif di Yogyakarta tidak hanya terkonsentrasi pada satu titik. Tiap sudut wilayah Yogyakarta yang terdiri atas tiga belas kecamatan memiliki potensinya sendiri yang mampu diolah sedemikian rupa dan mengubahnya menjadi suatu komoditi yang memiliki nilai jual. Dengan kata lain, sumber daya manusia kreatif telah tersebar dan mengakar di pelbagai daerah di Yogyakarta.

Yogyakarta juga memiliki ruang kreatif sebagai sarana dan prasarana tumbuh kembangnya industri kreatif di Yogyakarta. Bagi subsektor seni pertunjukan dan musik, ada nama-nama seperti Taman Budaya Yogyakarta, Museum Benteng Vredenburg, Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardja Soemantri, dan sebagainya. Sementara bagi subsektor pasar barang seni dan kerajinan, Yogyakarta memiliki Malioboro, Pasar Beringharjo, Pasar Seni Gabusan, Pasar Ngasem, galeri-galeri swasta, dan sebagainya. Ruang kreatif yang dimiliki oleh Yogyakarta menjadi suatu sarana yang mampu menjaga eksistensi kreativitas dan industri kreatif di Yogyakarta.

Selain memiliki industri kreatif, stakeholder di Yogyakarta juga turut memberikan katalis bagi industri kreatif dengan menggelar pelbagai macam event tahunan. Event-event itu diantaranya adalah Festival Film Pelajar Yogyakarta (FFPJ), Jogja Asian Film Festival (JAFF), Master class programme of the Jogjakarta Documentary Film Festival, Yogyakarta Contemporary Music Festival, The Jogja International Performing Arts Festival, Jogja-Netpac Asian Film Festival, Biennale Jogja, The Parade Clothing Exhibition, Pinasthika. (Affandi dalam Arfani (ed), 2012). Event-event tersebut seringkali menjadi pemantik bagi perkembangan

perekonomian kreatif di Yogyakarta. Ketika kita mengambil Pinasthika sebagai contoh, event ini diselenggarakan oleh P3I Pengda Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Harian Kedaulatan Rakyat sebagai perintis, dengan didukung sepenuhnya oleh P3I Pusat. Event kreatif tahunan ini telah dimasukkan agenda nasional oleh Kementerian Perdagangan dan menarik perhatian internasional.

Ekonomi kreatif sendiri memang memiliki arti penting dalam perekonomian Yogyakarta. Namun, belum ada data pasti mengenai berapa sumbangsih ekonomi kreatif di Yogyakarta terhadap PDRB Yogyakarta sendiri. Hal ini dikarenakan BPS belum menggolongkan industri kreatif dalam perhitungan PDRB. Pegiat ke-15 festival terdepan di Yogyakarta yang sekaligus pendiri Jogja Festivals. Adalah ARTJOG, Asia Tri Festival, Bedog Art Festival, Biennale Yogyakarta, Cellsbuton Yogyakarta New Media Art Fest, Festival Film Dokumenter, Festival Musik Tembi, Jogja Blues Explosion, Jogja Festival Layang-Layang Nasional, Jogja NATPAC Asia Film Festival, KUSTOMFEST, Ngayogjazz, Pesta Boneka, Yogyakarta Contemporary Music Festival serta Yogyakarta Gamelan Festival.

Arah branding Jogja sebagai kota kreatif yang dilakukan Pemerintah Yogyakarta sebenarnya sudah mulai menunjukkan respon positif dari kalangan bisnis. Perusahaan Multinasional yang bergerak di bidang gaming industry, yaitu Gameloft yang juga membuka kantornya di Yogyakarta. Dari sekian banyak pilihan kota yang ada di Indonesia, mengapa Yogyakarta yang dipilih, bukan Jakarta sebagai pusat bisnis ataupun Kota Yogyakarta yang menyediakan sumber daya manusia dan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan berada tak jauh dari Jakarta. Tentunya perusahaan besar sekelas Gameloft punya think tank yang cukup capable untuk menentukan strategi pemasarannya terkait pemilihan kota yang menjadi satellite officenya. Di awal tahun 2018 ini kita bisa bersama menyaksikan seperti apa terobosan-terobosan baru yang dilakukan Yogyakarta untuk dapat memasarkan Yogyakarta sebagai kota Industri Kreatif dengan rumus PDB (Positioning-Differentiation-Branding).

3.2 Industri Kreatif sebagai Pendukung Utama Yogyakarta sebagai Kota Kreatif

Konsep kota kreatif sebagai respon kreatif terhadap permasalahan atau krisis urban yang dihadapi oleh beberapa kota dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Ideologi dari konsep Kota Kreatif adalah memperbaiki lingkungan urban dan memajukan perkembangan atmosfer yang inspiratif bagi kegiatan kreatif masyarakat kota.

Untuk menjadi sebuah Kota Kreatif, Landry dan Bianchini (1995) menganjurkan beberapa hal yang dapat dilaksanakan oleh sebuah kota yang intinya mengembangkan ruang kota sebagai katalisator bagi individu atau golongan kreatif. Pengembangan ruang kota juga sebagai langkah untuk menarik partisipasi komunitas masyarakat dengan menyediakan tempat atau wadah yang kondusif untuk berkegiatan.

Dalam konsep Kota Kreatif, terdapat tiga aspek penting yang perlu diperhatikan bagi sebuah kota dalam mewujudkan konsep Kota Kreatif, antara lain pertumbuhan Ekonomi Kreatif, pemeliharaan Creative Class (golongan atau individu kreatif) dan penyediaan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan kreativitas. Terdapat keterkaitan antara ketiga aspek tersebut yaitu Creative Class berperan dalam pengembangan ekonomi kreatif dimana mereka-lah yang berkreativitas sehingga menghasilkan produk berupa intellectual property yang memiliki nilai komersial. Creative Class pun membutuhkan lingkungan yang kondusif dan inspiratif sehingga mereka dapat melakukan kegiatan kreatif. Lingkungan juga dibutuhkan sebagai wadah aktivitas ekonomi kreatif dimana manusia dapat mengembangkan produk kreatifnya. Keterkaitan tersebutlah yang menjadikan ketiga aspek itu penting.

Sebuah survei dilakukan terhadap pelaku industri kreatif di Yogyakarta oleh Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Yogyakarta, bekerja sama dengan Asosiasi Digital Kreatif (ADITIF) Yogyakarta dan JakPat yang melibatkan 84 responden pelaku usaha kreatif di berbagai bidang. Dari data yang didapat, kategori usaha kreatif yang paling banyak di Yogyakarta ialah bidang agensi kreatif, pemasaran digital, dan media. Disusul kategori lain yakni e-commerce, pengembang aplikasi permainan dan animasi, jasa teknologi, dan pendidikan (lihat Diagram 1).

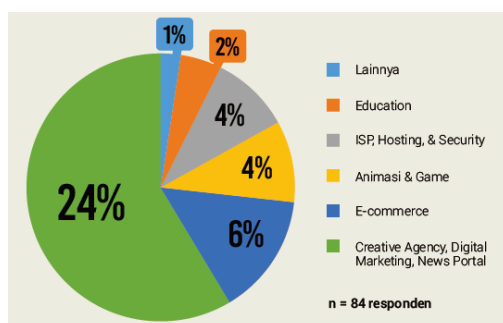


Diagram 1. Kategori pelaku usaha kreatif di Yogyakarta

Pertumbuhan industri kreatif di Yogyakarta sudah terlihat dalam satu dekade terakhir. Banyak faktor yang mendukung Yogyakarta dinilai nyaman bagi industri kreatif. Pertama ialah ketersediaan sumber daya manusia, ditopang banyaknya perguruan tinggi dengan berbagai jurusan. Di luar kampus, berbagai komunitas kreatif bisa ditemukan di kota ini sebagai sarana untuk berbagi informasi dan pengetahuan antar anggotanya.

Faktor kedua, Yogyakarta terkenal dengan biaya hidup yang relatif murah. Dari segi infrastruktur yang dibutuhkan seperti internet dan sewa bangunan bisa dikatakan cukup terjangkau. Hal ini menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang ramah untuk tumbuhnya perusahaan industri kreatif. Karena faktor-faktor itu, potensi industri kreatif di Yogyakarta sangat luar biasa besar.

3.3 Sinergi Quadro-Helix (Pemerintah, Akademisi, Pelaku Usaha dan Masyarakat) sebagai Pendorong Utama Yogyakarta sebagai Kota Kreatif

Dukungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengembangan ekonomi kreatif diantaranya dapat melalui (i) pembangunan pusat kreatif (creative center), (ii) pengembangan kawasan kreatif, (iii) pemberian penghargaan di bidang kreatif, (iv) dukungan riset & pengembangan bagi produk lokal Yogyakarta yang memiliki kreasi unik, (v) kampanye lanjutan Yogyakarta sebagai kota kreatif, (vi) pengadaan seminar kreatif, dan lain sebagainya.

Selain itu, Yogyakarta juga memiliki berbagai sentra industri dan perdagangan dengan berbagai komoditas yang menjadi fokus unggulannya. Dengan pembinaan, perencanaan, dan insentif yang baik, sentra-sentra ini diharapkan dapat berkembang dan memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan Kota Yogyakarta. Tahun 2017 telah terdapat 230.047 sentra industri dan UMKM yang telah dikembangkan di Kota Yogyakarta. Pengembangan sentra industri dan perdagangan melalui pengembangan konsep “competitive district” dengan fokus bidang tertentu harus lebih dikembangkan.

Kebutuhan untuk menuntaskan permasalahan ekonomi dengan mengedepankan pertumbuhan ekonomi kreatif menjadi penting, karena ekonomi kreatif lebih mengedepankan aspek nilai tambah ekonomi yang memberikan kesempatan luas kepada masyarakat dalam mencari jalan keluar dari keterbatasan sumberdaya modal dan barang. Keberadaan beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta, memberikan dampak signifikan pula terhadap kualitas sumber

daya manusia dengan memberikan pelatihan kepada para pelaku ekonomi kreatif untuk selalu berinovasi dalam menciptakan kreasi-kreasi baru yang dapat diterima oleh pasar.

Sejauh ini, Yogyakarta didalam Peraturan Daerah (Perda) Daerah Istimewa Yogyakarta (Kota Yogyakarta) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil telah dibuat untuk pemberdayaan yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha. Selain itu juga dibuat untuk melakukan perlindungan dalam menjaga dan melindungi industri kreatif, koperasi dan usaha kecil dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan serta perkembangan industri kreatif, koperasi, dan usaha kecil. Industri kreatif, koperasi, dan usaha kecil sebagai pelaki usaha memiliki peran dan arti penting serta kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan juga sebagai wahana penciptaan lapangan kerja di Kota Yogyakarta.

Selain ekonomi kreatif yang telah mengalami pertumbuhan luar biasa di Kota Yogyakarta adalah *creative tourism* merupakan potensi kreatif lain yang juga memiliki peluang besar dikembangkan untuk memperkuat daya saing kawasan wisata di tanah air. Dalam konsep pariwisata kreatif, turis bukan hanya diajak menyaksikan hasil akhir dari sebuah pertunjukan tetapi juga mengikuti proses penciptaannya.

Kota Yogyakarta sudah lama menerapkan pola kerja yang selalu mengedepankan sinergi antara pemerintah dengan ABC yakni akademisi, bisnis dan *community/komunitas* atau masyarakat. Komunitas perlu dukungan dari pemerintah, juga sebaliknya karena program yang dilakukan sama-sama untuk mendukung Kota Yogyakarta yang kreatif. Dalam konteks pelaku usaha/bisnis tentu bisa kita lihat industri kreatif yang bisa menyumbang perekonomian masyarakat, bahkan Presiden pun juga sudah mencanangkan bahwa industri kreatif sebagai tulang punggung perekonomian bangsa. Oleh karena itu, dengan pola sinergi 4 (empat) itu tadi sangat efektif untuk menjalankan program-program yang berkaitan dengan unsur kota kreatif.

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang dihasilkan dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang berhasil dirumuskan adalah sebagai berikut:

Dukungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengembangan ekonomi kreatif diantaranya dapat melalui (i) pembangunan pusat kreatif (*creative center*), (ii) pengembangan kawasan kreatif, (iii) pemberian penghargaan di bidang kreatif, (iv) dukungan riset & pengembangan bagi produk lokal Yogyakarta yang memiliki kreasi unik, (v) kampanye lanjutan Yogyakarta sebagai kota kreatif, (vi) pengadaan seminar kreatif

Pemerintah Kota Yogyakarta telah banyak bersinergi dengan lembaga semacam Forum-forum kreatif seperti Rumah Kreatif, Pusat Seni/Kerajinan dan Industri Kreatif, dan yang lainnya, diharapkan bisa lebih cepat menjangkau forum dan komunitas kreatif, Oleh karena itu, sikap mengedepankan sinergi antara pemerintah dengan ABC yakni Akademisi, Bisnis dan *Community/Komunitas* atau masyarakat merupakan landasan utama dalam membangun kota kreatif. Dengan adanya sinergi ini pemerintah dan komunitas bersama menyusun program yang berkaitan dengan kota kreatif. Komunitas perlu dukungan dari pemerintah, juga sebaliknya karena program yang dilakukan sama-sama untuk mendukung terwujudnya kota yang kreatif. Munculnya komunitas bahkan event kita sudah melibatkan banyak komunitas, akademisi juga sangat mendukung dan diperlukan, seperti bagaimana teori pengembangan kota kreatif dan lainnya. Dalam konteks pelaku usaha/bisnis tentu bisa kita lihat industri kreatif yang bisa menyumbang perekonomian masyarakat, bahkan menumbuhkan industri kreatif.

Adanya peran komunitas yang aktif mendukung kota Yogyakarta menuju kota kreatif.

yakni adanya Jogja Creative Society, sehingga melalui forum-forum seperti ini akan mampu menjadi simpul kreatif yang menghubungkan komunitas-komunitas kreatif yang ada di kota tersebut.

Untuk menuju kota kreatif diperlukan rumusan misi dan gagasan yang disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam tujuannya sebagai kota kreatif.

Dalam merumuskan merumuskan model strategi Kota Kreatif, maka setiap kota harus melibatkan seluruh komponen stakeholders-nya sehingga akan menjadikan rumusan model strategi kota kreatif yang menjadi lebih relevan karena potensi yang diunggulkan dikaji dari berbagai aspek secara luas, paling tidak dihargai oleh masyarakatnya sendiri sehingga mereka akan ikut bertanggung jawab dalam mewujudkannya.

REFERENSI

- Anholt, Simon. 2007. *Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities, and Regions*, Penerbit Palgrave Macmillan, New York
- Djunaedi, Achmad. 2002. "Pemasaran Kota dalam kaitannya dengan Perencanaan Kota", Makalah, Seminar Nasional "Peranan Pendidikan Perencanaan di Indonesia: Menjawab Tantangan Perubahan", 27 Juli 2002, Yogyakarta
- Hermuningsih, S. 2017. Analisis Strategi Pengembangan. Industri Kreatif. (Custom Distro Clothing) untuk Meningkatkan Daya Saing Pelaku Ekonomi Lokal di Kota Yogyakarta. BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA.
- Kolehmainen, J., Irvine, J., Stewart, L., Karacsonyi, Z., Szabó, T., Alarinta, J., & Norberg, A. (2016). Quadruple helix, innovation and the knowledge-based development: lessons from remote, rural and less-favoured regions. *Journal of the Knowledge Economy*. Diakses melalui <https://realkm.com/applying-thequadruple-helix-model-of-open-innovation-in-knowledge-based-development/>
- Landry, C. 2008. *The Creative City : A Toolkit for Urban Innovators* 2nd edition. Comedia.
- Pasaribu, Rowland B. F. Pembangunan Ekonomi Daerah. Alamat laman: <http://docplayer.info/224481-Pengertian-pembangunan-ekonomi-daerah.html> (diakses 23/08/2018)
- Rahmat, Yananda; Ummi Salamah. 2014. *Branding Tempat, Membangun Kota, Kabupaten, dan Provinsi Berbasis Identitas*. Penerbit Makna Informasi: Jakarta.
- Rangkuti, Freddy. 2004. *The Power of Brand*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Yanuar, H. 2017. Mimpi Yogyakarta Jadi Pusat Industri Kreatif. Alamat laman: <https://www.liputan6.com/regional/read/3134150/mimpi-yogyakarta-jadi-pusat-industri-kreatif> diakses pada 08 September 2018.
- Rahmad, Kurniawan. 2017. Kota Kraetif (Creative City) dan Pengaruh Komunitas bagi Kota yang Kreatif. Artikel dalam <http://news.indonesiakreatif.net/creative-city-bagaimana-kita-mewujudkannya-di-indonesia/> diakses pada 8 September 2018.
- Majalah Marketeers. 2012. Jogja Kota Kreatif. Dimuat dalam <http://marketeers.com/jogja-kota-kreatif/>. Diakses pada 8 September 201

MODEL MANAJEMEN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS MELALUI UJI PUBLIK RENCANA KONTINJENSI ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO

Puji Lestari¹, Eko Teguh Paripurno², Arif Rianto Budi Nugroho³

¹Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

^{2,3}Jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknologi dan Mineral

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

E-mail: 1puji.lestari@upnyk.ac.id, 2paripurno@gmail.com, 3arif.rianto@gmail.com

Abstract

The research aims to create a community-based disaster risk management (PRBBK) model through the Mount Sinabung eruption contingency plan program. This research uses qualitative descriptive methods. Data collection methods using table top exercise and field test exercise. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation and withdrawal of conclusions at pre-research, during research, and post-research. The results showed that with the implementation of the field, it can improve the safety and preparedness of Karo district communities in the face of the disaster eruption Mount Sinabung. The contribution of this research is a model of community-based disaster risk management through the program of Mount Sinabung eruption contingency plan which is being processed into the regulation of the Karo District, North Sumatera.

Keywords: Contingency plan, Field Test Exercise, Disaster Risk Management, Mount Sinabung

PENDAHULUAN

Gunung Sinabung mengalami erupsi pada tahun 2010 hingga 2019 (Kusumayudha, Lestari and Paripurno, 2018). Erupsi Gunung Sinabung mengakibatkan banyak tempat tinggal dan fasilitas menjadi rusak, sehingga berdampak dalam kehidupan masyarakat sekitarnya. Pada Juni 2019, Gunung Sinabung kembali mengalami erupsi. Tidak ada korban jiwa dalam letusan tersebut, namun masyarakat diminta untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius tiga kilometer dari puncak gunung, radius sektoral lima kilometer sektor selatan-timur, dan empat kilometer sektor timur-utara.

Pengaturan mengenai pengelolaan bencana diamanatkan oleh Undang Undang Bencana No 2004 Tahun 2007 (Presiden Republik Indonesia, 2007) antara lain tentang mitigasi bencana. Guna mengoptimalkan penanganan bencana pada saat terjadi bencana, Pemerintah diamanatkan memiliki kebijakan Rencana Kontinjensi. Kabupaten Karo rawan bencana erupsi Gunung Sinabung, namun belum memiliki dokumen rencana kontinjensi. Peneliti bermaksud memperoleh data mengenai dokumen rencana kontinjensi.

Penelitian tentang rencana kontinjensi telah dilakukan oleh Basyid di Gunung Api Lokon. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa peta rencana kontinjensi terdiri dari peta kawasan risiko bencana, kawasan rawan bencana, kerentanan ekonomi, dan kerentanan sosial. Peta rencana kontinjensi bermanfaat untuk menyebarluaskan informasi dalam proses pengambilan kebijakan, memprediksi dampak dari bencana, dan melaksanakan kegiatan

penanggulangan mengenai bencana gunung Api Lokon (Basyid, 2010).

Penelitian tentang rencana kontinjensi erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo sudah diteliti Lestari dkk sejak tahun 2017 dan 2018. Hasil penelitian tahun 2017 telah dipublikasikan di Prosiding Seminar Nasional Tahun ke-3 LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta dengan judul Model Manajemen Komunikasi Bencana Berbasis Komunitas Melalui Rencana Kontinjensi Erupsi Gunung Sinabung mengenai proses pemutakhiran data Rencana Kontinjensi Sinabung guna mengurangi dampak bencana erupsi Gunung Sinabung (Lestari et al., 2017). Penelitian tahun 2018 telah dipublikasikan pada Prosiding Seminar Nasional Tahun ke-4 LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta dengan judul Implementasi Model Komunikasi Bencana Berbasis Komunitas Melalui Rencana Kontinjensi Erupsi Gunung Sinabung mengenai pengimplementasian model komunikasi berbasis komunitas untuk pengurangan risiko bencana melalui rencana kontinjensi erupsi Gunung Sinabung (Puji. Lestari, Paripurno and Nugroho, 2018); Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 21 (3), halaman 231-245 dengan judul Disaster Risk Reduction Based on Community through a Contingency Plan for Mount Sinabung yang membahas tentang peningkatan kesiapsiagaan bencana terhadap bencana ancaman (Puji Lestari, Paripurno and Nugroho, 2018); Jurnal Kajian Komunikasi 6 (1), halaman 106-120 dengan judul Pemberitaan di Media Online untuk Pengurangan Risiko Bencana Gunung Sinabung mengenai analisis peran media online Kompas.com dan Hariansib.com sebagai pembawa informasi bencana Gunung Sinabung (Lestari et al., 2018). Penelitian tahun 2019 melanjutkan penyempurnaan data penelitian tahun 2017 dan 2018. Hasil penelitian telah dipublikasikan di Jurnal Penelitian Komunikasi 22 (1) dengan judul Model Komunikasi Bencana "Table Top Exercise" dalam Pengurangan Risiko Bencana membahas tentang gladi meja yang dinilai optimal dalam model komunikasi kesiapsiagaan bencana erupsi Gunung Sinabung (Lestari et al., 2019). Proceeding ICoSI 2019 dan sudah dipresentasi dalam Konferensi Internasional ICoSI 30 – 31 Juli 2019. Proceeding dimuat pada Atlantis Conference Proceeding (Web of Sciences-indexed Proceeding) dengan judul Synergy Communication Model of Decision Making Mount Sinabung Eruption Contingency Plan. Hasil penelitian tahun pertama hingga tahun ketiga berupa produk Dokumen Rencana Kontinjensi Erupsi Gunung Sinabung yang sedang di proses menjadi Peraturan Bupati Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Manfaat penelitian, yaitu: (1) Terlaksananya pengelolaan risiko bencana erupsi Gunung Sinabung melalui Rencana Kontinjensi yang lebih terstruktur dan sistematis, (2) Terfasilitasinya program Rencana Kontinjensi guna mewujudkan ketangguhan terhadap risiko bencana Gunung Sinabung, (3) Memungkinkan lahirnya kebijakan Rencana Kontinjensi yang mendukung proses perwujudan ketangguhan komunitas dalam pengelolaan risiko bencana Gunung Sinabung. Penelitian ini bertujuan untuk membuat model pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK) melalui program Rencana Kontinjensi Erupsi Gunung Sinabung.

KAJIAN TEORI

Risiko bencana sangat lekat dengan komunikasi. Bencana dapat ditanggulangi apabila komunikasi berjalan dengan lancar, hal ini sesuai dengan teori komunikasi krisis. Komunikasi krisis selalu dimaknai sebagai hal yang negatif dan dapat mengancam masyarakat (Juneza and Purworini, 2016). Komunikasi krisis merupakan penyebaran informasi untuk meredakan tentang krisis yang sedang dialami melalui komunikasi. Komunikasi krisis dalam pengurangan risiko bencana sangat penting karena dapat mengurangi kerugian berupa harta benda masyarakat yang terkena dampak erupsi Gunung Sinabung dan tidak menimbulkan korban jiwa (Partao, 2005).

Penelitian mengenai pengurangan risiko bencana berbasis komunitas dilakukan oleh

Akhirianto. Penelitian tersebut menghasilkan informasi yang menjadi pedoman masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan mengurangi ancaman bencana yang datang (Akhirianto, 2017). Pengurangan risiko bencana dapat diatasi secara cepat apabila ada panduan berupa rencana kontinjensi, dengan demikian penelitian mengenai Rencana Kontinjensi Erupsi Gunung Sinabung sangat relevan.

Penelitian yang dilakukan oleh Renatama dan Suryono tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Pelatihan Wajib Latih Dan Gladi Lapang Bagi Masyarakat Kawasan Rawan Bencana Merapi. Hasil penelitian tersebut yaitu masyarakat mampu untuk menerapkan rencana kesiapsiagaan di lingkungannya dengan memanfaatkan keterampilan serta pengetahuan dasar untuk menyelamatkan diri (Renatama and Suryono, 2015). Masyarakat disekitar Gunung Sinabung juga memiliki kemampuan untuk melakukan kesiapsiagaan apabila terjadi erupsi Gunung Sinabung.

Penelitian mengenai rencana kontinjensi juga melibatkan bidang kesehatan yang dikoordinasi oleh Dinas Kesehatan. Puskesmas merupakan salah satu unsur utama dalam pengurangan risiko bencana di bidang kesehatan. Hal ini terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh Huriah dan Farida mengenai Gambaran Kesiapsiagaan Perawat Puskesmas dalam Manajemen Bencana di Puskesmas Kasihan I Bantul Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kesiapsiagaan perawat dalam pengurangan risiko bencana di tingkat kecamatan, tepatnya di Puskesmas Kasihan I Bantul (Huriah and Farida, 2010). Penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa mitigasi bencana di bidang kesehatan sangat diperlukan. Penyusunan rencana kontinjensi harus memperhatikan kesiapsiagaan tenaga medis sesuai kebutuhan disetiap kecamatan terdampak. Selain unsur kesehatan, rencana kontinjensi juga membahas berbagai persoalan terkait pendidikan, sosial, sarana-prasarana, komunikasi, dan berbagai kebutuhan lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan gladi lapang. Para peserta gladi lapang terdiri dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam penanganan bencana, antara lain: TNI (Erlaba Perangin-angin), Camat Payung, Camat Payung, Kades Tiganderket, Dinas Sosial, Tagana Basarnas Medan, Panji Kasi Logistik BPBD, TRC BPBD, Bidang Evakuasi, RS Umum. Hasil diskusi gladi ruang menjadi panduan untuk gladi lapang yang melibatkan masyarakat Kabupaten Karo.

Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data yang diperoleh, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk display data, kemudian dipilih data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Tahap berikutnya membuat kesimpulan dan interpretasi dari hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pra-penelitian, saat penelitian, dan pasca-penelitian. Peneliti merupakan subjek yang tidak terpisahkan dengan analisis, oleh karena itu subjek penelitian harus berada dan terlibat langsung dalam proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2019, peneliti melakukan gladi lapang di halaman Kantor Bupati Karo, Sumatera Utara. Hasil yang diperoleh dari implementasi Renkon Sinabung (Gladi Lapang) di Aula Bupati Kabupaten Karo pada 9 Mei 2019, pukul 09.00 WIB bertujuan untuk bertukar pemikiran/ide berupa prosedur, rencana kontinjensi, rencana operasi, dan kesepakatan kerjasama.

Pada saat gladi lapang, masing-masing satuan memiliki tugas masing-masing, seperti:

(1) RIG (Rencana Informasi Gladi) mengatur agar semua peserta mendengarkan arahan dari si pengendali dan pengawas. (2) TRC harus bergerak dengan cepat saat terjadi bencana, Kantor punya informasi jelas mengenai informasi yang jelas ketika adanya bencana Erupsi Sinabung. (3) BNPB, Basarnas, BPBD, OPD Terkait, dan masyarakat menjadi pengendali dan peserta. Beberapa bidang yang harus ada dalam gladi lapang, yaitu: sumber daya, operasi, rencana dan kaji cepat, info dan media, observer. (4) TNI (Erlaba Perangin-angin) bertugas sebagai pengingat di daerah-daerah yang terkena dampak erupsi gunung Sinabung dan harus memiliki plank di mengingatkan setiap warga agar mengetahui informasi lewat tulisan. (5) TNI, POLRI Relawan harus tanggap tidak harus menunggu status tanggap darurat.



Gambar 4 Kegiatan Uji Publik Dokumen Rencana Kontinjensi Erupsi Gunung Sinabung 9 Mei 2019. Sumber: Dokumen Peneliti 2019

Pada hari kedua penelitian pada tanggal 10 Mei 2019, pelaksanaan gladi lapang dilakukan di halaman Kantor Bupati Kabupaten Karo. Kegiatan simulasi gladi lapang ini merupakan penyempurnaan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi Erupsi Gunung Sinabung yang sedang dalam proses menjadi Peraturan Bupati Karo. Kepala BPBD, Martin Sitepu menyatakan bahwa dengan adanya simulasi gladi lapang ini dapat meningkatkan keselamatan dan kesiapsiagaan masyarakat Kabupaten Karo. Suang Karo-karo, M. Sc selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra menyatakan bahwa simulasi gladi lapang dapat membangun kewaspadaan dan kesadaran semua pihak yang terkena maupun tidak terkena bencana dalam menghadapi bencana (Karakab, 2019).



Gambar 5 Kegiatan Simulasi Gladi Lapangan Dokumen Rencana Kontinjensi Erupsi Gunung Sinabung. Sumber: (Karokab, 2019)

Simulasi gladi lapangan berkaitan erat dengan komunikasi krisis. Gladi lapangan diperlukan untuk menguji dan mempraktekkan dokumen rencana kontinjensi erupsi Gunung Sinabung (Yahya, 2016) untuk mengantisipasi adanya krisis bencana. Komunikasi sangat diperlukan dalam pelaksanaan gladi lapangan. Hasil gladi lapangan pada hari pertama menunjukkan adanya koordinasi yang belum optimal di kalangan para peserta. Keberadaan TNI/POLRI sangat membantu kelancaran koordinasi. Hasil gladi hari pertama merupakan dasar pelaksanaan simulasi gladi lapangan hari kedua. Kondisi belum optimalnya gladi pertama merupakan kendala dan segera diatasi oleh para peserta dipandu dari UPN "Veteran" Yogyakarta, sehingga gladi hari pertama sudah dinilai siap untuk melaksanakan simulasi lapangan hari kedua.

Gladi lapangan pada hari kedua melibatkan banyak satuan unit dan masyarakat Kabupaten Karo. Satuan unit yang memberikan informasi mengenai adanya bencana erupsi Gunung Sinabung. Komunikasi yang dilakukan satuan unit dan masyarakat dilakukan pada saat persiapan maupun pelaksanaan gladi lapangan di halaman Kantor Bupati, Kabupaten Karo. Gladi lapangan melibatkan semua OPD dipimpin oleh Asisten Bupati dan TNI/POLRI serta BPBD. Koordinasi dapat berjalan dengan lancar didukung oleh masyarakat peserta gladi lapangan sebanyak 315 orang. Proses gladi lapangan berjalan dengan lancar merupakan indikasi pengurangan komunikasi krisis. Komunikasi krisis diperuntukkan sebagai penyebaran informasi yang akurat mengenai situasi terkini mengenai bencana agar meminimalisir dampak yang timbul dari bencana erupsi Gunung Sinabung. Komunikasi krisis yang baik dapat membuka kesempatan masyarakat Kabupaten Karo untuk mengurangi risiko erupsi Gunung Sinabung (Purwaningwulan, 2013). Komunikasi krisis akibat erupsi Gunung Sinabung dapat diatasi dengan implementasi rencana kontinjensi Erupsi Gunung Sinabung.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan model pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK) melalui program Rencana Kontinjensi Erupsi Gunung Sinabung. Dokumen rencana kontinjensi sudah diuji melalui gladi meja pada tahun 2018, gladi ruang dan gladi

lapang pada tahun 2019 di halaman Kabupaten Karo. Hasil penelitian ini berupa produk Rencana Kontijensi yang sedang diproses menjadi Peraturan Bupati Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada DRPM Kemristekdikti atas dana hibah Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi tahun 2019, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber dari pemerintah Daerah Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhirianto, N. A. (2017) ‘Community Based Landslide Disaster Risk Reduction a Design Concept’, *Jurnal Sains dan Teknologi Mitigasi Bencana*, 12(1), pp. 32–43.
- Basyid, M. A. (2010) ‘Pengembangan Peta Rencana Kontijensi Bencana Gunung Api Studi Kasus: Gunung Api Lokon’, *Jurnal Rekayasa*, XIV(4), pp. 216–226. Available at: <https://ejurnal.itenas.ac.id/index.php/rekayasa/article/viewFile/92/59>.
- Huriah, T. and Farida, L. N. (2010) ‘Gambaran Kesiapsiagaan Perawat Puskesmas dalam Manajemen Bencana di Puskesmas Kasihan I Bantul Yogyakarta’, *Jurnal Mutiara Medika*, 10(2), pp. 128–134.
- Juneza, R. R. D. and Purworini, D. (2016) ‘Respon Para Disabilitas terhadap Komunikasi Krisis BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan Tim SAR Klaten Tahun 2016’, *Jurnal Profetik*, 10(1), pp. 80–96. doi: <https://doi.org/10.14421/pjk.v9i1.1192>.
- Karokab (2019) UPN “Veteran” Yogyakarta Adakan Publik dan Simulasi Gladi Posko Dokumen Rencana Kontinjensi Menghadapi Erupsi Gunung Sinabung, karokab.go.id. Available at: <https://karokab.go.id/id/berita/7839-upn-veteran-yogyakarta-adakan-uji-publik-dan-simulasi-gladi-posko-dokumen-rencana-kontinjensi-menghadapi-erupsi-gunung-sinabung> (Accessed: 29 May 2019).
- Kusumayudha, S. B., Lestari, P. and Paripurno, E. T. (2018) ‘Eruption Characteristic of the Sleeping Volcano , Sinabung , North Sumatera , Indonesia , and SMS gateway for Disaster Early Warning System’, *Indonesian Journal of Geography*, 50(1), pp. 70–77. doi: <https://doi.org/10.22146/ijg.17574>.
- Lestari, P. et al. (2017) ‘Model Manajemen Komunikasi Bencana Berbasis Komunitas melalui Rencana Kontinjensi Erupsi Gunung Sinabung’, in *Prosiding Seminar Nasional Tahun ke-3, Call for Paper, dan Pameran Hasil Penelitian & Pengabdian Masyarakat Kemristekdikti RI*, pp. 88–95.
- Lestari, P. et al. (2018) ‘Pemberitaan di Media Online untuk Pengurangan Risiko Bencana Gunung Sinabung’, *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(1), pp. 106–120. doi: <https://doi.org/10.24198/jkk.v6i1.15168>.
- Lestari, P. et al. (2019) ‘Model Komunikasi Bencana “Table Top Exercise” dalam Pengurangan Risiko Bencana’, *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 22(1), pp. 17–30. doi: [10.20422/jpk.v22i1.587](https://doi.org/10.20422/jpk.v22i1.587).
- Lestari, Puji, Paripurno, E. T. and Nugroho, A. R. B. (2018) ‘Disaster Risk Reduction Based on Community through a Contingency Plan for Mount Sinabung’, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21(3 March), p. 231. doi: [10.22146/jsp.30059](https://doi.org/10.22146/jsp.30059).
- Lestari, Puji., Paripurno, E. T. and Nugroho, A. R. B. (2018) ‘Implementasi Model Komunikasi Bencana Berbasis Komunitas melalui Rencana Kontinjensi Erupsi Gunung Sinabung’, in

- Prosiding Seminar Nasional Tahun ke-4, Call for Paper, dan Pameran Hasil Penelitian & Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti, pp. 357–362.
- Partao, Z. A. (2005) ‘Optimalisasi Fungsi Media Relations untuk Keberhasilan Komunikasi Krisis’, *Jurnal Komunikologi*, 2(1), pp. 8–21.
- Presiden Republik Indonesia (2007) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Lembaran Negara RI Tahun 2007. Jakarta.
- Purwaningwulan, M. M. (2013) ‘Public relation dan manajemen krisis’, *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 11(2), pp. 166–175.
- Renatama, P. B. and Suryono, Y. (2015) ‘Evaluasi pelaksanaan program pelatihan wajib latih dan gladi lapang bagi masyarakat kawasan rawan bencana merapi’, *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), pp. 192–202. doi: 10.21831/jppm.v2i2.6356.
- Yahya, A. A. (2016) ‘Kemitraan dalam Sekolah Siaga Bencana di SMP Negeri 2 Cangkringan Sleman Yogyakarta’, *Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi*, 1(V), pp. 111–124.

IMPLEMENTASI KURIKULUM BERBASIS KKNI MENUJU ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0: TELAHAH LITERATUR

Sri Astuti, Zuhrohtun, Kunti Sunaryo

sri_astuti@upnyk.ac.id, zuhrohtun@upnyk.ac.id, kunti.sunaryo@upnyk.ac.id

Abstract

Curriculum changes in tertiary institutions are routine activities that must be carried out in response to the development of Science and Technology, community needs, and the needs of graduate users. The curriculum currently used is the Indonesian National Qualification Framework or commonly abbreviated as KKNi. Namely the framework for qualifying work qualifications that juxtaposes, equalizes, integrates, the education and training sector as well as work experience in the context of providing work competency recognition in accordance with work positions in various sectors.

The rapid development of information technology has influenced all aspects of life, including the business and accounting world. To that end, the curriculum of the accounting study program must harmonize with the development of the information technology. Namely the curriculum in accordance with the development of the Industrial Revolution 4.0.

Various attempts have been made by several accounting study programs, including conducting workshops to review existing curricula, integrating the latest information technology materials into several (all) accounting courses currently available, training lecturers related to the latest information technology materials and adding new lectures related to the latest information technology.

Keywords: Curriculum, KKNi, Industrial Revolution 4.0

PENDAHULUAN

Perubahan kurikulum di perguruan tinggi merupakan aktivitas rutin yang harus dilakukan sebagai tanggapan terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (scientific vision), kebutuhan masyarakat (societal need), serta kebutuhan pengguna lulusan (stakeholder need). Permasalahan yang sering timbul di kalangan akademisi adalah pemahaman tentang bagaimana melakukan rekonstruksi kurikulum pendidikan tinggi yang masih sangat beragam baik antar program studi sejenis maupun antar perguruan tinggi (tim, 2016).

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau biasa disingkat dengan KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kerja yang menyandingkan, menyetarakan, mengintegrasikan, sektor pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan jabatan kerja di berbagai sector (Alhamuddin, 2015).

Munculnya KKNi dilatarbelakangi oleh alasan internal dan eksternal. Alasan internal munculnya KKNi adalah adanya kesenjangan dalam pendidikan tinggi, meliputi mutu pendidikan yang masih rendah, jumlah tenaga pendidik yang memiliki kompetensi belum mencukupi serta kemampuan pengembangan dari institusi pendidikan. Selain hal tersebut, munculnya KKNi juga dipengaruhi oleh belum selarasnya antara kebutuhan pasar sumberdaya

manusia yang terdidik dengan lulusan perguruan tinggi. Hal ini menyebabkan banyaknya sumberdaya terdidik yang masih menganggur. Banyaknya sumberdaya terdidik yang menganggur ditenggarai oleh adanya sistem pendidikan yang belum mengaplikasikan antara ilmu pengetahuan dengan ketrampilan, sehingga lulusan perguruan tinggi tidak mempunyai bekal keterampilan yang memadai. Dukungan dari institusi lain dan atau lembaga lain juga sangat dibutuhkan untuk mengembangkan KKNi, seperti organisasi asosiasi. Organisasi ini berperan dalam pengembangan ilmu dan kompetensi profesinya.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi munculnya KKNi adalah faktor globalisasi. Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat sangat berpengaruh pada segala bidang. Munculnya globalisasi telah menyebabkan adanya pasar bebas tenaga kerja dan hal ini merupakan tantangan bagi ketenagakerjaan. Untuk menghadapi hal ini, pengembangan pendidikan sangat dibutuhkan untuk membentuk masyarakat pendidikan berbasis ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi harus membekali lulusannya dengan kemampuan beradaptasi dan kreativitas agar mampu menghadapi perubahan dan perkembangan di segala aspek bidang.

Dunia pendidikan merespon hal tersebut dengan cara memperbaiki sistem pendidikan melalui pengembangan kurikulum pendidikan yang mengacu kepada kebutuhan pasar dan teknologi. Untuk menghadapi persaingan tersebut, institusi pendidikan selain membekali dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan, juga perlu membangun karakter anak didiknya yang: jujur, tanggung jawab, amanah, rasa hormat, berani, adil, tekun, setia kawan, integritas dan kebangsaan (Naim, 2016).

Seiring dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0, maka kurikulum berbasis KKNi harus menyesuaikan diri. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan revolusi digitalisasi, di mana mesin digantikan oleh artificial intelligence, yaitu teknologi yang dibuat untuk mempermudah aktivitas dan pekerjaan manusia (Huang, 2018).

Revolusi Industri 4.0 ini berdampak pada semua aspek, terutama aspek bisnis. Sehingga berdampak pula pada lapangan pekerjaan. Tahun 2030 diprediksi banyak lapangan pekerjaan yang muncul. Akuntansi merupakan bagian dari bisnis, juga terkena dampak perkembangan teknologi Industri 4.0. Peran akuntansi tidak hanya sebatas menyediakan laporan keuangan saja, akan tetapi harus mampu memastikan bahwa proses bisnis berjalan efisien dan efektif, melindungi asset baik berwujud maupun tidak berwujud, dan juga memastikan bahwa organisasi mematuhi aturan-aturan baik yang bersumber dari dalam maupun luar (Ali, 2019).

Revolusi industri 4.0 menjadikan perkembangan ekonomi digital semakin melaju pesat. Berbagai peluang dan risiko juga semakin meningkat secara bersamaan. Perkembangan ini berdampak signifikan terhadap perkembangan dunia akuntansi dan auditing. Akuntan saat ini tidak hanya dihadapkan dengan pelaporan keuangan, akan tetapi juga dihadapkan pada pengendalian internal, analisis yang bersifat prediktif.

KAJIAN TEORI

Kurikulum Pendidikan Tinggi

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi (Ristekdikti, 2016). Menurut Jono (2016), kurikulum adalah rencana program pengajaran atau pendidikan yang akan diberikan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, ibarat orang yang akan membangun rumah, kurikulum adalah “blue print” atau gambar cetak birunya.

Ibarat “blue print” pendidikan, maka kurikulum sangat berperan dalam mencetak sumber daya yang berkualitas. Adapun peran dari kurikulum menurut Kunaefi (2008) adalah sebagai (1) manajemen pendidikan tinggi untuk menentukan arah pendidikannya, (2) filosofis yang akan mewarnai terbentuknya masyarakat dan iklim akademik, (3) Patron atau pola pembelajaran, (4) atmosfer atau iklim yang terbentuk dari hasil interaksi manajerial PT dalam mencapai tujuan pembelajaran, (5) Rujukan kualitas dari proses penjaminan mutu, serta (6) ukuran keberhasilan PT dalam menghasilkan kelulusan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kurikulum yang dikembangkan di perguruan tinggi Indonesia banyak mengalami perkembangan. Perubahan kurikulum disebabkan oleh berbagai hal, antara lain adalah pengaruh globalisasi. Perkembangan dunia pendidikan sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat, hal ini menuntut dunia pendidikan untuk menyelaraskan dengan kebutuhan akan pasar tenaga kerja. Perguruan tinggi dituntut untuk menghasilkan lulusan yang dapat bersaing di pasar global. Perubahan orientasi pendidikan tinggi juga mempengaruhi perubahan kurikulum. Perguruan tinggi dituntut tidak hanya menghasilkan lulusan yang cerdas berilmu, tetapi juga harus mampu menerapkan keilmuannya di masyarakat luas. Banyak budaya yang ada di kehidupan bermasyarakat, dan budaya tersebut beragam, sehingga lulusan perguruan tinggi dituntut untuk mampu menerapkan keilmuannya yang berbudaya tersebut di masyarakat. Lulusan perguruan tinggi harus dibekali dengan kemampuan *hardskill* dan *softskill* serta memiliki kompetensi yang bisa diperoleh lewat pendidikan formal maupun non-formal agar mereka mampu bersaing di pasar bebas.

Landasan hukum perguruan tinggi dalam menerapkan KKNi adalah Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012. Berdasarkan peraturan tersebut, dijelaskan bahwa Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Pemerintah mengeluarkan beberapa aturan untuk mengimplementasikan KKNi tersebut, adapun aturan-aturan tersebut adalah sebagai berikut: (1) UU RI Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi; (2) Permendikbud RI Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi; (3) Permendikbud RI Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.

Pendidikan merupakan sarana untuk memperbaiki kehidupan manusia secara pribadi dan negara secara umum. Pendidikan berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, produktif dan inovatif, sehingga mampu menjadi ujung tombak kemajuan bangsa. Negara yang maju akan mampu menekan tingkat pengangguran bagi masyarakatnya.

Kurikulum berbasis KKNi memberikan parameter ukur berupa jenjang kualifikasi dari jenjang 1 (terendah) sampai jenjang 9 (tertinggi). Setiap jenjang KKNi bersepadan dengan level capaian pembelajaran (CP) program studi pada jenjang tertentu, yang mana kesesepadannya untuk pendidikan tinggi adalah level 3 untuk D1, level 4 untuk D2, level 5 untuk D3, level 6 untuk D4/S1, level 7 untuk profesi (setelah sarjana), level 8 untuk S2, dan level 9 untuk S3.

Revolusi Industri 4.0 dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Akuntansi

Menurut Kagermann dkk (2013), Revolusi Industri 4.0 adalah integrasi dari Cyber Physical System (CPS) dan Internet of Things and Services (IoT dan IoS) dalam proses industri meliputi manufaktur dan logistik serta proses industri lainnya. Merkel Angela (2014)

berpendapat bahwa Industri 4.0 merupakan transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi pada industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Schlechtendahl dkk (2015) menekankan definisi revolusi industri 4.0 ini pada unsur kecepatan dari ketersediaan informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana seluruh entitasnya dapat selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan seluruh bagian yang ada di dalamnya.

Revolusi industri 4.0 dimulai oleh pemerintah Jerman yang menggaungkan penggunaan teknologi tinggi komputerisasi dalam kegiatan manufaktur atau pabrikasi (Iswanto dan Wahjono, 2019). Revolusi Industri 4.0 menjadi sangat fenomenal di tahun 2011 dalam ajang Hannover fair dan di tahun 2013 dalam ajang yang sama dibentuk tim kerja yang dipimpin oleh Siegfried Dais (Robert Bosch GmbH) dan Henning Kagermann, seorang Akademi ilmu dan Teknik Jerman.

Revolusi industri dari generasi pertama sampai dengan generasi terakhir masing – masing memiliki ciri khas dan imbal balik yang berbeda terhadap banyak situasi. Berikut penjelasannya: (a) Revolusi industri pertama terjadi di Inggris pada tahun 1760 – 1840. Pada generasi ini mesin digunakan pertama kali dalam lini produksi. Industri yang terdampak positif adalah pertanian dan tekstil yang memberikan kontribusi ekonomi signifikan di negara agraris. (b) Revolusi industri kedua terjadi pada tahun 1870 dan 1914. Pada generasi ini listrik digunakan pertama kali dalam lini produksi. Dengan menggunakan listrik memungkinkan terjadinya produksi massal (mass production) dalam pembuatan barang sehingga harga dan biaya dapat ditekan secara bersamaan. (c) Revolusi industri ketiga terjadi pada tahun 1950 – 1970. Pada generasi ini dikenal juga istilah revolusi digital, perubahan dari analog dan mekanis menjadi digital. Perubahan yang terjadi masih berlangsung sampai hingga saat ini yang berdampak dan terlihat terutama kepada perkembangan komputer dan teknologi informasi. (d) Pada era revolusi industri 4.0 diproyeksikan memberikan dampak signifikan dan luar biasa terhadap berbagai aspek dan disiplin ilmu, terutama pada produk (product), rantai pasokan (supply chain), konsumen (customers) dan pekerja (workers).

Akuntan merupakan salah satu profesi yang terlibat secara langsung didalamnya sehingga hal tersebut berimbas pada disruptif tentang bagaimana seorang akuntan menjalankan profesi yang diembannya, selain harus beradaptasi dengan cara meningkatkan kapabilitas diri untuk menghadapi revolusi industri 4.0 yang sudah diinisiasi.

Dampak RI 4.0 Terhadap Pendidikan Akuntansi

Akuntansi harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan juga harus merefleksi kondisi sosial, politis, hukum, budaya, dan ekonomi tempat akuntansi beroperasi atau diterapkan (Suwardjono, 2016). Pernyataan tersebut sesuai dengan panduan kurikulum yang diterbitkan oleh Menristek Dikti pada tahun 2019. Dalam buku panduan tersebut dijelaskan bahwa Perguruan Tinggi di Indonesia harus mampu melahirkan manusia-manusia yang siap beradaptasi dengan pemutakhiran teknologi, kebutuhan masyarakat, serta kebutuhan pengguna lulusan. Perguruan Tinggi dibebaskan dalam pengembangan kurikulum yang dipakai dengan tetap mengacu pada SN-DIKTI.

Penelitian yang dilakukan oleh Livdan dan Nezlobin (2017) menyatakan bahwa kurikulum yang digunakan dalam akuntansi konvensional mengutamakan kemampuan menghafal yang dapat menyebabkan mahasiswa tidak mampu mengembangkan kompetensi yang sebenarnya dibutuhkan di akuntansi. Dalam penelitian lain disebutkan oleh Lashine & Mohamed (2013) bahwa ciri utama pendidikan 4.0 adalah dengan melakukan dialog antara mahasiswa dan dosen ataupun rekan sesama mahasiswa di dalam kelas serta dukungan teknologi informasi mampu memberikan efektifitas pembelajaran akuntansi. Praktik ini disebut

praktik heutagogi yaitu memberikan ruang bagi mahasiswa mendesain belajarnya sendiri (self-direct/determined learning). Perbedaan dalam penelitian ini menyebutkan bahwa adanya perbedaan paradigma dalam dunia pendidikan akuntansi. Perguruan tinggi dituntut untuk menghasilkan mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibutuhkan di dunia kerja dengan membuka diri dari perubahan yang ada di sekitarnya dan memperbaharui serta mengembangkan model pembelajaran di dalam kelas. Duff (2014) menyatakan bahwa pembelajaran akuntansi harus berubah dengan mengikuti perubahan lingkungan dan respon perkembangan teknologi untuk terus berkembang dan bermanfaat.

Swardjono (2016) menyatakan bahwa akuntansi dalam prespektif teknologi mendasarkan proses terencana dan sistematis yang melibatkan pemikiran, penalaran, dan pertimbangan untuk memilih dan menentukan teori, pengetahuan yang tersedia, konsep, metoda, teknik, serta pendekatan untuk menghasilkan suatu produk (konkret atau konseptual). Proses terencana dan sistematis ini menjadikan kontribusi akuntansi semakin besar bagi pengetahuan dan kehidupan.

Dikutip dari International Edition of Accounting and Business Magazine edisi Desember 2016, Roger Leonard Burrit dan Katherine Christ mengatakankan bahwa terdapat empat langkah yang harus diambil akuntan didalam menghadapi revolusi industry 4.0 yaitu:

Kesadaran (Awareness). Revolusi industri melahirkan peluang atau kesempatan baru yaitu dapat menumbuhkan bisnis baru yang belum pernah ada sebelumnya, sebagai contoh Jerman sebagai negara pencetus revolusi industri 4.0 memiliki 80% perusahaan yang siap mengimplementasikan revolusi industri 4.0, Cina yang menyadari bahwa diperlukan pembangunan pada aspek pengetahuan telah menargetkan 60% investasi pada sektor ini. Bukan hanya dua negara ini saja, tetapi banyak negara sudah berada dalam tahap awal diseminasi informasi yang pada tahap selanjutnya akan berkembang lebih dalam untuk menjalankan secara penuh revolusi 4.0

Pendidikan (Education). Pemerintah sebagai regulator serta praktisi pendidikan dituntut untuk dapat membuat suatu kurikulum yang relevan dan telah disesuaikan dengan perkembangan digital, seperti contohnya pelatihan koding, manajemen informasi antar beberapa program dan platform yang berbeda atau implementasi real-time accounting yang ditujukan kepada seluruh karyawan pada masing-masing departemen suatu perusahaan serta pemegang saham.

Pengembangan profesi (Professional Development). Meningkatkan kinerja profesi akuntan beserta program - program yang mendukung pengembangan kompetensi dengan cara melakukan latihan presentasi secara online maupun tatap muka secara langsung (face to face discussion) dan mengevaluasi pengaruhnya terhadap kapabilitas profesi akuntan pada masa yang akan datang.

Penerapan standar tinggi (Reaching Out). Sebagai seorang akuntan tuntutan memiliki kontrol maksimal terhadap data yang dihasilkan. Data atau informasi fisik biasanya diperoleh dari para insinyur (engineer) sehingga hubungan kerja antara akuntan dan insinyur harus berjalan harmonis agar data dan informasi akuntansi dapat dijaga dengan baik.

Empat perubahan peran akuntan pada revolusi industry 4.0 yang sudah dijelaskan hendaknya sudah dimulai pada awal proses pembelajaran di universitas atau perguruan tinggi. Kurikulum dan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan aktual dunia bisnis saat ini dan masa depan. Sehingga universitas atau perguruan tinggi perlu membuat dan menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kemajuan teknologi yang meningkatkan aspek paling krusial yaitu literasi manusia dimana fokus utama adalah mengembangkan kapasitas kognitif mahasiswa untuk bisa berpikir kritis dan sistemik karena literasi manusia dapat berfungsi

dengan baik apabila mengacu kepada "kemanusiaan (humanity), komunikasi (communication) dan desain (design).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumusan Tim KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Direktorat Pembelajaran (2015) tertulis bahwa lulusan universitas atau perguruan tinggi harus dipersiapkan (selain literasi manusia) agar memiliki kemampuan literasi data yaitu membaca, menganalisis dan menggunakan informasi dalam format data besar (big data) dan literasi teknologi. Literasi teknologi yaitu memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi, artificial intelligence dan prinsip - prinsip teknik (engineering principles), sehingga kombinasi literasi manusia, data dan teknologi mampu menjawab tantangan revolusi industry 4.0

Revolusi industri menuntut seluruh lapisan dalam pemerintah serta institusi pendidikan untuk melahirkan lulusan yang memahami konsep big data. Berbagai usaha dilakukam agar lulusan dapat mencapai standar capaian pembelajaran lulusan yang disusun dalam suatu kurikulum. Penelitian banyak dilakukan untuk mengungkapkan faktor apa saja yang dapat menunjang kesiapan seorang akuntan dalam menghadapi perubahan tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2019) menyatakan bahwa kompetensi sarjana akuntansi tidak berpengaruh terhadap kemampuan sarjana akuntansi dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, hal ini disebabkan alumni beranggapan bahwa kompetensi sarjana akuntansi dalam bekerja bukan hanya berupa ilmu tetapi juga melalui pengalaman dari suatu pekerjaan.

Perubahan kurikulum dalam pembelajaran di kelas sangat dipelukan untuk menunjang kompetensi bagi lulusan perguruan tinggi. Kementerian Riset dan Teknologi telah menerbitkan buku panduan penyusunan kurikulum di era industri 4.0. Buku ini menghimbau para staf pengajar untuk fokus terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), kebutuhan masyarakat (societal needs), dan kebutuhan pengguna lulusan (stakeholder). Masing-masing perguruan tinggi dapat mengembangkan kurikulum mereka agar memenuhi tiga aspek tersebut. Perbedaan kurikulum yang ada di perguruan tinggi diharapkan menjadi salah satu bentuk persaingan yang membangun, di mana masing-masing perguruan tinggi diharapkan dapat menghasilkan lulusan terbaik berdasarkan kurikulum yang telah mereka susun.

Untuk mengembangkan kurikulum yang sudah ada, dan menyesuaikan kebutuhan terkait dengan Revolusi Industri 4.0, maka berikut ini beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh departemen/program studi di Indonesia:

Aktivitas	Persentase
Melakukan workshop/seminar untuk mereview kurikulum yang ada	30,30%
Mengintegrasikan materi teknologi informasi terkini ke dalam beberapa mata kuliah akuntansi yang ada saat ini	23,30%
Meningkatkan pelatihan kepada dosen program studi akuntansi terkait materi teknologi informasi terkini	18,90%
Mengintegrasikan materi teknologi informasi terkini ke dalam semua mata kuliah akuntansi yang ada saat ini	13,30%
Menambahkan mata kuliah baru yang terkait teknologi informasi terkini	11,20%
Tidak ada tindakan	3,00%

Sumber: Data diolah oleh Ali (2019)

Berdasarkan data di atas, maka disimpulkan bahwa sebagian besar Program Studi Akuntansi di Indonesia dalam menyusun kurikulum yang mengacu pada perkembangan Revolusi Industri masih relatif rendah. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Program Studi Akuntansi di Indonesia untuk lebih mengembangkan kurikulum sesuai tuntutan kebutuhan.

Sedangkan perkembangan Revolusi Industri 4.0 itu sendiri telah mengubah proses bisnis secara keseluruhan. Perubahan proses bisnis akan berpengaruh pada proses akuntansi. Sehingga hal ini akan berdampak pada pendidikan akuntansi. Terdapat beberapa mata kuliah yang paling terkena dampak dari Revolusi Industri 4.0, yaitu: Sistem Informasi Manajemen, Sistem Informasi Akuntansi, Pengauditan, Audit Sistem Informasi, Manajemen Database, Pengantar Akuntansi, Sistem Pengendalian Manajemen, Perpajakan, ERP, Akuntansi Manajemen, dan Analisis Laporan Keuangan.

Sedangkan beberapa materi kuliah terkait dengan Revolusi Industri 4.0 yang dapat diaplikasikan di Program Studi Akuntansi adalah Bahasa Pemrograman, Database non-relational, Extensible business reporting language, Blockchain, Alat Visualisasi Data, Artificial Intelligent, Cloud Computing, Big Data, Data Base Relational dan Social Media. Materi-materi tersebut bisa dimasukkan dalam mata kuliah yang sudah ada, atau memunculkan mata kuliah baru.

KESIMPULAN DAN SARAN

Revolusi Industri 4.0 telah mengubah seluruh proses bisnis, hal ini ditandai oleh persaingan ketat dan arus informasi yang pesat pada semua sektor, Indonesia dituntut memiliki daya saing yang kuat agar mampu mensejajarkan diri dengan negara-negara lain. Kunci utama untuk meningkatkan produktifitas berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa adalah dengan inovasi. Perguruan tinggi perlu melakukan reorientasi terhadap kurikulum yang selama ini digunakan, yaitu berbasis KKNI. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas inovasi di era Revolusi Industri 4.0.

Revolusi Industri 4.0 mendorong kurikulum pendidikan tinggi agar sesuai dengan dinamika digital, internet of thing, Artificial Intelligence, bioteknologi, serta perkembangan pesat lainnya. Jika tidak disesuaikan, lulusan perguruan tinggi tidak akan sesuai untuk menjadi pemikir dan pekerja di era Revolusi Industri ini.

Program Studi Akuntansi secara umum belum siap 100% dalam menyiapkan kurikulum yang mengacu pada permasalahan Revolusi Industri. Hal ini terlihat dari hasil survei yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Banyak hal yang harus dikembangkan dalam kurikulum yang sudah ada.

SARAN

Tantangan serta pengaruh revolusi industri terhadap profesi akuntan antara lain yaitu terjadinya perkembangan teknologi mengubah bisnis seperti banyak aset yang berupa “technology” dan tidak berwujud secara fisik, teknologi ini tidak lagi membutuhkan sumber daya manusia yang banyak termasuk didalamnya staf akuntansi, perusahaan tidak memiliki konsep “place” atau “premises”, pekerjaan ini telah dikendalikan melalui “virtual office” dan yang terakhir mengenai cara memasarkan dan cara berjualan produk/jasa, perusahaan akan memilih “market place” atau “online store” yang memiliki biaya rendah serta kinerja yang efektif dan efisien. Semuanya tadi akan menuju kepada titik keseimbangan atau equilibrium baru yang nantinya membentuk standarnya sendiri.

Melihat banyaknya perubahan tersebut, perlu adanya banyak penelitian yang nanti akan mendukung dalam penyusunan kurikulum yang sesuai dengan permasalahan Revolusi Industri 4.0. Dampak perkembangan teknologi informasi yang besar berdampak pula pada ilmu

akuntansi, sehingga ilmu akuntansi harus berkembang. Salah satu cara pengembangannya adalah melalui penelitian. Selain itu, keberhasilan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan Revolusi Industri sangat dipengaruhi oleh dukungan dari pimpinan seluruh institusi pendidikan. Untuk itu perlu adanya koordinasi dan dukungan dari seluruh jajaran pimpinan perguruan tinggi.

DAFTAR REFERENSI

- Alhamuddin. 2015. Kurikulum Perguruan Tinggi Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagai Upaya untuk Mengembangkan Sumberdaya Manusia Indonesia Berdaya Saing di Era Global, Vokasional. Vol. 1, No. 1, (Oktober 2015).
- Ali Syaiful, 2019, Revolusi Industri 4.0 dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Akuntansi di Indonesia, BPFE Yogyakarta).
- Burrit, Leonard dan Katherine Christ (2016). International Edition of Accounting and Business magazine p.43-46. Desember 2016
- Duffd, A. (2014). Learning styles and approaches in accounting education. In The Routledge Companion to Accounting Education, 163–188.
- Huang Z, 2018, Discussion on the Development of Artificial Intelligence in Taxation, Journal Business Management, 1817-24.
- Iswanto, Alek Candra dan Wahjono. (2019). The Impact of Industry Revolution 4.0 Towards Accounting Science – an Essay. INFOKAM Nomor I Th. XV/MARET/2019
- Jono Ali Akbar, 2016, Studi Implementasi Kurikulum Berbasis Kkni Pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Di Lptk Se-Kota Bengkulu, Manhaj, Vol. 4, Nomor 1, Januari – April 2016.
- Kagermann, H., Lukas, W.D., & Wahlster, W. (2013). Final report: Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0. Industrie 4.0 Working Group.
- Kemenristekdikti, 2015, Permenristekdikti No.44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Indonesia: Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Lashine, S. H., & Mohamed, E. K. A. (2013). Accounting knowledge and skills and the challenges of a global business environment. Managerial Finance, 29(7), 3–16.
- Merkel, A. (2014). Speech by Federal Chancellor Angela Merkel to the OECD Conference. https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Reden/2014/2014-02-19-oecd-merkel-paris_en.html, Diakses pada 11 Maret 2017.
- Naim Ainun, 2016, Pendidikan Akuntansi sebagai Fondasi Terwujudnya Akuntan Profesional: Kolaborasi IAI, Regulator (Pemerintah) dan Perguruan Tinggi-Sudut Pandang Regulator, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Puspitasari, Eva. (2019). Pengaruh Kompetensi Sarjana Akuntansi, Regulasi Pemerintah dan Etika Profesi terhadap Kemampuan Sarjana Akuntansi Untuk Bersaing dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. E-JRA Vol. 08 No. 01. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang
- Suardjono. (2016). Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Tim, 2016, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2016.
- Tresno Dermawan Kunaefi, dkk, 2008, Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi, Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi.

SILLOVERS PRODUKTIVITAS PEKERJA DI JAWA TENGAH

Joko Susanto, Didit Welly Udjianto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN “Veteran” Yogyakarta

Abstract

Penelitian ini menganalisis spillovers produktivitas pekerja di wilayah Jawa Tengah. Data penelitian meliputi produktivitas pekerja, kapital, dan upah minimum kabupaten/kota tahun 2017 yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi spasial dengan memasukkan unsur spillovers produktivitas pekerja dan diestimasi dengan software Geoda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat spillovers produktivitas pekerja antar kabupaten/kota di Jawa Tengah. Nilai koefisien Lambda, pada Model Spatial Error maupun Model Spasial Lag tidak signifikan menunjukkan bahwa nilai produktivitas pekerja di masing-masing kabupaten/kota tidak mendapat pengaruh dari daerah sekitarnya. Selanjutnya variabel kapital yang signifikan menunjukkan bahwa kenaikan jumlah kapital diikuti dengan kenaikan produktivitas pekerja. Sementara itu, variabel jumlah pekerja lulusan perguruan tinggi tidak signifikan.

Keywords: spillovers, produktivitas pekerja, spasial

LATAR BELAKANG

Perekonomian kabupaten dan kota di Jawa Tengah terintegrasi dan tumbuh secara bersamaan sejalan dengan adanya interaksi antar daerah di kawasan ini. Integrasi perekonomian antar kabupaten/kota di Jawa Tengah didukung oleh keberadaan jalur regional yang menghubungkan kota-kota di wilayah tersebut. Adanya infrastruktur yang baik mendukung berbagai aktivitas ekonomi antar daerah seperti pergerakan pekerja antar daerah (komuter) dan perdagangan barang dan jasa antar daerah. Perkembangan ekonomi yang terjadi di kawasan ini tidak terlepas dari interaksi penduduk antar daerah.

Interaksi antar daerah juga didukung oleh keberadaan sejumlah perguruan tinggi terkemuka di Semarang, Solo dan Purwokerto. Keberadaan sejumlah perguruan tinggi unggulan telah mendorong migrasi penduduk ke kota-kota di Jawa Tengah guna menuntut ilmu. Pembangunan sektor pendidikan di kota-kota Jawa Tengah tidak hanya berdampak pada peningkatan produktivitas pekerja di kota-kota tersebut, tetapi juga berdampak terhadap produktivitas pekerja di daerah sekitarnya. Interaksi antara pekerja di dua daerah atau lebih yang berdekatan secara geografis memungkinkan adanya transfer pengetahuan dan keterampilan antar pekerja. Hal ini berarti peningkatan produktivitas pekerja tidak hanya berdampak pada wilayah yang bersangkutan, tetapi juga wilayah sekitarnya. Daerah sekitar kota, misalnya, ikut menikmati peningkatan jumlah dan kualitas modal manusia yang berlangsung di kawasan perkotaan.

Produktivitas pekerja bergantung pada keberadaan sumber daya manusia berkualitas tinggi. Adapun kualitas sumber daya manusia ditentukan antara lain oleh tingkat pendidikan dan keterampilan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan meningkatkan keahlian seseorang sehingga mereka dapat bekerja lebih cepat dan tepat. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan ekonomi (Pauw, Gericke,

Olsson, & Berglund, 2015). Pengetahuan yang lebih tinggi mendukung munculnya inovasi di bidang teknik, ekonomi, dan berbagai aspek kehidupan lainnya (König, Battiston, Napoletano, & Schweitzer, 2011). Investasi dalam bidang pendidikan memiliki implikasi positif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna meningkatkan output. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi produktivitasnya (Adhadika & Pujiyono, 2014).

Pendidikan yang semakin tinggi juga mendorong adanya inovasi dalam proses produksi. Inovasi merupakan penerapan ide-ide baru terhadap produk, proses, dan aktivitas perusahaan. Inovasi menunjukkan kemampuan dalam penerapan kreativitas guna mencari solusi dan menemukan peluang. Pada dasarnya, inovasi adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baru dan berbeda. Adanya inovasi menunjukkan munculnya sesuatu yang baru atau diperbaharui guna menciptakan nilai tambah baik secara langsung bagi perusahaan maupun tidak langsung terhadap pelanggannya. Sesuatu dapat dianggap sebagai inovasi bila telah diterapkan atau dikomersialisasikan. Munculnya inovasi bergantung pada learning dan skills individu-individu pelaku usaha yang akan menjadi salah satu sumber keunggulan bersaing (Prihadyanti & Laksani, 2016). Pelaku usaha harus memiliki ide-ide baru yang dihasilkan dari suatu kreativitas. Meskipun ide tersebut telah lama ada tetapi ini dapat dikatakan suatu inovasi bagi orang yang baru melihat atau merasakannya (Ernani Hadiyati, 2011).

Pada umumnya inovasi berkaitan dengan munculnya produk baru yang lebih unggul atau proses produksi baru yang lebih efisien. Proses produksi yang lebih efisien memungkinkan terjadinya peningkatan produktivitas pekerja. Selanjutnya pembangunan bidang pendidikan di suatu wilayah akan meningkatkan kualitas modal manusia baik di wilayah yang bersangkutan maupun wilayah sekitar. Tenaga kerja yang bekerja di suatu daerah bukan hanya berasal dari daerah itu tetapi juga dari daerah lain di sekitarnya. Adanya interaksi antar pekerja menyebabkan terjadinya limpahan pengetahuan atau spillovers pengetahuan dari daerah dengan modal manusia tinggi ke daerah lain di sekitarnya. Spillovers pengetahuan terjadi karena adanya interaksi antara individu satu dengan individu lainnya baik antar masyarakat umum maupun antar para pekerja yang saling bertukar ilmu satu sama lain. Dengan demikian kenaikan produktivitas pekerja yang terjadi di suatu daerah juga berdampak pada kenaikan produktivitas pekerja di daerah sekitarnya.

Interaksi antara suatu daerah dengan daerah lain di sekitarnya menyebabkan perkembangan ekonomi suatu wilayah juga dipengaruhi bukan saja oleh kondisi ekonomi dan demografi di wilayah tersebut tetapi juga oleh kondisi ekonomi dan demografi di wilayah sekitarnya. Terdapat efek spillovers yang menyebabkan pertumbuhan di suatu wilayah berdampak pula pada pertumbuhan wilayah sekitarnya. Efek spillovers menyebabkan peningkatan modal manusia tidak hanya berdampak pada wilayah tertentu saja tetapi juga wilayah sekitarnya. Pembangunan ekonomi di suatu daerah tidak hanya berdampak kesejahteraan penduduk di daerah tersebut tetapi juga berdampak terhadap kesejahteraan penduduk di daerah sekitarnya. Spillovers terjadi melalui interaksi antara penduduk suatu daerah dengan penduduk daerah sekitarnya. Bentuk interaksi ini meliputi migrasi penduduk, aliran investasi, dan lalu lintas (perdagangan) barang dan jasa antar daerah. Interaksi penduduk antar daerah dipermudah dengan adanya infrastruktur sehingga aktivitas ekonomi antar daerah dapat berlangsung dengan lancar.

Keberadaan tenaga kerja berpendidikan dapat meningkatkan produktivitas pekerja secara keseluruhan. Hal ini berarti terdapat efek spillovers dari peningkatan pengetahuan. Spillovers produktivitas pekerja terjadi melalui interaksi antar warga masyarakat dengan cara berbagi pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan. Adanya spillovers produktivitas pekerja memungkinkan peningkatan kesejahteraan masyarakat bukan hanya terjadi di wilayah

perkotaan yang memiliki modal manusia yang tinggi tetapi juga di daerah sekitarnya. Selanjutnya penelitian ini menganalisis spillovers produktivitas pekerja di Jawa Tengah.

KAJIAN LITERATURE

Produktivitas kerja merupakan perbandingan antara hasil yang diperoleh (output) dengan jumlah sumber daya yang dipergunakan sebagai masukan (input). Dalam kegiatannya setiap perusahaan akan selalu berusaha mencapai produktivitas kerja yang maksimal. Produktivitas kerja merupakan tolok ukur keberhasilan dalam menjalankan usaha. Semakin tinggi produktivitas kerja, semakin besar perolehan laba perusahaan. Produktivitas kerja menunjukkan produk yang dapat dihasilkan oleh individu atau kelompok selama satuan waktu tertentu dalam suatu proses kerja. Pekerja dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan dengan menghasilkan output tertentu dalam waktu yang lebih singkat. Hal ini berarti proses produksi dapat dilaksanakan dalam waktu yang lebih pendek.

Kemajuan suatu daerah antara lain ditentukan oleh produktivitas pekerja. Produktivitas pekerja menunjukkan perbandingan antara jumlah output dengan jumlah pekerja. Semakin tinggi produktivitas pekerja, semakin tinggi pula jumlah output yang dapat dihasilkan oleh seorang pekerja. Produktivitas pekerja berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan teknologi. Hanya sumber daya manusia berkualitas tinggi yang mampu menjalankan alat-alat produksi berkualitas tinggi. Tanpa adanya sumber daya manusia berkualitas tinggi, maka keberadaan mesin-mesin berteknologi tinggi menjadi kurang berfungsi, demikian pula sebaliknya. Sumber daya manusia berkualitas tinggi sering kali disebut sebagai modal manusia (human capital).

Tingginya produktivitas pekerja juga menunjukkan tingginya kualitas modal manusia (human capital). Terdapat hubungan positif antara modal manusia dan pertumbuhan ekonomi. Kontribusi modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah 30 persen (Alisjahbana, 2009). Modal manusia merupakan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi. Modal manusia merupakan faktor produksi yang mampu mengorganisasi faktor-faktor produksi lain sehingga proses produksi berjalan secara efektif dan efisien. Modal manusia telah menjadi faktor produksi penting (Kefela, 2010) untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan sarana bagi suatu negara untuk memenangkan kompetisi global (Taty, Possumah, & Razak, 2017). Keunggulan suatu negara bergantung pada jumlah dan kualitas modal manusia. Adanya modal manusia memungkinkan proses produksi berlangsung secara efisien sehingga produktivitas meningkat. Kenaikan produktivitas menunjukkan kenaikan output yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Peningkatan produktivitas tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya alam, melainkan juga berbasis inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang diantaranya diukur dari tingkat pendidikan. Di samping faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, produktivitas pekerja juga bergantung pada stok modal fisik. Tingkat pendidikan pekerja dan jumlah modal fisik berpengaruh signifikan pada produktivitas pekerja (Farah & Sari, 2014). Dominasi pengaruh tingkat pendidikan pekerja/karyawan mendorong pemerintah/perusahaan untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan pekerja diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan. Perusahaan perlu melakukan rekrutmen karyawan dengan pendidikan lebih tinggi atau mendorong karyawan yang berpendidikan rendah untuk ikut program pendidikan kesetaraan guna meningkatkan produktivitas kerjanya (Budiastuti, Ludviana Dwi & Endang, 2012)

Faktor lain yang melengkapi keberadaan sumber daya manusia berkualitas adalah ketersediaan alat-alat produksi berteknologi maju. Teknologi merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan tinggi rendahnya output. Output yang lebih tinggi hanya bisa dicapai dengan penggunaan teknologi yang lebih baik. Sumber daya manusia yang berkualitas mampu mengorganisasikan sumber daya lainnya sehingga meningkatkan efektivitas alat-alat produksi. Peningkatan efektivitas alat-alat produksi mendukung peningkatan nilai tambah (Blaga & Jozsef, 2014). Daerah dengan modal manusia yang lebih tinggi mampu mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi pula (Ramos, Suriñach, & Artís, 2009). Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Kreativitas dan kapasitas sumber daya manusia sangat menentukan tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi.

Di samping tingkat pendidikan, kemampuan perusahaan/industri untuk melakukan inovasi juga bergantung pada kedekatan spasial yang memungkinkan terjadinya pengetahuan spillovers antar pekerja perusahaan yang lokasinya berdekatan satu sama lain. Spillovers pengetahuan dapat menawarkan pengetahuan tambahan bagi perusahaan yang mampu menyerap pengetahuan tersebut dan menggabungkannya dengan pengetahuan yang dihasilkan sendiri (Arvanitis, Seliger, & Woerter, 2016). Kecenderungan ini juga terjadi di luar sektor industri, petani atau pekerja sektor jasa yang lokasinya berdekatan akan saling berinteraksi satu sama lain sehingga memungkinkan terjadinya spillovers pengetahuan di tiap-tiap sektor ekonomi.

Pengetahuan spillovers dapat menyebabkan adanya unsur saling melengkapi dalam upaya penelitian dan pengembangan dan memperkenalkan gagasan kapasitas serap sebagai prasyarat bagi perusahaan untuk dapat mengeksplorasi spillovers tersebut. Pengetahuan spillovers akan berdampak pada peningkatan produktivitas pekerja di daerah sekitar pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian pekerja yang bekerja di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bukan hanya berasal dari daerah tersebut, akan tetapi juga dari daerah sekitarnya. Hal ini berarti terjadi spillovers pengetahuan melalui interaksi antar pekerja. Interaksi ini memungkinkan pekerja yang memiliki pengetahuan lebih membagikan pengetahuan, pengalaman dan keterampilannya kepada pekerja lain maupun kepada anggota masyarakat lain. Dengan adanya pengetahuan baru tentang proses produksi maka pekerja daerah sekitar mampu bekerja secara lebih efektif dan efisien. Mereka mampu meningkatkan output pada tingkat penggunaan input yang tetap sehingga produktivitas pekerja meningkat. Kondisi ini dikenal sebagai spillovers produktivitas pekerja.

Proses spillovers produktivitas pekerja antar daerah semakin mudah terjadi dengan membaiknya sarana transportasi dan komunikasi. Sarana transportasi membaik dengan adanya perbaikan jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten yang menghubungkan daerah satu dengan daerah lainnya. Perbaikan bidang transportasi menyebabkan semakin lancarnya mobilitas barang dan jasa antar daerah. Mobilitas barang dan jasa antar daerah berlangsung cepat dan murah. Selanjutnya perbaikan teknologi komunikasi menyebabkan semakin mudahnya komunikasi penduduk antar daerah sehingga informasi yang terjadi di suatu daerah dapat segera diakses oleh penduduk daerah lain secara cepat dan murah. Adanya perbaikan bidang transportasi dan komunikasi mempercepat terjadinya spillovers produktivitas pekerja antar daerah.

METODOLOGI

1. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data Badan Pusat Statistik Jawa tengah dan publikasi lain yang relevan. Data penelitian mencakup produktivitas pekerja, upah minimum

kabupaten/kota, dan jumlah kapital. Adapun cakupan wilayah penelitian adalah seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah pada tahun 2017. Hal ini berdasar pertimbangan bahwa publikasi tahun 2017 merupakan publikasi terbaru.

2. Definisi Operasional variabel

Definisi operasional dijelaskan sebagai berikut.

Produktivitas pekerja adalah jumlah output baik barang maupun jasa dibagi dengan jumlah penduduk bekerja (satuan juta rupiah per pekerja).

Kapital adalah rasio penambahan modal tetap bruto (PMTB) terhadap jumlah penduduk berkerja (satuan juta rupiah per pekerja).

Upah minimum kabupaten/kota (UMK) adalah tingkat upah minimum yang berlaku di tiap-tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah (satuan ribu rupiah).

3. Alat Analisis

Penelitian ini meliputi kondisi produktivitas pekerja di seluruh Kabupaten dan kota di Jawa Tengah dan variabel-variabel yang mempengaruhinya pada tahun 2017. Dengan demikian data penelitian berbentuk data cross section. Selanjutnya analisis dilakukan berdasar hasil estimasi model regresi spasial berikut.

$$Y_i = \alpha_i \sum_{j=1}^N w_j Y_j + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \delta_i + e_i \quad (1)$$

Secara berturut-turut

Y adalah produktivitas pekerja

wij adalah matriks pembobot spasial berdasar kedekatan spasial antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya.

X1 adalah kapital

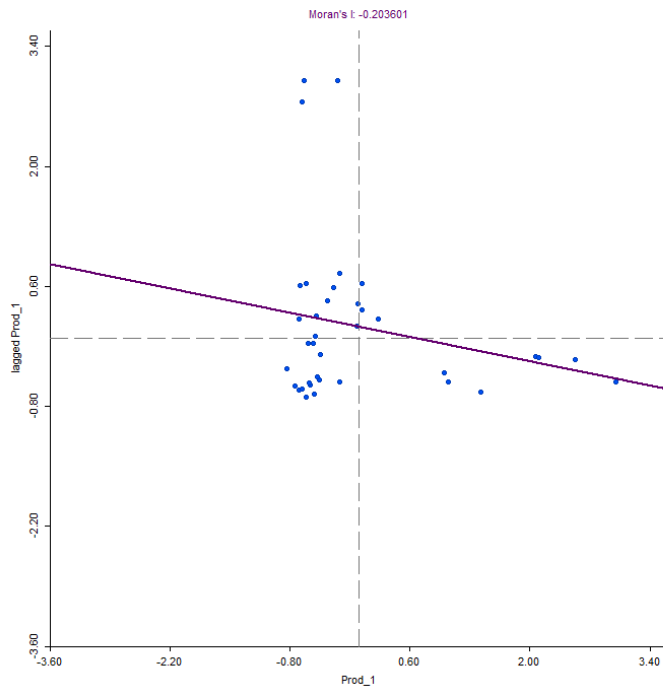
X2 adalah upah minimum kabupaten kota

Hubungan kedekatan (neighbouring) antara lokasi pada model autoregressive dinyatakan dalam matrik pembobot spasial W, dengan elemen-elemennya Wij yang menunjukkan ukuran hubungan lokasi ke-i dan ke-j. Lokasi yang dekat dengan lokasi yang diamati diberi pembobot besar, sedangkan yang jauh diberi pembobot kecil.

HASIL EMPIRIS DAN PEMBAHASAN

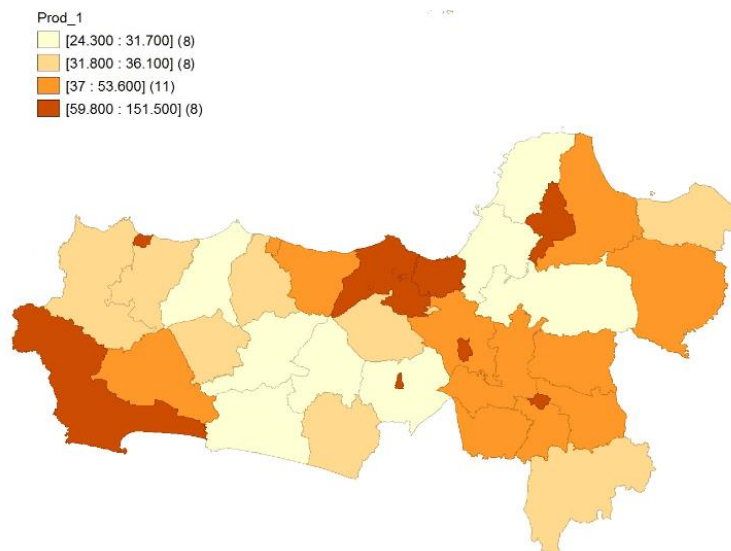
Hasil Empiris

Salah satu karakteristik data cross section adalah munculnya keragaman antar lokasi dan autokorelasi spasial. Untuk mengetahui adanya keragaman antar lokasi dipergunakan uji Breusch-Pagan, sedangkan untuk mendeteksi adanya autokorelasi spasial dipergunakan Indeks Moran, yaitu ukuran dari korelasi antara pengamatan yang saling berdekatan. Hasil perhitungan dengan software Geoda menunjukkan nilai statistik Breusch-Pagan sebesar 30,647 dengan p-value < 0.05. Hal ini berarti error memiliki keragaman atau dengan kata lain terdapat heteroskedastisitas. Dengan demikian analisis akan dilakukan berdasar model regresi spasial. Selanjutnya nilai statistik Moran's dari variabel produktivitas pekerja sebesar 0,204 menunjukkan adanya autokorelasi spasial dengan pola data membentuk suatu cluster (Gambar 1).



Gambar 1. Nilai Statistik Moran's

Nilai produktivitas pekerja yang sangat tinggi terjadi di Kota Solo, Salatiga, Semarang, Magelang, Tegal, Kabupaten Kendal, Kudus dan Cilacap. Sementara itu kabupaten/kota dengan nilai produktivitas pekerja tinggi meliputi Kabupaten Banyumas, Batang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Semarang, Sragen, Pati, Blora, dan Kota Pekalongan. Adapun kabupaten/kota dengan nilai produktivitas pekerja sedang mencakup Kabupaten Wonogiri, Temanggung, Purworejo, Brebes, Tegal, Purbalingga, Pekalongan, dan Rembang. Selanjutnya nilai produktivitas pekerja rendah mencakup Kabupaten Blora, Demak, Jepara, Magelang, Kebumen, Wonosobo, Banjarnegara, dan Pemalang (Gambar 2).



Gambar 1. Produktivitas Pekerja di Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota

Selanjutnya berdasar hasil Scatter Plot Frame produktivitas pekerja yang menunjukkan pola cluster maka matriks pembobot yang tepat digunakan adalah quinn continuity dengan ketentuan 1= untuk daerah yang berbatasan langsung dan 0= untuk daerah yang tidak berbatasan langsung. Hal ini berarti variabel pembobot ditentukan berdasar metode quinn continuity.

Dalam model regresi spasial dikenal 2 (dua) model yaitu Spatial Autoregressive Model (SAR) dan Spasial Error Model (SEM). Model spasial autoregressive (SAR) merupakan model yang mengkombinasikan model regresi sederhana dengan lag spasial pada variabel dependen dengan menggunakan cross section. Kelebihan dari model spasial autoregressive adalah model ini tepat untuk digunakan pada pola spasial dengan pendekatan area. Adapun spasial error model (SEM) dibangun dengan memperhitungkan pengaruh spasial pada error.

Hasil estimasi model SAR dan SEM menghasilkan hasil yang mirip. Pada model SAR, koefisien Y_ produktivitas pekerja yang tidak signifikan, sedangkan koefisien LAMBDA pada model SEM juga tidak signifikan. Koefisien regresi kapital signifikan baik pada model SAR maupun SEM. Sementara itu, koefisien regresi upah minimum kabupaten/kota tidak signifikan baik pada model SAR maupun SEM.

Tabel 1. Hasil Estimasi Regresi Spasial

	Model Spatial Autoregressive			Model Spatial Error		
	Koefisien	Nilai z	Prob.	Koefisien	Nilai z	Prob.
Y_Produktivitas Pekerja	-0,136	-0,940	0,347	-	-	-
CONSTANT	-31,508	-0,886	0,375	-25,832	-0,754	0,450
Kapital	1,097	5,421	0,000	1,120	5,658	0,000
UMK	48,049	1,895	0,058	39,137	1,689	0,091
LAMBDA	-	-	-	-0,106	-0,587	0,557
Variabel dependen : produktivitas pekerja						
R2 :	64,52			63,37		

Pembahasan

Koefisien Y_ produktivitas pekerja (pada model SAR) bertanda negatif dan tidak signifikan, demikian pula koefisien LAMBDA (pada SEM) juga bertanda negatif dan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan tidak terjadinya spillovers produktivitas pekerja. Produktivitas pekerja di suatu daerah dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas yang meliputi kapital dan upah minimum kabupaten/kota di daerah tersebut, tetapi tidak dipengaruhi oleh produktivitas pekerja dari daerah sekitarnya.

Produktivitas pekerja yang tinggi terjadi di kabupaten-kabupaten yang memiliki pusat-pusat industri. Daerah lain yang juga memiliki produktivitas pekerja yang tinggi adalah daerah perkotaan yang menjadi pusat industri atau perdagangan. Secara umum lapangan kerja dengan produktivitas pekerja yang tinggi adalah sektor industri dan jasa, sedangkan produktivitas pekerja sektor pertanian relatif rendah. Sektor industri dan jasa memerlukan tenaga kerja dengan keahlian dan keterampilan tertentu. Proses produksi di sektor industri dan jasa hanya dapat dikerjakan oleh pekerja dengan keahlian dan keterampilan tertentu. Pekerja dengan keterampilan minimum tidak dapat memasuki sektor industri atau jasa. Sementara itu sektor pertanian cenderung menjadi sektor yang menampung pencari kerja dengan berbagai keterampilan bahkan bagi pekerja dengan keterampilan minimum. Pencari

kerja yang tidak terserap di sektor industri dan jasa akan memasuki sektor pertanian. Jumlah pekerja sektor pertanian sangat banyak sedangkan luas lahan pertanian cenderung berkurang dari tahun ke tahun akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian.

Sektor pertanian menampung limpahan tenaga kerja dari sektor lain sehingga menghadapi masalah penawaran tenaga kerja berlebih (labor surplus). Jumlah penawaran tenaga kerja di sektor pertanian jauh memiliki jumlah pekerja yang dibutuhkan di sektor ini. Jumlah pekerja yang berada di sektor pertanian sangat besar sedangkan lahan pertanian relatif sempit. Akibatnya nilai output tiap pekerja relatif rendah sehingga produktivitas pekerja juga relatif rendah.

Untuk daerah Jawa Tengah, produktivitas pekerja yang tinggi terjadi kabupaten yang memiliki sentra-sentra industri seperti Kabupaten Kendal, Kudus dan Cilacap. Adapun daerah lain seperti Kota Solo, Salatiga, Semarang, Magelang, dan Tegal juga memiliki sektor jasa yang memadai sehingga produktivitas pekerja juga relatif tinggi. Sementara itu produktivitas pekerja di kabupaten yang didominasi oleh sektor pertanian relatif rendah. Nilai produktivitas pekerja rendah mencakup Kabupaten Blora, Demak, Jepara, Magelang, Kebumen, Wonosobo, Banjarnegara, dan Pemasang

Selanjutnya berdasar hasil analisis regresi spasial, didapatkan bahwa model yang lebih unggul adalah model Spatial Error (SEM) karena memiliki kriteria Akaike lebih kecil (Tabel 3). Estimasi model SAR menghasilkan nilai kriteria Akaike sebesar 332,8 sedangkan nilai kriteria Akaike pada model SEM sebesar 331,9.

Tabel 2.
Perbandingan R-square Hasil Estimasi Model Spatial Autoregressive dan Model Spatial Error

	Model Spatial Autoregressive	Model Spatial Error
Kriteria Akaike	332,8	331,9

Koefisien regresi kapital signifikan baik pada model SAR maupun SEM. Pada model SAR, kenaikan kapital sebesar 1 juta rupiah per pekerja diikuti dengan kenaikan nilai produktivitas pekerja sebesar 1,109 juta rupiah. Adapun dalam model SEM kenaikan kapital dalam jumlah yang sama diikuti dengan kenaikan nilai produktivitas pekerja sebesar 1,120 point. Kenaikan kapital menunjukkan bertambahnya alat-alat produksi yang dapat dipergunakan oleh pekerja. Tinggi rendahnya output di antaranya bergantung pada jumlah kapital sebagai sarana produksi. Penambahan alat-alat produksi ini menyebabkan pekerja dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien sehingga jumlah output mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah output ini terjadi jumlah pekerja yang tetap sehingga produktivitas pekerja mengalami kenaikan.

Sementara itu, koefisien regresi upah minimum kabupaten/kota tidak signifikan baik pada model SAR maupun SEM. Variabel upah minimum kabupaten/kota yang tidak signifikan diduga karena upah minimum kabupaten/kota relatif rendah. Kenaikan upah minimum kabupaten/kota dipandang belum cukup untuk mendorong pekerja untuk bekerja secara lebih efektif dan efisien. Sementara itu, pada sejumlah kabupaten yang bersifat agraris, tinggi rendahnya output ditentukan oleh ketersediaan lahan pertanian beserta alat-alat produksinya. Walaupun upah minimum kabupaten/kota mengalami kenaikan sehingga mendorong pekerja lebih giat, tetapi keterbatasan lahan dan sarana produksi membuat peningkatan output sulit diwujudkan. Di samping itu daerah-daerah ini juga mengalami masalah kelebihan pasokan

tenaga kerja sehingga proses produksi tidak dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Hal ini menyebabkan kenaikan upah minimum kabupaten/kota tidak berdampak pada produktivitas pekerja.

KESIMPULAN

Tidak terdapat spillovers produktivitas pekerja antar kabupaten/kota di Jawa Tengah. Produktivitas pekerja di suatu daerah dipengaruhi oleh jumlah sumber daya (kapital) yang ada di daerah tersebut, tetapi tidak dipengaruhi oleh produktivitas pekerja dari daerah sekitarnya. Kenaikan jumlah kapital menunjukkan kenaikan jumlah alat-alat produksi sehingga produktivitas pekerja meningkat. Sementara itu kenaikan upah minimum kabupaten/kota tidak berdampak pada produktivitas pekerja. Walaupun upah minimum kabupaten/kota mengalami kenaikan, sehingga mendorong pekerja lebih giat, tetapi keterbatasan lahan dan sarana produksi membuat peningkatan output sulit diwujudkan. Dengan demikian kenaikan upah minimum kabupaten/kota tidak diikuti dengan kenaikan produktivitas pekerja.

SARAN.

Pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi Jawa Tengah perlu mendorong konektivitas ekonomi antar kabupaten/kota. Konektivitas ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara bersamaan. Perekonomian daerah-daerah di Jawa Tengah akan tumbuh dan berkembang secara bersamaan. Untuk itu, pemerintah daerah dan pemerintah provinsi bersinergi satu sama lain terutama dalam penyusunan kebijakan ekonomi. Sinergi antar pemerintah daerah dan pemerintah provinsi menjadikan kebijakan ekonomi berjalan lancar sehingga pertumbuhan ekonomi merata di semua wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhadika, T., & Pujiyono, A. (2014). Analysis of Some Factor that Influence in Semarang Municipality (Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi di Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Economics*, 3(1), 1–13. Retrieved from <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme>
- Alisjahbana, A. S. (2009). Revisiting Indonesia's Sources of Economic Growth and Its Projection Towards 2030. Working Paper in Economics and Development Studies (Vol. 05).
- Arvanitis, S., Seliger, F., & Woerter, M. (2016). Knowledge Spillovers and their Impact on Innovation Success – A New Approach Using Patent Backward Citations.
- Blaga, P., & Jozsef, B. (2014). Human Resources, Quality Circles and Innovation. *Procedia Economics and Finance*, 15(14), 1458–1462. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(14\)00611-x](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(14)00611-x)
- Budiastuti, Ludviana Dwi, M., & Endang, S. (2012). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja Operator Jahit Pada Konfeksi. *Fashion and Fashion Education Journal*, 1(1), 16–19.
- Ernani Hadiyati. (2011). Kreativitas dan Inovasi Berpengaruh Terhadap Kewirausahaan Usaha Kecil. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 13(1), 8–16. <https://doi.org/10.9744/jmk.13.1.8-16>
- Farah, A., & Puspita Sari, E. (2014). Modal Manusia Dan Produktivitas. *Jejak (Journal of Economics and Policy)*, 7(1), 22–28. <https://doi.org/10.15294/jejak.v7i2.3840>
- Kefela, G. T. (2010). Knowledge-Based Economy and Society Has Become a Vital Commodity to Countries. *International Journal of Educational Research and Technology*, 1(2), 68–75.
- König, M. D., Battiston, S., Napoletano, M., & Schweitzer, F. (2011). Recombinant Knowledge

- and The Evolution of Innovation Networks. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 79(3), 145–164. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2011.01.007>
- Pauw, J. B. de, Gericke, N., Olsson, D., & Berglund, T. (2015). The effectiveness of education for sustainable development. *Sustainability*, 7(11), 15693–15717. <https://doi.org/10.3390/su71115693>
- Prihadyanti, D., & Laksani, C. S. (2016). R & D dan Inovasi di Perusahaan Sektor Manufaktur Indonesia. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 14(2), 187–198. <https://doi.org/10.12695/jmt.2015.14.2.5>
- Ramos, R., Suriñach, J., & Artís, M. (2009). Human Capital Spillovers and Regional Economic Growth in Spain. *Research Institute of Applied Economics*, (May 2009), 1–19. <https://doi.org/10.1111/j.1435-5957.2010.00296.x>
- Taty, S., Possumah, B. T., & Razak, R. I. (2017). Human Capital Competitiveness in ASEAN Economic Community (AEC): The Role of Regulation, Indonesia Experiences. *American Journal of Applied Sciences*, 14(2), 267–273. <https://doi.org/10.3844/ajassp.2017.267.273>

ANALISIS PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA

(Studi Empiris Pada Lima Desa di Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro)

Lita Yulita Fitriyani, Marita, Windyastuti, Mustholihul Absor

UPN Veteran Yogyakarta

E-mail : lita.yf@gmail.com , handadita@gmail.com, windyastuti.wijaya@gmail.com,
mustholihulabsor96@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of the variables Transparency, Accountability, and the Role of Village Officials on Village Fund Management in Kedewan District. This study uses a purposive sampling method with 30 respondents in five villages in Kedewan District. They are Kedewan district, Beji district, Hargomulyo district, Kawengan district and Wonocolo district. Data collection techniques in this study were in the form of questionnaires. The analysis used is multiple regression analysis using SPSS (Statistical Package for Social Science) version 20. The results of this study indicate that the variables Transparency, Accountability, and the Role of Village Officials affect the Village Fund Management variable.

Keywords: Transparency, Accountability, Role of Village Officials, Village Fund Management.

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2015, pemerintah pusat mengalokasikan dana APBN untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa kepada seluruh desa se-Indonesia dalam bentuk Dana Desa. Dana Desa diserahkan kepada pemerintah desa dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa.

Penelitian ini menggunakan data responden yang terdiri dari para perangkat desa di Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Sampai saat ini, tidak ada kasus kepala desa di Kecamatan Kedewan yang terkena kasus korupsi dana desa. Namun demikian ada dua desa di Kabupaten Bojonegoro yaitu Desa Sukosewu di Kecamatan Sukosewu dan Desa Glagahwangi di Kecamatan Sugihwaras yang Kepala Desanya terindikasi kasus korupsi Dana Desa. Oleh karena itu, penulisan ini sangat penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa.

Setiap desa menerima dana desa per tahun dalam jumlah yang sangat besar yaitu sekitar Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar. Tentu saja jumlah ini dapat membuat sejumlah orang menjadi gelap mata. Oleh karena itu, penggunaan dana desa yang dikelola para perangkat desa, harus transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) sehingga dana desa dapat digunakan tepat sasaran dan tidak merugikan negara.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Peran Perangkat Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro)”.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi adalah kontrak antara manajer (agents) dengan pemilik (principals). Hubungan keagenan adalah pihak principals yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agents untuk melakukan semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Pada pemerintahan daerah di Indonesia, teori agensi telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud principals adalah rakyat dan agent adalah pemerintah yang dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya (Widagdo, Widodo, dan Ismail 2016).

Transparansi

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi diharapkan dapat menjamin akses dan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatannya, dan pelaksanaan, serta hasil-hasil yang telah dicapai.

Menurut Mardiasmo (2009), transparansi berarti keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi Informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan wewenang, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agen/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan sebuah pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principals) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Secara singkat, kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Widagdo, Widodo, dan Ismail 2016).

Peran Perangkat Desa

Kepala desa dan perangkat desa merupakan orang yang memiliki peran penting dalam memimpin dan mengelola desa untuk mencapai cita-cita bersama dalam upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyarakat desa. Oleh karena itu, peran perangkat desa sangat mempengaruhi keberhasilan pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan program pemerintahan desa.

Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan PP No. 60 tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan dana desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

H1: Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa

H2: Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa

H3: Peran perangkat desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang ada di Kecamatan Kedewan. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perangkat desa yang berperan dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode sensus. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Carik Desa, Kasi Pemerintah, Kasi Kesejahteraan Rakyat, Kasi Pelayanan, Kaur perencanaan, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha Umum yang berperan dalam pengelolaan dana desa.

Definisi Operasional Variabel

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan skala Likkert dengan penilaian 1 sampai 5 yakni SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju). Indikator yang digunakan dalam pengukuran ini antara lain adalah:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan
- e. Pertanggungjawaban

Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Variabel dalam penelitian ini menggunakan skala Likkert dengan penilaian 1 sampai 5 yakni SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju). Indikator yang digunakan dalam pengukuran ini antara lain adalah:

- a. Komunikasi publik oleh pemerintah
- b. Hak masyarakat terhadap akses informasi
- c. Ketepatan dalam pelaporan
- d. Kualitas informasi yang disampaikan

Akuntabilitas

Menurut Mahmudi (2015) Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang dan harus diikuti dengan pemberian kapasitas untuk melaksanakan, keleluasaan (diskresi) dan kewenangan. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diartikan sebagai kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di desa dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah desa sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Desa. Dalam penelitian ini menggunakan skala Likkert dengan penilaian 1 sampai 5 yakni SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju). Indikator yang digunakan dalam pengukuran ini antara lain adalah:

- a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran
- b. Akuntabilitas proses
- c. Akuntabilitas program
- d. Akuntabilitas kebijakan

Peran Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala Desa (Gunawan, 2013). Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang kita miliki secara baik (Good Governance) yang bercirikan demokratis juga desentralistis. Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: Dalam penelitian ini menggunakan penelitian skala Likkert dengan penilaian 1 sampai 5.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari jawaban semua responden (perangkat desa) yang berasal dari semua desa di Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, yaitu Desa Kedewan, Desa Beji, Desa Hargomulyo, Desa Kawengan dan Desa Wonocolo. Setelah dilakukan olah data, diperoleh hasil bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi normal serta tidak bermasalah dengan uji validitas dan reliabilitasnya. Uji normalitas menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov test yang ditentukan berdasarkan taraf signifikansi 5%. Hasilnya, semua data terdistribusi normal karena nilai asymp. sig. semua variabel independennya $> \alpha$ (0.05). Semua butir kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini valid (mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut) karena masing-masing bernilai signifikansi $< 0,05$. Semua variabel penelitian ini reliabel karena menunjukkan nilai Cronbach Alpha $> 0,70$.

Uji Hipotesis

Hasil uji regresi linear berganda dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-1,800	.609		-2,956	,007
	Transparansi (X1)	,426	,084	,445	5,053	,000
	Akuntabilitas (X2)	,850	,110	,673	7,718	.000
	Peran Perangkat Desa (X3)	,177	,075	,204	2,365	.026

Sumber : Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas maka persamaan regresi yang diperoleh sebagai berikut :

$$Y = -1,800 + 0,426X1 + 0,850X2 + 0,177X3$$

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi yang berada pada kolom Adjusted R Square diperoleh sebesar 0,793 atau 79%. Hal ini berarti bahwa kontribusi variabel independen yaitu transparansi, akuntabilitas, peran perangkat desa terhadap variabel dependen yaitu pengelolaan dana desa sebesar 79%, sedangkan sisanya 21% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel independen yang digunakan. Hasil uji koefisien determinasi (R²) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,903a	,815	,793	,16654

a. Predictors: (Constant), Peran Perangkat Desa (X3), Akuntabilitas (X2), Transparansi (X1)

Sumber : Data primer diolah, 2019

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji statistik t dapat dilakukan dengan menggunakan unstandardized coefficients. Apabila tingkat signifikan $t \leq 0,05$ maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima (Ghozali, 2011). Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 1.

Hasil pengujian statistik menunjukkan nilai signifikansi variabel transparansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, artinya H1 diterima atau transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Koefisien regresi variabel transparansi sebesar 0,426. Arah hubungan antara transparansi dengan pengelolaan dana desa adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin transparan maka pengelolaan dana desa di desa-desa yang berada di Kecamatan Kedewan semakin baik. Pemerintahan desa di Kecamatan Kedewan

sudah menerapkan sistem transparansi pengelolaan dana desa berdasarkan asas-asas transparansi, tertib dan disiplin.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Alfasadun (2018) dan Fitriyani, dkk (2019) yang mengatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di desa-desa yang berada di Kecamatan Imogiri.

Hasil pengujian statistik menunjukkan nilai signifikansi variabel akuntabilitas sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, artinya H2 diterima atau akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Koefisien regresi variabel akuntabilitas sebesar 0,850 artinya terjadi hubungan positif antara akuntabilitas dengan pengelolaan dana desa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin akuntabel maka pengelolaan dana desa di desa-desa yang terdapat di Kecamatan Kedewan juga semakin baik.

Penerapan akuntabilitas terhadap pengelolaan dan desa di Kecamatan Kedewan sudah menerapkan prinsip tanggungjawab dan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113. Pengelolaan dana desa di Kecamatan Kedewan telah dilaksanakan secara akuntabel. Hal ini tampak dari beberapa responden yang menyatakan setuju bahwa sekretaris desa menyampaikan Raperdes APBDesa kepada kepala desa dan kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati atau Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggarannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Alfasadun (2018) dan Fitriyani, dkk (2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dan desa.

Hasil pengujian statistik menunjukkan nilai signifikansi variabel peran perangkat desa sebesar 0,026 yang lebih kecil 0,05 artinya H3 diterima atau peran perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Koefisien regresi variabel peran perangkat desa sebesar 0,177. Arah hubungan antara peran perangkat desa dengan pengelolaan dana desa adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik peran perangkat desa maka pengelolaan dana desa di desa-desa yang berada di Kecamatan Kedewan maka semakin baik pula pengelolaan dana desanya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan peretanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat desa di Kecamatan Kedewan.

Dalam proses perencanaan, perangkat desa di Kecamatan Kedewan telah ikut berperan dalam menyusun perencanaan pembangunan desa dengan melakukan Musyawarah Dusun (Musdus) yang akan dibahas pada Musyawarah Desa (Musdes), untuk membahas tentang arah dan rencana prioritas pembangunan desa selama 5 tahun serta sumber pembiayaan kegiatan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Sesuai hasil kesepakatan tersebut perangkat desa membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang selanjutnya akan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang).

Peran perangkat desa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dapat dilihat dari proses pengadaan barang dan jasa dan proses pembayaran. Pengelolaan dana desa dilakukan berdasarkan APBDes pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dengan membawa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan dijadikan dasar bagi pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan.

Penatausahaan dilakukan perangkat desa yang diwakili oleh bendahara desa atau kepala urusan keuangan. Penatausahaan dana desa dilakukan untuk mencatat semua transaksi yang ada, berupa penerimaan dan pengeluaran. Penatausahaan dana desa merupakan fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDes, hasil dari penatausahaan digunakan untuk

pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan bendahara desa dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank.

Pelaporan dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang dilakukan selama satu periode tertentu sebagai tanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan. Perangkat desa melakukan pelaporan dana desa mengenai penggunaan dana desa yang disusun dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dari tahap I, tahap II dan tahap III.

Perangkat desa melakukan pertanggungjawaban dana desa melalui Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir harus dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan Realisasi Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disajikan berisi informasi tentang penggunaan anggaran desa secara keseluruhan selama tahun anggaran.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Satrio (2017) yang menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan terkait pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan peran perangkat desa terhadap pengelolaan dana desa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kedewan. Hal ini menunjukkan semakin tinggi transparansi yang dimiliki oleh Kecamatan Kedewan maka pengelolaan dana desa semakin baik.

Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kedewan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas yang dimiliki oleh Kecamatan Kedewan maka pengelolaan dana desa semakin baik.

Peran Perangkat Desa berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kedewan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi peran perangkat desa yang dimiliki oleh Kecamatan Kedewan maka pengelolaan dana desa semakin baik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian tersebut maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

- Pemerintah desa
Tetap menjaga transparansi, akuntabilitas dan peran perangkat desa yang sudah baik ini untuk diterapkan pada masa-masa yang akan datang. Tetap menjaga integritas, profesionalitas, dan keimanan dalam menjalankan amanah untuk memajukan desa dan mensejahterakan masyarakat desa yang di pimpinnya.
- Penelitian selanjutnya.
Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode wawancara atau terlibat tatap muka langsung dengan responden. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar responden lebih memahami pernyataan kuesioner yang diberikan oleh peneliti, sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain seperti kualitas perangkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfasadun, Pancawati dan Sri. 2018. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Universitas Stikubank*.
- Dwi, Novindra dan Nur. 2017. Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Febri, Dwi dan Taufik. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Universitas Jember*.
- Ferina, Ika Sasti, Burhanuddin, and Herman Lubis. 2016. "Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Ogan Ilir)." *Jurnal manajemen dan bisnis* 14(3): 321–36.
- Fitriyani, Lita Yulita, Marita, Windyastuti, Mustholihul Absor. 2019. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris di Kecamatan Imogiri). *Seminar Nasional di Universitas Mercu Buana*. Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- <https://kumparan.com/blokbojonegoro/diduga-korupsi-dana-desa-kades-di-bojonegoro-ini-ditahan-1542441129112826778>
- Krina, P. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, edisi ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi kelima. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Miftahudin, 2018. *Akuntabilitas dan Trnsparasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa*. Skripsi Universitas Islam Indonesia.
- Ngongare, Yanis. 2016. "Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang Selatan." *Jurnal Eksekutif* 1(8).
- Rahman, Meuthia Ganie. 2000. "Good Governance, Prinsip, Komponen dan Penerapannya" dalam *Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik)*. Jakarta: Komnas HAM.
- Satrio, Mohamad. 2017. *Pengaruh Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa*. Skripsi Politeknik Negeri Bandung.
- Soerjono, Soekanto. 2002. *Sosioiogi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Kadek, Wayan. 2016. Peran perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Universitas Halu Oleo Kendari*.
- Tri, Neny. 2017. Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Akuntansi Keuangan dan Pajak* Volume 1 No 2-Juli 2017.
- Widagdo, Ari Kuncara, Agus Widodo, and Muhammad Ismail. 2016. "Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 19(2): 323–40.
- Widiyanti, Arista. 2016. *Akuntabilitas dan Transparansi Penelolan Alokasi Dana Desa*. Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

KRITIK ARUS BAWAH: STUDI WISATA FESTIVAL DI PERBATASAN SOTA, MERAUKE

Machya Astuti Dewi

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
machya@upnyk.ac.id

Iva Rachmawati

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Iva.rachma@gmail.com

Sri Issundari

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
sri.issundari@upnyk.ac.d

Meilan Sugiarto

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis
msugiarto89@gmail.com

Abstract

Many people believe that organizing festivals in the border area will increase the popularity of the border area and improve the socio-economic conditions of the border communities. But in the case of Sota border area, it is debatable. This paper aims to analyze the views of the community and local government about the border festival which was held by the central government in Sota, Merauke, Papua in 2016 and subsequently explored their views on what border festival should be like. To answer the question, a Focus Group Discussion was conducted with community leaders in Sota, activists in Merauke, officials from the Tourism Office, the Culture Office, the National Border Management Agency in Merauke, students and lecturers from Musamus University. They stated that the festival which had been conducted by the central government seemed in a hurry and lacked coordination with the local government. They also regretted that the festival was dominated by artists from Jakarta, while the local community was less involved. As a result, local cultural and economic potentials are not fully exposed. There are three things that should be considered to promote the border area through festivals: 1) the social, cultural and economic potential of the local community must be the main points promoted, 2) the widespread use of mass media, and 3) the strengthening of networks between the community and the local university, and local government for continual assistance.

Keywords: border area, border festival, promotion, local community, local government

PENDAHULUAN

Pengembangan kawasan pariwisata perbatasan saat ini menjadi trend dalam pembangunan daerah perbatasan. Hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah mengentaskan kemiskinan di wilayah perbatasan seperti tertuang dalam 11 rencana aksi BNPP yang diimplementasikan melalui Peraturan Presiden No. 29 tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011. Hal ini juga tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 melalui Program Pengembangan Wilayah Perbatasan. Oleh karenanya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan perbatasan melalui proyek border tourism dapat menjadi salah satu upaya pengentasan kemiskinan.

Namun demikian pengembangan pariwisata perbatasan menghadapi kendala keterbatasan akses, infrastruktur, sarana, dan prasarana, di samping lokasinya yang jauh dari kota. Keterbatasan-keterbatasan itu oleh Kementerian Pariwisata dicoba untuk diminimalisir dengan penyelenggaraan festival pada tahun 2016. Festival memainkan peran yang penting dalam pariwisata baik sebagai aset maupun sebagai produk dari pariwisata (Cudny, 2013). Dorongan utama melakukan perjalanan wisata budaya tidak hanya untuk mendapatkan kesenangan dari perjalanan wisata itu sendiri melainkan mereka yang melakukan perjalanan wisata budaya cenderung bepergian untuk memperoleh pengetahuan mengenai budaya baru dan merasakan atmosfer yang berbeda (Miller, Tanpa Tahun). Penyelenggaraan festival pada kawasan perbatasan diharapkan mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang menyukai perjalanan wisata budaya dan atau mereka yang sebelumnya tidak tertarik dengan wisata perbatasan.

Festival perbatasan atau Cross Border Festival di Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata pernah digelar di beberapa daerah perbatasan dengan konser musik, bazaar, kuliner dan sejumlah pertandingan olahraga seperti pacuan kuda dan motorcross. Sejumlah besar wisawatan baik wisatawan domestik maupun wisatawan dari negara tetangga datang untuk menikmati Cross Border Festival. (<https://travel.kompas.com/read/2016/06/29/061000927/Tarik.Wisman.Kemenpar.Akan.Gelar.Festival.Perbatasan>). Di Papua, Cross Border Festival diselenggarakan tahun 2016 di Jayapura dan Merauke. Seperti halnya Cross Border Festival lainnya, Cross Border Festival di Jayapura dan Merauke juga ditujukan untuk meningkatkan kedatangan wisatawan dengan mengundang sejumlah artis dari Jakarta dan budaya lokal. Banyak pihak menilai festival tersebut berhasil meningkatkan jumlah pengunjung di perbatasan. Namun apakah daerah perbatasan mendapat manfaat dari kegiatan tersebut? Tulisan ini hendak mengungkap pandangan pemerintah daerah Merauke dan masyarakat Sota tentang festival perbatasan.

KAJIAN LITERATUR

Pemerintah saat ini banyak membantu pariwisata di daerah dengan menyelenggarakan kegiatan atau event tertentu guna menarik pengunjung. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi untuk pembangunan ekonomi, pembangunan bangsa dan pariwisata budaya. Kesadaran atas dampak kegiatan budaya atau festival budaya yang dapat menarik wisatawan pun saat ini telah mengalamai banyak perubahan. Pemerintah pusat tidak lagi menjadi aktor utama dalam menyelenggarakan kegiatan melainkan aktor utama justru berada di tangan warga lokal. Komunitas lokal memainkan peran utama ketika menjalankan acara olahraga besar atau acara berskala besar lainnya. Merujuk pada temuan Getz (1997) tentang pengelolaan kegiatan, maka dukungan dari komunitas budaya lokal sangat penting. Getz (1991) juga menengarai sejumlah keunggulan dalam penyelenggaraan festival

yang diselenggarakan oleh warga lokal.

Getz (2008) menempatkan Festival Tourism sebagai bagian dari Event Tourism. Bagi Getz, semua pariwisata yang bertujuan untuk menghadiri sebuah festival adalah bagian dari Event Tourism. Demikian pula mengacu pada klasifikasi Lord Cultural Resources Planning and Management (<https://www.lord.ca/>), festival merupakan salah satu bentuk dari Event Tourism yang merupakan sub bagian dari Cultural Tourism. Sementara event sendiri didefinisikan oleh Janiskee (1980) sebagai serangkaian kegiatan yang atraktif dan menarik yang diselenggarakan dalam waktu yang pendek pada kawasan tertentu untuk memperingati peristiwa tertentu. Studi mengenai special event sebagai bagian dari manajemen pariwisata dimulai pada tahun 1970 (Hede 2007). Studi tersebut terus berkembang hingga tidak hanya meyakini event sebagai motivator penting atau pembangun citra sebuah kawasan tertentu tetapi juga meyakini bahwa event mampu menjadi pendorong perekonomian masyarakat.

Sementara itu Congcong (2014) mendeskripsikan festival secara lebih spesifik yaitu dengan menelusuri makna dari festival itu. “it (festival) is a kind of social activity according to the needs of people living custom for a long time gradually established and passed from generation to generation”. Dengan demikian, Congcong mendefinisikan festivals tourism sebagai upaya untuk membangun pariwisata dengan memanfaatkan budaya lokal dan warga masyarakat (Congcong, 2014: 53).

Secara khusus pula Congcong menetapkan karakter dari festival tourism melalui beberapa prasyarat yaitu, pertama, festival tourism bersifat lokal yang artinya turisme ini secara spesifik menawarkan budaya dan adat daerah dan merujuk pada kawasan geografis tertentu. Dengan demikian, setiap festival di setiap daerah memiliki keunikannya masing-masing. Kedua, setiap wisatawan dapat turut serta berpartisipasi dan memiliki pengalaman secara langsung dalam acara yang diselenggarakan. Ketiga, budaya -selain menjadi komoditas utama guna menarik wisatawan- ia juga menjadi jembatan bagi komunikasi budaya antara warga antar negara. Keempat, festival tourism merupakan kegiatan yang sangat luas yang mencakup budaya lokal, kuliner lokal, penginapan, hingga transportasi, keamanan bahkan mencakup persoalan politik yang terkait dengan kebijakan penyelenggaraan festival tourism. Terakhir, festival tourism merupakan bentuk baru dari produk pariwisata yang memberikan sensasi yang berbeda kepada wisatawan karena tidak saja mengenal budaya yang berbeda tetapi mereka dapat mengenal budaya yang berbeda dengan cara yang unik. Dengan begitu, produk baru dalam industri pariwisata budaya ini sudah selayaknya dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih besar tetapi juga dampak sosial.

Berangkat dari pemaknaan festival tersebut, maka semestinya penyelenggaraan festival harus memiliki unsur budaya lokal baik yang berupa tangible product maupun intangible product berupa tari-tarian dan musik. Meskipun dalam prakteknya penyelenggaraan festival sebagai bagian dari turisme tidak lagi dapat ditempatkan semata pada produk budaya lokal. Sebagai sebuah produk guna menarik kedatangan wisatawan pada suatu kawasan maka festival tourism diselenggarakan sejalan dengan bentuk-bentuk kegiatan yang lain seperti kegiatan olahraga yang dikemas sebagai perlombaan atau musik dan aktivitas seni yang tidak lagi merujuk pada seni tradisional. Tujuan festival tourism sebagai daya tarik wisata tidak jarang mengacaukan identitas kawasan itu sendiri yang semestinya dapat menjadi brand tersendiri yang melekat pada festival yang diselenggarakan. Cudny (2013:109) menengarai hal tersebut dengan memperingatkan bahwa hilangnya autentisitas lokal yang semata-mata hanya mengikuti keinginan wisatawan dapat menjadi penyebab disfungsi dari penyelenggaraan sebuah festival.

Festival atau event dapat menjadi salah satu bentuk pariwisata alternatif yang dapat

dikembangkan di perbatasan termasuk Sota, dengan mendorong warga lokal sebagai host. Selain mendorong peningkatan kualitas sumber daya, budaya dan artis lokal memiliki kesempatan yang lebih baik dalam sejumlah festival budaya. Dengan demikian, pembangunan image terbangun secara tidak langsung dengan melekatkan kekhasan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan memahami pandangan masyarakat tentang festival perbatasan dan merumuskan ulang model festival perbatasan. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk merumuskan model pemberdayaan masyarakat melalui program pariwisata perbatasan dalam bentuk festival yang merupakan sinergi antara masyarakat (kelompok yang dibina pada tahun kedua), dinas terkait (Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, Dinas Perindustrian, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah), maupun pihak swasta, sehingga dapat mendukung pengembangan produk dan promosi pariwisata perbatasan di Desa Sota.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Untuk pengumpulan data kualitatif instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah focus group discussion (FGD). FGD dilakukan pada tanggal 29 April 2019 dengan peserta terdiri dari unsur pemerintah daerah kabupaten Merauke, Kepala Kampung Sota, Polsek Sota, staf Badan Nasional Pengelola Perbatasan di Merauke, Komunitas Kandara, perwakilan masyarakat Sota, mahasiswa dan akademisi dari Universitas Musamus Merauke. Selain itu juga dilakukan observasi terhadap situasi dan obyek pengamatan untuk melengkapi dan memperkaya data.

Data yang sudah dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan deskriptif analitis. Data dipilih berdasarkan kategorisasi-kategorisasi. Selanjutnya data dianalisis dan diinterpretasikan, dinarasikan dan kemudian ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Sota dan Festival Perbatasan

Sota adalah sebuah distrik (kecamatan) di kabupaten Merauke yang terletak di ujung Timur Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Sota berjarak sekitar 80 km dari Kabupaten Merauke dengan jarak tempuh sekitar 1-2 jam. Wilayah ini terletak pada 7°45'00" - 8°50'04" LS dan 140°41'04" - 141°12'00" BT. Luas daerah Distrik Sota adalah 2.319.071 Km² (5,06% dari luas wilayah Kabupaten Merauke). Jalan dari Kota Kabupaten Merauke menuju Sota ditempuh melewati jalan aspal yang cukup baik yang menembus hutan dan savana milik Taman Nasional Wasur. Di sebelah utara Sota berbatasan dengan Distrik Eligobel. Di sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Naukenjere. Di sebelah barat berbatasan dengan sungai Maro Distrik Jagebob. Sementara di sebelah timur berbatasan dengan sungai Torasi negara Papua Nugini.

Sota memiliki potensi destinasi wisata yang unik karena merupakan kawasan perbatasan negara pada kawasan paling timur Indonesia. Di Sota terdapat tugu kembar perbatasan atau tugu titik 0 km seperti yang dimiliki oleh Sabang di Aceh (perbatasan Indonesia paling barat di bagian utara Pulau Sumatera). Keunikan lain yang dimiliki kawasan ini adalah masih berjalannya perdagangan tradisional antara warga Sota dan warga desa Weam dan desa Wereaber dari Papua Nugini. Perdagangan tradisional yang mengandalkan hubungan personal ini terjadi setiap hari dengan intensitas yang cukup tinggi, yaitu sekitar 200-300 orang pendatang dari Papua Nugini dan rata-rata 100 orang Indonesia berkunjung ke PNG setiap bulannya (Data Pos Imigrasi Perbatasan Sota, Merauke, 2013). Sota memiliki Taman Nasional Wasur yang kaya akan flora dan fauna. Sota juga menyediakan fenomena unik, yaitu sarang

Semut atau Musamus yang hanya ada di Indonesia dan sejumlah negara di Afrika. Sementara itu potensi wisata alam pantai juga dimiliki Sota, yaitu pantai Lampu Satu.

Sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah untuk menambah daya tarik Sota sebagai destinasi wisata. Selain Taman Perbatasan yang dibangun oleh warga lokal, sebuah proyek ekowisata pernah diujicobakan di kawasan tersebut. Pada tahun 2013 Sota mendapat dana bantuan untuk pembangunan ekowisata selama 3 tahun. Sayangnya proyek selama 3 tahun tersebut tidak berhasil karena kesadaran masyarakat atas potensi ekonomi yang mereka miliki nampaknya belum cukup dapat menggerakkan masyarakat untuk memanfaatkannya (Dewi dan Rachmawati, 2018).

Kegagalan ini mengingatkan pemerintah bahwa masyarakat masih perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar untuk menunjukkan bahwa industri pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Secara umum masyarakat kurang memiliki pendidikan yang cukup dan sebagian besar berprofesi sebagai petani. Bahkan, sebagian masyarakat juga masih ada yang hanya mengandalkan ketercukupan pangan mereka dari kebun dan hutan. Pemerintah akhirnya menggagas sebuah festival untuk mendatangkan lebih banyak pengunjung di perbatasan. Ide ini juga dilatarbelakangi oleh kesuksesan perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus di Sota yang mampu menarik ratusan pengunjung baik Merauke maupun dari Papua Nugini datang ke Sota. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia kemudian menyelenggarakan Cross Border Festival (festival perbatasan) dengan harapan event budaya dapat menarik kunjungan wisata lebih banyak ke kawasan perbatasan dan mendorong kesadaran masyarakat atas potensi pariwisata yang mereka miliki.

Festival perbatasan diselenggarakan di Merauke pada 17 Agustus 2016 dan 13 Desember 2016 di Lapangan Sota, Merauke. Acara ini didominasi oleh pertunjukan band dan penampilan artis-artis ibukota dan daerah. Musik beraliran reggae sengaja dipilih dalam festival musik karena menurut Kepala Bidang Festival Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran Asia Pasifik Kementerian Pariwisata, Adela Raung, music reggae banyak disukai oleh masyarakat Papua Nugini. Strategi ini nampaknya cukup berhasil menarik sejumlah besar pengunjung dari Papua Nugini untuk menghadiri festival perbatasan yang diselenggarakan dua kali tersebut pada tahun 2016. Selain pertunjukan musik kegiatan ini juga menampilkan budaya lokal berupa tari-tarian, kuliner lokal dan juga kerajinan lokal dan bazaar.

Kementerian Pariwisata Indonesia mencatat bahwa festival tersebut memperoleh sukses besar dengan jumlah kedatangan wisatawan yang cukup besar pada acara tersebut. Wisatawan mancanegara yang datang pada festival perbatasan tanggal 17 Agustus 2016 tercatat sebanyak 1300 orang. Sementara itu wisatawan mancanegara yang hadir pada tanggal 3 Desember 2016 tercatat sebanyak 50 orang. Konsulat Jendral Republik Indonesia di Papua Nugini, Abraham Lebalauw, menyatakan bahwa di Papua Nugini acara ini mendapat sambutan yang positif dari warga setempat. Event tersebut sangat terkenal dan mampu menarik sejumlah warga Papua Nugini untuk datang (<http://www.cnn.Indonesia>, 2016).

Kritik Arus Bawah

Meskipun secara umum festival perbatasan yang pernah dilakukan pada tahun 2016 dipandang sukses, namun tidak sedikit kritik yang disampaikan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. Salah satu kritik yang disampaikan terkait dengan kurangnya pelibatan masyarakat setempat dalam festival perbatasan. Salah seorang pejabat pemerintah di Merauke menyatakan bahwa festival dengan mengundang artis-artis ibukota dipandang kurang tepat. Menurutnya penyelenggaraan festival semestinya berasal dari masyarakat itu sendiri, yaitu menunjukkan potensi ekonomi dan budaya setempat. Hasilnya pun berupa

peningkatan ekonomi yang dinikmati masyarakat. Pejabat tersebut menceritakan:

Jangan sampai kita melakukan festival, tapi mendatangkan keramaian dari luar. Sebaiknya dari masyarakat sendiri. Nah kita perlu mempersiapkan masyarakat dengan baik. Apa yang disajikan dalam festival itu. Entah itu tarian, hasil-hasil budaya, ukiran atau souvenir atau apa saja yang menunjukkan daerah perbatasan. Ini yang perlu kita cari. Selama ini festival yang kita lakukan hanyalah mengumpulkan orang lalu melakukan sesuatu yang mungkin kita sendiri tidak paham atau masyarakat tidak paham. Jangan sampai festival mendatangkan artis dari Jakarta. Kita harus membentuk festival yang memang betul-betul dari masyarakat (FGD, 29 April 2019).

Kritik yang sama juga disampaikan oleh perwakilan Komunitas Kandara Merauke yang menyatakan bahwa festival perbatasan semestinya memaksimalkan potensi lokal yang dimiliki Sota. Ia menyayangkan bahwa penyelenggaraan festival perbatasan di Sota tahun 2016 mengesankan bahwa pengunjung datang beramai-ramai untuk mencari makan. Tujuan festival mempromosikan budaya dan potensi ekonomi Sota menjadi tidak tersampaikan, padahal Sota memiliki aset budaya dan aset ekonomi yang bisa dipromosikan:

Saya tidak terlibat secara langsung, tapi saya sebagai kontituen yang meramaikan. Tapi saya mau sampaikan cerita tidak enak. Setelah festival bubar, nggak ada kelanjutan dari itu. Kalo kita bicara seni budaya di distrik Sota ada 5 kampung yang sebenarnya mereka sudah punya yang unik. Sebagai contoh Yanggandur itu. Kalo di Yogya itu ada upacara turun tanah untuk bayi, itu ada di Yanggandur. Ini potensi budaya yang perlu diperkenalkan. Kemudian tari-tarian yang masih sangat orisinal... Hasil bumi Sota sangat banyak. Ada minyak kayu putih. Dari sisi lain kalo kita anak Merauke berarti tahu dong kalo Noken dari bahasa suku Kanum itu adalah toare. Bahwa tifa adalah kandara. Ini juga kita harus perkenalkan. Bukan hanya Sota, festival. Tapi juga tahu apa itu yang ada di sana. Mungkin ada festival kulinernya, ada handicraft-nya. Supaya masyarakat terwakili, dilibatkan, bukan sebagai penonton yang datang hanya untuk maaf... cari makan. Kesederhanaan masyarakat di sana banyak potensi yang bisa digali. Hanya karena belum dilibatkan, jadi bodo amat (FGD, 29 April 2019).

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Kampung Sota. Menurutnya festival yang diinisiasi pemerintah pusat terlalu didominasi oleh penampilan artis dari Jakarta. Akibatnya budaya masyarakat lokal tidak terangkat. Padahal Sota memiliki ikon wisata berbasis budaya, yang antara lain ditunjukkan oleh keberadaan taware atau noken (tas tradisional Papua), souvenir gantungan kunci, dan kandara atau petkore (tifa). Tifa atau Kandara dari Merauke berbeda dengan tifa dari daerah lain yang ukurannya lebih kecil. Selain itu terdapat tarian tradisional khas Merauke, yaitu tari Etor. Hal ini dapat menjadi ikon dalam festival perbatasan. Kepala kampung menjelaskan:

Festival itu seharusnya yang diangkat budayanya. Saya sangat sayangkan festival kemarin yang dipertunjukkan di sana hanya artis dari Jakarta. Akhirnya budaya kita tidak diangkat. Masyarakat lokal yang punya budaya tidak kelihatan. Ukir-ukiran, anyaman belum dimanfaatkan. Festival kemarin itu juga tiba-tiba. Masyarakat lokal belum punya persiapan. Bahkan pemda juga agak kaget dengan waktu yang singkat. Akhirnya tamu dari PNG diundang agak repot. Kalau bisa festival ini ada persiapan paling tidak satu minggu sebelumnya. Nanti yang dipertunjukkan budayanya selain mereka juga ada persiapan termasuk souvenir (FGD, 29 April 2019).

Menanggapi promosi budaya di Sota, Arnoldus dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Merauke menyatakan bahwa aspek tersebut harus dikaji mendalam. Merauke memiliki 5 lokasi kecamatan perbatasan, yaitu Naukenjerai, Sota, Ulele, Muting, dan Gobel. Untuk mempromosikan perbatasan pemerintah telah membuat festival perbatasan.

Arnoldus setuju bahwa potensi budaya lokal harus diangkat. Namun jika yang ditampilkan tari-tarian, sementara yang datang adalah warga PNG maka itu artinya tidak ada sesuatu yang baru yang ditampilkan. Artinya perlu mempromosikan festival budaya ke pihak luar (luar Papua), sehingga potensi budaya Sota terangkat. Peran publikasi menjadi sangat penting, baik melalui media sosial, maupun televisi nasional. Harapannya agar bisa lebih dikenal luas dan akhirnya wisatawan dari luar Papua datang melihat. Dampak berikutnya adalah masyarakat bisa memamerkan produk-produk mereka dan mendapatkan penghasilan dari festival perbatasan (FGD, 29 April 2019).

Saat ini peran media massa dalam promosi kepariwisataan adalah hal yang tidak terhindarkan. Banyak kajian empiris di berbagai negara menunjukkan bahwa kesuksesan dalam mempromosikan sektor wisata ditopang oleh peran media yang intensif, baik media massa konvensional maupun media sosial baru yang saat ini sedang menjadi trend (Al-khasawneh, et al, 2018; Hincu, 2017; Condratov & Hapenciuc, 2012). Oleh karenanya upaya untuk mengangkat wisata perbatasan melalui festival perbatasan seharusnya dipersiapkan dengan perencanaan yang baik, termasuk pemanfaatan media massa untuk mempromosikan wisata perbatasan.

Upaya untuk mempromosikan festival di perbatasan bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan maskapai penerbangan. Informasi mengenai festival perbatasan bisa dimasukkan dalam majalah yang dimiliki maskapai penerbangan, misalnya Garuda atau Lion sehingga informasinya bisa tersebar lebih luas dan diketahui oleh orang dari luar Papua. Waktunya pun harus dibuat longgar, misalnya satu tahun sebelum kegiatan digelar sudah mulai dipromosikan. Jika dimungkinkan promosi bekerjasama dengan maskapai penerbangan dalam bentuk diskon penerbangan ke Merauke saat festival diselenggarakan. Hal ini tentunya menuntut perencanaan yang sangat baik agar kegiatan festival di perbatasan bisa terjadwal dengan baik dan dipromosikan secara luas. Terkait arti penting promosi salah seorang dosen Universitas Musamus menjelaskan:

... memang manajemen pariwisatanya harus jelas. Apa yang mau dilakukan, dipromosikan. Dari Musamus pernah mau mengembangkan desa wisata kerja sama dengan Faperta di kampung Nasem. Kendalanya masyarakat menolak, karena rumahnya harus bagus dulu baru bule mau tinggal. Padahal justru bule sukanya tinggal seperti itu... Yang penting kita promosinya bagaimana. Harus continue.. Website Merauke juga harus kemana-mana. Harus kerja sama pemerintah dengan masyarakat (FGD, 29 April 2019).

Contoh kesuksesan festival Asmat dapat dijadikan salah satu referensi untuk mengembangkan wisata festival di perbatasan. Dalam festival Asmat Pemerintah Daerah menggelar dan melelang produksi ukiran dan tari-tarian. Misalnya mulai dari harga 1 juta sampai 10 juta. Banyak tamu yang diundang oleh pemerintah Daerah Merauke, termasuk dari luar Jakarta, semua provinsi di Indonesia, bahkan luar negeri. Untuk Sota dapat dikemas serupa. Waktu kegiatan harus ditentukan lebih dulu, apakah akan disediakan setiap tahun, dua tahun sekali, apakah akan diselenggarakan setiap tanggal 17 Agustus atau momen penting yang lain. Festival juga bisa menjadi ajang lomba. Pemerinah bisa menerbitkan Perda tentang festival perbatasan

Aspek yang tidak kalah penting untuk mengembangkan festival di perbatasan adalah sinergi kerja sama antara masyarakat di perbatasan, pemerintaah daerah dan perguruan tinggi. Pendampingan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan pendampingan dari Perguruan Tinggi swasta maupun pemerintah lebih ditingkatkan. Seperti yang telah dilakukan Kandara Scooter Club dalam pengembangan pariwisata, hal itu bisa diikuti. Sinergitas antara universitas, LSM dan pemerintah bisa dilakukan. untuk pengembangan pariwisata .

KESIMPULAN

Apa yang muncul dalam pemberitaan di publik belum tentu merupakan realita yang sesungguhnya terjadi. Itulah gambaran wisata festival yang pernah diselenggarakan di Sota, perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Pemberitaan di media massa menunjukkan kesuksesan dari festival tersebut. Namun demikian pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan festival perbatasan ternyata menyampaikan hal yang berbeda. Terdapat catatan-catatan kekurangan dari festival di perbatasan, terutama karena potensi budaya dan ekonomi lokal belum menjadi sentral perhatian dalam festival.

Kasus wisata festival di perbatasan Sota menunjukkan bahwa dominasi otoritas kewenangan pusat dalam menentukan arah pembangunan di daerah justru berimplikasi pengabaian potensi lokal. Kritik-kritik pun bermunculan sebagai bentuk ketidakpuasan atas pelaksanaan festival tersebut. Oleh karenanya di masa mendatang pemerintah pusat perlu mempersiapkan agenda festival perbatasan terencana lebih baik dengan memperhatikan potensi dan ciri khas sosial, budaya dan ekonomi dari masyarakat perbatasan sebagai ikon utama festival. Aspek promosi yang terintegrasi dan jaringan kerja sama dengan pemerintah daerah serta perguruan tinggi dapat menjadi penopang keberhasilan wisata festival di perbatasan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Tulisan ini merupakan bagian dari penelitian berjudul "Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Kawasan Pariwisata Perbatasan di Kabupaten Merauke" yang didanai oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Cudny, W. 2013. Festival Tourism – The Concept, Key Functions and Dysfunctions in The Context Of Tourism Geography Studies. *Geographical Journal*. 65 (2), 105-118.
- Al-khasawneh, N., Al-Hrout, S., Ibrahim, H. M. 2018. The Role of Tourism Media in the Promotion of Domestic Tourism in Jordan (Governorate of Irbid as A model) *Journal of Tourism, Hospitality and Sports*. 37, 36-47.
- Condratov, I., Hapenciuc, C.V. 2012. Study Regarding the Use of Multimedia Technologies in Tourism Sector of Suceava County. *Revista de Turism: Studii si Cercetari in Turism*. 0 (14), 60-65.
- Dewi, M. A. & Rachmawati, I. 2018. The Barriers and Strategy of Sota's Border Tourism Area Development. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. 31 (4).
- Congcong, T. 2014. The Study of Festival Tourism Development of Shanghai. *International Journal of Business and Social Science*. 5 (4).
- Data Pos Imigrasi Perbatasan Sota, Merauke, 2013.
- Focus Group Discussion. 29 April 2019.
- Getz, D. 2008. Event Tourism: Definition, Evolution and Research. *Tourism Management*. 29 (3), 403-428.
- Hede, A. 2007. Managing special events In the New Era of the TBL. *Event Management*. 11, 13-22.

- Hincu, L. 2017. Strategies to Promote Tourism in Bucovia. *Management Intercultural*. XIX (38), 33-44.
- Janiskee, R. 1980. South Carolina’s Harvest Festival: Rural Delights for Day Tripping Urbanities. *Journal of Cultural Gegraphy*. 1, 96-104.
- Kompas.com.2016. Tarik Wisman, Kemenpar akan Gelar Festival Perbatasan.
<https://travel.kompas.com/read/2016/06/29/061000927/Tarik.Wisman.Kemenpar.Akan.Gelar.Festival.Perbatasan>.
- Miller, D. Tanpa Tahun. The Increasing Importance of Cultural Tourism. TTRA International. Strategic Marketing and Research, Inc.

ADOPSI APLIKASI BERBASIS ANDROID

Bela Yudha Darasta

Magister Manajemen, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Aprilivianto

Magister Manajemen, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Dyah Sugandini (penulis korespondensi)

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

dini@upnyk.ac.id

Mohamad Irhas Effendi

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keunggulan relatif, kemudahan dan keterlihatan pada adopsi aplikasi berbasis Android. Sampel penelitian ini adalah konsumen yang pernah menggunakan aplikasi berbasis Android dengan jumlah 100 responden. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keunggulan relatif, kemudahan dan keterlihatan pada adopsi aplikasi berbasis Android. Menunjukkan rata-rata jawaban yang tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keunggulan relatif, kemudahan dan keterlihatan pada adopsi aplikasi berbasis Android bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya terkait adopsi Aplikasi berbasis Android.

Kata kunci: Android, keunggulan relatif, kemudahan dan keterlihatan

PENDAHULUAN

Transisi jaringan interkoneksi global untuk berbagi dan menyampaikan informasi menyebabkan internet muncul sebagai alat pemasaran yang berguna dan berfungsi sebagai platform untuk transaksi domestik dan internasional (Lim, Osman, Salahuddin, Romle & Abdullah, 2016). The sharing economy merupakan konsep bisnis yang sedang tren yang baru-baru ini muncul sebagai model bisnis yang inovatif di mana orang secara kolaboratif memanfaatkan sumber daya dengan cara yang inovatif. Model konsumsi dengan cara baru ini telah memaksa perubahan yang menantang konsep bisnis tradisional dengan mengubah model bisnis serta menggeser konsep konsumsi, apa yang harus dikonsumsi dan bagaimana cara mengonsumsi (Rogers, 2010). Aplikasi berbasis Android yang menawarkan cara berbisnis baru dari awal sudah mendapatkan respon sangat baik dari para konsumen di Indonesia. Aplikasi berbasis Android terus berkembang memenuhi kebutuhan konsumennya. Banyak konsumen yang merasakan kemudahan dalam menggunakan Aplikasi berbasis Android dan menggunakan Aplikasi berbasis Android untuk berbagai transaksi pembeliannya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji model pengukuran adopsi berbasis Android dengan mendasarkan pada teori Adopsi Inovasi dari Rogers (2010) yang sudah dikembangkan juga oleh Min, So & Jeong (2018). Model pengukuran yang akan diukur dalam penelitian ini meliputi variabel keunggulan relatif, kesesuaian, kerumitan, ketercobaan dan keterlihatan. Model pengukuran

ini penting untuk dilakukan karena banyak studi yang masing-masing sangat membutuhkan fit model dari variabel yang membentuk adopsi inovasi terutama inovasi berbasis android. Contohnya adalah Liu & Mattila (2017) mempelajari keputusan konsumen tentang Airbnb. So, Oh, dan Min (2018) meneliti motivasi dan kendala konsumen Airbnb. Literatur masih kurang menangani penelitian empiris tentang fenomena adopsi android dari perspektif konsumen (Min et al., 2018).

TINJAUAN LITERATUR

Relative advantage (Keunggulan relatif)

Keunggulan relatif dari satu teknologi di atas yang lain adalah penentu utama dari adopsi teknologi baru. Tingkat keuntungan relatif adalah sering dinyatakan dalam istilah ekonomi

keuntungan, prestise sosial, kenyamanan, kepuasan atau keuntungan lainnya (Rogers, 2010). Masalah keunggulan relatif telah terbukti memiliki hubungan positif dengan adopsi inovasi (Sin et al., 2016). Tornatzky dan Klein (1982) mengklaim bahwa atribut ini memiliki kekurangan kekuatan teoretis, ketergantungan dan kekuatan preskriptif karena definisi ini sangat luas. Meskipun demikian tentang ini, Lertwongsatien dan Wongpinunwatana (2003) menemukan bahwa konsumen yang memiliki pemahaman keunggulan relatif yang lebih tinggi, semakin tinggi peluang untuk mengadopsi E-commerce. Sejumlah penelitian yang menggunakan atribut keunggulan relatif untuk dikaitkan dengan adopsi inovasi menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Misalnya di Singapura, Soh, Mah, Gan, Chew dan Reid (1997) menyatakan bahwa Internet memiliki efek optimis terhadap citra perusahaan dan kepuasan pelanggan meskipun tidak ada keuntungan relatif pada peningkatan pangsa pasar atau penjualan. Seyal dan Rahman (2003) menemukan bahwa tidak ada hubungan yang relevan antara keunggulan relatif dan adopsi E-commerce. Sebaliknya, masih banyak peneliti yang menunjukkan ada hubungan positif antar keunggulan relatif dan adopsi E-commerce termasuk: Lertwongsatien et al., (2003), Tan dan Teo (2000), Premkumar dan Ramamurthy (1995).

Persepsi Kemudahan

Persepsi kemudahan penggunaan seperti yang dijelaskan oleh Davis (1989); Venkatesh & Davis (2000) adalah sejauh mana penggunaan android bebas dari usaha. Ini merupakan penilaian individu dari upaya yang digunakan karena menggunakan teknologi baru (Davis, 1989). Kemudahan penggunaan adalah salah satu keyakinan perilaku utama yang mempengaruhi niat pengguna untuk menerima teknologi baik dalam model TAM asli maupun yang direvisi. Dalam konteks aplikasi android, persepsi kemudahan penggunaan, sebagai faktor penentu utama yang memengaruhi niat perilaku untuk menggunakan aplikasi pada smartphone (Vatanparast, 2010; De Silva et al., 2011). Beberapa peneliti seperti Liao et al., (2007); Suki, (2012) menegaskan bahwa persepsi kemudahan penggunaan bertanggung jawab dalam menentukan niat konsumen untuk menggunakan layanan seluler dan persepsi kemudahan penggunaan merupakan faktor paling penting untuk meningkatkan niat perilaku konsumen untuk menggunakan layanan. Persepsi kemudahan mempengaruhi sudut pandang seorang individu terhadap menggunakan teknologi (Rauniar et al., 2014) dan juga memprediksi manfaat yang dirasakan (Raza, Umer & Shah (2017). Namun hasil studi yang dilakukan oleh Chong et al., (2012) menunjukkan bahwa kemudahan menggunakan yang dirasakan tidak berpengaruh signifikan terhadap niat konsumen untuk mengadopsi 3G. Mardikyan et al., (2012) dan Pandit dan Upadhyay (2012) meneliti bahwa persepsi kemudahan penggunaan adalah salah satu faktor, yang mempengaruhi persepsi konsumen dan adopsi pada teknologi

seluler 3G. Adopsi konsumen dalam m-commerce terus tumbuh, Kim et al., (2009) menyelidiki bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap sikap pengguna ponsel dan niat penggunaan teknologi seluler untuk berbelanja. Ko et al., (2009) mengeksplorasi bahwa potensi adopsi konsumen dalam berbelanja dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan. Persepsi kemudahan penggunaan adalah prediktor penting bagi niat perilaku pengguna untuk menggunakan aplikasi seluler (Nassuora, 2013; Raza, Umer & Shah, 2017). Kemudahan penggunaan yang dirasakan adalah penentu utama dari penerimaan konsumen dalam layanan pembayaran mobile (Schierz et al., 2010; Kim et al., 2011). Yan et al., (2009) dan Viehland dan Leong (2010) membuktikan bahwa persepsi kemudahan penggunaan memengaruhi niat konsumen untuk menggunakan layanan pembayaran berbasis aplikasi android (m-mobile)

Observability (Keterlihatan)

Persepsi terhadap observability didefinisikan sebagai sejauh mana konsumen merasakan dan melihat bahwa situs web online dapat menambah nilai dan kemanjuran bagi mereka saat melakukan belanja online (Lai & Wang, 2012). Konsumen bisa mengamati dan yang merasakan bahwa dengan menggunakan sistem bisa meningkatkan kinerja mereka (Davis, 1989; Liao et al., 2013). Kegunaan yang dirasakan dari situs web biasanya tergantung pada efisiensi karakteristik teknologi seperti mesin pencari canggih dan layanan pribadi yang disediakan oleh penyedia layanan kepada konsumen (Kim & Song, 2010). Berbagai informasi dan deskripsi barang berkualitas tinggi harus disediakan kepada pelanggan untuk membantu pelanggan dalam membuat keputusan yang terinformasi dengan baik. Negara-negara berkembang masih pada tahap awal dalam teknologi informasi dibandingkan dengan negara maju (Hana, Mike & Parvaneh, 2012; Lim et al., 2016) sehingga berimbas pada adopsi inovasi berbasis mobile (Aghdaie et al., 2011) Hernandez et al., (2011) mengungkapkan bahwa manfaat yang dirasakan memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku belanja online di Spanyol, tetapi Aghdaie et al., (2011) menemukan bahwa manfaat yang dirasakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku pembelian internet di Iran. Bisa jadi karena berbeda sudut pandang responden dari negara maju dan berkembang mengenai pengaruh manfaat yang dirasakan pada perilaku belanja internet mereka. Masalah harga, kualitas, daya tahan dan aspek terkait produk lainnya adalah yang utama pendorong keputusan pembelian di negara maju tetapi pertimbangannya bisa berbeda dari negara berkembang (Ahmed, 2012). Studi sebelumnya di Malaysia menemukan bahwa manfaat yang dirasakan dari sistem tertentu akan dampak signifikan secara langsung pada penggunaan sistem informasinya (Ndubisi & Jantan, 2003; Lim et al., 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam pengumpulan data, dengan menggunakan kuesioner. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang sudah menggunakan aplikasi berbasis android pada smartphone-nya. Penelitian ini menggunakan skala Likert lima poin yang berkisar dari 1. Sangat Setuju 2. Setuju 3. Tidak Diputuskan 4. Tidak Setuju 5. Sangat Tidak Setuju. Prosedur pengambilan sampel secara probabilitas ini digunakan karena masing-masing responden memiliki kesempatan yang sama untuk mengekspresikan pendapat dan perasaan mereka tentang penggunaan aplikasi android dan data dianalisis menggunakan SPSS.

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Responden

Hasil penelitian ini dapat mengumpulkan 100 responden dengan berbagai karakteristik yang didasarkan pada jenis kelamin, usia, pendidikan, dan tujuan menggunakan aplikasi berbasis Android. Hasil tabulasi data deskripsi responden dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik responden

Karakteristik responden	Jumlah	Karakteristik responden	Jumlah
Jenis kelamin		Tujuan menggunakan aplikasi android:	
Laki-laki	55%	Pembelian online	47%
Perempuan	45%	Aplikasi perjalanan (Gojek, Grab)	33%
Usia		Game	20%
≤ 20 tahun	60%		
21 - 40 tahun	22%		
≥ 40 tahun	18%		
Pendidikan		Penghasilan	
SMA	48%	≤ Rp. 1.000.000	60%
S1	47%	Rp. 1000.000 – Rp. 2.500.000	23%
S2	3%	≥ Rp. 2.500.000	27%
S3	2%		

Hasil analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan adopsi inovasi aplikasi berbasis Android.

Keunggulan Relatif

Gambaran umum responden tentang persepsi keunggulan relatif aplikasi berbasis Android dibanding dengan aplikasi lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.
Keunggulan Relatif

Indikator keunggulan relatif	Rerata	Kategori
Aplikasi android memberi saya kontrol lebih besar atas tugas saya untuk mendapatkan barang.	4,56	Lebih memiliki keunggulan
Aplikasi Android memungkinkan saya melakukan pembayaran dengan cara yang lebih nyaman.	4,66	Lebih memiliki keunggulan
Aplikasi Android membuat lebih mudah untuk mengakses transportasi	4,32	Lebih memiliki keunggulan
Aplikasi Android menyediakan berbagai game secara gratis	4,44	Lebih memiliki keunggulan
Aplikasi Android meningkatkan pengalaman berbelanja saya secara keseluruhan	4,54	Lebih memiliki keunggulan
Rata-rata jawaban responden	4,504	Lebih memiliki keunggulan

Kemudahan Menggunakan

Gambaran umum responden tentang persepsi kemudahan menggunakan aplikasi berbasis Android dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.
Kemudahan Menggunakan

Indikator Kemudahan Menggunakan	Rerata	Kategori
Menggunakan Aplikasi berbasis Android tidak membutuhkan keterampilan teknis.	4,46	Sangat Mudah digunakan
Menggunakan Aplikasi berbasis Android tidak membutuhkan banyak upaya	4,76	Sangat Mudah digunakan
Menggunakan Aplikasi berbasis Android bisa membuat frustrasi	2,22	Mudah digunakan
Rata-rata jawaban responden	4,610	Lebih memiliki keunggulan

Observability (Keterlihatan).

Gambaran umum responden tentang persepsi keterlihatan manfaat dalam menggunakan aplikasi berbasis Android dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.
Keterlihatan

Indikator Keterlihatan	Rerata	Kategori
Bisa melihat manfaat menggunakan aplikasi berbasis Android dengan segera	4,66	Sangat Mudah dilihat
Bisa melihat orang lain menggunakan aplikasi berbasis Android	4,53	Sangat Mudah dilihat
Bisa mempelajari penggunaan aplikasi berbasis Android dengan cepat	4,52	Sangat Mudah dilihat
Rata-rata jawaban responden	4,57	Sangat Mudah dilihat

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang mengukur anteseden adopsi inovasi aplikasi berbasis Android memiliki jawaban yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dari berbagai indikator yang membentuk Keunggulan Relatif, Kemudahan menggunakan dan Keterlihatan dalam menggunakan aplikasi berbasis Android yang semuanya menunjukkan jawaban relatif bagus. Konsumen menyatakan bahwa Aplikasi berbasis Android memiliki keunggulan dibandingkan aplikasi yang pernah ada sebelumnya. Aplikasi berbasis Android mampu menjawab kebutuhan konsumen akan berbagai transaksi yang dibutuhkan secara online. Aplikasi berbasis Android menurut sebagian besar konsumen memiliki kemudahan dalam menggunakan. Konsumen tidak membutuhkan usaha yang berlebihan dalam

menggunakan aplikasi berbasis Android. Konsumen juga tidak merasakan frustrasi menggunakan aplikasi berbasis Android ini. Di samping itu aplikasi berbasis Android juga menawarkan kemudahan dalam menggunakan tanpa ada keterampilan khusus. Terkait dengan persepsi keterlihatan yang diberikan oleh aplikasi berbasis Android ini, konsumen merasakan bahwa manfaat menggunakan aplikasi berbasis Android ini dapat dengan mudah dilihat. Aplikasi berbasis android terlihat mudah untuk dipelajari hanya dengan melihat orang lain yang sudah menggunakannya.

KESIMPULAN

Penelitian ini bisa menyimpulkan bahwa persepsi keunggulan relatif, persepsi kemudahan dan persepsi keterlihatan yang dimiliki oleh konsumen pengguna aplikasi berbasis Android baik. Hal ini ditunjukkan dengan jawaban responden yang rata-rata menjawab setiap pertanyaan dengan pilihan baik dan sangat baik. Responden menyatakan bahwa aplikasi berbasis Android memiliki keunggulan relatif dibandingkan aplikasi sebelumnya maupun aplikasi yang ada dalam smartphone i-phone. Responden juga menyatakan bahwa aplikasi berbasis Android mudah untuk digunakan, dan manfaat menggunakan aplikasi berbasis Android dapat dipahami dengan segera.

REKOMENDASI UNTUK PENELITIAN SELANJUTNYA

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan 100 responden yang sudah menggunakan aplikasi berbasis Android. Pilihan satu obyek menyebabkan hasil penelitian ini kurang bisa digeneralisasikan pada obyek aplikasi lainnya misalnya aplikasi IOS ataupun aplikasi yang terdapat pada smartphone i-phone. Penelitian ini belum menunjukkan hubungan sebab dan akibat terjadinya adopsi inovasi berbasis Android, untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa menganalisis antecedent dan konsekuensi dalam adopsi aplikasi berbasis Android.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang telah mendanai riset ini melalui Hibah Penelitian Tesis Magister. Ucapan terima kasih penulis sampaikan juga kepada LPPM Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta yang telah memfasilitasi riset ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aghdaie, S. F., Piraman, A., & Fathi, S. (2011). "An analysis of factors affecting the consumer's attitude of trust and their impact on internet purchasing behaviour". *International Journal of Business and Social Science*. Pp. 147-158.
- Ahmed, E.-K. (2012). "Consumer behavior differences between developed and developing countries". Retrieved from We are development Website: <http://wearedevelopment.net/2011/11/01/10-consumer-behavior-differences-between-developed-anddeveloping-countries>
- Chong, A.Y.L., Ooi, K.B., Lin, B., & Bao., H. J. (2012). "An empirical analysis of the determinants of 3G adoption in China". *Computer and Hum. Behavior*, 28: 360-369.
- Davis, F. D., (1989). "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology". *Management Information Systems Quarterly* Vol. 13(3), pp. 319-340.

- De Silva, H., Ratnadiwakara, D., & Zainudeen, A. (2011). "Social influence in mobile phone adoption: Evidence from the bottom of the pyramid in emerging Asia". *Information Technology. Int. Dev.*, 7: 1-18. DOI: 10.1016/S2212-5671(16)00054-X
- Hana, B.-S., Mike, M., & Parvaneh, N. (2012). "E-Commerce is the next frontier in global expansion". New York: AT Kearney. Retrieved from Arkearney website.
- Hernandez, B., Jimenez, J., & Martin, M. J. (2011). "Age, gender and income: do they really moderate online shopping behaviour?" *Online Information Review*, 36(1), 113-133.
- Kim, H., & Song, J. (2010). "The quality of word-of mouth in the online shopping mall". *Journal of Research in Interactive Marketing*. Vol. 4(4), pp. 376-390.
- Kim, J., Ma, Y.J., & Park, J. (2009). "Are US consumers ready to adopt mobile technology for fashion goods?: An integrated theoretical approach". *Journal of Fashion Marketing Management*, 13: 215-230.
- Kim, K.K., Shin, H.K., & Kim, B. (2011). "The role of psychological traits and social factors in using new mobile communication services". *Electronic Commerce Res. Appl*, 10: 408-417.
- Kit Yeng Sina, Abdullah Osmanb, Shahrul Nizam Salahuddinc, Safizal Abdullaha, Yi Jin Limd, Choon Ling Sima. "Relative Advantage and Competitive Pressure towards Implementation of Ecommerce: Overview of Small and Medium Enterprises (SMEs)". Article in *Procedia Economics and Finance* · December 2016
- Ko, E., Kim, E.Y., & Lee, E.K. (2009). "Modeling consumer adoption of mobile shopping for fashion products in Korea". *Psychology Marketing*, 26: 669-687.
- Lai, E., & Wang, Z., (2012). "An empirical research on factors affecting customer purchasing behavior tendency during online shopping". *Institute of Electrical and Electronics Engineers*. pp. 583-586.
- Lertwongsatien, C., & Wongpinunwatana, N. (2003). "E-commerce adoption in Thailand: An empirical study of small and medium enterprises (SMEs)". *Journal of Global Information Technology Management*, 6(3), 67-83
- Liao, C., To, P.-L., & Liu, C.-C., (2013). "A motivational model of blog usage". *Online Information Review*. Vol. 37(4), pp. 620-637.
- Liao, C.H., C.W. Tsou., & M.F. Huang. (2007). "Factors influencing the usage of 3G mobile services in Taiwan". *Online Inform Review*, 31: 759-774.
- Lim, Y. J., Osman, A., Salahuddin, S. N., Romle, A. R., & Abdullah, S. (2016). "Factors influencing online shopping behavior: the mediating role of purchase intention". 7th International Economics & Business Management Conference, 5th & 6th October 2015. *Procedia Economics and Finance*. Vol. 35, pp. 401–410. www.sciencedirect.com. doi: 10.1016/S2212-5671(16)00050-2.
- Liu, S. Q., & Mattila, A. S. (2017). "Airbnb: Online targeted advertising, sense of power, and consumer decisions". *International Journal of Hospitality Management*, 60, 33–41.
- Mardikyan, S., Besiroglu, B., & Uzmaya, G. (2012). "Behavioral intention towards the use of 3G technology". *Commun. IBIMA*, Vol. 2012. 10.5171/2012.622123
- Min, S., So, K. K. F., & Jeong, M. (2018). "Consumer Adoption of the Uber Mobile Application: Insights from Diffusion of Innovation Theory and Technology Acceptance Model". *Journal of Travel & Tourism Marketing*. DOI: 10.1080/10548408.2018.1507866.
- Nassuora, A.B. (2013). "Understanding factors affecting the adoption of M-commerce by consumers". *Journal of Applied Science*, 13: 913-918.
- Ndubisi, N. O., & Jantan, M. (2003). "Evaluating IS usage in Malaysian small and medium-sized firms using the Technology Acceptance Model". *Logistic Information Management*,

- 16(6), 440-450.
- Nysveen, H., Pedersen, P.E., & Thorbjørnsen, H. (2005). "Explaining intention to use mobile chat services: moderating effects of gender". *Journal of Consumer Marketing*, Vol. 22, No. 5, pp.247–256.
- Pandit, R., & Upadhyay, D. (2012). "Consumer perception towards 3G mobile technologies". *Management*, 1: 43-44.
- Premkumar, G., & Ramamurthy, K. (1995). "The role of organizational and inter-organizational factors on decision mode for adoption of interorganizational systems". *Decision Sciences*, 26(3), 303-336.
- Rauniar, R., Rawski, G., Yang, J., & Johnson, B. (2014). "Technology acceptance model (TAM) and social media usage: An empirical study on Facebook". *Journal of Enterprise Information Management*, Vol. 27, pp.6–30.
- [Raza](#), S. A., [Umer](#), A., & [Shah](#), N. (2017). "New determinants of ease of use and perceived usefulness for mobile banking adoption". *International Journal of Electronic Customer Relationship Management*. Volume 11(1), pp: 44-57. DOI:10.1504/IJECRM.2017.086751
- Rogers, E. M. (2010). *Diffusion of Innovations*. New York: Free Press
- Schierz, P.G., Schilke, O., & Wirtz, B.W. (2010). "Understanding consumer acceptance of mobile payment services: An empirical analysis. *Electron". Commerce Res. Applic*, 9: 209-216.
- Seyal, A. H., & Rahman, M. N. A. (2003). "A preliminary investigation of e-commerce adoption in small & medium enterprises in Brunei". *Journal of Global Information Technology Management*, 6(2), 6-26.
- Sin, K. Y., Osman, A., Salahuddin, S. N., Abdullah, S., Lim, Y. J., & Sim, C. L. (2016). "Relative Advantage and Competitive Pressure towards Implementation of E-commerce: Overview of Small and Medium Enterprises (SMEs)". *Procedia Economics and Finance*. 35, pp. 434 – 443. www.sciencedirect.com
- So, K. K. F., Oh, H., & Min, S. (2018). "Motivations and constraints of Airbnb consumers: Findings from a mixed-methods approach". *Tourism Management*, 67, 224–236.
- Soh, C., Mah, Q. Y., Gan, F. J., Chew, D., & Reid, E. (1997). "The use of the Internet for business: The experience of early adopters in Singapore". *Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy*, 7(3), 217-228.
- Suki, N.M. (2012). "Third generation (3G) mobile service acceptance: Evidence from Malaysia". *Africa Journal of Bussines Management*, 6: 5165-5171.
- Tan, M., & Teo, T. S. (2000). "Factors influencing the adoption of Internet banking". *Journal of the Association for Information Systems*, 1 (5), pp. 1–42.
- Tornatzky, L. G., & Klein, K. J. (1982). "Innovation characteristics and innovation adoption implementation: A meta-analysis of findings". *IEEE Transactions on Engineering Management*, 29(1), 28-45.
- Vatanparast, R. (2010). "Mobile service adoption optimization: A case study". *International Journal of Mobile Marketing*, 5: 57-74.
- Venkatesh, V., & Davis, F.D. (2000). "A theoretical extension of the technology acceptance model: four longitudinal field studies". *Management Science*, Vol. 46, No. 2, pp.186–204.
- Viehland, D., & Leong, R.S.Y. (2010). "Consumer willingness to use and pay for mobile payment services". *International Journal of Principles Application Information Science Technology*, 3: 35-46.
- Yan, A., Nor, K. M.D-E., Abu-Shanab., & Sutanonpaiboon, J. (2009). "Factors that affect mobile

- telephone users to use mobile payment solution”. *Journal of Economy Management*, 3: 37-49.
- Zhu, G., So, K. K. F., & Hudson, S. (2017). “Inside the sharing economy: Understanding consumer motivations behind the adoption of mobile applications”. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 29(9), 2218–2239.

LOYALITAS PADA WISATA HERITAGE: STUDI KASUS PADA WISATAWAN CANDI PRAMBANAN

Esti Dwi Rahmawati

Magister Manajemen, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Yulia Aji Puspitasari

Magister Manajemen, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Yuni Istanto

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Dyah Sugandini (penulis korespondensi)

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

dini@upnyk.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui loyalitas wisatawan di Candi Prambanan Yogyakarta sebagai salah satu wisata Heritage, dengan menggunakan responden wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa loyalitas wisatawan yang ditunjukkan dengan e_WOM, kemauan merekomendasi dan niat untuk berkunjung kembali menunjukkan rata-rata jawaban yang tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wisatawan yang berkunjung ke Candi Prambanan memiliki loyalitas yang tinggi pada destinasi wisata ini.

Kata kunci: Heritage, e-WOM, rekomendasi dan niat mengunjungi kembali

PENDAHULUAN

Penelitian ini berfokus pada penilaian loyalitas wisata dengan tujuan wisata Heritage di Candi Prambanan Yogyakarta. Loyalitas wisatawan diukur dengan tiga indikator, yaitu electronic word of mouth, kemauan untuk merekomendasi destinasi wisata Candi Prambanan kepada orang lain dan niat untuk mengunjungi kembali. Penelitian tentang loyalitas wisatawan pada wisata Heritage masih sangat diperlukan, karena banyak studi yang menganalisis tentang wisata Heritage biasanya memusatkan pada penelitian arkeologi, konservasi situs budaya, namun tidak pada kesetiaan wisatawan dengan situs warisan budaya (Chami 2018). Sebagai salah satu tujuan wisata warisan budaya terfavorit di Indonesia, Yogyakarta memiliki Candi Prambanan yang sangat terkenal di seluruh dunia. Candi Prambanan ini merupakan situs Hindu tertua di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi.

TINJAUAN LITERATUR

Studi Sebelumnya tentang Loyalitas Pariwisata

Sugandini (2003), menganalisis loyalitas konsumen pada industri perhotelan, hasilnya

menunjukkan bahwa loyalitas dipengaruhi oleh citra, kualitas persepsian, citra dan harga. Radder & han (2013), menganalisis tentang pengaruh persepsi kualitas destinasi dan kepuasan wisatawan pada conative loyalty di South African heritage museum. Hasilnya menunjukkan bahwa kepuasan dan kualitas mempengaruhi loyalitas konatif pada wisata Heritage Museum di Afrika Selatan. Remoaldo, Ribeiro, Vareiro & Santos (2014), menganalisis tentang persepsi wisatawan pada world Heritage destinations. Hasilnya menunjukkan bahwa loyalitas wisatawan dipengaruhi oleh citra dan motivasi. Susilowati dan Sugandini (2018), menganalisis pengaruh WOM pada keputusan mengunjungi destinasi wisata. Sugandini, Effendi, Sasmita dan Utami (2018), menganalisis tentang strategi pariwisata di DIY. Rajesh (2013) mengembangkan model teoritis loyalitas destinasi dengan menggunakan persepsi wisatawan dan citra destinasi di India. Peneliti berpendapat bahwa konstruk loyalitas destinasi dipengaruhi oleh niat untuk mengunjungi kembali, promosi dari mulut ke mulut dan rekomendasi seseorang kepada orang lain. Lee (2009) untuk menguji dan mengevaluasi bagaimana para pengunjung destinasi wisata festival mengembangkan kesetiaan di Texas, AS. Lee (2009) menemukan bahwa atmosfer festival memiliki efek tidak langsung positif pada kesetiaan festival melalui emosi positif; komitmen festival dan kepuasan festival, yang kemudian secara positif memengaruhi loyalitas destinasi. Arvin dan Andisheh, (2013) meneliti bagaimana dampak kualitas layanan mempengaruhi loyalitas wisatawan di Industri Pariwisata Malaysia. Mereka menemukan bahwa tidak ada hubungan antara loyalitas wisatawan dan jenis kelamin. Valle et al., (2006) melakukan penelitian tentang loyalitas destinasi di Algarve, Portugal dan berpendapat bahwa kepuasan wisatawan mempengaruhi loyalitas wisatawan di daerah tersebut. Ada kontradiksi temuan Valle et al., (2006) dan Hu et al., (2011) yang berpendapat bahwa kesetiaan wisatawan dapat dipengaruhi oleh kepuasan wisatawan, sementara Hu et al. (2011) berpendapat bahwa loyalitas wisatawan tidak tergantung pada kepuasan wisatawan. Haque dan Khan (2013) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas wisatawan di destinasi di Malaysia dan menyarankan bahwa citra destinasi, nilai yang dirasakan, dan kualitas layanan memiliki hubungan positif dengan loyalitas wisatawan di destinasi wisata di Malaysia. Vinh dan Long (2013) melakukan penelitian tentang hubungan harapan, kepuasan dan loyalitas pengunjung internasional di Hanoi, Vietnam. Mereka menyarankan bahwa loyalitas destinasi dipengaruhi oleh hubungan positif antara harapan wisatawan dan kepuasan wisatawan. Argumen ini juga telah didukung oleh Vinh dan Long (2013); Hu et al., (2011); Haque dan Khan (2013) yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan loyalitas destinasi, pengelola wisata harus memperhatikan kepuasan dan harapan pelanggan.

Loyalitas wisatawan

Loyalitas konsumen dapat ditinjau dari dua pendekatan, yaitu loyalitas kesikap dan loyalitas berperilaku (Andreassen dan Lindestad, 1998). Loyalitas kesikap mempunyai dimensi subyektif yaitu aspek kognitif, afektif dan konatif. Ketiga aspek inilah yang membentuk sikap. Loyalitas berperilaku bisa dipahami sebagai perilaku konkret, seperti pembelian berulang atas produk atau merek yang sama atau dari penyedia yang sama, terlepas dari apakah konsumen telah menyatakan niat untuk membeli (Sugandini, 2003). Oleh karena itu dua pendekatan ini menganggap bahwa loyalitas mengandung dua aspek, yaitu komitmen konsumen terhadap merek dan perilaku pembelian berulang. Dick dan Basu (1994) menunjukkan pendekatan yang berbeda, mereka menyatakan bahwa loyalitas tidak hanya terbentuk dari perilaku atau komitmen pembelian berulang, tetapi bisa keduanya, mengingat bahwa kesetiaan berubah menjadi komitmen psikologis yang ditunjukkan oleh sikap positif dan niat tulus untuk membeli lagi. Menurut Oliver (1999) loyalitas berkembang melalui tahapan yang berbeda. Tahapan-tahapan ini adalah (1) preferensi (keyakinan) atas satu

merek di atas yang lain, (2) preferensi yang efektif (sikap) terhadap produk, dan (3) peningkatan niat untuk membeli (konatif) produk kita dibanding produk pesaing. Dengan kata lain, konsumen pertama kali menjadi loyal ada dalam koridor perilaku kognitif, kemudian efek suka dan tidak suka sebelum konsumen tersebut mencapai tahap konatif akhir (Back, 2005; Oliver, 2014).

Prados-Peña et al., (2019) menyatakan bahwa dalam konteks destinasi wisata, loyalitas wisatawan dianggap sebagai faktor penting dalam keberhasilan pengembangan destinasi wisata. Sejumlah penelitian dilakukan dalam di berbagai negara, menyatakan bahwa anteseden loyalitas wisatawan meliputi motivasi, citra destinasi, kualitas perjalanan, nilai yang dirasakan, dan kepuasan (Bigné, Sanchez dan Sanchez, 2001; Huang dan Hsu, 2009). Kemenarikan destinasi dan keterlibatan wisatawan juga telah dianggap sebagai prediktor loyalitas destinasi (Yuksel, Fisun dan Yasin, 2009). Anteseden Loyalitas destinasi telah banyak diteliti dalam konteks destinasi rekreasi dan situs wisata Heritage terkenal (Poria, Butler dan Airey, 2004). Menurut Carbone (2016) peninggalan bersejarah tersebut memiliki potensi sumber daya untuk menjadi daya tarik dan berkontribusi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan. Namun, hingga saat ini belum ada penelitian yang dilakukan yang meneliti anteseden loyalitas ke situs warisan budaya (Heritage) yang belum menjadi tujuan destinasi yang ditetapkan Prados-Peña, Gutiérrez-Carrillo dan Barrio-García (2019).

Oppermann, (2000) berpendapat bahwa dalam konteks pariwisata, studi tentang loyalitas harus dilakukan penekanan yang lebih kuat pada perilaku. Zhang, Fu, Cai & Lu (2014) juga telah memperdebatkan bahwa para peneliti di bidang ini sebenarnya sebagian besar menggunakan pendekatan perilaku. Namun, pada akhirnya, bentuk loyalitas yang dibawa oleh wisatawan ke destinasi wisatawan hanya dikaitkan dengan perilaku kunjungan kembali mereka. Loyalitas mereka terhadap tujuan ditunjukkan sebagai niat mereka untuk mengunjungi dan seberapa besar kemungkinan mereka akan merekomendasikannya Almeida- (Santana dan Moreno, 2018).

Electronic Word of Mouth (e-WOM)

WOM didefinisikan sebagai komunikasi tentang produk atau perusahaan antara orang-orang yang tidak terdapat dalam entitas komersial (Litvin, Goldsmith & Pan, 2008). Westbrook (1987) menggambarkan WOM secara lebih luas lagi, dengan memasukkan semua komunikasi informal yang diarahkan pada konsumen lain tentang kepemilikan, penggunaan, atau karakteristik barang dan jasa tertentu atau penjualannya. Sementara Westbrook (1987) tidak secara spesifik mendefinisikan apa yang dimaksud dengan komunikasi informal. Buttle (1998) berpendapat bahwa dapat dimediasi dengan cara elektronik dalam praktik pemasaran viral yang mengaburkan WOM batas antara pesan komersial dan WOM (Lindgreen dan Vanhamme 2005). Karakteristik utama WOM adalah persepsi kemandirian sumber pesan. WOM adalah komunikasi antara konsumen tentang produk, layanan, atau perusahaan di mana sumbernya dianggap independen pengaruh komersial. Penelitian terbaru di bidang pariwisata dalam studi di berbagai negara telah menunjukkan bahwa WOM memiliki pengaruh positif dan negatif pada produk pariwisata. Evolusi definisi ini menunjukkan bahwa dengan teknologi informasi saat ini WOM telah menjadi lebih menyebar dan tidak berbentuk. Morgan, Pritchard, dan Piggott, (2003) mencatat bahwa WOM memiliki dampak negatif yang luar biasa pada citra destinasi, karena wisatawan yang tidak puas bisa menyebarkan komentar yang tidak menyenangkan terkait dengan pengalaman mereka. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Crick's (2003) memperingatkan bahwa ketika penduduk setempat menunjukkan perasaan bermusuhan terhadap wisatawan, hasilnya adalah meningkatnya WOM negatif dan

kemungkinan penurunan di destinasi tersebut. O'Neill, Palmer and Charters (2002) menemukan bahwa rekomendasi melalui WOM wisatawan meningkatkan penjualan ketika pemimpin opini yang berlibur kembali ke rumah dan menceritakan pengalaman mereka kepada orang lain. Studi Shanka, Ali-Knight dan Pope (2002) tentang metode pemilihan destinasi wisata menemukan bahwa sebagian besar keputusan perjalanan di Australia Barat didasarkan pada komunikasi WOM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam pengumpulan data, dengan menggunakan kuesioner tertutup yang dirancang dan didistribusikan kepada 100 responden (wisatawan) yang berkunjung di wisata Heritage Candi Prambanan Yogyakarta. Kuesioner disusun menjadi dua bagian, untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Bagian pertama memuat data deskripsi responden, bagian kedua memuat tentang pertanyaan terkait loyalitas wisatawan. Responden diminta untuk memberikan skor untuk setiap pertanyaan dari bagian kuesioner tentang loyalitas dengan menggunakan skala Likert lima poin yang berkisar dari 1. Sangat Setuju 2. Setuju 3. Tidak Diputuskan 4. Tidak Setuju 5. Sangat Tidak Setuju. Selain itu, wisatawan yang berkunjung di Candi Prambanan dipilih secara acak di dalam lokasi tanpa mempertimbangkan usia, jenis kelamin, asal kebangsaan mereka. Prosedur pengambilan sampel secara probabilitas ini digunakan karena masing-masing responden memiliki kesempatan yang sama untuk mengekspresikan pendapat dan perasaan mereka tentang masalah loyalitas dengan tempat tersebut. Akhirnya, data dianalisis menggunakan SPSS.

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Responden

Hasil penelitian ini dapat mengumpulkan 100 responden dengan berbagai karakteristik yang didasarkan pada jenis kelamin, usia, pendidikan, tujuan berkunjung dan asal negara. Hasil tabulasi data deskripsi responden dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik responden

Karakteristik responden	Jumlah	Karakteristik responden	Jumlah
Jenis kelamin		Asal negara	
Laki-laki	60%	Indonesia	75%
perempuan	40%	Asing	25%
Usia		Tujuan berkunjung	
≤ 20 tahun	30%	Berwisata keluarga	20%
21 - 40 tahun	32%	Melakukan studi tour	45%
≥ 40 tahun	38%	Mempelajari situs sejarah	35%
Pendidikan		Penghasilan	
SMA	48%	≤ Rp. 1.000.000	20%
S1	37%	Rp. 1000.000 – Rp. 2.500.000	40%
S2	13%	≥ Rp. 2.500.000	40%
S3	2%		

Hasil analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan loyalitas wisatawan di obyek wisata Prambanan Yogyakarta.

E-WOM

Gambaran umum responden tentang kesediaan untuk melakukan komunikasi dari mulut ke mulut melalui media elektronik atau media sosial dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. e-WOM wisatawan di Candi Prambanan Yogyakarta

Indikator e-WOM wisatawan	Rerata	Kategori
Selalu menceritakan pengalaman berkunjung ke Candi Prambanan melalui sosial media	4.05	Baik
Selalu meng-update status terkait dengan Candi Prambanan Candi Prambanan pada saat berkunjung	4.50	Baik
Menceritakan hal-hal positif tentang Candi Prambanan melalui media sosial	4,23	Baik
Mengupload foto-foto tentang kunjungan ke Candi Prambanan dengan berbagai komentar dan informasi	4.80	Baik
Rata-rata jawaban responden	4,395	Baik

Rekomendasi kepada calon wisatawan lainnya

Gambaran umum responden tentang kesediaan untuk merekomendasikan wisata Candi Prambanan kepada calon wisatawan lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. Kemauan untuk merekomendasikan candi Prambanan

Indikator tentang Kemauan merekomendasikan Candi Prambanan	Rerata	Kategori
Bersedia untuk mengajak teman untuk mengunjungi candi Prambanan	4.40	Sangat Bersedia merekomendasi
Memberikan saran pada calon wisatawan yang akan mengunjungi Yogyakarta untuk berkunjung ke Candi Prambanan	4.25	Sangat Bersedia merekomendasi
Mendorong keluarga dan kerabatnya untuk mengunjungi candi Prambanan	4.87	Sangat Bersedia merekomendasi
Merekomendasikan kepada calon wisatawan yang ingin mempelajari situs budaya untuk mengunjungi candi prambanan	4.90	Sangat Bersedia merekomendasi
Rata-rata jawaban responden	4,605	Sangat Bersedia merekomendasi

Niat mengunjungi kembali

Gambaran umum responden tentang niat untuk mengunjungi kembali Candi Prambanan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4. Niat Berkunjung Kembali

Indikator tentang Niat berkunjung kembali	Rerata	Kategori
Kenyamanan dan bukti-bukti sejarah yang terdapat di Candi Prambanan memberikan keinginan wisatawan untuk mengunjungi kembali Candi Prambanan	4.60	Sangat berniat untuk berkunjung kembali
Berkeinginan untuk mengunjungi Candi Prambanan pada waktu yang akan datang	4.45	Sangat berniat untuk berkunjung kembali
Berkeinginan untuk mengunjungi Candi Prambanan kembali pada saat melakukan wisata dengan teman maupun saudara	4.75	Sangat berniat untuk berkunjung kembali
Rata-rata jawaban responden	4,600	Sangat berniat untuk berkunjung kembali

PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel 2,3, dan 4 di atas menunjukkan bahwa dari 100 responden yang mengunjungi Candi Prambanan semuanya memiliki loyalitas yang tinggi pada candi Prambanan. Hal ini ditunjukkan dari berbagai dimensi loyalitas yang semuanya menunjukkan angka yang tinggi. Jawaban respponden tentang e-WOM menunjukkan bahwa wisatawan yang berkunjung ke Candi Prambanan memiliki kemauan untuk menceritakan hal-hal terbaik tentang Candi Prambanan melalui media sosialnya. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata jawaban responden sebesar 4,395 (Baik). Wisatawan ini dengan bangganya mengupload foto-foto dirinya dengan background Candi Prambanan disertai dengan komentar dan berbagai informasi.

Terkait dengan kemauan untuk merekomendasi Candi Prambanan kepada orang lain atau wisatawan lain menunjukkan bahwa jawaban responden sangat sangat baik, yaitu sebesar 4,605. Hal ini menunjukkan bahwa wisatawan yang sudah mengunjungi Candi Prambanan selalu bersedia untuk merekomendasikan Candi Prambanan kepada orang lain. Rekomendasi yang dilakukan wisatawan ini bisa secara langsung bertemu dengan caon wisatawan maupun melalui sosial media.

Keinginan untuk berkunjung kembali ke Candi Prambanan juga ditunjukkan dengan nilai rata-rata jawaban repoden yang sangat tinggi, yaitu sebesar 4,600. Hal ini menunjukkan bahwa wisatawan yang telah berkunjung ke Candi Prambanan berkeinginan kembali berkunjung karena merasa bahwa kunjungannya di Candi Prambanan nyaman, dan mereka mendapatkan banyak informasi bersejarah melalui situs-situs yang digambarkan pada candi Prambanan. Sebagian besar wistawan yang berkunjung ke Candi Prambanan memang bertujuan untuk mempelajari situs budaya, sehingga banyak yang merasa belum tuntas dalam mempelajarinya. Sehingga wisatawan ini mengagendakan untuk mengunjungi kembali Candi Prambanan untuk kunjungan wisata berikutnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini bisa menyimpulkan bahwa pengunjung di destinasi wisata Heritage Candi Prambanan memiliki loyalitas yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan kemauan menceritakan Candi Prambanan secara elektronik melalui media sosial. Wisatawan dengan senang hati menceritakan pengalamannya berkunjung di candi Prmbanan dengan mengupload foto maupun video melalui media sosia yang emreka miliki. Wisatawan ini juga secara sengaja

merekomendasikan Candi Prambanan sebagai destinasi wisata Heritage yang layak dikunjungi jika ke Yogyakarta melalui media sosial yang dimilikinya. Disamping itu, naita berkunjung kembali ke Candi Prambanan juga sangat tinggi, karena Candi Prambanan memang menyimpan informasi bersejarah yang tidak dijumpai pada situs lainnya.

REKOMENDASI UNTUK PENELITIAN SELANJUTNYA

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan 100 responden yang mengunjungi wisata Heritage. Pilihan satu obyek wisata Heritage menyebabkan hasil penelitian ini kurang bisa digeneralisasikan pada obyek wisata yang lainnya, sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat mengakomodasi beberapa situs Heritage yang ada di Yogyakarta sebagai obyek penelitian.

Penelitian ini belum menunjukkan hubungan sebab dan akibat terjadinya loyalitas wisata Heritage, untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa menganalisis anteseden dan konsekuensi loyalita wisatawan pada wisata Heritage.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang telah mendanai riset ini melalui Hibah Penelitian Tesis Magister. Ucapan terima kasih penulis sampaikan juga kepada LPPM Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta yang telah memfasilitasi riset ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Almeida-Santana, A., Moreno-Gil, S. (2018). "Understanding tourism loyalty: Horizontal vs. destination loyalty". *Tourism Management*. Vol. 65, pp. 245–255.
- Andreassen, T., Lindestad, B. (1998). "Customer loyalty and complex services: The impact of corporate image on quality, customer satisfaction and loyalty for customers with varying degrees of service expertise". *Int. J. Serv. Ind. Manag.* Vol 9, pp. 7–23.
- Arvin, M., & Andisheh, M. (2013). "The impact of services quality on tourist loyalty in Malaysia tourism industry". *International Journal of Innovative Ideas*. Vol. 13, p. 1-19.
- Back, K.-J. (2005). "The effects of image congruence on customers' brand loyalty in the upper middle-class hotel industry". *J. Hosp. Tour. Res.* Vol. 29, pp. 448–467.
- Bigné, J.E., Sanchez, M.I., & Sanchez, J. (2001). "Tourism image, evaluation variables and after purchase behaviour: Inter-relationship". *Tourism Management*. Vol. 22, pp. 607–616.
- Buttle, F. A. (1998). "Word of mouth: understanding and managing referral marketing". *Journal of Strategic Marketing*. Vol. 6(3), pp. 241 - 254.
- Carbone, F. (2016). "An insight into cultural heritage management of tourism destinations". *Eur. J. Tour. Res.* Vol. 14, pp. 75–91.
- Chami, M. F. (2018). "Tourist Touching Loyalty in Cultural Heritage Sites in Tanzania: A Case Of Zanzibar Stone Town, Zanzibar Island". *International Journal of Economics, Business and Management Research*. Vol. 2, No. 04, Page 306. ISSN: 2456-7760. www.ijebmr.com.
- Crick, A.P. (2003). "Internal marketing of attitudes in Caribbean tourism". *International Journal of Contemporary Hospitality Management*. Vol. 15(3), pp. 161-166.
- Dick, A.S., & Basu, K. (1994). "Customer loyalty: Toward an integrated conceptual framework". *J. Acad. Mark. Sci.* Vol. 22, pp. 99–113.

- Haque, A., & Khan, A. H. (2013). "Factors influencing of tourist loyalty: a study on tourist destinations in Malaysia". Proceedings of 3rd Asia-Pacific Business Research Conference. Kuala Lumpur, Malaysia, ISBN: 978-1-922069-19-1
- Hu, Y. H., Cheng, C., Chiu, S. I., & Hong, F. Y. (2011). "A study of customer satisfaction, customer loyalty and quality attributes in Taiwan's Medical Service Industry". African Journal of Business Management. 5 (1): 187-195.
- Huang, S., & Hsu, C.H. (2009). "Effects of travel motivation, past experience, perceived constraint, and attitude on revisit intention". J. Travel Res. Vol. 48, pp. 29–44.
- Lee, T. H. (2009). "A structural model to examine how destination image, attitude, and motivation affect the future behavior of tourists". Leisure Sciences, 31: 215–236.
- Lindgreen, A., & Vanhamme, J. (2005). "Viral marketing: the use of surprise". In Advances in Electronic Marketing, Clarke, I. and Flaherty, T.B. (Eds.) Hershey, PA: Idea Group Publishing, 122-138.
- Litvin, S. W., Goldsmith, R. E., & Pan, B (2008). "Electronic Word-of-Mouth in Hospitality and Tourism Management". Tourism Management. Vol. 29(3), pp. 458-468. DOI: 10.1016/j.tourman.2007.05.011
- Morgan, N., Pritchard, A. & Piggott, R. (2003). "Destination branding and the role of the stakeholders: the case of New Zealand". Journal of Vacation Marketing. Vol. 9, pp. 285–299.
- Oliver, R. L. (2014). "Satisfaction: A behavioral perspective on the consumer". Routledge: London, UK, 2014.
- Oliver, R.L. (1999). "Whence consumer loyalty?" J. Mark. Vol. 3, pp. 33–44.
- O'Neill, M., Palmer, A., & Charters, S. (2002). "Wine production as a service experience –The effects of service quality on wine sales". Journal of Services Marketing. Vol. 16 (4), pp. 342–62.
- Oppermann, . (2000). " Management. Tourism destination loyalty". [Journal of Travel Research](https://doi.org/10.1177/004728750003900110). Vol. 39, pp. 78–84. <https://doi.org/10.1177/004728750003900110>
- Poria, Y., Butler, R., & Airey, D. (2004). "Links between tourists, heritage, and reasons for visiting heritage sites". J. Travel Res. Vol. 43, pp. 19–28.
- [Prados](#), B., [Gutiérrez-Castillo](#), M. L., & [Barrio-García](#), S.D. (2019). "The Development of Loyalty to Earthen Defensive Heritage as a Key Factor in Sustainable Preventive Conservation". Sustainability. Vol. 11(3516):1-19. DOI: 10.3390/su11133516.
- Radder, L., & Han, X. (2013). "Perceived quality, visitor satisfaction and conative loyalty in the South African heritage museums". International Business & Economics Research Journal. Vol. 12, Number 101261-1272 DOI: 10.19030/iber.v12i10.8135
- Rajesh, R. (2013). "Impact of tourist perceptions, destination image and tourist satisfaction on destination loyalty: A conceptual model". PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural. Vol. 11 (3), pp. 67-78.
- Remoaldo, P. C., Ribeiro, J. C., Vareiro, L., & Santos, J. F. (2014). "Tourists' perceptions of world heritage destinations: The case of Guimarães (Portugal)". Tourism & Hospitality Research, 14(4), 206-218. doi:10.1177/1467358414541457
- Shanka, T., Ali-Knight, J., & Pope, J. (2002). "Intrastate travel experiences of international students and their perceptions of Western Australia as a tourist destination". Tourism and Hospitality Research. Vol. 3 (3), 245-256.
- Litvin, S. W., Goldsmith, R. E., & Pan, B (2007). "Electronic Word-of-Mouth in Hospitality and Tourism Management". Tourism Management. DOI: 10.1016/ Tourism Management.2007.05.011

- Sugandini, D. (2003). "Anteseden loyalitas konsumen pada industry perhotelan (studi pada hotel berbintang di Daerah Istimewa Yogyakarta)". *Wahana*, Vol. 6 (2), pp. 181–200.
- Sugandini, D., Effendi, M. I., Aribowo, A. S., & Utami, Y.S. (2018). "Marketing Strategy on Community Based Tourism in Special Region of Yogyakarta". *Journal of Environmental Management and Tourism*. [S.l.], Vol. 9, no. 4, pp. 733-743, DOI: [https://doi.org/10.14505/jemt.v9.4\(28\).06](https://doi.org/10.14505/jemt.v9.4(28).06).
- Susilowati, C., Sugandini, D. (2018). "[perceived value, eword-of-mouth, traditional word-of-mouth, and perceived quality to destination image of vacation tourists](#)". *Review of Integrative Business and Economics Research*. Vol. 7(s1), pp: 312-321
- Valle, P. O., Silva, J. A., Mendes, J., & Guerreiro, M. (2006). "Tourist satisfaction and destination loyalty intention: A structural and categorical analysis". *International Journal of Business Science and Applied Management*. Vol. 1 (1), pp. 25-44
- Vinh, N. Q., & Long, N. L. (2013). "The relationship among expectation, satisfaction and loyalty of visitor to Hanoi, Vietnam". *Journal of Global of Management*. Vol. 5 (1), pp. 30-43.
- Westbrook, R. A. (1987). "Product/consumption-based affective responses and postpurchase processes". *Journal of Marketing Research*, 24 (3), 258-270.
- Yuksel, A., Fisun, Y., & Yasin, B. (2010). "Destination attachment: Effects on customer satisfaction and cognitive, afective and conative loyalty". *Tourism Management*. Vol. 31, Issue 2, April 2010, Pages 274-284. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.03.007>
- Zhang, H., Fu, X., Cai, L.A., & Lu, L. (2014). "Destination image and tourist loyalty: A meta-analysis". *Tourism Management*. Volume 40, February 2014, Pages 213-223. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2013.06.006>

KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN INDUSTRI HIJAU (GREEN INDUSTRY) MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO

Asep Saepudin, Sri Muryantini, Herra Dwi Maghfiroh

Jurusan Hubungan Internasional, FISIP-UPN “Veteran” Yogyakarta

Abstract

This article aims to describe various policies related to the development of green industry in the era of President Joko Widodo. this article is the result of basic research funded by UPN "Veteran" Yogyakarta. The research conducted is qualitative by conducting a study of various policy products produced by president Joko Widodo related to Green Industry. In this article explains that the foundation of green industry development has been carried out by president Susilo Bambang Yudhoyono with the issuance of Presidential Decree Number 28 2008 about the objective of long term national industrial development, Industrial Act number 3, 2014 about Industry and Government Regulation number 14, 2015 about the National Industrial Development Master Plan for 2015-2035. Green industry development is being continued and President Joko Widodo strengthened with the issuance of Presidential Regulation No. 2 of 2018 concerning National Industrial Policy 2015 - 2019. President Joko Widodo has Strengthened on the Standardization of Green Industries, green industry facilitation, and the use of Green Industrial Products.

Keyword: Policy, Green Industry, Joko Widodo, Standardisation, fasilitation

PENDAHULUAN

Dengan adanya permasalahan kerusakan lingkungan yang diakibatkan sector industri dan terbatasnya daya dukung sumber daya, khususnya energy, dalam menjalankan sektor industri, membuat perlunya pengembangan industri yang ramah lingkungan dengan penggunaan energy seefisien mungkin. Green Industri menjadi salah satu pilihan rasional untuk mengatasi masalah tersebut. Green Industri telah menjadi fenomena global dalam pembangunan sektor industri negara-negara di dunia, utamanya bagi negara-negara maju. Namun bagi Indonesia, konsep ‘Green’ sendiri secara umum mulai mengemuka baru beberapa tahun belakangan ini walaupun baru sebatas slogan dan alat marketing (Lestari dan Yodi, 2011). Konsep Green merupakan turunan dari prinsip Sustainability (keberlanjutan), yaitu kemampuan berbagai macam sumber daya yang ada di bumi ini berinteraksi dengan sistem budaya manusia dan ekonomi serta daya adaptasinya dalam menghadapi kondisi lingkungan yang pastinya terus berubah.

Pembangunan berkelanjutan tidak menafikan pentingnya pertumbuhan ekonomi. Namun pertumbuhan ekonomi yang harus dikembangkan adalah pertumbuhan yang dapat memastikan ketersediaan kebutuhan pokok manusia pada saat ini dan pada masa yang akan datang, yang dalam perkembangannya dikenal dengan paradigma pertumbuhan “Green Growth”. Green Growth dianggap sebagai sebuah paradigma yang revolusioner, karena kerangka berpikir ini mengkritisi kerangka berpikir lama tentang pembangunan secara menyeluruh. Perubahan cara berpikir ini harus menyentuh seluruh sisi, termasuk sisi industri dan rumah tangga (Theresia Vera Yulianti, 2014).

Paradigma green growth telah menjadi suatu tren global baru. Negara-negara Eropa dan Amerika seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Denmark telah mengumumkan keseriusannya sehubungan dengan green growth (Myung-Kyoon Lee, 2012). Di Asia Pasifik tercatat beberapa negara telah menyatakan komitmennya terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan. Australia dengan penggunaan infrastruktur yang lebih efisien, Selandia Baru dengan pembentukan high-level private sector advisory group yang bertujuan pada penggunaan energi secara lebih efisien, Jepang dengan inovasi pasar dan peluang kerja terkait lingkungan, Korea Selatan dengan komitmen 2% dari Gross Domestic Product tahunan untuk proyek green growth, dan Cina dengan komitmen bahwa pada tahun 2020 telah menggunakan sumber daya yang terbaru untuk 16% penggunaan energi utamanya. Indonesia sendiri turut serta dalam tren global ini dengan komitmennya untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak bumi sampai dengan 15% sampai tahun 2014.

Pilar penting terwujudnya Green Growth adalah pengelolaan sektor industri yang berkelanjutan, atau yang dikenal dengan green industri. Bagi pemerintah Indonesia, pembangunan industri yang berkelanjutan telah dicanangkan pada tahun 2008, ketika Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2008 tentang kebijakan industri nasional tentang tujuan pembangunan industri nasional jangka panjang. Untuk memperkuat komitmen terhadap pembangunan industri hijau ini, pemerintah Indonesia telah memasukan aspek-aspek industri hijau dalam 11 prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014. Indonesia juga telah memasukan konsep industri hijau dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. Komitmen Indonesia terhadap penerapan industri hijau juga dipengaruhi beberapa rejim internasional, diantaranya: Protokol Kyoto 1997 yang merupakan sebuah amandemen terhadap Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) tentang persetujuan internasional mengenai upaya mengatasi pemanasan global; British Standard No. 7750 yang sekarang dipakai menjadi ISO 14000; serta Environmental Management, and Auditing Scheme (EMAS) dari Jerman yang akhirnya diadopsi oleh Uni Eropa yang sekarang dipakai juga sebagai acuan untuk pelaksanaan Environmental Management System (EMS) dalam ISO 14001 (Kemenperin, 2017).

Selama periode 2010-2014, dengan merujuk 11 prioritas, kinerja atau capaian dalam pelaksanaan industri hijau menunjukkan hasil yang mengarah positif. Hal ini ditandai dengan beberapa indikator, yaitu: semakin meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan, dari 66 % pada periode 2010-2011 menjadi 69% pada periode 2011-2012. Pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menurunkan beban pencemaran dan mereduksi Gas Rumah Kaca (GRK) guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan telah mulai dijalankan. Data dari Kementerian Kehutanan juga menunjukkan turunnya laju deforestasi, yang mampu ditekan dari 830.000 ha pada tahun 2006-2009, menjadi 450.000 per tahun pada periode 2009-2011. Kegiatan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) mampu mendorong perusahaan-perusahaan untuk menurunkan beban pencemarannya. Sementara upaya pengendalian kebakaran hutan juga berhasil mengurangi jumlah hotspot (titik api) di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi (Akhmad Fauzi, dan Alex Oxtavianus, 2013)

Walaupun pemerintah Indonesia, selama periode 2009-2014, telah berkomitmen dan membuat kebijakan dalam mendorong terwujudnya industri hijau, menurut Mantan Menteri Perindustrian MS. Hidayat, terdapat 5 tantang bagi Indonesia dalam mewujudkan industri hijau, yaitu: Pertama, kebutuhan teknologi dan penelitian dan pengembangan/litbang yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan industri nasional. Kedua, masih banyaknya industri yang menggunakan teknologi obsolete sehingga dibutuhkan restrukturisasi proses dan

permesinan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Ketiga, masalah suku bunga bank komersil yang masih tinggi dalam mendukung pengembangan industri hijau dalam aspek permesinan. Keempat, masih terbatasnya SDM yang kompeten dalam penerapan industri hijau. Serta kelima, belum adanya insentif yang mendukung pengembangan industri hijau (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/756919/5-tantangan-menuju-industri-hijau>, 20 maret 2019).

Dalam sebuah paparan yang disampaikan Deputi Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup (2013) yang berjudul “Pelaksanaan RPJMN (2009-2014) Bidang Sumber daya Alam Dan Lingkungan Hidup dan Dukungan Riset” disampaikan bahwa dalam tahapan pembangunan berkelanjutan, yang meliputi 4 aspek: ekonomi, social, lingkungan dan tata kelola, masih terdapat 2 kelemahan yaitu: aspek lingkungan belum berkembang seperti aspek social dan ekonomi (dalam hal ukuran dan indikatornya), serta aspek lingkungan belum terinternalisasi dengan baik dalam aspek social dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi atau pentingnya aspek lingkungan masuk dalam aspek ekonomi masih menimbulkan permasalahan.

Di Era Pemerintah Joko Widodo atau periode 2015-2019, komitmen terhadap pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tetap menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Hal ini ditandai dengan masukan konsep pembangunan berkelanjutan dalam RPJMN 2015-2019. Seperti disebutkan dalam arah kebijakan umum pembangunan nasional tahun 2015-2019, dari 7 arah kebijakan umum, 2 diantaranya menyinggung tentang pembangunan berkelanjutan, yaitu: pertama, arah kebijakan umum yang pertama, “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dan arah kebijakan umum yang kedua, “Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan” (Buku I RPJMN 2015-2019). Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mendeskripsikan tentang bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia terhadap upaya mewujudkan industri hijau (green industri) era Presiden Joko Widodo, utamanya pada industri ekstraktif.

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah tersebut, digunakan konsep Green Economy, Green Growth dan Green Industri. Dalam memahami konsep green industri, perlu diawali dengan pemahaman green economy, karena green industri merupakan bagian dari green economy. Paradigma green economy telah menjadi suatu tren global baru dan sebagai bentuk dan tindak lanjut dari pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Green Economy menurut UNEP diartikan sebagai “economic growth that improved human well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities”. Green economy merupakan salah satu strategi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Terdapat dua tujuan utama dalam pembangunan berkelanjutan yaitu: pertama, pembangunan yang dijalankan masa sekarang harus memastikan tidak ada penurunan kesejahteraan pada masa yang akan datang, atau dikenal dengan “Non-declining welfare”. Kedua, pembangunan masa sekarang harus memastikan bahwa generasi yang akan datang tetap mendapatkan keadilan dalam menikmati hasil pembangunan atau dikenal dengan “not only intra-generational equity, but also inter-generational equity”.

Dengan dikembangkannya green economy (ekonomi hijau), maka diharapkan pembangunan yang dijalankan akan menghasilkan pertumbuhan yang bukan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pertumbuhan yang memastikan keadilan social masyarakat dan terjaganya kondisi lingkungan hidup agar tetap baik atau yang dikenal dengan istilah green growth. Ada beberapa aspek penting dalam melihat green growth, yaitu:

energy efficiency; renewable and nuclear energy; transport, cities and fuel efficiency; water and ecological infrastructure; and green technologies as future growth engines.

Pertumbuhan hijau dapat diwujudkan apabila didukung oleh 3 aspek penting (source of green growth) yaitu:

Productivity: incentives for greater efficiency in the use of resources and natural assets, including enhancing productivity, reducing waste and energy consumption, and making resources available to their highest value use.

Innovation: opportunities for innovation, spurred by policies and framework conditions that allow for new ways of creating value and addressing environmental problems.

New markets: creation of new markets by stimulating demand for green technologies, goods, and services; creating new job opportunities.

Faktor penting untuk mendukung pertumbuhan hijau adalah sektor industri. Oleh karenanya paradigma dalam pembangunan industri juga harus berorientasi pada paradigma industri hijau atau dikenal dengan green industri. Green Industri, seperti disampaikan Yeonok Choi dalam tulisannya yang mengulas tentang prinsip-prinsip yang ada dalam "Low Carbon Green Growth Act" 2010 (Yeonok Choi, 2010), menjelaskan bahwa green industri adalah aktivitas yang: (1) increase the effectiveness of energy and resources through entire economy and (2) minimize the emission of Green House gas and pollution, and that accomplish low carbon green growth through products and services that can improve environment." Dalam Undang-Undang RI NO. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, disebutkan bahwa "Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat".

Boston Consulting Group menjelaskan 4 konsep dasar Industri Hijau (Gangsar, 2014) yaitu: pertama, secara prinsip, industri tersebut mempunyai visi yang pro lingkungan, kedua, proses industrinya telah mengaplikasikan proses produksi yang ramah lingkungan. Ketiga, produk yang dihasilkan adalah produk yang tidak merusak lingkungan, dan keempat, promosi yang dijalankan dengan mengampanyekan posisi perusahaan atas praktek pro lingkungan. Lebih jauh dalam Gansar dijelaskan bahwa industri hijau dalam menjalankan proses industrinya menekankan beberapa prinsip penting yaitu: efisiensi energy, penggunaan energi terbarukan, efisiensi pemanfaatan sumber daya, siklus materi, dan keterkaitan sistem alam dan manusia. Sedangkan parameter untuk mengukur seberapa baik penerapan industri hijau dalam sebuah industri akan ditentukan beberapa hal yaitu:

Proses Produksinya: Kriteria dalam aspek produksi adalah jenis bahan baku dan bahan penolong, energi, air, teknologi proses, produk, sumber daya manusia (SDM), dan lingkungan kerja.

Manajemen Perusahaan: Kriteria dalam aspek manajemen adalah efisiensi produksi, CD/CSR, penghargaan terkait industri hijau, dan sistem manajemen.

Pengelolaan Lingkungan: Kriteria dalam aspek pengelolaan lingkungan adalah pemenuhan baku mutu lingkungan, sarana pengelolaan limbah dan emisi, dan PROPER.

Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa variable penting dalam melihat implementasi industri hijau, yaitu:

- Efisiensi dan efektivitas penggunaan Sumber Daya secara berkelanjutan
- Efektivitas penggunaan Energi secara berkelanjutan
- Penggunaan Energi terbarukan
- Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Proses Industri: input-proses-ouput memperhatikan aspek kualitas lingkungan (masa kini dan masa datang)

UNIDO1 (United Nations Industrial Development Organization) telah mengeluarkan dokumen "Policies for supporting Green Industri" yang akan menjadi tahap awal penting dan menjadi rujukan utama pemerintah dalam menjadikan industri hijau untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dokumen ini juga merupakan inisiatif yang diperuntukan bagi komunitas internasional, pemerintah dan sector swasta dalam menciptakan peran positif industri untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Dokumen tersebut lebih jauh menjelaskan bahwa Green Industri mempromosikan pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dengan karakteristiknya adalah resource and energy efficient, low-carbon and low waste, non-polluting and safe, and which produce products that are responsibly managed throughout their lifecycle. Agenda the Green Industri meliputi: pertama, the greening of industries, artinya seluruh industri secara terus menerus meningkatkan produktivitas sumber dayanya dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Kedua, To deliver environmental goods and services in an industrial manner, artinya industri dalam menghasilkan barang dan jasa harus ramah lingkungan dalam pengelolaan industrinya, seperti waste management and recycling services, renewable energy technologies, and environmental analytical and advisory services.²

Dalam dokumen UNIDO tersebut, terdapat lima kerangka kebijakan untuk mewujudkan industri hijau, yaitu:

- An integrated framework to support the greening of industries
- Creating an enabling environment
- Supporting industri-led initiatives
- Harnessing environmental technologies
- Instrument mixes to promote the greening of industries

PEMBAHASAN

Kebijakan Green Industri Sebelum Era Jokowi

Dasar-dasar kebijakan Green Industri Indonesia telah ada sebelum era Pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu era Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Hal ini ditandai dengan terbitnya Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. Undang-undang ini memberikan gambaran dan arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan Industri Hijau (Green Industri).

Beberapa dasar-dasar kebijakan penting yang terkait dengan Industri Hijau, khususnya dalam mewujudkan industri hijau yang merujuk pada Undang-Undang Tersebut adalah: Perumusan Kebijakan; Penguatan Kapasitas Kelembagaan; Standardisasi; dan Pemberian Fasilitas.

Penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan dengan peningkatan kemampuan dalam hal penelitian dan pengembangan, pengujian, sertifikasi, dan promosi. Penguatan kapasitas kelembagaan dilaksanakan oleh Menteri Perindustrian yang berkoordinasi dengan menteri terkait, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait, dan Pemerintah Daerah, serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait. Dalam melakukan Standardisasi Menteri menyusun dan menetapkan standar Industri Hijau. Standar Industri

¹ Adalah sebuah organ PBB yang bertujuan "to reduce poverty through sustainable industrial development/green industrial development"

²UNIDO, 2011, "UNIDO Green Industri: Policies for Supporting Green Industri"

Hijau paling sedikit memuat: Bahan Baku, bahan penolong, dan energi; proses produksi; produk; manajemen perusahaan; dan pengelolaan limbah.

Dalam penyusunan standar Industri Hijau, dilakukan dengan cara: memperhatikan sistem Standardisasi nasional dan/atau sistem standar lain yang berlaku; dan berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, bidang riset dan teknologi, bidang standardisasi, serta berkoordinasi dengan asosiasi Industri, Perusahaan Industri, dan lembaga terkait.

Standar Industri Hijau yang telah ditetapkan oleh Menteri tersebut menjadi pedoman bagi Perusahaan Industri. Dalam penerapan standar Industri Hijau pemberlakuan wajib bagi Industri dilakukan secara bertahap. Pemberlakuan tersebut ditetapkan oleh Menteri. Oleh karenanya semua perusahaan wajib memenuhi standar Industri hijau tersebut. Apabila ada perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan standar Industri Hijau dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; denda administratif; penutupan sementara; pembekuan izin usaha Industri; dan/atau pencabutan izin usaha Industri.

Sedangkan bagi perusahaan Industri yang telah memenuhi standar Industri Hijau diberikan sertifikat Industri Hijau. Sertifikasi Industri Hijau dilakukan oleh lembaga sertifikasi Industri Hijau yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri. Namun apabila belum terdapat lembaga sertifikasi Industri Hijau yang terakreditasi, Menteri dapat membentuk lembaga sertifikasi Industri Hijau. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh sertifikat Industri Hijau diatur dengan Peraturan Menteri Perindustrian. Untuk mewujudkan Industri Hijau, Perusahaan Industri secara bertahap perlu melakukan beberapa hal yaitu: membangun komitmen bersama dan menyusun kebijakan perusahaan untuk pembangunan Industri Hijau; menerapkan kebijakan pembangunan Industri Hijau; menerapkan sistem manajemen ramah lingkungan; dan mengembangkan jaringan bisnis dalam rangka memperoleh Bahan Baku, bahan penolong, dan teknologi ramah lingkungan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Hijau dan tata cara pengenaan sanksi administratif serta besaran denda administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015 – 2035. PP ini selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu: mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional; mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri; mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau; mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

RIPIN 2015-2035 disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki karakteristik dan relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan industri nasional. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah: Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan, pembangunan industri hijau (green industri) perlu lebih diprioritaskan, antara lain melalui regulasi eco product, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta bahan-bahan berbahaya.

Kerangka Pikir Bangun Industri Nasional tahun 2035 mencakup: Modal Dasar, yaitu

faktor sumber daya yang digunakan dalam kegiatan industri untuk menghasilkan barang dan jasa serta dalam penciptaan nilai tambah atau manfaat yang tinggi. Modal dasar yang diperlukan dan digunakan dalam kegiatan industri adalah: sumber daya alam yang diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sebagai bahan baku maupun sumber energi bagi kegiatan industri; sumber daya manusia yang memiliki kompetensi kerja (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang sesuai di bidang industri; dan pengembangan, penguasaan, dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas serta inovasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian sector industri nasional.

Kebijakan Green Industri Era Jokowi

Di era pemerintahan Jokowi, telah diterbitkan berbagai peraturan perundangan yang mendukung perwujudan Industri Hijau, diantaranya adalah PP RI Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015 – 2019; Peraturan Menteri Perindustrian RI (Permenperin) Nomor 39 tahun 2018 tentang tata cara sertifikasi industri hijau.

Dalam PP RI Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri, telah menggambarkan Industri Hijau. Beberapa hal penting dalam kebijakan ini adalah: Standardisasi Industri Hijau, fasilitasi industri hijau, dan Penggunaan Produk Industri Hijau. Standardisasi Industri Hijau terdiri dari Standardisasi Industri Hijau dan Sertifikasi Industri Hijau. Standar Industri Hijau paling sedikit memuat ketentuan mengenai: Bahan baku, bahan penolong, dan energy; Proses produksi; Produk; Manajemen perusahaan; Pengelolaan limbah.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas kepada Perusahaan Industri yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan Industri Hijau. Fasilitas berupa fasilitas fiskal dan fasilitas non fiskal. Fasilitas fiskal diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Bentuk fasilitas nonfiskal dapat berupa: Pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia industri dalam penerapan industri hijau; pelimpahan hak produksi atas suatu teknologi yang lisensi patennya telah dipegang oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; Pembinaan keamanan dan/atau pengamanan kegiatan operasional sector Industri guna keberlangsungan atau kelancaran kegiatan logistic dan/atau produksi bagi Perusahaan Industri guna keberlangsungan atau kelancaran kegiatan logistik dan/atau produksi bagi Perusahaan Industri yang merupakan obyek vital nasional dan memiliki Sertifikat Industri Hijau dan/atau; Penyediaan bantuan promosi hasil produksi. Terkait dengan penggunaan Produk Industri Hijau, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memprioritaskan penggunaan produk yang memiliki Sertifikasi Industri Hijau.

Kebijakan lainnya di era Jokowi adalah terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015 – 2019. Pada peraturan ini telah ditetapkan Fokus Pengembangan Industri. Kebijakan pengembangan industri nasional merupakan bagian kebijakan perindustrian yang diamanatkan dalam RIPIN 2015 – 2035 dan RPJMN 2015-2019. Prinsip kebijakan pengembangan industri harus mendorong pertumbuhan industri serta peningkatan daya saing industri nasional.

Kebijakan pembangunan industri nasional difokuskan pada:

1. Peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral, serta migas dan batubara dalam rangka pendalaman struktur industri melalui penguatan rantai nilai industri dan pembangunan industri hulu yang diintegrasikan dengan industri antara dan industri hilirnya.

2. Peningkatan kapabilitas industri melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan penguasaan teknologi
3. Pembangunan industri di seluruh wilayah Indonesia melalui pembangunan wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI), kawasan peruntukan industri (KPI), kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah (sentra IKM)

Dalam peraturan ini juga telah ditetapkan tahapan capaian pembangunan industri, yaitu:

1. Pengembangan Sumber Daya Industri

Sumber daya industri mencakup sumber daya manusia (SDM) industri, sumber daya alam (SDA), teknologi, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan.

Pembangunan sumber daya manusia industri. Pembangunan SDM Industri dilakukan melalui pembangunan infrastruktur ketenagakerjaan berbasis kompetensi, peningkatan kompetensi SDM industri, peningkatan produktivitas SDM Industri.

2. Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran SDA.

Pemanfaatan, penyediaan, dan penyaluran SDA dilakukan melalui pemetaan potensi dan kebutuhan SDA, penyusunan ketentuan peraturan perundang – undangan yang menjamin kepastian pasokan bahan baku untuk industri dalam negeri secara berkelanjutan, pengembangan kemitraan antara industri dengan produsen bahan baku dan pemabangunan industri berbasis SDA.

3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri.

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dilakukan melalui penguatan infrastruktur penelitian dan pengembangan, peningkatan adopsi dan alih teknologi, serta pemanfaatan teknologi industri dalam negeri.

4. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi.

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dilakukan melalui penyediaan ruang, wilayah, dan infrastruktur bagi pengembangan kreativitas dan inovasi, pengembangan sentra industri kreatif, pelatihan teknologi dan desain, fasilitas perlindungan hak ekakayaan intelektual, dan promosi atau pemasaran produk industri kreatif.

5. Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri.

Penyediaan sumber pembiayaan yang kompetitif bagi industri dilakukan antara lain melalui pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan industri.

Pemberdayaan Industri mencakup pengembangan industri hijau, pembangunan industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), kerjasama internasional serta pengamanan dan penyelamatan industri.

Industri Hijau

Pengembangan industri hijau dilakukan melalui penetapan standar industri hijau, pembangunan dan pengembangan lembaga sertifikasi industri hijau, peningkatan kompetensi auditor industri hijau, dan pemerian insentif untuk industri hijau. Pemanfaatan, penyediaan, dan penyaluran SDA mencakup pemetaan potensi dan kebutuhan SDA, serta penyusunan peraturan perundang-undangan dengan tujuan menjamin penyediaan dan penyaluran SDA untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi, dan air baku bagi industri nasional.

Mendorong kemajuan industri nasional dan mendukung peningkatan teknologi industri periode 2017-2019 difokuskan pada pemenuhan kebutuhan teknologi bagi pengembangan 10 industri prioritas sebagai berikut: Industri pangan; Industri farmasi, obat tradisional, kosmetik, dan alat kesehatan; Industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka; Industri

alat transportasi; Industri elektronika dan telematika; Industri pembangkit energy; Industri barang modal, komponen, dan bahan penolong; Industri hulu agro; Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; Industri kimia dasar.

Standarisasi Industri

Pengembangan standarisasi industri ditujukan untuk meningkatkan daya saing industri nasional, menjamin keamanan, kesehatan dan keselamatan atas penggunaan produk industri, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengembangan industri hijau, dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

Diversifikasi dan penghematan penggunaan energy oleh sector industri, meliputi:

- a. Penyediaan insentif bagi restrukturisasi mesin industri yang mendukung penghematan penggunaan energy
- b. Fasilitas dan insentif bagi pengolahan limbah menjadi sumber energy
- c. Fasilitas kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penggunaan energy baru dan terbarukan serta penghematan penggunaan energy di sector industri.

Pemberdayaan Industri

Industri Hijau

Pengembangan industri hijau ditujukan untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pengembangan industri hijau dilakukan melalui penerapan standar industri hijau yang secara bertahap diterapkan secara wajib.

Pengembangan industri hijau diarahkan pada penyediaan infrastruktur kelembagaan sertifikasi industri hijau dan mendorong penerapan prinsip – prinsip industri hijau dalam produksi industri dengan sasaran pengembangan selama periode 2017 – 2019 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan aturan, pedoman umum dan pedoman teknis berupa peraturan terkait konvensi Minamata; peraturan mengenai pengurangan penggunaan persistent organic pollutants (POPs); peraturan perundangan mengenai penghapusan bahan perusak ozon (BPO); peraturan pengendalian pencemaran, satu peraturan mengenai penyediaan kebutuhan air industri; dan pedoman teknis konservasi energy;
2. Penyediaan infrastruktur industri berupa penyusunan standar industri hijau; pengembangan dan penetapan lembaga sertifikasi industri hijau; dan pembentukan komite pengelola lembaga sertifikasi industri hijau;
3. Penyediaan SDM terkait industri hijau terdiri dari SDM kompeten di bidang system informasi dan monitoring gerakan rumah kaca, auditor industri hijau, dan manajer energy;
4. Mendorong penerapan prinsip industri hijau oleh industri melalui penyediaan informasi mengenai manfaat industri hijau; pemberian penghargaan dan penyelenggaraan pameran industri hijau.

Kebijakan dan Program Operasional

Kebijakan dan program operasional pengembangan industri hijau selama periode 2017-2019 adalah sebagai berikut:

- Benchmarking standar industri hijau di Negara lain
- Penetapan panduan umum penyusunan standar industri hijau
- Penyusunan, penetapan dan pemberlakuan standar industri hijau untuk kelompok – kelompok industri (mengacu kepada klasifikasi baku lapangan usaha)
- Penetapan peraturan mengenai pengawasan atas pelaksanaan standar industri hijau yang bersifat wajib

- Kesepakatan pengakuan bersama mengenai standar industri hijau dengan Negara lain
- Penyusunan pedoman umum pembentukan lembaga sertifikasi, standard operating procedure (SOP) sertifikasi, modul pelatihan dan standar kompetensi auditor industri hijau
- Penunjukan lembaga sertifikasi serta penetapan pedoman akreditasi dan pengawasan lembaga sertifikasi industri hijau
- Pelatihan auditor industri hijau
- Penyediaan insentif bagi industri hijau

Kebijakan lain di era Jokowi adalah Peraturan Menteri Perindustrian RI (Permenperin) Nomor 39 tahun 2018 tentang tata cara sertifikasi industri hijau. Dalam peraturan ini mengatur mengenai sertifikat industri hijau, yaitu pengakuan yang diberikan oleh lembaga sertifikasi industri hijau untuk menyatakan bahwa perusahaan industri telah memenuhi SIH. Lembaga sertifikasi industri hijau yang selanjutnya disingkat LSIH adalah lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan sertifikasi industri hijau.

Perusahaan Industri yang telah memiliki Sertifikasi Industri Hijau dapat mencantumkan Logo Industri Hijau. Logo Industri Hijau dapat dicantumkan pada: Kemasan produk, Label produk, Kop surat perusahaan, Kartu nama perusahaan, dan Media promosi perusahaan.

Pedoman Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman LSIH dalam melaksanakan sertifikasi industri hijau berdasarkan persyaratan teknis atau standar industri hijau dan SNI ISO 17065 tentang Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa.

PENUTUP

Indonesia sebagai bagian dari rejim lingkungan Internasional, telah menetapkan arah pengembangan industri hijau. Dasar kebijakan Industri Hijau telah ditetapkan di era Presiden Susilo Bambang Yudoyono, dengan ditetapkannya UU Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015 – 2035. Dua produk peraturan perundangan ini menjadi pijakan bagi pemerintah Jokowi dalam membangun Industri Hijau. Era presiden Jokowi, pembangunan Industri Hijau tetap dilanjutkan dan dikuatkan. Setidaknya 3 hal penting yang ditindaklanjuti adalah Standardisasi Industri Hijau, fasilitasi industri hijau, dan Penggunaan Produk Industri Hijau. Yang perlu mendapat perhatian di masa yang akan datang adalah tentang konsistensi dalam penegakan berbagai peraturan perundangan yang telah dibuat dan dukungan pemerintah dalam memberikan fasilitasi kepada perusahaan dan juga komitmen perusahaan untuk membangun industry hijau.

DAFTAR PUSTAKA

- Halimatussadiyah, Alin, 2014, "Green Economy: Concept, Agendas and Challenges" Green Development Seminar "Green Mindset toward Sustainable Development" Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia, Wisma Makara Universitas Indonesia, Depok, 15 Februari 2014
- Kementerian Perindustrian, "Kebijakan Pengembangan Industri Hijau (Green Industri)", <http://greenlistingindonesia.com/berita-147-kebijakan-pengembangan-industri-hijau-green-industri-kementerian-perindustrian.html>, diakses tanggal 20 maret 2019
- Kementerian Luar Negeri, "Krisis Energi", <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Krisis-Energi.aspx>, diakses tanggal 20 Maret 2019
- Kementerian Perindustrian, 2012, "Kebijakan Pengembangan Industri Hijau" materi Workshop Efisiensi Energi di IKM Jakarta, 27 Maret 2012

- “Lima Tantangan Menuju Industri Hijau”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/756919/5-tantangan-menuju-industri-hijau>, 20 maret 2019
- Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014
- Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015 – 2019
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035
- UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian
- UNIDO, 2011, “UNIDO Green Industri: Policies for Supporting Green Industri”, <https://www.unido.org/our-focus/cross-cutting-services/green-industri/green-industri-initiative>, diakses 27 Maret 2019
- World Commission on Environment and Development, 1987, Our Common Future, New York: Oxford University press
- Yeonok Choi, 2010, “Development of Green Growth Statistics”
- Yuliantanti, Theresia Vera, 2012, “Sekilas Tentang Green Growth”

PENGARUH SELF-EFFICACY TERHADAP MOTIVASI BERPRESTASI MAHASISWA JURUSAN MANAJEMEN BERBASIS KKNI

AYN Warsiki dan Tri Mardiana

UPN “Veteran” Yogyakarta, Prordi Manajemen
kiki_upn@yahoo.co.id, triana_upn@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to find out how much self-efficacy can affect student achievement motivation. Achievement motivation is an impulse that is in a person to achieve success and avoid failure that leads to behavioral tendencies to maintain and enhance a success that has been achieved by referring to the benchmark of the best achievements ever achieved by both himself and others. So that achievement motivation also affects the choice of activities undertaken by someone. In the learning process, self-efficacy (self-efficacy) which is owned by someone can influence achievement motivation. Self-efficacy refers to belief in one's ability to organize and carry out the actions needed to manage the situation

Keyword: Motivasi berprestasi, Self-efficacy

PENDAHULUAN

Pada saat melakukan perkuliahannya, prestasi belajar merupakan cerminan dari tingkatan yang mampu dicapai oleh mahasiswa dalam meraih tujuan yang sudah ditetapkan disetiap bidang studi, oleh karena itu dalam usahanya untuk mencapai prestasi belajar yang optimal akan sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. (Dalyono 2009), yang saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. (Slameto,2010), dimana bila tidak ditunjang dengan kemampuan manajemen diri yang baik makatidak akan mampu mencapai prestasi yang optimal (Susanto, 2006).

Ada beberapa pengertian self-efficacy sejak pertama kali dikenalkan oleh Albert Bandura pada tahun 1977 yang disebutkannya sebagai keyakinan seseorang tentang kemampuannya, yang kemudian berkembang sehingga ada yang mengartikannya sebagai kompetensi diri seeseorang untuk melakukan suatu tugas dan menghadapi kendala yang terjadi. (Baron dan Byrne, 2004), cara individu berperilaku dalam situasi tertentu (Alwisol, 2004), keyakinan untuk melatih sejumlah ukuran pengendalian terhadap fungsi diri (Bandura, dalam Feist & Feist, 2008) atau keyakinan atas kesanggupan untuk melakukan perilaku tertentu (Feist & Feist, 2008). self- efficacy merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam proses belajar mengajar karena akan mempengaruhi pencapaian prestasi belajar .(Bandura dalam Santrock, 2008), dan pada setiap diri individu merupakan hal penting dalam menghadapi suatu permasalahan. (Bandura, 1989), dan diduga berpengaruh hingga 14 % dari performansi akademik individu. (Multon, 1991). Hal inikarena self-efficacy yang rendah sangat mempengaruhi penyelesaian tugas karena rendahnya keyakinan pada dirinya sendiri dalam mengerjakan tugas yang diberikan (Adicondro,2011).Tingkat self-efficacy seorang mahasiswa akan mengakibatkan tumbuhnya keyakinan yang kuat , memiliki dorongan prestasi yang ingin dicapai untuk setiap target yang lazim dikenal dengan sebutan motivasi berprestasi (Zimmerman, 2000, Santroc, 2011) .

Pengertian self efficacy pertama kali dikenalkan oleh Albert Bandura pada tahun 1977 sebagai keyakinan yang dipegang oleh seseorang tentang kemampuannya, hasil yang akan dia peroleh dari hasil kerja kerasnya, serta mempengaruhi perilaku. Self-efficacy merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam proses belajar mengajar karena akan mempengaruhi pencapaian prestasi belajar. (Bandura dalam Santrock, 2008), dalam menghadapi suatu permasalahan. (Bandura, 1989), performansi akademik individu. (Multon, 1991), dan penyelesaian tugas yang diberikan (Adicondro, 2011).

Karena itu adanya self-efficacy untuk dimiliki oleh setiap mahasiswa akan mengakibatkan mahasiswa dapat memiliki keyakinan yang kuat serta memiliki dorongan prestasi yang ingin dicapai untuk setiap target yang dikenal juga dengan sebutan motivasi berprestasi (Zimmerman, 2000.b, Santroc, 2011), terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pemberi daya, pemberi arah dan mempertahankan perilaku (Sumantri, 2001), yang berperan untuk rasa gairah, senang dan semangat belajar. (Sardiman, 2009:75), yang merupakan motif seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain (McClelland dalam Alex Sobur, 2003) dengan dasar dari 2 aspek, yaitu pengharapan untuk sukses dan menghindari kegagalan. (Mangkunegara 2007, Smet, 1994).

Self-efficacy yang dimiliki seseorang berbeda-beda, yang secara umum dibedakan atas dua kelompok, yaitu Self-efficacy khusus dan umum. Self-efficacy khusus sangat beragam tergantung pada tugas khusus dan diolah secara kognitif oleh individu sebelum usaha tersebut dikembangkan dan sebaliknya Self-efficacy umum merujuk pada keyakinan orang dalam keberhasilan mencapai prestasi hidup. (Lauster, 1988), yang secara langsung akan mempengaruhi keputusan untuk menampilkan tugas tertentu/ pemilihan perilaku, usaha motivasi yang dilakukan untuk menyelesaikan tugas dan tingkat daya tahan yang akan muncul (selain masalah), tidak sesuai dengan bukti dan kesulitan yang dihadapi. (Luthans, 2006, Bandura, 2001).

Ada empat sumber penting yang digunakan individu dalam membentuk self-efficacy, yaitu pertama mastery experience (pengalaman keberhasilan), kedua vicarious experience atau modeling (meniru), ketiga verbal persuasion (persuasi verbal) dan keempat tingkat psikologi dan emosi. (Bandura, 1989).

Self-efficacy akademik, merupakan hal yang akan menjadi penentu suksesnya perilaku akademik di masa yang akan datang (Alwisol, 2004), sumber penting bagi pengembangan diri (Santrock, 2008) dan akan menentukan prestasi akademik seseorang (Ferla, Valcke, & Cai, 2009), dan merupakan sub bagian spesifik dari dimensi self-efficacy, yang mengacu kepada tiga aspek yaitu aspek level, generality, dan strength dimana terdapat empat proses psikologis yang mengiringi yaitu proses kognitif, proses motivasi, proses afeksi dan proses seleksi. Dan dibentuk melalui satu atau kombinasi dari keempat faktor yaitu pengalaman-pengalaman tentang penguasaan (mastery experiences), pemodelan sosial (social modeling), persuasi sosial (social persuasion) dan kondisi fisik dan emosional (physical and emotional states). (Feist & Feist, 2008)

Kata motivasi berasal dari bahasa latin "Movere" (Robbins, 1996), mula-mula dikemukakan oleh Henry Murray pada tahun 1938 (Purwanto, 1998). yang diartikan sebagai usaha mencapai hasil atau tujuan tertentu serangkaian sikap dan nilai-nilai.

(Rivai, 2004), dorongan dalam memenuhi kebutuhannya, (Uno, 2008), tanggapan terhadap adanya tujuan (Sardiman, 2009) dan sebagai tenaga pendorong atau penarik tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu (Mulyasa, 2003).

Motivasi dapat dibedakan menjadi dua jenis (Robbins, 2012) yaitu motivasi intrinsik

dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik berupa keinginan bertindak yang disebabkan faktor pendorong dari dalam diri (internal) individu, tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan, sedangkan motivasi ekstrinsik berupa segala sesuatu yang diperoleh melalui pengamatan sendiri, ataupun melalui saran, anjuran atau dorongan dari orang lain.

Tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu, (Purwanto,1998), mendorong manusia untuk berbuat ke arah tujuan yang hendak dicapai (Sardiman, 2009, Hamalik, 2004), yang dipengaruhi dimensi motivasi (Gunarsa, 2008), yang mempunyai indikator adanya hasrat dan keinginan berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, adanya harapan dan cita-cita masa depan, adanya penghargaan dalam belajar, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, dan adanya lingkungan belajar yang kondusif. (Uno, 2008)

Orang termotivasi dapat dilihat dari ciri-ciri yang ada pada diri orang tersebut, yaitu tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah, lebih senang bekerja mandiri, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin, dapat mempertahankan pendapatnya, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu, dan senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal (Sardiman, 2009).

Pada intinya setiap manusia mempunyai 3 jenis motivasi sosial, yaitu motivasi berprestasi, motivasi untuk berkuasa, dan motivasi untuk berafiliasi. Dua dari ke-tiga motivasi tersebut obyeknya adalah berkaitan dengan manusia lain yang ada di lingkungannya, kecuali motivasi berprestasi yang berpijak pada dirinya sendiri. (Hasibuan, 2007), yang dipengaruhi oleh faktor individu dan faktor lingkungan (Mc. Clelland,1987), dengan menentukan arah tujuan yang ingin dicapai dan menyelesaikan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan (Uno, 2007).

Karena itu mengingat betapa pentingnya peran self-efficacy untuk menumbuhkan motivasi berprestasi bagi mahasiswa, maka perlu dilakukan studi tentang besarnya pengaruh self-efficacy terhadap motivasi berprestasi pada mahasiswa jurusan manajemen berbasis KKNi.

Tujuan penelitian ini adalah: untuk menganalisis besarnya pengaruh dari self-efficacy terhadap motivasi berprestasi pada mahasiswa jurusan manajemen berbasis KKNi

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif regresi sederhana dengan variabel bebas Self-efficacy (X1) Serta motivasi berprestasi sebagai Variabel terikat (Y). Populasi penelitian adalah yang seluruh mahasiswa mendaftar ulang pada tahun ajaran 2017 /2018 dengan jumlah 250 orang dan jumlah sampling penelitian terpilih sebesar 150 orang, yang didapatkan melalui rumus Slovin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	54.055	3.379		15.997	.000
1 TED	.329	.032	.660	10.316	.000

Hasil penelitian telah menjawab tujuan penelitian yaitu secara umum menyimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan dari self-efficacy terhadap motivasi berprestasi pada mahasiswa jurusan manajemen berbasis KKNi FEB UPN “Veteran”YK, dan secara khusus disimpulkan aspek self-efficacy berpengaruh signifikan dan linier terhadap motivasi berprestasi, dengan persamaan regresi $\hat{Y} = 54,055 + 0,329 X_1$ dengan signifikansi 0,000

Hasil penelitian yang dilakukan memberikan hasil yang juga sesuai dengan hasil penelitian terdahulu seperti yang diperoleh oleh Amir (2016), Latifah (2018) dan Zimmerman (dalam Schimtz dan Wiese 2006) yang menyatakan bahwa individu yang memiliki motivasi berprestasi dalam belajar yang tinggi akan cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, mempunyai tanggung jawab, selalu berusaha mencapai basil yang baik, aktif dalam kehidupan sosial, memilih teman yang ahli daripada sekedar sahabat, serta tahan terhadap tekanan-tekanan. Sedangkan hasil penelitian Amir (2016) menyimpulkan bahwa self-efficacy mahasiswa berpengaruh secara signifikan dan linier terhadap motivasi berprestasinya. Semakin baik dan tinggi self-efficacy pada mahasiswa maka akan diikuti dengan peningkatan motivasi berprestasi mahasiswa, dan sebaliknya. Latifah (2018) menyimpulkan bahwa self-efficacy berpengaruh signifikan terhadap motivasi berprestasi. Self-efficacy merupakan keyakinan dalam diri seseorang tentang kemampuannya untuk menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas tertentu. Jika seseorang cukup yakin bahwa ia dapat menyelesaikan tugas atau aktivitas tertentu, maka hasil yang diperoleh juga akan lebih baik daripada mereka yang kurang yakin. Hal ini mengandung implikasi agar guru bersama orang tua lebih membangun keyakinan dalam diri siswa/anak bahwa mereka bisa melakukan tugas atau aktivitas tertentu, sehingga dalam mengikuti pelajaran di sekolah maupun kegiatan lain siswa bisa lebih optimis untuk maju.

Temuan tersebut juga sesuai dengan pendapat Bandura (1995) yang mengatakan bahwa self-efficacy mengacu pada keyakinan terhadap kemampuan seseorang untuk mengatur dan melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk mengelola situasi yang ada. Keyakinan tersebut mempengaruhi bagaimana orang berpikir, merasa, memotivasi diri, dan bertindak.

Bandura (dalam Nease, Mudgget dan Quinones ,1999), menjelaskan self-efficacy merupakan keyakinan individu terhadap kemampuan yang dimilikinya untuk memobilisasi motivasi, sumber daya kognitif dan tindakan-tindakan yang diperlakukan atas situasi – situasi yang dihadapi. Self-efficacy merupakan salah satu faktor yang merujuk pada keyakinan individu bahwa ia mampu mengerjakan tugasnya. Self-efficacy masalah kemampuan yang dirasakan individu untuk mengatasi situasi khusus sehubungan dengan penilaian atas kemampuan untuk melakukan satu tindakan yang ada hubungannya dengan tugas khusus atau situasi tertentu. Semakin tinggi self-efficacy seseorang, semakin tinggi rasa percaya diri yang dimilikinya sehingga kemampuan untuk berhasil dalam tugas pun tercapai.

Bandura menyebutkan bahwa pengaruh dari self-efficacy pada proses kognitif seseorang sangat bervariasi. Pertama, self-efficacy yang kuat akan memengaruhi tujuan pribadinya. Semakin kuat self-efficacy, semakin tinggi tujuan yang ditetapkan oleh individu bagi dirinya sendiri dan yang memperkuat adalah komitmen individu terhadap tujuan tersebut. Individu dengan self-efficacy yang kuat akan mempunyai cita-cita yang tinggi, mengatur rencana dan berkomitmen pada dirinya untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, individu dengan self-efficacy yang kuat akan memengaruhi bagaimana individu tersebut menyiapkan langkah-langkah antisipasi bila usahanya yang pertama gagal dilakukan.

Self-efficacy memainkan peranan penting dalam pengaturan motivasi diri. Sebagian

besar motivasi manusia dibangkitkan secara kognitif. Individu memotivasi dirinya sendiri dan menuntun tindakan-tindakannya dengan menggunakan pemikiran-pemikiran tentang masa depan sehingga individu tersebut akan membentuk kepercayaan mengenai apa yang dapat dirinya lakukan. Individu juga akan mengantisipasi hasil-hasil dari tindakan-tindakan yang prospektif, menciptakan tujuan bagi dirinya sendiri dan merencanakan bagian dari tindakan-tindakan untuk merealisasikan masa depan yang berharga.

Self-efficacy mendukung motivasi dalam berbagai cara dan menentukan tujuan-tujuan yang diciptakan individu bagi dirinya sendiri dengan seberapa besar ketahanan individu terhadap kegagalan. Ketika menghadapi kesulitan dan kegagalan, individu yang mempunyai keraguan diri terhadap kemampuan dirinya akan lebih cepat dalam mengurangi usaha-usaha yang dilakukan atau menyerah. Individu yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap kemampuan dirinya akan melakukan usaha yang lebih besar ketika individu tersebut gagal dalam menghadapi tantangan.

Kegigihan atau ketekunan yang kuat mendukung bagi pencapaian suatu performansi yang optimal. Self-efficacy akan berpengaruh terhadap aktifitas yang dipilih, keras atau tidaknya dan tekun atau tidaknya individu dalam usaha mengatasi masalah yang sedang dihadapi.

Selain itu Junqing Fu (2011) juga menambahkan bahwa siswa dengan self-efficacy yang tinggi secara keseluruhan juga mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi dan motivasi untuk sukses, akan tetapi mempunyai motivasi yang rendah untuk menghindari kegagalan.

Selain kedua pendapat di atas, Moekijat (Martianah, 2004: 26) juga mengatakan bahwa harapan/keyakinan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi seseorang. Harapan/keyakinan merupakan kemungkinan yang dilihat untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dari seseorang yang didasarkan atas pengalaman yang telah lampau; harapan tersebut cenderung untuk mempengaruhi motif pada seseorang. Seseorang siswa yang merasa yakin akan sukses dalam ulangan akan lebih terdorong untuk belajar giat serta tekun agar dapat mendapatkan nilai setinggi-tingginya.

Bandura (1997) Self-efficacy adalah keyakinan seorang individu mengenai kemampuannya dalam mengorganisasi dan menyelesaikan suatu tugas yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu. Keyakinan self-efficacy menentukan bagaimana orang merasa, berpikir, memotivasi diri dan perilakunya.

Berdasarkan pendapat dan hasil penelitian tersebut, secara teoritik self-efficacy yang dimiliki oleh siswa akan mempengaruhi motivasi berprestasi dalam diri siswa tersebut, sehingga hasil penelitian ini menunjukkan kebenaran teori yang ada.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan simpulan analisis data yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa aspek self-efficacy sebagai variabel bebas mempengaruhi motivasi berprestasi dengan besarnya koefisien regresi sebesar 0,329 arah pengaruh positif. Ini membuktikan bahwa self-efficacy mahasiswa berpengaruh secara signifikan dan linier terhadap motivasi berprestasinya. Semakin baik dan tinggi self-efficacy pada mahasiswa maka akan diikuti dengan peningkatan motivasi berprestasi mahasiswa dan sebaliknya.

Saran

Berdasarkan Kesimpulan dan apa yang dikatakan Bandura (1997) bahwa self efficacy adalah keyakinan seorang individu mengenai kemampuannya dalam mengorganisasi dan

menyelesaikan suatu tugas yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu. Keyakinan self efficacy menentukan bagaimana orang merasa, berpikir, memotivasi diri dan perilakunya, maka perlu di sarankan:

Bagi mahasiswa manajemen FEB UPN VY dalam upaya mencapai prestasi belajar yang optimal perlu untuk meningkatkan Self efficacy (efikasi diri) dalam belajar, karena dengan self efficacy tinggi mahasiswa akan : yakin dapat menyelesaikan tugas tertentu , yakin dapat memotivasi diri untuk menyelesaikan tugas, yakin bahawa dirinya mampu berusaha dengan keras,gigih dan tekun, yakin bahwa diri mampu menghadapi hambatan dan kesulitan, yakin dapat menyelesaikan tugas yang memiliki range yang luas ataupun sempit.

Bagi Dosen harus lebih inten memberikan dorongan-dorongan kepada mahasiswa agar mereka giat dalam belajar bila perlu adanya program pemberian reward kepada mahasiswa berprestasi tentu bisa meningkatkan motivasi belajar mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Juli 2016, Korelasi Pengaruh Faktor Efikasi Diri dan Manajemen Diri terhadap Motivasi Berprestasi Pada Mahasiswa Pendidikan Kimia Universitas Bengkulu2, Jurnal Manajemen Pendidikan, Volume 10,Nomer 4, Hlm 336-342
- Bandura, A, 1986, Self Efficacy ; The Exercise of Control, New York,Freman
- Bandura, Albert and Schunk, Dale.H.1981" Cultivating Competence, selfefficacy and Intrinsic Interest Though Proximal Self Motivation",Journal of Personality and Social Psychology Vol41 No 3. Halaman 586-598
- Bandura, Albert. 1989."Human Agency in Social Cognitive Theory" Americans Psychologist ,Journal of Personality and Social Psychology. Vol 44 No 9, Sep 1989 Halaman 1175-1184
- Bandura, Albert Claudio Barbaranelli, Gian Vittorio Caprara, dan Concetta Pastorelli, 2001, Self Efficacy Beliefs as Shapers Of Children's Aspiration and Career Trajectories, Child Development. Volume 72. Number 1 Halaman 187-206.
- Hartono,Budi,Asep, M.Pd, Pengaruh Konsep Diri Dan Efikasi Diri Terhadap Motivasi Berprestasi Latifah, Anis,2018, Pengaruh Konsep Diri Dan Efikasi Diri Terhadap Motivasi Berprestasi Siswa Kelas IV SD/MI Se-Gugus V Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo Tahun Ajaran 2017/2018
- McClelland, David .Clarence. 1987, Siswo Suyanto, Wihelminus, W. Bakowatun, (Penterjemah). 1987. Memacu Masyarakat Berprestasi: Mempercepat Laju Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Motif Berprestasi. Jakarta : Intermedia
- Robbins. Stephen. P. 2006. Perilaku Organisas.i Edisi Kesepuluh. Alih Bahasa: Benjamin Molan. Indonesia: Macan Jaya Cemerlang
- Robbins, Stephen. P. 1996. Perilaku organisasi : Konsep, kontroversi, aplikasi jilid 1 Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Prenhallindo
- Robbins, Stephen P, & Timothy A. Judge, 2008 . "Prilaku Organisasi Edisi 12 Buku I", Jakarta: Salemba Empat, penerjemah, Diana Angelica.

PENGARUH FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN SITUS PEMESANAN TIKET DAN HOTEL ONLINE PEGIPEGI

Danang Yudhiantoro, Ign Agus Suryono, Karyono
FEB UPN "Veteran" Yogyakarta

Abstrac

This study aims to determine and analyze the influence together or partially of trust, e-service quality, and risk perception of consumer purchasing decisions. The population in this study were all followers of the official Pegipegi facebook page. He sampled some of the followers of the official Pegipegi Facebook page. Non Probability Sampling sampling technique (purposive sampling), Consideration in choosing a sample is someone who becomes a follower of the official Pegipegi facebook page, understands the system used and has made purchases in Pegipegi. The sample size is 110 respondents. Tool for multiple regression analysis. The results of the study have a joint effect or partial trust, e-service quality, and risk perception of consumer purchasing decisions on ticket booking sites and Pegipegi online hotels.

Keywords: Trust, e-service quality, risk perception of consumer purchasing decisions, ticket booking sites and online Pegipegi hotels,

PENDAHULUAN

Pegipegi adalah salah satu biro agen perjalanan berbasis online terkemuka di Indonesia yang hadir untuk menawarkan ribuan pilihan hotel dan perjalanan dari berbagai maskapai penerbangan untuk tujuan domestik dan internasional. Cara pembayaran yang bermacam-macam dari ATM, kartu kredit sampai internet banking. Pesaing nya seperti Traveloka, Tiket.com, Agoda. Hal tersebut menyebabkan banyak perusahaan berlomba-lomba membuat layanan online atau layanan e-commerce yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh konsumen agar memudahkan dan menambah value bagi produk atau jasanya, lebih murah, dan efisien. Hal ini berdampak besar terhadap penjualan jika banyak konsumen yang berkunjung ke situs e-commerce tersebut dan mengetahui merek yang sedang ditawarkan. Kepercayaan konsumen kepada layanan yang diberikan secara online oleh suatu perusahaan akan menciptakan isu atau rumor yang beredar cepat, tidak hanya di dunia maya akan tetapi juga di dunia nyata dan hal ini akan membuat orang sadar akan keberadaan sebuah produk atau jasa dan membuat orang semakin ingin mencari tahu akan informasi produk atau jasa yang pada akhirnya akan memunculkan keputusan pembelian produk atau jasa tersebut. Pembelian adalah keputusan konsumen mengenai apakah membeli atau tidak, apa yang dibeli, kapan membeli, dimana harus membeli, dan bagaimana cara pembayarannya (Sumarwan, 2003).

Untuk memenangkan persaingan para perusahaan harus menempatkan keputusan pembelian sebagai tujuan utama, agar konsumen memutuskan untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Semakin ketatnya persaingan bisnis online mengharuskan perusahaan membangun kepercayaan, memaksimalkan e-service quality, dan

meminimalisir risiko yang muncul sehingga konsumen dapat yakin untuk melakukan pembelian pada situs online tersebut.

Pengambilan keputusan konsumen (consumer decision making) adalah proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif, dan memilih salah satu diantaranya (Setiadi, 2003). Konsumen memiliki kebebasan untuk menjatuhkan pilihan pembelian pada perusahaan penyedia barang atau jasa yang dikehendakinya.

Kepercayaan adalah hal penting ketika dua pihak terlibat dalam transaksi dan lebih penting lagi dalam transaksi e-commerce. Kepercayaan (trust) dikaitkan dengan ungkapan kepercayaan seseorang terhadap minat dan motif pihak lain (Gregg dan Walcz, 2010).

Parasuraman dkk. (2005) menyatakan definisi kualitas layanan online dalam interaksinya dengan website adalah "the extent to which a website facilities efficient and effective shopping, purchasing and delivery". Penilaian kualitas website tidak hanya saat pengalaman selama melakukan interaksi dengan website tetapi juga interaksi setelah mendapatkan layanan. Semakin besar persepsi risiko semakin besar pula kemungkinan keterlibatan konsumen pada pembelian (Engel, et.al. 1995).

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara bersama-sama kepercayaan, e-service quality, dan persepsi risiko terhadap keputusan pembelian konsumen pada situs pemesanan tiket dan hotel online Pegipegi.

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepercayaan secara individu terhadap keputusan pembelian konsumen pada situs pemesanan tiket dan hotel online Pegipegi.

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh e-service quality secara individu terhadap keputusan pembelian konsumen pada situs pemesanan tiket dan hotel online Pegipegi.

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi risiko secara individu terhadap keputusan pembelian konsumen pada situs pemesanan tiket dan hotel online Pegipegi.

TINJAUAN PUSTAKA

Keputusan Pembelian

Secara umum, keputusan adalah pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan (Schiffman & Kanuk, 2008). Dengan kata lain untuk membuat keputusan harus terdapat alternatif pilihan. Sebaliknya jika konsumen tidak memiliki alternatif untuk memilih maka tidak dapat dikategorikan sebagai pengambilan keputusan.

Tidak semua konsumen dalam mengambil keputusan memerlukan tingkat pencarian informasi yang sama. Jika dalam pengambilan keputusan memerlukan usaha yang besar, maka konsumen perlu meluangkan waktu untuk melakukan proses keputusan. Sebaliknya untuk pembelian yang sifatnya rutin cenderung merupakan peristiwa yang monoton dan menunjukkan berkurangnya tingkat kesenangan. Terdapat tiga tingkat pengambilan keputusan oleh konsumen dari usaha yang paling tinggi ke usaha yang paling rendah, yaitu: extensive problem solving, limited problem solving dan routinized response behavior (Schiffman & Kanuk, 2008).

- Pengambilan keputusan diperluas (extensive problem solving)
- Pengambilan keputusan terbatas (limited problem solving)
- Perilaku respon rutinitas (routinized response behavior)

Dalam mengevaluasi alternatif yang potensial, konsumen cenderung menggunakan dua jenis informasi, yaitu menentukan berbagai merek yang dipertimbangkan untuk dipilih dan

kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi merek. Himpunan pertimbangan terdiri dari beberapa merek yang konsumen kenal, ingat dan dapat diterima. Kriteria yang digunakan oleh konsumen dalam mengevaluasi merek yang berkaitan dengan himpunan pertimbangannya biasanya dengan melihat pentingnya atribut produk.

Aturan keputusan konsumen sering merujuk pada turunan (heuristics), strategi keputusan (decision strategies) dan strategi pemrosesan informasi (information-processing strategies), yang merupakan prosedur yang digunakan untuk memilih merek. Aturan ini memudahkan pembuatan keputusan yang kompleks. Aturan keputusan oleh konsumen dibagi menjadi dua kategori, yaitu aturan keputusan compensatory dan aturan keputusan non compensatory. Pada aturan keputusan compensatory konsumen mengevaluasi merek yang dipilih dan memberi skor pada masing-masing merek yang dipilih berdasarkan atribut produk atau jasa. Pada aturan keputusan compensatory kelebihan salah satu atribut bisa menutupi kekurangan untuk atribut yang lain. Sebaliknya pada aturan keputusan non compensatory tidak mungkin kelebihan salah satu atribut produk atau jasa untuk menutupi kekurangan pada atribut produk atau jasa yang lain. Terdapat tiga aturan non compensatory, yaitu aturan conjunctive, disjunctive dan lexicographic. Pada aturan conjunctive, konsumen menentukan tingkat minimum yang dapat diterima untuk setiap atribut. Jika terdapat nilai atribut di bawah tingkat minimum maka merek tidak dimasukkan ke dalam pertimbangan lebih lanjut. Pada aturan disjunctive, jika terdapat satu atribut yang nilainya lebih tinggi dari standar minimum yang diterima maka merek dapat diterima. Pada aturan lexicographic, konsumen meranking atribut. Kemudian konsumen membandingkan berbagai alternatif merek pada satu atribut yang paling penting. Jika skornya cukup tinggi, merek dipilih dan proses berakhir.

Terdapat empat pandangan pengambilan keputusan oleh konsumen, yaitu: economic view, passive view, cognitive view dan emotional view (Schiffman & Kanuk, 2008). Pada economic view pengambilan keputusan oleh konsumen dilakukan secara rasional. Konsumen dapat mengambil keputusan secara rasional dengan syarat: konsumen paham terhadap semua alternatif produk atau jasa, mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif produk atau jasa, dapat menentukan satu alternatif terbaik. Pada passive view digambarkan bahwa konsumen bersikap patuh pada kepentingan melayani diri sendiri dan usaha pemasaran. Konsumen dipersepsikan sebagai pembeli yang tidak rasional dan menuruti kata hati. Pada cognitive view konsumen digambarkan sebagai pemecah persoalan. Pada pandangan ini konsumen sering digambarkan sebagai penerima atau secara aktif mencari informasi produk atau jasa yang memenuhi keinginannya dan meningkatkan taraf kehidupannya. Pada emotional view digambarkan bahwa konsumen dalam memutuskan membeli memerlukan keterlibatan perasaan atau emosi. Biasanya orang membuat keputusan didasarkan pada usaha untuk mendapatkan kepuasan (Turban, 2005). Situasi keputusan seringkali diklasifikasikan berdasarkan apa yang diketahui (dipercaya) oleh pengambil keputusan tentang hasil keputusannya (Turban, 2005). Klasifikasi keputusan tersebut adalah: (1) keputusan dengan kepastian, yaitu pengambil keputusan mengetahui dengan pasti akibat/hasil dari keputusan tersebut, (2) keputusan dengan resiko, yaitu pengambil keputusan mengetahui probabilitas terjadinya hasil dari keputusan yang diambil, dan (3) keputusan dengan ketidakpastian, yaitu pengambil keputusan tidak tahu akibat/hasil dari keputusan yang diambil.

Menurut Kotler proses pengambilan keputusan model lima tahap, meliputi:

- Pengenalan masalah.
- Pencarian informasi.

Sumber informasi konsumen yaitu:

- Sumber pribadi: keluarga, teman, tetangga dan kenalan.
- Sumber komersial: iklan, wiraniaga, agen, kemasan dan penjualan.
- Sumber publik: media masa dan organisasi penilai konsumen.
- Sumber pengalaman: penanganan, pemeriksaan dan menggunakan produk.
- Evaluasi alternatif.
- Keputusan pembelian.
- Perilaku pasca pembelian.

Menurut Kotler (2009) terdapat indikator dari proses keputusan pembelian, yaitu:

- Pilihan produk atau jasa
- Pilihan merek
- Pilihan penyalur
- Jumlah pembelian
- Waktu pembelian
- Metode pembayaran

Kepercayaan

Kepercayaan merek (trust in a brand) didefinisikan sebagai keinginan pelanggan untuk bersandar pada sebuah merek dengan risiko-risiko yang dihadapi karena ekspektasi terhadap merek itu akan menyebabkan hasil yang positif (Tjahyadi, 2006).

Kepercayaan memiliki dua dimensi, yaitu kredibilitas dan benevolence. Kredibilitas didasarkan pada keyakinan akan keahlian partner untuk melakukan tugasnya secara efektif dan dapat diandalkan. Benevolence adalah suatu keyakinan bahwa maksud dan motivasi partner akan memberikan keuntungan bersama (Doney dan Canon, 1997 dalam Tjahyadi, 2006). Hal ini menjelaskan bahwa penciptaan awal hubungan dengan partner didasarkan pada trust (kepercayaan).

Menurut Lau dan Lee (dalam Yohana, 2007), terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kepercayaan terhadap merek. Ketiga faktor ini berhubungan dengan tiga entitas yang tercakup dalam hubungan antara merek dan konsumen. Adapun ketiga faktor tersebut adalah merek itu sendiri (brand characteristic), perusahaan pembuat merek (company characteristic), dan konsumen (consumer-brand characteristic) sebagai berikut:

Brand characteristic mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan pengambilan keputusan konsumen untuk mempercayai suatu merek. Hal ini disebabkan oleh konsumen melakukan penilaian sebelum membeli. Karakteristik merek yang berkaitan dengan kepercayaan merek meliputi mempunyai reputasi (brand reputation), dapat diramalkan (brand predictability), dan kompetensi merek (brand competence) (Lau dan Lee, 1999 dalam Tjahyadi, 2006). Adapun brand characteristic sendiri sebagai berikut:

- Brand reputation
- Brand predictability
- Brand competence

Company characteristic yang ada dibalik suatu merek juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut. Pengetahuan konsumen tentang perusahaan yang ada dibalik merek suatu produk atau jasa merupakan dasar awal pemahaman konsumen terhadap merek suatu produk atau jasa. Karakteristik ini meliputi kepercayaan terhadap perusahaan (trust in company), reputasi perusahaan (company reputation), motivasi perusahaan yang diinginkan (company perceived motives), dan integritas suatu perusahaan (company integrity) (Lau dan Lee, 1999 dalam Tjahyadi, 2006).

Consumer-brand characteristic merupakan dua kelompok yang saling mempengaruhi.

Karakteristik ini meliputi kemiripan antara konsep emosional konsumen dengan kepribadian merek (similarity between consumer self-concept & brand personality), kesukaan terhadap merek (brand liking), pengalaman terhadap merek (brand experience), kepuasan akan merek (brand satisfaction), dan dukungan teman (peer support) (Lau dan Lee, 1999 Tjahyadi, 2006).

Kepercayaan merek adalah persepsi akan kehandalan dari sudut pandang konsumen didasarkan pada pengalaman, atau lebih pada urutan-urutan transaksi atau interaksi yang dicirikan oleh terpenuhinya harapan akan kinerja produk dan kepuasan (Riset Costabile dalam Ferrinadewi, 2008).

Variabel kepercayaan diukur dari indikator yang mengacu, Ferrinadewi (2008) yang terdiri dari:

- Pemenuhan janji konsumen (achieving result),
- Bertindak dengan integritas (acting with integrity),
- Kepedulian (demonstrate concern)

E-Service Quality

Kualitas layanan pada lingkungan online menjadi sesuatu yang penting dalam penentuan kesuksesan atau kegagalan dari perdagangan elektronik. Voss (2003) mendefinisikan layanan dalam lingkungan elektronik (e-service) sebagai “the delivery as service using new media such as the web”. Definisi tersebut berarti penyerahan jasa dengan menggunakan media yang baru yaitu website. Keberadaan bukti dari kualitas layanan atas penyerahan melalui website merupakan kesuksesan strategi yang sangat penting di bandingkan dengan harga murah dan keberadaan web (Zeithaml dkk., 2002).

Lee & Lin (2005) mendefinisikan e-service quality merupakan sebagai tanggapan pelanggan secara keseluruhan dan penilaian mengenai keunggulan dan kualitas pengiriman e-service di pasar virtual.

Chase (2006) mendefinisikan service quality merupakan sebagai perluasan dari kemampuan suatu situs untuk memfasilitasi kegiatan belanja, pembelian dan distribusi secara efektif dan efisien.

(Zeithaml et al, 2001) dalam jurnal (Hsin Hsin Chang, 2008) e-service quality adalah sejauh mana website dapat memfasilitasi pelanggan secara efektif dan efisien dalam membeli produk atau jasa, pembelian, dan sampai dengan pengiriman produk atau jasa

Parasuraman, Zeithaml, dan Malhotra (2005) mendefinisikan e-service quality secara luas mencakup semua tahap yang dilakukan oleh konsumen dengan sebuah website dimana website tersebut memberikan fasilitas dalam berbelanja, melakukan pembelian dan sampai ke tahap pengiriman secara efektif dan efisien.

Zeithaml et al. (2013) mendefinisikan e-service quality sebagai sejauh mana sebuah website memberikan fasilitas kepada konsumen dalam melakukan kegiatan belanja, pembelian serta pengiriman secara efektif dan efisien.

Ho dan Lee (2007) menjelaskan indikator pengukuran e-service quality terdapat 5 sebagai berikut:

- Information quality
- Security
- Website functionality
- Customer relationship
- Responsiveness dan fulfillment

Persepsi Risiko

Perceived risk atau persepsi risiko didefinisikan oleh Oglethorpe (1994) sebagai

persepsi konsumen mengenai ketidakpastian dan konsekuensi-konsekuensi negatif yang mungkin diterima atas pembelian suatu produk atau jasa. Assael (1998) menyatakan bahwa *perceived risk* menjadi salah satu komponen penting dalam pemrosesan informasi yang dilakukan oleh konsumen. Konsumen semakin terdorong untuk mencari tambahan informasi ketika dihadapkan pada pembelian produk atau jasa dengan risiko tinggi. Persepsi risiko menjadi lebih tinggi ketika (Assael, 1998): Sedikit tersedia informasi mengenai produk atau jasa, Produk atau jasa tersebut merupakan yang baru, Produk atau jasa tersebut memiliki teknologi yang kompleks, Rendahnya kepercayaan diri konsumen dalam mengevaluasi merek, Tingginya harga produk atau jasa dan Produk atau jasa tersebut penting bagi konsumen.

Menurut Ferrinadewi (2008) persepsi terhadap risiko (*perceived risk*) adalah persepsi negatif konsumen atas sejumlah aktivitas yang didasarkan pada hasil yang negatif dan memungkinkan bahwa hasil tersebut menjadi nyata. Hal ini merupakan masalah yang senantiasa dihadapi konsumen dan menciptakan suatu kondisi yang tidak pasti misalkan ketika konsumen menentukan pembelian produk atau jasa yang baru.

Menurut Sciffman dan Kanuk (2008) mendefinisikan persepsi risiko sebagai ketidakpastian yang dihadapi oleh konsumen ketika mereka tidak dapat meramalkan dampak dari keputusan pembelian mereka. Persepsi risiko juga diartikan sebagai penilaian subjektif oleh seseorang terhadap kemungkinan dari sebuah kejadian kecelakaan dan seberapa khawatir individu dengan konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan kejadian tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan sikap risiko menurut Hillson & Murray Webster (2005) adalah: Kesadaran (*conscious*), Bawah sadar (*subconscious*), dan Afektif (*affective*)

Menurut Suresh AM dan Shashikala R (2011) indikator persepsi risiko adalah sebagai berikut: Risiko produk atau jasa, Risiko transaksi dan Risiko Psikologis

METODE PENELITIAN

Populasi dan sampel dan teknik sampling, Dalam penelitian ini populasi adalah seluruh followers laman facebook resmi Pegipegi. sampelnya adalah sebagian followers laman facebook resmi Pegipegi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Non Probability Method (*purposive sampling*), Pertimbangan dalam memilih sampel adalah seseorang yang menjadi followers dari laman facebook resmi Pegipegi, paham dengan sistem yang dihadirkan oleh Pegipegi dan pernah melakukan pembelian di Pegipegi. Besaran sampel berjumlah 110 responden.

HASIL PENELITIAN

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas, Hasil pengujian Validitas didasarkan nilai r hitung > r table maka secara keseluruhan item-item yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan valid dan dapat dilakukan pengujian lebih lanjut.

Uji Reliabilitas, Hasil uji reliabilitas instrument, nilai cronbach's alpha lebih besar dari 0,60. Hal ini menunjukkan hasil uji reliabilitasnya adalah semua variabelnya dapat dinyatakan handal sehingga dapat dipergunakan bagi penelitian selanjutnya.

Persamaan regresi berganda: $Y = 0,649 + 0.340X_1 + 0.830X_2 + 0.546X_3 + 1.522X_4$

Konstanta (a), Pada persamaan diatas nilai konstanta diperoleh sebesar 0,649 yang berarti bahwa jika skor pada Promosi, Kepercayaan, E Service Quality dan Persepsi resiko sama dengan nol (tidak ada perubahan) maka nilai keputusan pembelian konsumen pada situs pemesanan tiket dan hotel online Pegipegi sebesar 0.649. Koefisien regresi Promosi pada persamaan tersebut diperoleh sebesar 0.340 (*positif*), apabila Promosi yang di laksanakan

secara menarik dan berkesinambungan pada situs pemesanan tiket dan hotel online Pegipegi serta semakin ditingkatkan maka keputusan pembelian konsumen pada situs pemesanan tiket dan hotel online Pegipegi semakin meningkat. Koefisien regresi kepercayaan pada persamaan tersebut diperoleh sebesar 0.830 (positif), apabila kepercayaan yang diberikan oleh konsumen kepada situs pemesanan tiket dan hotel online Pegipegi sesuai apa yang didapatkan dan yang diterima oleh konsumen pada situs pemesanan tiket dan hotel online Pegipegi, maka keputusan pembelian konsumen pada situs pemesanan tiket dan hotel online Pegipegi semakin meningkat.

Koefisien regresi E Service Quality pada persamaan tersebut diperoleh sebesar 0.546 (positif) yang berarti bahwa E Service Quality yang dipersepsikan konsumen adalah baik dan semakin meningkat dalam cara melayani serta informative dan komunikatif maka Keputusan Pembelian konsumen pada situs pemesanan tiket dan hotel online Pegipegi semakin meningkat.

Koefisien regresi persepsi resiko pada persamaan tersebut diperoleh sebesar 0.546 (positif), persepsi resiko yang dipersepsikan konsumen adalah resiko yang ditanggung konsumen adalah seminimal mungkin maka Keputusan Pembelian konsumen pada situs pemesanan tiket dan hotel online Pegipegi semakin meningkat.

Uji F, Hasil analisis ini menunjukkan bahwa Promosi, kepercayaan, e-service quality, dan persepsi risiko secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada situs pemesanan tiket dan hotel online Pegipegi.

Uji t, hasil analisis ini menunjukkan Promosi secara individu mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada situs pemesanan tiket dan hotel online Pegipegi.

Kepercayaan secara individu mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada situs pemesanan tiket dan hotel online Pegipegi. E-service quality secara individu mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada situs pemesanan tiket dan hotel online Pegipegi. Persepsi risiko secara individu mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada situs pemesanan tiket dan hotel online Pegipegi.

Hasil uji model, Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.975 atau sebesar 97,5%, artinya kemampuan model determinasi Promosi, Kepercayaan, E Service Quality dan Persepsi Resiko mampu menjelaskan sebesar 97,5% keputusan pembelian konsumen pada situs pemesanan tiket dan hotel online Pegipegi dan sisanya sebesar 2,5 % dipengaruhi oleh variable lain diluar penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada situs pemesanan tiket dan hotel online Pegipegi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Bairizki (2017), Studi Kopalle dan Lehmann (1995) dan penelitian yang dilakukan Andrews (1989) tentang [pengaruh promosi](#) terhadap permintaan barang menyimpulkan bahwa kepercayaan dan penilaian konsumen terhadap produk atau jasa dapat dibangun dengan membina hubungan erat antara produsen dengan konsumen melalui pendekatan strategi promosi yang tepat. Mela dan Gupta (1997) mengembangkan bermacam-macam model parameter yang mempengaruhi timbulnya permintaan dan kuantitas pembelian untuk mengetahui dengan pasti apakah peningkatan promosi telah mempengaruhi keputusan pembelian ulang produk atau jasa dalam

jangka panjang yang akan meningkatkan permintaan akan produk atau jasa di pasaran. Promosi situs pemesanan tiket dan hotel online Pegipegi dilakukan secara menarik dan berkesinambungan pada akhirnya akan memudahkan konsumen dalam menilai suatu produk karena konsumen dihadapkan pada beberapa spesifikasi produk atau jasa dengan keunggulan situs pemesanan tiket dan hotel online Pegipegi.

Pengaruh Kepercayaan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepercayaan berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada situs pemesanan tiket dan hotel online Pegipegi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Bairizki (2017), Untuk dapat mempertahankan hubungan jangka panjang dengan para pembelinya, pihak penjual online perlu menganut konsep kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*). Agar dapat bertahan hidup dalam era online shop, pihak penjual online harus mempunyai pelanggan loyal (*customer loyalty*) yang percaya terhadap eksekusi jasa online shop. Seiring maraknya kejahatan internet seperti misalnya pembobolan kartu kredit dan penipuan, faktor kepercayaan (*trust*) menjadi hal yang sangat penting dalam transaksi online shop. Konsep kepercayaan ini berarti bahwa pembeli percaya terhadap keandalan pihak penjual online yang dapat menjamin keamanan bertransaksi online. Keamanan berarti bahwa transaksi penjualan online dapat dipercaya. Koufaris dan Hamton-Sosa (2002) mempelajari bagaimana pengalaman pada situs website dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen pada perusahaan itu sendiri melalui kepercayaan pada situs website. Ketika melakukan kegiatan belanja secara online konsumen banyak diberikan kebebasan dan kontrol karena mereka bebas mengakses dan memungkinkan pembeli untuk membandingkan produk atau jasa dan harga (Wolfenbarger dan Gilly, 2000). Koufaris dan Hampton-Sosa (2002) membuktikan bahwa ada hubungan positif antara kontrol, manfaat, dan kemudahan yang dirasakan dalam menggunakan situs website. Jika ada perusahaan yang situs website-nya mudah digunakan, bermanfaat, dan aman ketika digunakan konsumen cenderung akan melakukan pembelian pada situs website tersebut. Oleh karena itu jika konsumen mendapatkan pengalaman yang baik saat bertransaksi secara online dan merasa yakin akan keamanannya ketika melakukan transaksi online ataupun belanja online di sebuah online shop, maka konsumen cenderung untuk melakukan keputusan pembelian yang lebih tinggi pada situs online shop tersebut. Berdasarkan kepercayaan dan pengalaman mereka sebelumnya pada situs pemesanan tiket dan hotel online Pegipegi, mereka akan lebih suka merekomendasikan situs pemesanan tiket dan hotel online Pegipegi kepada orang lain, dibandingkan dengan mereka yang kurang percaya diri dalam berbelanja di toko online.

Pengaruh E-Service Quality Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa E Service Quality berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada situs pemesanan tiket dan hotel online Pegipegi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Bairizki (2017), Lovelock dalam Tjiptono (2011), mengemukakan bahwa kualitas layanan merupakan tingkatan kondisi baik buruknya sajian yang diberikan oleh penjual dalam rangka memuaskan konsumen dengan memberikan atau menyampaikan keinginan atau permintaan konsumen melebihi apa yang diharapkan konsumen. Menurut Rahma, dkk (2012) layanan yang diberikan oleh jasa berbeda dengan kualitas yang diberikan secara online. Meskipun produsen tidak dapat bertatap muka, namun produsen dapat memberikannya melalui penampakan produk atau jasa yang dilihat konsumen, ketepatan produk atau jasa yang ada digambar dan produk atau jasa sesungguhnya, hingga keamanan yang diberikan produsen untuk konsumen tentang data pribadi untuk keperluan mengirim produk. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Verina et

al., (2014) karena pelayanan jika tidak diiringi oleh faktor lain tidak bisa mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian melalui internet. situs pemesanan tiket dan hotel online Pegipegi memberikan pelayanan yang baik dan ramah bagi para konsumennya.

Pengaruh Persepsi Resiko Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi risiko berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada situs pemesanan tiket dan hotel online Pegipegi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Bairizki (2017), Melalui komunikasi yang baik, konsumen akan merasakan kenyamanan dan mengurangi persepsi akan risiko konsumen dalam bertransaksi, dan hal ini pada akhirnya akan mampu mempengaruhi konsumen dalam menentukan keputusan pembelian melalui social networking website. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukma (2011) yang menyebutkan bahwa persepsi risiko yang dirasakan konsumen memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan pembelian secara online.

Terkait dengan banyaknya atau adanya penipuan online, situs pemesanan tiket dan hotel online Pegipegi memperhatikan kualitas layanan dari segi proses untuk memperkecil tingkat persepsi risiko (perceived risk) pelanggan. Hal ini dikarenakan persepsi risiko mengandung ketidakpastian sebuah situasi.

KESIMPULAN

Promosi, kepercayaan, e-service quality, dan persepsi risiko secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada situs pemesanan tiket dan hotel online Pegipegi

Promosi secara individu mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada situs pemesanan tiket dan hotel online Pegipegi

Kepercayaan secara individu mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada situs pemesanan tiket dan hotel online Pegipegi

E-service quality secara individu mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada situs pemesanan tiket dan hotel online Pegipegi.

Persepsi risiko secara individu mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada situs pemesanan tiket dan hotel online Pegipegi.

SARAN

Dari variable promosi, pernyataan Saya senang mendapat potongan harga saat melakukan pembelian di Pegipegi memiliki nilai rata-rata terendah diantara pernyataan yang lain, hal ini berarti manajemen pada situs pemesanan tiket dan hotel online Pegipegi khususnya lebih sering memberi potongan harga ke konsumennya.

Dari variable kepercayaan, pernyataan Pegipegi peduli terhadap konsumen memiliki nilai rata-rata terendah diantara pernyataan yang lain, hal ini berarti manajemen pada situs pemesanan tiket dan hotel online Pegipegi, lebih memperhatikan konsumennya dan lebih peduli Hot line service dan segera merespon sumbang saran dan masukkan dari konsumen.

Dari variable E Service Quality, pernyataan Pertanyaan atau keluhan yang saya ajukan pada Pegipegi direspon dengan cepat dan sopan memiliki nilai rata-rata terendah diantara pernyataan yang lain, hal ini berarti manajemen pada situs pemesanan tiket dan hotel online Pegipegi lebih memperhatikan masukan, complain konsumen dan segera menindak lanjutinya. Dari variable persepsi risiko, pernyataan Saya tidak merasa ragu akan kesesuaian produk atau jasa yang saya beli di Pegipegi memiliki nilai rata-rata terendah diantara pernyataan yang lain, hal ini berarti manajemen pada situs pemesanan tiket dan hotel online Pegipegi lebih

memperhatikan kesesuaian produk atau jasa antara yang dipesan dengan yang didapatkan oleh konsumennya. Dari variable keputusan pembelian, pernyataan Saya melakukan pembelian di Pegipegi karena terdapat layanan customer 24 jam memiliki nilai rata-rata terendah diantara pernyataan yang lain, hal ini berarti manajemen pada situs pemesanan tiket dan hotel online PegiPegi lebih memperhatikan dan memperhatikan layanan customer 24 jam agar lebih tepat sasaran dan memberikan pelayanan terbaik.

Tabel 1. Hasil analisis Regresi linear berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Keterangan
	B	Std. Error	Beta			
(constant)	.649	.327		1.983	.050	
Promosi (X1)	.340	.310	.233	3.096	.000	Sig
Kepercayaan (X2)	.830	.322	.586	3.581	.000	Sig
E Service Quality (X3)	.546	.065	.844	8.421	.000	Sig
Persepsi Resiko (X4)	1.522	.081	.768	18.747	.000	Sig
Variabel dependen : Keputusan Pembelian (Y)						
R Square : 0,975						
Sign F : 0,000						

Sumber: Data Primer diolah, 2019

DAFTAR PUSTAKA

- Aaker, David A. Kumar, V. Day, George S., 2010, Marketing Research 9 Edition. John Wiley & Sons, Danvers.
- Aryani, Dwi dan Febrina Rosinta. 2010. Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan dalam Membentuk Loyalitas Pelanggan. Bisnis dan Birokrasi. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Mei-Agus 2010, hlm 114-126.
- Bela Dwi Kuntari, Srikandi Kumadji, Kadarisman Hidayat, 2016, Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan (Survei Pada Pelanggan Bengkel Pt Astra International Tbk – Daihatsu Malang), Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)|Vol. 36. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Christopher H Lovelock dan Lauren K. Wright, 2007, Manajemen Pemasaran Jasa , Alih bahasa Agus Widiantoro, Cetakan Kedua, Jakarta; PT. INDEKS
- Charisma Fidiansyah Putra Edriana Pangestuti Inggang Perwangsa Nuralam, 2018, Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan (Survei pada Pelanggan Bengkel AUTO 2000 Sukun Malang), Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 61, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
- Dharmmesta, Basu Swastha., Handoko, T. Hani. 2012. Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku

- Pelanggan. Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta.
- Elrado, Molden. 2014. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan, Kepercayaan, dan Loyalitas (Survey pada pelanggan yang menginap di Jambuluwuk Batu Resort Kota Batu. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 15, No. 2, Oktober 2014.
- Fandy Tjiptono, 2015. *Manajemen Jasa*. Yogyakarta: Andy offset.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Griffin, Jill. 2003. *Customer Loyalty: Menumbuhkan dan Mempertahankan Kesetiaan Pelanggan*. Alih Bahasa Dr. Dwi Kartini Yahya. Jakarta: Erlangga.
- Hurriyati, Ratih. 2008. *Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen: Fokus pada Konsumen Kartu Kredit Perbankan*. Bandung: Alfabeta.
- Indriantoro dan Supomo, 2002. *Metodologi Penelitian untuk Akuntansi dan Manajemen*, cetakan kedua, BPFE Yogyakarta
- Jasfar, Farida. 2012. *Teori dan Aplikasi Sembilan Kunci Keberhasilan Bisnis Jasa: Sumber Daya Manusia, Inovasi, Dan Kepuasan Pelanggan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kotler dan Keller. 2009. *Manajemen Pemasaran*. Jilid I. Edisi ke 13 Jakarta: Erlangga
- Kotler Philip, dan Gary Armstrong. 2014. *Principles Of Marketing*, Global Edition, 14 Edition, Pearson Education.
- Kotler Philip, dan Gary Armstrong. 2014. *Principles Of Marketing*, Global Edition, 14 Edition, Pearson Education.
- Kotler Philip dan Kevin L. Keller, 2013. *Manajemen Pemasaran Edisi 14, Global Edition*. Pearson Prentice Hall.
- Kotler dan Armstrong. 2012. *Manajemen Pemasaran*, Terjemahan oleh Bob Sabran. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Kotler Philip dan Kevin L. Keller. 2016. *Marketing Management*. Edisi ke 15. Penerbit Pearson Education Limited.
- Kotler, Philip and Kevin Lane Keller. 2008. *Manajemen Pemasaran*. Dialihbahasakan oleh: Benyamin Mollan. Edisi 12. Jakarta: PT Macanan Jaya Cemerlang.
- _____. 2009. *Manajemen Pemasaran*. Dialih bahasakan oleh Bob Sabran. Edisi 13. Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajat, 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, Edisi Keempat, Jakarta, Erlangga.
- Lupiyoadi, R. 2009. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lovelock, Christopher, Jochen Wirtz and Jacky Mussry. 2010. *Pemasaran Jasa- Perspektif Indonesia*. Alih Bahasa: Dian Wulandari dan Devri Barnadi Putera. Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Munandar, A. S. 2011. *Psikologi Industri dan Organisasi*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Parasuraman. 2003. *A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research*. USA : *Journal of Marketing*
- Paliliati, Alida. 2007. *Analisis Pengaruh Nilai Pelanggan, Kepuasan Terhadap Loyalitas Nasabah Tabungan Perbankan Di Sulawesi Selatan*. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 9, No. 1, pp. 73-81, Maret 2007.
- Purnama, Nursya'bani. 2006. *Manajemen Kualitas*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Ratnasari, Ririn Tri dan Mastuti Aksa. 2011. *Teori dan Kasus Manajemen Pemasaran Jasa*. Bogor. Ghalia Indonesia.

- Sachro dan Sri Rahayu Pudjiastuti. 2013. The Effect Service Quality to Customer Satisfaction and Customer Loyalty of Argo Bromo Anggrek Train Jakarta-Surabaya in Indonesia. *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*. Vol. 12, Issue I (Jul-Aug 2013). PP 33-38.
- Sawitri, Ni Putu, Ni Nyoman Kerti Yasa dan Abdulah Jawas. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan Tegal Sari Accommodation di Ubud. *Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis, dan Kewirausahaan*, Vol. 7, No. 1, Februari 2013.
- Tjiptono, Fandy; G. Chandra; dan D. Andriana. 2008. *Pemasaran Strategik*. Yogyakarta:ANDI.
- Tjiptono, Fandy. 2006. *Pemasaran Jasa*. Malang:Bayumedia Publishing.
- Zeithaml, V. A. And M. J. Bitner. dialih bahasakan Ratih Hurriyanti. 2013. *Bauran Pemasaran dan Loyalitas Pelanggan*, Alfabeta, Bandung.

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN PERPAJAKAN DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA UMKM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

Hari Kusuma Satria Negara, Dian Indri Purnamasari
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

LATAR BELAKANG

Besarnya penerimaan dari sektor pajak bukan hal yang mengembirakan jika dibandingkan dengan potensi penerimaan perpajakan di Indonesia. Dari tahun 2011-2013, penerimaan dari sektor perpajakan hanya terealisasi rata-rata 96% dari potensi yang ada. Pada tahun 2013 penerimaan sektor perpajakan jauh dari potensi yang ada yaitu hanya 91,31%. (Mahfud et al, 2017). Terdapat beberapa kemungkinan yang menyebabkan Wajib Pajak UMKM berlaku tidak patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Pada bulan Juni 2018, Pemerintah kembali meluncurkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut sebesar 0,5% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan (Tatik, 2018). Para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di DIY baru sekitar 25 persen alias masih minim yang mengantongi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kondisi ini berakibat sulitnya mengembangkan usahanya. Kesadaran kalangan 800.000 UMKM di DIY untuk taat aturan pajak memang masih perlu didorong dan ditingkatkan.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Harsinto dan Sarsiti (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian Fernando dan Arisman (2014) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sihombing (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian Syaiful (2016) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian terdapat penelitian yang dilakukan oleh Asfa dan Meiranto (2017) menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian Tiraada (2013) menyatakan bahwa sikap fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini ingin menguji secara empiris apakah terdapat pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2011), menyatakan bahwa pajak memiliki beberapa unsur yaitu (1) luran dari rakyat kepada Negara, dalam pengertian tersebut yang berhak memungut pajak hanyalah Negara dalam bentuk uang (bukan barang). (2) Berdasarkan Undang-undang, hal tersebut dimaksudkan pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya. (3) Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang dapat ditunjukkan secara langsung, sehingga dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. (4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yang meliputi pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi rakyat atau masyarakat luas.

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan, pajak merupakan penerimaan negara yang berasal dari rakyat yang secara tidak langsung dikembalikan lagi kepada rakyat melalui pengeluaran umum negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama yang telah diatur dalam Undang-undang (Jatmiko, 2018). Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2010). Safitri Narmantu mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Narmantu dalam Rahayu, 2010).

Ererd dan Feinstin mengartikan kepatuhan wajib pajak menggunakan teori psikologi yaitu sebagai rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan bebas pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah (Ererd dan Feinstin dalam Devano, 2006). Abdul Rahman mengartikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahman, 2010). Menurut James dan Alley (dalam Cahyadi dan Jati, 2016) definisi kepatuhan wajib pajak secara sederhana adalah pembayaran pajak oleh wajib pajak yang disesuaikan dengan hukum perpajakan yang berlaku. Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban bidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Cahyadi dan Jati, 2016).

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran) (Kumadji, dkk. 2014). Kaitannya dengan perpajakan, pengetahuan adalah segala sesuatu mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Fermatasari, 2013). Khasanah (2014) menyatakan beberapa konsep tentang pengetahuan pajak diantaranya pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dan mengenai fungsi perpajakan. Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah

hukuman kepada orang yang melanggar peraturan perpajakan.

Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu fiskus adalah petugas pajak. Dengan demikian pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak (Santi, 2012). Apabila pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak tidak memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak, berarti pelayanan yang diberikan tidak berkualitas.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh aparat pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena itu, kualitas pelayanan digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini. Pelayanan yang berkualitas akan memberikan kepuasan kepada wajib pajak sehingga akan menjadi patuh dalam memenuhi kewajibannya kembali. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak (Gresandi, 2018).

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Resmi (2009) menyatakan bahwa pengetahuan akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengimplementasikannya dalam kewajiban membayar pajak, serta mengetahui mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang meliputi bagaimana melakukan pembayaran pajak, tempat pembayaran, batas waktu pembayaran denda dan pelaporan SPT.

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak (Budiartha, 2013).

Hasil penelitian Mintje (2016), menunjukkan bahwa hubungan antara pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dari penjelasan yang ada dapat diambil kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan dapat membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, maka dari itu hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Motivasi atau dorongan yang berasal dari luar diri seseorang atau individu lain dapat mempengaruhi perilaku orang tersebut termasuk wajib pajak. Pelayanan sendiri merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2003). Terdapat hubungan yang terkait antara kualitas pelayanan fiskus yang diberikan aparat pajak terhadap perilaku yang ditunjukkan wajib pajak. Pelayanan yang baik dari aparat pajak tentunya akan memberikan pengaruh dan motivasi positif bagi wajib pajak untuk berperilaku patuh.

Pelayanan fiskus yang dianggap berbelit-belit mengakibatkan wajib pajak enggan untuk membayarkan pajaknya. Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak harus adil, sederhana, efisien, dan tidak berbelit-belit agar wajib pajak merasa nyaman melakukan pembayaran perpajakannya. Namun dengan pelayanan fiskus yang prima belum sepenuhnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu kualitas pelayanan harus selalu ditingkatkan. Hasil penelitian Asfa (2017), menunjukkan bahwa hubungan antara pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dari penjelasan yang ada dapat diambil kesimpulan bahwa pelayanan fiskus dapat membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, maka dari itu hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H2: Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Dalam menyusun penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Operasional Variabel

Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai perilaku Wajib Pajak yang merujuk pada tingkat ketaatannya dalam menunaikan kewajiban perpajakan, baik dalam perhitungan, penyeteroran, maupun pelaporan pajak terutang. Variabel ini dapat diukur dengan empat indikator Wajib Pajak patuh yang meliputi pendaftaran NPWP (Pernyataan nomor 1), penghitungan pajak terutang (Pernyataan nomor 2 dan 3), pembayaran pajak (Pernyataan nomor 5), dan pelaporan SPT (Pernyataan nomor 4). Menggunakan skala likert empat poin yaitu 1-4. Pengukuran variabel ini adalah dengan melihat skor rata-rata. Wajib Pajak dikatakan patuh jika memiliki skor di atas skor rata-rata. Kuesioner yang digunakan merupakan data diolah oleh peneliti yang didapatkan dari sumber penelitian Ayuningtyas (2017).

Pengetahuan Perpajakan adalah kemampuan dalam mengetahui peraturan perpajakan berdasarkan undang-undang (Jatmiko, 2018). Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat (Erawati, 2017). Indikator untuk variabel pengetahuan pajak yang dikutip dari penelitian Jatmiko (2018), yaitu: Kemampuan dalam mengetahui peraturan perpajakan berdasarkan undang-undang (Pernyataan nomor 1, 3, 4, 5 dan 6) dan Wajib Pajak mengetahui manfaat pajak yang dibayar (Pernyataan nomor 2 dan 7). Menggunakan skala likert empat poin yaitu 1-4

Pelayanan Fiskus adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, atau pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat (Santoso, 2008). Indikator yang digunakan dalam variabel pelayanan fiskus yang dikutip dari penelitian Gresandi (2018) yaitu: sikap pegawai pajak (Pernyataan nomor 1), cara pegawai melayani wajib pajak (Pernyataan nomor 3 dan 5), pemberian informasi kepada wajib pajak (Pernyataan nomor 2 dan 4). Menggunakan skala likert empat poin yaitu 1-4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pilot Test

Sebelum kuesioner diberikan kepada responden yang sesungguhnya, peneliti melakukan pilot test untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen serta menghindari pertanyaan yang kurang jelas, persepsi yang berbeda atas pertanyaan, dan mengetahui waktu yang diperlukan untuk mengisi kuesioner. Pilot test dilakukan terhadap 30 responden yang terdiri dari mahasiswa Magister Manajemen, dengan pertimbangan dan asumsi sudah bekerja, memiliki penghasilan, dan memiliki NPWP. Adapun hasil pilot tes adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Pengujian Pilot Test

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,821	Reliabel
Pelayanan Fiskus	0,904	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,836	Reliabel

Hasil tabel pengujian Pilot Test menunjukkan bahwa dengan 30 responden mahasiswa Magister Manajemen secara keseluruhan pertanyaan dalam kuesioner ini adalah reliabel. Penelitian dengan variabel, yaitu pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan kepatuhan wajib pajak adalah reliabel untuk seluruh item pertanyaan. Demikian halnya dengan pengujian validitas yang menunjukkan bahwa keseluruhan item pertanyaan pada masing-masing variabel berkorelasi signifikan dengan tingkat signifikansi 5%, sehingga kesemuanya valid.

Analisis Data

Dalam kurun waktu penelitian, responden yang mengembalikan dan siap dianalisis sejumlah 163 responden, yaitu pengusaha atau wajib pajak UMKM di Yogyakarta. Keseluruhan responden sesuai dengan kriteria yang disyaratkan dalam penelitian ini dan siap dianalisis, yaitu memiliki NPWP, omzet UMKM, pembayaran PPh Final Tarif 1%, dan berdomisili usaha di Yogyakarta.

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis

Coefficients ^a				
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		ig.
	B	Std. Error	eta	
1	(Constant)	14.849	.811	
	Pengetahuan Perpajakan	.108	.061	161
	Pelayanan Fiskus	.108	.069	133
a. Dependent	Variable: Kepatuhan			

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan secara statistik menunjukkan hasil $> 0,05$ yang artinya tidak signifikan atau hipotesis ditolak, hasil menunjukkan tidak terdapat pengaruh variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak ternyata tidak mampu meningkatkan bahkan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian sebelum-sebelumnya. Hal tersebut sangat mungkin terjadi karena beberapa hal, antara lain pengetahuan yang sangat mungkin standar tanpa diikuti pengetahuan dan kesadaran akan risiko perpajakan, bahkan sangat mungkin wajib pajak merasa UMKM dengan omset tidak besar sehingga tidak mempengaruhi sektor target dan penerimaan negara dari pajak. Wajib pajak hanya sekedar tahu akan pengetahuan perpajakan, tanpa ada implikasi untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus secara statistik menunjukkan hasil $> 0,05$ yang artinya tidak signifikan atau hipotesis ditolak, hasil menunjukkan tidak terdapat pengaruh variabel pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini tidak sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya, sangat dimungkinkan pelayanan fiskus merupakan hal yang sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan di Perpajakan dan Departemen Keuangan, sehingga hal tersebut bukan merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak perlu diajak patuh dengan cara-cara persuasif bentuk yang lain agar mau datang dan merasakan perubahan pelayanan fiskus di Kantor Pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa:

- Tidak terdapat pengaruh variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Tidak terdapat pengaruh variabel pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain jumlah responden yang belum mewakili keseluruhan jumlah wajib pajak UMKM di Yogyakarta, dan belum terbagi dalam beberapa wilayah KPP Pratama. Sehingga dalam penelitian selanjutnya peneliti dalam memperpanjang periode waktu penelitian, bekerjasama dengan kantor pajak, khususnya di bagian helpdesk yang banyak didatangi oleh wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, A. B. 2017. Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Surakarta. Jurnal Akuntansi. Universitas Islam Indonesia.
- Asfa, Esti R.; Wahyu M. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Diponegoro Journal Of Accounting, 6(3), 1-13.
- Boediono, B. 2003. Pelayanan Prima Perpajakan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Boediono, B. 2011. Pelayanan Prima Perpajakan. Jakarta: Rineka Cipta
- Cahyadi, I Made Wahyu., I Ketut Jati. 2016. Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 16, 2342-2373.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu. Kencana, Jakarta.
- Fernando; Arisman, Anton. 2014. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan,

- dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*. STIE Multi Data Palembang.
- Gardina, Trisia; Haryanto, Dedy. 2006. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Modus*, Vol. 18 (1), hal. 10-18.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 29. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harsinto, P.; Sarsiti. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Pengenaan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di KPP Pratama Boyolali. *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta*, 15(4).
- Hendri, Nedi. 2016. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada UMKM Di Kota Metro. *AKUISISI*, 12(1). *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Metro*.
- Ira. 2018. Kesadaran Pajak UMKM di DIY Masih Rendah. <https://www.krjogja.com>. Diakses pada 9 Desember 2018.
- Laraswati, M.; Siti N. & Hendro S. 2017. Pengaruh Pemahaman Sistem E-Billing, Kualitas Pelayanan, Dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Mebel Di Kabupaten Sukoharjo. Makalah dipresentasikan di Seminar Nasional IENACO.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan: Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Mintje, M.S. 2016. Pengaruh Sikap, Kesadaran, Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP). *Jurnal EMBA*, 4(1), 1031-1043.
- Muliari, N.K. dan Setiawan, P.E. 2010. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Fakultas Ekonomi Universitas Udanaya*.
- Nasution, Chairuddin Syah. 2003. "Analisis Potensi Dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Di Indonesia Periode 1990 – 2000". *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, Vol. 7, No. 2.
- Nurmantu, Safri. 2010. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor
- Paramartha, I Putu Indra. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi*, 15 (641 – 666). Universitas Udayana.
- Rahayu, Nurulita. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 10. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Santoso, Wahyu. 2008. Analisis Risiko Ketidak Patuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak: Penelitian Terhadap Wajib Pajak Badan Di Indonesia. Vol 5, Nomer 1.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Hukum Pajak Elementer, Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Situmorang, Patricia M.B. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Administrasi Bisnis*. Universitas Diponegoro.

- Sujaweni, V. Wiratna. 2016. Implementasi Penentuan Harga Pokok Produksi Untuk Mencapai Laba Optimal (Studi Pada Sentra UKM Industri Di Wilayah Minomartani Sleman Yogyakarta). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 4(3), 12 – 16. Universitas Respati Yogyakarta.
- Susanto, Agung Nugroho. (2011). Analisis Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penerapan Sistem E-filing Direktorat Jendral Pajak. Jakarta: Tesis Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik UI.
- Syaiful, Renando. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Negeri Padang.
- Tambunan, V. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pelayanan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Yang Terdaftar Di KPP Pratama Batam. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Putera Batam.
- Tatik. 2018. Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA) 8. Purwokerto.
- Tiraada, T.A.M. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Tumuli, Apriliani Kasandra, dkk. 2016. Analisis Penerapan E-SPT dan E-Filing dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal EMBA Vol.4 No.3 September 2016*, Hal. 102-112 ISSN 2303-1174.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Utami, S.R.; Andi; Soerono, A.N. 2012. Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.
- Utomo, Joko, Suwardi. 2011. Pengaruh Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja, dan Komitmen Organisasional Terhadap Kinerja Pegawai (Study Pada Pegawai Setda Kabupaten Pati). *Analisis Manajemen*. 5(1):75-86.
- Wiyono, Adrianto Sugiarto. (2008). "Evaluasi Perilaku Penerimaan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-filing Sebagai Sarana Pelaporan Pajak Secara Online dan Realtime." *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol. 11 (2) Hal. 117 – 132.
- Yuda, Alfi. 2017. Pengaruh Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*. UPN 'Veteran' Yogyakarta.

KAJIAN TEORETIS TENTANG MANAJEMEN LABA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP CREDIT RATING

Indra Kusumawardhani, Windyastuti

Jurusan Akuntansi-Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Yogyakarta

email: indra.kusumawardhani@upnyk.ac.id , windyastuti.wijaya@upnyk.ac.id

Abstract

Credit rating is a statement about the state of the debtor and the possibility of what can be done in connection with the debt owned. A higher credit rating has several benefits for both firms and investors. Managers who successfully improve their credit rating through earnings management see a reduction in their cost of debt. Earnings management can be conducted through accruals and real activities manipulation. Having a higher credit rating also nullifies restrictions imposed on certain investors from investing in the firm. There is a potential for firms to engage in earnings management to influence a credit change.

Keywords: credit rating, earnings management, accruals, real activities manipulation

PENDAHULUAN

Penelitian tentang akuntansi telah banyak menguji bagaimana pelaku pasar yang berbeda menginterpretasikan dan menggunakan informasi yang disajikan oleh akuntan. Salah satu kelompok pengguna laporan keuangan yang terkadang masih diabaikan dalam banyak literatur adalah agen pemeringkat utang. Agen pemeringkatan (rating agency) memainkan peran penting dalam pasar keuangan dan ekonomi secara keseluruhan, seperti yang sudah dilakukan pada saat krisis tahun 2008. Agen pemeringkatan menggunakan informasi yang diberikan oleh manajemen perusahaan yang diberi peringkat dan laporan keuangan perusahaan yang diberi peringkat untuk menghasilkan peringkat (rating) mengenai creditworthiness (kelayakan kredit) perusahaan secara keseluruhan dan untuk tujuan penerbitan utang tertentu. Pemeringkatan ini secara akurat merepresentasikan opini agen pemeringkatan mengenai kelayakan kredit sebuah perusahaan, mengkondisikan kemampuan mereka untuk menginterpretasikan dengan baik informasi yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan.

Hubungan teoretis antara kualitas informasi akuntansi dengan peringkat kredit dapat ditentukan dengan pemahaman atau tujuan dari peringkat kredit. Agen pemeringkatan bereputasi seperti Standard and Poor's (rater/pemeringkat) mendefinisikan peringkat kredit penerbit jangka panjang domestik sebagai opini dari kemampuan keseluruhan ratee (perusahaan yang diberi peringkat) untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Kemampuan pihak yang diberi peringkat untuk menghasilkan arus kas sekarang dan masa depan kemungkinan adalah faktor yang paling penting dalam menilai kemampuan pihak yang diberi peringkat untuk membayar pokok pinjaman dan bunga utang sekarang dan masa depan. Salah satu sumber informasi utama dari informasi arus kas adalah laporan keuangan perusahaan. Standards and Poor's (S&P) menyatakan bahwa mereka mendasarkan pada laporan keuangan perusahaan yang diperingkat dalam menentukan peringkat. Dalam lingkungan perusahaan

yang sudah memperdagangkan sahamnya secara publik, laporan keuangan akan disusun dan disajikan sesuai dengan Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) atau standar akuntansi keuangan yang berlaku, oleh karena itu ada kemungkinan mengandung akrual. Akrual memberi kemungkinan perusahaan untuk melakukan manipulasi angka dalam laporan keuangan. Sebagai hasilnya, diskresi yang dilakukan menurut GAAP secara potensial dapat menurunkan kemampuan agen pemeringkatan untuk bisa memprediksi secara akurat arus kas masa depan perusahaan yang diperingkat dan dapat mempengaruhi peringkat kredit perusahaan yang diperingkat.

Literatur akuntansi juga mengidentifikasi manajemen laba riil sebagai metoda yang dilakukan manajer untuk dapat melakukan manipulasi informasi laporan keuangan. Lebih lanjut, Zang (2012) menyatakan bahwa manajemen laba riil telah dilihat sebagai tindakan substitusi untuk manajemen laba berbasis akrual. Untuk dapat memperoleh pemahaman yang baik mengenai apakah mempengaruhi peringkat kredit, baik kualitas akrual maupun manajemen laba riil perlu untuk diuji bersama-sama. Manajemen laba riil diukur dengan abnormal cash flows from operations, abnormal production costs, abnormal discretionary expenditures (Roychowdhury 2006; Cohen and Zarowin 2010; Zang 2012; Zhao, Chen, Zhang, and Davis 2012; Siriviriyakul 2013).

DEFINISI MANAJEMEN LABA DAN CREDIT RATING

Manajemen Laba

Pada dasarnya manajemen laba (earnings management) memiliki banyak definisi. Tidak ada konsensus tentang definisi tunggal mengenai manajemen laba. Namun dalam konteks penelitian ini, manajemen laba lebih didefinisikan kepada bagaimana upaya-upaya manajemen dalam menggunakan pertimbangannya dalam menyusun laporan keuangan, sehingga dapat menyesatkan stakeholders dalam menilai kinerja perusahaan atau dapat mempengaruhi pendapatan yang telah ditetapkan berdasarkan angka-angka laporan keuangan (Healy dan Wahlen 1999).

Menurut Annisaa'rahman dan Yanti (2007) banyak teknik manajemen laba yang telah menjadi pusat berbagai penelitian seperti Copeland dan Wojdak (1969) menggunakan perubahan perlakuan akuntansi dalam mendeteksi pengelolaan laba, Bremser (1975) menggunakan perbandingan EPS dan ROI antar dua kelompok perusahaan. Healy (1985), Jones (1991), Dechow dan Sloan (1991) menggunakan metode akrual non diskresioner. Sweeney (1994) menggunakan pengujian langsung atas penggunaan metode akuntansi tertentu. Eckel (1981) menggunakan indeks Eckel. Bauman et al. (2001) dan Burgstahler (2002) menggunakan model distribusi laba. Schilit (2002) memperkenalkan teknik pengelolaan laba. Dan yang diperkenalkan oleh Roychowhury (2006) adalah deteksi manajemen laba melalui manipulasi aktivitas real.

Manajemen laba adalah suatu bentuk penyimpangan dalam proses penyusunan laporan keuangan, yaitu mempengaruhi tingkat laba yang ditampilkan dalam laporan keuangan. Abdelghany (2005) menjelaskan bahwa earning management merupakan manipulasi pendapatan yang dilakukan untuk memenuhi target yang ditetapkan manajemen. Sementara Lo (2008) mengelompokkan earnings management dalam dua katagori yakni real earning management seperti tindakan untuk mempengaruhi arus kas, dan accrual management melalui perubahan dalam estimasi dan kebijakan akuntansi. Peneliti lain yaitu Jiraporn, et al. (2006) mengelompokkan earnings management ke dalam dua kelompok yakni beneficial earning management dan opportunistic earning management.

Ada berbagai motivasi yang mendorong dilakukannya manajemen laba. Positive Accounting Theory mengusulkan tiga hipotesis motivasi manajemen laba, yaitu: bonus plan

hypothesis, debt covenant hypothesis, dan political cost hypothesis (Watts dan Zimmerman, 1986).

Bonus Plan Hypothesis

Bonus Plan Hypothesis menyatakan bahwa manajer yang memiliki insentif akuntansi, atau remunerasi yang terikat dengan kinerja akuntansi perusahaan akan cenderung memanipulasi metode dan angka akuntansi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik dari yang seharusnya. Seperti manajer memilih untuk menggunakan metode penyusutan yang berbeda, memungkinkan keuntungan yang lebih rendah di awal dan keuntungan yang lebih menjelang akhir.

Debt Equity Hypothesis

Dalam hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan utang, maka kecenderungannya adalah semakin besar kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Makin tinggi rasio hutang atau ekuitas perusahaan, makin besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Makin tinggi rasio hutang atau ekuitas makin dekat perusahaan dengan batas perjanjian atau peraturan kredit. Makin tinggi batasan kredit makin besar kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Manajer akan memiliki metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis.

Political Cost Hypothesis

Political cost hypothesis memperkenalkan suatu dimensi politik pada pemilihan kebijakan akuntansi. Perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba periodik dibanding perusahaan kecil. Biasanya biaya politis diprosikan dengan ukuran perusahaan. Menurut Yip, et al.(2011) dalam teori political cost, perusahaan besar akan besar kemungkinan menggunakan metode akuntansi yang mengurangi laba yang dilaporkan dan atau membuat pengungkapan lain untuk mengurangi biaya politis.

Sedangkan Scott (2009) mengemukakan beberapa motivasi terjadinya manajemen laba, yaitu:

1. Bonus purposes
Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak secara oportunistik untuk melakukan manajemen laba dengan memaksimalkan laba saat ini.
2. Political motivation
Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.
3. Taxation motivation
Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan untuk penghematan pajak pendapatan.
4. Pergantian CEO
CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.

5. Initial Public Offering (IPO)

Perusahaan yang akan go public belum memiliki nilai dasar, dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan go public melakukan manajemen laba dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.

6. Pentingnya memberi informasi kepada investor

Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar investor tetap menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik.

Menurut Scott (2009) manajemen laba dilakukan dengan pola sebagai berikut :

- Taking a bath

Taking a bath adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba perusahaan pada periode berjalan menjadi sangat ekstrim rendah (bahkan rugi) atau sangat ekstrim tinggi dibandingkan dengan laba pada periode sebelumnya atau sesudahnya.

Minimalisasi laba (income minimization)

Minimalisasi laba (income minimization) adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih rendah daripada laba sesungguhnya.

Maksimisasi laba (income maximization)

Maksimisasi laba (income maximization) adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih tinggi dari pada laba sesungguhnya.

Perataan laba (income smoothing)

Perataan laba (income smoothing) adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode-periode tertentu menunjukkan fluktuasi yang normal dalam rangka mencapai kecenderungan atau tingkat laba yang diinginkan.

Timing Revenue and Expenses Recognition.

Teknik ini dilakukan dengan membuat kebijakan tertentu yang berkaitan dengan timing suatu transaksi, misalnya pengakuan premature atas pendapatan.

Salah satu teknik pengelolaan laba yang biasa digunakan manajemen adalah akrual. Akrual merupakan selisih antara kas masuk bersih dari hasil operasi perusahaan dengan laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan bisa bersifat akrual non diskresioner atau akrual diskresioner. Laporan keuangan disusun berdasarkan proses akrual, sehingga angka-angka laporan keuangan akan mengandung komponen akrual, baik yang diskresioner maupun yang non diskresioner.

Manajemen laba dapat dilakukan dengan cara manipulasi akrual murni yaitu dengan discretionary accrual yang tidak memiliki pengaruh terhadap arus kas secara langsung (Roychowdhury, 2006). Namun akrual diskresioner ini tidak bisa diobservasi langsung dari laporan keuangan. Biasanya manajemen akrual dilakukan pada akhir periode ketika manajer mengetahui laba sebelum direkayasa sehingga dapat mengetahui berapa besar manipulasi yang diperlukan agar target laba tercapai. Model manajemen laba yang biasa digunakan antara lain. Model Healy, model de Angelo, Model Kothari, model Jones, Model Dechow (Modified Jones) dll.

Berbeda dengan manajemen laba akrual, manajemen laba riil dilakukan dengan cara memanipulasi aktivitas riil serta memiliki dampak langsung terhadap arus kas perusahaan.

Manajemen laba riil ini juga cenderung lebih sulit untuk dipahami oleh investor dan biasanya kurang menjadi perhatian dari auditor, regulator, dan pihak yang berkaitan lainnya (Kim dan Sohn 2013). Manipulasi aktivitas akrual didefinisikan sebagai aksi manajemen yang mendeviasikan dari praktik bisnis normal yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mencapai target laba tertentu (Roychowdhury 2006).

Roychowdhury (2006) memperkenalkan teknik pengelolaan laba yang disebut dengan manipulasi aktivitas real, yang didefinisikan sebagai perbedaan praktek operasi yang dilakukan dengan praktek-praktek operasi normal, dimotivasi oleh keinginan manajemen untuk memberikan pemahaman yang salah kepada stakeholders agar stakeholders percaya bahwa tujuan pelaporan keuangan tertentu telah dicapai sesuai praktek operasi normal perusahaan. Perbedaan yang dilakukan ini tidak memberikan kontribusi terhadap nilai perusahaan, meskipun dengan tindakan ini memungkinkan manajer mencapai tujuan pelaporan. Manipulasi aktivitas real seperti memberikan diskon harga, penurunan pengeluaran diskresioner yang mungkin merupakan tindakan optimal pada kondisi tertentu.

Namun jika hal tersebut dilakukan secara lebih ekstensif dari aktivitas normalnya dengan tujuan untuk mencapai target laba, maka tindakan seperti ini dapat dikategorikan sebagai manipulasi aktivitas real. Konsisten dengan definisi Roychowdhury (2006), Graham et al. (2005) menemukan bahwa eksekutif keuangan memberikan perhatian yang besar terhadap target laba seperti laba nol, laba periode sebelumnya, dan ramalan analisis;

setelah itu mereka akan melakukan manipulasi aktivitas real untuk mencapai target ini, meskipun tindakan pengelolaan ini secara potensial mengurangi nilai perusahaan. Tindakan yang dilakukan dalam periode sekarang yang bertujuan untuk meningkatkan laba, akan memiliki efek negatif terhadap arus kas pada periode mendatang. Produksi yang melebihi produksi normal (*overproduction*) menghasilkan kelebihan persediaan yang seharusnya dijual pada periode berikutnya, dan mendorong tingginya biaya pemeliharaan persediaan perusahaan.

Dalam mendeteksi manipulasi aktivitas real yang dilakukan perusahaan, Roychowdhury (2006) menggunakan model Dechow et al. (1998) dan fokus pada 3 metode pengelolaan yaitu:

1. Pengelolaan penjualan, didefinisikan sebagai usaha manajemen untuk meningkatkan penjualan secara temporer dengan menawarkan diskon harga dan memperlunak kredit yang diberikan. Contohnya, peningkatan volume penjualan sebagai hasil dari penawaran diskon harga pada waktu tertentu akan menyebabkan arus kas masuk menjadi besar, namun arus kas masuk per penjualan, diskon bersih dari tambahan penjualan, lebih rendah dari arus kas per normal penjualan atau dengan kata lain terjadi penurunan margin. Cara lain yang dilakukan manajemen untuk meningkatkan volume penjualan adalah dengan menawarkan kredit lunak, seperti menawarkan tingkat bunga kredit yang lebih rendah (*zero-percent financing*) pada akhir tahun fiskal. Hal ini akan meningkatkan laba atau arus kas masuk perusahaan seketika.
2. Mengurangi pengeluaran diskresioner seperti *research and development* (R&D), iklan, dan pemeliharaan yang secara umum merupakan beban pada periode terjadinya pengeluaran tersebut. Dengan demikian perusahaan dapat mengurangi beban yang dilaporkan sehingga akan meningkatkan laba. Contoh pengelolaan yang biasa dilakukan manajemen terkait dengan pengeluaran diskresioner adalah jika pengeluaran atas beban diskresioner dalam bentuk kas, maka pengurangan pengeluaran ini akan memperkecil arus kas keluar dan akan memiliki dampak positif terhadap *abnormal Cash Flow from Operation* (CFO) pada

periode sekarang, namun mungkin sebaliknya juga akan menimbulkan resiko rendahnya arus kas dimasa yang akan datang.

3. Overproduction, meningkatkan produksi dengan tujuan melaporkan Cost of Goods Sold (COGS) yang lebih rendah. Dengan tingginya level produksi, biaya tetap disebar pada unit yang besar, sehingga menghasilkan nilai biaya tetap per unit yang lebih rendah. Sepanjang penurunan pada biaya tetap per unit tidak dapat ditutupi oleh peningkatan biaya marginal per unit, total biaya per unit menurun. Hal ini menyebabkan COGS yang dilaporkan lebih rendah, dan perusahaan dapat melaporkan margin operasi yang lebih baik

Credit Rating

Menurut Manurung (2008), rating merupakan salah satu variabel yang diperhatikan oleh investor ketika memutuskan untuk melakukan investasi pada suatu perusahaan. Informasi yang terkandung dalam rating akan menunjukkan sejauh mana kemampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajibannya atas dana yang diinvestasikan oleh investor. Perusahaan yang memiliki rating yang tinggi, biasanya lebih disukai oleh investor dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki rating yang sangat rendah. Oleh sebab itu, agar obligasi suatu perusahaan yang memiliki rating yang cukup rendah, dapat dijual di pasar, maka biasanya investor akan menuntut suatu premi yang lebih tinggi, sebagai suatu kompensasi atas risiko yang ditanggung oleh investor.

Tujuan utama proses rating adalah memberikan informasi akurat mengenai kinerja keuangan, posisi bisnis industri perseroan yang menerbitkan surat hutang (obligasi) dalam bentuk peringkat kepada calon investor (Rahardjo, 2004). Credit Rating Agency adalah suatu perusahaan yang menerbitkan peringkat kredit bagi para penerbit obligasi. Peringkat kredit tersebut mengukur kelayakan kredit, kemampuan pembayaran kembali hutang, dan berpengaruh pada suku bunga yang dibebankan pada utang tersebut.

Perusahaan juga dapat menggunakan credit rating sebagai alat untuk meningkatkan citra merek atau citra pasar perusahaan tersebut. Perusahaan dengan rating yang baik memasuki pasar dengan keyakinan lebih tinggi. Selain itu, penggunaan rating yang efektif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena mempromosikan investasi publik di sektor korporasi. Oleh karena itu setiap model penelitian yang dapat meramalkan credit rating perusahaan akan membawa dampak baik yang besar untuk masyarakat umum (yang mencari peluang untuk berinvestasi) dan perusahaan itu sendiri (yang berusaha untuk mencapai tujuan perusahaan).

Manfaat umum dari proses credit rating adalah (Rahardjo, 2004):

- Sistem informasi keterbukaan pasar yang transparan yang menyangkut berbagai produk obligasi yang sehat dan transparan juga.
- Efisiensi biaya. Hasil rating yang bagus biasanya memberikan keuntungan, yaitu menghindari kewajiban persyaratan keuangan yang biasanya memberatkan perusahaan seperti penyediaan sinking fund, ataupun jaminan asset.
- Menentukan besarnya coupon, semakin bagus rating cenderung semakin rendah nilai coupon dan begitu pula sebaliknya.

Dengan melakukan analisis dari segi keuangan atau manajemen dan bisnis fundamentalnya, setiap investor akan dapat menilai kelayakan bisnis usaha emiten tersebut. Selain itu, investor akan dapat menilai tingkat risiko yang timbul dari investasi tersebut. Beberapa manfaat rating bagi investor adalah sebagai berikut :

Informasi risiko investasi. Tujuan utama investasi adalah untuk meminimalkan risiko serta mendapatkan keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu, dengan adanya credit rating diharapkan informasi risiko dapat diketahui lebih jelas posisinya.

Rekomendasi investasi. Investor akan dengan mudah mengambil keputusan investasi berdasarkan hasil rating. Dengan demikian investor dapat melakukan strategi investasi yang akan membeli atau menjual surat berharga sesuai perencanaannya.

Perbandingan. Hasil rating akan dijadikan patokan dalam membandingkan surat berharga yang satu dengan yang lain, serta membandingkan struktur yang lain seperti suku bunga dan metode penjaminannya.

Dalam melakukan proses rating, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis rating adalah (Rahardjo, 2004):

- Kinerja Industri.
Dibahas mengenai aspek persaingan industri, prospek dan pangsa pasar, adanya ketersediaan bahan baku, struktur industri yang kuat, pengaruh kebijakan pemerintah dan kebijakan ekonomi lainnya.
- Kinerja Keuangan.
Aspek kualitas asset rasio profitabilitas, pengelolaan asset dan pasiva rasio kecukupan modal, tingkat pengelolaan hutang, rasio kecukupan pembayaran bunga.
- Kinerja Non Keuangan.
Aspek manajemen, reputasi perusahaan, serta perjanjian indenture (meliputi sinking fund, debt test, dividend test, merger, dan sale of asset).

Di Indonesia, perusahaan yang mendapat izin serta menjadi market leader dalam pemberian rating adalah PT. PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia). PT PEFINDO bekerja sama dengan perusahaan rating di luar negeri yaitu Standard and Poor. Perusahaan ini mempunyai kewajiban harus mempunyai technical assistant dari perusahaan rating di luar negeri. Selain itu, belakangan ini juga terdapat perusahaan baru yang memiliki bidang usaha serupa yaitu Fitch Rating Indonesia dan ICRA (Indonesia Credit Rating Indonesia). Credit rating merupakan opini dari lembaga pemeringkat serta sumber informatif bagi pemodal atas risiko sekuritas yang diperdagangkan (Berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan Lembaga keuangan Kep-151/BL/2009). Informasi peringkat tersebut diharapkan dapat membantu investor dalam mengambil keputusan investasi.

Fungsi utama lembaga pemeringkat adalah memberikan rating yang obyektif, independen dan kredibel terhadap risiko kredit dari sekuritas pinjaman (debt) yang diterbitkan secara umum melalui kegiatan rating. Lembaga pemeringkat juga menghasilkan dan mempublikasikan informasi kredit berkaitan dengan pasar modal pinjaman. Publikasi ini meliputi opini kredit terhadap emiten obligasi dan sektor-sektor yang berkaitan. Proses penilaian rating ini dilakukan dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan informasi non keuangan, antara lain operasional perusahaan, manajemen perusahaan, laporan keuangan perusahaan, dan perencanaan perusahaan. Beberapa rating obligasi yang dikeluarkan oleh lembaga rating, antara lain (Manurung, Silitonga & Tobing, 2008):

Standar & Poor's adalah: AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, BB-, B+, B, B-, CCC+, CCC, CCC-, D

Moody's : Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, Baa1, Baa2, Baa3, Baa1, Ba2, Ba3, B1, B2, B3, Caa1, Caa2, Caa3, Ca, C

Fitch Ratings: AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, BB-, B+, B, B-, CCC, DDD, DD, D.

PEFINDO sebagai lembaga rating lokal yang banyak memberikan penilaian rating terhadap surat hutang berbagai perusahaan di Indonesia memiliki level rating sebagai berikut: AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, D.

MANAJEMEN LABA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP CREDIT RATING

Menurut Brigham dan Houston (2006), Faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat utang adalah sebagai berikut: (1) Berbagai macam risiko rasio-rasio keuangan, termasuk debt ratio, current ratio, profitability dan fixed charge coverage ratio. Semakin baik rasio-rasio keuangan tersebut semakin tinggi rating tersebut; (2) Jaminan aset untuk obligasi yang diterbitkan (mortgage provision). Apabila obligasi dijamin dengan aset yang bernilai tinggi, maka rating pun akan membaik; (3) Kedudukan obligasi dengan jenis utang lain. Apabila kedudukan obligasi lebih rendah dari utang lainnya maka rating akan ditetapkan satu tingkat lebih rendah dari yang seharusnya; (4) Penjamin. Emiten obligasi yang lemah namun dijamin oleh perusahaan yang kuat maka emiten diberi rating yang kuat; (5) Adanya sinking fund (provisi bagi emiten untuk membayar pokok pinjaman sedikit demi sedikit setiap bulan); (6) Umur utang. Ceteris Paribus, utang obligasi dengan umur yang lebih pendek mempunyai risiko yang lebih kecil; (7) Stabilitas laba dan penjualan emiten; (8) Peraturan yang berkaitan dengan industri emiten; (9) Faktor-faktor lingkungan dan tanggung jawab produk; dan (10) Kebijakan akuntansi. Penerapan kebijakan akuntansi yang konservatif mengindikasikan laporan keuangan yang lebih berkualitas.

Geiszler (2014) merupakan yang pertama kali menguji hubungan antara kualitas akrual, manajemen laba aktivitas riil, corporate governance dan peringkat kredit di Amerika Serikat menggunakan tiga model untuk mengukur kualitas akrual, yaitu model modified Jones, model cash flow dan model revenue. Manajemen laba aktivitas riil diuji menggunakan model Roychowdury. Corporate governance diukur menggunakan ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, independensi dewan komisaris, independensi komite audit dan Index based on the 24 provisions yang digunakan oleh Investor Responsibility Research Center. Hal lain yang diuji adalah apakah Credit Rating Agency Reform Act of 2006 dan Dodd-Frank Act of 2010 berpengaruh terhadap hubungan antara kualitas informasi akuntansi dengan peringkat kredit. Hasilnya mengindikasikan bahwa pada level perusahaan, kualitas akrual merupakan faktor yang signifikan dalam mempengaruhi rating yang diterima perusahaan. Perusahaan dengan kualitas akrual yang lebih rendah menerima peringkat kredit yang lebih rendah juga. Manajemen laba aktivitas riil dan corporate governance juga berpengaruh terhadap peringkat kredit pada level perusahaan. Hasil pengujian variabel corporate governance menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Ukuran dewan komisaris dan independensi dewan, dan komposisi dewan komisaris berpengaruh terhadap peringkat kredit, sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap peringkat kredit.

Penelitian John (2016) menguji apakah perusahaan yang kurang menggunakan strategi manajemen laba untuk mencapai peringkat kredit yang diharapkan setelah penerapan Sarbanes-Oxley Act (SOx) dan Dodd-Frank Wall Street Reform Consumer Protection Act (Dodd-Frank). Sebagaimana yang diharapkan, hasil penelitian mengindikasikan bahwa semakin sedikit strategi manajemen laba berbasis akrual digunakan setelah SOx dan terdapat kenaikan dalam strategi manajemen laba berbasis aktivitas riil pada periode sebelum terjadinya skandal korporasi besar terjadi.

Pertiwi (2014) menganalisis pengaruh leverage, perubahan leverage, profitability, perubahan profitability, size, perubahan size, interest coverage, institutional ownership dan perubahan DOL terhadap variabel dependen yaitu peringkat kredit dan penurunan peringkat kredit. Hasil pengujian ini menemukan bahwa secara parsial hanya leverage, profitability, dan size yang berpengaruh signifikan terhadap peringkat kredit sedangkan interest coverage dan institutional ownership tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peringkat kredit. Hasil dari penelitian yang penurunan peringkat kredit menunjukkan bahwa perubahan leverage,

perubahan profitability, perubahan size, dan perubahan DOL tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan peringkat kredit.

Penelitian mengenai kualitas akrual menunjukkan bahwa investor tidak dapat mendeteksi sepenuhnya keberadaan manajemen laba dan tidak dapat sepenuhnya memahami implikasi dari akuntansi akrual (Sloan, 1996). Penelitian ini menunjukkan bahwa investor cenderung untuk menilai terlalu tinggi tentang pentingnya komponen akrual dari laba dan menilai rendah komponen arus kas dari laba. Agen pemeringkatan kemungkinan merupakan pengguna laporan keuangan yang canggih dibandingkan pelaku pasar yang lain. Geiszler (2014) menyatakan bahwa agen pemeringkatan mampu mengidentifikasi dan menilai kualitas akrual perusahaan dan disajikan dalam peringkat yang mereka buat. Rating (peringkat) bisa menginterpretasikan perilaku perataan laba dan keputusan diskresioner versus nondiskresioner dengan konstruk GAAP yang menguntungkan bagi perusahaan dengan rating yang tinggi. Tetapi di pihak lain, agen pemeringkatan sebagai pengguna potensial yang canggih dari laporan keuangan dan mampu mengobservasi kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya bisa menghukum manajemen laba yang dibuat oleh manajer dan menggunakan akrual diskresioner atau mengabaikan masalah ini dalam penilaian berkaitan dengan kemampuan untuk mendeteksi manajemen laba. Zang (2012) menemukan bahwa manajer menggunakan manajemen laba aktivitas riil sebagai substitusi dari manajemen laba akrual. Manajemen laba aktivitas riil adalah upaya untuk mengarahkan atau menyajikan kondisi keuangan perusahaan lebih baik dari kondisi yang sebenarnya. Sebagai hasilnya dikondisikan pada kemampuan agen pemeringkatan untuk mendeteksi manajemen laba aktivitas riil, maka harus dihubungkan dengan peringkat kredit.

PENUTUP

Manajemen laba adalah tindakan-tindakan manajer untuk menaikkan (menurunkan) laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelola untuk tujuan menghindari kerugian dan lain sebagainya. Manajemen laba dapat membuat kinerja perusahaan terlihat baik oleh investor dengan menaikkan laba yang diperoleh perusahaan. Manajemen laba dapat mempengaruhi penerbitan obligasi suatu perusahaan. Jika perusahaan melakukan manajemen laba maka laba perusahaan akan meningkat ataupun dalam keadaan aman, oleh karena itu perusahaan mempunyai kemampuan untuk menerbitkan utang obligasi dengan modal laba yang tinggi. Laba yang tinggi akan meyakinkan kreditor atau calon kreditor bahwa obligasi yang dibeli akan aman. Selain itu dalam penerbitan obligasi, perusahaan akan dengan jelas menyatakan jumlah dana yang dibutuhkan melalui penjualan obligasi yang dikenal dengan istilah jumlah emisi obligasi. Penentuan besar kecilnya jumlah penerbitan obligasi berdasarkan aliran arus kas perusahaan, kebutuhan, serta kinerja bisnis perusahaan. Jika kinerja bisnis perusahaan terlihat baik maka jumlah emisi obligasi juga dapat ditingkatkan, sedangkan kinerja perusahaan yang baik dapat dihasilkan dengan praktik manajemen laba. Oleh karena itu manajemen diduga akan melakukan manajemen laba pada periode sekitar emisi obligasi.

Manajemen laba juga dapat mempengaruhi peringkat obligasi perusahaan. Peringkat obligasi itu sendiri merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh perusahaan pemeringkat mengenai efek utang suatu perusahaan. Peringkat obligasi suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh manajemen laba dengan cara yang sama dengan emisi obligasi yaitu menaikkan laba sebuah perusahaan sehingga kinerja perusahaan terlihat baik di mata investor dan investor pada akhirnya mempercayakan memberikan utang kepada perusahaan. Jika manajer dapat memprediksi peringkat obligasi perusahaan, maka mereka dapat memperkirakan resiko premium pada saat mengeluarkan obligasi. Manajemen sebuah

perusahaan diduga cenderung melakukan manajemen laba atau rekayasa laba pada periode di sekitar emisi obligasi agar kinerja perusahaan terlihat baik karena akan berdampak pada perolehan peringkat obligasi sehingga akan meningkatkan daya tarik perusahaan dimata para investor.

Perusahaan pada dasarnya didirikan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham (Almilia dan Sifa, 2006). Namun seringkali manajemen sebagai pihak pengelola perusahaan melakukan tindakan-tindakan yang hanya mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan pihak lain yang berkepentingan. Oleh karenanya dibutuhkan adanya suatu perlindungan terhadap berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Sistem corporate governance memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor sehingga mereka yakin akan memperoleh return atas investasinya dengan benar. Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris independen, para pemegang saham dan stakeholders lainnya (Ujiyantho dan Pramuka, 2007).

Kualitas keputusan investor dipengaruhi oleh kualitas pengungkapan informasi perusahaan. Asimetri informasi yang timbul saat manajer mengetahui informasi mengenai prospek perusahaan di masa depan daripada pihak eksternal perusahaan dapat dikurangi dengan kualitas informasi. Kualitas informasi dari peringkat obligasi diharapkan menjadi sinyal yang menyatakan kondisi keuangan dan sinyal mengenai kinerja manajemen perusahaan terkait oleh karena manajer turut memberikan informasi yang berkualitas dalam peringkat obligasi sehingga dapat mengurangi asimetri informasi (Jelita, 2014). Asimetri informasi yang terjadi antara principal dan agent menyebabkan terjadinya konflik kepentingan. Konflik kepentingan diasumsikan oleh teori agensi bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Yaitu agent, secara moral bertanggungjawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal), namun di sisi lain agent juga mempunyai kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka. Hal tersebut mendorong agent untuk melakukan penyimpangan dalam penyajian informasi kepada pemilik perusahaan agar agent dinilai berkinerja baik dan mendapat bonus untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Penyimpangan yang dapat terjadi adalah manajemen mempengaruhi tingkat laba yang ditampilkan dalam laporan keuangan atau yang sering disebut manajemen laba (Herawaty, 2008).

Salah satu cara yang paling efisien dalam rangka untuk mengurangi terjadinya konflik kepentingan dan memastikan pencapaian tujuan perusahaan, diperlukan keberadaan peraturan dan mekanisme pengendalian yang secara efektif mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta kemampuan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda (Boediono, 2005). Corporate governance merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan pemegang saham dan kreditor perusahaan untuk mengendalikan tindakan manajer (Nuryaman, 2007). Corporate governance tersebut dapat berupa kepemilikan institusi, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kualitas audit agen (Setyapurnama dan Norpratiwi, 2006).

DAFTAR PUSTAKA

- Almilia, L.S & Lailatul L. Sifa. (2006). Reaksi Pasar Publikasi Corporate Governance Perception Index Pada Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta, Simposium Nasional Akuntansi (SNA) IX, Padang.
- Annisaa'rahman, dan Yanthi H. (2007). Earnings Management melalui Accruals dan Real

- Activities Manipulation pada Initial Publik Offerings dan Kinerja Jangka Panjang (Studi Empiris pada Bursa Efek Jakarta). The 1st Accounting Conference, Fakultas Ekonomi - Universitas Indonesia.
- Brigham, E.F. & J.F. Houston. (2006). Dasar-dasar manajemen Keuangan. Penerjemah: Ali Akbar Yulianto, Edisi 10, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.
- Burgstahler, D., & Dichev, I. (1997). Earnings Management to Avoid Earnings Decreases and Losses. *Journal of Accounting and Economics*, 24(1), 99-126.
- Cohen, D.A. & P. Zarowin. (2010). Accrual Based and Real Earning Management Activities Around Seasoned Equity Offering. *Journal of Accounting and Economics*, 50, 2-19.
- DeAngelo, E.L. (1986). Accounting Numbers as Market Valuation Substitutes: A Study of Management Buyouts of Public Stockholders. *The Accounting Review*, LXI, (3), 400-422.
- Dechow, P., Hutton, A., Kim, J. & Sloan, R. (2011). Detecting Earnings Management: A New Approach. Working Paper, University Arizona, USA.
- Dechow, P., & Sloan, R. (1991). Executive Incentives and The Horizon Problem: An Empirical Investigation. *Journal of Accounting and Economics*, 14, 51-89.
- Dechow, P., Sloan, R. & Sweeney, A. (1995). Detecting Earnings Management. *The Accounting Review*, 70, 193-225.
- Geiszler, M. (2014). The Effect of Accrual Quality, Real Activities Earnings Management, and Corporate Governance on Credit Ratings. Kent State University, 107 pages.
- Graham, J.R., C.R. Harvey, & S. Rajgopal. (2005). The Economic Implications of Corporate Financial Reporting. *Journal of Accounting and Economics*, 40, 3–73.
- Gunny, K. (2009). The Relation between Earnings Management Using Real Activities Manipulation and Future Performance: Evidence from Meeting Earnings Benchmarks. Working Paper. University of Colorado.
- Healy, P.M. (1985). The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions. *Journal of Accounting and Economics*, 10, 85-107.
- Healy, P. M. & Wahlen, J. M. (1999). A Review of The Earnings Management Literature And Its Implications For Standard Setting. *Accounting Horizons*, 13 (4), 365-383.
- Herawaty, Vinola. “Peran Praktik Corporate Governance sebagai Moderatingvariable dari Pengaruh Earnings Management terhadap Nilai Perusahaan”. Simposium Nasional Akuntansi XI. Pontianak. 23-24 Juli, 2008.
- Jelita, Gyna Lea. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Peringkat Obligasi”. *Jurnal Universitas Diponegoro*, 2014. h. 1-29
- Jones, J.J. (1991). Earnings Management During Important Relief Investigations. *Journal of Accounting Research*, 29, (2), 193-228.
- Jorion, P & G. Zhang (2007). Good and Bad Credit Contagion: Evidence from Credit Default Swaps. *Journal of Financial Economics*, Vol. 84.
- Kothari, S. P., Leone, A.J., and Wasley, C.E. (2005). Performance Matched Discretionary Accrual Measures. *Journal of Accounting and Economics*, 39 (1): 163-197.
- Manurung, Addler Haymans. “Hubungan Rasio-rasio Keuangan dengan Rating Obligasi”. <http://www.finansialbisnis.com>. 2009. (Diakses 15 Agustus 2019)
- Raharjo, Spto. “Panduan Investasi Obligasi”. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Rangan, S., (1998). Earnings Management and The Performance of Seasoned Equity Offerings. *Journal of Financial Economics*, 50, 101-122.
- Roychowdhury, S. (2006). Earnings Management Through Real Activities Manipulation.
- Ross, Stephen A, R. Westerfield, & B.D. Jordan. (2010). *Corporate Finance*. 7th ed. McGraw-Hill.

- Scott, W. R. 2000. *Financial Accounting Theory*. Second Edition, Scarborough, Ontario: Ujijantho, Muh. Arif dan Bambang Agus Pramuka. “Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan”. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar. 26-28 Juli, 2007.
- Watts, R., & Zimmerman, J. (1986). *Positive Accounting Theory*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, USA.
- Zang, A. 2012. Evidence on the Trade-Off between Real Activities Manipulation and Accrual-Based Earnings Management. *The Accounting Review* 87 (2): 675-703.

MODEL SOSIALISASI DAN INTERNALISASI NILAI-NILAI BELA NEGARA DI KALANGAN MAHASISWA UPN “VETERAN” YOGYAKARTA UNTUK MEWUJUDKAN “KAMPUS BELA NEGARA”

Isbandi Sutrisno, Sigit Tripambudi

Email : isbandi_sutrisno@yahoo.com, mrsgrt_upnyk@yahoo.com

Abstrak

Masalah bela negara menjadi masalah yang penting seiring mencuatnya isu turun-turun rasa nasionalisme, memudarnya semangat persatuan, dominasi perekonomian oleh pihak asing dan sebagainya. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (UPNVY) adalah perguruan tinggi yang mempunyai kepedulian terhadap masalah bela negara. Hal ini dikuatkan dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta perlu dilaksanakan pengembangan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagai Kampus Bela Negara. Kampus UPNVY ingin menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki nilai-nilai bela negara agar punya semangat mengaplikasikan kapasitas yang dimiliki untuk bangsa dan negara. Oleh karena itu dirumuskan model sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai bela negara kepada mahasiswa. Model sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai bela negara bagi mahasiswa UPNVY dilakukan melalui proses yang terintegrasi di bawah koordinasi Kapus Bela Negara. Proses dilakukan sejak mahasiswa masuk sampai mahasiswa menyelesaikan studi. Lima mata kuliah pilar bela negara (Wimaya, Pancasila, Kewarganegaraan, Agama dan Olahraga) dan semua mata kuliah memberikan muatan materi bela negara. Proses diperkuat dengan keteladanan dalam disiplin, kejujuran dan kreativitas. Simbol-simbol bela negara juga dihadirkan untuk menciptakan atmosfer bela negara. Faktor pendukung untuk mewujudkan UPNVY sebagai kampus bela negara adalah faktor sejarah, bahwasanya UPNVY didirikan untuk memfasilitasi para pejuang pergerakan nasional di masa kemerdekaan untuk belajar. Semangat perjuangan membela negara terus terpelihara dan menjadi nilai yang dijaga.

Kata kunci : Bela negara, sosialisasi, internalisasi

PENDAHULUAN

Permasalahan bela negara menjadi mencuat ketika dikaitkan dengan isu-isu seputar menurunnya nasionalisme di Indonesia. Indikasinya adalah seperti permasalahan keidakmerdekaan ekonomi atas dominasi asing, kurangnya kecintaan terhadap produk nasional, menurunnya nilai kebangsaan, banyaknya kasus korupsi sampai dengan kenakalan / kerusakan di kalangan pemuda / pelajar. Permasalahan tersebut tidak boleh dianggap remeh. Akumulasi permasalahan tersebut lambat laun dapat menjadikan negara dalam keadaan bangkrut, bahkan dapat menjadikan negara Indonesia dalam keadaan terkooptasi oleh kekuatan-kekuatan asing.

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (UPNVY) adalah perguruan tinggi yang mempunyai kepedulian terhadap masalah bela negara. Hal ini dikuatkan

dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta perlu dilaksanakan pengembangan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagai Kampus Bela Negara. Hal ini dalam rangka menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara yang berupa ancaman non militer yang meliputi tindak kejahatan internet, korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, dan penggantian ideologi negara. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta berperan aktif melakukan penangkalan dalam bentuk smart power dan dapat menjadi kawah candradimuka bagi calon intelektual, generasi penerus berkualitas, dan pemimpin bangsa yang sanggup menjadi pioner pembangunan yang dilandasi jiwa bela negara di era global.

Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang teratur menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta berkeyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara guna menghadapi ancaman baik dari luar maupun dalam negeri yang membahayakan dan mengancam kedaulatan baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Diharapkan UPNVY dapat menghasilkan lulusan Kader Intelektual Bela Negara, dan mampu menjadi pioner pembangunan. UPNVY jugadiharapkan meningkatkan kualitas lulusan yang memiliki daya saing global dan berjiwa bela negara melalui pembelajaran berkualitas yang dikemas dalam pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai pemaknaan mahasiswa UPNVY terhadap nilai-nilai bela negara hasilnya menunjukkan bahwa : (a) Mahasiswa kampus bela negara UPNVY pada awalnya memaknai bela negara identik dengan wajib militer. Namun setelah diluruskan pemahamannya berubah dan memaknai bela negara dalam arti yang luas, yaitu memaksimalkan segala potensi yang dimiliki untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. (b) Mahasiswa kampus bela negara UPNVY memaknai bela negara sangat penting bagi mahasiswa, namun proses internalisasinya yang didesain melalui mata kuliah bela negara belum maksimal. Interaksi simbol bela negara masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan interaksi simbol yang lebih populer lainnya. (c) Pemaknaan mahasiswa kampus bela negara UPNVY terhadap nilai-nilai bela negara secara resisten karena melihat sarana, prasarana dan pelayanan yang masih kurang. Hal ini kontra dengan semangat nilai-nilai bela negara.

Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa label kampus bela negara belum mampu menginternalisasikan nilai-nilai bela negara di kalangan mahasiswa UPNVY. Proses yang diskenario melalui serangkaian kegiatan akademik maupun non-akademik belum mampu memenuhi harapan yang diinginkan. Melalui serangkaian penelitian lanjutan ini diharapkan dapat ditemukan serangkaian formula proses sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai bela negara di kalangan mahasiswa UPNVY.

Penelitian ini sangat tepat sebagai salah satu bentuk evaluasi dan memberikan solusi penanaman nilai-nilai bela negara di kalangan mahasiswa UPNVY, mengingat UPNVY sudah mencanangkan dirinya sebagai kampus bela negara. Tentunya berbagai pihak punya harapan tersendiri terhadap kapasitas UPNVY sebagai kampus bela negara, terutama dalam hal proses pembelajaran dan kapasitas lulusannya. Hal ini adalah tantangan yang harus dibuktikan. Penelitian ini akan merumuskan model sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai bela negara di kalangan mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta untuk mewujudkan “Kampus Bela Negara”. Rumusan tersebut akan diawali dengan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai bela negara di kalangan mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta “Kampus Bela Negara”.

TINJAUAN PUSTAKA

Sosialisasi dan internalisasi adalah proses komunikasi. Hovlan (1948) mendefinisikan komunikasi sebagai proses dimana seorang individu (komunikator) menyampaikan pesan (lambang verbal) untuk merubah perilaku individu lain. Dengan demikian dalam proses komunikasi sosialisasi dan internalisasi dituntut peran komunikator yang agensif dan kreatif dalam menformulasikan pesan. Little John (1996) menjelaskan tentang teori produksi pesan yang berkaitan dengan komunikator. Salah satu teorinya disebut dengan Rhetorical Sensitivity Theory. Teori ini menjelaskan bahwa komunikator cenderung menyesuaikan pesan dgn audience sebagai awal komunikasi yang efektif. Ada 3 jenis komunikator, yaitu :

- a. Noble selves (kaku)
- b. Rhetorical reflektor (melebur dengan audience)
- c. Rhetorical sensivity (moderat) dengan memperhatikan diri sendiri, situasi dan orang lain.

Teori produksi pesan lainnya disebut dengan teori Communication style. Teori ini menjelaskan bahwa dalam komunikasi terjadi dalam 2 level, tidak hanya memberikan informasi tetapi juga menghadirkan informasi. Gaya penyampaian pesan bisa sebelum-sesudah- atau ketika pesan utama disampaikan. Terdapat 9 gaya komunikasi :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a. Dominance | f. Impresion |
| b. Dramatic behavior | g. Leaving |
| c. Openness | i. Relaxation |
| d. Contentiousness | j. Friendliness |
| e. Animation | |

Pilihan terhadap gaya komunikasi menjadi penting jika dikaitkan dengan jenis pesan yang akan, khalayak sasaran dan dampak yang diinginkan. Komunikator yang cerdas akan membelajari kondisional yang terjadi sebelum memilih gaya komunikasi. Banyak terjadi kegagalan komunikasi akibat ketidaksesuaian antara pilihan gaya komunikasi kontekstual peristiwa komunikasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang sering diistilahkan dengan penelitian naturalistik dalam bidang Sosiologi, penelitian etnografi dalam bidang Antropologi dan penelitian studi kasus dalam bidang Psikologi (Sutopo, 2001 : 5-6). Neuman (2000 : 65) menyebutkan adanya tiga perspektif dalam Ilmu Sosial yang akan membedakan dalam teknik penelitian, yaitu : Positivist, interpretive dan critical. Pendekatan kuantitatif berada di bawah perspektif positivist, sedangkan pendekatan kualitatif berada di bawah perspektif interpretive/constructivis dan critical (Neuman, 2000 :65)

Penelitian ini masuk dalam kategori constructivis social research. Pemikiran ini dapat ditelusuri sejak Sosiolog Jerman Max Weber (1864-1920) dan Filosof Jerman Wilhem Dilthey (1833-1911). Dilthey membedakan dua jenis ilmu secara mendasar, yaitu : Naturwischenschaft (berdasarkan pemahaman abstrak) dan Geisteswischenschaft (berdasarkan pemahaman empathetic). Sedangkan Weber berpendapat bahwa Ilmu sosial membutuhkan studi makna tindakan sosial.

Perspektif ini diasosiasikan dengan hermeneutics, yaitu sebuah teori tentang makna, yang banyak ditemukan dalam sastra (linguistic, kritik sastra, sejarah seni). Penekanannya pada pengkajian teks (text) yang menunjuk pada conversation, kata-kata tertulis atau gambar. Tujuannya menemukan makna yang melekat pada teks. Selain itu, interpretive social science (ISS) juga diasosiasikan dengan constructionism, ethnomethodology, cognitive, idealist,

phenomenological, subjectivist, qualitative sociology dan interaksi simbolik (Neuman, 2000 :70-71)

Secara umum perspektif konstruktivis mengasumsikan bahwa : (1) Tujuan penelitian adalah memahami dan mendeskripsikan makna tindakan sosial, (2) Realitas sosial bersifat tidak tetap yang dibuat oleh interaksi manusia, (3) Manusia bersifat sosial yang membuat makna dan secara tetap memaknai dunianya, (4) Common sense sebagai teori yang kuat dalam kehidupan sehari yang digunakan orang biasa, (5) Teori adalah deskripsi tentang bagaimana kelompok sistem makna dibangkitkan dan dikembangkan, (6) Penjelasan tentang benar melekat pada apa yang sedang dipelajari, (7) Bukti yang baik melekat pada konteks interaksi sosial yang tidak tetap, dan (8) Nilai terletak pada bagian integral kehidupan sosial, tidak ada nilai yang salah, yang ada hanya perbedaan nilai (Neuman, 2000 :85).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan analisa dokumen. Informan yang diwawancarai adalah mahasiswa, dosen, Kapus Bela Negara dan pakar pendidikan. Teknik analisis yang akan digunakan adalah analisis antar kasus (cross-site analysis). Pada tiap kasusnya akan dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif. Dalam model analisis ini, tiga komponen analisisnya yaitu : reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atas kebenarannya, dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus (Sutopo, 2002)

Setiap kasus dilakukan analisis interaktif. Dalam kegiatan reduksi data, dilakukan seleksi data, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data dari fieldnote (catatan lapangan). Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian. Dalam kegiatan penyajian data, dilakukan pengolahan data dan dituliskan dalam deskripsi dalam bentuk narasi yang disusun secara logis dan sistematis yang memungkinkan dapat ditarik adanya simpulan-simpulan penelitian. Dalam kegiatan penarikan simpulan dan verifikasi, dilakukan pengulangan, pengujian, penelusuran, pencocokan data sehingga dihasilkan data yang mempunyai validitas tinggi.

HASIL PENELITIAN

Pembelajaran Nilai-Nilai Bela Negara di UPN VY

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (UPN VY) sebagai kampus bela negara selalu berusaha menanamkan nilai-nilai bela negara di kalangan mahasiswa. Upaya sosialisasi dan internalisasi dilakukan mulai dari mahasiswa masuk melalui kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bela Negara (PKKBN) bagi mahasiswa D-3 dan S-1. Dalam kegiatan ini ada sesi khusus kuliah umum yang langsung disampaikan Oleh Menteri Pertahanan (Menham) dengan tema "Bela Negara". Pendalamannya dilakukan dalam kelas kecil yang terdiri dari 30an mahasiswa selama satu hari yang terbagi menjadi dua sesi. Materi meliputi ceramah, Tanya jawab dan diskusi kelompok untuk merumuskan nilai-nilai bela negara bagi mahasiswa.

Upaya sosialisasi dan internalisasi berikutnya dilakukan melalui serangkaian mata kuliah : Pancasila, Kewarganegaraan, Widya Mwat Yasa (Wimaya), Olah Raga I dan olah Raga II. Kelima mata kuliah tersebut memiliki muatan nilai-nilai bela negara bagi mahasiswa di masa kekinian. Misalnya menanamkan rasa tanggung-jawab, disiplin, kerja sama, toleransi, rasa peduli terhadap lingkungan, nilai sopan santun dan sebagainya.

Mata kuliah Wimaya merupakan mata kuliah yang paling utama muatan nilai-nilai bela negaranya. Mata kuliah ini membahas dan menjelaskan mengenai Widya Mwat Yasa (Wimaya) yang merupakan pendidikan ke-UPN-an dengan tujuan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan mengimplementasikan Visi, Misi, dan Tujuan mata kuliah Pendidikan Wimaya. Wimaya merupakan pendidikan pembentukan karakter mahasiswa untuk

secara sadar belajar membangun bangsa Indonesia, dimulai dari membangun dirinya yang berkemampuan dalam kejuangan dan bela negara dengan meningkatkan: (1) Jati diri dengan menumbuhkan: nilai-nilai ideal yang diyakini, keberanian dan kearifan, (2) Etika dengan menumbuhkan kejujuran, pemahaman dan kecerdasan sepirtual yang agamis dan keteladanan, (3) Kedisiplinan, dengan menumbuhkan kesadaran kepatuhan, taat azas dan mengelola waktu, (4) Kreativitas dengan menumbuhkan: kecerdasan, berfikir kedepan (visioner/futuristik), wacana dan sifatrealistis, dan(5) Kejuangan, dengan menumbuhkan rasa ketahananmalangan (struggle), kemampuan mengambil hikmah masa lalu dari sejarah, keikhlasan, tanggungjawab dan kebersamaan tekad.

Secara normatif label Kampus Bela Negara mudah untuk diwacanakan. Namun implementasinya dalam bentuk terinternalisasi nilai-nilai yang realisasinya praktik nilai-nilai dalam kehidupan masih sulit diwujudkan. Berikut ini adalah beberapa pendapat mahasiswa di UPNVY mengenai kondisional kampus bela negara.

Menurut Andito (anggota Menwa), secara umum arti bela negara adalah mengupayakan setiap warga negara harus taat pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan sadar akan ideologi Pancasila di tengah-tengah maraknya isu-isu tentang ideologi. Sebagai kampus bela negara, UPNVY belum kelihatan nuansa bela negaranya baik di kalangan dosen maupun mahasiswa. Upaya sosialisasi yang dilakukan melalui serangkaian mata kuliah Wimaya, Kewarganegaraan, Pancasila dan Olah Raga sudah mencakup. Membandingkan dengan kampus-kampus lain itu belum ada yang seperti UPNVY. Contohnya adalah mata kuliah Olahraga dan yang paling khas nuansa bela negaranya adalah mata kuliah WimayMelalui serangkaian kegiatan diharapkan UPNVY dapat memotivasi dan menginspirasi mahasiswa. Hambatannya hambatannya lebih ke kesadaran masing-masing mahasiswa sendiri. Soalnya kalau dalam konteks bela negara itu idealnya harus ada Universitas Paturan yang tegas. Contohnya di kampus Universitas Pertahanan (Unhan) di Bogor yang juga merupakan kampus bela negara. Aturannya dibuat mewajibkan mahasiswanya ikut pelatihan bela negara, sedangkan di di UPNVY tidak diwajibkan. Hal ini yang menjadi hampatan di UPNVY karena tidak bersifat mengikat. Saran Andito untuk mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai bela negara bagi mahasiswa harus dimulai dengan mendisiplinkan birokrasinya. Dengan demikian mahasiswa dapat meneladaninya. Disiplin birokrasi di lingkungan UPNVY baru sebagian saja.

Pendapat Bangkit yang juga amggota Menwa mengenai kampus bela negara UPNVY, menurutnya ada dua sudut pandang bela negara yaitu untuk lingkup Indonesia dan lingkup kehidupan kampus. Untuk lingkup kampus yang jelas sebagai mahasiswa lebih diutamakan berkomitmen dengan kuliahnya, menjalankan kewajiban dan tugasnya sebagai mahasiswa dengan baik. Mahasiswa juga melibatkan diri dalam keorganisasian yang tersedia untuk mengembangkan diri, misalnya Menwa, Mapala, Pramuka dan sebagainya. Mahasiswa juga harus siap jika dikirin sebagai relawan di daerah-daerah yang mengalami musibah jika diperlukan. Menurut Bangkit, nuansa bela negara belum terasa di lingkungan kampus UPNVY baik di kalangan dosen maupun mahasiswa. Contohnya masih ada kelas yang kosong tanta ada keterangan. Mudahnaya kurang adanya keteladanan baik di kalangan pengajar maupun tenaga kependidikan, bahkan dalam birokrasi ada yang terkesan mempersulit. Menurut Bangkit selaku anggota Menwa pengenalan nilai-nilai bela negaranya lebih pada pendidikan Menwa. Dalam pendidikan Menwa diajarkan tentang nilai-nilai bela negara secara tersendiri, Soalnya ada didikan tersendiri dari MenWa dan diajarkan bela negara tersendiri mulai dari latihan-latihan dasarnya. Anggota Menwa mendapat juga Pendidikan Dasar Militer (Diksarmil) yang juga memiliki substansi nilai bela negara. Pendidikan lanjutannya adalah Puskader Kepemimpinan,

disini juga ditanamkan nilai-nilai bela negara. Slogan disiplin, kejuangan dan kreativitas yang juga merupakan implementasi nilai bela negara secara keseluruhan belum terwujud. Contohnya gampangnya, sehabis kegiatan wisuda selalu saja sampah berserakan di sana sini. Artinya belum ada kesadaran secara menyeluruh.

Pendapat mahasiswa lainnya tentang kampus bela negara disampaikan oleh Vera, mahasiswi Jurusan Akuntansi 2017 yang juga anggota UKM Bahasa Inggris. Ia mengenal UPNVY sebagai kampus bela negara setelah mengikuti PCKKBN Tahun 2017. Menurutnya : "...Bela negara adalah nggak hanya title dan simbolis, nggak cuma pake pakaian hitam putih aja atau ala-ala kemiliteran. Tapi juga bisa diamalkan....., maksud saya dengan ber-warga negara yang baik itu merupakan bela negara. Soalnya kadang-kadang kita sendiri masih belum bisa mentaati hal-hal kecil seperti rambu-rambu lalulintas..".(Wawancara tanggal 23 Juli 2019)

Menurut Vera, nuansa bela negara belum terasa di lingkungan kampus UPNVY. "Kalo dari individu-individunya belum sih, dari mahasiswa sendiri masih banyak yang datang belum tepat waktu, berdalih ada konsekuensi 15 menit, ada yg disiplin, ada juga yg nggak. Juga di depan kan ada plang tulisan kalo kita kampus hijau, tapi kenyataannya masih banyak yang pada ngrok di depan kelas. Jadi malah dari individunya sendiri emang masih kurang menepati rambu-rambu tersebut". (Wawancara tanggal....). Ketika ditanya soal pelayanan dari pengelola kampus, Vera menjelaskan "...masih kurang sih, kurangnya karena masih miss informasi. Misalnya informasi mengenai KRS aja masih kurang transparan, terus mengenai UKT juga. Kenapa kok saya dapet UKT segini gitu juga belum dijlaskan". (Wawancara tanggal 23 Juli 2019)

Saran Vera untuk lebih mempertegas kampus bela negara adalah dengan lebih tegas lagi regulasi yang ada. Misalnya udah ada aturan Senin-Selasa memakai baju hitam-putih, tapi masih ada yang nyolong-nyolong memakai celana Jeans. Pelaksanaan regulasi juga masih terjadi kesenjangan antara di Kampus 1 di Condong Catur dan Kampus 2 di Babarsari. Di Kampus 1 cenderung lebih ketat dan di Kampus 2 cenderung lebih longgar.

Sementara itu seorang mahasiswa anggota BEM yang bernama Aroma menyampaikan pentingnya bela negara agar kita lebih cinta terhadap negara kita sendiri. Kita akan menjadi tahu apa peran yang harus kita lakukan untuk negara kita sendiri. Ia memperoleh pemahaman bela negara pertama kali dari kampus kemudian menambah wawasan bela negaranya melalui penelusuran informasi secara mandiri. Ia menilai kalau kampus UPNVY sebagai kampus bela negara belum dapat mewujudkan nilai bela negara secara menyeluruh. Hal ini mungkin disebabkan materi kuliah bela negara yang masih kurang. Dalam MK Wimaya hanya disampaikan pokok-pokoknya saja, tidak diberikan bekal buat besok realitas yang dihadapi seperti apa. Dalam MK Pancasila, Kewarganegaraan dan Olahraga nuansa materi bela negaranya juga masih kurang. Kondisinya dipersulit dengan realitas generasi sekarang yang lebih condong pada budaya Barat. Bicara masalah bela negara seperti ini banyak yang tidak suka dan dianggap membuang-buang waktu saja. Hal ini merupakan tantangan bagi para dosen untuk mengembangkan materi maupun teknik pembelajarannya.

Menurut Aroma, slogan kejuangan, disiplin dan kreativitas juga belum kelihatan nuansanya di lingkungan UPNVY. Untuk mewujudkannya harus dimulai pada diri sendiri, yang dimulai dengan pembuatan aturan dan keteladanan dari para dosen sebagai acuan. Menurutnya kendala di UPNVY adalah factor birokrasi yang susah. Peraturan yang berubah-ubah dan personality yang kaku (saklek). Namun demikian apapun keadaannya nilai bela negara menjadikan kampus UPNVY berbeda dengan kampus lainnya. Mahasiswa UPNVY pun berbeda dengan mahasiswa kampus lainnya (Wawancara tanggal 4 Agustus 2019).

Seorang staf pengajar MK Pancasila di lingkungan UPNVY menyampaikan bahwa kendala utama mewujudkan kampus bela negara adalah mindset pada orang. Bagaimana

sebenarnya para pimpinan dan para pejabat harus mempunyai persepsi yang sama dulu. hal ini belum ada karena melemahnya ideology negara. Kita ini sebenarnya sudah clear dengan ideology negara Pancasila, sebagai panduan. Panduan didalam konteks berbangsa dan bernegara.

Kedua, kita mengatakan bahwa kita bela negara, pada hal sejak berdirinya UPN VY sudah bela negara. Kenapa sudah bela negara ? sejarahnya UPN VY itu didirikan paska revolusi peperangan melawan penjajahan. Para pejuang tiba saatnya untuk memajukan pendidikannya, yang dahulunya berjuang mengangkat senjata berubah berjuang dalam bentuk lain yaitu di bidang pendidikan. Kondisi sekarang kita terjebak dalam konsep kapitalis, terjebak dalam konsep kapitalis. ideology kita Pancasila hanya masuk dalam angan-angan karena faktanya banyak yang tidak diimplementasikan. Dalam konteks pendidikan, banyak orang yang konsepnya hanya mengajar tetapi tidak mendidik. Hal ini yang menyebabkan kegagalan dalam internalisasi nilai-nilai (bela negara) dalam proses pendidikan. Selaku alumni UPN VY juga, la merasakan juga merasakan semangat jiwanya orang kalau masuk UPN VY tu sudah tahu kalau UPN VY sebagai kampus yang hebat. Nuansa itu hilang setelah reformasi Tahun 1998. Angin keterbukaan dan kebebasan yang dihembuskan reformasi kebablasan sehingga menghapuskan nilai kedisiplinan..

".....Kebebasan yang dimaknai yang sebeb-bebasnya inilah, yang kemudian kita hanya mencetak uhm atau lulusan orang yang berpengetahuan, tetapi maaf tanda kutip tidak kuat di mental atau akhlaknya. Semangat membela negaranya, semangat kejuangannya, lupa. Contoh misalnya, ini kalo saya ketemu dengan beberapa alumni di luar negeri ya, ada juga yang kerja di departemen luar negeri. Apa yang terjadi ? semangat mereka hilang. Kadang mereka tahu tu ada misalnya mereka TKI illegal, apapun juga kan mereka warga negara Indonesia yang harus kita lindungi. Semangat-semangat inilah yang sudah mulai luntur. Nah karena apa ? karena kita sudah kembali tidak memahami ranah bingkai ideology yang namanya Pancasila ini sudah mulai luntur..." (Wawancara tanggal 24 Juli 2019)

Sesanti yang dimiliki UPN VY yang berbunyi "Disiplin, kejuangan, dan kreativitas" adalah nilai-nilai bela negara yang akan lebih baik lagi jika ditambahkan nilai "jujur".. Sesantinya menjadi "Jujur, disiplin, kejuangan dan kreativitas". hal ini akan semakin seiring dengan 4 konsep bela negara di UPN VY, yaitu : rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air, yakin akan Pancasila sebagai ideology atau dasar negara serta memiliki keterampilan dasar bela negara. Realitas yang terjadi, berbicara cinta tanah air namun terkadang ada yang tidak tahu tanah air; bicara ideology Pancasila namun masih ada yang tidak yakin;

".....Inilah yang harus kita tumbuh kembangkan kembali. Bagaimana memahami, nggak usah jauh-jauh lah kae kan ono tulisan nama-nama pahlawan, paling tidak mereka tau, oh Urip Sumoharjo ki sopo sih ? oh Federik laso ki siapa to ? Ki Haji Agus Salim siapa sih, itu, minimal itu. Yang harus sama-sama oleh semua pihak harus punya kesadaran itu. Contoh saiki saya sudah tiga tahun ini kan memintak untuk berseragam, kenapa sih harus berseragam ? ini hanya untuk menunjukkan kecintaan pada, hamong pake seragamnya Cuma senin dan selasa kok, Rabu, Kamis pake pakaian biasa. Hari jumat, batik, pakaian nasional yang sudah kita sepakati ya. Nah sekarang kita lihat, kalo orang memakai korsa pasti semangat banget. Tapi bagaimana dengan simbol-simbol kita ? simbol-simbol ke-UPN-nan, yaitu dengan berlatih berseragam dulu....." (Wawancara tanggal 24 Juli 2019).

Kebebasan yang dimaknai yang sebeb-bebasnya inilah, yang kemudian kita hanya mencetak uhm atau lulusan orang yang berpengetahuan, tetapi maaf tanda kutip tidak kuat di mental atau akhlaknya. Semangat membela negaranya, semangat kejuangannya, lupa.

Contoh misalnya, ini kalo saya ketemu dengan beberapa alumni di luar negeri ya, ada juga yang kerja di departemen luar negeri. Apa yang terjadi ? semangat mereka hilang. Kadang mereka tahu tu ada misalnya mereka TKI illegal, apapun juga kan mereka warga negara Indonesia yang harus kita lindungi. Semangat-semangat inilah yang sudah mulai luntur. Nah karena apa ? karena kita sudah kembali tidak memahami ranah bingkai ideologi yang namanya Pancasila ini sudah mulai luntur.

Pendapat lain disampaikan oleh staf pengajar MK WimaMya dan sekaligus pengajar MK Olahraga, yang disampaikan dalam wawancara tanggal 23 Juli 2019. Menurutnya selama pembelajaran ia telah melakukan pengenalan kembali nilai-nilai bela negara kepada mahasiswa. Dalam proses ini ada penekanan-penekanan bagaimana mahasiswa itu nantinya bisa bersikap atau istilahnya empati terhadap keadaan negara, seperti munculnya rasa nasionalisme.

Mahasiswa generasi sekarang krisis krisis multidimensi sehingga acuh tak acuh dengan kondisi dengan kondisi negara sehingga kita materi bela negara menjadi penting. Perlu ditumbuhkan motivasi agar mahasiswa tumbuh rasa cinta terhadap tanah air dan memiliki kemampuan awal bela negara. Dalam konteksnya kapasitasnya sebagai mahasiswa bela negara itu tidak harus mengangkat senjata yang menjadi ranahnya TNI / Polri, tetapi bias dengan memaksimalkan prestasi sesuai dengan bidangnya masing-masing, melestarikan kebudayaan yang adi luhung dan sebagainya.

..."Sebagian kebudayaan kita yang menguasai, yang tau itu orang luar. Generasi kita itu justru belajar dari orang luar. Karena apa ? Udah diambil orang luar. Nah itu salah satunya seperti itu konteks bela negara di UPN yang sering saya ajarkan. Tapi saya lebih cenderung bagaimana memotivasi mahasiswa itu biar punya istilahnya "krentek" agar dia itu peduli terhadap bangsa ini. Katanya sekarangkan arus globalisasi kadang-kadang individualnya itu lebih muncul. Nah itu harus kita kikis satu per satu agar mereka itu juga istilahnya muncul lagi jiwa nasionalismenya. Itu yang saya ajarkan..." (Wawancara tanggal 23 Juli 2019)

Nilai-nilai bela negara bisa diselaraskan dan bisa dimatchkan dengan nilai "Disiplin, Kejuangan dan Kreativitas", serta dengan sesanti "Widya Mwat Yasa". Terdapat sinkronisasi antara sesanti dengan nilai disiplin, kejuangan dan kreativitas hampir lebih dari 50 %. Konsep-konsep tersebut mudah dipelajari secara kognisi tetapi sulit dipraktikkan. Implementasi dalam civitas kehidupan kampus UPN VY belum mencapai 50 % baik di kalangan mahasiswa, tendik maupun dosen. Workshop, pelatihan atau yang sejenisnya belum menampakkan hasil yang diharapkan. Misalnya ada dosen yang masih hanya mementingkan masalah transfer ilmu pengetahuan namun kurang menanamkan nilai-nilai kejuangan. Oleh karena itu semua mata kuliah harus dikaitkan dengan nilai-nilai bela negara. Baru terdapat beberapa dosen yang melakukannya. Kalau mayoritas sudah melakukan maka perilaku mahasiswa, tendik dan dosen juga akan menstruktur sesuai nilai-nilai diharapkan. "...Semangatnya rela berkorban untuk mengabdikan..".

Sementara itu Kapus Bela Negara UPN VY, dalam wawancara tanggal 26 Agustus 2019, menyampaikan bahwa bela negara dimulai dari cinta tanah air, sadar berbangsa, yakin pada Pancasila. Hal ini yang harus ditanamkan sejak awal. Implementasinya dalam kehidupan kampus tumbuhnya nilai-nilai seperti kedisiplinan dan kinerja yang bagus. Untuk mewujudkan hal tersebut tidak bias lepas dari relasi kita ke atas kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang memiliki kinerja yang bagus biasanya juga disertai dengan pemahaman keagamaan yang bagus pula. Ia mulai menanamkan hal ini dengan selalu mengawali dan mengakhiri perkuliahan dengan berdoa. Kalau kita berdoa maka Tuhan akan bersama kita. Ilmu datang bukan dari manusia tetapi dari Allah SWT. "...Semua kegiatan harus selalu ingat kepada Allah. Urip kan

sakjane mung kek gitu...”. Ia menyampaikan kalau di lingkungan UPN VY masalah kedisiplinan saja masih belum fokus. Pada hal dengan berdisiplin berarti bersatu. Bersatu karena kuat dan kuat karena bersatu. Bersatu itu Team Work.

Menanamkan nilai bela negara harus menengok ke belakang, bagaimana sejarah pergerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Para pendahulu kita telah berkorban habis-habisan. Semangat keterpanggilan dan berkorban ini yang harus diteladani. Sekarang kita tinggal mewarisi dan mengisi kemerdekaan itu. Kita harus mensyukurinya dengan kinerja yang baik sesuai bidang dan kapasitas yang dimiliki. Hal ini adalah bela negara yang perlu diinternalisasikan yang dalam konteks mahasiswa adalah “...Rela berkorban untuk belajar. Relevansi ini disosialisasikan dalam MK Wimaya.

Sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai bela negara harus melalui proses habituasi yang terus menerus. Proses seperti ini akan menghasilkan sikap disiplin. Bela negara itu salah satunya taat pada aturan atau hukum. Habituasi tersebut membutuhkan keteladanan menyeluruh yang tidak hanya bergantung pada satu figur. Termasuk dalam menciptakan atmosfer bela negara, sehingga ketika ada orang luar masuk lingkungan UPN VY langsung merasakan sentuhan bela negara.

Model Sosialisasi dan Internalisasi Nilai-Nilai Bela Negara bagi Mahasiswa UPN VY

Proses pembelajaran adalah proses unik, sebuah transfer ilmu pengetahuan yang melibatkan unsur kognisi (kesadaran), afeksi (perasaan) maupun konasi (perilaku). Ketiga komponen tersebut diharapkan akan berubah ke arah yang lebih sempurna setelah melalui serangkaian proses pembelajaran. Oleh karena itu dirumuskan berbagai cara, teknik dan metode pembelajaran untuk mencapai hasil yang maksimal.

Kampus UPN VY yang menyabdang predikat kampus bela negara terus berusaha memformulasikan metode pembelajaran terbaik untuk mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai bela negara kepada mahasiswa. Harapannya kampus bela negara tidak sekedar slogan kosong, tetapi menjiwai setiap lulusan UPN VY. Proses pembelajaran yang dilalui tidak sekedar transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga transfer nilai-nilai (bela negara) yang terinternalisasi dan menjadi spirit.

Prof. Dr. Anik Ghufro, seorang pakar teknologi pembelajaran Universitas Negeri Yogyakarta, dalam wawancara pada tanggal 7 Agustus 2019 menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pembelajaran. Misalnya, Pertama, model atau metode pembelajarannya tidak mach dengan jenis aktivitas belajar yang diinginkan. Hal ini terjadi disebabkan oleh ketika dosen mau menggunakan metode pembelajaran apa, maka metode yang dipilih metode yang dipunyai saja. Tidak mau menggunakan metode belajar yang sesuai dengan aktivitas belajar anak atau mahasiswa. Aktivitas belajar mahasiswa dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu aktivitas yang motorik, aktivitas yang berkaitan dengan kajian teoritik dan aktivitas yang berkaitan dengan penghayatan nilai-nilai. Hal ini yang harus diperhatikan dalam memilih metode pembelajaran yang menyentuh.

Kedua, Kegagalan proses pembelajaran bisa disebabkan oleh kurang-jelasan capaian pembelajaran (CP) atau outcome sebagai bagian dari produk pembelajaran. Contohnya u, kalau yang lebih berkaitan pada pengamalan aplikasi., maka CP-nya harus menggunakan kata kerja. Hal ini sering diabaikan sehingga terjadi antara kegiatan kuliah dan kegiatan belajar tidak ada sinkronisasi. “...Kuliah ya kuliah, belajar ya belajar”.

Ketiga, tidak ada monitoring progress report itu lho Pak, terhadap event atau peristiwa pembelajaran idealnya dari satu fase pembelajaran ke fase berikutnya ada ada pantauan. Kalau sudah ada pantauan maka kalau terjadi penyimpangan akan ketahuan di mana letak

kesalahannya.

Namun pada dasarnya, semua keadaan bisa dirubah melalui proses pembelajaran. Kita tidak boleh mengatakan bahwa seorang anak (mahasiswa) itu tidak mampu, bodoh, tidak bias mengikuti materi pelajaran dan sebagainya yang memiliki konotasi negatif. Semua bisa dikondisikan dan lingkungan harus ditata agar mendukung pembelajaran. Menurut pemikiran beavioristik semuanya bisa dijangkau, tidak memandang apakah dalam usia anak-anak maupun dewasa bahkan batas akhirnya adalah sampai kematian menjemput.

Namun kondisionalnya juga berbeda-beda. Ada pepatah yang mengatakan "Mengajak atau merubah orang pintar akan lebih susah dari pada mengajak orang yang bener". Ada kalanya juga karakter anak-anak yang mahasiswa itu ada kecenderungan masih mempunyai karakter menentang. Menentang dalam pengertian mereka sudah memiliki ide tersendiri. Sekarang yang harus dilakukan adalah mencoba merekayasa pola pikir untuk menjadi satu sesuai yang kita harapkan (brainstorming). Melalui proses ini harapan-harapan akan dikonversi menjadi kebutuhan mahasiswa. Misalnya kampus Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sekarang dengan slogannya "Leading Character Education" berusaha menciptakan karakteristik perilaku, tindakan dan pemikiran yang mendukung. Tata nilai dan standar moral distandartkan..

"....Untuk kepentingan ini, dulu disaat Rektot Pak Rahmat Wahab itu kan mintak tolong AA Gym untuk ikut menjernihkan hati dan pikiran mahasiswa baru. Nah itu, tapi sekarang sudah tidak lagi. Tetapi mengajak semua yang ada di UNY dari yang senior maupun yang junior untuk memotivasi, menyemangati bagaimana mahasiswa itu bisa mengenali hidup yang dimaui oleh UNY. Itu, dan tentu kan mesti butuh rambu-rambu tata kehidupan yang di idealkan UNY yang bagaimana. Nah kami juga ada pusat Pendidikan karakter, yang sudah memiliki buku saku untuk dosen, untuk mahasiswa, untuk pimpinan dan untuk Tendik. Dalam waktu ke depan rencananya lembaga ini akan dijadikan Pusat Studi Pancasila dan Pendidikan Karakter. Karena karakter yang dikehendaki adalah nilai-nilai Pancasila " (Wawancara tanggal 7 Agustus 2019)

Menurut Prof. Anik Gufron, untuk kasus UPN VY, Kapus Bela negara harus menjadi sentral inisiasi sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai bela negara. Lima mata kuliah yang menjadi agen nilai-nilai bela negara (Wimaya, Pancasila, Kewarganegaraan, Agama dan Olahraga) belum dapat mencukupi. Nilai-nilai bela negara harus diintegrasikan dengan semua dosen atau semua mata kuliah. Lima mata kuliah itu menjadi sentral gerakannya (jalan tolnya). Namun jangan dibebankan pada kelima mata kuliah tersebut. Bela negara harus ada dalam kegiatan kurikuler, ekstra kurikuler dan dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, seorang pengampu MK Wimaya dan Olahraga, menyampaikan saran-saran untuk mewujudkan UPN VY sebagai kampus bela negara dengan memperbaiki materi bela negara yang terdapat dalam MK Wimaya lebih di perluas karena sementara ini materi bela negara hanya sedikit dan dosen harus berpedoman pada buku tersebut. Kalau pun dosen melakukan improvisasi, itu hanya berlaku pada kelas yang diampu (terjadi ketimpangan). Idealnya materi di update setiap tahun atau dua tahun sekali sehingga materi tidak ketinggalan. Ideal, nya hal ini harus diwadahi sebagai bentuk koordinasi, namun kondisinya di kampus bela negara UPN VY belum optimal. Sebagai kampus bela negarase harusnya mewadahi mata kuliah agen nilai-nilai bela negara yaitu MK Wimaya sebagai sarana koordinasi dan sinkronisasi materi kuliah.

"...iya kurang terorganiasi. Iya memang kemuadian kurangnya koordinasi antar pengajar karena satu dan yang lain berbeda. Kemudian sumber materi sudah lama ya, kurang update, mungkinkah harusnya 2 tahun sekali dievaluasi kaitannya disesuaikan dengan

perkembangan zaman, kalau misal dosennya yang satu aktif seperti ini dikelas saya sendiri diberikan dikelas lain tidak, maka akan terjadi ketimpangan. Hambatan-hambatannya seperti itu. Dan sekarang yang membawahi mata kuliah itu nggak ada. Idealnya diwadahi di bawah langsung wark 1. Kalau duluan ada koordinator Wimaya ada koordinator PKN yang masih ada itu koordinator Olahraga. Terus koordinator MK Pancasila yang dulu sempat ada koordinasi rutin walaupun setahun sekali..” (Wawancara tanggal 23 Juli 2019)

Kapus Bela Negara UPN VY juga menyampaikan hal yang sama yaitu pentingnya koordinasi dengan semua lini untuk mewujudkan kampus bela negara UPN VY. Sering terjadi adalah saling lempar tanggung jawab, pada hal tanggung jawabnya semua pihak. Bukan hanya tanggung jawabnya Kapus Bela Negara. Untuk mewujudkan obsesi ideal kampus bela negara harus diawali dengan kerja sama yang baik dan mengawali dengan mewujudkan (1) Disiplinan dan (2) Evaluasi.

Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas, maka dapat dirumuskan model sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai bela negara bagi mahasiswa UPN VY. Rumusan model tersebut memperhatikan berbagai aspek yang selama ini menjadi kendala. Misalnya yang berkaitan dengan materi, teknik pembelajaran, koordinasi, indikator ketercapaian dan evaluasi

Model sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai bela negara bagi mahasiswa upn “veteran” yogyakarta



Model di atas menjelaskan bahwa pertama kali yang harus dilakukan adalah penyamaan persepsi mengenai bela negara dalam kehidupan kampus di bawah koordinasi Kapus Bela Negara. Perlu dirumuskan konsep, indicator perilaku, indicator ketercapaian (perubahan) dan evaluasi. Ini menjadi pegangan bagi seluruh civitas kampus UPN VY.

Pengenalan nilai-nilai bela negara diawali ketika mahasiswa UPN VY ketika pertama kali masuk sudah diperkenalkan dengan nilai-nilai bela negara melalui kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bela Negara (PKKBN). Pengenalan berikutnya dilakukan melalui lima mata kuliah pilar bela negara yaitu Widyawan Mawar Yasa, Pancasila, Kewarganegaraan, Olahraga dan Agama. Pengampu mata kuliah tersebut harus senantiasa berkoordinasi untuk materi, teknik pembelajaran, aktualisasi materi dan evaluasi.

Sosialisasi nilai-nilai bela negara di UPN VY tidak boleh hanya dibebankan kepada kelima mata kuliah di atas, tetapi harus didukung oleh semua mata kuliah yang ada. Oleh karena itu semua mata kuliah harus dikaitkan dengan nilai bela negara. Semua bidang kajian ilmu di UPN VY harus dapat menemukan titik sentuhnya dengan nilai bela negara. Oleh karena itu perlu disusun kurikulum yang khas UPN VY. Semua mata kuliah harus memiliki capaian pembelajaran (CP) yang menyentuh nilai bela negara.

Atmosfir bela negara harus terasa kuat di lingkungan kampus UPN VY. Nilai kejujuran, disiplin dan kreativitas harus nyata, oleh karena itu dibutuhkan keteladanan. Keteladanan dari seluruh tenaga pengajar dan tenaga kependidikan. Indikator yang sering dinilai adalah pelayanan akademik, birokrasi dan kedisiplinan waktu. Atmosfir tersebut akan semakin terasa dengan dihidrarkannya simbolisasi nilai-nilai bela negara seperti nama-nama pahlawan, lagu-lagu perjuangan dan sebagainya.

PEMBAHASAN

Manusia adalah makhluk social yang dinamis. Pengetahuan, pikiran dan tindakannya dapat berubah karena komunikasi dan interaksinya dengan lingkungan. Pandangan behavioristik menilai segala sesuatu yang ada dalam diri manusia dapat berubah tanpa mengenal batasan usia. Hal ini adalah harapan bagi setiap disain yang menginginkan perubahan sikap dan perilaku manusia.

Sosialisasi dan internalisasi nilai adalah proses penghayatan yang dilakukan dengan proses komunikasi. Keberhasilan komunikasi bergantung proses transaksional antara unsur-unsur komunikasi, yaitu : komunikator, pesan, penerima dan dampak yang diharapkan (feedback). Komunikasi juga bersifat kontekstual yang bergantung pada situasi dan kondisi yang spesifik atas terjadinya proses komunikasi. Efektifitas komunikasi adalah integrasi intensitas yang setara terhadap semua komponen komunikasi.

Proses sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai bela negara Bgi mahasiswa UPN VY diperlukan proses integrasi komunikasi juga. Pilar utamanya dosen selaku komunikator harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai. Penguasaan materi (pesan) dan teknik pembelajaran (communication style) mutlak diperlukan. Hal ini diperlukan standart yang dibakukan bagi seluruh pengampu mata kuliah.

Nilai-nilai bela negara sebagai pesan komunikasi harus memiliki batasan yang tegas. Konsep=konsep, standar moral dan contoh-contoh perilaku bela negara harus dibakukan sehingga semua komunikator merujuk pada materi pesan yang sama. Kemudian teknik penyampaiannya pun harus melihat kontekstual komunikan (mahasiswa) dan capaian pembelajaran yang diharapkan. Selain itu masih harus didukung dengan motivasi dan antusias komunikan (mahasiswa) dalam proses komunikasi. Ini adalah tantangan komunikator dalam memproduksi pesan, menyampaikan pesan dan menciptakan atmosfir komunikasi.

Proses sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai bela negara di kampus UPNVY belum terintegrasi dengan baik. Diperlukan perbaikan dan penyempurnaan pada aspek komunikasi yang mencakup komunikator, pesan, penerima dan efek yang diharapkan. Oleh karena itu penelitian ini telah merekomendasikan model yang menekankan komunikasi, integrasi, koordinasi, standarisasi dan evaluasi.

KESIMPULAN

Model sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai bela negara bagi mahasiswa UPNVY dilakukan melalui proses yang terintegrasi di bawah koordinasi Kapus Bela Negara. Proses dilakukan sejak mahasiswa masuk sampai mahasiswa menyelesaikan studi. Lima mata kuliah pilar bela negara (Wimaya, Pancasila, Kewarganegaraan, Agama dan Olahraga) dan semua mata kuliah memberikan muatan materi bela negara. Proses diperkuat dengan keteladanan dalam disiplin, kejuangan dan kreativitas. Simbol-simbol bela negara juga dihadirkan untuk menciptakan atmosfer bela negara.

Faktor pendukung untuk mewujudkan UPNVY sebagai kampus bela negara adalah faktor sejarah, bahwasannya UPNVY didirikan untuk memfasilitasi para pejuang pergerakan nasional di masa kemerdekaan untuk belajar. Semangat perjuangan membela negara terus terpelihara dan menjadi nilai yang dijaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Barker, Chris. 2000 . *Cultural Studies : Theory and Practice*. London : Sage Publications.
- Denzin, Norman K dan Lincoln, Yvonna. 1994. *Handbook of Qualitative Research*. London : Sage Publications
- Griffin, Em. 2000. *A First Look At Communication Theory*. Boston : Mc. Graw Hill Book Company
- Liliweri, Alo. 2003, *Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Littlejohn, Stephen W. 1999. *Theories of Human Communication*. sixth edition. California : Wadsworth Publishing Company.
- Lull, James.1998. *Media, Komunikasi, Kebudayaan : Suatu Pendekatan Global*.
- Ter Suroto, Agus, 2015, *Buku Bela Negara Dan Widya Mwat Yasa Edisi ke-3 (Edisi Revisi)*. jemahan, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Neuman, W Lawrence. 2000. *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches*. fourth edition. Boston : Allyn and Bacon.
- Suroto, Agus, 2015, *Buku Bela Negara Dan Widya Mwat Yasa Edisi ke-3 (Edisi Revisi)*.
- Sutopo, HB. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS PRESS.

BUDAYA KOMUNIKASI MASYARAKAT SANGIRAN DALAM UPAYA PELESTARIAN SITUS ARKEOLOGI SANGIRAN SEBAGAI WARISAN BUDAYA DUNIA

Kurnia Arofah, Basuki Agus Suparno

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Prodi Ilmu Komunikasi.

E-mail: Kurnia.arofah@upnyk.ac.id, basukiagussuparno@upnyk.ac.id

abstract

Besides being known as an ancient site that needs to be preserved, Sangiran has never been free from various problems and controversies. The quality of life of the people in Sangiran is considered to be stagnant even though the site is also threatened because of nature and the actions of indigenous people as well as migrants who continue to explore this place. This study uses a communication ethnographic research method to explore the communication culture of the Sangiran community. Primary data were obtained by researchers through the first hand, namely the people living in the Sangiran site area. Secondary data was collected through a study of libraries consisting of journals published or empowered in the mass media and on social media during the research period. The results showed there were three topics in the messages that are commonly communicated by the Sangiran community every day. The first topic, related to scientific discourse vs mythology about fossils in Sangiran. The second topic, related to the discourse of the meaning of conservation vs economic value of the site's resources. The third topic, related to hope vs. cynicism about the rules and policies that surround the life of the Sangiran community. Communication culture is expected to be able to uncover the communication gaps that occur in the Sangiran community, so that they can be bridged

Key words: Sangiran, Communication Culture, Conservation, Ethnography

PENDAHULUAN

Sangiran, sebagai situs arkeologi, diyakini menjadi tempat manusia purba hidup di masa lampau setelah adanya penemuan fosil oleh GHR von Koenigswald pada tahun 1934. Sejak penemuan fosil tersebut, hingga tahun 2009 sudah ada lebih dari 100 manusia purba yang ditemukan di lokasi ini, sehingga Sangiran dianggap sebagai salah satu situs penemuan Homo Erectus paling penting di seluruh dunia (Widuri, 2014).

Penemuan-penemuan artefak arkeologi dari jaman purba di Situs purba Sangiran yang memiliki luas 56 km² ini bahkan masih terus berlangsung hingga tahun 2019. Temuan terakhir pada tanggal 26 Februari 2019 lalu menunjukkan bahwa benda yang ditemukan berasal dari zaman Megalitikum (Ayudha, 2019). Benda-benda atau artefak purba yang sering ditemukan oleh masyarakat antara lain senjata dari bahan perunggu, serpihan emas, manik-manik, gerabah hingga alat masak seperti periuk (Duhri, 2019). Sebagian besar penemuan tersebut ditampung di Museum Situs Sangiran.

Museum yang terus dikembangkan sejak tahun 1974 ini menjadi museum yang menyimpan fosil manusia purba terlengkap di Asia (Ernifiati, 2012). Meski ribuan artefak benda purba telah ditemukan, namun pengembangan situs Sangiran tidak pernah lepas dari

beragam masalah dan kontroversi. Terutama bagi masyarakat Sangiran yang hidup di wilayah Situs yang secara administratif terpisah dalam dua kabupaten yaitu kabupaten Sragen dan kabupaten Karanganyar ini.

Di bidang pariwisata misalnya, masyarakat sekitar dianggap belum bisa mengembangkan potensi wisata sangiran secara optimal (Mulyantari, 2016). Padahal perkembangan wisata Sangiran semakin meningkat sejak tahun 2008, hingga pada tahun 2012 saja pemasukan museum Sangiran mencapai Rp 1 Miliar dengan jumlah pengunjung hampir 300 ribu wisatawan (Afandi & Ali, 2015).

Namun demikian, peningkatan tersebut tidak bertahan lama karena pada tahun 2018, Museum ini dinilai stagnan. Kondisi stagnan ini kemudian diakali oleh warga setempat dengan merintis wahana piknik alternatif dengan berbagai wahana (Kurniawan, 2018). Perintisan usaha warga untuk kelangsungan hidup wilayah wisata Sangiran ini ternyata tidak diimbangi dengan kondisi infrastruktur misalnya kondisi jalan di wilayah sangiran yang rusak, juga tidak adanya angkutan umum yang beroperasi di wilayah tersebut (Kurniawan, 2018).

Permasalahan lain yang sebenarnya lebih penting adalah adanya temuan bahwa masalah dalam pelestarian Situs Sangiran ini ada di semua zona, mulai dari zona inti, zona penyangga hingga zona pengembangan. Permasalahan ini mulai dari perubahan lahan karena faktor alam dan aktivitas manusia, belum adanya arahan mengenai pelestarian dan pemanfaatan wilayah, hingga minimnya fasilitas pendukung pengembangan Kawasan yang fasilitasnya masih minim (Nuryanti & Suwarno, 2008).

Salah satu indikasi alasan tidak optimalnya wilayah ini dan banyaknya masalah seperti pencurian, penggelapan, penjualan fosil ilegal dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian situs Sangiran adalah kurangnya manfaat yang dirasakan oleh warga setempat dengan keberadaan dan status Sangiran sebagai salah satu situs warisan dunia. Situs Sangiran yang mendunia dianggap belum memberikan manfaat bagi masyarakat yang sudah lama hidup di daerah tersebut (Aditama, 2016).

Rejeki (2013) menuliskan bahwa pamor Sangiran yang berkilau di mata peneliti dunia, ternyata tidak sejalur dengan kehidupan masyarakat setempat. Mayoritas masyarakat yang tinggal di wilayah Sangiran yang tandus hidup dalam kemiskinan. Adanya museum yang menghasilkan pendapatan hingga miliaran rupiah belum dinikmati warga sekitar karena bahkan parkir dan biaya toilet dikelola oleh dinas pariwisata setempat. Di sisi lain, kondisi tanah yang tandus juga tidak bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar, karena tanah liat daerah Sangiran juga tidak bisa dipakai sebagai bahan batu-bata maupun genteng (Adi, 2013).

Kondisi ini menjadikan banyaknya penemuan-penemuan fosil berakhir pada tangan yang tidak semestinya, misalnya di tangan pihak asing atau tengkulak (Sulistyanto, 2009). Bukan hal yang rahasia bahwa fosil yang terus ditemukan dapat menjadi ladang emas bagi orang yang hidup di Sangiran jauh sebelum sangiran ditetapkan sebagai situs arkeologi warisan dunia. Hingga saat ini, sebagian warga yang menemukan fosil tidak menyerahkan fosil tersebut kepada pihak pemerintah namun disimpan sendiri. Kegiatan jual beli fosil menjadi kegiatan sehari-hari disamping kegiatan warga bertani dan beternak.

Kegiatan tersebut tentunya melibatkan proses komunikasi antara warga desa sebagai penduduk asli dengan pihak luar desa. Hal ini menarik peneliti untuk mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana komunikasi budaya warga desa Sangiran tersebut baik dalam bertahan hidup di wilayah situs yang secara geografis kurang menguntungkan karena tandus dan gersang, tapi di sisi lain juga menguntungkan karena banyaknya sisa-sisa benda purbakala yang masih terus diburu oleh banyak orang terutama pihak asing dari manca negara.

Kedatangan dan interaksi antara warga dengan pihak-pihak asing ini merubah persepsi warga yang tadinya menganggap bahwa fosil yang sering mereka temukan tanpa berusaha keras ini adalah benda relijius dan magis, menjadi menganggap fosil adalah benda yang mengandung nilai ekonomi tinggi. Selain itu komunikasi antara warga dengan peneliti asing bahkan bisa membuat warga memiliki perilaku baru yakni berburu fosil. Warga juga memiliki pengetahuan baru sehingga bisa membedakan fosil asli dan fosil palsu, fosil yang memiliki nilai ekonomis tinggi maupun fosil yang tidak laku dijual (Sulistyanto, 2009).

Terjadinya perubahan perilaku masyarakat ini terjadi sejak adanya budaya komunikasi yang dilakukan oleh von Koningswald yang diikuti juga oleh para peneliti asing lainnya. Menurut Hermanto (2016), perubahan ini karena adanya pengaruh budaya luar dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari warga setempat.

Berdasarkan fenomena yang masih terjadi hingga saat ini karena masih banyaknya wilayah-wilayah temuan baru di situs Sangiran, peneliti tertarik untuk menggali budaya komunikasi warga desa Sangiran baik budaya komunikasi yang terjadi antar sesama warga Sangiran yang hidup di dalam Situs arkeologi terbesar di Asia, maupun budaya komunikasi warga setempat dengan pihak luar seperti wisatawan, peneliti dalam negeri maupun peneliti asing, juga komunikasi dengan pemerintah setempat sebagai pengelola Situs Sangiran.

Untuk memahami budaya komunikasi yang harus dilakukan adalah memahami dulu apa yang dimaksud dengan budaya (Fajrie, 2016). Di situs Sangiran, terdapat warga yang telah hidup lama di wilayah tersebut bahkan jauh sebelum situs tersebut menjadi terkenal seperti saat ini. Perubahan budaya dari masa ke masa beserta interaksi dengan berbagai pihak tentu mempengaruhi budaya komunikasi masyarakat Sangiran. Terutama dalam bertahan hidup sembari mempertahankan kelestarian wilayah Sangiran sebagai cagar Budaya.

Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana budaya masyarakat yang hidup di sekitar Situs Sangiran. Selain itu peneliti juga tertarik untuk mengetahui bagaimana reaksi dan persepsi masyarakat dari masa ke masa terhadap keberadaan situs Sangiran, terutama setelah situs ini semakin lama semakin berkembang sebagai destinasi wisata yang menurut artikel-artikel di media masa tidak terlalu berdampak signifikan dalam kelangsungan hidup warga sekitar Situs Sangiran.

Selain itu peneliti juga tertarik untuk mengetahui bagaimana struktur masyarakat di Situs Sangiran dalam budaya komunikasinya. Bagaimana pula budaya komunikasi masyarakat di sekitar Situs Sangiran mempengaruhi pengetahuan masyarakat dalam kaitan pelestarian Situs Sangiran sebagai warisan dunia.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena dari masa ke masa, kualitas hidup masyarakat di sangiran tidak meningkat padahal ancaman kerusakan situs warisan dunia yang menjadi tempat tinggal mereka ini juga terancam karena alam dan perbuatan warga asli maupun pendatang yang terus mengeksplorasi tempat ini. Oleh karena itu perlu diketahui bagaimana perilaku masyarakat yang salah satunya tercermin dalam budaya komunikasinya, sehingga dapat ditemukan langkah komunikasi yang tepat untuk membantu upaya pelestarian Situs Arkeologi Sangiran.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Budaya Komunikasi Masyarakat yang Hidup di Situs Sangiran dalam Upaya Mempertahankan Kelestarian Situs Arkeologi Sangiran Sebagai Warisan Budaya Dunia

TINJAUAN PUSTAKA

Budaya Komunikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), budaya adalah pikiran, akal budi, adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar dirubah. Sementara itu salah satu pengertian komunikasi adalah komunikasi dianggap sebagai proses pentransmisi informasi dan kesamaan pemahaman antara manusia satu dengan manusia lain (Lunenburg, 2010). Komunikasi dan budaya saling mempengaruhi satu sama lain. Ketika proses transmisi atau penyampaian pesan tersebut telah berlangsung lama, maka komunikasi tersebut akan menjadi budaya, yaitu budaya komunikasi (Adhitama, 2016).

Beragamnya budaya yang ada di suatu wilayah akan menghasilkan budaya komunikasi yang berbeda dengan daerah lain. Interaksi antara warga di suatu wilayah dengan pihak asing juga akan menghasilkan budaya komunikasi tertentu. Budaya sangra berhubungan dengan komunikasi dan memiliki sifat yang dinamis tergantung pada lingkungan dimana budaya tersebut berkembang. Budaya mencakup pandangan dan cara hidup manusia yang dalam perkembangannya bisa bertahan lama atau bisa juga berubah karena komunikasi dan interaksi sosial sehari-hari (Liliweri, 2003 dalam Fajrie, 2016).

Menurut Conway dan Schaller (2007), komunikasi integral dengan konsep budaya itu sendiri. Asumsinya adalah budaya manusia selalu lekat dengan bahasa, sedangkan bahasa adalah sarana utama yang digunakan dalam proses komunikasi. Budaya sendiri dapat juga didefinisikan sebagai suatu hal yang dibagikan antar orang-orang yang berkomunikasi satu sama lain melalui bahasa yang dapat dipahami Bersama, yang lebih lanjutnya dikomunikasikan kepada anggota masyarakat lainnya. Sarana untuk melalukukan transmisi komunikasi ini bisa beragam mulai dari menirukan atau memperagakan gerakan tertentu hingga mengkonstruksikan bahasa simbolik yang kompleks. Namun demikian, prinsip dasarnya adalah suatu transformasi informasi atau dengan kata lain komunikasi, selalu hadir ketika kita berbicara tentang budaya (Conway & Schaller, 2007).

Budaya komunikasi berkaitan dengan tindakan atau perilaku dan perubahan perilaku. Budaya komunikasi bisa bersifat high context atau memberikan makna tinggi, maupun low context atau memberikan makna rendah pada pesan komunikasi. Komunikasi dengan konteks tinggi merupakan yang lebih menekankan pada pesan non verbal. Sementara komunikasi dalam konteks rendah akan lebih menekankan pada pesan verbal. Kedua sifat komunikasi ini, jika dipraktekkan akan menghasilkan suatu budaya komunikasi yang dapat mencerminkan budaya suatu masyarakat atau bangsa (Samovar, 2010 dan Hofstede, 1997 dalam Adhitama, 2016).

Komunikasi Interpersonal dalam Budaya Komunikasi

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan antara orang dengan orang lainnya secara langsung dalam arti melibatkan dua orang dalam jarak yang dekat.(Peranginangin & Perbawaningsih, 2016). Conway dan Schaller (2007) menyatakan bahwa komunikasi interpersonal menciptakan budaya. Untuk bisa memahami budaya secara menyeluruh, kita harus memahami kondisi psikologi sosial komunikasi interpersonal.

Lebih lanjut, Conway dan Schaller (2007) mengutip teori dampak dinamika sosial menyebutkan bahwa pengalaman yang dimiliki oleh seseorang merupakan akumulasi pengaruh dari kekuatan, kecepatan dan seberapa banyak dia berkomunikasi dengan orang lain. Proses komunikasi interpersonal yang dinamis mempengaruhi psikologi komunikasi. Sementara itu, pengaruh-pengaruh sosial yang muncul akibat proses komunikasi kemudian mempengaruhi pembentukan budaya dengan cepat.

Menurut Singh dan Lalropuii (2014), komunikasi interpersonal dapat berfungsi berdasarkan empat prinsip. Prinsip ini antara lain, pertama, komunikasi interpersonal tidak bisa dihindari (inescapable), Kedua, komunikasi interpersonal tidak bisa diputar kembali (irreversible). Ketiga, komunikasi interpersonal adalah rumit (complicated), keempat, komunikasi interpersonal adalah kontekstual (contextual). Dengan kata lain, komunikasi interpersonal tidak hadir dalam ruang hampa atau dalam kondisi terisolasi.

Komunikasi interpersonal dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu komunikasi diadik, public speaking dan, komunikasi dalam kelompok kecil. Komunikasi interpersonal setidaknya memiliki kegunaan antara lain memberikan dan mengumpulkan informasi, mempengaruhi sikap dan pendirian orang lain, mengembangkan dan mempertahankan hubungan, memformulasikan rasa dan pengalaman kehidupan kita di dunia, mengucapkan keinginan pribadi dan memahami keinginan orang lain, mengekspresikan emosi, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah, serta mengantisipasi dan membayangkan perilaku yang akan datang. Komunikasi interpersonal yang baik akan mendukung proses-proses seperti keintiman hubungan, konseling, manajemen, penjualan bahkan manajemen konflik (Sethi & Seth, 2009).

Ada setidaknya enam hambatan bagi terjadinya komunikasi interpersonal yang efektif menurut (Sethi & Seth, 2009) Pertama adalah sentimen. Seringkali pesan disampaikan atau diterima oleh orang yang berbeda dengan cara yang berbeda pula. Emosi yang berlebihan kadang membuat orang mengalami kesalahpahaman dalam berkomunikasi interpersonal. Hambatan kedua adalah, pengurangan. Terkadang komunikasi menyaring pesan yang akan ia sampaikan, umumnya tujuannya adalah untuk membentuk agar pesan sesuai dengan yang diinginkan oleh komunikator.

Hambatan yang ketiga adalah pesan yang terlalu banyak dijejali dengan informasi. Otak manusia hanya bisa memproses sejumlah kecil informasi dalam waktu yang sama. Membanjiri proses komunikasi interpersonal dengan informasi yang tidak relevan akan membuat pesan semakin sulit dipahami. Hambatan ke empat adalah sikap defensif. Ketika seseorang merasa mereka ditekan atau disudutkan dalam posisi yang sulit, umumnya akan sulit terjadi pengertian yang mutual diantara komunikator dan komunikan. Hambatan keenam adalah perbedaan budaya yang kadang memunculkan kesalahan interpretasi pesan. Hambatan terakhir yang ke tujuh adalah logat. Tidak semua orang memahami logat atau jargon-jargon yang digunakan oleh lawan bicaranya. Hal ini bisa menghambat proses komunikasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian etnografi komunikasi untuk menggali budaya komunikasi masyarakat sangiran. Dalam penelitian, etnografi sendiri kadang dianggap sebagai paradigma filsafat, ada pula yang menganggap etnografi sebagai metode jika relevan dengan obyek penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Berbeda dengan etnografi secara umum, etnografi komunikasi fokus pada pola-pola komunikasi dalam suatu masyarakat (Iswatiningsih, 2016). Metode etnografi komunikasi merupakan metode yang diterapkan untuk melihat pola-pola komunikasi kelompok sosial dengan salah satu asumsi para anggota budaya akan menciptakan makna yang digunakan bersama.

Etnografi komunikasi mampu mengungkapkan jenis identitas yang digunakan bersama oleh anggota komunitas budaya. mampu mengungkapkan makna kinerja publik yang digunakan bersama dalam komunitas, dan mampu mengungkapkan kontradiksi atau paradoks-paradoks yang terdapat dalam sebuah komunitas budaya (Zakiah, 2005). Dalam hal ini adalah mengungkap makna yang dibuat oleh individu-individu yang menjadi bagian dari masyarakat

sangiran sebagai situs arkeologi warisan budaya. Data primer diperoleh oleh peneliti melalui tangan pertama yaitu masyarakat yang tinggal di wilayah situs sangiran. Data digali melalui observasi langsung selama periode 1-2 bulan. Selanjutnya data primer juga diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang memenuhi kriteria. Sementara, kriteria narasumber adalah: 1. Warga yang tinggal di wilayah sangiran lebih dari 10 tahun., 2. Aktif dalam kegiatan pelestarian wilayah sangiran sebagai situs arkeologi warisan budaya. Narasumber disini sekaligus merupakan subyek penelitian yang menjadi sumber informasi yang dicari. Data sekunder dikumpulkan melalui kajian terhadap pustaka-pustaka berupa jurnal-jurnal terkini maupun pemberitaan-pemberitaan di media massa maupun di media sosial selama masa penelitian berlangsung.

HASIL PENELITIAN

Kehidupan Masyarakat di Sekitar Sangiran

Museum Purba sangiran adalah sebuah kesatuan museum yang terdiri dari beberapa kluster. Museum yang terbesar adalah Museum Purbakala Sangiran yang terletak di desa Kalijambe, Kabupaten Sragen Jawa Tengah. Museum ini adalah museum pusat yang merangkum semua informasi lengkap kebudayaan purba yang ditemukan di wilayah sangiran.

Selain museum pusat ini, di wilayah sangiran terdapat empat museum lain yang juga mengumpulkan informasi-informasi sejarah purbakala di wilayah sangiran. Antara lain Museum Geologi Sangiran, Museum Antropologi Sangiran, Museum Paleontologi Sangiran dan Museum Arkeologi Sangiran. Keempat museum ini terletak dalam radius tiga hingga empat kilometer dari Museum Purbakala Sangiran.

Di area museum, ada banyak tour guide mulai dari tour guide baru hingga yang sudah puluhan tahun menjadi guide di situs tersebut. Umumnya mereka punya pengetahuan lengkap tentang arkeologi, antropologi, dan geologi wilayah sangiran yang mereka pelajari turun-temurun dari orang tua, serta dari pengetahuan dan dongeng di wilayah sangiran. Para guide ini adalah warga di sekitar sangiran yang bekerja resmi untuk museum. Umumnya para tour guide ini tidak memiliki ijazah formal mengenai keilmuan yang mereka sampaikan. Namun karena sering mendampingi peneliti baik dari indonesia, jepang, belanda dan negara lain, pengetahuan mereka menjadi lengkap.

Selain tour guide, warga sekitar museum juga mengandalkan pendapatan dari membuka warung makan, penginapan dan toko souvenir. Umumnya warga yang hidup di sekitar kluster museum memiliki pengetahuan tinggi terkait fosil. Namun, sebagian besar masyarakat yang hidup jauh dari museum, tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan mereka yang mengandalkan pendapatan dari wisatawan atau peneliti yang datang ke museum. Meskipun merasa keberadaan museum berjasa bagi terbangunnya infrastruktur seperti jalan raya, namun umumnya sebagian besar warga sekitar sangiran ini tidak merasakan dampak yang signifikan.

Budaya Komunikasi

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan, ada banyak tema komunikasi yang terjadi dan berkembang di situs Sangiran. Situs Sangiran menyebar ke dua kabupaten, kabupaten Sragen dan kabupaten Karanganyar di, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Wilayahnya berkisar hingga radius 59 km² di mana sekitar 166 desa mendiami daerah tersebut. Tiga pihak utama membentuk interaksi komunikasi di bidang ini: pertama, Penduduk Sangiran; kedua, peneliti, pengunjung atau wisatawan di situs Sangiran; ketiga, personil Balai Pelestarian Manusia Kuno di Situs Sangiran.

Ada tiga topik dalam pesan-pesan yang biasa dikomunikasikan oleh masyarakat Sangiran sehari-hari. Topik pertama, terkait wacana ilmiah vs wacana mitologi mengenai keberadaan tulang purba atau fosil di Sangiran. Topik ini muncul akibat interaksi antara masyarakat Sangiran dengan peneliti yang datang ke Sangiran mulai sejak sebelum penjajahan Belanda hingga kini. Topik kedua, terkait wacana makna pelestarian dengan makna ekonomi. Masalah-masalah seperti pencurian, penyelundupan dan perdagangan fosil secara diselesaikan oleh pemerintah Indonesia dengan mendirikan sebuah museum sederhana pada tahun 1988 untuk melestarikan fosil yang ditemukan di daerah tersebut. Kemudian museum ini diperkuat dengan pendirian Balai Pelestarian Manusia Kuno situs Sangiran (AMPHS - atau BPSMPS dalam Bahasa Indonesia), pada 2007, terdiri dari satu Museum utama dan empat Museum pendukung. Solusi terakhir adalah masalah Peraturan Warisan Budaya no 11, tahun 2010 (UU Cagar Budaya no. 11 tahun 2010).

Topik ketiga terkait dengan harapan vs sinisme atas aturan dan kebijakan yang melingkupi kehidupan masyarakat Sangiran. Interaksi antara penduduk Sangiran; peneliti, pengunjung atau wisatawan di situs Sangiran; dan personil Balai Pelestarian Manusia Kuno di situs Sangiran menciptakan budaya komunikasi yang kompleks. Dari pandangan budaya komunikasi, penduduk Sangiran sudah memiliki persepsi yang sama tentang fosil. Pandangan Sangiran tentang fosil sebagai objek yang mengandung nilai-nilai mistis dan magis telah terkikis oleh interaksi mereka dengan para peneliti dan pesan-pesan yang dibawa oleh museum dan Peraturan Warisan Budaya. Dari pengertian dan makna, warga sudah memiliki pemahaman yang sama bahwa fosil adalah benda sejarah yang mengandung pengetahuan, karenanya harus dilestarikan. Namun, kebuntuan komunikasi antara kelompok warga dan juga dengan BPSMPS sebagai wakil pemerintah menciptakan kesenjangan komunikasi yang menyebabkan masalah dan rumor di antara semua pihak. Oleh karena itu perlu dijumpatani.

KESIMPULAN

Budaya komunikasi adalah genre pembicaraan yang ada di dalam masyarakat yang manifest dalam arena publik; sesuatu yang relatif permanen dan terdistribusi secara luas baik dalam bentuk dan cara-cara komunikasi, saling bergantung satu sama lain yang merupakan kebiasaan sehari-hari individu-individu yang hidup di dalam masyarakat. Budaya komunikasi mampu mengungkap komunikasi semua struktur masyarakat, kemudian mencoba melihat di mana celah yang belum dijumpatani antara struktur masyarakat ini sehingga jurang-jurang komunikasi yang terjadi di dalam masyarakat Sangiran dapat dijumpatani dan mendorong upaya pelestarian situs yang bermanfaat bagi semua pihak.

REFERENSI

- Aditama, Satria (2016). Analisis Budaya Komunikasi Pada Organisasi Pemerintah. *Jurnal Info Artha*, Vol 3 (2016). Hal: 77-88
- Afandi, Rois Lukman, Ali, M Muktie (2015). Kajian Pengaruh Keberadaan Kawasan Wisata Sangiran Terhadap Aspek Ekonomi, dan Aspek Sosial Masyarakat. *Jurnal Teknik PWK*, Volume 4 Nomor 2, 2015. Hal: 282-292
- Ayudha, Mohammad.(Februari 26, 2019). Penggalan Temuan di Situs Purba Sangiran. www.antarafoto.com, diunduh 23 Maret 2018 melalui <https://www.antarafoto.com/bisnis/v1551167715/penggalan-temuan-di-situs-purba-sangiran>
- Conway, Lucian., Schaller, Mark. (2007). How Communication Shapes Culture. In Fiedler, Klaus. *Social Communication*.(pp. 107-127). New York: Psychology Press
- Duhri, Muh Khodiq. (Februari 26, 2019) . Kuburan Kuno Terdeteksi di 5 Desa Sragen. diunduh 23 Maret 2018 melalui <https://soloraya.solopos.com/read/20190226/491/974548/>

[kuburan-kuno-terdeteksi-di-5-desa-sragen](#)

- Ernifiati, Emmy (2012). Perkembangan Museum Situs Sangiran dan Pengaruhnya Terhadap Ilmu Pengetahuan Tahun 1974-2004. *Journal of Indonesian History*, Vol 1 No 2 Tahun 2012 . Hal 118-124
- Fahmi, Ridlo Muhammad (2014) KOMUNIKASI PEMASARAN WISATA SANGIRAN (Studi Deskriptif Kualitatif Aktifitas Komunikasi Pemasaran Wisata Museum Purbakala Sangiran Oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Tahun 2012). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.
- Fajrie, Mahfudlah. 2016. Budaya Komunikasi Warga Madura (Kajian Komunitas Profesi Pangkas Rambut Maduram di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara). *Wahana Akademika*, Volume 3 Nomor 1, April 2016.
- Kurniawan, David. (Maret 17, 2019). Wisata Sragen: Museum Sangiran Stagnan, Warga Rintis Wahana Piknik Alternatif. diunduh 23 Maret 2018 melalui <https://soloraya.solopos.com/read/20180317/491/903656/wisata-sragen-museum-sangiran-stagnan-warga-rintis-wahana-piknik-alternatif>
- Kurniawan, David. (Juni 17, 2018) . Pengunjung Museum Sangiran Sragen Merasa Tak Nyaman. diunduh 23 Maret 2018 melalui <https://soloraya.solopos.com/read/20180618/491/922703/pengunjung-museum-sangiran-sragen-mengeluh-tak-nyaman>
- Iswatiningsih, Daroe (2016). Etnografi komunikasi: sebuah pendekatan dalam mengkaji perilaku masyarakat tutur perempuan jawa. *Prosiding Seminar Nasional Prasasti (Pragmatik : Sastra dan Linguistik)*. Hal 1-8
- Lunenburg, Fred. C (2010). *Communication: The Process, Barriers, And Improving Effectiveness*. *Schooling*, Volume 1, No 1, 2010. P: 1-11
- Mulyantari, Enny (2016). Strategi Pengembangan Situs Manusia Purba Sangiran Sebagai Daya Tarik Wisata Budaya, *Jurnal Media Wisata*, Volume 14, Nomor 1, Mei 2016, p . 333-344
- Nuryanti, Wiendu., Suwarno, Nindyo (2008). Kajian Zonasi Pengembangan Kawasan Pusaka Studi Kasus: Situs Sangiran, Sragen. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, Vol 15, No.3, November 2008: 101-110
- Peranginangin, Bernardus Bastanta., Perbawaningsih, Yudi (2016). Model Komunikasi Interpersonal Generasi Muda Suku Batak Karo di Yogyakarta Melalui Tradisi Ertutur. *Jurnal Komunikasi AspiKom*, Volume 2 Nomor 6, Januari 2016, hlm 425-436.
- Raharjo, Mudjia. (2018). Paradigma interpretif. UIN, Malang. Diunduh dari <http://repository.uin-malang.ac.id/2437/1/2437.pdf>, 25 Maret 2019.
- Sethi, Deepa., Seth, Manisha (2009). *Interpersonal Communication : Lifeblood of an Organisation*. *The IUP Journal or Soft Skill*, Vol III, Nos. 3&4, 2009. P.33-40
- Singh, Amit Kumar., Lalropuii (2014). Role of Interpersonal Communication in Organizational Effectiveness. *International Journal of Research in Management & Business Studies*. Vol.1, Issue 4, Oct-Dec, 2014. 36-39.
- Sulistyanto, Bambang (2009). Warisan Dunia Situs Sangiran Persepsi Menurut Penduduk Sangiran. *Wacana*, Vol . 11 No. 1 (April 2009): 57-80
- Zakiah, Kiki (2005). Penelitian Etnografi Komunikasi: Tipe dan Metode. *Mediator* Vol 9 No 1 Juni 2008.
- Widuri, Eka Ayu. 2014. Sangiran: Kekayaan Sejarah Bangsa Sebagai Warisan Budaya Dunia. Diunduh 23 Maret 2018 melalui https://www.academia.edu/7528093/SANGIRAN_KEKAYAAN_SEJARAH_BANGSA_SEBAGAI_WARISAN_BUDAYA_DUNIA

KEAKURATAN MODEL PREDIKSI FRAUD PADA INDUSTRI PERBANKAN

Sri Astuti*, Marita, Suchyo Heriningsih
FEB UPN "Veteran" Yogyakarta,
Korespondensi*: sri_astuti@upnyk.ac.id

Abstract

This study examines the factors that influence banking companies in conducting fraud. This study uses the pentagon fraud theory approach. The factors studied are pressure, opportunity, rationalization, competence and arrogance.

This study uses data from banking companies listed on the Indonesian Stock Exchange (BEI) from 2013 to 2018. Samples of data used in this study were 69. The analytical tool used in this study is multiple regression analysis.

After testing the classical assumptions and multiple regression, only the arrogance variable is able to predict that the company is committing fraud.

Keywords: Fraud, Pressure, Opportunity, Rationalization, Competence, Arrogance

PENDAHULUAN

Pada literatur akuntansi telah dijelaskan bahwa fraud atau kecurangan/penipuan merupakan kejahatan tinggi, penyalahgunaan terhadap kepercayaan, penggelapan, serta penyimpangan. Perbedaan pada implikasi fraud terhadap auditor digolongkan menjadi 2 yaitu, fraud yang dilakukan karyawan dan fraud yang dilakukan manajemen (Bawekes, 2018).

Definisi fraud sangat luas dan dapat diartikan pada beberapa kategori fraud. Namun secara umum, unsur-unsur dari fraud adalah fakta bersifat material, dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan, dengan maksud untuk menyebabkan suatu pihak beraksi, harus terdapat salah pernyataan, dari suatu masa lampau atau sekarang, pihak yang dirugikan harus beraksi terhadap salah pernyataan tersebut dan merugikan (Maghfiroh dkk, 2015).

Berdasarkan teori fraud tree, terdapat 3 bentuk fraud, yaitu corruption, asset misappropriation dan fraud statement. Korupsi umumnya didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan pada sektor pemerintahan dan juga di perusahaan publik demi keuntungan pribadi. Asset Misappropriation atau pengambilan aset secara ilegal (tidak sah atau melawan hukum) yang dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola/mengawasi aset tersebut disebut menggelapkan. Kecurangan pelaporan terdiri atas kecurangan laporan keuangan yang berkenaan dengan penyajian laporan keuangan dan kecurangan dalam penyusunan laporan non keuangan (ACFE, 2016).

Laporan keuangan disusun oleh manajemen untuk dipertanggungjawabkan kepada pemilik. Dalam teori keagenan dikenal dengan adanya pemisahan antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan. Sehingga manajemen sebagai pengelola perusahaan mempunyai hak pengendalian yang tinggi terhadap perusahaan. Tingginya hak pengendalian terhadap perusahaan tersebut bisa menimbulkan adanya penyalahgunaan wewenang dalam menyusun laporan keuangan. Fraud merupakan tindakan yang disengaja oleh manajemen perusahaan, pihak tata kelola, karyawan atau pihak ketiga yang melakukan penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau illegal (Amiruddin dan Sundari, 2012).

Menurut ACFE (2016), fraud statement merupakan fraud yang dilakukan oleh manajemen, karena laporan keuangan disusun oleh manajemen. Berdasarkan teori fraud pentagon, terdapat beberapa faktor pemicu orang melakukan fraud, yaitu adanya tekanan, peluang, rasionalisasi, kompetensi dan arogansi.

Menurut Skuosen (2015) Financial stability merupakan keadaan yang memaksa (menekan) suatu perusahaan harus menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi stabil. Peluang pada kecurangan laporan keuangan dapat terjadi pada tiga kategori yaitu: nature of industry, ineffective monitoring dan organizational structure; Integritas manajemen merupakan penentu utama dari kualitas laporan keuangan. Ketika integritas manajer dipertanyakan, maka keandalan laporan keuangan diragukan. Jika CEO atau manajer puncak lainnya sangat tidak peduli pada proses pelaporan keuangan, seperti terus mengeluarkan prakiraan yang terlalu optimistik, pelaporan keuangan yang curang lebih mungkin terjadi (Skouken. et al, 2015). Dapat dilihat bahwa faktor-faktor yang menyebabkan fraudulent financial reporting yang berasal dari rationalization berkaitan dengan adanya hubungan yang tidak baik antara manajemen dan auditor, juga adanya suatu kegagalan manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan, serta perilaku manajemen laba yang ada dalam perusahaan. Menurut Wolfe dan Hermanson (2004), kompetensi memberi pelaku kesempatan untuk mengubah keinginan menjadi kenyataan. Ada enam sifat umum kompetensi pribadi untuk melakukan kecurangan, antara lain adalah menguasai kecerdasan untuk memahami dan mengeksploitasi suatu situasi. Menurut Crowe, kesombongan atau kurangnya hati nurani merupakan sikap superioritas dan hak atau keserakahan dari orang yang percaya bahwa pengendalian internal tidak secara pribadi diterapkan. Arogansi merupakan sikap kesombongan yang ekstrim dari seseorang (kelompok). Atau keangkuhan yang berlebihan dan sikap superioritas dan hak, sehingga perlu diperiksa dan dialihkan. Yusof, et., al (2017), mengemukakan bahwa jumlah foto CEO dalam laporan tahunan perusahaan bisa menjadi salah satu proksi penting dalam mengukur arrogance. Arrogance bisa berdampak buruk kepada perusahaan dan seseorang, karena bisa menghancurkan karir atau perusahaan tersebut.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) pada tahun 2014 menunjukkan fakta bahwa sektor keuangan dan perbankan justru merupakan sektor yang terbanyak mengalami kasus fraud dibanding sektor-sektor yang lain. Kasus fraud pada perusahaan perbankan di Indonesia melibatkan banyak pihak manajemen dan jumlah kerugian atas fraud adalah besar. Penelitian tentang fraud dengan menggunakan teori fraud pentagon telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Tetapi hasil penelitian sebelumnya masih belum konsisten.

Berdasarkan teori, hasil penelitian sebelumnya, dan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk menguji secara empiris:

- Apakah variabel tekanan berpengaruh signifikan terhadap indikasi perusahaan melakukan fraud?
- Apakah variabel peluang berpengaruh signifikan terhadap indikasi perusahaan melakukan fraud?
- Apakah variabel rasionalisasi berpengaruh signifikan terhadap indikasi perusahaan melakukan fraud?
- Apakah variabel kompetensi berpengaruh signifikan terhadap indikasi perusahaan melakukan fraud?
- Apakah variabel arogansi berpengaruh signifikan terhadap indikasi perusahaan melakukan fraud?

KAJIAN TEORI

2.1. Pengertian Fraud

Pada literatur akuntansi telah dijelaskan bahwa fraud atau kecurangan/penipuan merupakan kejahatan tinggi (*white-collar crime*), penyalahgunaan terhadap kepercayaan, penggelapan, serta penyimpangan. Perbedaan pada implikasi fraud/kecurangan/penipuan terhadap auditor digolongkan menjadi 2 (dua) tingkatan yaitu, fraud yang dilakukan karyawan (*employee fraud*) dan fraud yang dilakukan manajemen (*management fraud*) (Bawekes, 2018).

2.2. Teori fraud tree

Menurut The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Fraud Tree adalah sistem klasifikasi dari berbagai bentuk kecurangan (Tuanakotta, 2010). ACFE sendiri merupakan suatu organisasi profesional yang bertujuan untuk memberantas kecurangan.

Berikut penjelasan masing-masing cabang yang terdapat pada fraud tree menurut Diany (2014): (1) *Corruption*. Korupsi umumnya didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan pada sektor pemerintahan dan juga di perusahaan publik demi keuntungan pribadi. Korupsi berdasarkan fraud tree terdiri dari empat hal: *Conflict of interest* atau benturan kepentingan yang sering ditemui dalam bentuk bisnis pejabat atau penguasa dan keluarga serta kroni-kroninya. *Bribery* atau penyuapan yang sering dijumpai dalam kehidupan bisnis dan politik di Indonesia. *Illegal gratuities* yaitu pemberian atau hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari penyuapan, hal ini juga sering dijumpai dalam kehidupan bisnis dan politik di Indonesia. *Economic extortion* adalah ancaman terhadap rekanan, ancaman ini bisa secara terselubung atau terbuka. (2) *Asset Misappropriation*. *Asset Misappropriation* atau pengambilan aset secara ilegal (tidak sah atau melawan hukum) yang dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola/mengawasi aset tersebut disebut menggelapkan. *Asset Misappropriation* dalam bentuk cash atau uang dilakukan dalam tiga bentuk yaitu *skimming*, *larceny*, dan *fraudulent disbursements*. (3) *Fraudulent Statement*. Kecurangan pelaporan terdiri atas kecurangan laporan keuangan yang berkenaan dengan penyajian laporan keuangan dan kecurangan dalam penyusunan laporan non keuangan. Kecurangan dalam menyusun laporan keuangan biasanya berupa salah saji baik *overstatement* maupun *understatement*. Kecurangan dalam penyusunan laporan non keuangan yaitu berupa penyampaian laporan non keuangan yang menyesatkan, lebih baik dari kondisi yang sesungguhnya, pemalsuan atau pemutarbalikan keadaan, dapat tercantum dalam dokumen yang diperlukan pihak intern maupun ekstern.

2.3. Teori Fraud Pentagon

Teori fraud pentagon atau yang disebut juga dengan *crowe's fraud pentagon theory* adalah perluasan dari model *fraud triangle* yang dikembangkan oleh Donald Cressey. Donald Cressey menyimpulkan hasil risetnya bahwa fraud memiliki tiga sifat umum yang yaitu insentif atau tekanan untuk melakukan fraud, adanya peluang/kesempatan untuk melakukan fraud, dan adanya dalih untuk membenarkan tindakan (Horwath, 2010). *Fraud triangle* telah banyak membantu mengidentifikasi kecurangan tapi tidak pada semua situasi. Kemudian Crowe's mengembangkan model fraud menjadi lima elemen yaitu *pressure*, *opportunity* dan *rationalization*, *competence*, *arrogance* yang kemudian dinamakan dengan teori fraud pentagon (Andriani, 2018)

Pressure merupakan dorongan orang untuk melakukan fraud. Tekanan tersebut muncul tidak hanya karena kebutuhan atau masalah financial saja, tetapi karena terdorong oleh keserakahan. Penggelapan uang perusahaan oleh pelaku yang bermula dari suatu tekanan kebutuhan keuangan yang mendesak (Priantara, 2013). Dalam *Statemen of Auditing Standars*

(SAS) No. 99, terdapat empat jenis kondisi umum penyebab adanya tekanan yang dapat mengakibatkan kecurangan yaitu (Skousen et al, 2015): stabilitas keuangan, target keuangan, tekanan pihak luar dan personal financial need.

Financial stability merupakan keadaan yang memaksa suatu perusahaan harus menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi stabil. Perusahaan mungkin akan memanipulasi laba ketika stabilitas keuangan atau profitabilitasnya terancam oleh kondisi ekonomi, industri atau kondisi operasi seperti berikut: (a) tingkat persaingan yang tinggi; (b) pertumbuhan yang cepat atau profitabilitas yang tidak biasa; (c) persyaratan akuntansi, undang-undang atau peraturan yang baru; (d) penurunan margin keuntungan; (e) penurunan permintaan pelanggan; (f) kerugian operasional; (g) arus kas negatif yang berulang dari operasi; (h) kerentanan tinggi terhadap perubahan yang cepat (yaitu teknologi, keusangan, atau tingkat suku bunga).

Opportunity merupakan peluang yang memungkinkan terjadinya fraud. Peluang dapat terjadi karena pengendalian internal yang lemah, serta pengawasan manajemen yang kurang baik (Widarti, 2015). Untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya fraud perusahaan dapat meningkatkan pengendalian internal serta meningkatkan pengawasan. Agar laporan keuangan tersaji dengan baik biasanya terdapat pengauditan yang dilakukan oleh KAP.

Perusahaan akan mencari KAP yang kredibilitasnya tinggi untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dimata pengguna laporan keuangan. KAP BIG 4 dianggap memiliki kualitas yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan KAP non BIG 4. SAS No. 99 menyebutkan bahwa peluang pada kecurangan laporan keuangan dapat terjadi pada tiga kategori yaitu: nature of industry, ineffective monitoring dan organizational structure (Skouseen. et al, 2015).

Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya fraud, di mana pelaku fraud selalu mencari pembenaran secara rasional untuk membenarkan perbuatannya. Adanya suatu sikap, karakter atau seperangkat nilai-nilai etika yang memungkinkan manajemen/pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam suatu lingkungan yang memberikan mereka tekanan yang cukup besar sehingga menyebabkan mereka membenarkan pelaporan keuangan yang tidak benar tersebut.

Ada penelitian yang menunjukkan bahwa kejadian kegagalan audit dan litigasi meningkat dengan cepat setelah terjadinya perubahan auditor. Oleh karena itu perubahan auditor sebagai proxy untuk rasionalisasi (Skousen, 2015).

Competence memiliki makna yang sama dengan capability dalam fraud diamond yang dikemukakan Wolfed dan Hermanson. Crowe mendefinisikan kompetensi, sebagai kemampuan karyawan untuk mengesampingkan pengendalian internal, mengembangkan strategi penyembunyian yang canggih, dan mengendalikan situasi sosial demi keuntungannya dengan menjual kepada orang lain (Horwath, 2012).

Menurut Wolfe dan Hermanson fraud tidak akan terjadi tanpa keberadaan orang yang tepat dengan kemampuan yang tepat. Pengawasan lemah memberikan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan fraud dan orang tersebut merasionalisasikan perilaku fraud-nya. Namun, orang tersebut harus memiliki kemampuan untuk mengenali peluang sebagai sebuah kesempatan untuk mengambil keuntungan tersebut (Priantara, 2013).

Menurut Crowe, kesombongan atau kurangnya hati nurani merupakan sikap superioritas dan hak atau keserakahan dari orang yang percaya bahwa pengendalian internal tidak secara pribadi diterapkan. Sebuah studi oleh Committee of Sponsoring Organisations (COSO) telah menemukan bahwa 70% kecurangan memiliki profil yang menggabungkan tekanan dengan kesombongan atau keserakahan (Andriani, 2018). Crowe mengatakan bahwa

banyak kecurangan yang dilakukan oleh orang-orang di posisi yang sangat senior dengan ego besar. Menurut Crowe, keangkuhan yang berlebihan merupakan sikap superioritas dan hak, sehingga perlu diperiksa dan dialihkan.

Yusof, et., al, mengemukakan bahwa jumlah foto CEO dalam laporan tahunan perusahaan bisa menjadi salah satu proksi penting dalam mengukur arrogance. Yusof, et., al juga menyatakan bahwa semakin banyak jumlah foto CEO yang terpampang pada sebuah laporan tahunan dapat mengindikasikan tingginya tingkat arogansi CEO dalam perusahaan tersebut.

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Tekanan terhadap kinerja manajemen berpengaruh signifikan terhadap indikasi perusahaan melakukan fraud.
- H2 : Peluang melakukan fraud berpengaruh signifikan terhadap indikasi perusahaan melakukan fraud.
- H3 : Sikap rasionalisasi manajemen berpengaruh signifikan terhadap indikasi perusahaan melakukan fraud.
- H4 : Kompetensi manajemen berpengaruh signifikan terhadap indikasi perusahaan melakukan fraud.
- H5 : Sikap Arogansi manajemen berpengaruh signifikan terhadap indikasi perusahaan melakukan fraud.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dengan metode deskriptif kuantitatif, Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018. Dengan asumsi bahwa selama ini fraud banyak terjadi di perbankan. Teknik sampling menggunakan purposive sampling, dengan kriteria: perusahaan menyampaikan annual report secara terbuka, memiliki laba positif, dan data tersedia lengkap. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah pengungkapan perusahaan, dan data keuangan perusahaan perbankan Indonesia tahun 2015-2018. Data observasi dalam penelitian ini sebesar 74. Berikut tabel data dalam penelitian ini:

Tabel 1. Sampel Data

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan perbankan listing tahun 2018	45
2	Tidak berturut-turut listing	-8
3	Data tidak lengkap	-15
	Perusahaan sampel	22
	Data observasian 22 x 4 tahun	92
	Data outlier	-23
	Data yang di olah	69

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah fraud. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy. Angka 1 meunjukkan bahwa perusahaan diindikasikan melakukan manipulasi laporan keuangan, dan angka 0 jika perusahaan tidak diindikasikan melakukan manipulasi laporan keuangan. Perusahaan terindikasi melakukan manipulasi laporan keuangan diprosikan dengan menggunakan model Beneish M-Score.

Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah komponen fraud pentagon, meliputi tekanan, peluang, rasionalisasi, kompetensi dan arogansi. Variabel tekanan diukur dengan menggunakan stabilitas keuangan. Variabel peluang diukur dengan menggunakan dummy kualitas audit (1 jika diaudit oleh KAP big4; 0 jika tidak). Variabel rasionalisasi diukur dengan menggunakan dummy pergantian KAP (1 jika terdapat pergantian auditor; 0 jika tidak). Variabel kompetensi diukur dengan menggunakan dummy pergantian direksi (1 jika terjadi pergantian; 0 jika tidak), dan variabel arogansi diukur dengan menggunakan frekuensi foto manajemen di laporan tahunan.

Data dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan alat analisis regresi berganda. Hipotesis penelitian akan didukung jika nilai signifikansi t dari hasil pengolahan regresi nilai signifikansi kurang dari 5%. Variabel fraud diukur dengan dummy, angka 1 menunjukkan bahwa perusahaan diindikasikan melakukan manipulasi laporan keuangan, dan angka 0 jika perusahaan tidak diindikasikan melakukan manipulasi laporan keuangan. Untuk menentukan perusahaan manipulator atau non-manipulator, diidentifikasi dengan menggunakan analisis Beneish M-Score, dengan persamaan sebagai berikut:

$$M = -4.84 + 0.92*DSRI + 0.528*GMI + 0.404*AQI + 0.892*SGI + 0.115*DEPI - 0.172*SGAI + 4.679*TATA - 0.327*LVGI$$

Keterangan: M = Manipulator (1); non-manipulator (0) ; DSRI = Days’ Sales in Receivables Index; GMI = Gross Margin Index; AQI = Asset Quality Index; SGI = Sales Growth Index; DEPI = Depreciation Index; SGAI = Sales, General and Administrative expenses Index; LVGI = Leverage Index; TATA - Total Accruals to Total Assets.

Kemudian dari 8 variabel tersebut di kombinasikan dan dihasilkan suatu score di sebut dengan M-Score. Apabila nilai M-Score di bawah -2.22 maka kemungkinan perusahaan tersebut prudent, tetapi apabila M-Score lebih besar dari -2.22 maka kemungkinan perusahaan tersebut melakukan manipulasi pada laporan keuangannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda. Adapun jumlah data yang diolah dalam penelitian ini sebanyak 69 data observasian. Sebagai gambaran data yang diolah dalam penelitian ini, maka berikut disajikan statistik deskriptif atas data sebagai berikut:

Statistik Deskriptif

Tahap awal melakukan pengujian dengan menguji deskriptif atas data yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut ini gambaran data yang diolah, ditunjukkan dalam table 1 berikut ini:

Tabel 2. Staitistik Deskriptif

	Mean	Std. Deviation	N
Fraud	.1159	.32250	69
Tekanan	.1159	.11876	69
Peluang	.6377	.48419	69
Rasionalitas	.1739	.38181	69
Kompetensi	.6087	.49162	69
Arogansi	1.5865	.18501	69

Sumber: Data diolah tahun 2019

Tabel 3. Distribusi Frekuensi

Variabel	Dummy Variabel	Frekuensi	Persentase
Peluang	1	25	36
	0	44	64
Rasionalisasi	1	57	83
	0	12	17
Kompetensi	1	27	39
	0	42	61

Hasil pengolahan data SPSS 2017

Berdasarkan data di atas, rata-rata nilai tekanan melakukan fraud sebesar 0,12. Tekanan melakukan fraud diukur dengan menggunakan ukuran perubahan total asset yang menggambarkan stabilitas keuangan. Rata-rata peluang melakukan fraud adalah sebesar 0,64, diukur dari kualitas auditor ekstern. Sebagian besar perusahaan yang diobservasi menggunakan KAP big4 yang menggambarkan sebagai pengukur peluang, yaitu sebesar 44 perusahaan. Rata-rata perusahaan melakukan pergantian auditor sebesar 0,17 atau hanya 12 perusahaan yang melakukan pergantian auditor. Faktor kemampuan melakukan fraud, diukur dari pergantian dewan direksi rata-rata sebesar 0,62 atau sebanyak 42 perusahaan melakukan pergantian dewan direksi. Sedangkan factor arogansi yang ditunjukkan melalui penayangan foto manajemen di laporan tahunan rata-rata 1,6 atau sebanyak 41 kali penayangan.

Pengujian Hipotesis

Hasil uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi berganda, yang sebelumnya telah dilakukan dilakukan uji asumsi klasik, dan dinyatakan lolos dari uji asumsi klasik, maka selanjutnya adalah diuji signifikansi F. Dari hasil pengujian regresi yang telah dilakukan dapat terlihat di tabel 4 dan tabel 5 berikut ini:

Berdasarkan pengujian regresi yang telah dilakukan, nilai signifikansi F sebesar 0,046 (kurang dari 0,05), sehingga model penelitian ini layak untuk diuji dan diinterpretasikan.

Tabel 4. Hasil Uji Regresi

Variabel	t	Signifikansi
Tekanan	-1.629	.108
Peluang	-.588	.559
Rasionalisasi	-1.740	.087
Kompetensi	-.258	.797
Arogansi	-2.201	.031
F	2.412	0.046

Sumber: Data diolah tahun 2019

Berdasarkan pengujian di atas, terdapat empat faktor pemicu kecurangan (tekanan, peluang, rasionalitas, dan kemampuan) yang tidak berpengaruh terhadap fraud, dan hanya variabel yang signifikan berpengaruh terhadap fraud adalah variabel arogansi, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,031. Variabel arogansi ini diukur dengan menggunakan jumlah penayangan foto jajaran manajemen dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini menandakan bahwa sikap arogansi dari manajemen sangat mempengaruhi kecenderungan perusahaan melakukan fraud.

Menurut Crowe, kesombongan atau kurangnya hati nurani merupakan sikap superioritas dan hak atau keserakahan dari orang yang percaya bahwa pengendalian internal tidak secara pribadi diterapkan. Sebuah studi oleh Committee of Sponsoring Organisations (COSO) telah menemukan bahwa 70% kecurangan memiliki profil yang menggabungkan tekanan dengan kesombongan atau keserakahan (Andriani, 2018). Crowe mengatakan bahwa banyak kecurangan yang dilakukan oleh orang-orang di posisi yang sangat senior dengan ego besar.

KESIMPULAN & SARAN

Penelitian ini menguji kekuatan variabel dalam fraud pentagon dalam memprediksi perusahaan melakukan fraud. Variabel fraud pentagon yang digunakan dalam penelitian ini adalah tekanan manajemen melakukan fraud, peluang manajemen melakukan fraud, sikap rasionalisasi manajemen terhadap fraud, kompetensi manajemen dalam melakukan fraud, dan sikap arogansi manajemen dalam mengelola perusahaan.

Berdasarkan pengujian regresi berganda, hanya sikap arogansi saja yang berpengaruh signifikan terhadap indikasi perusahaan melakukan fraud. Sikap arogansi dalam penelitian ini diukur dari jumlah foto manajemen yang ditampilkan dalam laporan tahunan.

Saran penelitian berikutnya adalah mengganti ukuran terhadap variabel yang tidak berpengaruh signifikan. Variabel tekanan bisa diukur dari nilai laba yang negatif, variabel peluang bisa diukur dengan menggunakan significant related party, variabel rasionalisasi bisa diukur dengan manajemen laba, sedangkan variabel kompetensi bisa diukur dari pengalaman direksi keuangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis sampaikan kepada Kemenristek Dikti, LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta dan semua pihak yang telah berperan serta dalam penelitian ini.

REFERENSI

- Andriani, Asih. 2018. Pengujian Teori Fraud Pentagon dan Fraudulent Financial Reporting pada Jakarta Islamic Index. Skripsi
- Association Certified Fraud Examiners. 2016. Report to The Nation on Occupational Fraud and Abuse
- Bawekes, Helda F. 2018. Pengujian Teori Fraud Pentagon Terhadap Fraudulent Financial Reporting (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011- 2015). Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah Vol 13 No 1.
- Crowe Horwarth, 2012, "The Mind Behind The Fraudsters Crime :Key Behavioral and Environmental Element".
- Maghfiroh, Nur., Ardiyani Komala dan Syafnita. 2015. Analisis Pengaruh Financial Stabilit, Personal Financial Need, External Pressure, dan Ineffective Monitoring pada Financial Statement Fraud dalam Perspektif fraud. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol 16 No 01.
- Priantara, Diaz. 2013. Fraud Auditing and Investigation. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Skousen, C. J., K. R. Smith, dan C. J. Wright, 2009, "Detecting and Predecting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of The Fraud Triangle and SAS No. 99." Corporate Governance and Firm Performance Advances in Financial Economis, Vol. 13, h. 53-81.
- Skouken. et al, 2015. Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of The Fraud Triangle and SAS No. 99 in Corporate Governance and Firm Performance. Journal of Emerald Insight. Vol 13.

- Tuanakotta, Theodorus M. *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Jakarta: Salemba Empat. 2010
- Wolfe, David T and Dana R. Hermanson, 2004, “The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud”. *CPA Journal*. 74.12 : 38-42.
- Yusof, Mohamed K., Ahmad Khair A.H. and Jon Simon. 2015. *Fraudulent Financial Reporting: An Application of Fraud Models to Malaysian Public Listed Companies*. *The Macrotheme Review* 4 (3).

KEBIJAKAN IRREGULAR MARITIME ARRIVALS (IMAS) AUSTRALIA DAN DAMPAKNYATERHADAP INDONESIA TAHUN 2010-2018

Muharjono, Hikmatul Akbar

Abstract

Irregular Maritime Arrivals (IMAs) are problems that faced by Australia since World War II ended. This problem on the one hand becomes a problem that must be faced with policies that support the entry of IMAs to Australia with justification of the rights possessed by IMAs who are refugees to get asylum. On the other hand, the government must also have integrity and firmness for the Australian border by justifying Australia's national interests in preventing the existence of human smugglers or people smugglers who utilize the existence of IMAs, both from within Australia and from outside Australia. Indonesia get more impact toward Australia policy on IMAs,

Keywords: IMAs, Assylum Seekers, Policy Impact

PENDAHULUAN

Salah satu isu yang dihadapi Australia adalah pencari suaka atau *asylum seekers*. Pencari suaka atau *asylum seekers* adalah orang yang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan kepada *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR) namun permohonannya sedang dalam proses penentuan. Apabila permohonan seorang pencari suaka itu diterima, maka ia akan disebut sebagai pengungsi, dan ini memberinya hak serta kewajiban sesuai dengan undang-undang negara yang menerimanya.³ Menurut Amnesty Internasional, seseorang pencari suaka adalah seseorang yang mencari perlindungan internasional.

Di negara dengan prosedur mandiri, pencari suaka adalah seseorang yang klaimnya sebagai seorang pengungsi belum disetujui di negara yang telah dia usulkan. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa tidak setiap pencari suaka adalah seorang pengungsi, namun setiap pengungsi adalah pencari suaka.⁴ Pengertian pengungsi sendiri berdasarkan Konvensi Satus Pengungsi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967, adalah ketika ia memiliki dasar dan ketakutan yang beralasan akan menjadi korban penyiksaan atas dasar ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, ataupun karena opini politiknya dimana ia kemudian berada di luar negara asalnya dan tak dapat ataupun tak ingin kembali ke negeri asalnya karena alasan akan menjadi korban penyiksaan.

Pencari suaka pada dasarnya menunggu di negara asal sampai permohonannya untuk menjadi pengungsi diterima. Akan tetapi masalah kemudian muncul ketika para pencari suaka yang ada di negara asal tidak dapat memperoleh visa atau dokumen perjalanan dari pejabat terkait di negara asal. Namun meskipun begitu, mereka tetap menghendaki datang ke Australia, dan pada akhirnya mereka menggunakan perahu untuk datang ke Australia. Sehingga, sangat jelas bahwa tanpa visa dan dokumen yang memadai, mereka tidak dapat

³ Jesuit Refugees Services Indonesia, “Pengungsi”, <http://jrs.or.id/refugee/> diakses 03 Maret 2018

⁴ International Amnesty, <https://www.amnesty.org.au/refugee-and-an-asylum-seeker-difference>, diakses pada 16 Oktober 2018

langsung diterima oleh pihak Australia begitu saja. Pencari suaka yang datang ke Australia menggunakan perahu disebut ‘*boat people*’, ‘*irregular*’, ‘*illegal*’ atau ‘*unauthorized*’ tergantung kepada istilah yang diberikan oleh pemerintah yang berkuasa atau memimpin pada era tertentu. Istilah *Irregular Maritime Arrivals* (IMAs) digunakan pada penelitian ini mengacu kepada terminologi yang netral dan manusiawi⁵ yang digunakan pada era Pemerintahan Partai Buruh Perdana Menteri Kevin Rudd dan Perdana Menteri Julia Gillard tahun 2007 sampai 2013. Sampai tahun 2001, kebijakan untuk menangani isu IMAs didukung oleh kedua partai besar di Australia. Akan tetapi, perbedaan pendapat dari kedua partai ini kemudian terjadi pada saat ALP menjadi oposisi pada pemerintahan Partai Liberal Australia Howard pada tahun 2001 hingga tahun 2007⁶. Pemerintah ALP menilai kebijakan yang diterapkan oleh Howard terlalu keras kepada IMAs dan tidak sesuai dengan *The Migration Amendment (Detention Arrangements) Act 2005* yang telah menetapkan kerangka dan prinsip penanganan pencari suaka untuk dilaksanakan dengan “lembut”⁷. Pemerintah Howard dalam praktiknya tetap menerapkan kebijakan yang bersifat menghukum serta tetap menerapkan kebijakan imigrasi berupa penahanan dan pemberian visa sementara atau TPVs, pemrosesan *offshore*, dan apabila diperlukan, tindakan memutar balik perahu yang datang di perairan Australia akan tetap dilakukan.

PEMBAHASAN

Pada tahun pertama kedatangan *boat people*, masyarakat Australia menerima kedatangan mereka dengan rasa simpati. Hal ini karena Australia beranggapan bahwa mereka benar-benar pengungsi.⁸ Namun, adanya peningkatan jumlah *boat people* yang datang dari tahun ke tahun yang ditunjukkan dengan tabel 3, membuat pihak oposisi Australia menilai bahwa pemerintah kehilangan kontrol pada perbatasan yang mengakibatkan adanya “invasion” atau “flood” terhadap Australia.⁹ Kemudian, sejalan dengan pendapat pihak oposisi, protes kemudian terjadi pada tahun 1977 dari gerakan serikat pekerja cabang Waterside di Darwin atas “perlakuan istimewa” yang diterima oleh *boat people*. Gerakan ini mengatakan bahwa orang-orang yang diterima di Australia bukanlah pengungsi, namun merupakan bajak laut, pebisnis, pengedar narkoba, dan penyebar paham komunis.¹⁰

Gelombang kedatangan *boat people* yang kedua terjadi kembali tahun 1989-1998. Jika pada gelombang pertama mayoritas orang-orang berasal dari Vietnam, orang-orang yang datang pada gelombang kedua ini berasal dari Kamboja, Vietnam dan Cina Selatan.¹¹ Pada

⁵ Mirjam Nugis, “Australia’s Immigration Policy: Asylum Seekers, Sovereignty and International Law”, *Tallinn University of Technology Bachelor’s Thesis*, Tallin University, 2017, hlm.11 diakses dari <https://digi.lib.ttu.ee/i/?7832>, pada 07 Desember 2018

⁶ Janet Philips, “A Comparison of Coalition and Labor Government Asylum Policies in Australia Since 2001”, diakses dari https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1617/AsylumPolicies pada 16 Februari 2019

⁷Merujuk kepada penanganan terhadap IMAs di pusat penahanan imigrasi dimana anak-anak tidak akan serta ditahan di pusat penahanan imigrasi.

⁸Janet Philips dan Harriet Spinks, “Boat Arrivals in Australia since 1976”, diakses dari <https://www.aph.gov.au/binaries/library/pubs/bn/sp/boatarrivals.pdf> pada 15 Januari 2019.

⁹ N Viviani, *The Long Journey: Vietnamese Migration and Settlement in Australia*, Melbourne University Press, Carlton, 1984, hlm. 79.

¹⁰*Ibid.*

¹¹ BBC, “Australia asylum: Why is it controversial?” diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-asia-28189608> pada 07 Desember 2018.

gelombang ini, pemerintah Australia memiliki kebijakan untuk menahan *boat people* pada pusat penahanan imigrasi bahkan hingga waktu yang cukup lama dan mengirim mereka kembali ke negara asal untuk mengurangi jumlah orang yang ditahan di pusat penahanan imigrasi.

Namun isu ini kembali mencuat saat jumlah *boat people* yang datang naik dengan signifikan pada tahun 1999 hingga tahun 2001 yang disebut sebagai gelombang ketiga. Orang-orang yang datang pada gelombang ini mayoritas berasal dari Timur Tengah dan biasanya datang ke Australia dengan menggunakan jasa penyelundup manusia.¹² Pada periode ini juga terjadi peristiwa Tampatahun 2001, dimana sebuah kapal bernama MV Tampa yang adalah kapal kargo dari Norwegia mengevakuasi 430 *boat people* yang tenggelam karena kapal mereka rusak.

Istilah *Irregular Maritime Arrivals* (IMAs) sendiri digunakan pada penelitian ini mengacu kepada terminologi yang netral dan manusiawi¹³ yang digunakan pada era Pemerintahan Partai Buruh Perdana Menteri Kevin Rudd dan Perdana Menteri Julia Gillard tahun 2007 sampai 2013 untuk menunjukkan *boat people* yang datang ke Australia menggunakan perahu tanpa surat-surat dan dokumen resmi yang dibutuhkan. Sedangkan istilah non-IMAs ditujukan kepada pencari suaka yang datang dengan menggunakan jalur udara atau pesawat menuju Australia tanpa surat-surat yang memadai.

Pada dasarnya, jumlah kedatangan IMAs lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kedatangan non-IMAs. Akan tetapi, perdebatan mengenai kedatangan IMAs tetap menjadi salah satu isu yang penting karena isu ini biasanya terus menjadi sasaran bagi para pengkritik kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, Menteri Imigrasi Gerry Hand pada tahun 1992 pernah mengatakan bahwa apabila pemerintah gagal mempertahankan sistem perbatasan yang kuat dan tidak dapat mengatur siapa yang dapat masuk ke dalam komunitas dan yang tidak, maka ujung dari hal ini adalah Australia dapat menjadi target perpindahan secara masal.¹⁴

Tabel 5. Perbandingan Jumlah Pencari Suaka di Australia dan Total Pencari Suaka

Tahun	Australia	Total Pencari Suaka	Persentase
2000	13.070	577.864	2,26%
2001	12.370	621.144	1,99%
2002	5.860	587.371	1,00%
2003	4.300	508.060	0,85%
2004	3.200	394.550	0,81%
2005	3.200	338.130	0,95%
2006	3.520	306.330	1,15%
2007	3.970	338.350	1,17%

Sumber: Diolah dari UNHCR, “Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries 2007 Statistical Overview of Asylum Applications Lodged in Europe and Selected non-European Countries” diakses dari <https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/4ba7341a9/asylum-levels-trends-industrialized-countries-2009-statistical-overview.html> pada 15 Januari 2019

¹² William Maley, “Security, People Smuggling, and Australia’s New Afghan Refugees”, *Australian Journal of International Affairs*, vol. 55, 2001 No 3 hlm 354

¹³ *Ibid.*, hlm 11.

¹⁴ Gabrielle Chan, “Keating Minister Said Australia Could be 'Easy Target' for Asylum Seekers”, diakses dari <https://www.theguardian.com/australia-news/2017/jan/01/keating-minister-said-australia-could-be-easy-target-for-asylum-seekers> pada 11 Januari 2019

Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan seseorang melakukan migrasi¹⁵ yaitu *push* dan *pull factors*.¹⁶ Analisis ini melihat bahwa penyebab migrasi adalah faktor pendorong atau *push factor* yang ada di negara asalnya dan adanya faktor penarik atau *pull factor* yang ada di negara tujuan.¹⁷

Secara umum, *push factor* pertama yang ada di negara asal adalah berupa keadaan ekonomi, dan akses kepada pendapatan. Kemudian, yang kedua adalah tak adanya pandangan terhadap masa depan, khususnya karena adanya rasa pesimisme dari dalam individu. Sedangkan, faktor penarik atau *pull factor* yang ada di negara destinasi adalah kebijakan pencari suaka di negara tujuan, bagaimana “sambutan” yang diberikan dari negara tujuan, persepsi terhadap negara tujuan mengenai bagaimana penerimaan terhadap pengungsi, keadaan ekonomi negara tujuan, serta bagaimana keberadaan eksistensi dari diaspora dan komunitas di negara tujuan.

Jika dilihat dengan jelas, Australia hampir memenuhi keseluruhan indikator sebagai negara destinasi ideal bagi pencari suaka. Selain itu, pernyataan ini juga didukung dengan data survei oleh Australia kepada IMAs tahun 2012.¹⁸ Dalam survei ini, IMAs mengatakan bahwa *push-factor* berasal dari diskriminasi etnik (52%), diskriminasi agama (51%), persekusi (32%), persekusi politik (25%), dan persekusi terhadap wanita (14%). Sedangkan *pull factor* ialah karena Australia menerima pengungsi (65%), Australia tidak mengembalikan pengungsi ke negara asal (46%), respon negara lain yang tidak menerima pengungsi (18%), serta respon negara lain yang sekiranya akan mengembalikan pengungsi ke negara asal (17%). Hal ini menunjukkan bahwa faktor penarik yang paling tinggi adalah Australia sebagai negara yang menerima keberadaan pengungsi.

Sejatinya, Australia menerima keberadaa pengungsi secara resmi pada tahun 1954 dimana Australia ikut menandatangani konvensi terkait dengan status pengungsi oleh PBB. Perjanjian ini mengawali seluruh kebijakan Australia terhadap pengungsi dan pencari suaka, bahkan sampai kedatangan IMAs atau *boat people* yang pertama kali tahun 1976 dan juga bahkan sampai saat penelitian ini dibuat.

Dampak Terhadap Indonesia

Dalam menganalisis dampak kebijakan Australia dalam kasus IMA terhadap hubungan kerja sama Indonesia-Australia, perlu dilihat terlebih dahulu posisi tawar dari kedua negara dalam rangka menjalin kerja sama, baik dalam kerangka bilateral maupun multilateral. Australia, sebagai negara tujuan IMA, merasa memiliki kepentingan yang lebih tinggi untuk menghentikan arus IMA. Inilah mengapa isu IMA selalu mewarnai perdebatan politik di dalam negeri dan mempengaruhi persepsi masyarakat Australia.

¹⁵ Menurut definisi dari International Organization for Migration (IOM), migrasi adalah perpindahan seseorang atau sekelompok orang, baik secara internasional atau di dalam suatu negara. Istilah ini mencakup segala jenis pergerakan manusia, apapun penyebabnya dan berapa pun komposisinya. Dalam hal ini, istilah ini juga merujuk kepada migrasi para pengungsi, orang-orang terlantar, dan orang-orang yang berpindah untuk tujuan lain termasuk penyatuan kembali keluarga bagi para pencari suaka.

¹⁶ Australia Government Department of Immigration and Border Protection, “Seeking The Views of Irregular Migrants: Decision Making, Drivers and Migration Journeys”, diakses dari <https://www.homeaffairs.gov.au/research-and-stats/files/views-irregular-migrant-decision-drivers-journey.pdf> pada 14 Januari 2019.

¹⁷ International Organization for Migration (IOM), “Key Migration Terms”, diakses dari <https://www.iom.int/key-migration-terms#Push-pull-factors> pada 15 Januari 2019.

¹⁸ Survei yang dilakukan pada tahun 2012 oleh Australia yang dilakukan oleh *Australian Department of Immigration and Border Protection* (DIBP).

Atas dasar urgensi permasalahan ini, Australia mengalokasikan dana cukup besar untuk melaksanakan berbagai operasionalisasi kebijakan khususnya untuk kebijakan pembangunan pusat proses IMA di beberapa negara.¹⁹ Sedangkan, Indonesia berada dalam posisi negara transit. Kepentingan Indonesia dalam isu IMA adalah manajemen penanganan IMA yang tertangkap di Indonesia sebelum mereka melanjutkan pelayarannya menuju Australia. Dalam hal ini, Indonesia bukan hanya berkepentingan untuk menangkap IMA tersebut, namun Indonesia berkewajiban untuk memastikan perlindungan dan keselamatan IMA dari bahaya di laut atas dasar hak asasi manusia yang dimilikinya.

Tetapi jika melihat realitas kondisi saat ini, Indonesia memang terbatas dari segi sumber daya untuk bisa mengelola penanganan IMA secara mandiri tanpa bantuan dana asing. Hal ini membuat lokasi Indonesia, serta sistem perlindungan perbatasan Indonesia yang cenderung lemah, menjadi sangat strategis bagi IMA, dan di sisi lain menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Australia. Dalam merespons kasus pencari suaka sendiri, Indonesia belum memiliki perangkat kebijakan khusus mengenai prosedur penanganan IMA. Sehingga, selama ini aktivitas Indonesia terkait isu pencari suaka khususnya IMA lebih bersifat reaktif terhadap fenomena dan arus IMA yang terjadi dengan bantuan UNHCR dan IOM.

Dari posisi masing-masing negara, tampak bahwa Australia lebih merasa terancam karena kasus IMA dibandingkan dengan Indonesia. Kondisi ini menyebabkan Indonesia cenderung dimanfaatkan sebagai negara buffer atau penyangga antara pencari suaka dengan Australia sebagai negara tujuan. Pemerintah Australia selama ini telah berupaya sedemikian rupa untuk berdiplomasi dengan pemerintah Indonesia melalui berbagai jalan, mulai dari Bali Process, kerja sama Regional Cooperation Arrangement, perjanjian Lombok, program the Management and Care of Irregular Immigrants Project di tahun 2007, hingga mencapai Deklarasi Jakarta 2013. Upaya ini memang jelas menunjukkan strategi Australia untuk memperluas jangkauan kekuasaannya di wilayah regional supaya lebih leluasa melakukan upaya pencegahan yang hampir mirip dengan preemptive strike, yakni menyerang “musuh” sebelum “musuh” tersebut dapat masuk atau menyerang ke negaranya.

Kebijakan Australia yang semakin agresif terhadap IMA berdampak negatif bagi Indonesia dan bukan tidak mungkin akan berkontribusi pada memburuknya hubungan kerja sama kedua negara. Peningkatan jumlah IMA yang memasuki wilayah Indonesia juga disebabkan oleh berubah haluannya kapal-kapal yang ditolak oleh Australia dan dikembalikan ke wilayah laut Indonesia.

Kebijakan sepihak Australia yang dikenal dengan istilah “turn-back-boat” policy ini memicu kemarahan pemerintah Indonesia yang disampaikan melalui Menteri Luar Negeri Indonesia pada waktu itu, Marty Natalegawa. Pascapenerapan kebijakan yang belum didiskusikan dengan pemerintah Indonesia ini, berbagai pemberitaan media di Indonesia mulai mewacanakan tindakan Australia ini telah menyimpang dari komitmen kerja sama keamanan kedua negara karena Australia secara sengaja melanggar batas kedaulatan Indonesia. Isu IMA juga menyiratkan upaya hegemoni Australia terhadap Indonesia. Kerangka kerja sama untuk menangani IMA yang dibangun dengan Indonesia tidak dapat dipungkiri turut memastikan mengalirnya sejumlah dana bantuan untuk pengelolaan IMA dalam penampungan sementara, maupun dana operasionalisasi untuk penangkapan perahu-perahu yang berupaya mencapai wilayah Australia. Kombinasi antara penyebaran pemahaman mengenai ancaman yang datang

¹⁹ Australian Government, “Report of the Expert Panel on Asylum Seekers”, Agustus 2012, <http://electionwatch.edu.au/sites/default/files/docs/Houston%20Panel%20Report.pdf>, diakses pada tanggal 3 Juli 2019.

dari IMA, aliran dana bantuan yang cukup besar, serta kebijakan sepihak yang dilakukan oleh Australia ini semakin menegaskan bahwa Australia sedang menjalankan strategi untuk membangun hubungan kerja sama yang tidak seimbang (*imbalanced relations*) dengan Indonesia.

Meskipun pemerintahan Australia dan Indonesia seringkali menekankan bahwa ada saling ketergantungan antara kedua negara dalam berbagai aspek kerja sama, dalam kasus IMA pada faktanya pemerintah Indonesia memang belum memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dari Australia. Hal ini dikarenakan selama ini orientasi penyelesaian kasus IMA di Indonesia sebagai negara transit belum maksimal dan komprehensif akibat keterbatasan sumber daya serta belum ada payung hukum spesifik yang mengatur pengelolaannya kasus IMA tersebut. Akibatnya, organisasi internasional yang dibiayai oleh Australia seperti IOM memiliki celah dan akses yang besar (atas persetujuan pemerintah Indonesia, tentunya) untuk bergerak dan justru malah lebih berkontribusi dalam menangani kasus IMA di wilayah Indonesia sendiri. Mulai dari sinilah wacana ketergantungan Indonesia terhadap Australia menjadi lebih nyata.

Kini, pascakebijakan unilateral Australia yang memaksa kapal-kapal IMA untuk menjauhi wilayah teritorial Australia dan mengirimnya memasuki wilayah Indonesia, Indonesia dihadapkan pada dua pilihan respons, yakni menerima begitu saja peningkatan IMA atau melakukan pendekatan yang tegas terhadap Australia. Seharusnya, tidak butuh waktu lama bagi Indonesia bahwa pendekatan kebijakan IMA Australia saat ini bukan lagi berorientasi pada *shared responsibility* dengan negara-negara lain yang terkena imbas dari kasus IMA. Saat ini Australia seolah lebih ingin berupaya untuk *shifting responsibility* kepada negara-negara transit dan negara-negara yang menjalin kerja sama pembentukan *offshore processing centre*.

Perkembangan terakhir, Australia tidak hanya melakukan *turn-back-boat policy*, tetapi bahkan menolak *resettlement* bagi pengungsi yang statusnya sudah ditetapkan oleh UNHCR di berbagai *offshore processing centre*. Penolakan ini menjadi paradoks bagi Australia sendiri karena selama ini Australia memiliki reputasi yang lebih baik di dunia internasional dalam mengakomodasi orang-orang yang sudah terbukti sebagai pengungsi. Australia saat ini terlihat lebih berhasil dalam menghentikan IMA memasuki wilayah teritorialnya. Kondisi ini bisa jadi sudah merasa “aman” dengan kebijakan sepihak yang semakin restriktif. Ada kemungkinan bahwa isu IMA ini akan tergeser dengan prioritas agenda lain yang urgensinya dianggap lebih tinggi. Hal ini dikarenakan pendekatan regional yang telah dirintis sejak lama dengan melibatkan Indonesia sebagai *co-partner* mulai ditinggalkan karena dianggap tidak efektif atau bahkan sulit terealisasi secara nyata.

Apabila isu IMA tidak lagi menjadi prioritas agenda hubungan diplomatik kedua negara, maka ini sama dengan membuka jalan bagi kemungkinan terjadinya tragedi kemanusiaan yang lebih besar, sekaligus membuka peluang terjadinya kejahatan transnasional. Situasi ini tidak menguntungkan bagi Indonesia, karena Australia sangat mungkin bertindak pragmatis dengan tidak lagi menganggap perlunya kerangka regional untuk menangani IMA dan memilih menggunakan pendekatan unilateral saja. Padahal, bagi Indonesia isu IMA ini masih menjadi persoalan besar. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya selama ini kerja sama yang dibangun dengan Indonesia lebih untuk kepentingan politik dalam negeri dan keamanan nasional Australia. Tidak heran, apatisme terhadap perlindungan pencari suaka dan pengungsi yang semakin kuat dalam kebijakan Australia menimbulkan kecurigaan akan adanya upaya *shifting responsibility*. Upaya ini bisa jadi dilakukan oleh Australia karena melihat posisi Indonesia yang “tergantung” dengan bantuan-bantuan dari Australia. Hal ini tidak sepenuhnya benar, bahkan seorang Indonesianis dari Australia menyebutkan “Canberra

needs Jakarta more than Jakarta needs Canberra” dalam Australia-Indonesia Dialogue di La Trobe’s Centre for Dialogue pada Juni 2013.²⁰

Pandangan ini menjadi penting karena Australia seharusnya tidak bisa *taking for granted* dalam konteks hubungan bilateralnya dengan Indonesia. Apalagi ketika Indonesia telah bersedia berkomitmen dan berbagi keprihatinan yang sama khususnya dalam isu migrasi ireguler, tindakan Australia yang sepihak dan abai terhadap posisi dan kepentingan nasional Indonesia dapat diterjemahkan sebagai upaya ofensif Australia yang tidak menghormati Indonesia sebagai negara tetangga sekaligus sebagai *strategic partner*. Tidak heran, ketika hubungan diplomatik Australia dan Indonesia memburuk pasca kasus penyadapan di tahun 2014, salah satu kerja sama yang dihentikan adalah kerja sama penanganan IMA.

Indonesia menunjukkan bahwa posisi tawar Indonesia tidak bisa diremehkan karena Australia pun juga membutuhkan Indonesia jika ingin membuat *Operation Sovereign Borders*nya lebih berhasil dan efektif. Hal ini membuktikan bahwa sentimen-sentimen semacam ini yang berkembang di kalangan pemerintah maupun masyarakat tidak berkontribusi positif bagi hubungan kerja sama kedua negara di tengah kerentanan hubungan diplomatik Australia-Indonesia dewasa ini. Perkembangan terakhir saat ini membawa Australia pada kepemimpinan Perdana Menteri yang baru, walaupun masih berasal dari partai Liberal. Perubahan kepemimpinan ini diiringi dengan banyaknya seruan dari dunia internasional, bahkan dari Sekretaris Jenderal PBB, untuk Australia mengkaji ulang pendekatan kebijakan *turn-back-boat* dan pusat penahanan pencari suaka yang berdampak pada perlakuan tidak manusiawi terhadap IMA.²¹ Hal ini nampaknya sulit terjadi, mengingat pendekatan yang keras terhadap IMA seperti menjadi ciri platform partai Liberal dalam mencegah masuknya pencari suaka yang beresiko menambah jumlah pengungsi yang harus ditangani oleh Australia.

Di sisi lain, Indonesia juga memiliki Presiden baru yang belum terlihat perhatian khususnya terhadap penanganan pencari suaka dan pengungsi yang berada di wilayah Indonesia. Berdasarkan pada kondisi terbaru ini, kerja sama Indonesia-Australia di bawah pemerintahan Perdana Menteri Australia yang baru, Malcom Turnbull, dan Presiden Indonesia, Joko Widodo, dalam penanganan IMA akan tergantung pada pendekatan kedua pemimpin negara ini dalam melihat keberadaan IMA. Selama IMA hanya disorot dari perspektif ancaman keamanan yang kedatangannya berbahaya bagi keberlangsungan hidup masyarakat di suatu negara, maka baik Indonesia dan Australia mungkin akan bekerja sama bukan atas dasar urgensi krisis kemanusiaan. Alih-alih, sudut pandang terhadap IMA sebagai pelaku *smuggling* akan lebih lekat bagi kedua negara daripada melihat mereka sebagai bagian dari masyarakat internasional yang terancam hak hidupnya akibat berbagai konflik bersenjata yang tidak bisa diselesaikan oleh institusi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Hyndmau, Patricia, *Australian Immigration Law and Procedures Pertaining to the Admission of Refugees*, New South Wales University, Associate Professor of Law, 1988.
Maley, William, *Security, People Smuggling, and Australia’s New Afghan Refugees*, *Australian Journal of International Affairs*, vol. 55, 2001.

²⁰Alberto Gomes, “Relations with Indonesia at Risk”, 4 Juli 2013, <http://www.latrobe.edu.au/news/articles/2013/opinion/relations-with-indonesia-at-risk>, diakses pada tanggal 3 Juli 2019

²¹Daniel Hurst dan Ben Doherty, “Ban Ki-moon personally asks Malcolm Turnbull to review boat turnback policy”, <http://www.theguardian.com/australia-news/ban-ki-moon-personally-asks-malcolm-turnbull-review-asylum-boat-turnback-policy>, diakses pada tanggal 3 Juli 2019.

McCann, Daryl, “How Boat People Brought Down Rudd and Gillard”, Juli-Agustus 2014, *Quadrant*.

Pickering, Sharon dan Caroline Lambert, “Deterrence: Australia’s Refugee Policy”, *Current Issues in Criminal Justice*, vol. 14, 2002 no.1.

KAUSALITAS ANTARA INVESTASI ASING DAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Purwiyanta

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN “Veteran Yogyakarta
Email : purwiyanta@gmail.com

Ambar Puji Harjanto

Program Studi magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN “Veteran Yogyakarta
Email : denkelik@yahoo.co.id

Abstract

The view that foreign investment is the cause of poverty in Indonesia often makes skepticism about the positive impact of foreign investment. This study examines the causality relationship between poverty and foreign direct investment, and the causality relationship between portfolio investment and poverty in Indonesia. Time series data from 1998 to 2017 is used to test the hypothesis. The conclusion of this study is that foreign direct investment and portfolio investment do not cause poverty in Indonesia

Keywords: Foreign Direct Investment, Portfolio Investment, Poverty, Causality

PENDAHULUAN

Globalisasi perekonomian telah meningkatkan transaksi pada pasar keuangan global antar-negara sejak sekitar tahun 1980-an (Rajan, 2001). Bebasnya transaksi pasar keuangan tersebut ditandai dengan adanya pergerakan aliran modal yang semakin bebas di kawasan negara industri, khususnya negara-negara di Eropa dan Amerika telah merambat pada berbagai kawasan dunia, khususnya negara-negara di kawasan Asia-Pasifik.

Chinn dan Ito (2008) mengungkapkan bahwa sejak tahun 1970, berdasarkan karakteristik kelompok less developed countries, indeks keterbukaan sektor keuangan yang menghitung derajat keterbukaan capital account terhadap pendanaan asing di kawasan Asia-Pasifik memiliki derajat keterbukaan terbesar jika dibandingkan dengan kawasan geografis lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor keuangan di kawasan Asia-Pasifik lebih terbuka dan memiliki hambatan pasar keuangan yang sangat rendah terhadap pasar keuangan.

Perekonomian dengan sektor keuangan yang semakin bebas akan berkontribusi positif terhadap kondisi makro ekonomi dengan menurunkan derajat volatilitas dari pertumbuhan output dan konsumsi. Kalemli-Ozcan & Sørensen (2003) mengungkapkan bahwa adanya aliran modal lintas negara yang semakin terintegrasi akan menjaga fluktuasi variable makro ekonomi. Hal ini disebabkan karena adanya keterbukaan aliran keuangan akan membantu negara tersebut dalam memperoleh berbagai akses permodalan, membuat variasi pola produksi suatu negara meningkat, dan pada gilirannya akan menjaga fluktuasi variabel makro ekonomi.

Mirdala et al. (2015), kajian dan penelitian empiris mengenai liberalisasi keuangan di dunia diawali karena adanya berbagai temuan penting mengenai pengaruh dari adanya liberalisasi keuangan terhadap perekonomian. Proses liberalisasi aliran modal yang dipimpin oleh negara-negara industri telah menjadi kunci pendorong dalam peningkatan efisiensi alokasi sumberdaya dan berbagi resiko secara internasional, meningkatkan produktivitas dan

pertumbuhan perekonomian. Semakin bebasnya aliran modal lintas negara juga menentukan hasil guna perekonomian dan berimplikasi terhadap tingkat kesejahteraan.

Perekonomian dengan sektor keuangan yang semakin bebas berkontribusi positif terhadap kondisi makro ekonomi dengan menurunkan derajat volatilitas dari pertumbuhan output dan konsumsi. Kalemli-Ozcan & Sørensen (2003) mengungkapkan bahwa adanya aliran modal lintas negara yang semakin terintegrasi akan menjaga fluktuasi variable makro ekonomi. Hal ini disebabkan karena adanya keterbukaan aliran keuangan akan membantu negara tersebut dalam memperoleh berbagai akses permodalan, membuat variasi pola produksi suatu negara meningkat, dan pada gilirannya akan menjaga fluktuasi variabel makro ekonomi.

Keterbukaan finansial dapat dilihat dari besaran investasi asing pada perekonomian, baik yang berupa infestasi langsung atau foreign direct investment (FDI), maupun yang bersifat porto folio (portfolio investment). Dalam kasus negara berkembang, FDI memiliki peranan yang vital dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara tersebut, begitu pula dengan invetasi porto folio. Kondisi ini berjalan seiring dengan keterbukaan perdagangan yang semakin besar juga memicu pertumbuhan investasi langsung dan investasi porto folio dan memberikan dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi negara berkembang, dan dipercaya dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi dan sosial, khususnya kemiskinan.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di kawasan Asia telah membuka pasar finansialnya dalam proses pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Dari sudut pandang penurunan jumlah penduduk miskin, Bank Dunia mencatat bahwa telah terjadi penurunan angka kemiskinan di Indonesia di Indonesia secara signifikan. Pada tahun 1984 angka kemiskinan di Indonesia sebesar 71,4 %, mengalami penurunan menjadi 58,5 % tahun 1990, 39,3 % tahun 2000, 15,7 % tahun 2010, dan 5,7 % tahun 2017.

Kajian hubungan kausalitas antara investasi asing dan kemiskinan merupakan salah satu topik menarik karena telah mewarnai perdebatan publik di Indonesia. Kajian ini akan memberikan perspektif yang bersifat rasional sebab akibat antara foreign direct investment (FDI), maupun porto folio (portfolio investment tingkat kemiskinan di Indonesia. Masalah utama yang akan dikaji dalam makalah ini adalah dirumuskan sebagai berikut :

Apakah terjadi hubungan kausalitas antara foreign direct investment (FDI) dan kemiskinan di Indonesia?

Apakah terjadi hubungan kausalitas antara foreign portfolio investment dan kemiskinan di Indonesia?

KAJIAN LITERATUR

2.1. Keterbukaan Perekonomian

Keterbukaan perekonomian merupakan keterkaitan suatu perekonomian dengan kegiatan perekonomian dunia (global). Keterkaitan suatu perekonomian terhadap perekonomian global mengandung makna bahwa perekonomian terintegrasi pada pasar dunia, baik pasar barang maupun pasar modal dunia. Calderon (2005), menyatakan bahwa integrasi pada perekonomian global memberi kontribusi terhadap potensi keuntungan dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Keterbukaan ekonomi juga berarti semakin menipisnya hambatan-hambatan kegiatan ekonomi antara pasar domestik dan pasar luar negeri, baik pasar barang (keterbukaan perdagangan) maupun pasar finansial (keterbukaan investasi).

Asongu (2012) dalam penelitiannya yang berjudul "Globalization and Africa: Implications for Human Development" mengukur tingkat keterbukaan keuangan yang

didasarkan pada rasio penanaman modal asing terhadap produk domestik bruto. Simorangkir (2006) dalam penelitiannya yang berjudul "The Openness and Its Impact to Indonesian Economy: ASVAR Approach" mengukur keterbukaan finansial dihitung dari total investasi asing langsung dan arus masuk investasi portofolio dibagi dengan PDB.

Penanaman modal asing yang juga merupakan investasi ini menurut Fitzgerald (dalam Salim dan Sutrisno, 2008) adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber sumber dana yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang dan dengan barang modal tersebut akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang.

Sementara menurut Kamaruddin Ahmad (dalam Salim dan Sutrisno, 2008: 32), investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Berdasarkan kedua definisi tersebut, Salim dan Budi Sutrisno (2008:33) kemudian memberikan definisi yang lebih menyeluruh dimana investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi asing adalah penanaman sumber-sumber dana yang dilakukan investor asing yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada bidang usaha yang terbuka untuk investasi dengan tujuan untuk memperoleh

2.2. Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan merupakan suatu kondisi adanya kekurangan materi pada seseorang/segolongan orang atau standar hidup yang rendah dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku. Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya dalam konteks ekonomi tidak hanya menyangkut aspek finansial tetapi meliputi semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.

Suharto (2006) mengatakan bahwa ada tiga kategori kemiskinan yang menjadi pusat perhatian pekerjaan social, yaitu :

Kelompok yang paling miskin (*destitute*) atau yang sering didefinisikan sebagai fakir miskin. Kelompok ini secara absolut memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan (umumnya tidak memiliki sumber pendapatan sama sekali) serta tidak memiliki akses terhadap berbagai pelayanan sosial.

Kelompok miskin (*poor*), yakni kelompok yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan namun secara relatif memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar.

Kelompok rentan (*vulnerable grup*). Kelompok ini dapat dikategorikan bebas dari kemiskinan, karena memiliki kehidupan yang relatif lebih baik ketimbang kelompok *destitute* maupun miskin. Namun sebenarnya kelompok yang sering "near poor" (agak miskin) ini masih rentan terhadap berbagai perubahan sosial disekitarnya. Mereka seringkali berpindah dari status "rentan" menjadi "miskin" dan bahkan "destitute" bila terjadi krisis ekonomi dan tidak mendapat pertolongan sosial.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan perkapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari, sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Selanjutnya untuk mengukur kemiskinan dilakukan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dan *Head Count Index*. Pengukuran kemiskinan dengan pendekatan kebutuhan dasar pada dasarnya melihat

kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan pendekatan *Head Count Index* merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur besaran kemiskinan absolut.

Bank Dunia dalam mengukur kemiskinan menggunakan ukuran yang berbeda. Penduduk miskin adalah mereka yang berpenghasilan yang diukur dengan daya belinya kurang sebesar US \$ 1,90 per hari (*purchasing power parity*, 2011). Tentu saja ukuran ini menyebabkan kemiskinan di Indonesia berbeda dengan yang dihitung oleh BPS.

Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah batas yang disebut garis kemiskinan, yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Oleh karenanya garis kemiskinan terdiri dari 2 komponen yaitu garis kemiskinan makanan (*food line*) dan garis kemiskinan non makanan (*non foodline*).

2.3. Penelitian terdahulu

Feriansyah, Noer Azam Achsani, dan Tony Irawan (2018) telah menguji pengaruh Liberalisasi Keuangan terhadap Volatilitas Makroekonomi di kawasan Asia-Pasifik. Model panel dinamis digunakan terhadap 19 negara di Kawasan Asia-Pasifik selama periode tahun 1976-2015. Hasil penelitian membuktikan bahwa keuntungan liberalisasi keuangan di Kawasan Asia-Pasifik karena rendahnya volatilitas pertumbuhan variabel makroekonomi hanya terjadi di kelompok negara *developed countries*, dan tidak terjadi untuk kelompok negara *developing countries*. Hasil ini membuktikan bahwa adanya liberalisasi keuangan belum memberikan efek yang menguntungkan secara penuh di Kawasan Asia-Pasifik.

Hal ini menjelaskan bahwa adanya keterbukaan keuangan di kawasan Asia-Pasifik terhadap pasar keuangan global belum memberikan efek positif terhadap kelompok negara-negara *developing countries*. Artinya, adanya kenaikan keterbukaan keuangan di kelompok negara-negara berkembang akan semakin meningkatkan volatilitas makroekonomi di kelompok tersebut. Sedangkan untuk negara *developed*, hasil interaksinya dengan keterbukaan keuangan menunjukkan hasil yang negatif signifikan untuk semua hasil estimasi.

Nowbutsing (2014), menganalisis pengaruh keterbukaan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota Indian Ocean RIM (IOR). Metode penelitian yang digunakan adalah panel unit root dan panel cointegration untuk 15 negara (Australia, Bangladesh, India, Indonesia, Kenya, Madagascar, Malaysia, Mauritius, Mozambique, Seychelles, Singapore, South Africa, Sri Lanka, Tanzania dan Thailand) selama periode 1997 sampai 2011. Variabel dependen pertumbuhan ekonomi yang diwakili oleh PDB masing-masing negara. Sedangkan variabel independen adalah derajat tingkat keterbukaan perdagangan yang diukur dengan rasio ekspor ditambah impor terhadap PDB, tingkat keterbukaan impor (impor sebagai persentase PDB), tingkat keterbukaan ekspor (ekspor sebagai persentase PDB), pengeluaran pemerintah, pembentukan modal bruto, inflasi dan tenaga kerja.

Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan ketiga tingkat keterbukaan perdagangan, tingkat keterbukaan impor, dan tingkat keterbukaan ekspor berpengaruh positif. Tingkat keterbukaan impor memiliki pengaruh paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dimungkinkan karena sebagian besar negara anggota IOR adalah importir besar dalam bidang teknologi maupun bahan baku dan bahan penolong untuk industri.

Eunyoung (2012), melakukan kajian dampak keterbukaan perdagangan dan aliran penanaman modal langsung (*foreign direct investment*) terhadap ketimpangan pendapatan di negara-negara berkembang. Dengan menggunakan data panel tahun 1975 sampai dengan 2005 dari 59 negara berkembang. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa keterbukaan perdagangan dan aliran penanamam modal langsung berpengaruh signifikan dalam

memperluas ketimpangan pendapatan di Negara berkembang.

Dat Daumal, Marie (2008) juga melakukan kajian yang hampir sama dengan yang dilakukan Eunyoung, untuk kasus India dan Brazil. Dengan berbasis data time Series periode tahun 1980-2004 untuk kasus India dan data tahun 1985-2004 untuk kasus Brazil. Kesimpulan analisisnya mengatakan bahwa keterbukaan ekonomi secara signifikan menurunkan ketidakmerataan pendapatan di Negara Brazil, namun untuk kasus Negara India justru sebaliknya, keterbukaan ekonomi meningkatkan ketidakmerataan di India.

Murbarani, Nova (2014) telah melakukan kajian pengaruh keterbukaan Ekonomi terhadap ketimpangan antar propinsi di Indonesia dengan menggunakan data panel dari 26 provinsi di Indonesia tahun 1994-2012. Hasil penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa keterbukaan perekonomian memiliki pengaruh signifikan pada ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penelitiannya sekaligus membuktikan bahwa Hipotesis Kuznet, hubungan antara pertumbuhan dan ketimpangan yang digambarkan seperti kurva U terbalik, berlaku di Indonesia.

Tito Brian Adiputra (2017) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh keterbukaan ekonomi yang terdiri dari keterbukaan perdagangan dan keterbukaan finansial terhadap indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan menggunakan data runtun waktu (time series) dari tahun 2000 sampai tahun 2015. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hanya keterbukaan finansial yang memiliki pengaruh signifikan meningkatkan indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sementara keterbukaan perdagangan tidak berpengaruh.

Delis, Arman, dkk (2015) melakukan kajian terhadap pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia, periode tahun 1993 sampai tahun 2013. Keimpulan dari penelitiannya adalah bahwa FDI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin dan FDI berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap jumlah pengangguran.

METODA PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada makalah ini. Dengan menggunakan data sekunder time series yang diperoleh dari Bank Dunia, dari tahun 1988 sampai dengan 20175, yakni data tingkat kemiskinan di Indonesia, freing direct investmen (FDI), dan investasi portofolio (Portfolio Investment) yang berasal dari luar negeri

Model yang digunakan pada penelitian ini adalah Model Kausalitas Granger. Model ini dapat digunakan untuk mengindikasikan apakah suatu variabel mempunyai hubungan dua arah atau hanya satu arah saja, atau sam sekali tidak mempunyai hubungan kausalitas. Dengan demikian semua variabel merupakan variabel dependen. Model hubungan kausalitas antara tingkat kemiskinan dan FDI ditulis sbb :

$$POV = \sum_{i=1}^n \alpha_i FDI_{t-i} + \sum_{j=1}^n \beta_j POV_{t-i} + e_{1t} \dots \dots \dots (1)$$

$$FDI = \sum_{i=1}^m \lambda_i FDI_{t-i} + \sum_{j=1}^m \delta_j POV_{t-i} + e_{2t} \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan :

- POV = Tingkat kemiskinan di Indonesia (%)
- FDI = Feing Direct Investmen (prosentase terhadap GDP)
- n, m = Jumlah lag
- e_{1t}, e_{2t} = Variabel pengganggu
- $\alpha, \beta, \lambda, \delta$ = Koefisien regresi

Menurut Granger untuk menyelesaikan model kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan neraca perdagangan sebagaimana dalam persamaan (1) dan (2) maka ada empat model regresi yang harus dilakukan (Widarjono, 2007).

Untuk menguji apakah ada kausalitas neraca perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi, maka dilakukan regresi dengan memodifikasi terhadap persamaan (1) dalam bentuk persamaan unrestricted dan restricted sebagai berikut :

$$POV = \sum_{i=1}^n \alpha_i FDI_{t-i} + \sum_{j=1}^n \beta_j POV_{t-i} + e_{1t} \quad \dots\dots\dots \text{persamaan unrestricted} \quad (3)$$

$$POV = \sum_{i=1}^m \gamma_i POV_{t-i} + e_{2t} \quad \dots\dots\dots \text{persamaan restricted} \quad (4)$$

Untuk menguji apakah ada kausalitas pertumbuhan ekonomi terhadap neraca perdagangan, maka dilakukan regresi dengan memodifikasi terhadap persamaan (2) dalam bentuk persamaan unrestricted dan restricted sebagai berikut :

$$FDI = \sum_{i=1}^m \lambda_i FDI_{t-i} + \sum_{j=1}^m \delta_j POV_{t-i} + e_{2t} \quad \dots\dots\dots, \text{persamaan unrestricted} \quad (5)$$

$$FDI = \sum_{i=1}^m \gamma_i FDI_{t-i} + e_{2t} \quad \dots \quad \dots\dots\dots \text{persamaan restricted} \quad (6)$$

Kemudian untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi mempengaruhi neraca perdagangan atau sebaliknya neraca perdagangan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi digunakan uji F, nilai F dihitung sebagai berikut :

$$F = \frac{(n - k)(RSS_R - RSS_{UR})}{m(RSS_{UR})} \quad \dots\dots\dots (7)$$

Dimana :

RSS_R dan RSS_{UR} = Berturut-turut adalah nilai Residual sum of squares di dalam persamaan restricted dan unrestricted.

n = jumlah observasi

m = jumlah lag

k = jumlah parameter yang diestimasi pada persamaan unrestricted.

d. Hipotesis

1). Kausalitas tingkat kemiskinan (POV) terhadap FDI dihipotesiskan sebagai berikut:

Ho :Tingkat kemiskinan (POV) tidak ada hubungan kausalitas terhadap FDI.

Ha: Tingkat Kemiskinan (POV) memiliki hubungan kausalitas terhadap FDI .

2). Kausalitas FDI terhadap tingkat kemiskinan (POV) dihipotesiskan sebagai berikut:

Ho: FDI tidak ada hubungan kausalitas terhadap Tingkat Kemiskinan (POV)

Ha: FDI memiliki hubungan kausalitas terhadap Tingkat Kemiskinan (POV)

e. Kriteria penerimaan/penolakan hipotesia

Dengan derajat keyakinan (degree of freedom) tertentu, maka :

Jika F hitung pada persamaam 15 > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima.

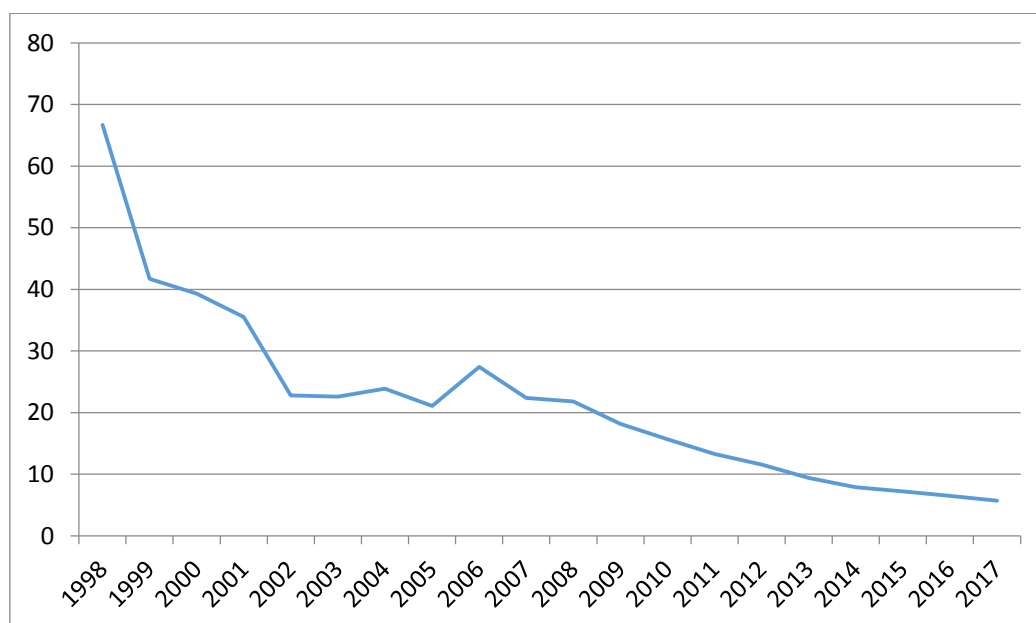
Jika F hitung pada persamaam 15 < F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak.

Model hubungan kausalitas antara tingkat kemiskinan (POV) dan investasi portofolio (PI) indentik dengan model di atas dengan mengganti variabel FDI dengan investasi portofolio

(PI). Langkah-langkah perhitungan dan pengujiannya sama seperti pada kausalitas Tingkat Kemiskinan (POV) dan FDI.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

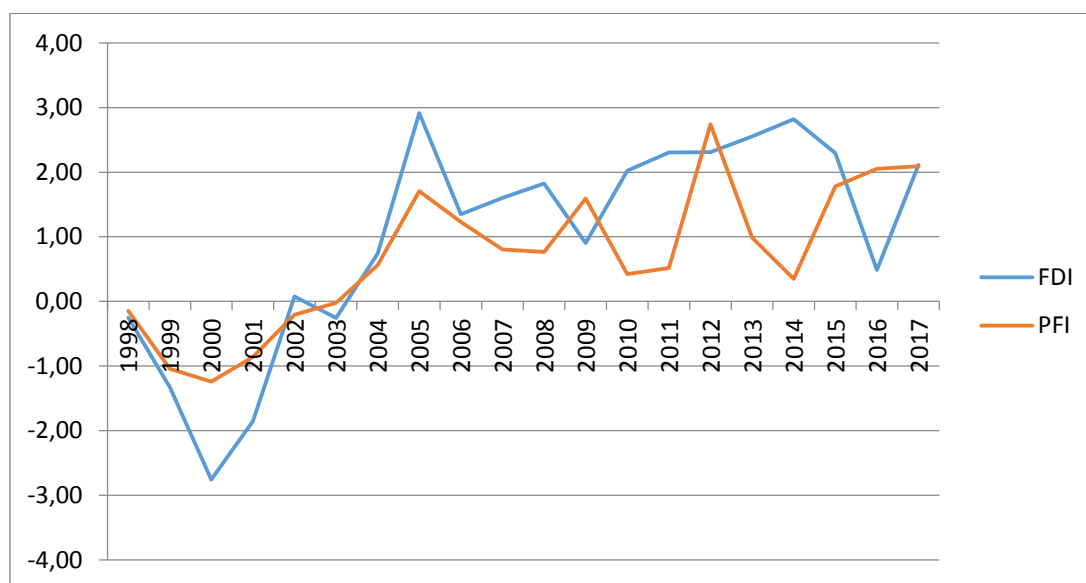
Selama periode 1998 -2016, Bank Dunia mencatat bahwa telah terjadi penurunan kemiskinan di Indonesia secara signifikan. Tahun 1985 angka kemiskinan di Indonesia sebesar 71,4 persen, dan telah mengalami penurunan secara signifikan menjadi 47,4 persen (tahun 1996). Krisis ekonomi tahun 1997 /1998 menyebabkan angka kemiskinan meningkat menjadi 66,7 persen akan tetapi secara berangsur-angsur kemudian turun menjadi 15,7 persen (tahun 2010) dan 5,7 persen (tahun 2017), periksa Gambar 1.



Gambar 1: Kemiskinan di Indonesia, 1998 -2017 (dalam %)

Foreign Direct Investment (FDI) neto di Indonesia, dalam prosentase terhadap GDP, telah mengalami kenaikan yang cukup berarti sejak tahun 2004 setelah sebelumnya mengalami situasi sulit pada masa-masa krisis ekonomi. Pada tahun 1998 krisis ekonomi melanda Indonesia menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan iklim investasi di Indonesia dan berdampak pada beberapa tahun berikutnya. Secara neto, periode 1998-2003 merupakan periode dimana FDI bernilai negative. Hal menunjukkan bahwa selama periode 1998-2003 telah terjadi capital outflow pada perekonomian Indonesia, dan yang terburuk terjadi pada tahun 2000, sebesar minus 2,76 persen dari GDP, periksa Gambar 2.

Pada kurun waktu 1998-2017, investasi portofolio di Indonesia mengalami kinerja yang hampir sama dengan FDI. Periode 1996-2003 merupakan periode yang sulit bagi kinerja pasar modal Indonesia. Krisis ekonomi telah menyebabkan situasi yang tidak menguntungkan bagi para investor untuk melakukan transaksi finansial di pasar modal Indonesia. Pada tahun 2004 seiring membaiknya perekonomian Indonesia investasi portofolio kembali berangsur dan bernilai positif pada kisaran 0,05 sampai dengan 2,7 persen terhadap GDP, periksa Gambar 2.



Gambar 2: Foreign Direct Investment dan Portfolio Investment di Indonesia, 1998 -2017 (% terhadap GDP)

Hasil uji Kausalitas Granger pada lag kedua antara data foreign direct investment (FDI) dan data kemiskinan di Indonesia (POV), dan kausalitas antara investasi portofolio (PI) dengan kemiskinan di Indonesia (POV) tersaji pada Tabel 1. Dari pengujian tersebut menghadirkan hubungan satu arah yang menarik, yaitu bahwa kemiskinan menjadi penyebab FDI, tetapi FDI tidak menjadi penyebab kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan juga berhubungan satu arah dengan dengan investasi portofolio, yaitu bahwa kemiskinan menjadi penyebab investasi portofolio, tetapi inverstasi portofolio tidak menjadi penyebab kemiskinan di Indonesia.

Hubungan kausalitas satu arah antara kemiskinan dengan FDI dan kemiskinan dengan Investasi portofolio tersebut dapat dimaknai bahwa kemiskinan dapat menjadi penyebab FDI dan investasi portofolio di Indonesia. Kenyataan tersebut tidak berlaku sebaliknya, yaitu bahwa FDI dan investasi portofolio bukanlah penyebab terjadinya kemiskinan di Indonesia.

Kebijakan pemerintah memberi ruang untuk tumbuh berkembangnya FDI dan investasi portofolio dari Negara lain bukanlah menjadi penyebab kemiskinan di Indonesia. Kesimpulan ini sedikit berbeda dengan kesimpulan penelitian Delis, Arman, dkk (2015) yang menyimpulkan bahwa FDI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Perbedaan ini tentu saja dapat terjadi mengingat terdapat perbedaan pengukuran variable FDI. Pada kajian ini ini FDI dipakai sebagai ukuran derajat keterbukaan di bidang financial dan besarnya merupakan prosentase terhadap GDP. Demikian halnya dengan tingkat kemiskinan di Indoneisa pada penelitian ini menggunakan ukuran yang dikeluarkan oleh Bank Dunia .

Tabel 1 : Rangkuman Hasil uji Kausalitas Granger

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
FDI does not Granger Cause POV	18	0.91282	0.4256
POV does not Granger Cause FDI		5.77777	0.0160
PI does not Granger Cause POV		0.33224	0.7232
POV does not Granger Cause PI		5.70478	0.0167

Sumber : data diolah

KESIMPULAN

Kesimpulan yang menarik dari kajian ini adalah bahwa FDI maupun investasi portofolio tidak menyebabkan kemiskinan di Indonesia. Kesimpulan ini dapat dipakai sebagai dasar justifikasi bagi Pemerintah kepada pihak-pihak yang menyuarakan bahwa FDI, maupun investasi portofolio menjadi salah satu penyebab kemiskinan di Indonesia. Data dan uji statistik tidak mendukung pernyataan bahwa Investasi asing (baik investasi langsung maupun investasi portofolio) bukanlah penyebab kemiskinan di Indonesia. Oleh karenanya anggapan bahwa investasi asing berdampak pada kemiskinan di Indonesia melalui uji kausalitas terbantahkan.

REFERENSI.

- Adiputra, Tito Brian, 2017 : “Pengaruh Keterbukaan Ekonomi Terhadap Indek Pembangunan Manusia Indonesia, Tahun 2000- 2015” , Skripsi, Universitas Hasanudin, Makasar.
- Arman Delis, Candra Mustika, Etik Umiyati, 2015 : “ Pengaruh FDI Terhadap Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia”, Journal Paradikma Ekonomi, Vol.10, No. 0.
- Asongu, S. A.,2012: “Globalization and Africa: Implications for Human Development”, AGDI, Working Paper.
- Bremmer, Ian. 2011 : “Akhir Pasar Bebas, terj. Alex Tri Kantjono”. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chinn, Menzie D, and Hiro Ito, 2008 : “ A New Measure of Financial Openness”. Journal of Comparative Policy Analysis, Volume 10, Issue 3,
- Calderon, Cesar, 2004: “Trade Openness and Real Exchange Rate Volatility: Panel Data Evidence”, Central Bank of Chile, Working Papers 294.
- Daumal, Marie, 2008: Impact of Trade Openness on Regional Inequality and Political Unity: the Cases of India and Brazil. Paper. Dauphine Paris University, Paris
- Deliarnov. 2012: “Perkembangan Pemikiran Ekonomi”. Rev.ed.. Jakarta: Rajawali Pers.
- Feriansyah, Noer Azam Achsani, dan Tony Irawan, 2018 : “Pengaruh Liberalisasi Keuangan terhadap Volatilitas Makroekonomi di Kawasan Asia-Pasifik “, JEPI Vol. 18 No. 2
- Ha, Eunyong, 2012: Globalization, Government Ideology, and Income Inequality in Developing Countries. The Journal of Politics, Vol. 74, No. 2, 541-557
- Kalemli-Ozcan, S., & Sørensen, B. 2003: Financial Integration and Economic Welfare;http://econweb.umd.edu/~kalemli/assets/books/SorensenKalemli-Ozcan_Feb9_06.pdf.
- Murbarani, Nova. 2014 : “Pengaruh Keterbukaan Ekonomi Terhadap Ketimpangan antarprovinsi di Indonesia”. Tesis. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Nowbutsing, Baboo M. 2014: “The Impact of Openness on Economic Growth: Case of Indian Ocean Rim Countries” Journal of Economic and Development Studies. Vol.2, No.2, pp.

407-427.

- Rajan, R. (2001). Economic globalization and Asia: Trade, finance and taxation. CIES Discussion Paper No. 0150. Center for International Economic Studies, Adelaide University. <https://www.adelaide.edu.au/cies/documents/papers/0150.pdf>. Diakses 6 Februari 2019
- Salim dan Budi Sutrisno. 2008: “Hukum Investasi di Indonesia” Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Suharto, Edi. 2006: “ Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial”, Alfabeta, Bandung
- Widarjono, Agus, 2013 : Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya, Edisi Keempat, Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

UPAYA REUNIFIKASI KOREA DAN PERKEMBANGAN HUBUNGAN ANTAR KOREA

Reza Prima Yanti & Anik Yuniarti

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

e-mail: rzprimayanti@gmail.com

Abstract

The Korean Peninsula is a strategic region in East Asia and is still experiencing disputes since the end of the Korean War to the present. This paper aims to explain the efforts made for the reunification of Korea from the reign of Syngman Rhee to Moon Jae In and the implications for the development of relations between Korea. The author uses descriptive analytical-qualitative methods in conducting this research. In the writer's findings, efforts made under military rule are more aimed at merging the two Koreas by eliminating North Korea's communist ideology. While in the era of civil government, the efforts made were more to create trust between the two Koreas and then to build close relations through economic cooperation, economic assistance and reunification did not become forced.

Keywords: Korea, Reunification, Diplomacy

PENDAHULUAN

Korea merupakan negara kecil yang terletak di bagian timur Benua Asia, terdiri dari Semenanjung Korea dan 3.305 pulau disekitarnya. Secara keseluruhan, luas wilayah Korea meliputi 220.000 kilometer persegi, dimana 98.000 kilometer persegi menjadi bagian wilayah Korea Selatan, sementara sisanya adalah milik Korea Utara. Wilayah Korea bagian utara berbatasan dengan Sungai Yalu dan Tumen, sementara bagian timur dan barat dikelilingi oleh perbatasan laut (Soong Hoom & Chung-in Moon, 2001:11). Letaknya yang strategis itu menjadikan Semenanjung Korea sebagai jembatan penghubung antara Benua Asia (Cina) di Utara dengan wilayah Jepang di selatan. Selama abad-19, Jepang dan negara barat melihat Korea sebagai batu loncatan untuk memproyeksikan kekuatan dan pengaruhnya ke Manchuria (Chung-in Moon, 2012:11). Sementara itu, Cina dan Rusia menggunakan Korea sebagai batu loncatan untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka ke Pasifik Utara. Karena letaknya yang strategis itulah, Jepang menduduki Korea pada tahun 1910 melalui Perjanjian Aneksasi Jepang-Korea. Selama penjajahan, Jepang melakukan eksploitasi dan membuat aturan-aturan yang merugikan Korea, meskipun disisi lain Jepang membangun infrastruktur seperti jalan dan komunikasi modern. Misalnya, Jepang melakukan kerja paksa dan mengeksport tanaman Korea ke Jepang guna memenuhi tujuan dan pertahanan Jepang. Akibatnya terjadi kekurangan pangan di Korea (Young Ick Lew, 2000:23). Di bidang budaya, Jepang melarang penggunaan Bahasa Korea, pengajaran sejarah dan budaya Korea di sekolah, serta penggunaan nama Korea.

Memasuki akhir Perang Dunia II, Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang dengan melancarkan invasi Manchuria dan Korea (Hanneka Andreas, 2006:21). Pada saat itu

Jepang telah habis oleh perang berlarut-larut melawan Amerika Serikat dan Sekutu. Peristiwa penjatuhan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 telah membuat pemerintah Jepang berupaya mencari cara untuk mengakhiri perang. Hingga akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Sejak kemunduran Jepang, Uni Soviet mendaratkan pasukannya di Korea dari arah utara. Hal tersebut juga diikuti oleh Amerika Serikat yang mendaratkan pasukannya dari arah selatan sebagai upaya untuk mencegah salah satu pihak menguasai seluruh Semenanjung Korea. Ketika perang berakhir dengan menyerahnya Jepang pada 15 Agustus 1945, rakyat Korea menerima berita pembebasan mereka dengan kegembiraan sekaligus kecemasan. Rakyat Korea gembira karena mereka dibebaskan dari penindasan Jepang tetapi cemas karena negara mereka harus dibagi sepanjang garis 38°Lintang Utara (38°paralel) menjadi dua zona pendudukan militer. Garis 38°Lintang Utara dipelopori oleh para pembuat kebijakan Amerika Serikat yang diklaim sebagai cara terbaik untuk mencegah Uni Soviet menempati seluruh Semenanjung Korea. Presiden Harry S. Truman menjamin dan membuat perjanjian dengan Marsekal Joseph Stalin untuk menghormati garis 38°Lintang Utara pada tanggal 16 Agustus 1945 tanpa harus berkonsultasi dengan Korea. Dibawah garis 38°Lintang Utara, Korea bagian selatan diduduki oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat pada bulan September 1945. Pasukan pendudukan AS menyelenggarakan pemerintahan militer sementara di Korea bagian selatan dengan nama Pemerintah Militer Amerika Serikat di Korea (United States Army Military Government in Korea/USAMGIK) di Seoul dan memerintah Korea Selatan selama tiga tahun dengan dukungan dari Partai Demokrat Korea. Hingga pada tanggal 15 Agustus 1948, Korea Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat memerdekakan diri sebagai sebuah negara dengan nama resmi Republic of Korea (ROK) dan diakui oleh PBB sebagai pemerintah yang sah. Sementara itu, Uni Soviet juga mendukung berdirinya pemerintahan di Pyongyang dan menghasilkan kemerdekaan Korea Utara dengan nama resmi Democratic People Republic of Korea (DPRK) pada 9 September 1948.

Pembagian Semenanjung Korea merupakan salah satu bukti jelas yang disebabkan persaingan ideologi. Pasca berdiri sebagai dua negara yang memiliki kedaulatannya masing-masing, hubungan Korea Selatan dengan Korea Utara diliputi konfrontasi dan ketegangan militer yang merupakan upaya untuk menyatukan kembali kedua Korea (Kim Yukhoon, 2007:83-84). Ketegangan kali pertama terjadi pada 25 Juni 1950 ketika militer Korea Utara menyeberangi perbatasan dan melakukan invasi atas Korea Selatan. Tindakan ini memulai Perang Korea yang berlangsung selama tiga tahun, mengakibatkan lebih dari dua juta orang tewas, merusak infrastruktur dan perekonomian negara, serta meninggalkan keretakan hubungan diantara sesama orang Korea. Perang Korea berakhir pada 27 Juli 1953 saat Amerika Serikat, Cina dan Korea Utara menandatangani persetujuan gencatan senjata, dan kedua belah pihak sepakat untuk membuat zona penyangga selebar tiga mil antara kedua negara yang kemudian dikenal sebagai Zona Demiliterisasi. Presiden Korea Selatan, Syngman Rhee, menolak menandatangani persetujuan tersebut, namun ia berjanji menghormati kesepakatan gencatan senjata (Bruce Cunnings, 2011:1-36). Ini berarti bahwa Perang Korea belum berakhir secara resmi hingga saat ini, dan tidak mengherankan jika kemudian ketegangan masih mewarnai perjalanan hubungan diantara kedua Korea.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian kualitatif dipilih karena dapat mencakup berbagai macam isu dan permasalahan (Silverman, 2001:25) serta ditujukan untuk menjelaskan, melakukan analisa dan memberikan

pemahaman terhadap fenomena-fenomena sosial yang terjadi. Secara sederhana, John W. Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai berikut: “[a] qualitative research begins with assumptions and the use of interpretative/theoretical frameworks that inform the study of research problems addressing the meaning individuals or groups ascribe to a social or human problem.” (Creswell, 2013:44). Selanjutnya “A qualitative study is defined as an inquiry process of understanding a social or human problem, based on building a complex, holistic picture, formed with words, reporting detailed views of informants, and conducted in a natural setting” (Creswell, 1994:1-2). Dalam proses pengumpulan data penelitian, terdapat tiga langkah yang harus dilakukan. Pertama, adanya pengaturan tentang pembatasan dalam pembahasan suatu masalah penelitian. Kedua, mengumpulkan informasi dengan melakukan pengamatan, wawancara, pengumpulan dokumen-dokumen dan bahan visual. Ketiga, membuat sebuah protokol untuk mencatat atau merekam setiap informasi. Oleh sebab itu, penulis memberi batasan masalah pada upaya-upaya yang dilakukan untuk reunifikasi Korea sejak masa Rhee Syngman hingga Moon Jae-in. Masalah utama yang dikaji adalah kebijakan luar negeri apa yang diterapkan Korea Selatan terhadap Korea Utara dan instrumen untuk mewujudkan reunifikasi Korea. Selanjutnya mengkaji bagaimana implikasi kebijakan dan penggunaan instrumen tersebut bagi perkembangan hubungan Korea. Terkait teknik pengumpulan data, penulis menggunakan kajian literatur atau studi pustaka terhadap data-data dengan menggunakan sumber baik berupa juga, buku, artikel, hasil penelitian, serta dokumen-dokumen lainnya. Selain itu, data juga diperoleh dari situs (*website*) internet yang dianggap relevan sesuai dengan data yang dibutuhkan. Data yang diperoleh melalui *internet research* ini bersifat sebagai data tambahan atau pendukung.

PEMBAHASAN

Sejak terbaginya Korea menjadi dua negara yang bertentangan secara ideologi dan politik pada tahun 1953, banyak upaya damai yang telah dilakukan kedua belah pihak yang dimulai dengan saling membuka komunikasi dan hubungan baik antar Korea. Hubungan antar Korea tidak hanya persaingan dan permusuhan, namun juga berorientasi pada kerjasama reunifikasi Korea. Presiden Korea Selatan yang juga merupakan salah satu tokoh perintis kemerdekaan Korea Selatan adalah Syngman Rhee (1948-1960). Dalam kepemimpinannya di awal kemerdekaan, Syngman Rhee mengusung kebijakan resmi pemerintahannya dengan nama March North for Unification, yang secara jelas menerapkan kebijakan unifikasi dengan kekuatan bersenjata dan menolak untuk hidup berdampingan dengan damai bersama Korea Utara (Cha Victor D, 2011). Dalam upaya untuk mewujudkan reunifikasi Korea, pemerintahan Syngman Rhee mempertahankan sifat permusuhan yang tidak dapat didamaikan terhadap Korea Utara dan berusaha mencapai reunifikasi melalui penaklukan komunisme Korea Utara (Yang Seung-yoon&Mohtar Mas’oed, 2002:31-32). Kebijakan reunifikasi Presiden Syngman Rhee itu terkait dengan dua faktor, yaitu rasa antisipasi dan tidak percaya terhadap komunisme serta klaim Korea Selatan untuk menjadi satu-satunya pemerintahan yang sah di Semenanjung Korea. Klaim ini didasarkan pada Resolusi Dewan Umum PBB No.195 (III) tahun 1948 dan tetap dipertahankan oleh pemerintahan-pemerintahan Korea Selatan selanjutnya. Resolusi ini menyatakan bahwa pemerintahan Republik Korea adalah pemerintahan Semenanjung yang sah karena dibentuk melalui pemilu yang sah dan wilayah Republik Korea didiami oleh sebagian besar rakyat Korea.

Instrumen utama yang digunakan oleh Syngman Rhee untuk mencapai tujuan politiknya adalah diplomasi, terutama dengan negara sekutu. Ia mengandalkan kekuatan Amerika Serikat untuk mendapatkan dan mempertahankan kemerdekaan Korea Selatan serta

untuk menyatukan kembali Korea. (Han Ki-shik, 2001:10). Presiden Rhee adalah seorang internasionalis yang mengeluarkan kebijakan didasarkan pada kepentingan internal Korea Selatan, sehingga dia menggunakan kekuatan asing (negara lain) untuk kepentingan bangsanya. Dalam pemerintahannya, Presiden Rhee mendesak Amerika Serikat yang menjaga keamanan Korea Selatan untuk memanfaatkan monopoli nuklirnya guna memaksa Uni Soviet menarik diri dari Semenanjung Korea. Ketika Amerika Serikat memasuki negosiasi gencatan senjata (pasca Perang Korea), Presiden Rhee dengan terbuka menentang penghentian permusuhan. Rhee menuntut agar Amerika Serikat menarik mundur pasukannya dari Semenanjung Korea jika gencatan senjata itu ditandatangani, dan juga mengertak bahwa Korea Selatan lebih memilih bertarung sendirian melawan Korea Utara, Cina dan Uni Soviet daripada memilih gencatan senjata.

Selain itu, Presiden Rhee melakukan tindakan destruktif yang sengaja dirancang untuk menyalakan kembali permusuhan dengan Korea Utara. Salah satu tindakan Rhee yang provokatif terjadi pada bulan Juni 1953 ketika ia secara sepihak mengumumkan adanya 25.000 tawanan Perang Korea yang ditawan di selatan. Tindakan ini merupakan salah satu upaya yang disengaja untuk melemahkan negosiasi gencatan senjata, yaitu dengan cara melakukan repatriasi (pengembalian tawanan perang ke negeri asalnya). Repatriasi tersebut menjadi titik utama negosiasi. Pada akhirnya, perjanjian gencatan senjata antara Korea Utara dan Korea Selatan terjadi. Namun, Presiden Rhee menolak untuk menandatangani perjanjian. Ia berjanji untuk menghormati perjanjian gencatan senjata tersebut. Kontribusi Rhee terhadap sejarah politik Korea adalah kemampuannya melindungi negaranya dari ancaman komunis selama masa awal kemerdekaan. Sementara itu, ideologi politik yang diterapkan selama masa pemerintahannya adalah ideologi anti Jepang dan anti komunis.

Pemerintahan Rhee berakhir pada April 1960 ketika dia digulingkan oleh aksi pemberontakan mahasiswa di Korea Selatan, selanjutnya pemerintah peralihan Korea Selatan dipimpin oleh Heo Chong selama tiga bulan. Dibawah pemerintahannya, Korea Selatan mulai melunakkan sikapnya mengenai reunifikasi Korea. Meskipun di sisi lain, Heo Chong tetap mempertahankan dua kunci utama politik luar negerinya, yakni berusaha memperbaiki hubungan Korea Selatan dengan Jepang dan negara-negara non blok, serta bersedia untuk mengakhiri pemisahan Semenanjung Korea sesuai dengan prinsip-prinsip resolusi PBB. Pemerintahan peralihan Heo Chong kemudian digantikan oleh Perdana Menteri Chang Myeon yang melanjutkan kebijakan Heo Chong tersebut. Berbeda dari politik luar negeri Rhee, Chang Myeon secara eksplisit menyatakan Korea Selatan tidak akan menggunakan kekuatan militer untuk mencapai reunifikasi dan mengembangkan sikap fleksibel terhadap negara-negara non blok. Chang Myeon hanya memimpin selama delapan bulan sebagai Perdana Menteri sebelum akhirnya mundur akibat kudeta militer yang dilakukan oleh Jenderal Park Chung Hee pada bulan Mei 1961.

Setelah kudeta yang dilakukannya, Park Chung Hee muncul sebagai presiden Korea Selatan dan berkuasa selama 16 tahun (1963-1979) Presiden Park mengkonsentrasikan semua kekuatan sosial, politik dan ekonomi Korea Selatan dibawah komandonya. Sebagai mantan militer, dia tertarik untuk menciptakan stabilitas, membangun perekonomian dan memperkuat pertahanan nasional. Park tidak mengenal prinsip-prinsip demokrasi atau cara hidup berdemokrasi (Nahm Andrew C, 1993:196). Menurutnya, cara demokrasi akan membawa kemajuan yang lamban, pemisahan sosial dan melemahkan pertahanan nasional. Park membuat pemerintahannya bertumpu pada kekuatan yang berasal dari militer, birokrat dan teknokrat. Oleh sebab itu, rezim dibawah Park disebut rezim otoriter birokratis dan termasuk salah seorang peletak dasar strong military government di Asia (Jakti Kuntjoro, 1995:114).

Terkait kebijakan reunifikasi dengan Korea Utara, pemerintahan Park mendasarkannya pada tiga hal berikut: anti komunisme sebagai tujuan nasional yang utama dan terus memperkuat rasa anti komunisme tersebut; menghormati piagam PBB, melaksanakan prinsip-prinsip perjanjian internasional dan memperkuat ikatan dengan Amerika Serikat serta negara-negara non blok lainnya; menggunakan seluruh tenaga untuk membangun kekuatan yang memungkinkan melawan komunisme demi tercapainya unifikasi nasional.

Ketiga hal tersebut adalah lanjutan dari kebijakan luar negeri pemerintahan sebelumnya, namun strategi reunifikasi yang digunakan pemerintahan Park lebih menekankan pada pelaksanaan pembangunan kekuatan nasional sebagai langkah pendahuluan atas hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai reunifikasi. Selain itu, hal penting lainnya yang ada dalam politik luar negeri Park adalah goodwill diplomacy yang diterapkan terhadap negara-negara non blok. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman negara-negara non blok terhadap permasalahan Semenanjung Korea.

Kekuatan ekonomi Korea Selatan semakin berkembang pada tahun 1980an sehingga menjadi instrumen diplomatik bagi kebijakannya terhadap Korea Utara yang dikenal dengan istilah Nord Politic dari pemerintahan Presiden Roh Tae Woo (Charles K. Amstrong, 2005:6). Kebijakan masa Roh Tae Woo fokus pada pendekatan Korea Selatan dengan sekutu komunis Korea Utara agar mau membuka hubungan dalam bidang ekonomi dan politik. Nord Politic berhasil membangun hubungan antara Korea Selatan dan negara-negara komunis di Eropa Timur, termasuk Uni Soviet yang pada akhirnya mengakui Korea Selatan pada tahun 1990. Sementara itu, untuk Korea Utara, Presiden Roh mengajukan visi antar-Korea berupa kerjasama yang merupakan langkah menuju unifikasi menjadi Masyarakat Nasional Korea (Korea National Community). Usulan utama Korea Selatan terhadap Korea Utara terkait unifikasi, yang diusulkan Roh adalah konfederasi atau negara perserikatan dari dua sistem politik yang ada di Semenanjung Korea, pertama kali dijelaskan pada tahun 1980. Korea Utara telah menunjukkan fleksibilitasnya dalam menjalankan usulan tersebut dan bersedia untuk melihat konfederasi bukan sebagai tujuan akhir penyatuan (unifikasi) tetapi merupakan institusi transisi atau peralihan dalam upaya penyatuan dua “pemerintah daerah” (Korea Utara dan Korea Selatan).

Pemerintahan selanjutnya dibawah pemerintahan sipil yaitu Kim Young Sam (1993-1998). Setelah Uni Soviet dan Blok Eropa Timur runtuh pada akhir tahun 1980an hingga awal 1990an, sikap Korea Utara jauh lebih keras daripada masa-masa sebelumnya dimana Korea Utara masih mendapatkan bantuan dan dukungan besar dari masyarakat sosialis internasional. Menyadari keadaan Korea Utara khususnya keadaan perekonomiannya yang semakin memburuk, pemerintah Kim Yeong Sam mencoba mendekati Korea Utara seperti halnya Jerman Barat terhadap Jerman Timur. Namun usahanya justru mengarahkan Korea Utara menuju ke arah yang lebih keras lagi, memperkuat kekuatan militer sambil mengembangkan kekuatan senjata modern. Pemerintahan Kim Dae Jung (1998-2003) menandai peralihan kekuasaan politik secara damai di Korea Selatan untuk pertama kalinya. Pada awal kepemimpinannya, pemerintahan Kim Dae Jung meluncurkan Sunshine Policy atau kebijakan untuk melakukan kerjasama, mengurangi kekuatan militer, membangun perdamaian dengan membangun kepercayaan bersama Korea Utara (Chung-in Moon, 2012:1). Kebijakan pemerintah Kim Dae Jung terhadap Korea Utara secara resmi bernama The Policy of Reconciliation and Cooperation, tetapi presiden Kim secara pribadi lebih suka menggunakan Sunshine Policy. Kebijakan ini didasarkan pada tiga prinsip utama berdasarkan pidato pelantikan Kim Dae Jung pada tahun 1998. Pertama, prinsip non-toleransi terhadap segala bentuk ancaman militer maupun provokasi bersenjata oleh Korea Utara. Kedua, prinsip

unifikasi dua Korea tanpa menggunakan ancaman ataupun kekerasan. Ketiga, prinsip mendorong peningkatan pertukaran serta kerjasama antara Korea Selatan-Korea Utara melalui pemberlakuan kembali perjanjian rekonsiliasi tahun 1991. Perjanjian rekonsiliasi atau Treaty of Reconciliation and Non-aggression, merupakan perjanjian yang ditandatangani oleh Korea Selatan dan Korea Utara pada tanggal 13 Desember 1991. Dalam perjanjian itu, Seoul dan Pyongyang sepakat untuk menghentikan hubungan permusuhan dan bekerjasama dalam bidang keamanan.

Melalui kebijakannya, pemerintahan Kim Dae Jung menekankan pentingnya keadaan kebersamaan, perdamaian dan peningkatan kerjasama dengan Korea Utara dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Kim Dae Jung memilih kebijakan penyatuan Korea secara *de facto* melalui lebih banyak kontak dan kerjasama antara Utara dan Selatan daripada penyatuan sistem dan hukum (*de jure*). Menurut Geetha Govindasamy, reunifikasi kedua Korea merupakan tujuan akhir Kim Dae Jung. Namun, dia memahami bahwa reunifikasi sulit direalisasikan tanpa mengakhiri kebijakan ala Perang Dingin yang diadaptasi oleh pemerintahan sebelumnya. Kim percaya bahwa kebijakan bermusuhan dan blokade hanya memperburuk situasi dan meningkatkan kemungkinan konfrontasi militer antara kedua Korea. Sebagai alternatif, Kim Dae Jung merancang formula unifikasi tiga tahap yang mencakup koeksistensi damai, pertukaran damai antar Korea dan unifikasi damai (Geetha Govindasamy, 2012:2). Hal itu senada dengan apa yang dituliskan oleh Chung-in Moon, bahwa Presiden Kim merumuskan konsep perdamaian ke dalam tiga prinsip utama, yakni: hidup berdampingan secara damai atau *peaceful co-existence* (pembangunan perdamaian dengan mengakhiri hubungan permusuhan, pengurangan penggunaan senjata dan pengawasan bersama, serta membangun rezim keamanan dan kerjasama multilateral); pertukaran perdamaian atau *peaceful exchange* (restorasi identitas nasional bersama melalui interaksi politik, ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan, serta perluasan kepentingan bersama melalui peningkatan pertukaran atau kerjasama dalam bidang ekonomi); unifikasi damai atau *peaceful unification* (peningkatan unifikasi dan penolakan terhadap unifikasi dengan kekuatan militer maupun tindakan manipulasi). Sunshine Policy dapat dilihat sebagai bentuk dari tiga prinsip perdamaian tersebut.

Selain itu, Kim Dae Jung membangun kebijakan yang bersifat timbal balik (*reciprocity*) dan fleksibel terhadap Korea Utara. Timbal balik berarti bahwa salah satu kebijakan Korea Selatan memberikan bantuan kepada Korea Utara tidak perlu diberi balasan atau ganti yang setara (dalam arti bentuk dan jumlah bantuan yang telah diberikan), namun Korea Utara hanya perlu meningkatkan hubungan baik dengan Korea Selatan. Selain itu, sekalipun nuklir Korea Utara telah diakui sebagai salah satu masalah utama, namun secara resmi hal tersebut dipisahkan dari kebutuhan untuk memperbaiki hubungan antar Korea. Pemerintah Kim tidak memprioritaskan kebijakannya pada masalah senjata nuklir Korea Utara. Sebaliknya, pemerintah Kim menekankan kebijakannya pada kebutuhan ekonomi dan kemanusiaan Korea Utara. Hasil penerapan Sunshine Policy yang dilakukan oleh pemerintah Kim Dae Jung membawa kemajuan bagi hubungan dua Korea. Pencapaian-pencapaian penting yang berhasil direalisasikan antara lain pada tahun 1998, Kim Dae Jung berhasil melancarkan proyek bersama antar Korea, yakni proyek pariwisata dan turisme Gunung Kumgang dan proyek Komplek Industri Kaesong di Korea Utara; pada Juni 2000 berhasil melaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi Korea (Korean Summit) yang dilakukan oleh presiden Kim Dae Jung dan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Il. KTT tersebut menghasilkan The South-North Joint Declaration dan diadakannya South-North Ministerial Meeting. Korea Utara menanggapi positif pertemuan puncak tersebut dan berdampak pada meningkatnya hubungan ekonomi

kedua Korea.

Keharmonisan hubungan Korea Utara dan Korea Selatan tersebut hanya berlangsung sebentar. Setelah presiden Kim Dae Jung turun tahta dan digantikan oleh Roh Moo Hyun (2003-2008) hubungan kedua Korea menjadi renggang. Pada masa Roh Moo Hyun, haluan kebijakan Korea Selatan untuk Korea Utara menjadi berubah. Hal ini dibuktikan oleh Sunshine Policy tidak lagi didukung semua pihak karena pada masa ini banyak rakyat Korea yang menganggap kebijakan tersebut hanya sebagai mission impossible Kim Dae Jung. Sunshine Policy digantikan oleh kebijakan yang dibuat Roh Moo Hyun yaitu mengadopsi kebijakan kesejahteraan dan keterlibatan Korea Selatan terhadap Korea Utara serta terus bekerja menuju reunifikasi damai kedua Korea di abad 21. Presiden Roh juga tidak hentinya menyatukan kedua Korea namun usaha yang dilakukan seperti beberapa perundingan dua Korea mengalami kegagalan. Hubungan keduanya berangsur memburuk dan harapan terwujudnya reunifikasi nyaris pudar. Hubungan Korea Selatan dan Korea Utara semakin memburuk sejak terpilihnya Lee Myung Bak sebagai presiden baru Korea Selatan yang dilantik pada bulan Februari 2008. Keinginan Lee Myung Bak untuk menjalankan kebijakan garis keras terhadap Korea Utara berkaitan dengan program nuklir Korea Utara. Korea Utara mengancam akan menggelar perang fisik dengan Korea Selatan jika pemerintah Lee Myung Bak tidak menghentikan kebijakan konfrontasinya. Tujuan mulia rekonsiliasi dan reunifikasi kedua Korea hanya dapat dicapai kembali jika kepemimpinan Korea Utara bersedia untuk menyerah dalam pengembangan senjata nuklir dengan menerima jaminan keamanan dan bantuan kemanusiaan dari negara-negara besar di Pertemuan Enam Pihak di Beijing. Kemudian reunifikasi Korea secara damai dapat dicapai dengan jaminan persetujuan dan keamanan dari empat negara besar yang mengelilingi Semenanjung Korea termasuk Cina, Jepang, Rusia dan Amerika yang mempengaruhi arah masa depan rekonsiliasi dan reunifikasi kedua Korea. Upaya reunifikasi juga dilakukan pemerintahan Park Geun Hye. Pada tahun 2014, Presiden Park Geun Hye mendeklarasikan “Gagasan Unifikasi Damai Semenanjung Korea” di Dresden yang merupakan lokasi simbol penyatuan Jerman pada tanggal 28 Maret 2014. Menurut Park Geun Hye, kedua Korea harus meningkatkan kerjasama. Keduanya membutuhkan kerjasama dan pertukaran yang saling membantu masyarakat dua Korea untuk memulihkan kesamaan, bukan pertukaran yang hanya sekali saja dalam proses membangun kepercayaan Semenanjung Korea. Selain itu, langkah tersebut adalah salah satu kebijakan pembentukan landasan unifikasi damai yang menjadi salah satu dari empat tonggak kebijakan negara pemerintahan Park Geun Hye: solusi masalah kemanusiaan antara warga kedua Korea (reuni keluarga terpisah reguler, peningkatan bantuan kemanusiaan kepada warga Korea Utara termasuk anak balita dan ibu hamil); pemulihan kesamaan bangsa antara kedua Korea (peningkatan antara warga kedua Korea, peningkatan pertukaran sipil dibidang penelitian sejarah, seni dan budaya, olahraga, dan lain-lain. Dukungan pengembangan ekonomi Korea Utara, pendidikan finansial dan lain-lain. Penelitian bersama program pendidikan demi generasi masa depan; pembentukan infrastruktur hajat kehidupan untuk kemakmuran bersama dua Korea (bermanfaat bagi kemakmuran bersama di Asia Timur termasuk warga dua Korea, dukungan perlengkapan atau pembentukan infrastruktur kehidupan rakyat dan social serta pengembangan sumber daya alam di Korea Utara). Upaya yang dilakukan pemerintahan Park Geun Hye ini demi terlaksananya pelaksanaan reunifikasi Korea, karena menurutnya pelaksanaan unifikasi di Semenanjung Korea yang bermanfaat bagi dunia internasional dan harmonis dengan negara-negara tetangga. Upaya reunifikasi di Semenanjung Korea seakan menemukan titik terang ketika 27 April 2018, presiden Korea Selatan Moon Jae In dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bertemu di Panmunjom, yang kemudian dilanjutkan dengan pembicaraan bilateral diantara

mereka (Kompas, 28 April 2018:8). Pembicaraan bilateral ini menghasilkan sejumlah kesepakatan, yaitu: kedua Korea akan meningkatkan hubungan demi kesejahteraan bersama dan bersatu kembali secara mandiri; kedua Korea akan bekerjasama mengurangi ketegangan militer; kedua Korea akan bekerjasama mewujudkan perdamaian abadi Semenanjung Korea

PENUTUP

Di awal pemerintahan Korea yang dipimpin oleh Syngman Rhee, upaya yang ditempuh untuk reunifikasi adalah melalui diplomasi terhadap negara asing guna memperoleh dukungan atas tujuan akhirnya untuk menyatukan Korea dengan menghilangkan paham komunis di Korea Utara. Upaya awal ini bersifat konfrontatif terhadap Korea Utara dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan setelah pemerintahan sipil memerintah Korea. Beberapa pemerintahan Korea Selatan memilih cara lain dan mampu merangkul beberapa isu guna mendekati Korea Utara, khususnya pada masa pemerintahan sipil yang dimulai dari era Kim Dae Jung. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap Korea Utara dalam mewujudkan reunifikasi Korea diterapkan melalui beberapa prinsip seperti menyelesaikan masalah melalui dialog, membangun kepercayaan satu sama lain antara kedua Korea, meningkatkan kerjasama internasional dan membangun rezim perdamaian di Semenanjung Korea. Langkah-langkah ini menunjukkan kesadaran bahwa permasalahan Semenanjung Korea mencakup berbagai isu seperti ekonomi, politik dan keamanan. Instrumen yang digunakan masih dalam kerangka diplomasi, memberi bantuan ekonomi dan melakukan kerjasama guna menumbuhkan saling percaya antara kedua Korea dengan tujuan akhir adalah reunifikasi yang dilakukan secara damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, Charles K, *Inter-Korean Relations in Historical Perspective*, Vol.14 No.2, 2005
- Andreas, Henneka, Reflections on Korean History and Its Impacts on the US-North Korean Conflict. *ISYP Journal on Science and World Affairs*, Vol.2 No1 2006
- Andrew C, Nahm, *Introduction to Korean History and Culture*, Seoul: Hollym International, 1993
- Chayo, Agus, *Perang-perang paling Fenomenal, Dari Klasik sampai Modern*, Yogyakarta, Bukubiru, 2012
- Creswell, J.W, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*, London, Sage Publications, 1994
- Govindasamy, Geetha, *Kim Dae Jung and The Sunshine Policy: An Appealing Policy Option for Inter-Korean Relations*, *ISYP Journal on Science and World Affairs*, Vol.27 No.1, June 2012
- Hoom, Soong Hoom & Chung-in Moon, *Understanding Korean Politics; an Introduction*, USA: State University of New York Press, 2001
- Ki-shik S.J, Han, *Understanding Korean Politics*, USA: State University of New York Press, 2001
- Kuntjoro, Jakti, *Ekonomi Politik Internasional di Asia Pasifik*, Jakarta, Erlangga, 1995
- Lew, Young Ick, *Brief History of Korea; A Bird's Eye View*, New York: The Korea Society, 2000
- Moon, Chung-in, *The Sunshine Policy; In Defense of Engagement as a Path to Peace in Korea*, ROK: Yonsei University Press, 2012
- Seung-yoon, Yang & Mohtar Mas'ood, *Politik Luar Negeri Korea Selatan: Penyesuaian Diri terhadap Masyarakat Internasional*, Gadjah Mada University Press, 2002
- Yukhoon, Kim, *Korean History for International Citizens*, Seoul: Northeast Asia Foundation, 2007
- Victor D, Cha, Rhee-straint: The Origins of the US-ROK Alliance, *International Journal of Korean Studies*, Vol. XV No.1, 2011

TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER DENGAN SASARAN AKHIR PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Rini Dwi Astuti, Sri Rahayu Budi Hastuti

UPN “Veteran” Yogyakarta

email: rinidwiastuti@upnyk.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the effects of changes in the BI 7-day Repo Rate reference rate for economic growth in Indonesia. The analytical tool used is the Vector Autoregression analysis with the analysis period of August 2016 - December 2018. The results of the study indicate that the transmission of monetary policy on interest rates in Indonesia towards the ultimate target of economic growth has been effective

Keywords: monetary policy, interest rate channel, transmission mechanism

PENDAHULUAN

Secara umum, kebijakan moneter memiliki beberapa tujuan, yaitu meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga, menjaga stabilitas suku bunga, menjaga stabilitas pasar keuangan, dan menjaga stabilitas pasar valuta asing (Mishkin, 2008). Kebijakan moneter selalu diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang diinginkan dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Secara operasional, stance kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan yang diharapkan akan mempengaruhi suku bunga pasar uang, suku bunga perbankan dan selanjutnya mempengaruhi sektor riil (Bank Indonesia, 2018).

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai dasar penyusunan kebijakan moneter di Indonesia, khususnya berkaitan dengan seberapa cepat respon suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan dalam merespon perubahan suku bunga acuan yang baru yaitu BI 7 days repo rate. Selanjutnya dapat dilihat bagaimana efek dari perubahan suku bunga acuan tersebut bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Bank Indonesia dalam mengevaluasi efektivitas penggunaan BI 7 days repo rate sebagai suku bunga acuan/kebijakan yang baru.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan-kebijakan ekonomi secara garis besar dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama, kebijakan-kebijakan untuk mempengaruhi sisi penawaran agregat seperti kebijakan ketenagakerjaan, kebijakan perdagangan, kebijakan perindustrian. Kelompok kedua adalah kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi sisi permintaan agregat (lebih dikenal dengan kebijakan ekonomi makro), seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan nilai tukar. Di antara berbagai kebijakan di atas, kebijakan moneter dianggap lebih bisa dikontrol oleh pemerintah sehingga dengan demikian dapat digunakan untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi (Warjiyo dan Zulverdi, 1998).

Kajian mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter umumnya mengacu pada

peranan uang dalam perekonomian, yang pertama kali dijelaskan oleh Quantity Theory of Money 'Teori Kuantitas Uang'. Teori ini pada dasarnya menggambarkan kerangka kerja yang jelas mengenai analisis hubungan langsung yang sistematis antara pertumbuhan jumlah uang beredar dan inflasi, yang dinyatakan dalam suatu identitas yang dikenal sebagai "The Equation of Exchange" (Mankiw, 2010):

$$MV = PT$$

Dimana jumlah uang beredar (M) dikalikan dengan tingkat perputaran uang /income velocity (V) sama dengan jumlah output atau transaksi ekonomi/output riil (T) dikalikan dengan tingkat harga (P). Dengan kata lain, dalam keseimbangan, jumlah uang beredar yang digunakan dalam seluruh kegiatan transaksi ekonomi (MV) sama dengan jumlah output, dihitung dengan harga berlaku, yang ditransaksikan (PT).

Transmisi kebijakan moneter jalur suku bunga data dilihat melalui pengaruh suku bunga ke sektor riil (output) melalui mekanisme pengaruh perubahan suku bunga jangka pendek yang ditransmisikan pada suku bunga menengah/panjang melalui mekanisme penyeimbangan sisi permintaan dan penawaran di pasar uang (Mishkin, 2008).

Penelitian Kusmiarso dkk (2002) di Indonesia, Albu (2006) di Rumania, dan Obamuyi (2009) di Nigeria menemukan bahwa suku bunga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui pengaruhnya terhadap investasi. Herlina (2013) melakukan penelitian berkaitan mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia Tahun 2000 – 2011 melalui saluran kredit perbankan, saluran suku bunga, saluran harga asset dan saluran nilai tukar. Alat analisis yang digunakan adalah analisis kausalitas Granger (Granger Causality). Hasil penelitian menunjukkan bahwa SBI memiliki hubungan kausalitas dengan PUAB pada triwulan ketiga dan SBI memiliki hubungan kausalitas dengan suku bunga deposito.

Seprilina (2013) melakukan penelitian pengaruh instrumen kebijakan moneter yaitu jumlah uang beredar dan suku bunga SBI dalam mempengaruhi output yang diprosikan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Analisis yang digunakan menggunakan metode regresi Vector Error Corection Model (VECM). Hasil uji empiris membuktikan bahwa variabel instrumen jumlah uang beredar dan suku bunga SBI dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang dengan arah koefisien yang searah.

Maslan (2017) memaparkan mengenai efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia melalui jalur suku bunga. Dengan variabel suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), suku bunga kredit, investasi, suku bunga pasar uang antar bank, Produk Domestik Bruto (PDB), dan inflasi pada periode triwulan I tahun 2004–triwulan IV tahun 2010. Menggunakan alat analisis Vector Auto Regression (VAR). Hasil pengujian yang dilakukan bahwa variabel-variabel jalur suku bunga saling berhubungan secara simultan dimana satu variabel mempengaruhi variabel lainnya dan mampu mempengaruhi variabel itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder runtut waktu (times series) bulanan, periode Agustus 2016 – Desember 2018. Data pertumbuhan ekonomi merupakan interpolasi dari data Produk Domestik Regional Bruto harga konstan tahun 2010. Sumber data berasal dari publikasi Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Alat Analisis

Penelitian ini akan mengolah dan menganalisis data dengan mempergunakan alat

analisis Vector Autoregression (VAR). VAR merupakan sistem persamaan dinamis yang menguji hubungan antara variabel-variabel ekonomi dengan menggunakan asumsi minimal atas struktur/teori ekonomi yang mendasarinya. VAR menjelaskan bahwa setiap variabel yang ada dalam model tergantung pada pergerakan masa lalu variabel tersebut dan juga pergerakan masa lalu seluruh variabel yang ada dalam sistem. VAR kurang menekankan pada asumsi ekonomi, tapi VAR lebih fokus pada perolehan nilai statistik yang lebih baik dari interaksi masa lalu antar variabel ekonomi dan menentukan model berdasarkan data tersebut (Gujarati, 2009).

Model penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Growth = \sum_{i=1}^n \alpha_i BI7D_{t-i} + \sum_{j=1}^n \beta_j Growth_{t-i} + \sum_{k=1}^n \gamma_k IR_{t-i} + e_{1t} \quad (1)$$

$$IR = \sum_{i=1}^m \lambda_i BI7D_{t-i} + \sum_{j=1}^m \delta_j Growth_{t-i} + \sum_{k=1}^m \sigma_k IR_{t-i} + e_{2t} \quad (2)$$

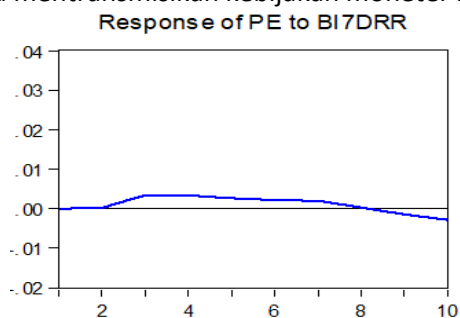
Keterangan :

- Growth = Pertumbuhan ekonomi
- BI7D = BI 7 Days Repo Rate
- IR = Suku bunga pasar uang antar bank, suku bunga perbankan
- n, m = jumlah lag
- e_{1t}, e_{2t} = Variabel pengganggu
- $\alpha, \beta, \gamma, \lambda, \delta, \sigma$ = Koefisien regresi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Respon Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Suku Bunga BI 7-day Repo Rate

Pada gambar 1 dapat dilihat bahwa sampai dengan bulan kedua, perubahan suku bunga BI 7-day Repo Rate tidak direspon secara permanen oleh pertumbuhan ekonomi. Setelah bulan ke-2 hingga bulan ke-8, pertumbuhan ekonomi merespon secara positif perubahan suku bunga BI 7-day Repo Rate. Hal ini berarti penurunan suku bunga belum cukup mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Setelah bulan ke-8, respon pertumbuhan ekonomi terhadap perubahan suku bunga BI 7-day Repo Rate adalah negatif dan permanen. Artinya, dalam jangka waktu yang lebih panjang, kenaikan (penurunan) suku bunga BI 7-day Repo Rate dapat menyebabkan penurunan (kenaikan) pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, suku bunga acuan baru yang digunakan Bank Indonesia telah mampu mentransmisikan kebijakan moneter ke sektor riil dengan baik.

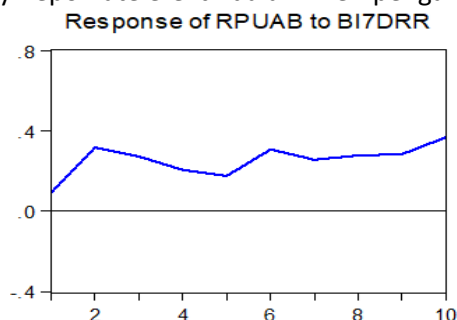


Gambar 1. Impulse Response Function Inflasi terhadap BI7DRR

Respon Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank Terhadap Suku Bunga BI 7-day Repo Rate

Respon suku bunga pasar uang antar bank terhadap perubahan suku bunga BI 7-day Repo Rate adalah positif dan permanen (Gambar 2). Artinya jika suku bunga BI 7-day Repo Rate mengalami goncangan kenaikan maupun penurunan diikuti oleh suku bunga pasar uang

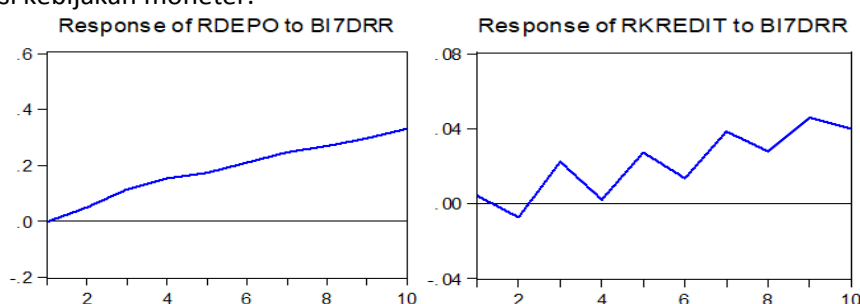
antar bank dengan arah perubahan yang sama baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pasar uang antar bank merupakan media pertama bagi transmisi kebijakan moneter. Melalui transaksi pinjaman antar bank yang sebagian besar berjangka waktu pendek (overnight). Jika suku bunga BI 7-day Repo Rate mengalami kenaikan terus menerus, maka suku bunga pasar uang akan mengikuti hal tersebut karena suku bunga BI 7-day Repo Rate merupakan acuan bagi transaksi likuiditas antar bank. Hal ini menunjukkan bahwa suku bunga BI 7-day Repo Rate efektif dalam mempengaruhi suku bunga pasar uang antar bank.



Gambar 3. Impulse Response Function Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank (RPUAB) terhadap BI7DRR

Respon Suku Bunga Perbankan Terhadap Suku Bunga BI 7-day Repo Rate

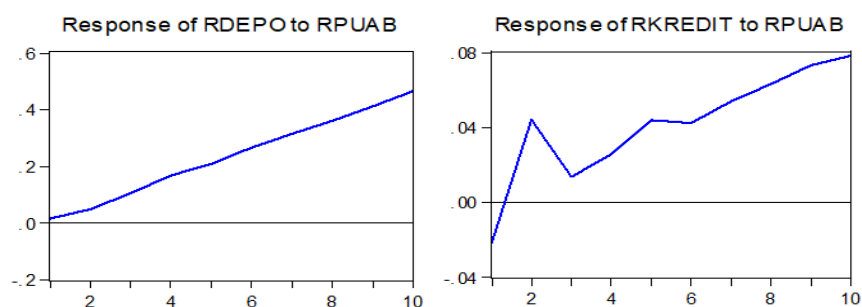
Dapat dilihat dalam gambar 3, bahwa suku bunga deposito (RDEPO) dan suku bunga kredit (RKREDIT) memiliki respon yang positif dan permanen terhadap perubahan suku bunga BI 7-day Repo Rate. Hanya saja suku bunga kredit secara konsisten menunjukkan respon yang positif terhadap perubahan suku bunga BI 7-day Repo Rate setelah bulan keempat. Hal ini menunjukkan bahwa suku bunga kredit relatif tegar dalam jangka pendek. Dalam jangka yang lebih panjang, guncangan yang terjadi pada suku bunga acuan BI 7-day Repo Rate akan diikuti oleh perubahan suku bunga perbankan dengan arah yang sama. Lebih lambat respon suku bunga kredit terhadap perubahan suku bunga BI 7-day Repo Rate dapat menghambat transmisi kebijakan moneter.



Gambar 3. Impulse Response Function Suku Bunga Deposito (RDEPO) dan Suku Bunga Kredit (RKREDIT) terhadap BI7DRR

Respon Suku Bunga Perbankan Terhadap Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank

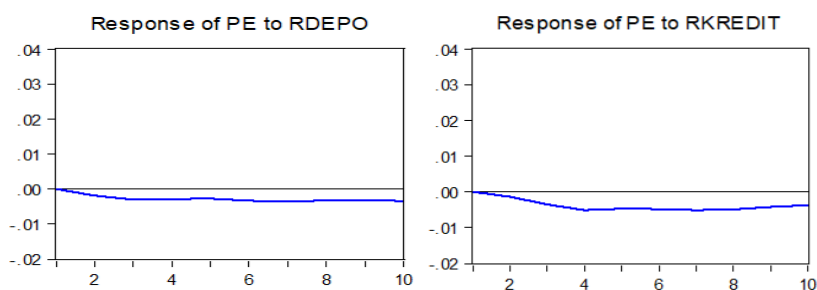
Respon suku bunga deposito (RDEPO) dan suku bunga kredit (RKREDIT) terhadap adanya perubahan suku bunga pasar uang antar bank adalah positif dan permanen (Gambar 4). Hal ini berarti perubahan suku bunga pasar uang mampu ditransmisikan dengan baik ke sektor perbankan. Kenaikan atau penurunan suku bunga pasar uang antar bank akan diikuti pula dengan kenaikan (penurunan) suku bunga perbankan, baik suku bunga deposito maupun suku bunga kredit. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan efektivitas dari kebijakan moneter.



Gambar 4. Impulse Response Function Suku Bunga Deposito (RDEPO) dan Suku Bunga Kredit (RKREDIT) terhadap Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank (RPUAB)

Respon Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Suku Bunga Perbankan

Adanya perubahan suku bunga perbankan, baik suku bunga deposito maupun suku bunga kredit direspon secara negatif oleh pertumbuhan ekonomi (Gambar 5). Artinya kenaikan (penurunan) suku bunga perbankan akan menyebabkan penurunan (kenaikan) pertumbuhan ekonomi.



Gambar 5. Impulse Response Function Pertumbuhan Ekonomi (PE) terhadap Suku Bunga Deposito (RDEPO) dan Suku Bunga Kredit (RKREDIT)

Suku bunga kredit merupakan biaya modal bagi investasi, sehingga adanya kenaikan suku bunga tersebut akan menurunkan insentif terhadap peminjaman dana sehingga investasi akan berkurang dan menurunkan permintaan agregat. Hal ini menyebabkan penurunan output dan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan suku bunga deposito akan meningkatkan insentif pemilik dana untuk menyimpan uang di bank, sehingga mengurangi permintaan agregat, output, dan pertumbuhan ekonomi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kebijakan moneter dengan menggunakan suku bunga BI 7-day Repo Rate memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil impulse response function inflation to BI 7-day Repo Rate memiliki pengaruh sejak awal penetapan BI 7-day Repo Rate menjadi suku bunga acuan hingga akhir periode penelitian.

Instrumen kebijakan moneter melalui jalur suku bunga BI 7-day Repo Rate memiliki pengaruh positif terhadap suku bunga pasar uang antar bank sehingga dapat ditransmisikan ke suku bunga perbankan. Selanjutnya terhadap sasaran akhir pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses mekanisme transmisi kebijakan

moneter melalui jalur suku bunga telah bekerja secara efektif.

Saran

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan yang diambil, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Transmisi kebijakan moneter jalur suku bunga di Indonesia terhadap sasaran akhir pertumbuhan ekonomi telah berjalan efektif. Sehingga, otoritas moneter dapat menggunakan dan mempertahankan suku bunga acuan BI 7-day Repo Rate sebagai instrumen kebijakan moneter.

Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan lebih luas dalam melakukan penelitian dengan memasukkan variabel seperti jumlah uang beredar, nilai tukar, harga aset sebagai instrumen untuk dapat melihat efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter selain dari jalur suku bunga.

DAFTAR PUSTAKA

- Akyüz, Yilmaz (2009), *Exchange Rate Management, Growth, and Stability: National and Regional Policy Options in Asia*, Asia Pacific Trade and Investment Initiative UNDP Regional Centre for Asia Pacific, Colombo Office.
- Albu, Lucian-Liviu (2006), *Trends in the Interest Rate – Investment – GDP Growth Relationship*, Romanian Journal of Economic Forecasting, No. 3, hal. 5-13.
- Bank Indonesia (2018), *Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I-IV*, Bank Indonesia, Jakarta.
- Gujarati, Damodar N dan Dawn C Porter (2009), *Basic Econometrics*, 5th Edition, McGraw-Hill, Singapore.
- Gujarati, Damodar N (2012), *Econometrics by Examples*, Palgrave Macmillan, New York.
- Herlina D. (2013), *Identifikasi Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Tahun 2000-2011*, Jurnal Kinerja, Volume 17. No.2: 158-173
- Kusmiarso, Bambang dkk (2002), *Interest Rate Channel of Monetary Transmission in Indonesia, Transmission Mechanisms of Monetary Policy in Indonesia*, Directorate of Economic Research and Monetary Policy, Bank Indonesia, Jakarta, hal 27-102.
- Mankiw, N Gregory (2010), *Macroeconomics*, 7th Edition, Worth Publishers, New York.
- Maslan J (2017), *Efektifitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia Melalui Jalur Suku Bunga*, Jurnal Ilmiah Kohesi, Vol. 1 No. 1.
- Mishkin, Frederic S (2008), *The Economic of Money, Banking, and Financial Markets: Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*, Edisi 8, Buku 2, Penerbit Salemba Empat, Pearson Education Inc, New Jersey.
- Obamuyi, T. M. (2009), *An Investigation of the Relationship between Interest Rates and Economic Growth in Nigeria, 1970 – 2006*, Journal of Economics and International Finance, Vol. 1(4), hal. 093-098.
- Seprillina L. (2013), *Efektivitas Instrumen Kebijakan Moneter terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Periode 1999:1-2012:2)*, Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya.
- Siswanto, Benny dkk (2002), *Exchange Rate Channel of Monetary Transmission in Indonesia, Transmission Mechanisms of Monetary Policy in Indonesia*, Directorate of Economic Research and Monetary Policy, Bank Indonesia, Jakarta, hal. 159-190.
- Warjiyo P dan Juhro S. M (2016), *Kebijakan Bank Sentral Teori dan Praktik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Warjiyo, Perry (2003), *Kebijakan Moneter di Indonesia*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia. Jakarta
- Warjiyo, Perry (2004), *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia*, Pusat Pendidikan

dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, Jakarta.
Warjiyo, Perry dan Zulverdi, D (1998), Penggunaan Suku Bunga sebagai Sasaran Operasional Kebijakan Moneter di Indonesia, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Vol. 1, No. 1.

KONTESTASI BERITA HOAX PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019 DI MEDIA DARING DAN MEDIA SOSIAL

Rudi Wibowo, Edwi Arief Sosiawan, Ratnawati, M.si

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN Veteran Yogyakarta

email: rudiretno@yahoo.com , edwias@upnyk.ac.id, ratnawati@upnyk.ac.id

Abstract

Penyebaran informasi/berita bohong (hoax) pada Pemilihan Presiden 2019 meningkat ekskalasinya dibandingkan pada saat Pilpres 2014. Fenomena berita politik hoax tersebut banyak menyesatkan masyarakat dan pada akhirnya digunakan untuk menyerang lawan politik selama pilpres 2019. Oleh karena itu selama pilpres 2019 berita politik hoax menjadi arena kontestasi antara pasangan capres. Penelitian ini membaca dan mengungkap isi kontestasi berita hoax politik selama pilpres 2019 dengan menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan metode analisis isi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa lokus penyebaran berita hoax adalah berada pada media sosial seperti facebook dan whatsapp. Berita hoax politik pilpres 2019 bersifat berantai dan memproduksi ulang berita hoax yang pernah ada sebelumnya pada pilpres 2014. Sasaran yang dituju oleh kontestasi berita hoax adalah capres 2019 serta pemerintah pusat. Simpulan yang diperoleh bahwa berita hoax penajamannya sangat ampuh menggunakan media sosial dan mengarah pada kebencian antar golongan. Saran dari penelitian ini adalah kontinuitas literasi media untuk semua golongan masyarakat.

Kata Kunci: berita hoax, pilpres 2019

PENDAHULUAN

Hoax saat ini menjadi perbincangan hangat di media massa maupun media sosial karena telah meresahkan publik dengan informasi yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Bila merujuk pada arti kata hoax sendiri adalah bermakna sebuah kebohongan atau informasi sesat yang sengaja disamarkan agar terlihat benar. Sedangkan berita hoax adalah sebuah publikasi yang terlihat seperti berita faktual, namun ternyata berisi kebohongan dan fitnah. Umumnya berita hoax sengaja dibuat untuk menyebarkan propaganda fitnah atau pesan kebencian (*hate speech*) kepada seseorang atau instansi tertentu.

Meskipun merupakan berita bohong namun masih banyak masyarakat Indonesia tertipu oleh berita hoax. Berita hoax seolah mampu mengalahkan berita – berita faktual yang dipublikasikan oleh New York Times, the Washington Post dan CNN. BuzzFeed.com menenggerai bahwa berita hoax ternyata lebih banyak disukai oleh masyarakat, hal ini terbukti dengan mudahnya hoax disebarluaskan dengan teknik *share* terutama via media sosial (diakses tanggal 17 Februari 2017). Kesukaan masyarakat pada berita hoax menurut hasil riset Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) adalah karena media *mainstream* tidak lagi berpihak kepada rakyat, media *mainstream* kurang peka dalam menyerap aspirasi masyarakat luas serta cenderung menjadi corong para pemilik media (Kominfo.ac.id diakses tanggal 17 Februari 2017). Oleh karena itu, masyarakat kemudian mencari media alternatif untuk pemuasan kebutuhan informasi mereka dengan mencari situs-situs berisi berita-berita hoax tersebut.

Menurut pandangan psikologis, ada dua faktor yang dapat menyebabkan masyarakat cenderung mudah percaya pada berita hoax, yaitu *pertama*, jika informasi berita hoax tersebut sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki. Misal seseorang memang sudah tidak setuju terhadap kelompok tertentu, produk, atau kebijakan tertentu begitu juga sebaliknya. Ketika ada informasi yang dapat mengafirmasi opini dan sikapnya tersebut, maka akan mudah percaya sehingga keinginan untuk melakukan pengecekan kebenaran terlebih dahulu menjadi berkurang. *Kedua*, masyarakat mudah percaya pada berita *hoax*, karena disebabkan terbatasnya pengetahuan atau literasi soal pembacaan dan pemaknaan terhadap berita *online*. Masyarakat tidak memiliki *prior knowledge* tentang informasi yang diterima sehingga mudah terpengaruh dan percaya oleh berita hoax (Kompas.com tanggal 23 Januari 2017). Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi masyarakat Indonesia yang berada di urutan ke 60 dibanding negara-negara lain menurut John W. Miller dan Michael C. McKenna dalam bukunya *World Literacy: How Countries Rank and Why It Matters* yang diterbitkan oleh Routledge (2016).

Fakta dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, hoax sebagai berita membuat tidak seorangpun mampu menghindari atau imun terhadap *exposure* berita hoax, siapapun dapat menjadi korban sesatnya informasi berita hoax. Bahkan Presiden Jokowi pun memberikan perhatian khusus terhadap fenomena hoax tersebut dengan himbuan agar media *mainstream* dan seluruh komponen masyarakat melakukan perlawanan dan pembasmian derasnya berita hoax (Kompas.com 10 Februari 2017).

Derasnya berita hoax tersebut oleh Masyarakat Indonesia Anti hoax dinilai sudah tak terkendali lagi. Dalam satu hari terdapat 30 berita hoax yang umumnya berkategori isu politik, kesehatan dan keuangan (Kompas 1 Desember 2016). Kominfo pada Desember 2016 merilis bahwa terdapat 800 ribu situs pembuat hoax dan *hate speech* di Indonesia. Oleh karena itu dapat dibayangkan dampak serta *exposure* yang disebarkan kepada masyarakat.

Berdasarkan riset Masyarakat Telematika (Mastel) menyebutkan pada tahun 2016 sebaran berita hoax lebih banyak didominasi oleh berita hoax politik. Dalam riset Mastel tersebut ditemukan fakta bahwa 91,8 persen responden mengaku paling sering menerima konten hoax tentang sosial politik, seperti pemilihan kepala daerah dan pemerintahan. Tidak beda jauh dengan sosial politik, isu SARA berada di posisi kedua dengan angka 88,6 persen. Sedangkan bentuk konten hoax yang paling banyak diterima responden adalah teks sebanyak 62,1 persen, sementara sisanya dalam bentuk gambar sebanyak 37,5 persen, dan video 0,4 persen. Sedangkan media atau alat yang menyebarkan berita hoax adalah 62,8 persen responden menyatakan mendapatkan berita bohong dari aplikasi pesan; 34,9 persen situs dan 8,7 persen dari televisi.

Merujuk pada data riset di atas berita hoax politik menjadi dominan disebarkan kepada masyarakat karena; pertama, berita hoax merupakan salah satu media yang ampuh untuk digunakan menjatuhkan dan menyerang lawan politik yang efektif. Kedua, pelaku atau pengunggah berita hoax relatif sulit untuk diketahui dan dicari keberadaannya karena bekerja dan bertindak dalam ruang maya atau virtual. Ketiga, berita informasi hoax mampu menyebar dengan cepat serta menjadi viral tanpa harus mengeluarkan biaya dan waktu yang besar dan lama.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, menyebarkan berita hoax walaupun hanya sekedar iseng atau sekedar mendistribusikan (*forward*) diancam pidana 6 (enam) tahun dan denda 1 (satu) milyar rupiah sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE. Namun ternyata ancaman hukuman ini tidak berefek langsung dengan berkurangnya berita hoax politik yang disebarkan.

Berkaitan dengan Pemilu presiden tahun 2019 maka berita hoax menjadi arena kontestasi antar lawan politik yang disebarakan melalui media sosial. Fakta tersebut disampaikan oleh KOMINFO yang menyatakan terdapat 62 berita hoax terkait Pemilu Pilpres tahun 2019 (<https://news.detik.com/berita/d-4368351/62-hoax-pemilu-2019-teridentifikasi-kominfo-ini-daftarnya>) dan semuanya mengarah pada kontestasi politik Pemilu 2019 khususnya pada pemilihan presiden. .

Pada sisi lain ke berita hoax di atas menjadikan Pemerintah sebagai petahana juga menjadi panik yang pada akhirnya memaksa presiden Jokowi diberbagai kesempatan selalu menyinggung masalah hoax dan memerintahkan secara serius aparat Kepolisian untuk melakukan tindakan tegas.

Berdasarkan pada fakta-fakta dan paparan ancaman penyebaran dan derasnya berita hoax di atas menjadi dasar pijakan untuk melakukan topik penelitian disini yang akan mengambil rumusan masalah : **““Bagaimana isi kontestasi informasihoax politik Pemilu 2019 selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2019 pada media daring dan sosial ?“**

Penelitian ini diangkat karena masih jarangny tema berita hoax dijadikan tema atau topik peneltian. Sejauh ini peneliti belum menemukan hasil penelitian yang sama tentang analisis isi berita hoax baik melalui jurnal cetak maupun jurnal online. Umumnya topik penelitian berita hoax selalu dikaitkan dengan literasi subjek penelitian atau lebih mengacu pada penelitian lapangan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survey.

KAJIAN LITERATUR

Tinjauan Hoax

Kata Hoax ecara etimologis berasal dari bahasa Inggris yang artinya tipuan, menipu. berita bohong ,berita palsu atau kabar burung. Sehingga dapat dikatakan bahwa Hoax adalah kata yang berarti ketidak benaran suatu informasi. Hoax bukan singkatan tetapi satu kata dalam bahasa inggris yang punya arti sendiri (Oxford Dictionary edisi 2003). Secara historis, Kata "hoax" berawal dari "hocus pocus" yang berasal dari bahasa latin "hoc est corpus" yang artinya "ini adalah tubuh". Kata ini awalnya digunakan oleh penyihir untuk mengklaim kebenaran, padahal sebenarnya mereka sedang berdusta. Hocus digunakan untuk menipu yang digunakan untuk sihir atau mantra para penyihir dan pesulap jaman dahulu. Kata "hoax" sendiri didefinisikan sebagai tipuan berasal dari Thomas Ady dalam bukunya candle in the dark (tahun 1656) atau risalah sifat sihir dan penyihir. Istilah Hoax mulai populer berdasarkan film drama Amerika yang dibintangi oleh Richard Gere "The Hoax". Film itu dirilis tahun 2006 yang disutradarai oleh Lasse Hallstrom, penulis skenario William Wheeler yang berdasarkan dari novel dengan judul yang sama karya Clifford Irving (1981) (sumber : Wikipedia.com).

Dalam konteks yang lebih luas lagi yang disebut dengan hoax bukan hanya sebatas berita palsu saja namun Hoax tidak lepas dari perjalanan sejarah, dalam esensinya sejarah mencatat sebuah tradisi "Satir Art Hoax" (SAH) yaitu Satir adalah kritikan, art adalah seni, sedangkan hoax adalah tipuan/manipulasi/mengakali/kebohongan (irving, 2006, 23). Sejarah mencatat SAH dimulai sekitar abad ke-7. SAH digunakan oleh kritikus untuk mengkritik fenomena kehidupan dalam masyarakat. Tradisi SAH dimainkan oleh seorang kritikus dalam mengkritik sebuah karya seni.

Satir art hoax juga digunakan kritikus dalam mengkritik para akademisi yang banyak menghabiskan waktunya di dalam rumah untuk selalu belajar, sehingga mereka tidak bisa menikmati kehidupan di luar yang lebih luas dan bebas. Hoax mulai populer pada abad ke-20, melalui perkembangan internet. Pada awalnya Satir Art Hoax, lalu berubah menjadi Satir Hoax,

kemudian kian keluar dari jalur menjadi Satir dan/atau Hoax. Jadi, jika merunut pada perjalanan sejarah, definisi hoax tidak sempit hanya berkuat pada masalah "berita palsu". Hoax mencakup suatu perbuatan yang bertujuan untuk menipu/membohongi orang lain dengan cara memanipulasi, mengakali, ataupun menutupi fakta yang sebenarnya. (Irving, 2006, 42).

Perkembangan saat ini jika mengkaitkan hoax dengan teknologi maka terlihat arus penyebaran hoax makin deras, semakin canggih dan tak terbendung. Gejala hoax makin mewabah sehingga berujung pada fitnah dan maraknya ujaran kebencian. Secara teoritis penyebaran hoax adalah sebagai berikut : (a) hoax dibuat dengan bentuk yg sangat provokatif dan menarik, sehingga orang yg membaca akan membenci atau komentar. (b). padahal setiap komentar pada links tersebut secara otomatis *search engine* di media sosial akan otomatis *crawling* dan melakukan *record* data tersebut. (c).kemudian Hoax tersebut diarahkan agar emosional pembaca ingin melakukan share ulang utk memberitahu teman bahwa " ini Hoax ". Melalui tindakan ini maka akan menambah kenaikan rating postingan hoax, karena core mesin pencari pada semua media sosial secara otomatis akan menaikkan rating berita yg paling banyak dilihat dan di komentari (Potter, 2008, 132)

Seperti halnya situs penipuan, situs hoax sama-sama menutupi identitas pemilik situs seperti kontak dan alamat dengan motif ekonomi. Dengan, faktor identitas sebuah situs jadi rujukan utama untuk mengenali penipuan dan berita bohong di internet. Selain mencari keuntungan, Hoax atau cerita bohong sengaja dibuat dengan alasan popularitas tetapi juga dampak munculnya kepanikan masal. Menurut analisa Andrew Potter (2008, 154) beberapa dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat dari berita hoax tersebut yaitu : (a). a. Secara ekonomis, hoax membuang waktu dan uang ; membaca hoax dapat menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi individu dan produktivitas. Setiap orang akan menghabiskan waktu 10 detik saja per hari untuk membaca pesan hoax. (b). b. Secara kriminal, hoax jadi pengalih isu : dalam dunia maya, hoax dapat digunakan oleh para penjahat maya atau penjahat siber untuk memuluskan aksi ilegal mereka. Umumnya para penjahat siber sering menyebar hoax untuk merusak kerentanan sistem di sebuah layanan internet. (c).c. Hoax dijadikan ajang penipuan publik ; jenis hoax yang dibuat untuk mencari simpati dan uang. Contoh seperti kabar hoax pembukaan pendaftaran CPNS nasional yang dikirim lewat WhatsApp. (d). Hoax pemicu kepanikan publik ; tujuan hoax yang paling banyak diminati oleh si pembuat hoax, memicu terjadinya kepanikan publik.

Menurut David Harley (2008, 233), ada beberapa aturan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi informasi *hoax* secara umum yaitu : *Pertama*, informasi *hoax* biasanya memiliki karakteristik surat berantai dengan menyertakan kalimat seperti "Sebarkan ini ke semua orang yang Anda tahu, jika tidak, sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi". *Kedua*, Informasi *hoax* biasanya tidak menyertakan tanggal kejadian atau tidak memiliki tanggal yang realistis atau bisa diverifikasi, misalnya "kemarin" atau "dikeluarkan oleh..." pernyataan-pernyataan yang tidak menunjukkan sebuah kejelasan. *Ketiga*, Informasi *hoax* biasanya tidak memiliki tanggal kadaluwarsa pada peringatan informasi, meskipun sebenarnya kehadiran tanggal tersebut juga tidak akan membuktikan apa-apa, tetapi dapat menimbulkan efek keresahan yang berkepanjangan. *Keempat*, Tidak ada organisasi yang dapat diidentifikasi yang dikutip sebagai sumber informasi atau menyertakan organisasi tetapi biasanya tidak terkait dengan informasi.

Mendefinisikan berita ternyata memiliki berbagai sudut pandang di dalamnya, dengan kata lain bahwa definisi berita tidaklah universal. Dalam buku Here's the News yang dihimpun oleh Paul De Maeseneer (1982, 22) menyatakan bahwa berita adalah informasi baru tentang

kejadian yang baru, penting, dan bermakna (signifikan), yang berpengaruh pada para pendengarnya serta relevan dan layak dinikmati oleh mereka. Definisi berita tersebut mengandung unsur-unsur yang : a. Baru dan penting, b. Bermakna dan berpengaruh, c. Menyangkut hidup orang banyak, d. Relevan dan menarik.

Nimmo (1989 : 247) mengartikan berita sebagai proses menegosiasikan laporan yang bermakna tentang kejadian, yang mencakup simbolisasi (1) kejadian sebagai peristiwa; (2) peristiwa sebagai sesuatu yang bernilai; dan (3) peristiwa bernilai berita sebagai kisah berita. Berita dapat diperoleh dari internet, satelit televisi, koran, radio, melalui telepon orang-orang penting (polisi, pemadam kebakaran, dan lain-lain), pengamat berita, radio, masukan dari pekerja di stasiun televisi tersebut (Ted White, 2002: 139- 144).

Berita yang baik dan benar (dipercaya dan obyektif) hanya dapat di tulis apabila di dukung fakta dan data yang akurat. Adapun keberhasilan mengumpulkan data dan data yang akurat sangat tergantung pada bagaimana fakta dikumpulkan secara benar. Berbicara mengenai berita politik, demikian lazimnya anggapan orang, adalah berbicara mengenai naluri kekuasaan yang dibenarkan secara sosial. Politik dalam arti yang seluas-luasnya adalah dimensi kekuasaan yang mengatur dan mengarahkan kehidupan sosial secara keseluruhan.

Berita politik pada dasarnya sama saja dengan berita yang lainnya dalam hal teknik pengumpulan data dan penulisannya. Namun berita politik memiliki sisi strategis dibandingkan berita mengenai tema lain. Pemberitaan politik menjadi sarana komunikasi politik dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu peristiwa politik. Berita-berita politik selalu menarik perhatian pembaca, karen politik pada abad ke-20 dan abad demokrasi dalam berbagai manifestasinya sekarang, akan sangat mempengaruhi kepentingan pribadi-pribadinya didalam suatu negara. Dalam hubungan ini tidak hanya berita-berita politik internasional menarik perhatian pembaca tetapi berita-berita politik lokalpun juga menarik perhatian pembaca.

Shoemaker dan Reese (1996:34) membagi peran media dalam berita politik kedalam kategori, media dan berita politik bisa secara aktif dan pasif. Berita politik dalam media adalah, media yang berperan aktif dalam memberitakan berita politik kepada khalayak banyak dalam menentukan isi berita politik dan mengkonstruksikannya. Secara sadar dan memiliki tujuan tertentu untuk mengarahkan pendugaan dalam hal ini sifat media dalam memberitakan politik tidak netral dan berpihak konsep media pasif. Sebaliknya, menanggapi media hanyalah menyampaikan pesan politik atau sebuah peristiwa apa adanya.

Menurut Shoemaker berita politik yaitu berita yang di sampaikan media tidak sengaja untuk mempengaruhi khalayak. Sehingga jika terjadi efek pengaruh tergantung dari konstruksi khalayak, bukan pada medianya. Tidaklah muda menentukan apakah berita politik itu mempunyai realitas sosial atau telah direayasa oleh teknologi yang telah mendekatkan kondisi yang sebenarnya. Dramatisasi tayangan-tayangan baik berita politik maupun iklan politik begitu alami sehingga bagi masyarakat akan hal ini di anggap sebagai kebenaran. Karena itu kepentingan politik yang sanggup membayar untuk sport tayangan. Bias ekonomi politik media dalam hal ini tidak bisa di hindari.

Berita politik, sebagai media komunikasi politik, dari sisi pelaku komunikasi baik politikus maupun wartawan sendiri ditujukan bagi pembentukan opini publik (*public opinion*) dan sikap khalayak terhadap isu politik yang dikomunikasikan. Dalam rangka pembentukan opini publik ini, suatu pemberitaan dilakukan dalam tiga ranah kegiatan sekaligus, yaitu: menggunakan simbolsimbol politik (*language of politic*); melaksanakan strategi pengemasan berita (*framing strategies*); dan melakukan agenda media (*agenda setting function*).

Berita politik dengan tujuan pembentukan opini maka penggunaan simbol-simbol politik dilakukan agar sesuai dengan opini yang hendak disebarkan, demikian pula strategi

pengemasan pesan akan melakukan seleksi fakta untuk mendukung opini tersebut. Sedangkan fungsi *agenda setting* adalah penentu bagi media dalam membentuk opini publik di tengah masyarakat. (Hamad, 2004 : 4) Upaya membangun opini publik ini dengan sendirinya menjadikan pemberitaan politik berpotensi mengalami bias realitas.

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah berita hoax politik yang beredar pada media online selama kurun waktu Agustus 2018 sampai dengan Maret 2019. Alasan pemilihan periodisasi tersebut dikarenakan pada bulan Agustus 2018 dimulai pendaftaran calon presiden untuk pemilu tahun 2019.

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan komunikasi yang mencakup (1) klasifikasi tanda, (2) menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi, (3) menggunakan teknik analisis tertentu sebagai pembuat prediksi (Setiawan, 1989, 39). Adapun unit analisis dan kategorisasi yang akan diteliti meliputi :

Tabel Unit-unit analisis dan kategorisasi

NO	UNIT ANALISIS	KATEGORISASI
1.	Lokus penyebaran Hoax	1. Situs Berita Online 2. Situs Media Sosial
2.	Isi pesan berita hoax	1. Kritikan 2. Propaganda 3. Provokasi
3.	Identitas penyebar berita hoax	1. Personal 2. Lembaga 3. Organisasi
4.	Tujuan Berita Politik Hoax	1. Opini publik 2. Agenda setting 3. Kepanikan publik
5.	Sasaran yang dijadikan Berita Hoax	1. Pemerintah Pusat 2. Pemerintah Daerah 3. Tokoh politik 4. Partai Politik
6	Sifat pesan berita hoax	1. Pesan berantai 2. Pesan tunggal

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokus penyebaran hoax

Penyebaran hoax lebih banyak dilakukan melalui *platform* media sosial (75%) daripada situs media online. Hal ini dikarenakan karena kemampuan media sosial dalam membentuk jaringan informasi lebih luas dibandingkan dengan situs media berita *online* yang menuntut keaktifan dari penggunaannya. Pada sisi lain justru situs berita *online* kontennya dapat diviralkan melalui media sosial seperti Instagram. Sehingga dapat diketahui bahwa pola dalam penyebaran berita hoax adalah utama bersumber dari media sosial. Dapat diketahui bahwa temuan dalam penelitian ini juga menunjukkan kecenderungan hal yang sama yaitu bahwa lokus penyebaran berita hoax adalah melalui media sosial. Pada kasus ini media sosial yang paling banyak berpengaruh adalah media sosial facebook dengan whatsapp karena media

tersebut paling populer diakses dan digunakan oleh masyarakat.

Salah satu contoh berita hoax tersebut yang beredar di media sosial adalah yang memuat surat dari mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menuliskan surat tentang dukungan putranya dengan Prabowo Subianto menjadi presiden RI dengan tulisan sebagai berikut : "Demi bangsa dan negara yang dicintainya, Agus Harimurti Yudhoyono Siap mengabdikan diri untuk Indonesia 2019-2024. Bersama Bapak Prabowo, saya yakin Insya Allah AHY bisa mengurangi kemiskinan di negeri ini. Mari kita sambut pemimpin baru untuk Indonesia yang lebih baik. Cikeas 4 Agustus 2018."

Isi pesan berita hoax

Dari keseluruhan berita hoax yang diteliti maka kecenderungan isi megarah pada aksi provokasi (45%) dan propaganda (40%) sedangkan sisanya berisi kritikan. Hal ini sebetulnya dapat dilihat pada awal judul berita tersebut yang sering kali memiliki judul bombastis dan berlebihan untuk memancing pengguna media digital agar dengan mudahnya ikut menyebarkan dengan membagikan (*share*) dan menyiarkan (*broadcast*) ke akun-akun lain yang dikenal termasuk grup-grup yang berada dalam jaringan mereka. Aktivitas ini sering kali tidak didahului dengan klarifikasi atau pengecekan terhadap kebenaran isi informasi tersebut. Fenomena ini disebut sebagai *clicking monkey* (Priyambodo, 2013). *Clicking Monkeys* adalah aktivitas berupa membaca judul berita saja tanpa membaca isi dari berita tersebut. Beberapa ada yang sampai membaca isi dari berita tersebut namun lupa untuk melakukan pengecekan silang terhadap berita yang sama pada media yang lain ataupun media yang berbeda.

Melalui ramuan judul dan isi berita yang provokatif yang ditambahkan foto sebagai ilustrasi, berita hoax dapat menarik menimbulkan 'eye-catching' pembaca sehingga pandangan pembaca diarahkan agar segera menyimpulkan 'jump to conclusion' tanpa harus membaca isi berita secara lengkap apalagi malakukan cek and ricek. Judul ditambah isi yang bersifat provokatif dan propaganda tersebut umumnya menggunakan tata bahasa yang kontras dengan penggunaan judul yang lazim digunakan dalam media massa. Pada sisi lain isi berita hoax sering mencantumkan sumber yang seolah diambil dari berita media massa *mainstream* atau *daring* yang populer seperti Kompas, Koran Tempo, Republika, atau Media Indonesia. Sedangkan media daring yang sering dicatut namanya adalah detiknews.com atau liputan6.com sebagai situs berita daring yang populer.

Salah satu berita yang berisikan propaganda adalah postingan Video dalam *platform* facebook, yang menyatakan bahwa organisasi islam Nahdlatul Ulama mendeklarasikan mendukung CAPRES dan CAWAPRES nomor urut 02 yaitu Prabowo dan Sandiaga Uno. Padahal postingan video tersebut tidaklah benar. Video yang beredar tersebut telah di edit dengan narasi yang menyatakan ""MENGEJUTKAN ! PB NU AKHIRNYA RESMI MENDUKUNG PRABOWO SANDI"". Fakta yang sesungguhnya video tersebut terjadi pada saat Prabowo dan Sandiaga Uno Silaturahmi dan berkunjung ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada tanggal 16 Agustus 2018 dan tujuan sebenarnya adalah untuk meminta doa restu dalam menghadapi Pilpres 2019.

Identitas penyebar berita hoax

Identitas penyebar berita hoax sesungguhnya relatif sulit untuk dikenali identitas aslinya. Tentu saja logika ini berkait dengan hoax itu sendiri adalah berita bohong sehingga umumnya identitas penyebar hoax juga cenderung menggunakan identitas palsu atau fake identity. Konteks kategori disini adalah melihat identitas palsu yang digunakan apakah mengatasnamakan organisasi, lembaga ataukah personal. Dari berita hoax yang diteliti umumnya identitas palsu yang digunakan adalah menggunakan identitas personal. Meskipun begitu kecenderungannya berimbang dalam penggunaan identitas palsu yaitu 40%, 35 % dan

25 % dari kategori personal, lembaga dan organisasi. Fakta dari analisis yang dilakukan juga menemukan adanya identitas personal asli yang digunakan untuk melakukan penyebaran hoax.

Salah satu contoh unit analisis penggunaan identitas asli dalam berita hoax tersebut adalah cuitan dari akun @AndiArief_ yang memposting berita "mohon di cek kabarnya ada 7 kontainer suarat suara yg sudah dicoblos di tanjung priok. Supaya tidak fitnah mohon dicek kebenarannya. Karena ini kabar sudah beredar.." Sedangkan beita hoax yang menggunakan identitas palsu organisasi atau lembaga adalah berita tentang dukungan kepolisian terhadap paslon no 01 melalui identitas Pilpres 2019. Isi berita tersebut "Kapolsek yg wilayahnya kalah akan dievaluasi oleh kapolda. Ini serius. Jadi tolong dukungannya scra ikhlas dan sadar diri karena kita berjuang utk institusi brarti juga memperjuangkan nasib kita sendiri. Target minimal 60%. Para kapolsek tolong Agar buat baliho 01 di tiap2 desa/kelurahan. Minimal 1 baliho per desa/kelurahan. Dan kirim laporannya di group ini. Trims."

Tujuan Berita politik Hoax

Secara umum berita hoax yang disebarkan saat pilpres tahun 2019 adalah bertujuan politis, atau bertujuan komersial. Para pelaku penyebar hoax mereproduksi tinggi dan sistematis karena mereka memiliki tujuan mempercepat kondisi politik tertentu serta mendapatkan keuntungan. Bila dilihat dari hasil analisis berita hoax yang menjadi objek penelitian maka dapat dilihat bahwa kecenderungan hoax mengarah pada agenda setting dan kepanikan publik dengan prosentase sebesar 45% dan 40% , sedangkan sisanya 5% adalah berita hoax yang mengarah pada opini publik.

Berita hoax *agenda setting* sendiri berkarater sebagai berita yang pada prinsipnya membentuk persepsi khalayak tentang apa yang dianggap penting dengan teknik pemilihan dan penonjolan. Berita hoax memberikan penekanan tentang isu dalam narasinya tentang isu yang lebih penting untuk disajikan bagi khalayak. Salah satu contoh adalah berita hoax yang dikirim dari akun akun Facebook (FB) atas nama Arya Setiawan (facebook.com/arya.doang.50702) "Assalamualaikum wr wb. #COPAS Diberitahukan kepada seluruh relawan Prabowo Sandi agar pada saat pencoblosan berlangsung untuk mengawal #suratsuara dan ketika #suratsuara sedang dihitung kita harus memperhatikan dg cermat #tangan atau #jari siPenghitung #suratsuara (bisa jadi #jari #tangan siPenghitung melubangi salah satu Paslon). Karena di nomor 1 ada tanda lubang (betul atau tdknya tetap kita harus waspada) yg kemungkinan mudah dibolongin oleh #jari #tangan. #WASPADALAH..!! #MohonDISHARE sebanyak"nya. #SalamAkalSehat".

Sedangkan contoh untuk berita hoax yang mengarah pada kepanikan publik adalah berita hoax dari situs berita daring inibenar.com yang bernarasi sebagai berikut : "Gerakan #2019GantiPresiden ternyata didukung oleh kaum teroris. Hal itu terbukti dengan ditemukannya sebuah foto seorang perempuan yang membentangkan tulisan #2019GantiPresiden."MASIH INGAT KAH SEKELUARGA MELEDAKKAN DIRI BUNUH DIRI DI GEREJA2 DI KOTA SBY KEMARIN??? TERNYATA,IBU INI TRMSUK DLM BARISAN EMAK EMAK NENO WARISMAN!!!"

Sasaran yang dijadikan Berita Hoax

Menjadi lazim ketika berita hoax disasarkan pada lawan politik, namun fakta dalam penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pemerintah juga menjadi sasaran berita hoax karena salah satu paslon presiden 01 adalah petahana. Komposisi berita hoax dalam unit analisis sasaran berita hoax adalah secara rinci menasar paling banyak pada tokoh politik yaitu calon presiden itu sendiri yaitu sebesar 68% sedangkan pemerintah pusat sebesar 21%

dan partai politik sebesar 11%. Salah satu contoh berita hoax yang menyerang capres 01 adalah berita yang bersumber dari akun facebook Dewa Amor yaitu : "Utang Negara Bertambah, Cina Minta Pulau Sumatera dan Jawa Dijual Untuk Bayar Utang RI". Berita hoax tersebut bersumber dari situs berita daring nkri-news-trending.blogspot.com. Berita hoax di ujung tahun 2018 tersebut menyerang posisi Jokowi selaku petahana pilpres 2019 yang dibuat sebagai aksi provokasi melemahkan kampanye pasangan 01.

Adapun contoh berita hoax yang cenderung menyerang pemerintah adalah kutipan situs berita daring resmi viva.co.id dari akun twitter @m_mirah dengan nama asli Mirah Sumirat yang berisi pernyataan "Hasil laporan anggota di berbagai wilayah Kota Bekasi jumlah TPS ada lebih dari 6000 an dan hampir lebih dari 70% pasangan 02 menang per tanggal 17 april 2019 pukul. 15.00wib,"

Sifat pesan berita hoax

Membandingkan antara kategori berita hoax yang bersifat berantai tunggal, maka secara statistik diketahui bahwa berita hoax pilpres cenderung merupakan berita berantai yang disebarkan umumnya melalui grup di media sosial ataupun jejaring media sosial. Berita hoax yang berantai tersebut menjadi hal yang perlu dicegah dan waspadai karena umumnya berita hoax terlanjur menjadi viral sebelum di verifikasi karena disampaikan secara berantai. Oleh karena itu mengapa kemudian beberapa kelompok masyarakat cenderung mempercayai berita tersebut.

Contoh dari berita hoax berantai tersebut adalah berita hoax tentang rumusan kebijakan yang sudah di bentuk dan akan di terapkan paksa oleh Jokowi 2 periode, yaitu wacana perubahan nama Kementerian Agama menjadi Kementerian Urusan Haji Zakat dan Wakaf. Pada informasi tersebut dijelaskan bahwa bukan hanya namanya saja yang diganti, melainkan beberapa peraturan wajib akan turut diganti. Berita hoax tersebut sebenarnya merupakan isu yang pernah ada saat pilpres 2014 dan dimunculkan kembali saat pilpres 2019. Berita yang sama juga terkait berita hoax bahwa Jokowi adalah keturunan cina yang sebelumnya juga beredar pada pilpres tahun 2014. Hal yang sama juga terjadi pada kubu Prabowo melalui berita hoax berantai bahwa keluarganya yang disebut tidak harmonis, gagal mendidik anaknya, perceraian dengan Titiek Soeharto, yang tujuannya tentu untuk mengontraskan pembawaan Prabowo yang terlihat tegas serta membandingkan dengan keluarga Jokowi.

SIMPULAN

Terbukti jelas bahwa media sosial menajamkan berita-berita hoax selama pilpres 2019 dengan memuat narasi-narasi perseteruan antara cebong dan kampret (julukan saling merendahkan bagi para pendukung kedua kubu capres). Bahkan di kedua kubu hal tersebut justru dijadikan bahan kampanye diantara kedua kubu. Dari 30 berita hoaks politik sebagai objek penelitian capres Jokowi menjadi target terbanyak. Ekskalasi berita hoax juga semakin meningkat dilihat waktu yang dianalisis pada bulan saat mendekati pilpres di tahun 2019. Meskipun demikian pada satu sisi walau berita hoax bertujuan untuk menyerang capres tertentu namun bagi terdapat pula berita hoax yang bertujuan menarik atau memperoleh dukungan.

Fakta yang yang dianalisis menunjukkan keprihatinan mengingat berita hoax pilpres 2019 menggiatkan untuk menyebarkan politik kebencian yang dikhawatirkan bisa mengoyak persaudaraan dan persatuan bangsa bahkan menjurus ke arah konflik sosial di tengah minimnya tingkat literasi masyarakat. Fakta lain yang memprihatinkan adalah produksi berita palsu (*fake news*) yang dikirim secara berulang-ulang, sehingga dipercaya sebagai suatu

kebenaran oleh kelompok masyarakat yang mempercayai informasi palsu tersebut.

Saran dalam penelitian ini adalah upaya memberikan literasi media dan berita melalui media sosial dan digital harus dilakukan secara kontinyu terhadap semua golongan masyarakat. Literasi tersebut memiliki materi tentang kewaspadaan terhadap berita yang memiliki Judul yang provokatif serta mencek alamat situs yang palsu atau situs resmi juga konfirmasi valid terhadap alamat situs sumber berita. Partisipasi Masyarakat harus diaktifkan membersihkan konten negatif di media sosial dengan bersama-sama melakukan siskamling digital, melaporkan jika ada konten bermasalah ke Kementerian Kominfo melalui aduankonten.id atau Kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- De Maeseneer , Paul, 1982, *Heres The news : A Radio News Manual*, Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta, Granit
- Harley, David, 2008, *Common Hoaxes and Chain Letters*, USA, ESET LLC
- Irving, Clifford, 2006, *The Hoax*, New York, Open Road integrated media
- Mille, John W. r dan Michael C. McKenna , 2016, *World Literacy: How Countries Rank and Why It Matters* , New York, Routledge
- Nimmo, Dan, 1989, *Mediated Political Realities*, Aurora il, Longman Pub Group
- Potter, Andrew, 2008, *The Authenticity Hoax: How We Get Lost Finding Ourselves*, Amazon Pub
- Setiawan, Bambang, 1989, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, Yogyakarta, Gama press
- Shoemaker dan Reese, 1996, *Mediating the message: Theories of influences on mass media content (2nd ed.)*. White Plains, N.Y.: Longman
- Sobur, A. 2009. *Analisis Teks Media*. Bandung: Rosdakarya
- Suprpto, T, 2010, *Politik Redaksi Berita*. Malang: Pustaka Kaiswara
- Thurlow, Crispin etc, 2008, *Computer Mediated Communication*, Sage Publications, California
- White, Ted, 2002, *Broadcast News Writing, Reporting, and Producing*, Baton Rouge, Focal Press

PENGEMBANGAN MODEL PENGAMBILAN KEPUTUSAN MULTI KRITERIA PADA PERUSAHAAN JASA UNTUK MENENTUKAN TRADE-OFF DARI TUJUAN PERUSAHAAN YANG SALING BERKONFLIK MENGGUNAKAN METODE SINGLE OBJECTIVE APPROACH

Sutrisno, Dyah Rachmawati Lucitasari

Fakultas Teknik Industri, Jurusan Teknik Industri

Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Yogyakarta

email : Jur_tiupn@telkom.net

ABSTRAK

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan kebanyakan adalah pengambilan keputusan yang bersifat multi kriteria. Pengambilan keputusan perusahaan yang bersifat multi kriteria ditandai dengan harus dilakukannya pengambilan keputusan atas beberapa tujuan perusahaan yang saling bersifat kontradiktif. Perusahaan jasa pada umumnya ingin memaksimalkan kepuasan pelanggannya dan meminimalkan biaya operasional perusahaan. Untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan, perusahaan harus melaksanakan program-program yang diharapkan dapat memaksimalkan tingkat kepuasan pelanggan tersebut. Pelaksanaan program-program tersebut akan menaikkan biaya operasional perusahaan, dimana pada akhirnya dapat menurunkan keuntungan perusahaan. Jadi tujuan perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan berakibat dengan naiknya biaya operasional perusahaan, sehingga kontradiktif dengan tujuan perusahaan yang kedua yaitu meminimalkan biaya operasional perusahaan, hal ini merupakan permasalahan pengambilan keputusan multi kriteria. Untuk mencari trade-off dari dua tujuan perusahaan jasa yang saling kontradiktif, yaitu memaksimalkan kepuasan pelanggan dan meminimalkan biaya operasional perusahaan maka pertama-tama akan dikembangkan model pengambilan keputusan multi kriteria. Model pengambilan keputusan yang dikembangkan adalah model matematis yang terdiri dari dua fungsi tujuan yang saling kontradiktif, yaitu maksimasi tingkat kepuasan pelanggan dan minimasi biaya operasional perusahaan, serta pembatas yang merupakan penjabaran secara matematis dari hal-hal yang membatasi tercapainya dua tujuan perusahaan tersebut. Setelah model matematis dari pengambilan keputusan multi kriteria terbentuk, langkah selanjutnya adalah mencari trade-off dari dua tujuan perusahaan tersebut menggunakan single objective approach.

Kata kunci : pengambilan keputusan multi kriteria, trade-off, single objective approach

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan merupakan suatu tindakan yang harus diambil oleh manajemen perusahaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan strategis perusahaan, seperti optimalisasi tingkat kepuasan pelanggan untuk menjaga loyalitas

pelanggan, minimasi biaya produksi untuk mengoptimalkan efisiensi perusahaan, dan lain sebagainya. Pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan harus dilakukan secara optimal. Optimalitas pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dapat diukur dari tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Suatu perusahaan, apapun jenisnya, baik perusahaan manufaktur, perusahaan proses, ataupun perusahaan jasa pasti mempunyai banyak tujuan atau kebijakan yang harus dicapai. Tujuan-tujuan perusahaan tersebut kadang kala satu sama lain saling berkonflik atau kontradiktif. Konflik antara satu tujuan dengan tujuan yang lainnya diindikasikan dengan turunnya pencapaian suatu tujuan disaat tujuan yang lainnya dinaikkan ketercapaiannya. Langkah-langkah optimasi perlu dilakukan agar tujuan-tujuan perusahaan yang saling berkonflik dapat dioptimalkan ketercapaiannya dengan baik. Optimasi terhadap tujuan-tujuan yang saling berkonflik merupakan permasalahan dalam pengambilan keputusan multi kriteria. Untuk mempermudah manajemen perusahaan dalam melakukan pengambilan keputusan terhadap tujuan perusahaan yang saling berkonflik maka perlu dikembangkan model pengambilan keputusan multi kriteria.

Pada penelitian ini akan dikembangkan suatu model pengambilan keputusan multi criteria untuk melakukan optimasi terhadap dua tujuan yang saling berkonflik pada perusahaan jasa, yaitu maksimasi tingkat kepuasan pelanggan dan minimasi biaya operasional yang ditimbulkan, dengan pembatas berupa keterbatasan sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Eksistensi perusahaan jasa sangat bergantung kepada tingkat kepuasan pelanggan dalam merasakan jasa yang telah diterimanya. Semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan terhadap jasa yang diterimanya maka semakin eksis perusahaan tersebut, karena akan mendapatkan pelanggan yang semakin banyak, sehingga maksimasi tingkat kepuasan pelanggan merupakan tujuan utama dari suatu perusahaan jasa. Untuk memaksimalkan tingkat kepuasan pelanggan, pasti diperlukan biaya operasional untuk melaksanakan program-program yang dapat memaksimalkan tingkat kepuasan pelanggan tersebut, sehingga perlu diupayakan untuk memaksimalkan tingkat kepuasan pelanggan dengan menggunakan biaya operasional sekecil mungkin. Tujuan kedua dari suatu perusahaan jasa adalah minimasi biaya operasional perusahaan, yang merupakan upaya perusahaan jasa untuk meminimalkan biaya operasional sebagai upaya untuk menekan pengeluaran perusahaan yang salah satunya digunakan memaksimalkan kepuasan pelanggan. Model optimasi ini akan menjembatani manajemen perusahaan jasa untuk memaksimalkan tingkat kepuasan pelanggan sehingga akan menghasilkan semakin banyak pelanggan yang loyal terhadap perusahaan, tetapi biaya operasional untuk memaksimalkan tingkat kepuasan pelanggan tersebut dapat ditekan sekecil mungkin.

Untuk melakukan optimasi pada model pengambilan keputusan multi criteria yang dikembangkan, akan dilakukan menggunakan metode *single objective approach*. Kelebihan dari metode ini adalah tersedianya beberapa opsi dalam melakukan trade-off (pencarian nilai optimal secara simultan dari dua fungsi tujuan yang saling berkonflik) terhadap model pengambilan keputusan multi criteria yang telah dikembangkan. Model pengambilan keputusan multi criteria yang dikembangkan terdiri dari dua fungsi tujuan yang saling berkonflik, sehingga dengan menggunakan metode *single objective approach* akan didapatkan dua opsi pencarian nilai trade-off yang dapat dipilih, yaitu memaksimalkan tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan tingkat maksimal biaya operasional yang ditetapkan perusahaan, atau meminimasi biaya operasional perusahaan berdasarkan tingkat minimal nilai kepuasaandidapat dengan nilai ideal dari masing-masing fungsi tujuan yang terkecil.

Optimasi pada model pengambilan keputusan multi criteria yang dilakukan akan

menghasilkan tingkat kepuasan pelanggan yang maksimal dengan biaya operasional perusahaan yang minimal. Hasil optimasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing perusahaan jasa dalam persaingan di era global. Peningkatan daya saing perusahaan jasa dengan memaksimalkan tingkat kepuasan pelanggan dan sekaligus melakukan efisiensi dengan meminimalkan biaya operasional, akan menjadi modal penting bagi perusahaan jasa dalam negeri pada saat bersaing dengan perusahaan jasa dari luar negeri yang sudah banyak beroperasi di Indonesia, seperti perusahaan asuransi asing dan perusahaan jasa pengiriman barang asing.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas maka masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana mengembangkan model pengambilan keputusan multi kriteria pada perusahaan jasa untuk menentukan trade-off dari dua tujuan perusahaan yang saling berkonflik menggunakan metode single objective approach.

Batasan Masalah

Agar pembahasan masalah yang dilakukan tidak terlalu meluas sehingga menyimpang dari permasalahan yang dirumuskan, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah

Model pengambilan keputusan multi kriteria yang dikembangkan adalah model optimasi dari dua tujuan perusahaan jasa yang saling berkonflik dengan batasan berupa keterbatasan sumberdaya perusahaan dalam mencapai dua tujuan tersebut.

Tujuan perusahaan yang akan ditentukan nilai trade off nya dalam penelitian ini adalah maksimasi tingkat kepuasan pelanggan dan minimasi biaya operasional perusahaan.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah mengembangkan model pengambilan keputusan multi kriteria pada perusahaan jasa untuk menentukan trade off dari dua tujuan perusahaan yang saling berkonflik menggunakan metode single objective approach.

METODOLOGI PENELITIAN

Objek Penelitian

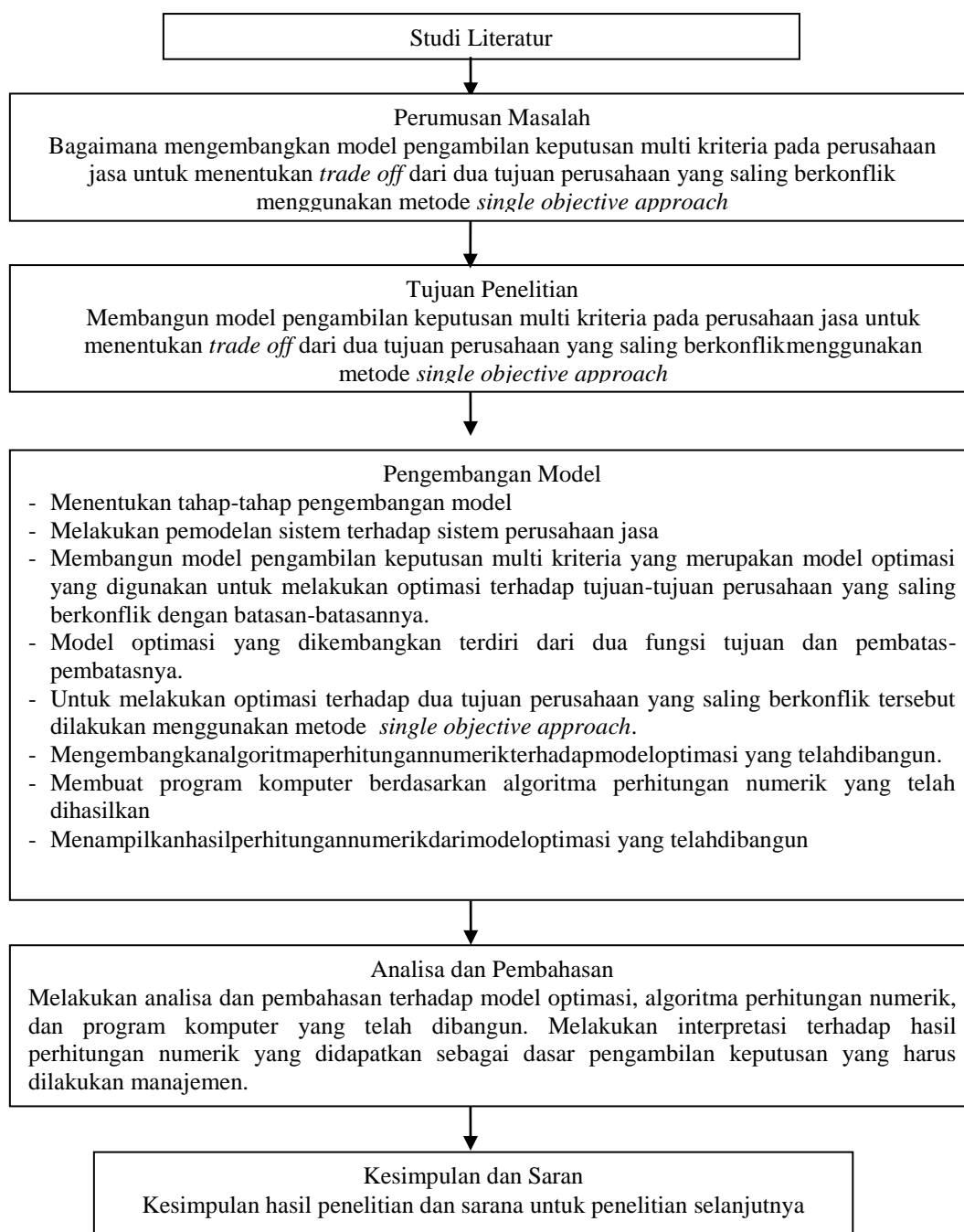
Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa. Penelitian ini akan mengembangkan model pengambilan keputusan multi kriteria pada perusahaan jasa untuk menentukan trade off dari dua tujuan perusahaan yang saling berkonflik. Untuk melakukan optimasi atau menentukan nilai trade off dari dua tujuan perusahaan yang saling berkonflik akan dilakukan menggunakan metode single objective approach.

Teknik pengumpulan data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap pimpinan perusahaan jasa yang ada di Yogyakarta dan data kuesioner yang diberikan kepada pimpinan dan karyawan perusahaan jasa yang ada di Yogyakarta. Data sekunder diperoleh dari data operasional perusahaan jasa yang ada di Yogyakarta.

Kerangka Penelitian

Kerangka dari penelitian ini dapat ditunjukkan dengan diagram alir sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

PENGEMBANGAN MODEL

Pengumpulan Data

Perusahaan jasa yang menjadi objek dari penelitian ini adalah perusahaan jasa pengiriman barang CV. Interindo. Data-data yang diperlukan untuk mengembangkan model pengambilan keputusan multi kriteria pada perusahaan jasa ini adalah data jumlah tenaga kerja, data jumlah pekerjaan, data jumlah jam kerja, data lama waktu pengiriman, data ongkos

pengiriman barang, dan data tingkat kepuasan pelanggan.

Pengolahan Data

Data-data yang sudah dikumpulkan akan dilakukan pengolahan data untuk menentukan parameter-parameter, konstanta, dan variabel keputusan dari model matematika yang dikembangkan. Selanjutnya dapat dikembangkan model matematika yang terdiri dari dua fungsi tujuan yang saling berkonflik dan pembatas untuk tercapainya dua tujuan perusahaan tersebut.

Pengembangan Sistem Pengambilan Keputusan Multi Kriteria

Sistem pengambilan keputusan multi kriteria yang dikembangkan berupa model matematika yang terdiri dari dua tujuan perusahaan yang saling berkonflik, dan pembatas pencapaian dua tujuan tersebut. Tahapan pengembangan model matematika dalam persoalan ini adalah

Menentukan variable keputusan

Variabel keputusan disini adalah berat empat barang yang paling sering dikirim oleh CV. Interindo dalam setiap harinya. Variabel keputusan tersebut adalah:

x1= berat paket jenis 1 yang dikirim per hari (puluh kg)

x2= berat paket jenis 2 yang dikirim per hari (puluh kg)

x3= berat paket jenis 3 yang dikirim per hari (puluh kg)

x4= berat paket jenis 4 yang dikirim per hari (puluh kg)

Menentukan fungsi tujuan

Dalam menentukan fungsi tujuan perlu ditentukan parameter-parameter fungsi tujuan terlebih dahulu. Fungsi tujuan dari model matematika pengambilan keputusan multi criteria ini adalah maksimasi kepuasan pelanggan (Z1) dan minimasi biaya operasional perusahaan (Z2). Formulasi fungsi tujuannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Maksimasi } Z1 = f1(X) = 0,17 x1 + 0,25 x2 + 0,45 x3 + 0,57 x4$$

$$\text{Minimasi } Z2 = f1(X) = 115000 x1 + 123000 x2 + 163000 x3 + 154000 x4$$

Menentukan fungsi pembatas

Batasan berat barang yang dikirim dalam satu kali pengiriman

Batasan ini mempunyai formulasi matematika sebagai berikut:

$$X_1 + X_2 + 2X_3 + X_4 \leq 2000$$

Batasan jumlah jam kerja

Batasan waktu set up setiap barang dan jumlah jam kerja yang tersedia mempunyai formulasi matematika sebagai berikut:

$$24X_1 + 15,34X_2 + 21,84X_3 + 17,56X_4 \leq 945$$

Batasan ketersediaan jumlah tenaga kerja

Formulasi matematika untuk alokasi tenaga kerja pada setiap barang dan jumlah tenaga kerja yang tersedia adalah sebagai berikut:

$$X_1 + 3X_2 + 4X_3 + 2X_4 \leq 25$$

Batasan non negative

Suatu batasan yang menyatakan bahwa berat barang yang dikirim tidak mungkin negative. Batasan non negative adalah:

$$X1, X2, X3, X4 \geq 0$$

Menentukan trade-off dari model matematika yang dibangun menggunakan single objektif approach. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

Tentukan solusi ideal masing-masing fungsi tujuan

Solusi ideal masing-masing fungsi tujuan dicari dengan metode simpleks menggunakan

software winQSB. Solusi ideal masing-masing fungsi tujuan adalah:

$$Z1^* = Z1_{maksimal} = 7,5 \text{ dengan } x1^* = (0,30,0,0)$$

$$Z2^* = Z2_{minimal} = 2300000 \text{ dengan } x2^* = (20,0,0,0)$$

Model matematika dari persoalan multi criteria yang diselesaikan menggunakan single objektif approach, dengan:

Mengutamakan Z1 dan memasukkan Z2 sebagai pembatas dengan tingkat pencapaian maksimal 2750000.

Sehingga model matematikanya adalah:

$$\text{Maksimasi } Z1 = f1(X) = 0,17x_1 + 0,25x_2 + 0,45x_3 + 0,57x_4$$

Pembatas

$$X_1 + X_2 + 2X_3 + X_4 \leq 2000$$

$$24X_1 + 45X_2 + 15,34X_3 + 21,84X_4 \leq 945$$

$$X_1 + 3X_2 + 4X_3 + 2X_4 \leq 25$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

$$115000x_1 + 123000x_2 + 163000x_3 + 154000x_4 \leq 2750000$$

Dimana nilai trade-off yang didapat adalah :

$$Z1 = 9,25 \text{ dan } Z2 = 2700000 \text{ dengan } x^* = (0,28,5,0)$$

Jadi disini terlihat bahwa dengan lebih mengutamakan Z1 maka pada nilai trade-off nilai Z1 mengalami peningkatan dari 7,5 menjadi 9,25 , tetapi nilai Z2 yang seharusnya diminimalkan disini terjadi kenaikan dari 2300000 menjadi 2700000.

Mengutamakan Z2 dan memasukkan Z1 sebagai pembatas dengan tingkat pencapaian minimal 6.

Sehingga model matematikanya adalah:

$$\text{Minimasi } Z2 = f1(X) = 115000x_1 + 123000x_2 + 163000x_3 + 154000x_4$$

Pembatas

$$X_1 + X_2 + 2X_3 + X_4 \leq 2000$$

$$24X_1 + 45X_2 + 15,34X_3 + 21,84X_4 \leq 945$$

$$X_1 + 3X_2 + 4X_3 + 2X_4 \leq 25$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

$$0,17x_1 + 0,25x_2 + 0,45x_3 + 0,57x_4 \geq 6$$

Dimana nilai trade-off yang didapat adalah :

$$Z1 = 6,5 \text{ dan } Z2 = 2150000 \text{ dengan } x^* = (10,2,0,0)$$

Jadi disini terlihat bahwa dengan lebih mengutamakan Z2 maka pada nilai trade-off , nilai Z2 mengalami penurunan dari 2300000 menjadi 2150000 , tetapi nilai Z1 yang seharusnya dimaksimalkan disini terjadi penurunan dari 7,5 menjadi 6,5.

Analisa Hasil

Nilai trade-off dari persoalan pengambilan keputusan multi kriteri jika diselesaikan menggunakan single objective approach akan bergantung pada pemilihan fungsi tujuan mana yang dianggap lebih penting. Pada contoh kasus di atas, dengan lebih mengutamakan Z1 maka pada nilai trade-off , nilai dari Z1 mengalami peningkatan dari 7,5 menjadi 9,25 tetapi nilai Z2 yang seharusnya lebih diminimalkan disini terjadi kenaikan dari 2300000 menjadi 2700000. Ketika lebih mengutamakan Z2, pada kasus di atas nilai Z2 mengalami penurunan dari 2300000 menjadi 2150000, tetapi nilai Z1 yang seharusnya mengalami peningkatan disini terjadi penurunan dari 7,5 menjadi 6,5.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem pengambilan keputusan multi kriteria menggunakan single objective approach telah memberi banyak opsi kepada pengambil keputusan dalam melakukan optimasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Balteiro, L.D., Pachon, J.G., Romero, C., (2017), Measuring Systems Sustainability with Multi-Criteria Methods: A Critical Review, *European Journal of Operational Research*, Elsevier, Vol 258, Issue 2, Pages 607-616
- Belton, Stewart, (2005), Gamete and Immune Cell Recognition Revisited, *BioEssay*, Volume 7, Issue 12
- Cinelli, M., Coles, S. R., Kirman, K., (2014), Analysis of The Potentials of Multi-Criteria Decision Analysis Methods to Conduct Sustainability Assessment, *Ecological Indicators*, Elsevier, Volume 46, Pages 138-148
- Pohekar, S. D., Ramachandran, M., (2004), Application of Multi-Criteria Decision Making to Sustainable Energy Planning—A Review, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Elsevier, Volume 8, Issue 4, Pages 365-381
- Gungor, (1999), Issues in Environmentally Conscious Manufacturing and Product Recovery: a survey, *Computer & Industrial Engineering*, Elsevier, Volume 36, issue 4, 811-853
- Handayani, T., Wakhidah, N., (2012), Penerapan SPK Untuk Seleksi Mahasiswa Berprestasi Menggunakan Metode AHP, *Jurnal Universitas Semarang*, Volume 1 Nomor 2.
- Huang, I.B., Keisler, J., Linkov, I., (2011), Multi-Criteria Decision Analysis in Environmental Science : Ten Years of Applications and Trends, *Science of The Total Environment*, Elsevier, Volume 409, Issues 19, Pages 3578 - 3594
- Indrianti, N., Sutrisno, (2014), *Buku Ajar Pengambilan Keputusan Multi Kriteria*, UPN "Veteran" Yogyakarta, Yogyakarta
- Jiang, W.Y., Chun, Y.J., Jun, F.Z., Zhao, H., (2009), Review on Multi-Criteria Decision Analysis Aid in Sustainable Energy Decision-making, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Elsevier, Vol 13, Issue 9, Pages 2263 – 2278
- Kleindorfer, (2005), Sustainable Operations Management, *Production and Operations Management*, Volume 14, Issue 4, 482-492
- Muhsin, A. (2014), *Logika Pemrograman dan Dasar Komputer*, Jurusan Teknik Industri UPN "Veteran" Yogyakarta, Yogyakarta.
- Rahardjo, J., Stok, R., Yustina, R., (2000), Penerapan Multi-Criteria Decision Making Dalam Pengambilan Keputusan Sistem Perawatan, *Jurnal Teknik Industri*, Volume 2, Nomor 1, Halaman 1-12
- Ristono, A., (2011), *Pemodelan Sistem*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Rohayani, H., (2013), Analisis Sistem Pendukung Keputusan Dalam Memilih Program Studi Menggunakan Metode Logika Fuzzy, *Sriwijaya Journal of Information Systems*
- Si, J., Halburd, L.M., Nasiri, F., Bell, S., (2016), Assessment of Building-integrated Green Technologies: A Review and Case Study on Applications of Multi-Criteria Decision Making (MCDM) Method, *Sustainable Cities and Society*, Elsevier, Vol 27, Pages 106 – 115

DESENTRALISASI FISKAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DI PULAU JAWA TAHUN 2001-2017

Wahyu Dwi Artaningtyas, Asih Sriwinarti

FEB UPN "Veteran" Yogyakarta

artaningtyas73@gmail.com, asihwinarti09@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted to examine the effect of Fiscal Decentralization on Development Inequality in Java 2001-2017. The data analysis technique uses panel data regression with the Random Effect Model. The data used is a data panel consisting of time series data from 2001-2017 and cross sections covering DKI Jakarta, West Java, East Java, DIY, Central Java and Banten. The results of the study that Fiscal decentralization showed non significant impact on Development Inequality in all provinces of Java 2001-2017.

Keywords : Fiscal decentralization, Inequality

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang melibatkan berbagai perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, tingkah laku sosial, dan institusi sosial, disamping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, serta pemberantasan kemiskinan (Todaro, 2004). Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 1985). Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan wilayah (regional disparity) timbul dikarenakan tidak adanya pemerataan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terbelakang, atau kurang maju. Ketidakmerataan pembangunan ini disebabkan karena adanya perbedaan antara wilayah satu dengan yang lainnya. Alisjahbana (2005) mengemukakan salah satu permasalahan ketimpangan yang menonjol di Indonesia adalah kesenjangan antar daerah sebagai konsekuensi dari terkonsentrasinya kegiatan perekonomian di Pulau Jawa dan Bali.

Indeks Williamson seluruh provinsi di Pulau Jawa menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir dari tahun 2013-2017 masih terjadi ketimpangan wilayah pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa tersebut. Apabila nilai Indeks Williamson mendekati 1 maka menunjukkan wilayah tersebut semakin timpang, sedangkan bila nilai Indeks Williamson semakin mendekati 0 maka semakin merata (Bonet, 2006). Tabel 1 menunjukkan dalam lima tahun terakhir tingkat ketimpangan tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata ketimpangan sebesar 0,64 sementara Propinsi Jawa Timur merupakan propinsi dengan rata-rata ketimpangan rendah yaitu sebesar 0,18. Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk dalam kategori propinsi dengan ketimpangan sedang.

Tabel 1. Indeks Ketimpangan Wilayah Antar Provinsi di Pulau Jawa
 Tahun 2013-2017

Provinsi	Tahun					Rata-rata
	2013	2014	2015	2016	2017	
DKI Jakarta	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Jawa Barat	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44
Jawa Tengah	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
DI. Yogyakarta	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Jawa Timur	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Banten	0,26	0,27	0,27	0,28	0,28	0,27

Sumber : BPS, diolah

Banyak faktor yang menjadi sebab terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Salah satu faktor tersebut adalah adanya desentralisasi fiskal. Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadi peluang bagi suatu daerah untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerah melalui peningkatan potensi daerah secara efisien baik dari sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang dimiliki. Desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan, tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat (Kuncoro, 2004). Namun demikian, menurut Bonet (2006) dalam penelitiannya yang menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap disparitas pendapatan regional di Kolombia menyatakan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal setiap daerah meningkat, namun selama periode analisis ternyata disparitas pendapatan antara wilayah juga meningkat. Sementara menurut Kyriacou, Gallo dan Sagues (2015) bahwa desentralisasi fiskal dapat berkontribusi terhadap pengurangan disparitas antar daerah. Sedangkan Sacchi dan Salotti (2011) menyatakan sebaliknya, mereka menyatakan bahwa desentralisasi berkontribusi terhadap meningkatnya disparitas antar daerah. Qiao et.al. (2002) justru menyimpulkan dari hasil penelitian mereka bahwa variabel desentralisasi pengeluaran secara signifikan berkorelasi positif atau akan meningkatkan disparitas pendapatan regional. Sementara Akai dan Sakata (2005) tidak dapat menemukan dampak yang signifikan dari variabel desentralisasi pengeluaran terhadap disparitas pendapatan regional.

Tabel 2. Desentralisasi Fiskal Seluruh Provinsi di Pulau Jawa
 Tahun 2013-2017

Provinsi	Tahun					Rata-Rata
	2013	2014	2015	2016	2017	
DKI Jakarta	67,95	71,36	76,20	68,58	67,72	70,36
Jawa Barat	64,25	67,40	66,78	61,54	71,10	66,21
Jawa Tengah	61,55	65,42	64,80	58,79	52,94	60,70
DI. Yogyakarta	47,08	46,65	46,86	42,93	36,42	43,99
Jawa Timur	66,50	69,53	69,29	63,37	58,03	65,34
Banten	66,11	69,31	67,86	63,11	59,31	65,14

Sumber: BPS, diolah

Provinsi-provinsi di Pulau Jawa memiliki tingkat ketergantungan yang berbeda-beda. Berdasarkan tabel 2 di atas terlihat bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi dengan tingkat ketergantungan yang paling rendah terhadap pemerintah pusat dibandingkan provinsi lain di

Pulau Jawa dengan derajat desentralisasi fiskal rata-rata sebesar 70,36 dari tahun 2013-2017. Sementara Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan kemampuan mengelola keuangan terendah dimana dari tahun 2013-2017 rata-rata derajat desentralisasi fiskal hanya sebesar 43,99.

Dari berbagai pendapat peneliti di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan pandangan mengenai pengaruh desentralisasi terhadap disparitas pendapatan regional. Pandangan pertama menyatakan bahwa desentralisasi akan mampu mengurangi disparitas tersebut. Namun pandangan lain menyatakan bahwa desentralisasi justru akan meningkatkan disparitas pendapatan antar wilayah. Disamping itu, meskipun tingkat ketergantungan terhadap pusat rendah atau dengan kata lain daerahnya sudah mampu mengelola keuangannya sendiri, akan tetapi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan tingkat ketimpangan pembangunan paling tinggi di Pulau Jawa. Kondisi tersebut sangat menarik untuk dianalisis lebih jauh bagaimana sebenarnya kondisi derajat desentralisasi fiskal dan ketimpangan pembangunan antar propinsi di Pulau Jawa tahun 2001-2017 atau tepatnya pasca otonomi daerah serta bagaimana hubungan keduanya.

TINJAUAN PUSTAKA

Hubungan Desentralisasi Fiskal dengan Ketimpangan Pembangunan

Menurut pasal 1 ayat 7 UU No.32 tahun 2004, "desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dari definisi tersebut, bahwa daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan seluruh fungsi pemerintahan, kecuali kewenangan pemerintahan dalam bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, yustisi, moneter, dan fiskal nasional serta agama. Menurut Sjafrizal (2008) bahwa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan dapat digunakan untuk mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hal ini jelas karena, dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan, maka aktivitas pembangunan daerah, termasuk daerah terbelakang akan dapat lebih digerakkan karena ada wewenang yang berada pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Dengan adanya kewenangan tersebut, maka berbagai inisiatif dan aspirasi masyarakat untuk menggali potensi daerah akan dapat lebih digerakkan. Bila hal ini dapat dilakukan, maka proses pembangunan daerah secara keseluruhan akan dapat ditingkatkan dan secara bersamaan ketimpangan pembangunan antar wilayah akan dapat pula dikurangi.

Penelitian Terdahulu

Christian Lessmann (2006) melakukan penelitian yang berjudul "Fiskal Decentralization and Regional Disparity: A Panel Data Approach for OECD Countries". Penelitian ini menggunakan metode estimasi OLS dengan menggunakan data panel data untuk periode tahun 1980-2001 di 17 OECD. Hasil yang di dapat dari penelitian ini bahwa di eropa barat desentralisasi berdampak positif terhadap disparitas pendapatan antar wilayah, tapi hasil ini ternyata tidak signifikan. Alasan berdampak positif; perbedaan latar belakang yang sulit dengan centralized, communist fiskal organization, dan pertumbuhan sangat cepat pusat aglomerasi.

Jaime Bonet (2006) melakukan penelitian yang berjudul "Fiskal Decentralization and Regional Income Disparities: Evidence from The Colombian Experience". Penelitian ini menggunakan metode estimasi OLS dengan menggunakan data panel data untuk periode tahun 1990-2000 di Kolombia. Hasil yang di dapat dari penelitian ini bahwa pengalaman di kolombia pertumbuhan ekonomi setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal meningkat di tiap

daerah, akan tetapi di sisi lain pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut meningkatkan disparitas pendapatan antar wilayah secara signifikan. Kemudian variabel kontrol juga berdampak negatif terhadap disparitas pendapatan regional secara signifikan.

Faishal Fadli (2014) melakukan penelitian dengan judul *Analysis of Direct and Indirect Effect of Fiscal Decentralization and Regional Disparity (Case Study Provinces in East and West Indonesia Year 2006-2012)*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efek langsung dan tidak langsung dari desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan regional di Indonesia bagian timur dan barat melalui pertumbuhan ekonomi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan menggunakan Analisis Path. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tidak ada efek langsung dari desentralisasi fiskal pada kesenjangan regional dan pertumbuhan ekonomi melalui desentralisasi fiskal langsung pada kesenjangan regional baik di Indonesia timur dan Indonesia barat.

Ferry Kurniawan (2016) melakukan penelitian tentang Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Sumatera Utara menggunakan pendekatan PDRB per kapita relatif untuk menghitung tingkat ketimpangan wilayah di Provinsi Sumatera Utara, membuktikan teori Hipotesis Kuznet serta menganalisis pengaruh variabel independen PDRB per kapita, investasi, dan dummy desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dengan menggunakan pendekatan PDRB per kapita relatif tingkat ketimpangan di Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu 1990-2013 masih rendah. Berdasarkan hasil regresi, variabel PDRB per kapita dan investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan, variabel dummy desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan.

Muhammad Fajri, Arman Delis dan Yohanes Fyn Amzar (2016) melakukan penelitian dengan judul *Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi dan Keterbukaan Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatra*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi fiskal dan pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah serta Sumatra masih belum terbuka terhadap lalu lintas perdagangan. Otonomi Fiskal dan Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah di Sumatra sementara keterbukaan ekonomi berpengaruh positif.

Ahmad Fawaiq Suwanan dan Eka Heni Sulistiani (2009) melakukan penelitian dengan judul *"Fiscal Decentralization and Regional Disparities in Indonesia: a Dynamic Panel Data Evidence"*. Penelitian ini mengkaji secara empiris dampak desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan daerah menggunakan data panel dinamis untuk 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2001 hingga 2008. Desentralisasi fiskal diwakili oleh desentralisasi pendapatan (revdec) dan kesenjangan daerah dengan koefisien gini. Hasil utama dari penelitian ini adalah bahwa tingkat desentralisasi yang tinggi terkait dengan kesenjangan regional yang rendah.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfungsi untuk mendeskripsikan data dalam bentuk angka atau presentase dan analisis ekonometri berupa regresi data panel. Data panel yaitu gabungan antara data cross section yaitu provinsi provinsi di pulau Jawa meliputi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur serta Banten dan data time series yaitu tahun 2001-2017. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data Pendapatan Asli Daerah, Total Penerimaan Daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010, Jumlah Penduduk, PDRB per kapita seluruh propinsi di pulau Jawa yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Definisi Operasional Variabel

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi Fiskal menggambarkan seberapa besar angka kemandirian setiap provinsi di Pulau Jawa dalam pengelolaan keuangan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Derajat Desentralisasi Fiskal dinyatakan dalam bentuk persen yaitu rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah. Semakin besar nilai Derajat Desentralisasi Fiskal semakin tinggi derajat otonomi fiskal di suatu wilayah.

Ketimpangan Pembangunan

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang penggambaran masing-masing provinsi dari segi pemerataan pembangunan, dapat diamati menggunakan Indeks Williamson didasarkan pada data PDRB masing-masing daerah digunakan rumus sebagai berikut :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - Y)^2 f_i/n}}{Y}$$

dimana :

IW = Indeks Williamson

Y_i = PDRB per kapita daerah i

Y = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah

f_i = Jumlah penduduk daerah i

n = Jumlah penduduk seluruh daerah

Hasil pengukuran dari nilai Indeks Williamson ditunjukkan oleh angka 0 sampai angka 1 atau $0 < IW < 1$. Jika indeks Williamson semakin mendekati angka 0 maka semakin kecil ketimpangan pembangunan ekonomi dan jika indeks Williamson semakin mendekati angka 1 maka semakin melebar ketimpangan pembangunan ekonomi.

Alat Analisis

Model Data Panel

Analisis data panel digunakan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan dalam pembangunan ekonomi antar wilayah propinsi di Pulau Jawa. Dan fungsi umum yang akan digunakan adalah : $IW = f(x_1)$

Yang kemudian model yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + e_{it}$$

Keterangan :

Y = Ketimpangan Pembangunan

X_1 = Derajat Desentralisasi Fiskal

β = parameter

i = provinsi yang diobservasi ($i=1, \dots, m$)

t = periode penelitian ($t=1$)

e = error term

Estimasi Model Data Panel

Analisis data yang dilakukan dengan estimasi regresi, yang mana menurut Widarjono (2007) untuk melakukan estimasi menggunakan data panel terdapat 3 model yang dapat dilakukan, yaitu:

Metode Common Effect merupakan suatu estimasi data panel yang hanya mengkombinasikan data time series dan cross-section dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu atau waktu. Dalam model ini terdapat asumsi bahwa intersep dan koefisien regresi nilainya tetap untuk setiap

objek penelitian dan waktu.

Metode Fixed Effect pada metode estimasi ini mengasumsikan bahwa setiap objek memiliki intersep yang berbeda tetapi memiliki koefisien yang sama. Untuk membedakan antara objek yang satu dengan yang lainnya maka digunakan variabel dummy atau variabel semu sehingga metode ini juga disebut Least Square Dummy Variables (LSDV).

Model Random Effect pada metode ini tidak menggunakan variabel dummy seperti yang digunakan pada fixed effect. Metode ini menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antarwaktu dan antarobjek. Model random effect mengasumsikan bahwa setiap variabel mempunyai perbedaan intersep tetapi intersep tersebut bersifat random atau stokastik.

Dari 3 model yang akan diuji pada penelitian ini antara common effect, fixed effect, dan random effect maka dipilih model yang paling baik dimana model common effect dan fixed effect diuji dengan uji chow. Sedang untuk menguji model fixed effect dengan random effect maka dilakukan uji hausman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desentralisasi Fiskal Seluruh Provinsi di Pulau Jawa

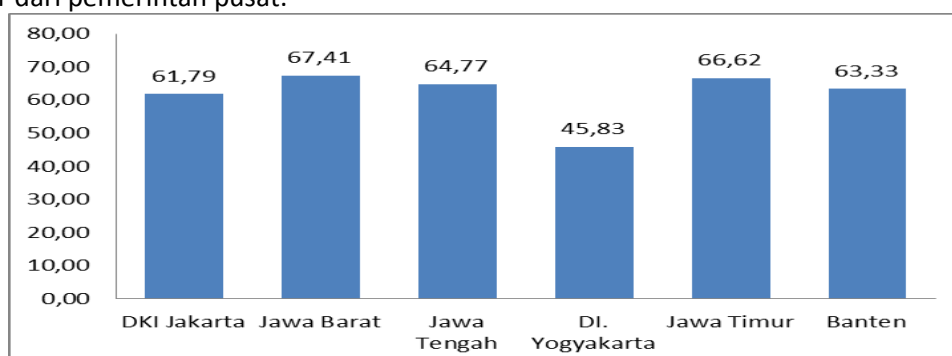
Desentralisasi fiskal menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya sendiri yang berarti juga bahwa pemerintah daerah semakin tinggi kemampuannya dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Desentralisasi fiskal yang menggambarkan kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dikur dengan melihat rasio jumlah Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah. Derajat desentralisasi fiskal provinsi-provinsi di Pulau Jawa dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Desentralisasi Fiskal Seluruh Provinsi di Pulau Jawa
 Tahun 2001-2017

Tahun	Provinsi					
	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI. Yogyakarta	Jawa Timur	Banten
2001	40,06	49,67	42,96	32,80	49,54	32,80
2002	42,06	56,27	48,15	36,38	50,84	42,45
2003	52,71	66,43	59,50	38,50	55,25	54,97
2004	55,69	70,39	64,69	53,81	72,35	60,79
2005	56,38	74,71	70,62	57,45	75,15	66,97
2006	54,52	74,27	68,89	49,54	72,57	70,43
2007	100,00	70,26	100,00	37,40	70,10	68,02
2008	54,39	72,51	71,08	50,28	73,67	70,65
2009	55,03	70,90	70,23	50,17	72,92	69,28
2010	62,47	73,44	71,13	52,57	73,80	74,74
2011	63,00	76,92	73,72	54,03	77,42	77,10
2012	62,30	59,15	56,69	46,23	62,23	62,73
2013	67,95	64,25	61,55	47,08	66,50	66,11
2014	71,36	67,40	65,42	46,65	69,53	69,31
2015	76,20	66,78	64,80	46,86	69,29	67,86
2016	68,58	61,54	58,79	42,93	63,37	63,11
2017	67,72	71,10	52,94	36,42	58,03	59,31

Sumber : BPS, diolah

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa desentralisasi fiskal dari seluruh provinsi yang ada di Pulau Jawa tahun 2001-2017 cukup variatif. Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat kemampuan yang tinggi dalam mengelola keuangan daerahnya ditunjukkan dengan nilai rata-rata desentralisasi fiskal sebesar 67,41 persen. Provinsi Jawa Timur mempunyai rata-rata derajat desentralisasi fiskal sebesar 66,62 persen, Provinsi Jawa Tengah sebesar 64,77 persen, Provinsi Banten sebesar 63,33 persen, Provinsi DKI Jakarta 61,79 persen dan yang terendah Provinsi DI Yogyakarta dengan rata-rata sebesar 45,83 yang artinya masih ada ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat.



Sumber : BPS, data diolah

Gambar 1. Rata-Rata Desentralisasi Fiskal Provinsi Di Pulau Jawa

Analisis Data Panel

Pemilihan Model Estimasi

Uji Chow

Model ini digunakan untuk membandingkan model terbaik antara common effect model dan fixed effect model dengan cara membandingkan hasil probabilitasnya dengan nilai alfa (0.05). Adapun hipotesisnya yaitu : H_0 : Common Effect Model diterima dan H_a : Common Effect Model ditolak, Fixed Effect diterima. Uji ini dilakukan dengan melihat p-value signifikan (kurang dari 5%) maka model yang digunakan adalah estimasi Fixed Effect Model, sebaliknya apabila p-value tidak signifikan (lebih besar dari 5%) maka model yang digunakan adalah estimasi Common Effect Model. Dari hasil regresi yang dilakukan untuk membandingkan model terbaik CommoEffect Model dengan Fixed Effect Model diperoleh hasil probabilitas sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	106.557012	(5,95)	0.0000
Cross-sectionChi-square	192.608737	5	0.0000

Berdasarkan hasil uji Chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas F-statistik sebesar $0,0000 < \alpha=0,05$, maka artinya menolak H_0 atau menerima H_a sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa model terbaik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis adalah Fixed Effect Model, lalu akan dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu dengan uji Hausman untuk menguji Fixed Effect Model dengan Random Effect Model.

Uji Hausman

Teknik estimasi data panel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model atau Random Effect Model. Hipotesis yang digunakan dalam uji hausman adalah sebagai berikut : H_0 : Random Effect Model diterima serta H_a : Random Effect Model ditolak, Fixed Effect diterima. Ketentuan uji hausman ini dengan melihat nilai probabilitas Cross-section random, apabila nilai probabilitas $> \alpha=0,05$, maka H_a ditolak artinya model yang terbaik adalah Random Effect. Begitu pula sebaliknya jika nilai probabilitas $< \alpha=0,05$ maka H_0 ditolak yang artinya model yang terbaik ialah Fixed Effect. Berdasarkan nilai probabilitas Cross-section random diatas sebesar $0,0000 > \alpha=0,05$, maka ditolak yang artinya model yang terbaik ialah Random Effect.

Tabel 6. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.080314	1	0.7769

Sumber: olah data

Hasil Estimasi Random Effect Model

Berdasarkan teknik pemilihan model estimasi yang telah dilakukan, maka kesimpulannya ialah memilih model Random Effect. Berikut hasil estimasi Random Effect Model.

Tabel 7. Hasil Estimasi Random Effect Model Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.378889	0.071356	5.309876	0.0000
FISKAL?	0.000194	0.000542	0.358080	0.7210
Random Effects				
(Cross)				
_DKI--C	0.240575			
_JABAR--C	0.035410			
_JATENG--C	0.037903			
_DIY--C	-0.072751			
_JATIM--C	-0.098761			
_BANTEN--C	-0.142377			
Weighted Statistics				
R-squared	0.001292	Mean dependent var		0.034089
Adjusted R-squared	-0.008695	S.D. dependent var		0.055057
S.E. of regression	0.055296	Sum squared resid		0.305763
F-statistic	0.129411	Durbin-Watson stat		0.222449
Prob(F-statistic)	0.719802			

Sumber: olah data

Dari hasil uji random effect dapat ditulis rumus regresi sebagai berikut :

$$Y_{it} = 0,378889 + 0.000894 \text{ Fiskalit} + e_{it}$$

Selama kurun waktu 17 tahun dari tahun 2001-2017, ternyata yang terjadi di seluruh

provinsi di Pulau Jawa adalah variabel desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui seberapa besar variasi dari desentralisasi fiskal mampu mempengaruhi variasi dari ketimpangan pembangunan wilayah. Berdasarkan perhitungan menggunakan regresi Random Effect Model nilai koefisien determinasi hanya menunjukkan angka 0,001292, sehingga dapat disimpulkan bahwa variasi ketimpangan pembangunan wilayah dapat dijelaskan oleh variasi dari desentralisasi fiskal hanya sebesar 0,1292 persen, sisanya sebesar 99,8708 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model seperti investasi, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, jumlah tenaga kerja, indeks pembangunan manusia, investasi dan lainnya.

Kondisi ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bonet (2006), Kyriacou, Gallo dan Sagales (2013), maupun Sacchi dan Salotti (2011) yang semuanya menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap disparitas antar daerah. Desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap disparitas antar daerah di seluruh provinsi di pulau jawa mungkin salah satunya disebabkan karena sebagian besar dana dekonsentrasi tidak digunakan dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pelayanan yang sasarannya adalah untuk mengurangi ketimpangan atau disparitas. Otonomi daerah bertujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam membangun daerahnya. desentralisasi fiskal yang tinggi di suatu daerah menunjukkan bahwa pendapatan asli dari suatu daerah tersebut tinggi, dan artinya bahwa semakin tinggi belanja pemerintah yang seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan dari suatu daerah. Namun demikian belanja daerah yang digunakan pemerintah daerah antara belanja rutin dan belanja modal yang mana belanja modal digunakan untuk pembangunan ekonomi lebih tinggi yang dikeluarkan untuk belanja rutinnya sehingga tidak dapat mendorong pembangunan ekonomi dan tidak akan mengurangi tingkat ketimpangan. Peningkatan kemampuan PAD terhadap pendapatan suatu daerah harus diikuti kualitas belanja daerah yang baik agar dapat menyelesaikan ketimpangan di daerah dan berpengaruh secara signifikan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka dalam penelitian ini diambil kesimpulan sebagai berikut : Berdasarkan hasil olah data desentralisasi fiskal dari tahun 2001 hingga 2017 seluruh provinsi yang ada di Pulau Jawa, dapat dilihat bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah berbeda-beda. Dari hasil perhitungan rata-rata desentralisasi fiskal, Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat kemampuan yang tinggi dalam mengelola keuangan daerahnya ditunjukkan dengan nilai desentralisasi fiskal sebesar 67,41 persen. Selanjutnya Provinsi Jawa Timur sebesar 66,62 persen, Provinsi Jawa Tengah sebesar 64,77 persen, Provinsi Banten sebesar 63,33 persen, Provinsi DKI Jakarta 61,79 persen dan yang terendah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 45,83 yang artinya masih ada ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat. Semakin tinggi tingkat desentralisasi fiskal, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Sementara itu variabel Derajat Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Pulau Jawa tahun 2001-2017. Kedepannya pemerintah daerah harus lebih banyak mengambil kebijakan terkait upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan fiskalnya dengan lebih menggali potensi daerahnya serta mengoptimalkan bantuan pemerintah pusat pada kegiatan-kegiatan yang bersifat mendorong penurunan disparitas antar wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akai, & Sakata. 2005. Fiscal decentralization, commitment and regional inequality: Evidence from state level cross-Sectional data for The United States. Osaka: Osaka International University.
- Armida S. Alisjahbana. 2005. Kesenjangan Regional di Indonesia. Lembaga Penelitian SMERU. Diakses Tanggal 13 Januari 2019.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik Indonesia Berbagai Tahun Terbitan. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2019. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi di Indonesia Berbagai Tahun Terbitan. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2019. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi di Indonesia Berbagai Tahun Terbitan. Jakarta
- Bonet. Jaime. 2006). Fiscal Decentralization and Regional Income Disparities : Evidence from The Colombian Experience. Original Paper. *Ann Reg Sci* 40:661-676
- Fadli, Faishal. 2014. Analysis of Direct and Indirect Effect of Fiscal Decentralization and Regional Disparity (Case Study Provinces in East and West Indonesia Year 2006-2012). *Journal of Economics and Sustainable Development* www.iiste.org/ISSN 2222-1700 (Paper) ISSN 2222-2855 (Online) Vol.5, No.18, 2014
- Fajrii, Muhammad, Arman Delis, Yohanes Vyn Amzar. 2016. Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera, *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 9 No. 2, 99-107.
- Kurniawan, Ferry. 2016. Tesis Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah di provinsi Sumatera Utara Tahun 1990-2013. Tesis Dipublikasikan. Medan: Universitas Sumatera Utara
- Kyriacou, A., Muinelo-Gallo, L., Roca-Sagales, O. 2015. Fiscal decentralization and regional disparities: The importance of good governance. *Papers in Regional Science*, Vol. 94, No. 1, pp. 89–107, doi: 10.1111/pirs.12061.
- Lessman, Christian. 2006. Fiscal Decentralization and Regional Disparity: A Panel Data Approach for OECD Countries. Germany :ifo Working Paper No. 25
- Qiao, et.al. 2003. The trade off between growth and equity in decentralization policy: China’s Experience. United States of America: Andrew Young School of Policy Studies & Georgia State University.
- Sacchi, Salotti. 2011. Income inequality, regional disparities, and fiscal decentralization in industrialized countries. Faculty of Economics and Management, University of Barcelona.
- Sadono, Sukirno. 1985. Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI dengan Bima Grafika. Jakarta
- Sjafrizal. 2008. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat. Padang: Praninta Offset.
- Suwanan, Ahmad Fawaiq dan Eka Heni Sulistiani. 2009. Fiscal decentralization and regional disparities in Indonesia: a dynamic panel data evidence. *Journal of Indonesian Economy and Business* Volume 24, Number 3, 2009, 328 – 336
- Todaro, Michael P., dan Stephan C. Smith. 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga
- Widarjono, Agus. 2007. Ekonometrika Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Ekonisia

STRATEGI PENGEMBANGAN DESA BERBASIS POTENSI LOKAL

Eko Murdiyanto, Budiarto, Vandrias Dewantoro

Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Yogyakarta

ekomur_upnyk@yahoo.com, budiarto.upn@gmail.com, vandriasdewantoro@yahoo.co.id

Abstract

This research is intended to design the development of a village by utilizing the existing local potential in the context of poverty alleviation. This research was conducted with a qualitative approach in Ngalian, Widodomartani, Ngemplak, Sleman. Methods of data collection by observation, interviews, and Focus Group Discussions. The results of the study showed that strategy that can be done in Ngalian Hamlet to optimize the physical and non-physical potentials there was done by making Ngalian as an Education Village through partnerships with stakeholders. This is supported by the farmer groups, livestock groups, fish farmers groups and farmer women's groups as a forum to improve the welfare of the community.

Keywords: poverty, potential, strategy

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah terbesar yang dihadapi Indonesia, meskipun Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Kemiskinan yang terjadi di sebuah wilayah membutuhkan suatu tindakan dengan cara memberdayakan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan karena pemberdayaan masyarakat didasarkan atas anggapan dasar atau pikiran bahwa, masyarakat perlu diberdayakan, bahkan masyarakat sendiri harus sadar bahwa masyarakat perlu memberdayakan diri untuk keberdayaan diri sendiri.

Dusun Ngalian merupakan salah satu wilayah yang memiliki penduduk miskin. Hal ini disebabkan belum banyak masyarakat yang belum peduli dengan lingkungan sekitar yang melimpah potensinya, sehingga potensi yang ada belum tergarap dengan optimal. Meskipun demikian sampai saat ini Dusun Ngalian telah memiliki Kelompok tani, kelompok ternak, kelompok pembudidaya ikan dan kelompok wanita tani (KWT) sebagai basis dalam pemanfaatan potensi lokal untuk mengentaskan kemiskinan. Atas dasar kesepakatan warga dan peraturan Dusun maka setiap rumahtangga memiliki keharusan untuk bergabung kedalam salah satu Kelompok-kelompok tersebut. Hal ini bertujuan agar setiap rumahtangga dapat terpantau perkembangan tingkat kemiskinannya dan secara bersama-sama meningkatkan kesejahteraannya melalui kelompok.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertitik tolak dari strategi yang perlu dilakukan oleh pengelola Dusun Ngalian untuk mengembangkan Dusun Ngalian berdasarkan pada potensi yang dimiliki dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi dalam pengembangan Dusun Ngalian Sleman berdasarkan potensi yang dimiliki.

Strategi Pengembangan

Strategi berasal dari [bahasa](#) Yunani "strategia" yang diartikan sebagai "the art of the general" atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Secara khusus strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi.

Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun [visi](#) dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik.

Beberapa langkah dalam merumuskan [strategi](#), yaitu (Hariadi, 2005):

- Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan dan menentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut.
- Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan misinya.
- Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.
- Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.
- Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan panjang.

Salah satu analisis yang dapat digunakan adalah analisis SOAR, yaitu suatu kerangka kerja perencanaan strategis dengan pendekatan yang berfokus pada kekuatan dan berusaha untuk memahami seluruh sistem dengan memasukkan suara pihak terkait" (Stavros dan Hinrichs, 2009). SOAR merupakan model yang lebih positif untuk memanfaatkan selama proses perencanaan strategis organisasi, karena dapat membantu mengidentifikasi keinginan internal karyawan organisasi, apa yang ingin mereka capai, dan bahkan bagaimana mereka akan mencapai tujuan. "SOAR membantu orang terhubung tujuan dan nilai-nilai mereka untuk pekerjaan mereka melalui percakapan strategis" (Stavros dan Hinrichs, 2009).

Analisis SOAR lebih disesuaikan dengan situasi organisasi. "SOAR fleksibel dan terukur; setiap organisasi dapat merancang pendekatan sendiri untuk sesuai dengan kebutuhan dan budaya" (Stavros dan Hinrichs, 2009). Model ini dapat digunakan untuk mengembangkan Rencana Strategis Organisasi, karena SOAR dapat menciptakan dialog yang lebih positif di seluruh tingkatan organisasi. Secara garis besar SOAR terdiri dari 5 langkah dalam menentukan strategi yang akan digunakan, yaitu :

- Menentukan Strengths atau Kekuatan apa saja yang dimiliki dan pihak mana sajakah yang sudah ikut berkontribusi dalam pencapaian kondisi yang diinginkan.
- Menentukan Opportunities atau Peluang apa saja yang dapat mendorong tercapainya kondisi yang diinginkan
- Menentukan Aspirations atau aspirasi-aspirasi dari semua pihak untuk kondisi terbaik.
- Menentukan Results atau hasil yang diperoleh dari kondisi tersebut bila sudah terwujud.
- Menentukan langkah-langkah kongkrit untuk mencapai kondisi tersebut.

Ide dasar dari SOAR adalah untuk membangun organisasi di seluruh apa yang berhasil, daripada mencoba untuk memperbaiki apa yang tidak, sehingga mencoba untuk membuat lebih dari apa yang sudah bekerja. Pendekatan SOAR mengintegrasikan Appreciative Inquiry

(AI) untuk menciptakan proses transformasional melalui mengajukan pertanyaan, memvisualisasikan masa depan untuk menciptakan hubungan yang positif, dan membangun, sehingga meningkatkan kapasitas organisasi untuk kolaborasi dan perubahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Dusun Ngalian Widodomartani, Ngemplak, Sleman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu penelitian yang mendalam dan mendetail tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan subjek penelitian (Lincoln dan Guba, 1985). Subyek dalam penelitian ini adalah pengurus dan anggota pengelola desa edukasi, pamong dusun Ngalian, Kelompok Wanita Tani, kelompok tani, kelompok tani ternak dan karang taruna. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan (observasi), wawancara, dan Focus Group Discussion (FGD).

Data yang terkumpul diuji keabsahannya dengan triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis menggunakan model Miles dan Huberman (1984) yang melalui 3 (tiga) tahap, yaitu: tahap reduksi data, tahap penyajian data/ analisis data setelah pengumpulan data dan tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Potensi Dusun Ngalian

1). Potensi Fisik

Topografi : dataran rendah yang datar, hampir tidak pernah mengalami kejadian banjir, longsong maupun kekeringan dan bahaya lainnya.

Tanah : Jenis tanah tanah regosol merupakan jenis tanah yang berasal dari material gunung api, jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang subur. Tanah regosol sangat cocok ditanami padi, palawija, tembakau, dan sayuran.

Cuaca dan Iklim: ketinggian 400 meter diatas permukaan laut. Oleh karena itu suhu yang dirasakan yaitu dalam keadaan sejuk.

Sumber air: berasal dari air sumur dan Air yang digunakan untuk usaha bidang pertanian berasal dari sungai yang melintas Dusun Ngalian.

Manusia: Terdapat 188 KK atau 476 orang, terdiri dari laki-laki 235 dan perempuan 241.

2). Potensi Non fisik

Taman Bacaan Masyarakat "SARASWATI": digerakan oleh kaum muda dengan berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda namun satu visi dan misi dengan tujuan yang sama dan dengan semangat yang tinggi.

Komunitas Kandang Kebo: sekelompok orang dengan berbagai latar belakang yang bergabung karena mempunyai kesamaan yaitu menyukai dan bahkan mencintai segala hal yang berbau Kebudayaan, terutama warisan budaya.

Kelembagaan Desa: kelompok tani, kelompok ikan, kelompok wanita tani dan Kelompok Ternak. Sampai saat ini kelompok ternak dan kelompok tani dengan prestasi yang dimiliki tingkat kabupaten maupun nasional sering menjadi tujuan kelompok tani atau ternak lain melakukan tukar pengetahuan melalui sekolah lapang pada kelompok ternak dan kelompok tani Mekar.

B. Rencana dan Strategi Berdasar Potensi

Pengembangan suatu desa membawa konsekuensi pada perubahan fisik desa dan perubahan dalam masyarakat secara luas. Dalam bentuk sederhana rencana pengembangan

merujuk pada konsep analisis yang digunakan yaitu analisis SOAR yaitu suatu kerangka kerja perencanaan strategis dengan pendekatan yang berfokus pada kekuatan dan berusaha untuk memahami seluruh sistem dengan memasukkan suara pihak terkait terutama pelaku utama yaitu masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut

1. Potensi Subjek (Strengths)

Potensi fisik berupa topografi, jenis tanah, ketersediaan air, dan cuaca & iklim menyebabkan Ngalian memiliki kesuburan tanah tinggi dan kaya akan sumberdaya air. Kondisi ini menyebabkan lahan sangat sesuai untuk budidaya pertanian baik tanaman pangan maupun hortikultura dan ternak.

Potensi non fisik berupa taman bacaan, komunitas kandang kebo dan kelembagaan sosial merupakan modal sosial yang dimiliki masyarakat. Hal ini menjadikan masyarakat memiliki pola pikir sederhana yang mengedepankan kebersamaan, gotong royong, dan tepo seliro. Kegiatan gotong royong dilakukan secara bersama-sama dalam masyarakat secara bergantian, terutama pada saat penyiapan lahan, panen, bahkan memiliki lumbung padi yang difungsikan sebagai gudang pangan milik dusun untuk kepentingan masyarakat. Hal ini akan mewujudkan asas resiprokal masyarakat di Dusun Ngalian yang merupakan salah satu cermin kuatnya ikatan solidaritas warga. Selain itu beberapa lembaga tersebut memiliki beberapa prestasi baik tingkat lokal maupun nasional, antara lain: juara dalam gelar potensi terbaik, lomba jam belajar masyarakat, Evaluasi kelompok sapi potong terbaik, penerapan pola tanam padi terbaik dan masih banyak lagi.

2. Peluang (Opportunities)

Potensi-potensi yang dimiliki Dusun Ngalian sekaligus memberikan peluang untuk dikembangkan lebih lanjut. Kondisi lahan yang cocok untuk usaha tani, ternak dan ikan merupakan awal untuk meraih peluang dengan semakin sadarnya konsumen dalam mengkonsumsi pangan yang sehat dan berkualitas. Selain itu dengan prestasi yang sudah dimiliki membuka peluang untuk diseminasi atau ditularkan kepada masyarakat lain di luar Ngalian. Hal ini didukung dengan munculnya tren edukasi di luar kampus atau lembaga pendidikan formal. Hal ini membuka peluang terbukanya kerjasama dengan pihak lain, baik pemerintah maupun swasta.

3. Aspirasi (Aspirations)

Masyarakat Dusun Ngalian memiliki aspirasi yang diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, yaitu adanya pendampingan dari berbagai pihak yang berhubungan dengan produk yang dihasilkan di Dusun Ngalian seperti benih padi yang bersertifikat, produk olahan yang memiliki standar kesehatan dan industri. Selain itu juga memiliki aspirasi jangkauan pasar yang luas. Hal ini diperlukan karena dengan perluasan pasar yang semakin melebar maka akan membuat produk Dusun Ngalian semakin meningkat permintaannya. Selain itu, tidak ingin berhenti pada program yang telah ada, masyarakat Desa Ngalian memiliki program-program yang berkelanjutan

4. Hasil yang Diharapkan (Results)

Hasil yang diharapkan dengan pengembangan potensi lokal adalah kegiatan yang melibatkan seluruh masyarakat dan potensi dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

Setelah dilakukan analisis kebutuhan yang telah dijelaskan di atas, maka selanjutnya dilakukan analisis SOAR dengan menggunakan matriks SOAR. Matriks analisis SOAR berfungsi untuk mempermudah identifikasi terkait situasi dan posisi yang dihadapi oleh suatu organisasi berdasarkan faktor-faktor strategi internal yang dimiliki oleh organisasi dan eksternal yang dihadapi organisasi. Matriks SOAR di Dusun Ngalian dapat dilihat pada Gambar 1.

Masa Lalu	Masa Depan
(1) Strength (Kekuatan) Potensi fisik (lahan sesuai untuk usahatani, ikan dan ternak sapi) Potensi Non fisik (modal sosial, kearifan lokal), kuat dalam ikatan solidaritas warga memiliki beberapa prestasi baik tingkat lokal maupun nasional.	(3) Aspiration (Aspirasi) Pendampingan pihak terkait produk Produk bersertifikat Jangkauan pasar luas memiliki program-program yang berkelanjutan
(2) Opportunities (Peluang) Terbukanya kerjasama dengan pihak lain, baik pemerintah maupun swasta Tren edukasi di luar kampus	(4) Result (Hasil) Pengentasan Kemiskinan melibatkan seluruh masyarakat dan potensi desa
(5) langkah kongkrit : Desa EDUKASI Berbasis Potensi	

Gambar 1. Matriks SOAR untuk pengembangan Potensi Dusun Ngalian

Berdasarkan Gambar 1, maka langkah kongkrit yang dapat ditempuh dalam pengembangan potensi lokal Dusun Ngalian adalah pembentukan desa edukasi berbasis potensi. Langkah ini ditempuh untuk mengoptimalkan potensi yang ada, baik potensi fisik maupun non fisik, sehingga desa edukasi yang akan dikembangkan dapat berkelanjutan. Sesuai konsep desa edukasi maka Ngalian harus bisa menjadi tempat untuk suatu kegiatan atau [perjalanan](#) yang dilakukan untuk [rekreasi](#) atau [liburan](#) dan juga terdapat aktivitas edukasi atau pendidikan. Ada banyak kegiatan edukasi yang bisa dilakukan di Dusun Ngalian terutama dalam bidang pertanian sesuai dengan potensi yang dimiliki. Untuk itu dapat dirumuskan beberapa kegiatan yang terkait dengan pengembangan desa edukasi yang diringkas dalam bentuk matriks seperti Gambar 2.

	Aspirations Pendampingan pihak terkait produk Produk bersertifikat Jangkauan pasar luas memiliki program-program yang berkelanjutan	Results Pengentasan Kemiskinan yang melibatkan seluruh masyarakat dan potensi desa
Strengths Potensi fisik (lahan sesuai untuk usahatani, ikan dan ternak sapi) Potensi Non fisik (modal sosial, kearifan lokal), kuat dalam ikatan solidaritas warga memiliki beberapa prestasi baik tingkat lokal maupun nasional.	perbaikan pengelolaan usahatani padi, ternak sapi dan ikan melalui SPO/GAP dan SPO/GHP Peningkatan diversifikasi dengan olahan potensi lokal lainnya	Perbaikan sistem pengelolaan desa edukasi
Opportunities Terbukanya kerjasama dengan pihak lain, pemerintah dan swasta Tren edukasi di luar kampus	Akses modal dan pengelolaan keuangan pelestarian kesenian asli	Revitalisasi kelembagaan Kelompok tani, kelompok ternak, kelompok petan ikan dan kelompok wanita tani

Gambar 2. Analisis Kegiatan Berdasarkan Hubungan Antara Aspirations, Results, Opportunities, Dan Strengths Dalam Matriks SOAR

Dari Gambar 2 dapat dilihat hubungan antara kekuatan, aspirasi, peluang, dan hasil dari analisis berupa program ataupun kegiatan dalam pengembangan menjadi desa edukasi, yaitu:

- Perbaikan pengelolaan usahatani padi, ternak sapi dan ikan melalui SPO/GAP dan SPO/GHP.
- Peningkatan diversifikasi dengan olahan berbasis pangan lokal dan potensi lokal lainnya.
- perbaikan sistem pengelolaan desa edukasi untuk menghasilkan pengelola yang memiliki standar dari dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat.
- Akses modal dan pengelolaan keuangan
- Pelestarian kesenian asli

revitalisasi kelembagaan Kelompok tani dan kelompok wanita tani.

Untuk mewujudkan Dusun Ngalian menjadi Desa edukasi maka diperlukan kesiapan masyarakat terutama lembaga-lembaga desa yang sudah ada dan campur tangan para pemangku kepentingan yang terkait dengan program dan kegiatan yang disusun

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dusun Ngalian memiliki potensi fisik dan non fisik yang yang dikembangkan dalam rangka mengentaskan kemiskinan masyarakat.

Strategi yang dapat dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan tidak merubah kondisi yang sudah ada adalah dengan menjadikan Dusun Ngalian sebagai Desa Edukasi berbasis potensi dengan dukungan dari para pemangku kepentingan yang terkait.

B. Saran

Potensi Dusun Ngalian yang belum dimanfaatkan seperti tenaga kerja muda yang tergabung dalam karang taruna dapat dimasukkan dalam setiap kegiatan dalam desa edukasi sesuai dengan kapasitasnya.

Pengelola Dusun memiliki peta jalan menuju Desa Edukasi agar dalam pembentukannya dapat terarah, berkelanjutan dan sesuai dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan.

REFERENSI

- Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Rineka Cipta. Jakarta.
- Creswell, John. 1998. Qualitatif Inquiry and Research Design. California: Sage Publications, Inc.
- Crosby, Benjamin. Koff, Russel L. 1962. Scientific Method. Stakeholder analysis: A vital tools for strategic managers", Technical Notes no. 2, USAID; and ODA.
- Hariadi, Bambang. 2005. Strategi Manajemen. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Kelsey, L.D. and C.C. Hearne, 1955, Cooperative Extension Work, Comstock Publishing Associates, Ithaca.
- Lincoln, S Yvonna dan Guba, Egon G. 1985. Naturalistic inquiry. New York: Sage.
- Milles, Matthew B. dan Huberman, Michael. 1984. Qualitative Data Analysis. London: Sage Publication
- Moleong, Lexy. 1993. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mungmachon, Roikhwaphut. 2012. Knowledge and Lokal Wisdom: Community Treasure . International Journal of Humanities and Sosial Science Vol. 2 No. 13; July 2012.
- Patton, Michael Quinn. 2001. Qualitative Research & Evaluation Methods. 3rd edition. SAGE Publications, Inc.

- Sholeh, Chabib. 2014. *Dialektika Pembangunan Dengan Pemberdayaan*. Fokusmedia. Bandung
- Spradley P. James. 1979. *Participant Observation and The Ethnographic interview*. Wadsworth Thomson Learning.
- Start, Daniel dan Ingie Hovland. 2004. *Tools for Policy Impact: A Handbook for Researchers*. Research and Policy in Development Programme 111
- Stavros, J. and G. Hinrichs. 2009. *The Thin Book of SOAR: Building Strengths-Based Strategy*. Bend, OR: Thin Book Publishing Co.
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV Alfabetika. Bandung.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bina Rena Pariwara. Jakarta.

MIGRAN PENDUDUK DARI DESA SUMBERMULYO BESERTA HUBUNGANNYA DENGAN DAERAH ASAL

Lukmono Hadi, Arif Wibawa

ABSTRACT

This study on the population mobility was done at Sumbermulyo village as a study object. Respondents interviewed in the survey were: (1) family heads whose at least one of their family members exercised mobility following the systematic random sampling, (2) all migrants who were back to home visiting their families. In general the purpose of this study was to find describe about relative links of the origin area—destination area that manifested in remittance forms or visit to the village. In order to describe fully any phenomena in accordance with the investigational purpose being achieved, frequency distribution, cross tabulation, and multiple regression analysis ara applied. The statistical test (t test and F test criteria) was only carried out as far as for confirming the purposed hypothetical test. The findings in this study in a brief as followed: the migrants were generally young and had relatively high educational level in average. They went out of the village related to the lack of the work opportunity. Their mobility steps spread over Indonesian territory, but generally still in Java Island (almost 75%), and the cities as the destinations. There are also who went out to other countries, such as Taiwan, Malaysia, and Hong Kong. In general the migrants recoqnized that they could live better than when that they at the villages. Althouhg they had gone out of their village, their relative links manifested in the form of origin area was quite strong. In general they sent remittance and had a visit.

Key words: Migrant, remittance, visit

PENDAHULUAN

Cooke dan Belanger (2009) berpendapat bahwa volume mobilitas penduduk meningkat sejalan dengan perkembangan ekonomi suatu negara dan cenderung meningkat dengan cepat apabila terdapat keragaman yang menonjol antar daerah. Nampaknya keadaan ini sedikit banyak dihadapi Indonesia dalam pembangunannya. Perpindahan penduduk menjadi sesuatu yang niscaya.

Namun demikian, masalah mobilitas penduduk di Indonesia kurang mendapat perhatian, paling tidak jika dibandingkan dengan dua komponen demografi yang lain. Oleh Suharso (2007) bahkan dikatakan masih sangat langka data maupun hasil penelitian yang mempertanyakan fenomena hubungan migran dengan keluarganya di daerah asal. Segera akan muncul begitu banyak hal yang belum jelas. Hal ini menurutnya karena hingga kini hubungan antara migran dengan keluarga di daerah asal kurang mendapat perhatian. Lebih banyak diutarakan dalam retorika daripada berpangkal pada data di lapangan. Ia menduga banyak faktor berpengaruh terhadap hubungan itu, misalnya faktor sosial ekonomi, pendidikan, status perkawinan, dan jarak daerah asal dengan daerah tujuan.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut di atas, studi ini bermaksud untuk melihat gambaran keadaan migran pada umumnya, serta gambaran ikatan yang terwujud dalam bentuk teritorial kekerabatan daerah asal-daerah tujuan, yang dimanifestasikan dalam wujud

remitan dan kunjungan, dengan membatasi diri pada 257 migran Desa Sumbermulyo.

Melalui studi ini diharapkan dapat diperoleh pengetahuan tentang arah persebaran, motivasi pindah, motivasi hubungan, dan faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kedua bentuk hubungan tersebut. Dari segi ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengambil keputusan dalam ikhtiar membawa perubahan bagi daerah pedesaan yang menyeluruh. Sedangkan dari segi akademis, diharapkan dapat menambah perbendaharaan studi tentang mobilitas, serta diharapkan dipakai sebagai justifikasi atau sekedar tinjauan-tinjauan kritis atas teori-teori mengenai mobilitas pada umumnya.

KAJIAN TEORI

Secara konseptual mobilitas penduduk horizontal atau geografis adalah gerakan penduduk yang paling tidak mencakup dua dimensi, yaitu dimensi tempat dan dimensi waktu (Gould dan Prothero, 1995). Kedua dimensi itu dapat bervariasi. Untuk dimensi tempat misalnya, dapat bervariasi dari tempat yang jaraknya beberapa meter hingga bermil-mil, untuk waktu dapat bervariasi dari beberapa jam hingga bertahun-tahun.

Atas dasar variasi kedua dimensi itu, maka mobilitas penduduk dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas permanen (migrasi) dan mobilitas temporer (sirkulasi). Kriteria waktu dan tempat untuk menentukan migrasi atau sirkulasi tidaklah seragam. Tetapi banyak ahli sepakat (misalnya Lee, 1996; Shaw, 1995; Thomlinson, 1999; Gould dan Prothero, 1995) bahwa dimensi waktu dalam migrasi mempunyai satu konotasi bahwa ia melambangkan perpindahan yang sifatnya permanen.

Secara umum proses terjadinya migrasi dapat dijelaskan melalui gabungan faktor penolak dari daerah asal dan faktor penarik dari daerah tujuan namun kebanyakan teori mengatakan faktor yang menyebabkan terjadinya migrasi adalah lebih dikarenakan faktor dorongan dari daerah asal.

Norris (2006) misalnya, mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya migrasi adalah lebih dikarenakan faktor dorongan dari daerah asal, seperti adanya tekanan atau siksaan di bidang keagamaan, politik, rasial serta ekonomi. Sedangkan menurut Fawcett (1999) seseorang mempunyai 7 orientasi dalam hidupnya, yaitu: kemakmuran, status, kenyamanan, stimulan otonomi, afiliasi, dan moralitas. Setiap orang memberi nilai pada masing-masing dari ke tujuh tujuan hidup tersebut. Motivasi migrasi tergantung pada harapan akan tercapainya tujuan hidup tersebut, yaitu dengan tetap tinggal atau migrasi. Sedangkan menurut Lewis (2007) di negara berkembang terdapat dualisme sistem ekonomi. Sistem ekonomi subsisten di sebagian besar kawasan pedesaan, dan sistem ekonomi yang ada di kota-kota. Disparitas antara kedua kawasan tersebut mengakibatkan terjadinya arus perpindahan desa-kota.

Hubungan migran dengan keluarga di desa asal. Masalah hubungan migran dengan keluarga di daerah asal dapat dipelajari dengan memanfaatkan penelitian-penelitian mikro, seperti misalnya studi Caldwell (1999) di Ghana, Connell (2005) di India.

Hasil studi mereka sepakat mengatakan bahwa ikatan genealogis yang terwujud dalam bentuk teritorial daerah asal-daerah tujuan adalah riil, bukan sesuatu yang imajiner. Manifestasi hubungan yang biasanya diwujudkan dalam bentuk arus kiriman uang (remitan) dan kunjungan.

Pada umumnya remitan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Connell, 2005). Selanjutnya oleh Curson (2011) dirumuskan 6 tujuan pokok pengiriman remitan, (1) untuk membantu keluarga, (2) untuk keperluan upacara siklus hidup, (3) membantu keluarga, (4) untuk melunasi hutang-hutang, (5) untuk investasi, (6) untuk

perencanaan pensiun.

Dalam konteks yang lebih luas, di mana remitan digunakan untuk keperluan masyarakat luas bisa dijumpai pada migran suku Minangkabau (Naim, 1994).

Dari segi kunjungan, banyak studi mengungkapkan bahwa migran juga menyempatkan berkunjung ke deesa asal (Naim, 1994; Mantra, 1989; Connell, 2005). Menurut Naim kunjungan mereka bisa bersifat periodik (hari raya atau hari besar lain) atau pun insidental (biasanya erat hubungannya dengan adanya kegiatan penting dari keluarga). Namun dari banyak studi tersebut di atas nampaknya tidak memberi informasi apakah kunjungan tersebut semata-mata karena keterikatan dengan keluarga atau karena keterikatan dengan tanah leluhur, atau karena motivasi yang lain.

Rumusan hipotesis dibuat sebagai penuntun guna mencapai tujuan penelitian yang kedua. Di mana fokus nya terletak pada upaya mencari hubungan antar variabel. Dibangun dengan mengikuti arah dugaan yang telah ditunjukkan oleh Mantra (1989).

Hipotesis pertama. Besar kecilnya remitan berbeda menurut ragam pendidikan, lapangan pekerjaan, dan pendapatan.

Hipotesis kedua. Di antara ketiga faktor yang di teliti tersebut, yang sangat mempengaruhi tinggi rendahnya retiman adalah pendapatan migran.

Hipotesis ketiga. Terdapat perbedaan kecenderungan kunjungan migran pada keluarga di desa asal menurut ragam jarak ongkos perjalanan, dan status perkawinan.

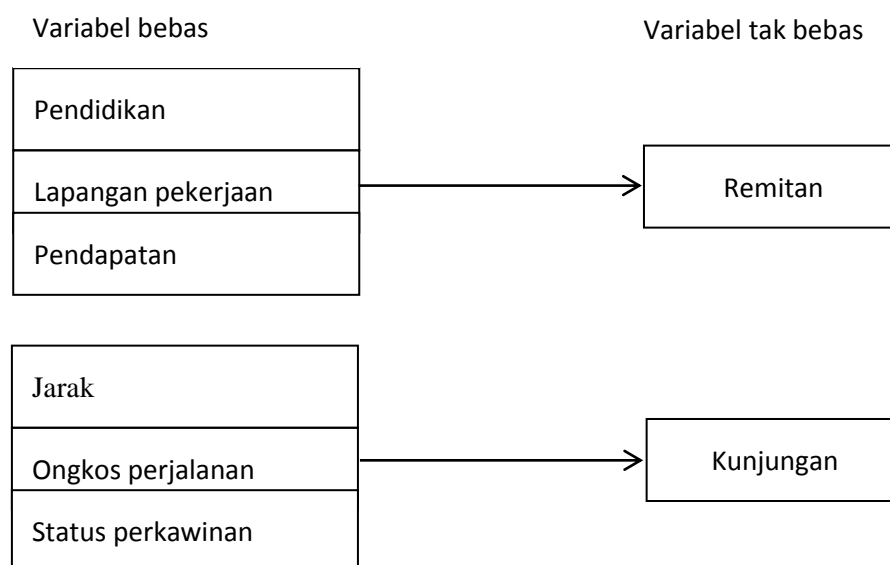
Agar semua bicara dalam satu bahasa, maka beberapa istilah dalam studi ini diberi pengertian dan batasan: Migran, adalah seseorang berusia 15 tahun atau lebih pindah dari daerah asal, dan minimal sudah 6 bulan di daerah tujuan. Hubungan, pengertiannya adalah dalam arti sosial ekonomi kekeluargaan, dan dibatasi bersifat satu arah. Keluarga, pengertiannya mengikuti konsep kekeluargaan yang berlaku di pedesaan Jawa, yaitu yang biasa diistilahkan dengan sanak saudara. Daerah asal, adalah tempat dimana migran dilahirkan. Remitan, dengan cara pendefinisian adalah uang dari migran yang dikirim. secara langsung atau tidak langsung ke daerah asal. Kunjungan, adalah pulang kampung untuk sementara.

METODE PENELITIAN

Data studi ini terutama diperoleh dari kepala keluarga dari suatu rumah tangga yang sekurang-kurangnya seorang anggota keluarganya bermigrasi. Dan dari migran yang mudik mengunjungi keluarganya selama masa pengumpulan data. Dalam studi ini dilakukan juga observasi-observasi pribadi serta wawancara terhadap informan di desa kasus.

Dalam studi ini dikembangkan suatu model kerangka analisa yang merupakan simplifikasi dari tujuan ke dua yang hendak dicapai dalam studi ini. Model tersebut nampak pada gambar 1.

Untuk kepentingan uji hipotesis, ke 8 variabel yang dianalisa digolongkan dalam dua kategori (dikotomisasi). Hipotesis pertama dan ketiga diuji dengan menggunakan pengujian Kai Skwer. Batas nyata dipakai taraf 5 % dan 1 %. Kemudian hipotesis kedua diuji dengan model analisa regresi ganda fungsi linier. Uji keberartian digunakan kriteria uji F (F test criteria) Tabel Anavar pada $\alpha = 5\%$ dan 1% .



Gambar 1. Bagan Kerangka Analisa Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Migran dalam studi ini nampaknya memperlihatkan karakteristik yang sama dengan migran pada umumnya (lihat misalnya: Shryock, 2012; Poucher, 2010; Caldwell, 2009; Temple, 2011), yakni muda usia (20 – 30 tahun), berpendidikan relatif tinggi. Mereka bermigrasi lebih dikarenakan faktor dorongan dari desa yang berkaitan dengan faktor ekonomi dan kesempatan kerja. Dan mereka tetap membina hubungan dengan keluarga di daerah asal yang dimanifestasikan dalam wujud remitan dan kunjungan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai remitan adalah banyak. Namun dari ketiga faktor (jarak, ongkos, status perkawinan) yang dalam studi ini diduga besar pengaruhnya terhadap besar kecilnya remitan, ternyata dari analisa tabel kontingensi didapatkan hanya faktor pendapatan yang berpengaruh secara bermakna (nyata pada taraf α 0,01) terhadap besar kecilnya remitan.

Dari angka perhitungan yang diperoleh melalui model regresi ganda fungsi linier, dan tertera pada Tabel 1 maupun Tabel 2 di bawah ini, menunjukkan bahwa besarnya sumbangan regresi ketiga faktor yang diteliti terhadap tingkat remitan sangat kecil. Ketiga faktor tersebut hanya menjelaskan tingkat remitan sebesar 12,1 persen atau $R^2 = 0,121$ (dengan kriteria uji F, nyata pada taraf 0,01). Dan sebagian besar sekitar 88 persen tidak dapat dijelaskan apa penyebabnya dalam studi ini.

Tabel 1. pengaruh pendidikan, pendapatan, dan lapangan pekerjaan terhadap remitan

Jenis faktor	Simpel r	Beta	Nilai t	Pengaruh
Pendapatan (ribuan rupiah)	0,338	0,821	4,935	***sangat berpengaruh
Pendidikan (tahun sukses)	0,210	-0,184	-0,306	**tidak berpengaruh
Lapangan Kerja (jam kerja)	0,184	0,082	1,304	*tidak berpengaruh
Konstante =10,770 $R^2 = 0,121$				

Keterangan: *) nyata pada taraf 0,05
 **) nyata pada taraf 0,05
 ***) nyata pada taraf 0,01

Besarnya faktor-faktor lain yang tidak dapat dijelaskan itu kemungkinan juga ada hubungannya dengan faktor-faktor pribadi migran yang biasanya sulit diukur. Faktor ini oleh Taylor (2007) disebut variabel dinamika atau variabel masa lalu migran (*lag variables*).

Di antara ketiga faktor yang diteliti itu, yang paling besar pengaruhnya terhadap tingkat remitan adalah faktor pendapatan migran (nyata pada taraf 0,01). Hal ini tampak jelas baik ditinjau dari sudut angka koefisien beta (0,821) maupun bila ditinjau dari sudut angka korelasi (simpler *r*) sebesar 0,338. Sedangkan pendidikan migran dan lapangan pekerjaan migran tidak mempengaruhi remitan secara nyata. Atau bisa saja dikatakan bahwa apapun pendidikan migran, serta dimanapun lapangan pekerjaan migran, tidak akan berpengaruh terhadap perbedaan nilai remitan. Sebagai konsekuensinya, hipotesa kedua yang diajukan dalam penelitian ini diterima.

Tabel 2. matriks korelasi (*r*) antar variabel : remitan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan pendapatan

Variabel	Remitan	Pendidikan	Pendapatan	Lapangan Kerja
Remitan	1,000	0,021	0,0338	0,187
Pendidikan	0,021	1,000	0,142	-0,069
Pendapatan	0,338	0,142	1,000	0,232
Lapangan Kerja	0,187	-0,069	0,232	1,000

Sampai dengan semua yang telah disampaikan, serta melihat semua kenyataan di atas, barangkali benar untuk mengatakan bahwa faktor pendapatan hanyalah sekedar memberi arti pada variasi tingkat remitan.

Dalam hal kunjungan ke desa asal, hasil studi ini menunjukkan bahwa para migran berkunjung ke desa asal rata-rata 3 kali dalam 1 tahun. Dan hampir bisa dipastikan mereka berkunjung pada hari Lebaran (95%), lalu hari Natal (40%), dan kemudian hari Nyadran (35%). Dan nampaknya merupakan suatu fenomena sosial yang baru dengan cukup banyaknya migran yang berkunjung pada hari Proklamasi 17 Agustus (26%). Hal ini tampaknya berhubungan dengan ikatan genealogis - yang terwujud dalam bentuk teritorial - yang mendasari bagian terbesar ikatan kekerabatan yang cukup kuat.

Sedangkan dari ketiga faktor (jarak, ongkos, status perkawinan) yang dalam studi ini diduga berpengaruh terhadap kunjungan ternyata – melalui analisa tabel silang -- hanya faktor jarak yang mempengaruhi kunjungan secara bermakna (nyata pada taraf α 0,01). Namun ternyata dalam kasus studi ini jarak berpengaruh negatif, dalam arti semakin jauh jarak, semakin migran akan cenderung berkunjung.

KESIMPULAN

Di daerah tujuan, para migran tetap membina / menjalin hubungan dengan keluarga atau kaum kerabat di desa. Ikatan teritorial kekerabatan tersebut nampak masih cukup kuat, dan dimanifestasikan dalam wujud remitan dan kunjungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi remitan dan kunjungan adalah banyak, namun dari faktor-faktor yang diduga berpengaruh dan menjadi hipotesa dalam studi ini, maka :

Variasi tingkat remitan hanya berbeda menurut tinggi rendahnya pendapatan migran. Dari ketiga faktor pengaruh yang diteliti, yang paling menentukan tingkat remitan adalah pendapatan migran.

Kecenderungan kunjungan ke desa hanya berbeda menurut jarak. Kebalikan dengan hipotesa yang diajukan, migran jarak jauh ternyata cenderung berkunjung daripada migran

jarak dekat.

Semua kenyataan di atas menuntun pada suatu kesimpulan bahwa faktor-faktor yang sifatnya emosional, seperti niat, kemauan, dan kebiasaan masa lalu nampaknya lebih dominan dalam menentukan keeratan hubungan migran dengan keluarga di desa. Jadi nampaknya terlalu gegabah bila nantinya ada yang beranggapan bahwa hubungan kekerabatan tersebut semata-mata ditentukan oleh faktor jasadiah saja. Yang mendekati kebenaran barangkali interaksi antara keduanya secara dialektis dalam situasi, kondisi, dan kurun waktu tertentu, di tempat tertentu.

Karena hubungan migran dengan keluarganya di desa yang terwujud dalam bentuk remitan adalah riil, maka pemerintah dapat memberikan kemudahan-kemudahan bagi pelaksanaan kelancaran arus remitan. Sebagai contoh, lembaga keuangan atau bank pemerintah (BRI Unit Desa) yang selama ini hanya ada di tingkat kecamatan Bambanglipuro dapat dipertimbangkan untuk dibuka di desa Sumbermulyo, atau perlu juga dipikirkan adanya semacam koperasi yang dapat memberikan pinjaman yang pengembaliannya lewat remitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cooke, John dan Daniele Belanger 2009 "Migration Theories and First Nation Mobility: Toward a System Perspektif", *Canadian Review of Sociology*, 43,2, hal 141-164.
- Caldwell, John 1999 "Determinants of rural-urban migration in Ghana", *Population Studies*, Vol. 2, Part November, Hal. 361-362.
- Collier, W.L. 1974 "Choce of technology in rice milling, A coment/a reply", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Volume 10 (1), Hal. 106-126.
- Coneel, John; Bilab Dasgupta; Roy Laishley 2005 *Migration from rural areas*, Oxford Univorsity Press, Hal 90-119.
- Curson, Peter 2011 "Remittance and migration the commerce of movement", InGudev Singh Gosal (ed.), *Population Geografy*, Volume 3 (1), hal. 77.
- Fawcett, James T. 1999 "A value expectancy approach to migration decisions", Paper disampaikan pada pertemuan tahunan The Population Association of America, Denver, Colorado, 10-12 April.
- Gould, W.T.s. dan R.M. Prothero 1995 "Space and time in African population mobility", In L.A. Kosinski and R.M. Prothero (eds.), *People on the move*, London, Methem & Co. Ltd.
- Lewis, W.A. 2007 *Economic development with unlimited supplies of labour*, The Manchester School, May Hal. 139-191.
- Mantra, Ida Bagus dan Sho Kasai 1987 *Population Mobility and Link between migrants and family back home : A case of two villages in Yogyakarta Special Region, Indonesia*, Tokyo, Nihon University Research Institute.
- Norris, Robert E. 2006 "Migration as spatial interaction", *Journal of Geografy*, Volume 31 (5), Mei, Hal. 294301.
- Naim, Mochtar, 1979 *Merantau, Pola migrasi Suku Minangkabau*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Shaw, R. Paul, 1995 *Migration theory and fact, a review and bibliography of current literature*, Philadelphia, Pensylvania, Regional Science Research Institute.
- Suharso, 1998 *Pela-perpindahan penduduk dan urbanisasi di Jawa. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan dan proses kejadiannya*, Disertasi Doktor, Ti dak dipublikasikan, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.
- Thomlinson, Ralph, 1999 *Population dynamics, causes and consequences of world demographic change*, Second Edition, New York, Random House, Hal. 267275.

GRAND DESAIN PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS POTENSI LOKAL (Studi Kasus Di Desa Salamrejo Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo)

Nanik Dara Senjawati, Indah Widowati, dan Sugiman Setyo Wardoyo

Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Email : darasenjawati@gmail.com

ABSTRAK

Grand desain adalah sebuah metode dalam memperdalam potensi lokal daerah untuk menjadi landasan dalam mengembangkan suatu daerah. Keterlibatan pemerintah desa, pengurus lembaga, dan warga masyarakat sangat penting dalam merumuskan bentuk pengembangan wilayah tersebut. Atas dasar itu bentuk perencanaan partisipatif dipilih sebagai suatu strategi pengembangan potensi desa. Perspektif grand desain pengembangan desa ini meliputi Sumberdaya Alam, Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya, Kelembagaan, dan Sumberdaya Lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi yang dimiliki Desa Salamrejo dan menganalisis potensi menggunakan pendekatan SOAR. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif pada masyarakat desa Salamrejo kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, wawancara, dan Focus Group Discussion (FGD). Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengembangan Desa Wisata pada Desa Salamrejo berdasarkan potensi yang dimiliki sebagai berikut (1) Perencanaan dan pengembangan desa wisata di Desa Salamrejo pada bidang Sumber Daya Alam dengan memanfaatkan sungai progo untuk destinasi wisata; (2) pelatihan inovasi terhadap pelaku industry di bidang produksi, pengolahan, dan pemasaran produk serat alam dan lidah buaya, serta memotivasi masyarakat dalam pelestarian industri serat alam; (3) Penguatan kelembagaan dengan mensinergikan seluruh lembaga yang ada ; (4) Edukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian budaya; (5) Penanaman kembali serat alam dan optimalisasi susukan sebagai sumber irigasi masyarakat

Kata Kunci: Grand Desain, Desa Wisata, Potensi Lokal

PENDAHULUAN

Grand Design secara bahasa berarti rencana besar, sebuah organisasi pasti memiliki tujuan mengapa organisasi itu dibentuk, untuk mencapai tujuannya tersebut, sebuah organisasi harus memiliki cara-cara mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi. Cara untuk mencapai tujuan mereka yang dilaksanakan tiap beberapa periode waktu itulah yang disebut Grand Design. Untuk membuat Grand Design, kita wajib mengetahui kondisi organisasi yang kita jalankan, apa saja kelebihanannya, kekurangannya, dari pihak internal maupun external. Rencana besar atau Grand Design yang akan dibuat untuk organisasi harus dapat mengurangi kekurangan yang organisasi dan mengoptimalkan potensi dan kekuatan organisasi. Kunci sukses untuk membuat Grand Design atau renstra adalah

adanya satuan tugas penyusun, atau indikator keberhasilan, dan juga kelengkapan data dan informasi.

Desa Salamrejo, Kecamatan Sentolo, merupakan salah satu desa di Kabupaten Kulonprogo dengan berbagai potensi lokal yang meliputi Sumberdaya Alam, Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya, Kelembagaan, dan Sumberdaya Lahan. Namun demikian potensi tersebut belum dikembangkan maksimal. Sebagian besar Desa Salamrejo belahan selatan berada di bantaran kali Progo. Dari delapan dusun di Desa Salamrejo enam diantaranya bersisihan dengan bantaran Kali Progo. Di sepanjang hamparan tersebut dapat dijadikan salah satu tujuan wisata memancing, arung jeram, outbond serta kegiatan lainnya.

Selain wisata alam, sampai saat ini masih terdapat empat dusun sentra pengolahan serat alam daun agel/gebang (*Corypha Gebanga*). Daun Agel inilah yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat Salamrejo untuk berbagai kerajinan seperti tenun, tas, topi, sepatu dan lain-lain. Industri serat alam selain mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi juga mampu menciptakan devisa karena realisasi ekspor mencapai 1 ton atau senilai 1,2 milyar rupiah, sehingga industri tersebut menjadi unggulan desa Salamrejo.

Potensi seni dan budaya cukup beragam diantaranya wayang kulit, wayang golek, jathilan, oglek dan masih banyak lagi seni budaya yang dapat dijadikan daya tarik tersendiri bagi desa Salamrejo. Potensi tersebut jika dikembangkan dan dikelola secara profesional maka desa Salamrejo mempunyai peluang yang sangat besar untuk dijadikan Desa Wisata yang mampu mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji potensi yang dimiliki Desa Salamrejo serta mengkaji perencanaan pengembangan wilayah menjadi desa wisata.

Strategi Pengembangan

Berkait dengan Grand Design yang tidak lain adalah suatu strategi pengembangan organisasi. Secara khusus strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan.

Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun [visi](#) dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam merumuskan [strategi](#), yaitu (Hariadi, 2005):

- Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan dan menentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut.
- Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan misinya.
- Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.
- Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.
- Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang.

Salah satu analisis yang dapat digunakan adalah analisis SOAR, yaitu suatu kerangka kerja perencanaan strategis dengan pendekatan yang berfokus pada kekuatan dan berusaha

untuk memahami seluruh sistem dengan memasukkan suara pihak terkait" (Stavros dan Hinrichs, 2009). SOAR merupakan model yang lebih positif untuk memanfaatkan selama proses perencanaan strategis organisasi, karena dapat membantu mengidentifikasi keinginan internal karyawan organisasi, apa yang ingin mereka capai, dan bahkan bagaimana mereka akan mencapai tujuan. "SOAR membantu orang terhubung tujuan dan nilai-nilai mereka untuk pekerjaan mereka melalui percakapan strategis" (Stavros dan Hinrichs, 2009).

Analisis SOAR lebih disesuaikan dengan situasi organisasi. "SOAR fleksibel dan terukur; setiap organisasi dapat merancang pendekatan sendiri untuk sesuai dengan kebutuhan dan budaya" (Stavros dan Hinrichs, 2009). Model ini dapat digunakan untuk mengembangkan Rencana Strategis Organisasi, karena SOAR dapat menciptakan dialog yang lebih positif di seluruh tingkatan organisasi.

Secara garis besar SOAR terdiri dari 5 langkah dalam menentukan strategi yang akan digunakan, yaitu :

- Menentukan Strengths atau Kekuatan apa saja yang dimiliki dan pihak mana sajakah yang sudah ikut berkontribusi dalam pencapaian kondisi yang diinginkan.
- Menentukan Opportunities atau Peluang apa saja yang dapat mendorong tercapainya kondisi yang diinginkan
- Menentukan, Aspirations atau aspirasi-aspirasi dari semua pihak untuk kondisi terbaik.
- Menentukan Results atau hasil yang diperoleh dari kondisi tersebut bila sudah terwujud.
- Menentukan langkah-langkah kongkrit untuk mencapai kondisi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Desa Salamrejo Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) karena Desa Salamrejo merupakan Desa sentra industri serat agel yang perjalanannya mengalami pasang surut pada pengembangannya, namun memiliki keinginan untuk megembangkan potensi pada sektor lain. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang penelaahnya kepada satu kasus dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif. Studi kasus dapat dilakukan terhadap individu atau kelompok dengan wawancara, observasi, dokumen atau arsip, dan dokumentasi.

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Salarejo, Sekdes Salamrejo, Kabid Pemberdayaan Desa, dan Ketua Pokdarwis. Key informan dalam penelitian ini adalah Kabid Pemberdayaan Desa Salamrejo. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan (observasi), wawancara, dan Focus Group Discussion (FGD). Data yang terkumpul diuji keabsahannya dengan triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis menggunakan model Miles dan Huberman (1984) yang melalui 3 (tiga) tahap, yaitu: tahap reduksi data, tahap penyajian data/ analisis data setelah pengumpulan data dan tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan dan Pengembangan Desa Wisata

Perencanaan dan pengembangan Desa Wisata pada Desa Salamrejo berdasarkan potensi yang dimiliki. Perencanaan dan pengembangan desa Wisata didukung dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam pengembangannya yang diperoleh berdasarkan analisis SOAR berupa :

Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam pada Desa Salamrejo memiliki kekuatan, peuang, aspirasi dan hasil

yang dapat dijadikan kegiatan dalam peningkatannya seperti pada Tabel 1 berikut :

Tabel1. Matriks SOAR Potensi Sumber Daya Alam

	A	R
	Sungai Progo sebagai sumber penghasil masyarakat dengan destinasi wisata	Pengembangan Sumber Daya Alam menjadi destinasi wisata
S Sumber air terjangkau dari sungai progo Tersedianya bahan baku pembuatan olahan lidah buaya	1A. Pemanfaatan sungai progo untuk destinasi wisata salamrejo	1A.Pendampingan pengelolaan sungai progo 2A.Pelatihan budidaya lidah Buaya
O Pengoptimalan serat alam sebagai bahan baku pembuatan kerajinan tangan Tersedianya Bahan baku serat agel	1.2.A. Pembuatan stand pengerajin serat alam pada destinasi wisata sungai progo	1.2.A. Pembentukan kelompok tani pebudidaya serat alam

Pada tabel 1 dapat dilihat beberapa kegiatan yang dapat di lakukan dalam perencanaan dan pengembangan desa wisata di Desa Salamrejo pada bidang Sumber Daya Alam yang terdapat di Desa Salamrejo. Kegiatan yang didapat berupa Pemanfaatan sungai progo untuk destinasi wisata salamrejo, Pendampingan pengelolaan sungai progo, Pelatihan budidaya lidah buaya, Pembuatan stand pengerajin serat alam pada destinasi wisata sungai progo dan Pembentukan kelompok tani pebudidaya serat alam.

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Desa Salamrejo memiliki kekuatan, peluang, aspirasi dan hasil yang dapat dijadikan kegiatan dalam peningkatannya seperti pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2. Matriks SOAR Potensi Sumber Daya Manusia

	A	R
	Pelaku industri memiliki kompetensi Peningkatan penghasilan masyarakat	Sumber Daya Manusia Berkompeten
S Kelompok pengrajin yang solutif Masyarakat sadar akan potensi daerah Keterampilan menganyam di masyarakat terjadi secara turun temurun Kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan lidah buaya sebagai olahan makanan	1.4.A. Pelatihan inovasi terhadap pelaku industri 1.4.B. Pelatihan dan pendampingan pelaku Industri dalam pemasaran dan peningkatan produk 2AB. Sosialisasi dan pelatihan peningkatan perekonomian dengan memanfaatkan potensi daerah	1A.a)Pebentukan gabungan kelompok pengerajin b)Ikutserta dalam asosiasi UMKM Kulonprogo 3A.Pembuatan pusat pelatihan pengerajin 4A. Pendampingan usaha pengolahan lidah buaya
O Tersedianya lapangan pekerjaan Kesadaran individu dalam pelestarian serat alam Peningkatan Kompetensi melalui pelatihan	1AB. Memperluas industri dengan memanfaatkan masyarakat lokal 2A.Memotovasi masyarakat dalam pelestarian industri serat alam	2.3A.Pelatihan pembudidayaan serat alam.

Tabel 2 menggambarkan beberapa kegiatan yang dapat dijadikan kegiatan dalam mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia untuk pembentukan Desa Wisata Desa Salamrejo berupa Pelatihan inovasi terhadap pelaku industry, Pelatihan dan pendampingan pelaku Industri dalam pemasaran dan peningkatan produk, Sosialisasi dan pelatihan peningkatan perekonomian dengan memanfaatkan potensi daerah, Pembentukan gabungan kelompok pengrajin, Ikutserta dalam asosiasi UMKM Kulonprogo, Pembuatan pusat pelatihan pengrajin, Pendampingan usaha pengolahan lidah buaya, Memperluas industri dengan memanfaatkan masyarakat lokal, Memotivasi masyarakat dalam pelestarian industri serat alam, dan Pelatihan pembudidayaan serat alam

Kelembagaan

Kelembagaan Desa Salamrejo memiliki kekuatan, peluang, aspirasi yang dapat dijadikan beberapa kegiatan dalam pengembangan Desa Wisata yang dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Matriks SOAR Potensi Kelembagaan

	A	R
	Bantuan peralatan produksi oleh pemerintah daerah Aktifnya koperasi lestari sebagai organisasi penghimpun pelaku usaha industri	Pensinergian lembaga Desa Salamrejo
S Dukungan material dan non material oleh pemerintah daerah Kelembagaan karangtaruna berjalan aktif Kekompakan organisasi sepeda kid rider Kelompok sinoman setiap dusun aktif Silaturahmi antar warga baik melalui arisan Organisasi pesewaan KUBE membantu masyarakat kurang mampu Kelompok budidaya lele “mina sejahtera” berprestasi dalam membudidayakan ikan Lembaga pendidikan Samirejo mengajarka menganyam pada siswa dari sejak kecil kekompakan PEBM (Persatuan Eklasing Budi Murka) dalam memajukan Desa	1A. Pengadaan dan pelatihan peralatan produksi oleh pemerintah 1B. Pelatihan dan pendampingan koperasi oleh pemerintah daerah 6A. Penambahan peralatan pesewaan	1A. Pembentukan pengelola pengembangan Desa Salamrejo 2A. Pensinergian karang taruna dengan lembaga lain 3A. Pembuatan agenda rutin bersepeda yang dinaungi oleh lembaga kid rider 5A. Pembentukan rapat rutin dengan kegiatan arisan 7A. Pembentukan rumah belajar budidaya lele 8A. Pembentukan rumah belajar menganyam

<p>O Pelatihan dan pendampingan oleh Kementrian dalam negeri Industri kerajinan serat alam tetap ada dan berjaya Pangsa pasar anyaman serat agel terus meningkat Tersedianya kandang komunal untuk ternak Aktifnya kelompok sanggar Ngudi Lestari Kelompok kerajinan koperasi lancar dapat aktif</p>	<p>3A.Pelatihan pemasaran anyaman serat alam 4A.Pengadaan dan pelatihan kandang komunal untuk ternak</p>	<p>2A.Pembentukan perhimpunan pengerajin serat alam 4A.Pembentukan perhimpunan peternak 5A.Pembuatan pentas rutin dari sanggar Ngudi Lestari 6A.Koperasi menjadi pusat pembelanjaan produk Salamrejo</p>
---	---	---

Tabel 3. menghasilkan beberapa kegiatan yang dapat mengembangkan kelembagaan dalam pembentukan Desa Wisata berupa Pengadaan dan pelatihan peralatan produksi oleh pemerintah, Pelatihan dan pendampingan koperasi oleh pemerintah daerah, Penambahan peralatan pesewaan, Pembentukan pengelola pengembangan Desa Salamrejo, Pensinergian karang taruna dengan lembaga lain, Pembuatan agenda rutin bersepeda yang dinaungi oleh lembaga kid rider, Pembentukan rapat rutin dengan kegiatan arisan, Pembentukan rumah belajar budidaya lele, Pembentukan rumah belajar menganyam, Pelatihan pemasaran anyaman serat alam, Pengadaan dan pelatihan kandang komunal untuk ternak, Pembentukan perhimpunan pengerajin serat alam, Pembentukan perhimpunan peternak, Pembuatan pentas rutin dari sanggar Ngudi Lestari, dan Koperasi menjadi pusat pembelanjaan produk Salamrejo.

Sosial dan Budaya

Kegiatan yang ada dalam peningkatan sosial budaya pada Desa Salamrejo dalam medukung Desa Wisata dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Matriks SOAR Potensi Sosial dan Budaya

	A Melestarikan tradisi leluhur	R Pelestarian Budaya
<p>S Budaya toleransi terhadap agama sangat kuat</p>	<p>1A. Pengadaan pentas seni setiap tahun sesuai dengan kepercayaan masing masing</p>	<p>1A. Penedukasian pentingnya pelestarian budaya di masyarakat (anak-anak dan orang muda)</p>
<p>O Pelestarian budaya yang ada di Desa Salamrejo melalui kelompok organisasi</p>	<p>1A. Pelatihan rutin dan edukasi budaya pada sanggar-sanggar di Desa Salamrejo</p>	<p>1A. Pembuatan pusat informasi mengenai kebudayaan di Desa Salamrejo</p>

Tabel 4 memunculkan beberapa kegiatan yang mendukung peningkatan sosial budaya untuk mewujudkan Desa wisata pada Desa Salamrejo berupa Pengadaan pentas seni setiap tahun sesuai dengan kepercayaan masing masing, Pelatihan rutin dan edukasi budaya pada sanggar-sanggar di Desa Salamrejo, Penedukasian pentingnya pelestarian budaya di

masyarakat (anak-anak dan orang muda), Pembuatan pusat informasi mengenai kebudayaan di Desa Salamrejo.

Sumber Daya Lahan

Sumber Daya Lahan memiliki kekuatan, peluang, aspirasi yang dapat memunculkan kegiatan yang dapat meningkatkan atau memperbaiki sumber daya lahan yang dapat dilihat dalam tabel 5 berikut:

Tabel 5. Matriks SOAR Potensi Sumber Daya Lahan

	A	R
	Terdapat lokasi pusat pengembangan potensi desa Memiliki irigasi sebagai sumber mata air sawah	Pemanfaatan lahan dalam pengembangan desa
S Terdapat lahan yang akan dijadikan tempat pengembangan potensi daerah Terdapat “susukan” untuk pengairan Terdapat lokasi watu jembar sebagai pusat pengembangan desa Tanah subur dapat ditanami berbagai macam tanaman	1A. Pembuatan lokasi pengembangan potensi Desa 2B. Pengelolaan “susukan” untuk irigasi atau pengairan 4B. Sosialisasi dan pelatihan budidaya tanaman yang menguntungkan	1A. Pengelolaan Watu Jembar sebagai pusat pengembangan potensi Desa
O Lahan pinggir sungai dijadikan destinasi wisata. Petani memanfaatkan suskan sebagai irigasi	1A. Pembentukan pengelola destinasi wisata pinggir sungai 1B. Pemanfaatan sungai progo sebagai irigasi	1A. Pemberian motivasi dalam pengembangan destinasi wisata sungai 2A. Optimalisasi susukan sebagai sumber irigasi masyarakat

Pada Tabel 5 memunculkan beberapa kegiatan untuk meningkatkan sumber daya lahan untuk mendukung Desa Wisata berupa Pembuatan lokasi pengembangan potensi Desa, Pengelolaan “susukan” untuk irigasi atau pengairan, Sosialisasi dan pelatihan budidaya tanaman yang menguntungkan, Pengelolaan Watu Jembar sebagai pusat pengembangan potensi Desa, Pembentukan pengelola destinasi wisata pinggir sungai, Pemanfaatan sungai progo sebagai irigasi, Pemberian motivasi dalam pengembangan destinasi wisata sungai, Optimalisasi susukan sebagai sumber irigasi masyarakat

KESIMPULAN

- Perencanaan dan pengembangan desa wisata di Desa Salamrejo pada bidang Sumber Daya Alam dengan memanfaatkan sungai progo untuk destinasi wisata.
- Pelatihan inovasi terhadap pelaku industry di bidang produksi, pengolahan, dan pemasaran produk serat alam dan lidah buaya, serta memotivasi masyarakat dalam pelestarian industri serat alam.
- Penguatan kelembagaan dengan mensinergikan seluruh lembaga yang ada.
- Edukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian budaya.

- Penanaman kembali serat alam dan optimalisasi "susukan" sebagai sumber irigasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2014. Identifikasi Potensi Wilayah. <http://agri-tani.blogspot.com/2014/02/identifikasi-potensi-wilayah.html>. diakses pada tanggal 6 september 2015.
- Aufa, Abdurrahman. 2019. Materi Grand Design. https://www.academia.edu/34820357/Materi_Grand_Design. Diakses pada 10 Juli 2019 pukul 22.46 WIB.
- Hariadi, Bambang, 2005, Strategi Managemen, Bayumedia Publishing, Malang
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong. J.Lexy. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Pingkan Aditiawati, dkk, "Pengembangan Potensi Lokal di Desa Panawangan sebagai Model Desa Vokasi dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional, dalam Jurnal Sositoteknologi, Vol. 15. No. 1, April 2016, hlm 60
- Sastrayuda, Gumelar S. 2010. Konsep Pengembangan Kawasan Agrowisata. Hand Out Mata Kuliah Concept Resort And Leisure, Strategi Pengembangan Dan Pengelolaan Resort And Leisure. http://file.upi.edu/gumelar_s.go.id. Diakses pada 10 Juli 2019 pukul 23.09 WIB
- Stavros, J. & Hinrichs, G. (2009). The thin book of SOAR: Building strengths-based strategy. Bend, OR : Thinbook Publishing.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung. Alfabeth.

POTENSI DAN PERMASALAHAN BUMDES DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN BANTUL (Studi di Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul)

Abdul Ghofar¹, Dwi Hari Laksana¹, Teguh Kismantoroadji²

¹Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN “Veteran” Yogyakarta

²Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian, UPN “Veteran” Yogyakarta

abdulghofar2167@gmail.com , dhlaksana@upnyk.ac.id , kismantoroadji@gmail.com

ABSTRACT

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan ekonomi di pedesaan. Kehadiran BUMDes dapat menjadi alat rekayasa sosial bidang kesejahteraan yang akan berfungsi untuk merekayasa taraf kehidupan masyarakat desa yang mengalami stagnasi ke arah progress kesejahteraan masyarakatnya yang lebih baik. Pembentukan BUMDES di Desa Srimartani mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDES didirikan dengan harapan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk memwadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa. Berbagai potensi di Desa Srimartani telah diolah sedemikian rupa menjadi sebuah usaha, namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan potensi-potensi yang ada. Kendala tersebut didasari oleh keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka serta perputaran modal yang kurang cepat dan tepat.

Kata kunci : BUMDes, pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi desa, kendala.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa dapat ditingkatkan melalui pengembangan potensi perekonomian desa dan menjadi wadah bersama masyarakat pedesaan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif. Desa merupakan unit terkecil dari suatu negara yang langsung berhubungan dengan masyarakat dan menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Basis sistem kemasyarakatan di desa yang kokoh adalah kekuatan untuk mengembangkan sistem politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Di Indonesia ada kurang lebih 74 ribu desa, dimana lebih dari 32 ribu desa masuk dalam kategori desa tertinggal. Kondisi ini sangat kontradiktif dengan tujuan otonomi daerah. Di era otonomi daerah, seharusnya menjadi perwujudan unjuk kekuatan di berbagai bidang, karena tujuan besar otonomi daerah adalah memperluas kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat desa. Kini desa menghadapi era baru. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hendak mengantarkan desa sebagai penyangga kehidupan. Desa diharapkan menjadi mandiri secara sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik.

Pada PP Nomor 43 Tahun 2014 yang diubah melalui PP Nomor 47 Tahun 2015 telah menyebutkan jika kini desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Berlakunya regulasi tentang desa membuka harapan bagi masyarakat desa untuk berubah. Desa memasuki era self governing community dimana Desa memiliki otonomi

dan kewenangan dalam perencanaan, pelayanan publik, dan keuangan. Maka desa bukan lagi penunggu instruksi dari supra desa (Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, dan Pusat). Untuk itu tumpuan dinamika kehidupan desa sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam mendorong terbangunnya kesepakatan pengelolaan desa, mampu menumbuhkan dan mengembangkan nilai sosial, budaya, ekonomi, dan pengetahuan. Dalam riset ini, keberadaan BUMDes menjadi salah satu pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, mengoptimalkan sumber daya manusia (warga desa) dalam pengelolaannya, dan adanya penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUMDes.

Dikenal dengan banyaknya kekayaan alam yang dimilikinya, pemerintah Kabupaten Bantul melakukan berbagai usaha untuk memajukan Kabupaten Bantul. Salah satunya adalah dengan adanya BUMDES. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 41.000 unit BUMDES yang ada di Kabupaten Bantul. Masing-masing BUMDES memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing, tergantung dengan keadaan geografis, keterampilan masyarakat, kekayaan alamnya, dan masih banyak lagi. BUMDES diharapkan menjadi sarana peningkatan ekonomi masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan dalam rangka visi pembangunan Kabupaten Bantul, untuk itu masyarakat dituntut untuk lebih berkembang, lebih kreatif dalam mengembangkan skill dan manfaat potensi yang ada. Maka dari itu tim peneliti mencari beberapa data-data dari beberapa BUMDES yang berada di Kabupaten Bantul.

Menurut Kussujaniatun, kismantoro Adji (2017, dan Anis (2018) dalam risetnya menyatakan bahwa diharapkan masyarakat yang mengetahui dan menyadari bahwa di daerahnya terdapat banyak potensi terutama dari sisi pemanfaatan, maka perlu mengkaji mengenai aspek peningkatan sosial dan peningkatan ekonomi. BUMDes Srimartani Makmur merupakan salah satu dari puluhan BUMDes di Kabupaten Bantul yang masih berjalan. Terdapat banyak potensi yang dapat dikembangkan di Desa Srimartani. Perdagangan, Pertanian, Sumber Air Bersih, dan Pengolahan Sampah merupakan 4 potensi terbesar yang akan dikembangkan. Selain adanya potensi besar pada Desa Srimartani, terdapat juga beberapa permasalahan yang menyebabkan sedikit terhambatnya jalannya BUMDes. Seperti keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah.

KAJIAN TEORI

Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga/badan erekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan. UU No 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Selanjutnya BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang legal dan memiliki peran penting dalam meningkatkan usaha perekonomian masyarakat desa, perlu di dukung pemerintah sebagai basis pengembangan industri kecil menengah atau UMKM.

Apa itu BUMDes? Istilah BUMDes muncul melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 72/2005 dan dirincikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 39/2010. BUMDes merupakan wadah usaha desa yang memiliki semangat kemandirian, kebersamaan, dan kegotong-royongan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mengembangkan aset-aset lokal untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa. Pedoman lain bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes yaitu Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa .

Menurut Ngesti D. Prasetyo, bahwa keberadaan BUMDes sangat strategis yang pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Harapandengan adanya BUMDes, adalah pembentukan usaha baru yang berakar dari sumberdaya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada.

Yunanto (2014:7) menjelaskan keunikan BUMDes sebagai berikut: BUMDes merupakan sebuah usaha desa milik kolektif yang digerakkan oleh aksi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes merupakan bentuk public and community partnership atau kemitraan antara pemerintah desa sebagai sektor publik dengan masyarakat setempat.

Menurut UU No 6 tahun 2014 pasal 87 ayat 3 menyebutkan BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, BUMDes dapat menjalankan pelbagai usaha, mulai dari pelayanan jasa, keuangan mikro, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Sebagai contoh, BUMDes bisa membentuk unit usaha yang bergerak dalam keuangan mikro dengan mengacu secara hukum pada UU Lembaga Keuangan Mikro maupun UU Otoritas Jasa Keuangan.

Aksa (2013) menjelaskan ada empat jenis bisnis yang bisa dikembangkan oleh BUMDes, antara lain:

BUMDes tang bertipe serving. BUMDes semacam ini menjalankan bisnis sosial yang melayani, yaitu melakukan pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus juga memperoleh keuntungan finansial dari pelayanan itu. Usaha ini memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, seperti usaha air minum desa dan usaha listrik desa.

BUMDes yang bertipe banking. BUMDes ini menjalankan bisnis uang seperti bank desa atau lembaga perkreditan desa. Modalnya berasal dari ADD (Anggaran Dana Desa), PADes (Pendapatan Asli Desa), tabungan masyarakat serta dukungan dari pemerintah. Bisnis uang desa ini mengandung bisnis sosial dan bisnis ekonomi. Bisnis sosial artinya bak desa merupakan proteksi sosial terhadap warga desa, terutama kelompok warga yang rentan dan perempuan dari jeratan para rentenir. Bisnis ekonomi artinya bank desa berfungsi untuk mendukung permodalan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku ekonomi di desa.

BUMDes bertipe renting. BUMDes ini menjalankan bisnis penyewaan barang-barang (perangkat pesta, traktor, alat transportasi, ruko, dan lain sebagainya), baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun untuk memperoleh pendapatan desa.

BUMDes bertipe brokering. BUMDes ini berperan sebagai lembaga perantara, seperti jasa pelayanan kepada warga maupun usaha-usaha masyarakat, misalnya jasa pembayaran listrik, desa mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat. BUMDes juga bisa membangun jaringan dengan pihak ketiga untuk memasarkan produk-produk lokal secara lebih luas.

Peranan BUMDes

Masyarakat desa sesungguhnya memiliki karakteristik yang khas sebagai suatu komunitas. Salah satu karakteristik yang khas dari masyarakat desa yaitu cara hidup kolektif. Durkheim menggambarkan ciri-ciri masyarakat desa dengan ciri-ciri memiliki solidaritas yang sifatnya mekanis. Sementara Ferdinand Tönnies salah satu karakteristik dari masyarakat desa adalah *Gemeinschaft* yaitu kehidupan yang masih guyup ditandai dengan adanya gotong royong. Kehidupan masyarakat desa yang bersifat kolektif memiliki tradisi: Pertama, solidaritas, kerjasama, swadaya, dan gotong royong tanpa mengenal batas-batas kekerabatan suku, agama, aliran dan sejenisnya merupakan akar tradisi dari basis modal sosial desa. Kedua, kepentingan masyarakat diatur dan diurus melalui kekuasaan dan pemerintahan desa yang mengandung otoritas dan akuntabilitas. Ketiga, ekonomi lokal yang memproteksi dan mendistribusikan pelayanan dasar masyarakat dilakukan oleh desa (Putra, 2015). Tradisi desa inilah yang menjadi salah satu gagasan fundamental dalam pendirian BUMDes, sehingga dalam pelaksanaannya ada sejumlah prasyarat yaitu: Pertama, BUMDes membutuhkan modal sosial yang berwujud kerjasama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya. Kedua, pengembangan usaha ekonomi desa dilakukan oleh BUMDes melalui musyawarah desa yang memiliki kedudukan sebagai forum tertinggi. Ketiga, BUMDes merupakan usaha ekonomi desa yang mengandung unsur bisnis ekonomi dan bisnis sosial yang dijalankan secara kolektif oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Keempat, kegiatan di bidang ekonomi dan / atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan / atau kerjasama antar-desa seluruhnya ditampung oleh BUMDes sebagaimana tertuang dalam UU Desa. Kelima, BUMDes berfungsi sebagai arena belajar bagi warga desa dalam meningkatkan kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif. Keenam, program yang diinisiasi oleh pemerintah (proyek pemerintah) menjadi “milik desa” ditransformasi oleh BUMDes (Putra, 2015). Di dalam prasyarat pelaksanaan BUMDes secara eksplisit telah disebutkan peranan dari BUMDes yaitu sebagai bisnis ekonomi dan bisnis sosial. Peranan secara ekonomi tentu saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui usaha-usaha yang dikelola oleh BUMDes serta kontribusinya terhadap kas desa atau PADes. Sedangkan peranan secara sosial dapat terlihat dari bagaimana nantinya keberadaan BUMDes mampu memberdayakan masyarakat, meningkatkan interaksi dan solidaritas yang telah terbina selama ini melalui kegiatan BUMDes yang dikelola secara kolektif.

Peranan BUMDes ini juga tercantum di dalam UU Desa bahwa hasil dari BUMDes dimanfaatkan selain untuk pengembangan usaha juga dimanfaatkan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sujarweni (2014:19) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial pada BUMDes Srimartani Makmur, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul. Yogyakarta.

Permasalahan

Permasalahan BUMDes yang menjadi hambatan yaitu selain kendala pembentukan BUMDes itu sendiri juga menyangkut masalah keberadaan BUMDes yang mati suri. dari 45 Bumdes yang berdiri, terdapat 15 BUMDes yang tidak aktif. Selain permasalahan sumber daya manusia, ketiadaan tokoh yang mampu menggerakkan BUMDes menjadi masalah sehingga keberadaannya hanya sebatas nama. “Personil pengurus masih belum bisa memberikan fokusnya 100% dalam mengurus BUMDes”, ujar Edy selaku Direktur BUMDes Srimartani Makmur. Hal ini terjadi karena hampir sebagian besar pengelola BUMDes adalah karyawan paruh waktu yang memiliki pekerjaan lain. Hal ini menyebabkan terhambatnya pengembangan BUMDes karena pengelola belum secara profesional fokus dalam mengelola dan mengembangkan BUMDes. Permasalahan besar lainnya adalah kurang cepat dan tepatnya perputaran modal. Modal merupakan aspek penting dalam sebuah usaha, akan sangat terhambat apabila perputaran modal tidak lancar. BUMDes Srimartani Makmur selama beberapa tahun ini telah mengikuti beberapa perlombaan antar BUMDes. Menjadi juara pada perlombaan tentunya akan mendapatkan sejumlah hadiah yang bisa digunakan sebagai modal usaha, namun karena kurang cepat nya modal tersebut berutar maka kegiatan usaha BUMDes Srimartani mengalami beberapa kedala.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah yang dialami oleh BUMDes Srimartani Makmur sebagai BUMDes berkembang di Kabupaten Sleman. Keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan yang dimiliki merupakan masalah terbesar yang menghambat jalannya BUMDes Srimartani Makmur.

Solusi terbaik untuk permasalahan diatas adalah dengan adanya pelatihan pengelolaan usaha kepada pengurus BUMDes Srimartani Makmur dengan output pengurus BUMDes menjadi lebih baik dalam mengelola atau me-manage usaha BUMDes. Kemudian pelatihan dalam pengelolaan keuangan, pemasaran digital (digital marketing), serta pelatihan untuk packaging produk terhadap para pengelola UMKM yang dimiliki oleh BUMDes, dengan harapan agar terealisasi penguatan BUMDes.

Potensi

BUMDes Srimartani Makmur merupakan BUMDes berkembang dengan bidang usaha yaitu perdagangan, pertanian, pengelolaan air bersih, dan pengelolaan sampah. Dapat dikatakan berkembang dikarenakan BUMDes Srimartani Makmur belum dapat memaksimalkan semua bidang usahanya. Terdapat perbedaan perkembangan diantara bidang usahanya. 2 bidang usaha yang mendapatkan perhatian lebih adalah perdagangan dan pertanian. Sedangkan pengelolaan air bersih dan pengelolaan sampah masih sangat kurang perhatiannya dikarenakan masih kurang maksimal dalam proses pengelolaannya.

Berdasarkan bidang usaha yang dikelola BUMDes Srimartani Makmur bila dikaitkan dengan tipe BUMDes termasuk yang bertipe brokering. BUMDes ini berperan sebagai lembaga perantara, seperti jasa pelayanan kepada warga maupun usaha-usaha masyarakat, misalnya jasa pembayaran listrik, desa mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat. BUMDes juga bisa membangun jaringan dengan pihak ketiga untuk memasarkan produk-produk lokal secara lebih luas.

PENUTUP

BUMDes Srimartani Makmur dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal desa, meningkatkan kondisi perekonomian dan Pendapatan

Asli Desa (PAD), meningkatkan upaya pengolahan potensi desa (sumber daya manusia dan sumber daya alam) sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa serta difungsikan untuk menjadi tulang punggung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa. Adanya peluang demokratisasi pada tingkat desa seharusnya pula membawa dampak positif bagi desa untuk membangun inisiatif dan keinginan memajukan desa. Inisiatif itu harus melihat pada banyak aspek meliputi pelayanan, demokratisasi dan partisipasi serta hal yang lebih penting adalah meningkatkan potensi ekonomi desa. Profesionalisme menjadi tuntutan bagi pengelola BUMDes Srimartani Makmur guna meningkatkan profesionalisme SDM BUMDes diperlukan pelatihan dan pendampingan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, Rivrisond. 2000. Koperasi Indonesia. BPFE, Yogyakarta.
- Desamembangun.or.id, 29 Maret 2014
- Kussujaniatun, Sri., Kismantoroaji, Pengaruh Peningkatan Sosial dan Ekonomi terhadap Perilaku Kewirausahaan, International Conference on Technology Engineering and Social Science, HASE, Nabu Research Academy, 2017.
- Kussujaniatun, Sri, dan Kismantoroaji, Teguh. 2017. Community Empowerment In Teak Root Potential Area. 7th International Conference on Biotechnology and Environmental Management (ICBEM 2017).
- Ghofar, Abdul. 2012. Pengaruh Moderasi Lingkungan Eksternal terhadap Hubungan Strategi Komperhensif dan Kinerja UMKM di Yogyakarta.
- Laksana, Dwi Hari. 2012. Manajemen Terpadu untuk Pengembangan Desa Wisata Eco Tourism di Desa Wisata Umbulharjo, Kecamatan Ponjong, Gunung Kidul, Yogyakarta pada The 6th Malaysia-Indonesia Geological Heritage Conference.
- Ngesti D. Prasetyo, 2006, Sistem Pemerintahan Desa, Makalah
- Putra, Anom Surya, 2015, Buku Saku 7 Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul
- Sujarweni, Winarta. 2014. Metode Penelitian . PT. Pustaka Baru. Bantul. Yogyakarta
- Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDES
- UU No. 6 Tahun 2005 Tentang Desa 2016-2021
- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, penjelasan mengenai Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Desa. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

POTENSI DESA WISATA DI SLEMAN MENUJU MUSLIM FRIENDLY TOURIST VILLAGE

Eny Endah Pujiastuti, Adi Soeprapto, Sriyono, Simon Pulung Nugroho, Fery Dwi Jadmiko,
Amira Fauzia Luberti
UPN “Veteran” Yogyakarta

Abstract

Tourism is one of the world's most important activities, involving millions of people, vast sums of money and generating employment in developing and industrialized countries. Halal tourism is a new business concept that has been initiated to meet the needs of tourists. Halal tourism arises because awareness is increasing among Muslims to choose halal tourism to meet their needs. Demand for halal tourism is responded by countries with a majority of Muslims and non-Muslims. Non-Muslim countries such as Australia, Taiwan, Korea, Japan, countries in Europe, specifically serving the Islamic tourism segment. Halal tourism is not only enjoyed by Muslim tourists but also non-Muslim tourists. The tourist destination in Sleman that has fulfilled the needs of Muslim tourists and is in accordance with the religion of Islam is the Tourism Village. Village tourism must respond to environmental changes, especially regarding the demand for halal tourism so that tourists do not doubt the halal of the destinations offered. The purpose of this article is an analysis of the potential of a tourism village to be able to branding and halal certification for Muslim Friendly Tourist Village. Analysis of the potential of a tourist village will be the basis in making concepts and policies regarding Muslim Friendly Tourist Village. The results of this study indicate that tourism villages in Sleman Regency have the potential to be developed into Muslim Friendly Tourist Village.

Keyword : Muslim Friendly Tourist Village, Halal, Destinasi, Pariwisata, Global

LATAR BELAKANG

Saat ini, permintaan akan produk Halal meningkat secara signifikan seiring dengan meningkatnya populasi muslim. Produk halal tidak hanya dikonsumsi oleh negara mayoritas Muslim, permintaan untuk produk halal juga berasal dari negara yang Muslimnya minoritas (Nurdiansyah, 2016). Pertumbuhan populasi muslim dan non muslim dapat menyebabkan meningkatkan ketertarikan akan pariwisata halal. Pariwisata halal adalah segala obyek pariwisata atau tindakan yang diizinkan menurut ajaran Islam untuk digunakan atau dilibatkan oleh umat Islam dalam industri pariwisata (Battour dan Ismail, 2016). Definisi tersebut mempertimbangkan hukum Islam (syariah) sebagai dasar untuk memberikan produk dan layanan pariwisata ke wisatawan yang sebagian besar Muslim, seperti hotel halal (sesuai syariah hotel), Resor Halal, restoran Halal, dan perjalanan Halal. Dasar dari pariwisata halal termasuk komponen seperti hotel halal, transportasi halal, halal tempat makanan, logistik halal, keuangan Islam, perjalanan Islami paket, dan spa halal (Mohd, Uzzaini, and Mohamad, 2012).

Permintaan akan pariwisata halal direspon oleh Negara yang mayoritas penduduknya muslim maupun non muslim. Negara Non muslim seperti Australia, Taiwan, Korea, Jepang,

negara di Eropa, secara khusus melayani segmen pariwisata Islam. Sebagai contoh Pemerintah Thailand telah menawarkan banyak insentif untuk Wisatawan Muslim untuk mengunjungi Thailand seperti makanan halal, akomodasi halal, masjid Chanin, Sriprasert, Rahman, and Don (2015). Hal ini menunjukkan bahwa perilaku wisatawan dalam memilih pilihan destinasi atau preferensi produk wisata dipengaruhi oleh factor agama (Saraithong and Chancharoenchai, 2010). Kesadaran meningkat di kalangan Muslim untuk memilih pariwisata halal untuk memenuhi kebutuhan.

Islamic tourism emerged as an answer to the needs of Muslim population intended to stay within their cultural and religious environment while on vacation (Arasteh and Eilami, 2011).. Pariwisata halal adalah konsep bisnis baru yang telah ada diinisiasi untuk memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim ketika wisatawan sedang berlibur. Dalam kenyataannya pariwisata halal sudah dilakukan oleh Negara yang mayoritas beragama muslim, seperti Negara Indonesia terutama di Kabupaten Sleman. Destinasi wisata di Sleman yang telah memenuhi kebutuhan wisatawan muslim dan sesuai dengan agama Islam adalah Desa Wisata. Batur (2015) menyatakan bahwa peluang dan tantangan pariwisata halal adalah semakin berkembang di masa depan. Dengan situasi seperti itu, desa wisata mau tidak mau harus merespon perubahan lingkungan terutama mengenai permintaan pariwisata halal. Langkah awal yang harus dilakukan adalah analisis potensi dari desa wisata untuk bisa branding dan sertifikasi halal untuk Muslim Friendly Tourist Village. Analisis potensi desa wisata akan menjadi dasar dalam pembuatan konsep dan kebijakan mengenai Muslim Friendly Tourist Village. Permintaan dari Pasar Muslim terhadap layanan halal, sangat penting untuk Kabupaten Sleman untuk mengembangkan konsep Muslim Friendly Tourist Village. Artikel ini mengaji potensi desa wisata di Sleman menuju Muslim Friendly Tourist Village.

KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep Pariwisata

Pariwisata merupakan sebuah konsep mencakup berbagai pertimbangan seperti sosial, perilaku, ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan (Jaelani, 2017). Medic dan Middleton (1973) menyatakan bahwa konsep pariwisata terdiri dari serangkaian kegiatan, layanan, dan manfaat yang memberikan pengalaman tertentu kepada para wisatawan. Buhalis (2000) percaya bahwa elemen penting dari destinasi wisata, yaitu atraksi, akses, fasilitas, aktivitas dan layanan yang berkaitan dengan pariwisata.

2. Konsep Halal

Tajzadeh Namin A.A. (2013) melakukan review tentang wisata syari'ah yang bersumber dari al-Qur'an. Wisata syari'ah ini memiliki arti: studying the life of the people of the past (QS. 3: 137); studying the destiny of the people of the past (QS. 30:42); studying how prophets were raised (QS. 16: 36); studying the life of evildoers (QS. 6:11); thinking about the creation; thinking about what happened to wrongdoers; visiting safe and prosperous towns (QS. 34: 11); the Holy Quran calls people to travel and to learn lessons from what happened to the infidels and deniers of divine signs; in general, it can be said that traveling helps people achieve theoretical and practical explanations and to reaffirm their faiths in the resurrection day. Traveling helps people learn from the past and prevents tyranny and oppression; and travelling improves sight, hearing, and inner knowledge and rescue people from inactivity and inanition.

Produk halal menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah produk yang memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut: (Tim Penyusun: 2003, 2).

- 1) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi

- 2) 2). Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, antara lain bahan yang diambil dari organ manusia, kotoran, dan darah
- 3) Semua hewan halal yang disembelih sesuai dengan tuntunan syariat Islam
- 4) Seluruh penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan dan transportasi bahan tersebut bukan bekas dipakai untuk babi, kecuali setelah dibersihkan dengan tata cara syariat Islam
- 5) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamr

3. Destinasi halal (wisata Halal)

Zamani Farahani and Anderson (2009) menegaskan bahwa "Islamic tourism can be defined as traveling activities of Muslims when moving from one place to another or when residing at one place outside their place of normal residence for a period less than one year and to engage in activities with Islamic motivations. It should be noted that Islamic activities must be in accordance with generally accepted principles of Islam; i.e. halal.

Beberapa Definisi Wisata Islami (Islamic Tourism) yang dapat digunakan untuk menyusun konsep desa wisata halal. Adapun Definisi Wisata Islami (Islamic Tourism) antara lain :

Semua pengembangan produk dan upaya pemasaran yang dirancang untuk umat Islam (Henderson, 2010).

Jenis pariwisata yang menganut nilai-nilai Islam (Hassan, 2007)

Semua aktivitas wisata yang dilakukan oleh muslim yang berasal dari motivasi islam dan diwujudkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Duman, 2011)

Berdasarkan literatur-literatur yang membahas pariwisata halal, ditemukan berbagai terminologi yang digunakan seperti wisata halal (halal tourism), wisata islami (islamic tourism), atau sharia travel (sharia travel) (Henderson, 2010; Ala-Hamaneh, 2011; Razalli et al. 2012; Halbase, 2015; El-Gohahary, 2016).

Definisi Wisata Halal (Halal Tourism)

- Kegiatan dalam pariwisata yang 'diizinkan atau dibolehkan' menurut ajaran Islam (Battour dan Ismail (2016))
- Penyediaan produk dan layanan pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim sesuai ajaran agama Islam (Mohsin et al. (2016)
- Menawarkan paket wisata dan tujuan yang khusus untuk memenuhi pertimbangan dan kebutuhan muslim (Halbase, 2015)

Indikator wisata religius dalam Islam sebagai berikut :

- 1) The concept of culture in relation to Islamic tourism (Islamic cultural site) (Al-Hamarneh, 2011).
- 2) Tourism synonymous with Muslim (subject to compliance with Islamic values), although it can be extended which includes non-Muslims (Shakiry, 2008)
- 3) Travel religion (pilgrimages and visits to shrines across the Islamic world) (Hassan, 2007).
- 4) Tourism Islam: A tourist with a new moral dimension that is based on values that are acceptable, ethical dimension and has a transcendental standard (Hassan, 2004)
- 5) Islamic Tourism: A trip aimed at the motivation of "safety" or activities which mean it comes from Islamic motivation (Din, 1989).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena sesuai dengan sifat dan

tujuan penelitian yang ingin diperoleh dan bukan menguji sebuah hipotesis, tetapi berusaha untuk mendapatkan sebuah gambaran tentang potensi desa wisata dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menjadikan desa wisata menjadi halal destination. Obyek penelitiannya adalah desa wisata yang ada di kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan studi pustaka dan FGD. Adapun langkah langkah dalam pengolahan data yaitu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi

DISCUSSION

Analisis potensi desa wisata didasarkan pada model ACES yang dikembangkan oleh Indonesian Moeslim Travel Index (IMTI). Adapun potensi yang dimiliki oleh desa wisata menuju Muslim Friendly Tourist Village sebagai berikut:

1. Acces

Potensi mengenai acces berkaitan dengan kemudahan yang dialami wisatawan menuju desa wisata. Desa wisata di Sleman Mudah diakses oleh wisatawan (konvensional dan modern), mudah dijangkau oleh kendaraan umum dan Kondisi jalan bisa dilewati kendaraan umum maupun pribadi. Berdasarkan potensi dari sisi Acces, dapat dikatakan bahwa desa wisata dapat menjadi Muslim Friendly Tourist Village.

2. Comunication

Potensi mengenai communication berkaitan dengan adanya guide untuk memandu wisatawan selama berwisata, tersedia nya guide wanita dan laki-laki. Desa wisata mempromosikan paket wisata melalui web. Berdasarkan potensi dari sisi communication, dapat dikatakan bahwa desa wisata dapat menjadi Muslim Friendly Tourist Village.

3. Environment

Potensi mengenai Environment seperti Commitment to Halal Tourism. Pengelola desa wisata selama ini komitmen untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim seperti makanan dan minuman halal, tempat ibadah, homestay untuk wisatawan muslim, paket wisata. Hal ini menunjukkan bahwa pengelola memiliki komitmen terhadap Muslim Friendly. Berdasarkan potensi dari sisi Environment seperti Commitment to Halal Tourism, dapat dikatakan bahwa desa wisata dapat menjadi Muslim Friendly Tourist Village.

4. Service

Potensi mengenai service di desa wisata maksudnya ketersediaan akomodasi ramah-Muslim. Selama ini, desa wisata menyediakan akomodasi yang ramah terhadap wisatawan muslim seperti kemudahan memperoleh makanan dan minuman halal, tersedia tempat beribadah, homestay yang disediakan untuk wisatawan muslim.

Makanan dan minuman halal

Makan atau minum yang halal harus disiapkan di lingkungan yang bersih dengan hanya menggunakan bahan-bahan yang diizinkan di bawah Islam sementara tidak mengandung secara eksplisit dilarang atau dilarang seperti babi, alkohol atau darah. Daging seperti ayam, sapi, atau daging sapi diizinkan, asalkan mereka disiapkan sesuai dengan persyaratan Islam.

Homestay

Pemilik homestay dalam menyediakan sarapan, makan siang maupun makan malam penuh kehati-hatian dengan memastikan bahwa makanan dan minuman halal bagi para wisatawan Muslim. Pemilik homestay menyediakan masakan lokal untuk wisatawan agar memiliki pengalaman budaya asli sebagai warisan leluhur. Homestay menyediakan menu sahur dan berbuka selama puasa Ramadhan. Homestay sesuai dengan agama yang dianut wisatawan (contoh nya wisatawan muslim ke homestay yang tuan rumah nya muslim, biar mudah untuk

melayani kebutuhan wisatawan muslim. Pemilik homestay menyediakan kamar untuk sholat dan berdoa dimana kamar merupakan satu fasilitas paling penting bagi umat Islam. Kamar tetap bersih dan terawat dengan baik.

Tempat ibadah

Desa wisata sudah menyediakan fasilitas yang memadai bagi umat Islam untuk melakukan shalat tepat waktu. Fasilitas yang memungkinkan wisatawan untuk melakukan ibadah dan doa sehari-hari dalam kenyamanan. Muslim bisa melakukan shalat wajib lima waktu, yang masing-masing harus dilakukan dalam rentang waktu tertentu. Kemudahan akses ke layanan Islam dengan ketersediaan masjid., air yang banyak tersedia, sajadah bersih atau karpet bersih, memisahkan tempat sholat untuk pria dan wanita, memiliki fasilitas wudhu terpisah untuk pria dan wanita yang berdekatan dengan musalla, Masjid terjaga kebersihannya, memiliki jumlah sajadah yang cukup, menyediakan rukuh (peralatan sholat wanita) yang bersih, Takmir masjid juga selalu melakukan Azan yang menandakan waktu sholat sudah tiba, memiliki arah kiblat yang ditandai dengan jelas. Ruang sholat atau masjid dapat menjadi daya tarik wisata yang unik dan luar biasa.

Atraksi Wisata

Atraksi wisata juga menawarkan paket wisata untuk keluarga muslim, atau wisatawan muslim, dimana paket wisata tersebut juga dapat nikmati oleh wisatawan non muslim. Pada bulan-bulan tertentu seperti bulan ramadhan diadakan kegiatan seperti buka bersama, terawih, tadarus dan pengajian. Jika memasuki waktu magrib sampe isya, kegiatan yang berkaitan dengan wisata berhenti digantikan dengan kegiatan keagamaan. Penjadwalan sholat selama jadwal tur. Fasilitas rekreasi dan kesehatan harus dijaga kebersihannya dan dirawat dengan baik;

Restoran/warung makan

Tempat makanan halal seperti Produk makanan dan minuman disajikan di restoran sudah Halal. Hewan seperti ayam dan sapi disembelih sesuai dengan prinsip Syariah. Semua makanan Halal dan melalui proses yang sesuai Halal.

Berdasarkan potensi dari sisi service, dapat dikatakan bahwa desa wisata dapat menjadi Muslim Friendly Tourist Village. Hal ini dikarenakan desa wisata memiliki factor penting menarik wisatawan, seperti yang disampaikan oleh Nurdiansyah (2016) bahwa ketersediaan akomodasi ramah-Muslim, yang juga menyediakan akses mudah untuk pilihan makanan dan minuman halal, bisa dibilang merupakan faktor terpenting dalam penentuan menarik daya tarik destinasi tertentu bagi calon wisatawan Muslim.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis potensi desa wisata dengan menggunakan model ACCES maka dapat disimpulkan bahwa desa wisata yang ada di Kabupaten Sleman memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi Muslim Friendly Tourist Village.

REFERENCE

- Al-Hamarneh, A., and C. Steiner. (2004). "Islamic Tourism: Rethinking the Strategies of Tourism Development in the Arab World after September 11, 2001." *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East*, 24 (1): 173-82.
- Battour M, dan Ismail MN. 2016, Halal tourism: Concepts, practices, challenges and future. *Tourism Management Perspectives* ;19:1–5.
- Buhalis, D. (2000), Marketing the competitive destination of the future. *Tourism Management*, 21(1), 97-152

- Chanin, Oraphan; Sriprasert, Piangpis; Rahman, Hamzah Abd and Sobri, Mohd 2015, Guidelines on Halal Tourism Management in the Andaman Sea Coast of Thailand, *Journal of Economics, Business and Management*, Vol. 3, No. 8, August
- Choi, T. Y., and R. Chu. (2001). "Determinants of Hotel Guests' Satisfaction and Repeat Patronage in the Hong Kong Hotel Industry." *International Journal of Hospitality Management* 20 (3): 277-97.
- Din, K. (1989), Islam and tourism: Patterns, issues, and options. *Annals of Tourism Research*, 16(4), 542-563.
- Elaziz, Muhammet Fatih and Kurt, Abdurrahman, 2017, Religiosity, consumerism and halal tourism: A study of seaside tourism organizations in Turkey, *Tourism*, Vol. 65/ No. 1/ 115 – 128
- Fatkurrohman, 2017, Developing Yogyakarta's Halal Tourism Potential for Strengthening Islamic Economy in Indonesia, *Jurnal AFKARUNA* Vol. 13 No. 1 Juni
- Gardiner, S., C. King, and D. Grace. (2013). "Travel Decision Making: An Empirical Examination of Generational Values, Attitudes, and Intentions." *Journal of Travel Research*, 52 (3): 310-24.
- Hassan, A.R. (2007), Islamic tourism revisited. *Islamic Tourism* 32(2), 1-8. Available from: [https://www.scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&lookup=0&q=Hassan,+A.L.+\(2007\),+Islamic+tourism+revisited.+Islamic+Tourism,+32\(2\).](https://www.scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&lookup=0&q=Hassan,+A.L.+(2007),+Islamic+tourism+revisited.+Islamic+Tourism,+32(2).)
- Medic, S., Middleton, V.T.C. (1973), Product formulation in tourism. *Tourism and Marketing*, 13, 173-201. Available from: https://www.scholar.google.co.id/scholar?cluster=13954064368403291515&hl=en&as_sdt=2005&scioldt=0,5
- Nurdiansyah, Alfian, 2016, Halal Certification and Its Impact on Tourism in Southeast Asia: A Case Study Halal Tourism in Thailand, *The 1st ICSEAS*
- Pujiastuti, Nimran, Suharyono, dan Kusumawati, 2017.a Study On Destination Image Satisfaction Trust And Behavioral Intention: a Study in the tourist village in Sleman, Yogyakarta. *International Journal of Administrative Science*, 148-159.
- Pujiastuti, Nimran, Suharyono dan Kusumawati, 2017b. The antecedents of behavioral intention regarding rural tourism destination. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 1170-1181
- Saraithong and Chanchaoenchai, 2010, "Tourists' behaviour in THAI homestay business," *International Journal of Management Cases*, pp. 112-127.
- Shakiry, A.S. (2008), Tourism Halal imposing them Little by Little. Available from: http://www.islamictourism.com/news_A.php/3838.
- Weidenfeld, A. & A. Ron. (2008). Religious needs in the tourism industry. *Anatolia*, 19(2), 18-22.

STRATEGI PENGEMBANGAN PENATAKELOLAAN DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA UKM SEBAGAI UPAYA KEEFEKTIFAN PENGENDALIAN MANAJEMEN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Hiras Pasaribu, Nur Suhascaryo, Alp. Yuwidianoro, Ida Ayu Purnama, Afni Sirait
hiras.pasaribu@upnyk.ac.id , suhascaryo@yahoo.com , yuwidianoro@upnyk.ac.id ,
ida.ayupurnama@upnyk.ac.id , afni.sirait@upnyk.ac.id
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengembangan penatakelolaan UKM dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap keefektifan pengendalian manajemen dan implikasinya terhadap respon kepatuhan wajib pajak UKM. Metode yang digunakan adalah melakukan survey pemahaman dan kepatuhan praktik penatakelolaan UKM, pengumpulan dokumen informasi akuntansi manajemen UKM, dokumen dianalisis yang dijadikan sebagai dasar penyusunan tata kelola dan sistem informasi akuntansi manajemen sesuai kebutuhan UKM. Alat analisis data yang digunakan menggunakan Analisis Jalur (Path Analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap keefektifan pengendalian manajemen. Selain itu, implikasi hasil penelitian ini bahwa penatakelolaan UKM, sistem informasi akuntansi manajemen dan keefektifan pengendalian manajemen UKM berpengaruh positif terhadap respon kepatuhan wajib pajak. Dilihat dari pengaruh tidak langsung melalui sistem informasi akuntansi manajemen, bahwa sistem informasi akuntansi manajemen secara tidak langsung dapat mempengaruhi penatakelolaan UKM terhadap keefektifan pengendalian manajemen. Demikian juga melalui variabel penatakelolaan UKM, bahwa penatakelolaan UKM juga mempengaruhi sistem informasi akuntansi manajemen terhadap keefektifan pengendalian manajemen UKM.

Keywords: Tata Kelola UKM, Sistem informasi akuntansi manajemen, Pengendalian manajemen, Respon kepatuhan wajib pajak.

PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu negara yang perekonomiannya sebagian besar ditopang oleh industri UMKM. Kemampuan UMKM ini terbukti dari kontribusi UMKM yang mampu membantu keadaan perekonomian Indonesia saat krisis moneter terjadi di tahun 1997. Hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2017 menunjukkan bahwa UMKM menyumbangkan kontribusinya untuk PDB Indonesia sebesar 61,41%. Hasil data perhitungan yang dilakukan tiap tahunnya menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM 6,4% per tahun.

Sayangnya penatakelolaan UKM masih jauh dari memadai. Padahal menurut Sarbah dan Xiao (2015) tata kelola yang baik berkontribusi untuk mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan dari peningkatan kinerja. Tata kelola yang baik dapat pula digunakan untuk mengatasi agency problem yang biasanya muncul dalam sebuah perusahaan (ACCA, 2015).

Selain masih sedikitnya UKM yang sadar mengenai pengelolaan yang baik, UKM juga

mengalami keterbatasan pengetahuan mengenai sistem informasi akuntansi. UKM masih sulit membangun sebuah sistem informasi akuntansi. Singh, et.al (2012) menyatakan bahwa menetapkan sistem informasi akuntansi sulit dilakukan di UMKM. Hal ini disebabkan karena skala ekonomi perusahaan, keadaan ekonomi yang kurang mapan untuk menyiapkan dan menjalankan sistem informasi. Faktanya, UMKM sangat membutuhkan informasi yang up-to-date, real, dan accountable untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Perubahan iklim bisnis yang tidak menentu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan UMKM harus selalu belajar beradaptasi dengan lingkungan bisnis. Menurut Hall (2011) sistem informasi akuntansi memberikan informasi tentang sumber daya yang berada di perusahaan. Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi dapat digunakan UMKM untuk menentukan keputusan pembelian bahan material baik jumlah maupun supplier yang akan digunakan. Bahkan informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk menentukan sasaran pasar yang akan dimasuki oleh UMKM tersebut.

Adanya pengelolaan UKM yang baik dan sistem informasi akuntansi diharapkan akan berdampak pada membaiknya sistem pengendalian manajemen. Bubbio, et all (2003) menyatakan sistem pengendalian manajemen merupakan strategi pengendalian yang dikenal secara sistematis dan berkelanjutan, hal ini menjadi perhatian manajemen karena merupakan konsekuensi strategis dari aktivitas sehari-hari. Hal ini sangat penting dilakukan karena akan berdampak pada keputusan pelaku usaha untuk membayarkan pajak.

Pembayaran pajak oleh UMKM di DIY untuk PDRB DIY tahun 2017 sebesar 79,64%. Bantul merupakan salah satu kabupaten yang ada di DIY dengan komposisi sebaran UMKM paling tinggi, yaitu 26%, diikuti Gunung Kidul, Kulonprogo, Sleman, dan terakhir Kota Yogyakarta. Hasil pemetaan Rakornas tahun 2018 yang dilakukan oleh pemerintah daerah DIY, menunjukkan bahwa lebih dari 50% UMKM yang ada di Yogyakarta masuk kategori mikro. Sehubungan dengan persebaran paling tinggi di Kabupaten Bantul, maka penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul.

Potensi yang dimiliki DIY saat ini menunjukkan bahwa besarnya potensi pajak yang dapat diterima negara. Selain itu, produk yang dihasilkan oleh UMKM DIY banyak merupakan produk tujuan ekspor merupakan negara-negara di kawasan ASEAN. Namun, hal yang menjadi kendala ialah pemilik UMKM kebanyakan tenaga terlatih bukan tenaga terdidik dan terlatih. Kondisi ini mengakibatkan sulit bagi para pelaku usaha untuk melaporkan kewajiban perpajakan.

Penelitian terdahulu tentang respon kepatuhan wajib pajak di Negiria Utara yang dilakukan oleh Atawodi dan Ojeka (2012) penelitian bahwa tarif pajak yang tinggi menjadi masalah bagi pengusaha sehingga mengakibatkan banyak pengusaha tidak taat dan tetap berada di sektor informal (tidak mendaftarkan usahanya ke instansi terkait).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bantul tahun 2017 menyebutkan bahwa penerimaan pajak penghasilan dari WP mencapai Rp310 M dalam setahun, sedangkan untuk UMKM sendiri memberikan kontribusi hanya Rp10 M. Jumlah WP UMKM tahun 2017 lebih dari 37 ribu UMKM dan memiliki NPWP sekitar 19 ribu UMKM (Purwanto,2017). Perkembangan UMKM di DIY meningkatkan capaian rasio kewirausahaan di DIY. Rasio capaian kewirausahaan untuk tahun 2017 ialah 6,41%. Perkembangan UMKM ini ternyata tidak sejalan dengan izin yang UMKM di Kabupaten Bantul. Pertumbuhan UMKM dan potensi yang dimiliki oleh UMKM menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Terjadi kesenjangan antara jumlah Wajib Pajak UMKM, jumlah Wajib Pajak yang memiliki izin usaha, dan penerimaan negara berupa setoran pajak Wajib Pajak UMKM. Sering kali hal ini dapat terjadi dikarenakan beberapa pelaku usaha kurang transparan (asas tata kelola perusahaan) atau tidak dapat menyusun laporan keuangannya

sehingga tidak dapat melaporkan dengan baik (sistem informasi akuntansi yang kurang baik). Faktor lain yang mungkin dapat terjadi ialah masalah yang terjadi dalam pengawasan aktivitas bisnis atau operasi perusahaan yang pada akhirnya dapat menyebabkan kesalahan dari pengambilan keputusan (sistem pengendalian manajemen yang kurang efektif).

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Usaha Kecil dan Menengah

Definisi UMKM menurut beberapa Negara dikelompokkan dalam pembagian ukuran jenis usahannya. Menurut pemerintah Singapura UKM merupakan usaha yang memiliki omzet penjualan tahunan tidak lebih dari Rp 100.000.000 atau minimal 30% pemegang saham local serta jumlah tenaga kerja kurang dari 200 orang. Malaysia mendefinisikan kategori UKM dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, category small medium manufacturing memiliki jumlah karyawan 5 sampai 75 orang atau jumlah omzet dalam satu tahun mulai dari Rp 300.000 hingga kurang dari Rp 15.000.000. Kedua, category medium manufacturing medium industry memiliki jumlah pegawai 75-200 orang atau jumlah modal saham sebesar Rp 15.000.000 hingga Rp 50.000.000. Ketiga, category small service and others sectors memiliki jumlah karyawan mulai 5 sampai 30 orang atau jumlah omzet dalam satu tahun mulai dari Rp 300.000 hingga kurang dari Rp 300.000. Keempat, category medium service and others sectors memiliki jumlah karyawan yang bekerja secara penuh mulai 30 sampai 75 orang atau jumlah omzet dalam satu tahun tidak lebih dari Rp 20.000.000.

Korea Selatan menentukan usaha yang masuk ke dalam kategori usaha kecil dan mikro ialah usaha dengan jumlah karyawan di bawah 300 orang dan jumlah asetnya kurang dari Rp 60.000.000. Usaha kecil dan menengah dapat didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perorangan atau rumah tangga maupun suatu badan dengan tujuan memproduksi barang atau jasa untuk diperjualbelikan secara komersial (Mariana, 2012).

Strategi Pengembangan Penatakelolaan and Keefektifan Pengendalian UKM

Lacob (2011) menyatakan bahwa sistem pengendalian manajemen di UKM tidak dilakukan secara formal dalam setiap aktivitas bisnis perusahaan. Strategi pengembangan penatakelolaan UKM yaitu upaya strategi pengembangan UKM yang kreatif untuk meraih peluang pasar yakni pembangunan prasarana, pembentukan kelompok usaha, pengembangan jaringan usaha, pemasaran, dan kemitraan, pengembangan sumber daya manusia, dan promosi.

Pembentukan kelompok usaha adalah upaya lainnya yang dibutuhkan dalam rangka menciptakan penatakelolaan UKM yang baik. Anggota kelompok dapat saling bertukar informasi dan pengetahuan mengenai usaha yang sedang dijalankan. Sejalan dengan Anthony dan Govindarajan (2004) bahwa sistem pengendalian manajemen yang baik akan mendukung implementasi strategi organisasi sehingga berdampak pada membaiknya sistem pengendalian manajemen di UKM.

Pemasaran dan promosi dilakukan melalui media massa, media elektronik, dan secara online. Sehingga pemanfaatan teknologi yang baik dan upaya pemasaran yang tepat diharapkan dapat meningkatkan tata kelola UKM tersebut dan dapat berdampak pada pengembangan UKM menjadi lebih besar dan menguntungkan.

H1: Strategi pengembangan penatakelolaan berpengaruh positif terhadap keefektifan pengendalian UKM

Sistem Informasi Akuntansi and Keefektifan Pengendalian UKM

Sistem informasi akuntansi harus dapat memberikan informasi yang cepat, lengkap, tepat dan memberikan informasi yang diperlukan secara lengkap (Rachmawati, 2013). Sistem

informasi akuntansi pada UKM adalah penerapan sistem informasi akuntansi diukur dengan indikator kepuasan pemakai, frekuensi pemakaian sistem, keterlibatan pemakai dalam pengembangan sistem informasi. Indikator bahwa sistem informasi akuntansi adalah setiap manajemen ingin mengambil selalu menggunakan data akuntansi yang tersedia. Selain itu karyawan ataupun manajer selalu dilibatkan untuk mengembangkan sistem informasi. Sebagian besar dari UKM masih sulit untuk menerapkan hal ini dikarenakan pengetahuan sumber daya manusia yang kurang memadai. Padahal sistem informasi adalah hal yang penting dalam rangka pencapaian keefektifan pengendalian UKM.

H2: Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap keefektifan pengendalian UKM

Keefektifan Pengendalian UKM and Ketaatan Wajib Pajak

KBBI efektif memiliki arti dapat membawa hasil, akibat, atau pengaruh. Anthony dan Govindarajan (2004) menyatakan bahwa sistem pengendalian manajemen merupakan proses dengan mana para manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya mengimplementasikan strategi organisasi. Proses pengendalian manajemen dilakukan melalui aktivitas perencanaan strategis, persiapan anggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Kombinasi kata efektif dan sistem pengendalian manajemen yang telah dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan keefektifan pengendalian manajemen ialah proses yang mempengaruhi setiap orang dalam organisasi yang bertujuan untuk memperoleh hasil dengan menerapkan strategi yang dimiliki perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Reheul dan Jorissen (2014) menyatakan bahwa pengendalian dan pengawasan manajemen setiap UKM berbeda dikarenakan lingkungan dan karakteristik organisasi bervariasi. Penelitian yang dilakukan oleh Mayegle dan Nguidjol (2017) menyatakan bahwa ketidakpastian lingkungan, posisi strategis, dan gaya kepemimpinan menentukan implementasi sistem pengendalian manajemen.

Lacob (2011) menyatakan sistem pengendalian manajemen di UKM tidak dilakukan secara formal dalam semua aktivitas bisnis perusahaan, karena biasanya hanya dilakukan di departemen akuntansi/keuangan, dan pelayanan administrasi dan umum perusahaan.

H3: Keefektifan pengendalian UKM berpengaruh positif terhadap ketaatan wajib pajak.

Strategi Pengembangan Penatakelolaan UKM and Kepatuhan Wajib Pajak

Onyali dan Okafor (2018) menyatakan bahwa tata kelola memiliki peran yang mendasar dalam memantau perbedaan peran dan memanfaatkan prosedur perencanaan dalam sebuah organisasi. Tata kelola merupakan cara dalam organisasi untuk mengawasi dan mengarahkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Shamsudin dan Noor (2012) menyatakan tata kelola perusahaan merupakan sinonim untuk lingkungan bisnis yang luas dan bagaimana tata kelola dapat memiliki relevansi untuk menelusuri UKM. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa kenaikan penjualan sering kali juga meningkatkan ketidakpatuhan wajib pajak untuk membayar pajak dengan menggunakan tax avoidance. Sehingga tata kelola mendorong perusahaan untuk melakukan transparansi untuk menghindari aktivitas tax aggressive yang akan menyebabkan ketidakpatuhan terhadap pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuhertiana, et. al (2016) menjelaskan bahwa semakin baik penerapan tata kelola perusahaan akan meningkatkan etika perpajakan. Kepatuhan pajak menurut Rustiyandingsih (2011) diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian yang dilakukan Sulistyowatie dan Pahlevi (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara penerapan tata kelolaan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4: Strategi pengembangan penatakelolaan UKM berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Sistem Informasi Akuntansi and Kepatuhan Wajib Pajak

Manaye (2016) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi memiliki fungsi penting bagi organisasi untuk pengukuran dan evaluasi efektivitas dan efisiensi dari aktivitas finansial. Penelitian yang dilakukan oleh Apriyanti et.al (2015) menunjukkan bahwa kualitas sistem informasi penerapan e-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di kota Bnadung berada pada kategori yang tinggi dengan menunjukkan nilai skor yang baik dan dapat berpengaruh pada aspek-aspek menenai sistem perpajakan.

Hasil penelitian Juita (2016) lima temuan. Pertama, UMKM merasa sistem informasi akuntansi penting. Kedua, masih banyak UMKM yang belum melakukan pencatatan dan pengelolaan informasi keuangan terpisah dari pemilik UMKM. Ketiga, praktik pelaksanaan pencatatan dan pengelolaan informasi keuangan dilakukan oleh pemilik. Keempat, sedikit UMKM yang mencatat dan menyimpan dokumen mengenai aktivitas usaha secara lengkap. Kelima, sumber daya dan pengelolaan keuangan yang belum memadai.

Syafariani dan Feryani (2012) di Kota Bandung menyatakan hal yang sama bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Penelitian yang sama dilakukan oleh Mas'ut dan Masrura (2018) di Kota Medan menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah.

H5: Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada semua Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Bantul. Jumlah responden diambil secara acak dari 100 manajer UKM sebagai sampel. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah respon kepatuhan wajib pajak. Variabel ini diukur dengan 10 item pertanyaan. Salah satu item pertanyaannya adalah "saya pernah menunggak pembayaran pajak" yang dijawab dengan menggunakan skala likert 1-5. Variabel independent pertama dalam penelitian ini adalah strategi pengembangan penatakelolaan UKM. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 1-5, salah satu item pertanyaan dalam penelitian ini adalah "Kami kelompok UKM sudah membentuk kelompok usaha untuk memajukan usaha ke depan". Jumlah item pertanyaan dalam variabel ini adalah 8 item.

Variabel independent kedua dalam penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi pada UKM. Variabel ini diukur dengan 4 item pertanyaan dengan skala likert 1-5. Salah satu pertanyaan yang tersedia adalah "Setiap manajemen ingin mengambil keputusan selalu menggunakan data akuntansi yang tersedia". Variabel independent yang ketiga adalah keefektifan pengendalian manajemen pada UKM. Variabel ini diukur dengan 4 item pertanyaan dan masing-masing item diukur dengan skala likert 1-5. Alat analisis data yang digunakan menggunakan Analisis Jalur (Path Analysis). Berikut ini adalah bagan model penelitian:

HASIL PENELITIAN

Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran setiap obyek penelitian yang diamati. Hasil statistik deskriptif ditunjukkan pada tabel berikut ini yang terdiri dari variabel strategi pengembangan penatakelolaan (X1), sistem informasi akuntansi (X2), keefektifan pengendalian UKM (X3), dan respon kepatuhan wajib pajak (Y).

Tabel berikut ini nampak bahwa masing-masing variabel mempunyai data 100. Variabel respon kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Nilai minimum pada variabel ini adalah 25 dan nilai maksimumnya adalah 50. Rata-rata responden menjawab dengan respon 35,15 dengan standar deviasi sebesar 4,547. Varians data dalam variabel ini adalah 20,647.

Variabel independen pertama dalam penelitian ini adalah strategi pengembangan penatakelolaan. Nilai minimum jumlah jawaban responden adalah 12 sedangkan nilai maksimumnya adalah 38. Rata-rata jumlah jawaban responden adalah 24,27 dengan standar deviasi 5,284. Varians data dalam variabel ini adalah 27,916.

Variabel sistem informasi akuntansi memiliki nilai minimum jawaban responden sebesar 8 dan nilai maksimum sebesar 20. Rata-rata jumlah jawaban responden pada variabel ini adalah 13,52 sedangkan standar deviasi dalam penelitian ini adalah 3,815. Varians dalam variabel ini adalah 14,555.

Variabel independen ketiga dalam penelitian ini mempunyai jumlah nilai minimum sebesar 4 dengan nilai maksimum sebesar 20. Rata-rata responden menjawab dengan total 12,03. Standar deviasi variabel keefektifan pengendalian UKM adalah 2,761 sedangkan variansnya bernilai 7,625.

Hasil pengujian H1 sesuai dengan perhitungan yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, menunjukkan pengaruh strategi pengembangan penatakelolaan (X1) terhadap keefektifan pengendalian UKM (X3). Hubungan antara strategi pengembangan penatakelolaan terhadap keefektifan pengendalian UKM ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar -0,247 dengan signifikansi sebesar 0,001. Strategi pengembangan penatakelolaan berpengaruh negatif terhadap keefektifan pengendalian UKM, dengan demikian H1 ditolak. Hal ini terjadi dikarenakan sistem tata kelola yang baik tidak selalu meningkatkan keefektifan pengendalian UKM. Pembangunan prasarana, pembentukan kelompok usaha, pengembangan jaringan usaha, pemasaran, dan kemitraan, pengembangan sumber daya manusia, dan promosi tidak berbanding lurus dengan membaiknya pengendalian anggaran dan biaya yang diterapkan oleh UKM.

Rumusan H2 adalah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap keefektifan pengendalian UKM. Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap keefektifan pengendalian UKM ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,303 dengan signifikansi sebesar 0,002. Hasil ini menunjukkan bahwa H2 diterima. Apabila UKM telah dapat memaksimalkan penggunaan data akuntansi untuk pengambilan keputusan maka pengendalian manajemen untuk membuat keputusan pembuatan anggaran menjadi semakin baik.

Pada model pertama R-square bernilai 0,148, hasil ini menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh X1 dan X2 terhadap X3 adalah sebesar 14,8% sementara sisanya 85,2% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian, F_1 senilai 0,923. Koefisien jalur pada Model I ini adalah 0,923.

H3 dalam penelitian ini adalah keefektifan pengendalian UKM berpengaruh terhadap respon kepatuhan wajib pajak. Hubungan kedua variabel menunjukkan korelasi sebesar -0,236 dengan signifikansi sebesar 0,028. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tepat pembuatan anggaran dan biaya tidak menggambarkan peningkatan respon kepatuhan wajib pajak, sehingga H3 ditolak.

H4 pada penelitian ini adalah strategi pengembangan penatakelolaan berpengaruh terhadap respon kepatuhan pajak. Hasil pengujian korelasi menunjukkan bahwa sistem pengembangan penatakelolaan berkorelasi dan respon kepatuhan pajak dengan nilai korelasi sebesar 0,105 dengan signifikansi sebesar 0,299. Hasil ini menunjukkan bahwa H4 ditolak.

Pengembangan sarana dan prasarana yang baik tidak selalu dapat mendukung sebuah UKM untuk meningkatkan respon kepatuhan pajak.

Hasil pengujian H5 adalah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap respon kepatuhan wajib pajak. Hubungan korelasi kedua variabel tersebut adalah 0,918 dengan signifikansi sebesar 0,057. Hasil ini menunjukkan bahwa H5 diterima. Keputusan pemilik usaha untuk selalu membuat keputusan berdasarkan informasi akuntansi yang tersedia berdampak pada peningkatan kepatuhan pelaku usaha untuk membayar pajak.

Pada model kedua R-square bernilai 0,091, hasil ini menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 9,1% sementara sisanya 90,9% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian, e^2 senilai 0,953. Nilai jalur pada Model II ini adalah 0,953.

Jika membandingkan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung variabel penatakelolaan UKM terhadap respon kepatuhan pajak sebesar 0,105 lebih tinggi dibandingkan pengaruh tidak langsung variabel penatakelolaan UKM terhadap respon kepatuhan pajak melalui efektivitas pengendalian manajemen sebesar 0,058. Sehingga pengaruh total variabel penatakelolaan terhadap respon kepatuhan pajak adalah 0,163.

Selanjutnya terdapat pengaruh langsung sistem informasi akuntansi terhadap respon kepatuhan pajak dengan koefisien sebesar 0,198 dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung sistem informasi akuntansi terhadap respon kepatuhan pajak melalui keefektifan pengendalian manajemen UKM sebesar -0,071. Sehingga pengaruh total variabel sistem informasi akuntansi terhadap respon kepatuhan pajak adalah 0,127.

Peneliti juga menguji pengaruh tidak langsung penatakelolaan UKM (X1) terhadap keefektifan pengendalian manajemen (Y) melalui sistem informasi akuntansi (X2) hasilnya menunjukkan terdapat nilai koefisien sebesar 0,01, sedangkan pengaruh tidak langsung penatakelolaan UKM (X1) terhadap respon kepatuhan pajak (Z) melalui sistem informasi akuntansi (X2) hasilnya menunjukkan terdapat nilai koefisien sebesar 0,06.

Pembahasan

Keefektifan pengendalian manajemen pada UKM adalah suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang terjadi pada seluruh kegiatan organisasi dan berjalan terus-menerus. Hal yang digunakan untuk mengukur keefektifan pengendalian manajemen yaitu yang berhubungan dengan penentuan apakah tujuan perusahaan yang ditetapkan telah tercapai. Lacob (2011) menyatakan bahwa sistem pengendalian manajemen di UKM tidak dilakukan secara formal dalam setiap aktivitas bisnis perusahaan. Strategi pengembangan penatakelolaan UKM yaitu upaya strategi pengembangan UKM yang kreatif untuk meraih peluang pasar yakni pembangunan prasarana, pembentukan kelompok usaha, pengembangan jaringan usaha, pemasaran, dan kemitraan, pengembangan sumber daya manusia, dan promosi. Pembangunan prasarana adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk pengembangan penatakelolaan UKM. Adanya prasarana yang baik akan menciptakan sistem tata kelola yang baik pula. Sarana yang dibutuhkan di UKM adalah akses jaringan internet yang tersedia untuk memasarkan produk atau jasa UKM ini. Pembentukan kelompok usaha adalah upaya lainnya yang dibutuhkan dalam rangka penciptaan penatakelolaan UKM yang baik. Hal ini tercermin dalam pembentukan kelompok usaha dalam rangka memajukan usaha ke depan. Anggota kelompok dapat saling bertukar informasi dan pengetahuan mengenai usaha yang sedang dijalankan. Sejalan dengan Anthony dan Govindarajan (2004) bahwa sistem pengendalian manajemen yang baik akan mendukung implementasi strategi organisasi sehingga berdampak pada membaiknya sistem pengendalian manajemen di UKM. Pemasaran dan promosi

dilakukan melalui media massa, media elektronik, dan secara online. Sehingga pemanfaatan teknologi yang baik dan upaya pemasaran yang tepat diharapkan dapat meningkatkan tata kelola UKM tersebut dan dapat berdampak pada pengembangan UKM menjadi lebih besar dan menguntungkan. Namun pengujian hasil statistic menunjukkan bahwa strategi pengembangan penatakelolaan tidak berpengaruh terhadap keefektifan pengendalian UKM diterima

Sistem informasi akuntansi harus dapat memberikan informasi yang cepat, lengkap, tepat dan memberikan informasi yang diperlukan secara lengkap (Rachmawati, 2013). Sistem informasi akuntansi pada UKM adalah penerapan sistem informasi akuntansi diukur dengan indikator kepuasan pemakai, frekuensi pemakaian sistem, keterlibatan pemakai dalam pengembangan sistem informasi. Indikator bahwa sistem informasi akuntansi adalah setiap manajemen ingin mengambil selalu menggunakan data akuntansi yang tersedia. Selain itu karyawan ataupun manajer selalu dilibatkan untuk mengembangkan sistem informasi. Sebagian besar dari UKM masih sulit untuk menerapkan hal ini dikarenakan pengetahuan sumber daya manusia yang kurang memadai. Padahal sistem informasi adalah hal yang penting dalam rangka pencapaian keefektifan pengendalian UKM. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap keefektifan pengendalian UKM.

Respon kepatuhan pajak adalah terpenuhinya ketaatan dalam melaksanakan ketentuan maupun peraturan perpajakan. Terdapat beberapa karakteristik sebuah UKM yang baik adalah (1) simplicity adalah sistem pajak mudah untuk diadministrasikan, (2) proporsional adalah kepatuhan pajak, pembayaran pajak harus sesuai dengan proporsi kondisi usaha yakni kecil dan menengah, (3) certainty adalah kewajiban pajak penting bagi UKM untuk membuat keputusan yang pasti, (4) sistem pelaporan pajak ramah untuk digunakan, (5) netralitas pajak, (6) keadilan (Ponorica dan Al-Saedi, 2015). Penerapan self assesment system menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya (Hardiningsih, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa ketika pemilik usaha sudah mempunyai sistem pengendalian yang baik maka seharusnya kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Dengan terujinya hipotesis yang diajukan maka dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa:

- 1) Penatakelolaan berpengaruh positif terhadap Keefekifan pengendalian manajemen
- 2) Sistem informasi akuntansi manajemen berpengaruh positif terhadap keefektifan pengendalian manajemen UKM. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang digunakan pelaku UKM untuk membuat anggaran dan biaya akan berdampak pada keefektifan pengendalian usaha yang dilakukan pelaku UKM.
- 3) Selain itu implikasi penelitian ini juga menemukan secara parsial bahwa Penatakelolaan, Sistem informasi akuntansi manajemen dan keefektifan pengendalian manajemen berpengaruh terhadap respon kepatuhan wajib pajak.

Rekomendasi

Melihat sistem informasi akuntansi manajemen dan keefektifan pengendalian manajemen berpengaruh terhadap respon kepatuhan wajib pajak. Hal ini perlu direkomendasikan bahwa Sistem informasi akuntansi dapat merespon kepatuhan wajib pajak. Kemampuan pelaku UKM untuk membuat anggaran dan biaya turut meningkatkan respon wajib pajak untuk membayar pajak. Oleh karena itu para peneliti selanjutnya, terhadap para

manajer UKM diperlukan pendampingan para pelaku usaha UKM dalam membuat sistem informasi akuntansi yang tepat karena secara signifikan mempengaruhi respon kepatuhan wajib pajak.

Disadari masih banyak kelemahan dalam penelitian ini sehingga perlu adanya penelitian lanjutan sebagai bahan pembandingan dan penyempurnaan hasil penelitian ini dengan memperluas obyek penelitian di seluruh Kabupaten dan Kota DIY. Selain itu penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel yang berkaitan dengan nilai-nilai personal yang dimiliki, seperti jiwa kewirausahaan.

REFERENSI

- Adhitama, S., & Aulia, D. (2017). Analisis penerapan Sistem Pengendalian Manajemen dengan Model Empat Tuas Kontrol di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai. *Info Artha*, 35-46.
- Atawodi, O., & Ojeka, S. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak antara Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Nigeria Tengah Utara. *Jurnal Internasional Bisnis dan Manajemen*, 87-96.
- Darmawati, D., & Oktaviana, A. (2018). Pengaruh Penerapan Akuntansi UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM e-Commerce. *Seminar Nasional Cendekiawan* (hlm. 919-925). Jakarta: Trisakti.
- Dawes dan Rowley. 1999. Evaluasi Negatif Kualitas Layanan - Kerangka Kerja forententifikasi dan Respon, *Jurnal Praktek Pemasaran: Ilmu Pemasaran Terapan*, Vol. 5 (2), Hal. 42-55.
- Estiningsih, W. (2014). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Usaha Kecil Menengah (UKM). *Sosio e- Kons*, 56-65.
- Ghozali, Imam. 2008. *Pemodelan Persamaan Struktural Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS)*, edisi 2. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul; Achmad Cahyono dan Muh. Fakri Husein. 2009. *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi Revisi. Pwnwrbit STIE-IKPN.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 126 - 142.
- Indrawan, R., & Binemas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM Pengertian tentang Pajak dan Pengetahuan Pajak tentang Kepatuhan dengan Pembayar Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 419-428.
- Juita, V. (2016). Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi pada Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) Sektor Jasa Perdagangan di Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 120-137.
- Mahmudah, M. (2017). Analisis Dampak Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Semarang. *UNDIP SKRIPSI*.
- Mardiasmo. 2010. *Perpajakan*, Edisi Revisi: Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mas'ut, & Masrura, A. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 29-37.
- Maulinda, A., & Lasmana, M. (2015). Faktor-faktor yang Memepengaruhi Tingkat Penghasilan Kena Pajak Badan Pedagang Pengecer di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 44-53.
- Meiliana, K., & Dewi, A. (2015). Analisis Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Pada Usaha Kecil dan Menengah di Yogyakarta. *Modus*, 29-40.

- Mutai, M. (2013). Faktor Penentu Kepatuhan Pajak Di Antara Usaha Kecil dan Menengah di Negara Uasin-Ginshu. UNIVERSITAS PENELITIAN NAIROBI , 1-69.
- Mwangi, P. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Di antara Usaha Kecil dan Menengah di Kawasan Industri Nairobi, Kenya. Universitas Tesis Nairobi , 1-65.
- Nurdiyana. (2008). Pengaruh Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya dengan Akuntabilitas Kinerja Sebagai Variabel Moderating. SKRIPSI UIN SYARIFHIDAYATULLAH JAKARTA , 1-62.
- Nurhadi, H. (nd). Penilaian Pengendalian Intern dalam Pemeriksaan Pajak.
- Oktaviani, R., & Adellina, S. (2016). Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan* , 136-145.
- Onyali, Okafor, C., & Gloria, T. (2018). Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak dari Perusahaan Manufaktur yang Dikutip di Bursa Efek Nigeria. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi Asia* , 1-20.
- Pahlevi, R., & Sulistyowatie, S. (2018). Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Sistem Pelaporan dan Risiko Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sleman. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* , 152-160.
- Parasuraman, A. 2007. Riset Pemasaran , 3 Edisi 2 nd ed. Penerbit: Houghton Mifflin.
- Parasuraman, A., 2007. Riset Pemasaran, Buku 3 Edisi ke-2 ed. Penerbit: Houghton Mifflin
- Poerwanto, Hendra. 2000. Mengevaluasi Kualitas Layanan dengan Model 4D, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* , Vol. 2 (2), hal. 59-67.
- Ponorica, A., & Al-Saedi, A. (2015). Pentingnya Sistem Perpajakan untuk Kepatuhan TAX UKM. *Manajemen dan Inovasi Untuk Keunggulan Kompetitif* (hlm. 129-136). Bukares Romania: Konferensi Manajemen Internasional.
- Pradini, A., & Nurcahyanto, H. (2018). Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Surat Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Candisari. *Jurnal Kebijakan Publik dan Tinjauan Manajemen* .
- Purnawan, A., & Adillah, S. (2014). Kebijakan Pajak Daerah Berdasarkan Keanggotaan untuk Mendorong Persetujuan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Jawa Tengah. *Jurnal Pembaruan Hukum* , 241-251.
- Rangkuti, Freddy. 2001. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis , Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ramdan, A. (2017). Informasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Orang Asing Satu Menurut Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* , 12-27.
- Reheul, A.-M., & Jorissen, A. (2014). Apakah Sistem Pengendalian Manajemen di UKM Mencerminkan Demografi CEO? *European Journal of Marketing* , 470-488.
- Romney, Marshall B dan Paul John Steinbart . 2017 . Sistem Informasi Akuntansi , Salemba Empat , Jakarta.
- Sadino, Bob. 2016. HYPERLINK "<https://dodimawardi.wordpress.com/2017/07/19/terbit-buku-belajar-goblok-dari-bob-sadino-edisi-baru/>" Terbit Buku Belajar Goblok dari Bob Sadino edisi baru . Penerbit : Gramedia .
- Saptowibowo, Son Firriadi. 2012. Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Pemahaman Akuntansi Pajak serta Dampaknya terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan perwakilan Akun sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada UMKM di Kludan Sidoharjo) . Seminar Prosiding Nasional Akuntansi, UPN "Veteran" Jawa Timur. SINAU ISBN .: 978-979-18670-5-4, hal. 193-206.

- Sasono, A., Alimudin, A., Kamisutara, M., & Inayati, I. (nd). Sistem Informasi Akuntansi Keuangan untuk UKM dengan Pelaporan Keuangan Berbasis Model SAK ETAP.
- Setiawan, A., & Ningrum, A. (2018). Analisis Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Komputerisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. *Manajemen, Akuntansi dan Perbankan*, 614-627.
- Shamsudin, S., & Noor, R. (2012). Tata Kelola Perusahaan dan Kepatuhan Pajak: Studi pada Usaha Kecil Menengah (UKM) di Malaysia. *Makalah Konferensi*, 1-5.
- Simanungkalit, T. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengaruh Wajib Pajak PBB P2 di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 252-265.
- Sinain, S. (2013). Analisis Efektivitas Pengendalian Manajemen Penggajian PT. PLN (Persero) Rayon Tomohon. *Jurnal EMBA*, 1221-1230.
- Subagio, Istuningtyas dan Gendut Sukarno. 2012. *Seminar Prosiding Akuntansi Nasional UPN "Veteran" Jawa Timur*. ISBN: 978-979-18670-5-4.
- Subandi, H., & Fadhil, M. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa di Kota Batu. *Berkala Akuntansi dan keuangan Indonesia*, 1-16.
- Sudiartana, I., & Mendra, N. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak di Sektor UKM: Teori Perilaku yang Direncanakan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 219-230.
- Sumarsan, Thomas. 2011. *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi 2. Penerbit: Indek, Jakarta.
- Susanti, & Utami, T. (nd). Peran Kepemimpinan, Kualitas Pelayanan Petugas Pemungut Pajak, dan Motivasi Wajib Pajak dalam Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 1-27.
- Suyono, E. (2018). Pentingnya Sistem Pengendalian Manajemen dalam Pengelolaan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 64-83.
- Syafariani, R., & Feryani, E. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. *Jurnal Teknologi dan Informasi UNIKOM*, 83-95.
- Talumewo, W., Nangoi, G., & Tirayoh, V. (2018). Analisis Atas Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen Pemberian Kredit pada PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 610-619.
- Tambe, S., Sunarya, H., & Yusuf, A. (2018). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat dan Dinas Pendapatan Daerah Kalabahi Kabupaten Alor. *Jurnal Akuntansi (JA)*, 60-78.
- Wedesango, N., A, M., C, M., & VO, W. (2018). Kepatuhan Pajak Usaha Kecil dan Menengah Melalui Sistem Penilaian Sendiri: Masalah dan Tantangan. *Akademi Akuntansi dan Jurnal Studi Keuangan*, 1-15.
- Yuhertiana, I., Setyaningrum, R., Hastuti, S., & Sundari, S. (2016). Etika, Organisasi, dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 131 -141.

ANALISIS TINGKAT KEDISIPLINAN MAHASISWA DALAM MENGHADIRI PERKULIAHAN PADA JURUSAN MANAJEMEN FEB UPN "VETERAN" YOGYAKARTA

Ignatius Agus Suryono, Sudaryatie, Sri Kussujaniatun, Anis Sitihartati

Prodi Manajemen UPN "Veteran" Yogyakarta,

agus.suryono@upnyk.ac.id, sudaryatie@upnyk.ac.id, sri.kussujaniatun@upnyk.ac.id,

anis.sitihartati@upnyk.ac.id

Abstract

This study aims to determine and analyze the level of student discipline in attending lectures in the Management Department of the Faculty of Economics and Business at UPN Veteran Yogyakarta. The population in this study was all students of the Management Faculty of Economics and Business UPN "Veteran" Yogyakarta. The sampling technique used is Convenience Sampling. The sample size was 110 respondents. Tools for descriptive analysis using frequency distribution. The results of the study found that undisciplined students signature in the form of attendance were falsified by their friends (fake absences) and the delay in attending classes ranged from 1-20 minutes in the Management Department of the Faculty of Economics and Business UPN "Veteran" Yogyakarta.

Keywords: discipline, lectures

PENDAHULUAN

Perkuliah merupakan proses transfer ilmu dari seorang pengampu matakuliah kepada mahasiswa/i, harapan suatu institusi dalam rangka pembelajaran kepada mahasiswa, salah satunya adalah mahasiswa/i mengerti, paham, dan dapat menerapkan ilmunya pada dunia nyata, untuk membangun negeri ini agar lebih baik. Salah satu cara proses pembelajaran in door yaitu pembelajaran yang dilakukan dalam suatu ruangan. Lamanya waktu pembelajaran perkuliahan dalam ruangan kelas bervariasi tergantung dari jumlah satuan kredit semester (sks) yang ditentukan untuk satu matakuliah ada satu, dua, tiga, empat, tujuh dan lainnya, setiap sks yang ditentukan dikaitkan dengan lamanya proses pembelajaran satu sks 50 menit (Rektor, 2010). Dalam satu perkuliahan pada umumnya terbagi menjadi beberapa bagian meskipun tidak secara eksplisit tertera dalam satuan kredit semester antara lain prolog materi, pendalaman materi dan kesimpulan di akhir perkuliahan. Prolog materi disampaikan oleh pengampu matakuliah pada awal perkuliahan berkisar antara mulai kuliah sampai 5-10 menit, jika mahasiswa hadir sebelum atau tepat saat perkuliahan dimulai maka tingkat pemahaman seorang mahasiswa secara keseluruhan terhadap materi dalam satu bab yang akan dibahas akan lebih mudah dari pada mahasiswa/i yang terlambat, karena prolog pengampu matakuliah merupakan gambaran keseluruhan materi dalam satu bab yang akan dibahas, jadi prolog merupakan bagian penting dari suatu proses adopsi pembelajaran. Prolog dapat berupa: tujuan mengapa bab yang akan dibahas ini penting untuk dipelajari, manfaat bab yang akan dibahas, kemudian review keterkaitan dengan materi bab sebelumnya dan materi bab selanjutnya, kemudian konsep-konsep atau metode-metode yang akan dibahas pada pertemuan tersebut, yang terakhir adalah outcome dari materi pada bab yang akan

dibahas (Suryono, 2010). Prolog dari pengampu matakuliah ini sangat penting disampaikan oleh seorang pengampu mata kuliah, agar mahasiswa/i dalam proses pembelajaran akan lebih mudah mengerti, memahami, dan mendalami materi dalam bab tersebut. Prolog matakuliah merupakan suatu kerangka pikir dalam satu bab, prolog ini akan memudahkan mempengaruhi tingkat pemahaman dan ketrampilan materi seorang mahasiswa/i dalam suatu pembelajaran. Keterkaitan tingkat kemudahan adopsi pembelajaran mahasiswa/i dalam kelas dimulai dari tingkat kedisiplinan mahasiswa dalam menghadiri perkuliahan sebelum kuliah dimulai (Suryono, dkk, 2019). Mahasiswa yang hadir terlambat akan lebih sulit memahami, mengadopsi materi bab yang akan dibahas, karena mahasiswa tidak mengetahui tujuan, manfaat, konsep-konsep atau metode-metode dan keterkaitan materi dengan bab lainnya yang disampaikan pengampu mata kuliah dalam prolog. Dari hasil observasi awal dari beberapa ketua kelas dari beberapa matakuliah yang berbeda ditemukan beberapa indikasi menurunnya tingkat kedisiplinan mahasiswa/i dalam menghadiri perkuliahan. Dari hasil observasi awal yang dilakukan selama dua semester tersebut menunjukkan turunnya tingkat kedisiplinan mahasiswa/i berupa titik absen, hampir 30% mahasiswa/i dari jumlah dalam satu kelas selalu ada yang hadir setelah perkuliahan dimulai.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

untuk mengukur dan menganalisis tingkat kedisiplinan kehadiran mahasiswa/i dalam menghadiri perkuliahan.

untuk mengetahui jenis ketidak disiplin mahasiswa/i dalam menghadiri perkuliahan.

untuk mengetahui penyebab mengapa mahasiswa tidak disiplin dalam menghadiri perkuliahan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kedisiplinan

Para Ahli memiliki pendapat masing-masing berikut ini beberapa pengertian disiplin menurut para ahli, yaitu:

Menurut James Drever dari sisi psikologis, disiplin adalah kemampuan mengendalikan perilaku yang berasal dari dalam diri seseorang sesuai dengan hal-hal yang telah di atur dari luar atau norma yang sudah ada. Dengan kata lain, disiplin dari segi psikologis merupakan perilaku seseorang yang muncul dan mampu menyesuaikan diri dengan aturan yang telah ditetapkan.

Menurut Parrr Fairshild dari sisi sosiologi, disiplin terdiri dari dua bagian, yaitu disiplin dari dalam diri dan juga disiplin sosial. Keduanya saling berhubungan satu sama lain, sehingga seseorang yang mempunyai sikap disiplin merupakan orang-orang yang dapat mengarahkan perilaku dan perbuatannya berdasarkan patokan atau batasan tingkah laku tertentu yang diterima dalam kelompok atau lingkup sosial masing-masing. Pengaturan tingkah laku tersebut bisa diperoleh melalui jalur pendidikan dan pembelajaran.

Menurut John Macquarrie, 1967 dari segi etika, disiplin adalah suatu kemauan dan perbuatan seseorang dalam mematuhi seluruh peraturan yang telah terangkai dengan tujuan tertentu.

Dari ketiga pengertian disiplin di atas, bisa kita simpulkan bahwa dari sudut pandang manapun, disiplin merupakan sikap yang wajib ada dalam diri semua individu. Karena disiplin adalah dasar perilaku seseorang yang sangat berpengaruh besar terhadap segala hal, baik urusan pribadi maupun kepentingan bersama dan untuk memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi dalam mengerjakan apapun, maka dibutuhkan latihan dengan kesadaran dari dalam diri akan pentingnya sikap disiplin sehingga menjadi suatu landasan bukan hanya pada saat

berkerja, tetapi juga dalam berperilaku sehari-hari.

Mahasiswa merupakan generasi muda memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam perkembangan pembangunan bagi bangsa dan negara. Salah satu pengukur baik buruknya suatu negara, dapat dilihat dari kualitas pemudanya, karena mereka adalah generasi penerus yang harus mempunyai karakter kuat untuk membangun negaranya, memiliki kepribadian tinggi, semangat nasionalisme, mampu memahami pengetahuan dan teknologi untuk bersaing secara global. Mahasiswa merupakan salah satu generasi muda harapan bangsa, pentingnya peran pemuda dalam kemajuan suatu bangsa. Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas (Hartaji, 2012: 5). Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI), mahasiswa didefinisikan sebagai orang yang belajar di Perguruan Tinggi (Kamus Bahasa Indonesia Online, kbki.web.id). Menurut Siswoyo (2007: 121) mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip yang saling melengkapi. Dari dimensi usia, kelompok mahasiswa S1 rata-rata berusia 17-23 tahun tergolong sebagai mahasiswa dalam tahapan dewasa muda. Usia mahasiswa merupakan usia yang amat peka terhadap keadilan. Norma-norma yang diperoleh dari rumah akan mereka uji kebenarannya dimana-mana, di kampus, maupun di luar kampus. Dikaitkan dengan perkembangan psikologi usia mahasiswa tersebut, didalam proses penanaman norma-norma pun harus kita sesuaikan dengan perkembangan idealismenya. Proses pembelajaran dengan lebih banyak intervensi dari dosen akan tidak efektif. Yang mereka ingin ketahui adalah pembuktian apakah orang lain juga berpegang pada norma yang sama atau sebaliknya (habitiasi). Kaitan dengan ciri perkembangan psikologi usia mahasiswa, dimana ada kecenderungan ingin membuktikan apakah orang dewasa (pengampu matakuliah) juga melaksanakan norma-norma yang mereka terima maka keteladanan pengampu matakuliah juga sangat menentukan dalam keberhasilan pembentukan karakter disiplin mahasiswa. Contohnya pengampu matakuliah pun harus menunjukkan kedisiplinan pada mahasiswa (misal tepat waktu mengajar, menyerahkan nilai dan lain lain). Karena ini akan menyebabkan pengampu matakuliah tidak dihargai oleh mahasiswa, yang pada gilirannya nilai-nilai yang diajarkan tidak dipercaya kebenarannya.

Peraturan Kedisiplinan Mahasiswa

Keberhasilan membentuk mahasiswa yang berkarakter disiplin kuat tidak hanya ditentukan para dosen, namun juga ditentukan oleh subsistem yang lain dalam perguruan tinggi. Bagaimana para pemangku jabatan (Birokrat), membuat kebijakan yang mendukung pengembangan karakter disiplin mahasiswa. Begitu juga tenaga pendukung (tenaga kependidikan) memberikan pelayanan yang baik dan tulus kepada mahasiswa sebagai wujud nyata kepedulian dan kerendahan hati serta keteladanan. Metode pembelajaran yang baik juga perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Apapun yang diupayakan perguruan tinggi, subsistem mahasiswa merupakan penentu terciptanya karakter disiplin yang kuat. “Character isn’t inherited. One builds its dayly by the way one thinks and acts, though by though, action by action” (Helen G Douglas). Karakter tidak diwariskan sesuatu yang dibangun secara kesinambungan hari demi hari melalui pikiran demi pikiran, tindakan demi tindakan. Perilaku yang diulang-ulang akan menghasilkan kebiasaan, kebiasaan yang diulang-ulang akan menghasilkan karakter. maka agar terbentuk karakter disiplin mahasiswa yang kuat maka

didalam proses pembelajaran, kebiasaan-kebiasaan yang secara objektif maupun instrinsik baik perlu dibiasakan. Pedoman perkuliahan merupakan salah satu bentuk aturan yang dibuat untuk membentuk karakter disiplin mahasiswa/i seperti jumlah tatap muka setiap semesternya yang wajib mengikuti proses pembelajaran perkuliahan sekurang-kurang 12 kali kegiatan tatap muka dari 16 kali pertemuan tatap muka. (Rektor, 2010)

Menurut Wikipedia (1993) bahwa disiplin sekolah “refers to students complying with a code of behavior often known as the school rules”. Yang dimaksud dengan aturan sekolah (school rule) tersebut, seperti aturan tentang standar berpakaian (standards of clothing), ketepatan waktu, perilaku sosial dan etika belajar/kerja. Pengertian disiplin sekolah kadangkala diterapkan pula untuk memberikan hukuman (sanksi) sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap aturan, meski kadangkala menjadi kontroversi dalam menerapkan metode pendisiplinannya, sehingga terjebak dalam bentuk kesalahan perlakuan fisik (physical maltreatment) dan kesalahan perlakuan psikologis (psychological maltreatment), sebagaimana diungkapkan oleh Irwin A. Hyman dan Pamela A. Snock dalam bukunya “Dangerous School” (1999). Belajar merupakan kegiatan yang bersifat universal dan multidimensional. Dikatakan universal karena belajar bisa dilakukan siapapun, kapan pun, dan dimana pun. Karena itu, bisa saja siswa merasa tidak butuh dengan proses pembelajaran yang terjadi dalam ruangan terkontrol atau lingkungan terkendali. Waktu belajar bisa saja bukan waktu yang dikehendaki anak.

METODE PENELITIAN

Populasi dan sampel dan teknik sampling, dalam penelitian ini populasi adalah seluruh mahasiswa/i prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Yogyakarta, sampelnya adalah sebagian mahasiswa/i prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan convenience sampling. Besaran sampel berjumlah 110 responden Teknik analisis data diskriptif menggunakan distribusi frekuensi (Ghozali, 2013).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan dari 110 mahasiswa/i yang dijadikan sample dalam penelitian ini: 57 mahasiswa/i pernah melakukan titip absen dan 53 mahasiswa/i belum pernah titip absen. Dari 57 mahasiswa/i yang pernah melakukan titip absen: 11 mahasiswa/i pernah 3 kali titip absen, 9 mahasiswa/i pernah titip absen 2 kali, dan sisanya pernah melakukan titip absen 1 kali. Alasan dari 57 mahasiswa/i pernah melakukan titip absen: alasan 39 mahasiswa/i karena adanya peluang dosen tidak pernah atau hanya kadang-kadang satu kali-tiga kali mengecek kehadiran selama perkuliahan berlangsung, karena materi terlalu banyak waktu habis, saat dosen melakukan pengecekan kehadiran mahasiswa berani tunjuk jari dua kali tidak ketahuan, alasan 11 mahasiswa/i terpaksa titip absen karena ada acara lain yang waktunya bertepatan dengan jadwal kuliah, 7 mahasiswa/i belum mengerjakan tugas dosen/mahasiswa/i tidak aktif dalam kelompok presentasi, alasan 10 mahasiswa/i titip absen karena sakit/tidak enak badan saat mau berangkat kuliah tetapi tidak memiliki surat opname rumah sakit karena sakit ringan. Dari 110 responden dalam penelitian ini yang pernah terlambat masuk kuliah sebanyak 73 mahasiswa/i dan yang selalu datang sebelum kuliah dimulai 37 mahasiswa/i. Dari 73 mahasiswa/i yang terlambat: 17 mahasiswa/i terlambat > 20 menit, yang terlambat >10 menit 39 mahasiswa/i, yang terlambat >0-10 menit 17 mahasiswa/i.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini menyimpulkan sebagian dari responden dalam penelitian ini

mempunyai tingkat kedisiplinan yang kurang dalam ketepatan waktu dan menghadiri perkuliahan di jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN "Veteran" Yogyakarta, sebagian kecil responden disiplin, mayoritas kurang disiplin sering terlambat dan sebagian tidak disiplin karena titip absen.

SARAN

Kedisiplinan ketepatan waktu menghadiri perkuliahan mahasiswa/i harus ditingkatkan, agar transfer ilmu yang diberikan pengampu matakuliah dapat diadopsi maksimal.

Harus diupayakan suatu cara atau metode atau sistem untuk meningkatkan kedisiplinan mahasiswa dengan motivasi riil atau hukuman riil, agar mahasiswa/i selalu hadir sebelum perkuliahan dimulai dan tidak lagi melakukan titip absen.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Siswoyo. (2007). Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: UNY Pers.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Harry Partt Fairshild, Dictionary of Sociology (New Jersey : Little Field. Adam & Co.,1977)
- Hartaji, Damar A. (2012). Motivasi Berprestasi Pada Mahasiswa yang Berkuliah Dengan Jurusan Pilihan Orangtua. Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma.
- Hyman Irwin A. dan Pamela A. Snock,1999,Dangerous School, Jakarta: Balai Pustaka
- Kamus Bahasa Indonesia Online, kbbi.web.id
- James Drever, A Dictionary of Psychology, (Harmondwort Middlesex : Penguin Books Ltd., 1986)
- John Macquarrie (ed), A Dictionary of Christian Ethics (London: Pres Ltd., 1967),
- Rektor, Pokok Pokok-Pokok Peraturan Akademik Program Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana UPN "Veteran" Yogyakarta 2010, Surat Keputusan Rektor Nomor: SKEP/87a/VII/2010
- Stiff, Helen R and Williams. 2010. "Widening the Lens to Teach character Education Alongside standards curriculum". Volume 4 Nomer 83
- Suryono Agus Ign., 2010, Upaya Menyelaraskan Kesenjangan antara Teori Pemasaran Dengan Pemasaran Dunia Bisnis, Proceeding Simposium Riset Pendidikan dan Call For Paper UPN "Veteran" Surabaya, ISBN :978-979- 3100-74-6
- Suryono Agus Ign., Sudaryatie, Sri Kussujaniatun, Anis Siti Hartati, 2019, Pembentukan karakter Kedisiplinan Mahasiswa dengan Manajemen Kelas, LPPM, UPN Veteran Yogyakarta
- Wikipedia. 1993. Disiplin Siswa Disekolah. www.integral.sch.id.

PEMETAAN MODEL PEMBELAJARAN PANCASILA PADA PERGURUAN TINGGI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Saptopo Bambang Ilkodar, Lestanta Budiman, Hastangka

Pusat Studi Pancasila UPN "Veteran" Yogyakarta

saptopo@yahoo.com , adilobo@ymail.com , hastangka@gmail.com

Abstract

This research tries to explore the way the college lecturers in Yogyakarta Province conduct teaching on the subject of Pancasila. The aim of the research is to recognize whether the way they deliver the subject is suitable with the its goal. The goal of the subject is to encourage students to behave in accordance to the value of Pancasila. Data in this research is collected by doing interview with a number of respondent. They are sample that is selected using purposive random method. To analyze the data the researcher using simple statistical method. This research finds that the way the lecturer deliver the subject is not suitable with the goal of the subject. While its goal is to alter the affective domain, the way they teach is doing with cognitive domain. Moreover most of the lecturer using method of tutorial, a method that makes most students are less interested in the subject.

Keywords: Pancasila, affective, instructional

PENDAHULUAN

Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (UU 20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional, lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia tidak wajib mengajarkan Pancasila kepada peserta didiknya. Sejak pendidikan jenjang usia dini hingga perguruan tinggi tidak ada kewajiban memasukkan mata pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Pancasila dalam kurikulum.

Beberapa tahun sesudah berlakunya Undang-Undang tersebut banyak pihak menyadari adanya hal yang salah dalam proses pendidikan di negeri ini. Munculnya kesadaran itu antara lain dipicu oleh kenyataan bahwa perilaku para penyelenggara negara, masyarakat luas, serta para pemuda dan pemudi negeri ini cenderung jauh dari nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Oleh karena itu kemudian banyak pihak menyerukan agar Pendidikan Pancasila kembali dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan mulai dari jenjang pra-sekolah hingga perguruan tinggi.

Pada tahun 2012 terbit Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 (UU 12/2012) tentang Pendidikan Tinggi yang di dalamnya mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk memasukkan mata kuliah Pendidikan Pancasila dalam kurikulum. Dengan kata lain sejak berlakunya UU 12/2012 Pendidikan Pancasila kembali menjadi mata kuliah wajib di semua perguruan tinggi di Indonesia.

Sebagaimana ditulis dalam berbagai peraturan dan panduan, standar kompetensi dari Pendidikan Pancasila lebih banyak mengarah ke ranah afektif dan psikomotorik ketimbang ranah kognitif. Dengan demikian proses pembelajaran Pendidikan Pancasila semestinya dilaksanakan dengan metode yang berbeda dibanding metode pembelajaran lain yang ranahnya lebih ke arah kognisi. Karena tujuan Pendidikan Pancasila adalah membangun dan

membentuk sikap dan perilaku, maka pertama-tama proses pendidikannya harus bisa menghadirkan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila. Penghayatan hanya bisa dilakukan jika mahasiswa sudah memperoleh pengetahuan yang lengkap dan mendalam.

Dengan alur pemikian seperti diuraikan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui model-model pengajaran Pendidikan Pancasila pada perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk selanjutnya melakukan asesment terkait tingkat kesesuaian model pengajaran pada satu sisi, dengan standar kompetensi yang hendak diraih pada sisi lain.

Lokus penelitian dipilih Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pemilihan tersebut didasarkan setidaknya tiga pertimbangan, yaitu: pertama, Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan, dan dalam kenyataannya di wilayah tersebut terdapat lebih dari 100 perguruan tinggi baik berstatus negeri maupun swasta. Kedua, terkait dengan hal yang pertama tersebut, sampai saat ini Yogyakarta masih dijadikan rujukan atau barometer pendidikan di Indonesia. Ketiga, DIY dikenal sebagai kota perjuangan yang ditandai oleh setidaknya dua peristiwa besar, yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang merupakan kerajaan dengan kedaulatan penuh, secara sadar menyatakan menggabungkan diri dengan Negara Republik Indonesia. Selain itu, Yogyakarta pernah menjadi ibukota Republik Indonesia pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

KAJIAN TEORI / LITERATUR

Kegiatan instruksional atau kegiatan pengajaran dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu hasil belajar berupa perubahan tingkah laku mahasiswa. Tanpa tujuan yang jelas maka pengajaran akan menjadi tidak efektif dan tidak dapat mencapai tujuan. (Suciatai, 2001)

Untuk dapat menentukan tujuan pembelajaran secara tepat, diperlukan pemahaman taksonomi tujuan pembelajaran atau taksonomi hasil belajar. Dengan pemahaman tersebut dosen dapat secara jelas menentukan tujuan instruksional matakuliah yang diasuhnya apakah lebih ke ranah kognitif atau afektif atau psikomotor. Rumusan tujuan yang jelas, terukur, dan dapat diamati sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran.

Menurut Suciatai (2001), tujuan pembelajaran yang bersifat kognitif berorientasi pada kemampuan berfikir, mencakup kemampuan intelektual mulai dari yang sederhana misalnya kemampuan “mengingat” hingga kemampuan untuk memecahkan suatu masalah (problem solving). Sementara itu tujuan pembelajaran yang bersifat afektif memiliki keterkaitan dengan perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap hati (attitude) yang menunjukkan penerimaan atau penolakan mahasiswa terhadap sesuatu. Tujuan afektif mulai dari yang paling sederhana seperti “memperhatikan suatu fenomena” hingga yang kompleks seperti soal kepribadian dan hari nurani. Adapun tujuan psikomotor berorientasi pada keterampilan motorik yang berhubungan dengan anggota tubuh atau tindakan yang memerlukan koordinasi antara syaraf dan otot.

Terkait dengan tujuan-tujuan tersebut, menurut Suciatai (2001), penting untuk disadari bahwa pemilahan level pada masing-masing tujuan, yaitu mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks, bukan untuk menunjukkan bahwa level yang sederhana bernilai buruk sehingga harus dihindari. Pemilahan level itu untuk menunjukkan bahwa untuk mencapai level yang kompleks diperlukan penguasaan pada level yang sederhana terlebih dahulu. Hal lainnya, pengelompokan pada tiga ranah (kognitif, afektif, dan psikomotor) bukan merupakan pemisahan dimana tidak ada keterkaitan satu dengan lainnya. Pengelompokan itu sekedar untuk menunjukkan ranah mana yang lebih ditekankan atau diberi porsi lebih besar. Ketiga

ranah tersebut selalu ada dalam setiap tujuan instruksional.

Level-level dalam tujuan kognitif, mulai dari yang paling sederhana hingga yang kompleks, meliputi: pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Level-level dalam tujuan afektif, mulai dari yang paling sederhana hingga yang kompleks, meliputi: pengenalan, pemberian respon, penghargaan terhadap nilai, pengorganisasian, dan pengamalan. Adapun level-level dalam tujuan psikomotor, mulai dari yang paling sederhana hingga yang kompleks, meliputi: meniru, memanipulasi, ketepatan, artikulasi, dan naturalisasi. (Suciati, 2001)

Tujuan afektif dapat diuraikan lebih rinci sebagai berikut. Level paling sederhana pada tujuan afektif adalah pengenalan (*receiving*). Pada level ini diharapkan mahasiswa dapat mengenal, bersedia menerima dan memperhatikan berbagai stimulus. Di sini mahasiswa masih bersikap pasif, yaitu sekedar mendengarkan atau sekedar memperhatikan saja. Level kedua adalah pemberian respon (*responding*), yaitu tahap adanya keinginan untuk berbuat sesuatu sebagai reaksi terhadap gagasan, benda atau sistem nilai. Di sini mahasiswa diharapkan untuk menunjukkan perilaku yang diminta seperti berpartisipasi, patuh atau memberi tanggapan secara sukarela. Level ketiga adalah penghargaan terhadap nilai (*valuing*), yaitu perasaan, keyakinan atau anggapan bahwa suatu gagasan, benda atau cara berfikir tertentu mempunyai nilai (*worth*). Pada level ini mahasiswa diharapkan secara konsisten berperilaku sesuai dengan suatu nilai meskipun tidak ada pihak lain yang meminta atau mengharuskan. Nilai tersebut dapat dipelajari dari orang lain seperti dosen, teman, ataupun keluarga. Level keempat adalah pengorganisasian (*organization*), yaitu menunjukkan saling keterhubungan antara nilai-nilai tertentu dalam suatu sistem nilai, serta menentukan nilai mana yang mempunyai prioritas lebih tinggi dibanding nilai lain. Dalam hal ini mahasiswa diharapkan menjadi *committed* (*berkomitmen*) terhadap suatu sistem nilai. Mahasiswa diharapkan dapat mengorganisasikan berbagai nilai yang dipilihnya ke dalam suatu sistem nilai, dan menentukan hubungan di antara nilai-nilai tersebut. Terakhir, level kelima adalah pengamalan (*characterization*), yaitu berhubungan dengan pengorganisasian dan pengintegrasian nilai-nilai ke dalam suatu sistem nilai pribadi. Hal ini diperlihatkan melalui perilaku yang konsisten dengan sistem nilai tersebut. Pada level ini mahasiswa diharapkan telah mengintegrasikan nilai-nilai ke dalam suatu filsafat hidup yang lengkap dan meyakinkan, dan perilakunya akan selalu konsisten dengan filsafat hidup tersebut. (Suciati, 2001).

Setelah tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran ditetapkan, hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah metode yang dipilih untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi terdapat sejumlah metode pengajaran. Masing-masing metode mengandung kelebihan dan kekurangan dan masing-masing metode memiliki tingkat kecocokan yang berbeda-beda terhadap matakuliah atau materi tertentu. Oleh karena itu, agar tujuan yang hendak diraih dari pembelajaran dapat dicapai dengan baik maka dosen harus bisa memilih metode pengajaran yang tepat. (Budiardjo, 2001)

Menurut Budiardjo (2001), terdapat sejumlah faktor yang harus dipertimbangkan ketika dosen hendak memilih metode pengajaran, yaitu: tujuan instruksional, waktu dan fasilitas, pengetahuan awal mahasiswa, jumlah mahasiswa, jenis matakuliah / pokok bahasan, serta pengalaman dan kepribadian dosen. Masing-masing faktor diuraikan di bawah ini.

Faktor tujuan instruksional merupakan faktor terpenting yang harus dipertimbangkan dalam memilih metode pengajaran. Dalam tujuan instruksional umumnya dicantumkan kompetensi-kompetensi yang diharapkan dikuasai mahasiswa setelah menempuh mata kuliah tersebut. Misalnya kompetensi yang diharapkan dari peserta matakuliah "Kimia Hasil Pertanian" adalah mahasiswa dapat menganalisa perubahan kimia pada bahan makanan

hewani dan nabati setelah pasca panen. Metode yang dapat membantu mahasiswa mencapai kompetensi tersebut adalah metode praktikum dimana mahasiswa secara riil dapat menyaksikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian analisis dibuat berdasarkan pengalaman yang dialami secara langsung oleh mahasiswa.

Faktor waktu dan fasilitas penting dipertimbangkan sebab dalam praktik pengajaran ada metode yang persiapannya memerlukan waktu lama dan fasilitas yang mahal namun hasil persiapan tersebut dapat digunakan berulang-ulang. Sebaliknya ada metode yang memerlukan waktu persiapan yang singkat dan fasilitas yang murah, tetapi implementasinya di ruang kelas justru memakan banyak waktu. Metode simulasi merupakan contoh metode pengajaran yang memerlukan persiapan fasilitas. Jika tidak tersedia fasilitas yang memadai maka tidak bisa dilakukan simulasi yang benar-benar mendekati situasi yang sesungguhnya. Padahal tujuan simulasi adalah memberi pengalaman praktik kepada peserta didik di dalam ruang kuliah tetapi dalam kondisi yang mirip dengan kondisi riil di lapangan. Selain masalah fasilitas, masalah waktu juga harus diperhitungkan. Misalnya untuk metode ceramah, materi akan lebih mudah diserap oleh mahasiswa pada pagi hari dibanding pada siang hari.

Faktor pengetahuan awal mahasiswa sangat perlu dipertimbangkan agar metode pengajaran yang digunakan menjadi sesuai. Metode diskusi kelompok merupakan metode yang memerlukan prasyarat berupa pengetahuan awal mahasiswa. Jika mahasiswa belum menguasai konsep dasar atau belum berpengalaman maka besar kemungkinan diskusinya tidak produktif. Pengetahuan awal mahasiswa dapat berasal dari pokok bahasan matakuliah yang sama atau dari mata kuliah lain.

Faktor jumlah mahasiswa juga penting dipertimbangkan. Misalnya untuk metode tutorial, metode tersebut lebih mudah dilaksanakan untuk jumlah mahasiswa yang sedikit ketimbang untuk kelas besar. Dalam jumlah mahasiswa yang sedikit dosen bisa memberi perhatian cukup terhadap kebutuhan individual mahasiswa serta dapat memberi umpan-balik lebih cepat. Sebaliknya dalam kelas besar, misalnya jumlah mahasiswa mencapai lebih dari 60 orang, sudah tentu latar belakang mereka beragam, kecepatan belajar mereka juga beragam. Akibatnya dosen sulit memenuhi kebutuhan masing-masing individu sesuai latar belakang dan kemampuan mereka.

Faktor jenis matakuliah atau pokok bahasan juga harus dipertimbangkan. Misalnya kuliah di fakultas kedokteran, dimana banyak berorientasi pada ranah psikomotor, maka metode pengajaran yang tepat adalah metode demonstrasi. Penyaji dalam demonstrasi tidak hanya dosen melainkan juga mahasiswa.

Yang terakhir adalah faktor pengalaman dan kepribadian dosen. Setiap dosen memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda-beda. Bagi dosen yang memiliki kemampuan berbicara maka metode ceramah sangat mudah dilakukan. Sebaliknya bagi dosen yang kurang kemampuannya dalam berbicara di depan publik maka metode ceramah bukan merupakan pilihan yang sesuai. Dengan demikian pada akhirnya pemilihan metode pengajaran sangat ditentukan oleh pengalaman dan kepribadian dosen. Semakin berpengalaman seorang dosen dalam mengajar maka semakin peka dosen tersebut dalam memilih metode pengajaran yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Menurut Budiardjo (2001), metode kuliah mimbar atau metode ceramah merupakan metode yang paling banyak dipakai dalam proses mengajar. Menurutnya, metode ceramah memiliki dua keunggulan, yaitu cepat dalam menyampaikan informasi dan dapat menyampaikan informasi dalam jumlah banyak kepada banyak pendengar dalam waktu singkat. Adapun kelemahannya meliputi: a) komunikasi bersifat hanya satu arah, akibatnya

mahasiswa hanya bersikap pasif; b) ada kemungkinan dosen mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan individual peserta didik yang heterogen; dan c) mahasiswa tidak mendapat kesempatan berfikir dan berperilaku kreatif.

Untuk mengatasi kelemahan metode ceramah, menurut Budiardjo (2001), dapat dipilih beberapa alternatif yang berisi kombinasi metode ceramah dengan metode lain, yaitu: metode ceramah dan media instruksional, metode ceramah dan diskusi, metode ceramah dan demonstrasi, metode sumbang saran dan ceramah, atau metode ceramah dan simulasi / bermain peran.

Dari sisi lain masalah pembelajaran dapat dilihat dengan teori belajar. Seperti dikuti Zainul (2001), C Rogers (1969) membedakan dua jenis belajar, yaitu *cognitive learning* (berhubungan dengan pengetahuan akademik) dan *experimental learning* (berhubungan dengan pengetahuan terapan). *Experimental learning* ditandai oleh adanya keterlibatan pribadi, inisiatif diri, evaluasi diri, dan dampak langsung yang terjadi pada diri mahasiswa dalam proses belajar. Oleh karena itu *experimental learning* merupakan landasan yang kuat untuk pertumbuhan dan perubahan pribadi. Menurut teori ini, belajar harus dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya sebagai fasilitator. Tugas pokok dosen adalah menciptakan lingkungan belajar yang baik, membantu mahasiswa merumuskan tujuan belajar, menyeimbangkan pertumbuhan intelektual dengan pertumbuhan emosional, menyediakan sumber belajar, berbagi rasa serta pemikiran dengan mahasiswa dalam belajar tetapi tidak mendominasi.

Menurut Zainul (2001), jika dulu model belajar dipusatkan hanya pada satu kemampuan pokok, yaitu kognitif, sekarang model belajar telah berubah ditujukan pada multi kemampuan. Terdapat 7 kemampuan dasar yang menjadi sasaran belajar, yaitu: *visual-spatial*, *bodily-kinesthetic*, *musical-rhythmical*, *interpersonal*, *intrapersonal*, *logical-mathematical*, dan *verbal-linguistic*. Dengan kata lain, proses belajar tidak hanya difokuskan pada satu aspek melainkan pada seluruh aspek kemampuan mahasiswa. Konsekuensinya, metode penilaian juga harus mengalami perubahan, yaitu tidak cukup hanya menggunakan tes baku.

Terkait penilaian atau evaluasi, secara umum dikenal ada dua macam evaluasi, yaitu evaluasi hasil belajar dan evaluasi proses belajar-mengajar. Evaluasi hasil belajar, yang biasa disebut juga dengan evaluasi substantif atau pengukuran hasil belajar, merupakan evaluasi terhadap pencapaian para peserta didik. Hal tersebut merupakan kegiatan yang sudah rutin dilaksanakan. Sedangkan evaluasi proses belajar-mengajar merupakan evaluasi terhadap jalannya pembelajaran.

Menurut Irawan (2001), evaluasi proses belajar mengajar mencakup tiga komponen, yaitu masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*). Yang termasuk dalam komponen masukan (*input*) antara lain: mahasiswa, materi perkuliahan, sarana perkuliahan, dosen, kurikulum, dan strategi perkuliahan. Yang termasuk dalam komponen proses antara lain: strategi perkuliahan, media instruksional, cara dosen mengajar, dan cara mahasiswa belajar. Adapun komponen keluaran (*output*) adalah hasil belajar mahasiswa yang metode evaluasinya sudah sangat dikenal luas, sebagaimana diuraikan di atas.

Dengan demikian untuk evaluasi proses pembelajaran hanya mencakup komponen masukan dan komponen proses. Pada komponen masukan, dari 6 sub-komponen yang disebutkan di atas, sub-komponen yang sangat tergantung pada dosen adalah sub-komponen strategi perkuliahan. Sedangkan pada komponen proses, terdapat tiga sub-komponen yang penentunya adalah dosen, yaitu strategi perkuliahan, media instruksional, dan cara mengajar.

METODE PENELITIAN

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara wawancara tatap muka. Setiap pewawancara dibekali dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan. Isi pertanyaan-pertanyaannya adalah tentang proses belajar mengajar. Adapun respondennya adalah sejumlah dosen pengajar mata kuliah Pendidikan Pancasila pada perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terpilih sebagai sampel.

Pemilihan sampel (sampling) dalam penelitian ini dilakukan dengan metode purposive random sampling. Mula-mula dilakukan pemilihan berdasar statusnya sehingga diperoleh kategori perguruan tinggi negeri dan kategori perguruan tinggi swasta. Dalam hal ini khusus perguruan tinggi swasta dipilih yang familiar bagi publik dan jumlah mahasiswanya tergolong besar.

Selanjutnya dipilah lagi berdasar landasan filosofis masing-masing perguruan tinggi sehingga diperoleh kategori perguruan tinggi negeri berbasis kebangsaan dan perguruan tinggi negeri berbasis keagamaan. Demikian pula pada perguruan tinggi swasta juga dilakukan pemilihan antara perguruan tinggi swasta berbasis kebangsaan dan perguruan tinggi swasta berbasis keagamaan. Pada masing-masing kategori tersebut dipilih sampel dengan cara random.

Pengolahan data dilakukan dengan metode statistik sederhana sehingga diperoleh kategori-kategori atau model-model dalam pengajaran Pancasila.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari data yang terkumpul dapat diketahui bahwa hampir semua dosen pengasuh matakuliah Pendidikan Pancasila pada Perguruan Tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah pernah mengikuti pelatihan metode pembelajaran. Sebagian kecil dosen yang belum pernah mengikuti pelatihan metode pembelajaran merupakan dosen tidak tetap dan berasal dari lembaga non perguruan tinggi.

Sekalipun mayoritas dosen telah mengetahui metode pembelajaran yang baik yang didapat dari pelatihan metode pembelajaran, hanya sebagian kecil di antara mereka yang membuat Rancangan Pembelajaran. Hal itu berarti bahwa tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran tidak dirumuskan secara eksplisit. Sebagaimana dikemukakan pada bagian teori, ketidakjelasan tujuan pembelajaran bisa berdampak pada ketidaktepatan metode yang dipilih dan akhirnya tidak tercapainya tujuan pembelajaran itu sendiri.

Dari sedikit dosen yang membuat Rancangan Pembelajaran itu, lebih dari sepertiga tidak sepenuhnya melaksanakan rancangan. Dengan kata lain, mereka membuat Rancangan Pembelajaran semata-mata hanya untuk memenuhi ketentuan. Sedangkan praktek pengajaran tidak sesuai dengan isi rancangan.

Selanjutnya, di antara mereka yang membuat Rancangan Pembelajaran dan melaksanakan rancangan tersebut, hanya sedikit yang sering melakukan perbaikan isi. Hal itu menandakan bahwa sebagian besar dari mereka melaksanakan pengajaran secara monoton. Padahal teknologi telah berkembang sedemikian rupa, para mahasiswa juga telah mengalami perubahan karakter dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dengan kata lain, terdapat kemungkinan ketidaktepatan metode dan kurang-aktualan isi dengan perkembangan jaman.

Dari segi metode pembelajaran, mayoritas dosen menggunakan metode ceramah. Sebagaimana dikemukakan pada bagian teori, metode ceramah mengandung sejumlah kelemahan seperti komunikasi bersifat hanya satu arah, dosen mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan individual mahasiswa yang heterogen; dan mahasiswa tidak mendapat kesempatan berfikir dan berperilaku kreatif. Dengan demikian bisa dimengerti jika dalam

berbagai kesempatan para mahasiswa menyatakan tidak tertarik pada matakuliah Pendidikan Pancasila.

Untuk evaluasi, sebagian besar dosen memberi bobot yang besar pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sangat sedikit yang memberi porsi penilaian untuk aktifitas lain seperti diskusi, tugas kelompok, atau tugas-tugas lainnya. Selanjutnya pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester itu sebagian besar menggunakan metode tes tulis yang dikerjakan di dalam kelas. Hanya sebagian sangat kecil yang memberi penugasan pembuatan makalah atau penugasan untuk dikerjakan di rumah.

Berdasar temuan-temuan di atas, yaitu mulai dari tidak adanya Rancangan Pembelajaran, metode pengajaran yang mengutamakan ceramah, hingga metode evaluasi yang menekankan hasil belajar dengan metode tes tulis, dapat dikatakan bahwa seluruhnya mengarah pada ranah kognitif. Padahal Pendidikan Pancasila bertujuan membentuk sikap dan perilaku mahasiswa agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, tujuan Pendidikan Pancasila adalah tujuan yang bersifat afektif. Menjadi tidak sinkron ketika ternyata metode pembelajaran dan evaluasinya lebih bersifat kognitif.

Oleh karena itu tidak mengherankan jika dalam berbagai media muncul kritik atau keluhan dari banyak kalangan mengenai tidak efektifnya Pendidikan Pancasila. Hal itu mengemuka terutama ketika dijumpai perilaku pelajar dan mahasiswa serta pemuda pada umumnya yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Ketidak-efektifan itu bersumber dari ketidakjelasan tujuan pembelajaran, ketidaktepatan metode pembelajaran, dan ketidaktepatan metode penilaian.

Dari segi isi materi pembelajaran, mayoritas dosen telah mengikuti kisi-kisi yang ditetapkan oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Bahan ajar atau referensinya bervariasi tetapi secara keseluruhan mencakup isi yang telah ditentukan.

Ketika dilakukan pencermatan lebih mendalam, yaitu dengan melakukan komparasi antara perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta, serta antara perguruan tinggi berbasis kebangsaan dengan yang berbasis keagamaan, terlihat bahwa model atau metode pembelajaran Pancasilanya cenderung sama. Kesamaan tersebut, patut disayangkan, terutama terdapat dalam hal metode pembelajaran dan metode evaluasi yang sama-sama lebih mengarah pada ranah kognitif. Metode pengajarannya sama-sama dominan menggunakan metode ceramah.

KESIMPULAN

Penelitian ini berkesimpulan bahwa metode pembelajaran Pancasila pada perguruan tinggi di Daerah Istimewa belum efektif, yaitu metode yang ditempuh tidak sesuai tujuan pembelajaran. Tujuan pendidikan Pancasila ada pada ranah afektif, sedangkan metode pembelajarannya lebih berkuat pada ranah kognitif. Hal itu diperburuk dengan penekanan yang berlebihan pada sub-komponen “menghafal”. Selain itu, metode pengajaran Pancasila cenderung membosankan bagi mahasiswa karena pada umumnya didominasi dengan metode ceramah.

SARAN

Berdasar paparan pada bagian terdahulu dapat disampaikan saran sebagai berikut:

- Perlu dilakukan pelatihan atau penyegaran mengenai metode pembelajaran bagi semua dosen pengasuh matakuliah Pendidikan Pancasila;

- Pimpinan lembaga pendidikan tinggi yang membidangi akademik sebaiknya mewajibkan setiap dosen pengasuh matakuliah Pendidikan Pancasila untuk mengumpulkan Rencana Pembelajaran dan mempresentasikannya pada awal semester.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim peneliti menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tinggi kepada Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN “Veteran” yang telah memberi kesempatan sekaligus pendanaan untuk dilakukannya penelitian ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada para responden yang telah bersedia berbagai pandangan tentang pengajaran Pancasila sehingga bisa terpetakan model-modelnya. Tim peneliti juga menyampaikan terimakasih kepada para enumerator, yaitu para mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah bersedia membantu pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Lily (2001), *Hakikat Metode Instruksional*. Jakarta, Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
- _____ (2001), *Metode Pemberian Tugas*. Jakarta, Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
- Irawan, Prasetya (2001), *Evaluasi Proses Belajar Mengajar*. Jakarta, Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
- Suciatai (2001), *Taksonomi Tujuan Instruksional*. Jakarta, Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
- Yudistira R dan Fitriasari S(2017), “Model Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Menumbuhkan Karakter Peduli Lingkungan Hidup Siswa”, *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, 11 November 2017, Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan*
- Zainul, Asmawi (2001), *Alternative Assesment*. Jakarta, Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

KAJIAN POTENSI USAHA PRODUK PASTA PEWARNA ALAMI ‘INDIGO’ DI KABUPATEN BANTUL BERBASIS KEMAMPUAN PENGEMBANGAN KETERLEKATAN JEJARING KERJASASAMA

Titik Kusamantini 1, Krisnandini Wahyu Putri 2, Darban Haryanto 3

1); 2) Dosen Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Yogyakarta

3) Dosen Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian UPN veteran Yogyakarta

Email korespondensi: titik.kusmantini@upnyk.ac.id; kusmantini_titik@yahoo.co.id

Abstraksi

Produk batik tulis sebagai produk unggulan Kabupaten Bantul perlu terus diupayakan kemandirian usahanya mulai dari kemandirian proses pengadaan bahan baku (khususnya bahan baku pewarna alami) sampai kemandirian komersialisasi produk hingga ke pasar luar negeri. Perkembangan usaha Batik Tulis membuka kesempatan usaha baru, khususnya usaha produksi bahan baku pewarna alami Batik. Di beberapa sentra Batik Tulis di Kabupaten Bantul telah tumbuh kelompok usaha baru Pasta Indigo (warna biru) sebagai bahan baku untuk pewarnaan alami batik. Tulisan ini mengkaji sejauh mana kemampuan dan kesiapan produsen Pasta Indigo dalam upaya pengembangan keterlekatan jejaring kerjasama (networking embeddedness), sehingga produk baru Pasta Indigo dapat memperkuat pasokan bahan baku pewarna alami Batik dan mampu meminimalkan ongkos produksi perajin Batik Tulis. Kajian keterlekatan jejaring kerjasama produsen pasta diuraikan secara diskriptif dan proses pengumpulan data menggunakan teknik Focused-Group Discussion. Hasil pengamatan di lapangan menjelaskan (1) Sumber-sumber pengembangan jejaring kerjasama; (2). Pola pengembangan keterlekatan jejaring kerjasama; (2). Strategi Penciptaan Keunggulan Bersaing Produk Pasta Indigo. Signifikansi hasil kajian diharapkan memiliki implikasi manajerial bagi berbagai pihak pemangku kepentingan, guna mendorong prospek produk unggulan Batik Tulis di Kabupaten Bantul.

Kata Kunci: Batik Tulis Bantul; Produk Unggulan; Pasta Indigo; Networking Embeddedness Model; Focused-Group Discussion.

PENDAHULUAN

Kabupaten Bantul mengembangkan visi misi 5 tahun ke depan (yakni 2016 – 2021) untuk fokus pada program penguatan sistem inovasi daerah (SIDa), dan proses implementasi program perlu sinergikan program dengan berbagai dinas terkait, pemerintahan daerah tingkat kecamatan ataupun desa bahkan sinergikan dengan program penelitian serta pengabdian Perguruan Tinggi. Sentra Batik Tulis di Kabupaten Bantul tersebar di banyak desa yang terdapat di beberapa kecamatan seperti, Kecamatan Imogiri, Pandak, Pajangan, Jetis, Sewon, Sanden dan Kecamatan Bambanglipuro. Sesuai Surat Keputusan bupati Bantul No. 489/Tahun 2014 menetapkan Batik Tulis sebagai produk unggulan daerah, perlu didorong kemampuan inovasinya sehingga mampu sebagai pilar kekuatan ekonomi daerah (Draf Dokumen Roadmap SIDa Kabupaten Bantul, 2016). Program penguatan inovasi ditujukan untuk menciptakan perbaikan proses produksi batik tulis yang tidak merusak lingkungan. Seperti kita ketahui, bahwa limbah proses produksi batik sangat rentan terhadap pencemaran lingkungan. Upaya

mendorong produksi batik tulis warna alami dinilai sangat strategis mengingat beberapa hal pertimbangan: (1). tuntutan konsumen akan produk ramah lingkungan mendorong produsen untuk mampu memproduksi ramah lingkungan; (2). penyerapan SDM lokal di industri Batik Tulis sangat besar; (3). efek negatif bahan baku pewarna sintetis, mendorong produsen harus mandiri atas pasokan bahan baku pewarna alami; (4). varietas tanaman sumber pewarna alam yang ada di Indonesia sangat beragam; (5). industrialisasi bahan baku pewarna alam menjadi tantangan dan sebagai peluang bisnis baru yang yang menjanjikan.

Pertumbuhan industri Batik tidak terbatas di Indonesia, di pasar mulai dikenal beberapa merek dan motif Batik dari berbagai negara seperti Cina dan Thailand. Masing-masing negara mencoba untuk memiliki kekhasan motif batiknya, di Indonesia motif batik merupakan perwujudan pelestarian budaya. Batik Bantul dikenal sebagai produk batik bercita rasa seni yang tinggi karena kemampuan perajinnya menghasilkan harmonisasi keragaman budaya lokal pada seni batik yang dihasilkan. Pemerintah Kabupaten Bantul bertekad mendorong pengembangan produk Batik tulis khususnya Warna Alam, dan artikel ini akan mengulas sejauhmana keberhasilan pemerintah dalam mendorong keterlekatan jejaring kerjasama di industri Batik Tulis. Konsep Keterlekatan atau Embeddedness pertamakali dikenalkan oleh Granovetter (1985) untuk menjelaskan bahwa ada keterlekatan hubungan sosial dengan ekonomi. Hubungan antar personal yang sangat dekat dan memiliki pola hubungan teratur akan membentuk rangkaian hubungan sosial sebagai sebuah jaringan (Zhaoquan, et al., 2011). Dalam artikel Zhaoquan, et al (2011) mengelompokkan dua macam keterlekatan jejaring yakni jejaring hubungan sosial dan jejaring struktural, dimana keduanya terbukti berpengaruh pada kemampuan Inovasi perusahaan.

Peneliti bersama Pemerintah Kabupaten Bantul telah implementasikan Program Sistem Inovasi Daerah (SIDa) selama 3 tahun yakni 2016 s/d 2019 telah menghasilkan beberapa desa sentra batik mandiri memproduksi pasta pewarna alam khususnya Pasta Indigo sebagai Produk Baru. Prospek Produk Pasta Indigo sebagai produk baru membutuhkan kajian mendalam tentang sejauh mana kemampuan produsen pasta indigo dalam membangun keterlekatan jejaring kerjasama. Signifikansi atas hasil penelitian ini adalah memberikan rekomendasi bagi berbagai pihak pemangku kepentingan untuk mewujudkan visi Bantul menjadikan Produk Batik Tulis (khususnya warna alam) sebagai Produk unggulan Daerah.

RUMUSAN MASALAH

Kajian model keterlekatan jejaring kerjasama atas kemampuan produsen pasta indigo sebagai produk baru perlu dikaji mendalam, dan secara ringkas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dua tipe keterlekatan hubungan yakni keterlekatan hubungan sosial dan keterlekatan struktural di industri batik.
2. Mengidentifikasi sumber-sumber informasi dan bagaimana perilaku berbagi informasi antar perusahaan di industri batik.

KAJIAN LITERATUR

Diera bisnis berbasis pengetahuan, sejumlah peneliti seperti.. menggarisbawahi pengetahuan sebagai modal utama didalam penciptaan daya saing perusahaan. Banyak sumber pengetahuan yang bisa diakses perusahaan, salah satunya adalah sumber pengetahuan yang terdapat dalam jejaring kerjasama. Melalui konsep jaringan rantai pasok, perusahaan dapat mengintegrasikan sumber daya dan kemampuan mitra eksternal guna mendukung keberhasilan perusahaan, terlebih ketika perusahaan menghasilkan produk baru

(Zhaoquan et al, 2011).

1. Networking embeddedness

Konsep dasar sumber daya menganggap bahwa sumber daya pengetahuan merupakan sumber daya penting untuk mendukung keberhasilan aktivitas penciptaan nilai tambah. Pengetahuan merupakan hasil dari proses belajar dan sangat tergantung pada pengalaman dan pengetahuan internal. Zhaoquan et al (2011) menjelaskan pengetahuan juga bisa diperoleh ketika perusahaan melakukan hubungan lekat dengan pihak eksternal, dan peneliti membedakan dua tipe keterlekatan hubungan dalam jejaring yakni hubungan sosial dan hubungan struktural yang lekat. Perusahaan perlu melakukan berbagai cara untuk membujuk mitra bisnis mau berbagi informasi dan pengetahuan secara sukarela.

Granovetter berpendapat bahwa keterlekatan struktural dalam jaringan dapat terbentuk karena adanya ikatan kuat antar organisasi karena ada keterkaitan tugas dan imbal balik. Tidak semua hubungan struktural dalam jaringan efektif, untuk mendorong keterlekatan maka perlu hubungan sosial atau hubungan dengan anggota jaringan yang lekat. Ketika ada keterlekatan hubungan relasional sosial maka akan mendorong keterlekatan hubungan dalam jaringan, sehingga antar organisasi akan meningkatkan jumlah transfer sumber daya, mempromosikan transfer pengetahuan implisit dan pengetahuan rumit. Sementara keterlekatan hubungan sosial terbentuk karena komunikasi antar pribadi dalam sebuah jejaring, hubungan yang lekat akan mendorong rasa kepercayaan yang tinggi sehingga kepadatan penugasan dalam jaringan antar organisasi lebih efektif. Untuk mendorong keberhasilan inovasi atau penciptaan produk baru kajian dua tipe keterlekatan jejaring khususnya jejaring rantai pasok perlu dievaluasi.

2. Sumber informasi dan perilaku berbagi informasi

Berbagi informasi sebagai sebuah balok bangunan kritis dalam membangun hubungan kerjasama jangka panjang (Chopra dan Meindl, 2013), terlebih ketika konteks persaingan bisnis sangat kompetitif (Mufaqih, et al., 2017). Informasi merupakan satu hal penting dalam proses pengambilan keputusan strategik. Untuk pengambilan keputusan yang tepat, Loudon (2016) menyebut tiga aspek informasi yang harus dipenuhi, informasi haruslah akurat, relevan dan tepat waktu. Informasi akurat disebut informasi yang realtime artinya informasi yang sesuai dengan kondisi riil. Relevan mencerminkan adanya ketersediaan data yang berkaitan dengan kepentingan pengambilan keputusan. Dan tepat waktu mencerminkan ketersediaan informasi pada saat dibutuhkan pengambil keputusan untuk mengambil keputusan. Untuk bisa memenuhi hal tersebut, dibutuhkan platform teknologi informasi.

Zhou dan Benton (2007); Vereecke, et al (2006) dan Lee, et al (2006) juga menekankan pentingnya TI untuk berbagi informasi. Sementara beberapa peneliti yang telah menghasilkan bukti empiris atas pengaruh konstruk berbagi informasi terhadap keterlekatan hubungan kerjasama adalah Yu, et al (2001); Lin, et al (2002) serta Zhao, et al (2002). Upaya membagi informasi yang transparan dan akurat dan kepercayaan antar pihak (Yu et al, 2001) akan mendorong komitmen perusahaan untuk membangun keterlekatan hubungan kerjasama. Adapun sumber pengetahuan diklasifikasikan ke dalam dua kelompok yakni sumber pengetahuan dari lingkup internal perusahaan dan eksternal seperti pemerintah, pesaing, pemasok atau distributor.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan alasan karena umumnya upaya pengembangan UKM merupakan kegiatan yang terus menerus dan berkelanjutan sehingga tindakan manajerial yang dilakukan pelaku usaha yang

diamati akan memiliki variasi yang sangat tinggi. Penganalisaan memerlukan kehati-hatian, untuk meminimalisir bias pada analisis kualitatif dilakukan wawancara mendalam dengan melibatkan banyak sumber serta melakukan cek silang perolehan data dari berbagai sumber (Cresswell, 2002).

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode triangulasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara (Hsieh dan Sannon, 2005). Adapun teknik wawancara menggunakan kombinasi yaitu wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan atau in-depth interview dengan beberapa narasumber yang mewakili stakeholder seperti Kabid Litbang Bappeda Bantul, Pemilik CV Puspita Indigo natural Dye di Desa Srandakan, Bantul, kelompok masyarakat pemerhati batik dan UKM produsen pasta warna alam.

Data-data yang telah diperoleh akan direduksi, diringkas dengan tujuan untuk mempertajam data yang relevan dengan topik penelitian, mengeliminasi data yang tidak perlu, mengelompokkan data untuk memudahkan proses penyajian dan pembahasan data dan juga penarikan kesimpulan. Umumnya kategorikal data didasarkan dengan metode komparasi. Kategorisasi data merupakan satu tahapan penting dalam analisis kualitatif karena pada tahapan ini harus mendasarkan pada logika, intuisi, pendapat dan pertimbangan kriteria tertentu sebagai acuan kategorikal (Moleong, 2004).

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian dideskripsikan secara bertahap, bagian awal akan dipaparkan tentang tipe keterlekatan jejaring kerjasama yakni keterlekatan hubungan sosial dan struktural.

(1). Keterlekatan hubungan sosial

Untuk analisis keterlekatan hubungan sosial mitra peneliti yakni produsen pasta maka obyek penelitian adalah UKM batik selaku pelanggan yang akan membeli produk pasta; kelompok tani selaku pemasok daun indigofera sebagai bahan baku proses ekstraksi pasta pewarna alami indigo serta lembaga peneliti baik dari Akademisi, pemerintahan ataupun lembaga swadaya masyarakat. Sejauhmana keterlekatan produsen pasta dengan berbagai pihak tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

a. Hubungan sosial dengan UKM Batik sebagai pelanggan

Karena lokasi tempat usaha produsen pasta dengan beberapa desa sentra tidak terlalu jauh, maka keterlekatan hubungan sosial sangat baik bahkan hubungan kekeluargaan semakin mengikat emosi berusaha, bahkan mampu sebagai pondasi awal membangun kepercayaan bisnis.

b. Hubungan sosial dengan Poktan (Kelompok tani) sebagai pemasok

Kesadaran kelompok tani akan prospek usaha pasta indigo sangat rendah, sebagian besar belum memiliki wawasan atas nilai tambah tanaman indigofera. Meskipun secara teknis budidaya, proses penanaman ataupun pemeliharaan tanaman relatif mudah, tetapi minimnya pengetahuan banyak anggota kelompok tani disekitar desa srandakan enggan untuk diajak kerjasama. Penguatan jejaring kerjasama melalui penguatan hubungan sosial telah dilakukan melalui program sosialisasi teknik budidaya, teknik ekstraksi pasta indigo serta prospek pasar di dalam negeri dan luar negeri. Inisiasi skenario kerjasama antara CV Puspita Indigo natural Dye bersama tim peneliti merancang mekanisme kerjasama berbasis sistem plasma. Yakni kelompok tani merupakan mitra usaha, keberhasilan produsen pasta akan bergantung pada pasokan daun dan kualitas daun indigofera dari petani. Dan keberhasilan produsen akan memberikan manfaat juga bagi kelompok tani, untuk itu kerjasama yang dilakukan adalah berbagai tugas dan prosentasi keuntungan. Tugas produsen pasta adalah menyiapkan benih, olah

daun menjadi pasta, dan menjual pasta. Sementara kelompok tani bertugas menyediakan lahan, melakukan pemeliharaan tanaman, pemupukan dan pemanenan daun ketika masa panen tiba. Pembagian keuntungan adalah 60:40, dimana 60 persen keuntungan untuk produsen pasta dan 40 persen untuk kelompok tani.

c. Hubungan sosial produsen dengan lembaga penelitian (PT ataupun lembaga pemerintah)

Perguruan tinggi berperan melalui invensi teknologi sederhana untuk proses ekstraksi dan pengujian laboratorium atas pasta indigo hasil ekstraksi. Invensi rekayasa sosial, melalui penerapan model keterlekatan jejaring kerjasama diharapkan akan membangun sebuah jejaring bisnis yang dapat saling berbagi informasi dan pengetahuan bisnis. Berikut Gambar Alat sederhana hasil invensi tim peneliti dari LPM UPN veteran Yogyakarta yang bisa diadopsi mitra untuk proses ekstraksi pasta indigo.



Gambar 1. TTG ekstraksi Pasta Indigo

Pemerintah sebagai pegiat UKM secara aktif memberikan fasilitasi produsen pasta untuk pameran, juga sebagai role model untuk studi banding kelompok produsen pasta indigo dari beberapa desa lainnya. Keberhasilan produk pasta indigo hasil produksi mitra, telah berhasil ekspr ke Jepang maka penguatan eksistensi produk dilakukan melalui program fasilitasi paten merek dagang produk pasta indigo “Blue Gold”. Gambar 2 merupakan ilustrasi logo merek pasta indigo milik mitra.



Gambar 2. Merek Dagang Mitra “Blue Gold”

2). Keterlekatan hubungan struktural.

Granovetter berpendapat bahwa keterlekatan struktural dalam jaringan dapat terbentuk karena adanya ikatan kuat antar organisasi karena ada keterkaitan tugas dan imbal balik. Keterlekatan jejaring diartikan sebagai dua atau lebih anggota rantai pasok mampu bekerjasama untuk penciptaan keunggulan bersaing melalui membangun kepercayaan, berbagai informasi dan pengambilan keputusan bisnis serta berbagi manfaat (Simatupang dan Sridharan, 2002). Konsekuensi atas kelekatan tersebut perusahaan lebih mampu menciptakan kepuasan daripada perusahaan secara individual. Dalam kasus ini, keberhasilan menghasilkan produk batik tulis warna alam sangat tergantung pada kualitas bahan baku pewarna alam, sementara kualitas pasta pewarna alam tergantung pada kualitas bahan bakunya yang dipasok petani.

Komitmen petani untuk dapat memasok bahan baku daun indigofera yang memenuhi standar kualitas perlu diupayakan dengan cara (1) menjamin tanaman cukup akan kebutuhan air, meskipun indigofera adalah sejenis tanaman perdu yang perlu sinar matahari dengan intensitas cukup tinggi tetapi jika kekurangan air daun akan cenderung berwarna kuning

kecoklatan. Hal ini akan berpengaruh ke hasil pasta nantinya, warna cenderung agak kehijauan. Tetapi jika daun berwarna hijau segar maka hasil pastanya akan berwarna biru dan kilau; (2) kesediaan memanen daun sebelum matahari terbit. Waktu pemanenan pagi hari akan menghasilkan pasta indigo lebih berkualitas.

Komitmen produsen pasta untuk memasok pasta pewarna batik harus menjaga kualitas produk pastanya, komposisi kandungan kapur tidak terlalu tinggi karena akan merusak kemasan ketika penyimpanan (plastik pecah akibat panas); tingginya kandungan kapur juga akan menghambat proses pengikatan warna ke kain. Bahkan beberapa tindakan tidak kooperatif yang dapat merugikan UKM batik adalah mencampur pasta dengan abu (sisa pembakaran kayu), mengurangi berat produk dalam kemasan dan memperbanyak kandungan kapur.

DAFTAR PUSTAKA

- Baker, G. (2002), "The effect of synchronous collaborative technologies on decision making: a study of virtual team", *Information Resources Management Journal*, Vol.15, No.4, pp. 79-93
- Chase, R.B., Jacobs, F.R., dan Aquilano, N.J. (2006), " Operation management for competitive advantage with global cases", Mc.Grow Hill Publisher
- Chi Pai, J. (2006), "An empirical study of the relationship between knowledge sharing and IS/IT strategic planning (ISSP)", *Management Decisions*, Vol.44, No.1, pp.105-122
- Chopra, S. dan Meindl, P. (2004), *Supply Chain Management: Strategy, Planning and Operation*, 2nd int. ed., Pearson/Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ.
- Daft, R. dan Lengel, R. (1986), "Organizational information requirements, media richness and structure design", *Management Sciences*, Vol.32, No.5, pp.554-571
- Danese, P. dan Romano, P. (2013), " The Moderating Network Structure on The Customer Integration- Efficiency Relationship", *International Journal of Operation and Production Management*, Vol. 33, No.4, pp. 372-393
- Ghozali, Imam (2013). *Model Persamaan Strctural, Konsep dan Aplikasi Dengan Program AMOS 21.0*: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriantoro, N. dan Supomo, (1999), "Metodologi Penelitian Bisnis", BPFE Yogyakarta
- Kusmantini, Haryono, Untoro dan Setiawan (2018), " Consensus strategic among function and the role of supply chain technology as moderator" *Journal of Industrial Engineering and Management*, Vol. 11, No. 4 (on process)
- Lee, G.G. dan Bai, R.J. (2003), "Organizational mechanism for successful IS/IT strategic planning in the digital era", *Management Decisions*, Vol.41, No.1, pp.32-42
- Lee, H.L., Padmanabhan, V. dan Whang, S. (1997), "Information distortion in a supply chain: the bullwhip effect", *Management Science*, Vol. 43, pp. 546-58.
- Lee, H.L., So, K.C. dan Tang, C.S. (2000), "The value of information sharing in a two-level supply chain", *Management Science*, Vol. 46 No. 5, pp. 626-43.
- Lee, H.L., So, K.C. dan Tang, C.S. (2000), "The value of information sharing in a two-level supply chain", *Management Science*, Vol. 46 No. 5, pp. 626-43.
- Zhao, M., Droge, C. dan Stank, T. (2002), "The effects of logistics capabilities on firm performance: customer-focused versus information-focused capabilities", *Journal of Business Logistics*, Vol. 22 No. 2, pp. 91-107.
- Zhou, H. dan Benton, W.C. (2007), "Supply chain practice and information sharing", *Journal of Operations Management*, Vol. 25 No. 6, pp. 1348-65.

KAJIAN PERILAKU SIVITAS AKADEMIKA TERHADAP SAMPAH DI LINGKUNGAN UPN "VETERAN" YOGYAKARTA

Andi Sungkowo, Ika Wahyuning Widiarti, Farida Afriani Astuti, Titi Tiara Anasstasia
Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknologi Mineral, UPN "Veteran" Yogyakarta
Email : ika.widiarti@upnyk.ac.id , tiara.anasstasia@upnyk.ac.id

Abstract

UPN "Veteran" Yogyakarta have to improve the waste management system by applying the principle of Reduce, Reuse, and Recycle (3R). Meanwhile, towards the 3R management system, the first step that is really needed is awareness from the UPNVY academic community for good waste management as well as facilitating supporting and adequate waste management facilities. The purpose of this study is to determine the level of knowledge, attitudes, behavior of the academic community towards waste, and the level of satisfaction of the academic community towards the waste management system at UPNVY. The sampling method and the number of samples to understand the knowledge, attitudes, behavior of each academic community are determined by the proportional stratified random sampling method and the Slovin formula. The results of the analysis are stated in the form of bar charts to represent each academic community. Based on the analysis results, showed that the knowledge and the attitude of the academicians were good towards waste. However, the behavior towards waste is considered good only owned by lecturers. While the behavior of the employees and student towards waste is classified as moderate and bad. The satisfaction of the academicians towards the waste management system at UPNVY is generally not satisfied. This relates to the services and facilities at UPNVY which are still not adequate. The improvement of the waste management system can be support by the knowledge and attitude of academicians who are generally good can enable good behavior to emerge.

Keywords: Waste, Behaviour, Academic community

PENDAHULUAN

Sampah merupakan bahan padat sisa yang dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia. Bagi beberapa negara berkembang, sampah masih dianggap sebagai suatu permasalahan yang pelik bagi aspek lingkungan, sosial, budaya, politik, ekonomi, hingga kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan sampah yang masih belum tepat dan optimal. Indonesia adalah salah satu negara yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. World Bank (2012) mencatat, jumlah timbulan sampah Indonesia pada tahun 2012 mencapai 61.644 ton/hari atau 22.5 juta ton/tahun. Bahkan diproyeksikan meningkat sebanyak 151.921 ton/hari atau 55,5 juta ton/tahun pada tahun 2025.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah dari perguruan tinggi atau Institusional Solid Waste (ISW) tergolong sampah perkotaan. Oleh karena itu sebagaimana amanat dalam Permen PU No.

21/PRT/M/2006, sudah sepatutnya perguruan tinggi melakukan pengelolaan sampah secara terpadu dan mandiri. Terlebih perguruan tinggi memiliki multi peran dalam implementasi Sustainable Development Goals (SDG's) melalui representasi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu: fungsi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Ditambah lagi sebagai tempat kegiatan belajar mengajar, sudah seharusnya Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan yang baik demi mewujudkan suasana akademik yang kondusif dan nyaman.



Gambar 1. Sistem Pengelolaan Sampah End of Pipe
Sumber: Dokumen pribadi

Sistem pengelolaan sampah di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (UPNVY) masih bertumpu pada sistem End of Pipe (Gambar 1). Sistem ini hanya mengandalkan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) dalam sistem pengelolaan sampah. Akibatnya adalah jumlah lahan yang diperlukan akan semakin besar berbanding lurus dengan jumlah sampah yang dibuang ke TPA. Selain itu sistem penimbunan terbuka (open dumping) di TPA juga menyebabkan pencemaran terhadap udara, air dan tanah. Oleh karenanya sangat perlu untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah di UPNVY, salah satunya melalui Reduce, Reuse, and Recycle (3R). Sementara itu untuk menuju ke sistem pengelolaan 3R, hal pertama yang sangat dibutuhkan adalah kesadaran dari sivitas akademika UPNVY terhadap pengelolaan sampah yang baik disamping ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah yang mendukung dan memadai.

Kesadaran sivitas akademika terhadap pengelolaan sampah yang baik akan memunculkan perilaku yang baik sehingga penerapan 3R di lingkungan UPNVY mudah dilakukan. Perilaku terhadap pengelolaan sampah dapat diketahui dari aspek pengetahuan, sikap dan perilaku sivitas akademika terhadap sampah. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengetahui perilaku sivitas akademika UPNVY terhadap sampah melalui pengetahuan, sikap, dan tindakan/perilaku terhadap sampah. Selain itu juga akan dilakukan survey mengenai kepuasan sivitas akademika terhadap pengelolaan sampah yang ada di UPNVY. Penelitian ini dilakukan di dua kampus UPNVY yaitu Kampus I Condong catur dan Kampus II Babarsari. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah UPNVY yang lebih baik dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan 4 (empat) atribut yaitu: pengetahuan, sikap, tindakan terhadap sampah, serta kepuasan terhadap pengelolaan sampah di lingkungan UPNVY. Pengetahuan adalah wawasan yang dimiliki responden terhadap sampah. Sikap adalah reaksi yang masih tertutup dari responden terhadap sampah. Tindakan atau perilaku adalah respon nyata atau terbuka dari responden terhadap sampah. Sumber data penelitian ini berasal dari

sivitas akademika di lingkungan Jurusan Teknik Lingkungan khususnya dan UPN VY pada umumnya. Sivitas Akademika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan (tendik) yang selanjutnya disebut responden.

Metode penentuan sampel untuk 4 (empat) atribut tersebut adalah dengan proportionate stratified random sampling. Proportionate stratified random sampling digunakan karena populasi tidak homogen dan berstrata secara proporsional (Sugiyono, 2013). Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan Rumus Slovin (Persamaan 1).

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2} \quad (\text{Persamaan 1})$$

keterangan:

- n = Jumlah Sampel
- N = Jumlah Total Populasi
- e = Batas Toleransi Error

Berdasarkan perhitungan dengan nilai e sebesar 0,1 diperoleh jumlah sampel sebanyak 324 orang responden yang terdiri dari dosen 83 orang, tendik 81 orang dan mahasiswa 160 orang. Responden diperoleh dari area Kampus I Condong Catur dan Kampus II Babarsari.

Hasil kuisioner yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode Weighted Linear Combination (WLC) atau model skoring, tujuannya adalah untuk memberikan bobot nilai pada tanggapan terhadap pertanyaan/ Pernyataan masing-masing atribut penilaian (pengetahuan, sikap, tindakan, serta tingkat kepuasan terhadap sampah di lingkungan UPN VY). Pada penelitian ini digunakan Skala Likert, yaitu skala ordinal yang diukur menggunakan nilai skor (Sunyoto, 2012) Pada penelitian ini digunakan skor nilai berkisar 0 – 2 untuk setiap pertanyaan/ pernyataan. Setiap skor dari masing-masing kategori kemudian dijumlahkan dan selanjutnya ditentukan rentang pengharkatan untuk mengklasifikasikan hasil dari tiap atribut dalam bentuk kelas interval. Pada studi ini rentang pengharkatan ditentukan berdasarkan Persamaan 2. sebagai berikut.

$$\text{Rentan skor} = \frac{X_{\max} - X_{\min}}{m} \quad (\text{Persamaan 2})$$

keterangan:

- X_{max} = Total skor tertinggi
- X_{min} = Total skor terendah
- m = Jumlah klasifikasi yang diinginkan

Selanjutnya hasil klasifikasi yang diperoleh untuk masing-masing atribut dari hasil perhitungan rentang nilai adalah sesuai pada Tabel 1. Hasil pada Tabel 1 kemudian akan menjadi landasan untuk menyajikan hasil analisis univariat masing-masing atribut dalam diagram batang pada bagian hasil dan pembahasan.

Tabel 1. Klasifikasi Skoring Empat Atribut Penelitian

Atribut	Kelas	Interval
Pengetahuan terhadap sampah	Rendah	$0 \leq x < 5,333$
	Sedang	$5,333 \leq x < 10,67$
	Tinggi	$10,67 \leq x \leq 16$
Sikap terhadap sampah	Buruk	$0 \leq x < 4$

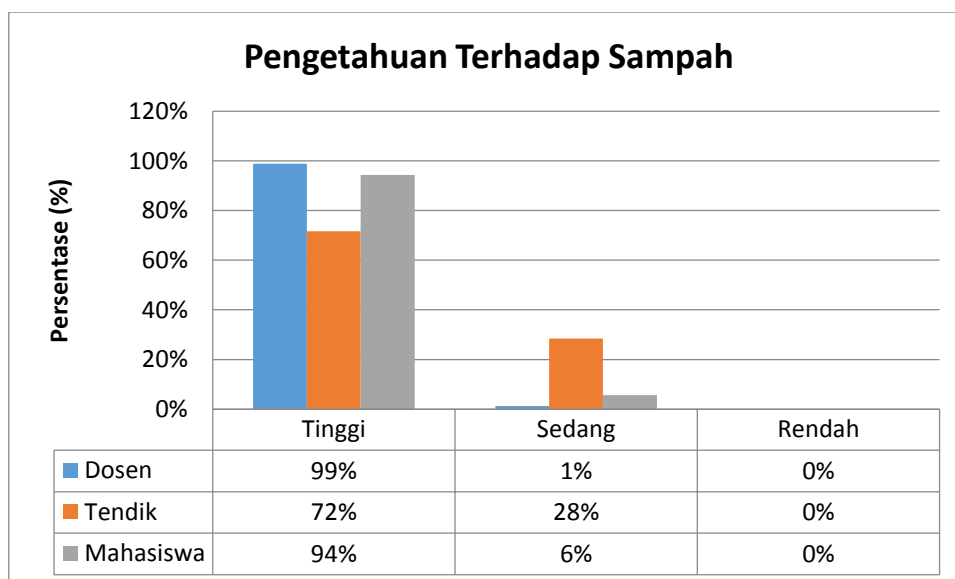
	Sedang	$4 \leq x < 8$
	Baik	$8 \leq x \leq 12$
Perilaku terhadap sampah	Buruk	$0 \leq x < 3,33$
	Sedang	$3,33 \leq x < 6,67$
	Baik	$6,67 \leq x \leq 10$
Kepuasan terhadap pengelolaan sampah	Tidak puas	$0 \leq x < 0,67$
	Sedang	$0,67 \leq x < 1,34$
	Puas	$1,34 \leq x \leq 2$

Sumber: hasil perhitungan, 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengetahuan sivitas akademika UPNVY terhadap sampah

Pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengetahuan responden mengenai definisi sampah, jenis-jenis sampah, sampah yang mudah membusuk dan tidak membusuk serta konsep reduce, reuse, dan recycle. Aspek pengetahuan dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Hasil analisis kuisioner tentang pengetahuan sivitas akademika UPNVY terhadap sampah tersaji pada Gambar 2.



Gambar 2. Pengetahuan Sivitas Akademika UPNVY Terhadap Sampah

Berdasarkan Gambar 2 dapat diketahui bahwa pengetahuan dosen terhadap sampah di lingkungan UPNVY tergolong tinggi sebanyak 99 %, sedangkan yang berpengetahuan sedang sebanyak 1 %. Pengetahuan tendik terhadap sampah di lingkungan UPNVY yang tergolong tinggi sebanyak 72% meskipun ada juga yang masuk dalam kategori sedang sebanyak 28%. Mahasiswa sebagai mayoritas responden berdasarkan pada Gambar 2 cenderung memiliki pengetahuan yang tinggi terhadap sampah di UPNVY (94%), meskipun beberapa dari mereka juga berpengetahuan sedang (6%).

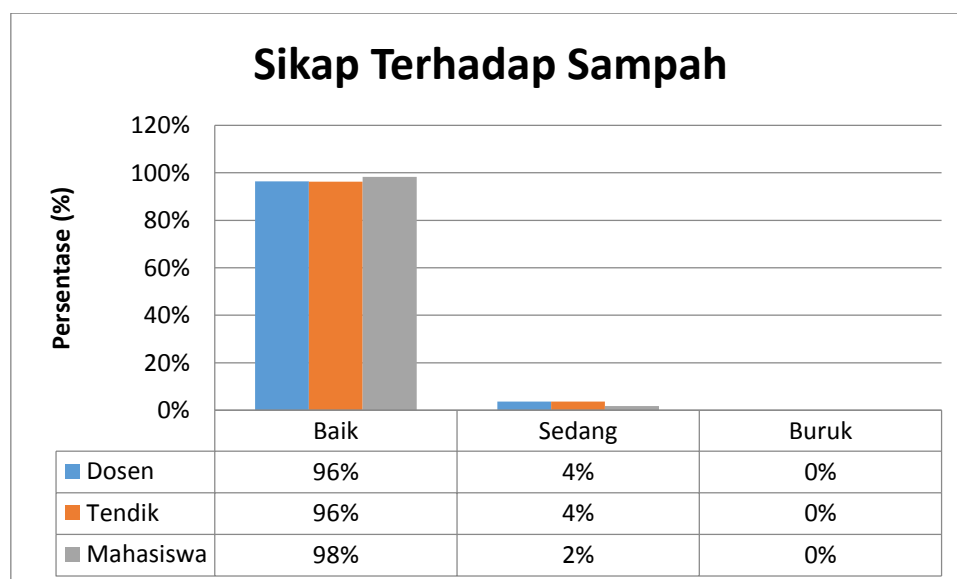
Pengetahuan dapat memberikan informasi pada setiap orang. Sumber informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, internet, majalah, koran, dan sebagainya. Idealnya semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi ilmu pengetahuan yang

diperoleh. Pada atribut ini menunjukkan bahwa dosen memiliki kecenderungan pengetahuan yang tinggi terhadap sampah. Hal ini dikarenakan secara umum dosen berpendidikan terakhir Strata dua (S-2) dan Strata tiga (S-3) sehingga mayoritas dosen memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi daripada tendik dan mahasiswa. Sementara untuk tendik dan mahasiswa cenderung tergolong sedang hingga tinggi. Namun, jumlah responden tendik berkategori sedang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa. Hal ini dapat disebabkan oleh status pendidikan terakhir tendik yang beragam mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga S-2 tetapi secara umum didominasi dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas atau sederajat (SMA/SMK). Pengetahuan mahasiswa terhadap sampah yang cenderung tinggi (94%) dapat disebabkan oleh tingginya transfer ilmu pengetahuan yang sedang dialami oleh mahasiswa karena mahasiswa sedang berada pada fase belajar. Beberapa responden mahasiswa telah menempuh pendidikan terakhir Strata satu (S-1), tetapi jauh lebih banyak jumlah responden mahasiswa yang berpendidikan terakhir SMU/SMK.

Aspek pengetahuan responden terhadap sampah dibangun berdasar kemampuan berpikir sesuai dengan kenyataan yang dilihat dan ditemukan di lingkungan sekitar responden berada (Sari & Mulasari, 2017). Pengetahuan sampah dapat ditingkatkan apabila ada aliran informasi dan pengetahuan yang baik, yang dalam hal ini dosen sebagai pengajar dapat memberikan informasi dan contoh tentang bagaimana sikap dan perilaku terhadap sampah kepada mahasiswa, tendik, bahkan sesama dosen sendiri. Aliran informasi yang baik dan benar tentang sampah diharapkan mampu menciptakan iklim pengetahuan yang baik di lingkungan UPNVY.

Sikap sivitas akademika terhadap sampah di lingkungan UPNVY.

Sikap yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana sikap responden terhadap kebijakan mengenai reduce, reuse, recycle jika diterapkan di UPNVY. Selain itu, responden juga diwawancari tentang persetujuan terhadap pembakaran sampah di lingkungan UPNVY dan pembuangan sampah ke TPA. Pada atribut sikap sivitas akademika terhadap sampah dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu baik, sedang, dan buruk. Berikut ini tersaji grafik sikap sivitas akademika UPNVY terhadap sampah.



Gambar 3. Sikap Sivitas Akademika UPNVY Terhadap Sampah

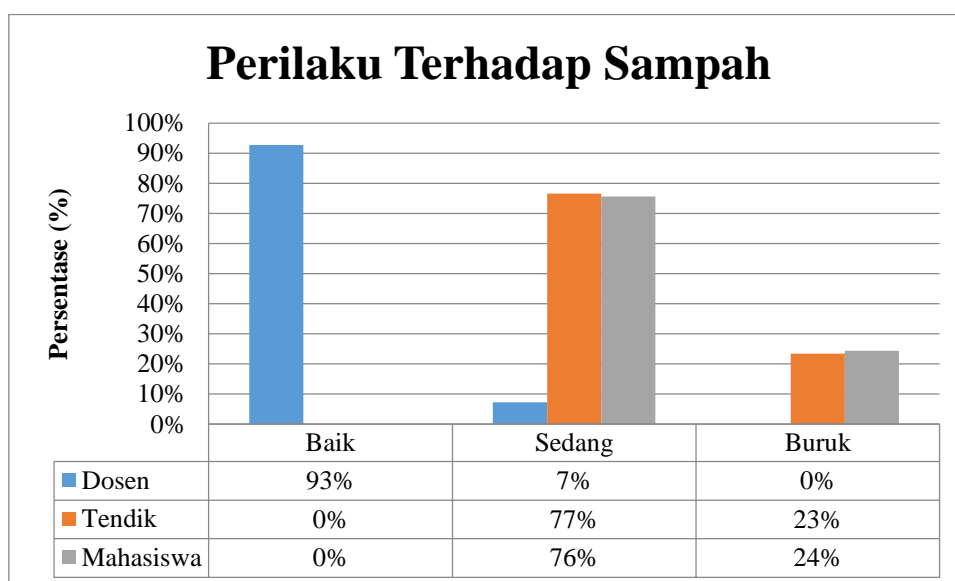
Gambar 3 memperlihatkan bahwa secara umum tidak ada sikap yang masuk kategori buruk pada seluruh responden. Dari grafik dapat diketahui bahwa dosen bersikap baik sebesar 96% dan bersikap sedang sebesar 4%. Sikap tendik terhadap sampah tergolong baik (96%) meskipun juga ada yang masuk dalam kategori sedang (4%). Sikap mahasiswa terhadap sampah di lingkungan UPNVY mayoritas memiliki sikap yang baik terhadap sampah di UPNVY (98%), meskipun terdapat 2% dari mereka yang memiliki sikap sedang.

Sikap dalam penelitian menunjukkan bagaimana seseorang bertindak berdasarkan perasaan atau pemikirannya terhadap sampah. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sivitas akademika UPNVY mempunyai sikap yang cenderung baik terhadap sampah, meskipun beberapa dari responden masih ada yang bersikap sedang. Berdasarkan hasil kuisioner secara umum sikap baik yang ditunjukkan antara lain responden setuju jika di lingkungan kampus harus ada tempat sampah, responden tidak setuju jika ada pembakaran sampah di lingkungan UPNVY, responden tidak setuju jika seluruh sampah dibuang ke TPA dan responden mendukung adanya kebijakan 3R.

Sikap berkategori sedang muncul karena beberapa responden baik dosen, tendik maupun mahasiswa menyetujui jika petugas kebersihan membakar sampah di lingkungan UPNVY. Pembakaran sampah dilarang sesuai dengan larangan yang tertuang dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2008. Pembakaran sampah yang tidak sesuai teknis pengelolaan sampah akan menimbulkan dampak pencemaran terhadap udara (Damanhuri, 2016). Selain itu, responden ini juga menyetujui jika seluruh sampah UPN dibuang ke TPA. Sikap ini merupakan sikap dari munculnya pemikiran lama bahwa pengelolaan sampah hanya terbatas pada kumpul-angkut-buang. Pembuangan seluruh sampah UPNVY ke TPA dapat mengurangi kapasitas TPA dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lingkungan karena pada umumnya TPA di Indonesia masih menggunakan sistem open dumping. Pembentukan sikap terhadap sistem pengelolaan sampah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, lembaga pendidikan dan lembaga agama, dan faktor emosional (Saputra dan Mulasari, 2017). Sikap terhadap sampah terbentuk, tergantung bagaimana budaya dan penanaman sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diperoleh dari keluarga, kehidupan sekitar, hingga budaya (Anifa et al., 2017). Sikap yang kurang baik terhadap sampah, dalam hal ini dapat diturunkan melalui kebiasaan dan peraturan yang baik dan tegas mengenai sampah di lingkungan kampus UPNVY.

Perilaku sivitas akademika UPNVY terhadap sampah

Aspek perilaku terhadap sampah dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu baik, sedang, dan buruk. Kategori ini menyangkut pada tindakan/perilaku yang seharusnya dilakukan oleh semua sivitas akademika UPNVY dalam hal pengumpulan, pemilahan, dan pengurangan sampah. Berikut ini tersaji grafik perilaku sivitas akademika UPNVY terhadap sampah.



Gambar 4. Perilaku Sivitas Akademika UPN VY Terhadap Sampah

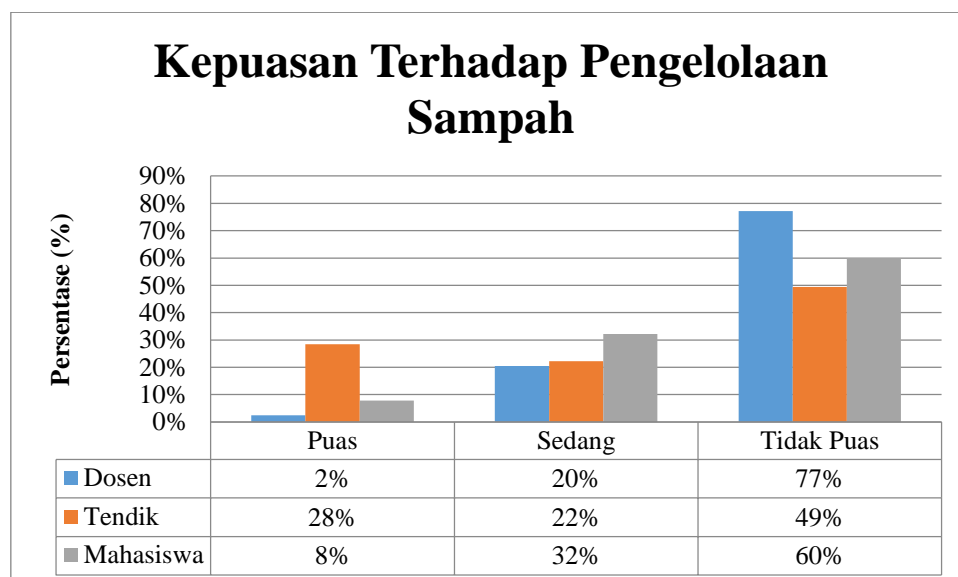
Perilaku dosen UPN VY sebagai pendidik sudah seharusnya baik terhadap sampah di lingkungan kampus. Berdasarkan pada Gambar 4, dapat diketahui bahwa mayoritas dosen berperilaku baik (93%) terhadap sampah di lingkungan UPN VY, meskipun 7% masih berperilaku sedang. Sedangkan perilaku tendik dan mahasiswa terhadap sampah hanya tergolong sedang dan buruk. Untuk tendik perilaku tergolong sedang sebanyak 77% dan berperilaku buruk sebanyak 23%. Perilaku terhadap sampah tergolong sedang pada mahasiswa sebanyak 76%, sisanya 24% masih memiliki perilaku buruk terhadap sampah.

Perilaku menunjukkan respon nyata atau terbuka seseorang terhadap sampah. Pada penelitian ini perilaku baik terhadap sampah hanya ditunjukkan oleh responden dosen. Sedangkan perilaku mahasiswa dan tendik didominasi dengan kategori sedang dan buruk. Berdasarkan hasil kuisioner, perilaku buruk tendik dan mahasiswa terhadap sampah yang dilakukan adalah pernah membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah sesuai dengan jenis tong sampah sebanyak, tidak berupaya mengurangi sampah baik di kampus maupun luar kampus. Perilaku manusia dalam pengelolaan sampah tidak memiliki hubungan dengan tingkat pendidikan atau pengetahuan. Namun, perilaku memiliki hubungan dengan lingkungan. Hal ini didukung oleh Teori Medan yang dikeluarkan oleh Kurt Lewin. Dalam teori tersebut dinyatakan bahwa perilaku adalah fungsi dari individu dan lingkungan artinya kondisi lingkungan sangat mempengaruhi kebiasaan masyarakat sehingga menghasilkan perilaku (DLH, 2017). Perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati secara langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar (Notoatmodjo, 2007). Munculnya perilaku buruk terhadap sampah pada sivitas akademika dapat disebabkan oleh belum adanya kondisi yang mendukung pengurangan dan penanganan sampah yang baik di lingkungan kampus UPN VY. Artinya, perlu ada kebijakan dan penerapan prinsip 3R dalam pengelolaan sampah di UPN VY sehingga perilaku yang muncul pada sivitas akademika menjadi baik. Dan pada akhirnya pengetahuan, sikap dan perilaku sivitas akademika terhadap sampah akan baik seluruhnya.

d. Kepuasan sivitas akademika terhadap pengelolaan sampah di UPN VY

Aspek kepuasan pelayanan pengelolaan sampah berkaitan erat dengan ketersediaan

fasilitas pelayanan dan penunjang sistem pengelolaan sampah di UPNVY. Kampus sebagai pihak penyedia fasilitas sudah seharusnya mampu memberikan layanan dan sarana-prasarana penunjang yang memadai. Parameter ini kemudian direspon oleh 3 jenis responden sebagai pengguna layanan. Berikut ini grafik kepuasan sivitas akademika terhadap pengelolaan sampah yang ada di UPNVY.



Gambar 5. Kepuasan Sivitas Akademika Terhadap Pengelolaan Sampah di UPNVY

Tingkat kepuasan dosen UPNVY sebagai pendidik sebagaimana pada Gambar 5, dapat diketahui bahwa mayoritas dosen cenderung tidak puas (77%), meskipun masih ada sedikit yang puas (2%), sedangkan sisanya sedang (20%). Tingkat kepuasan tendik terhadap pengelolaan sampah di UPNVY tergolong tidak puas (49%), sedang (22%), dan beberapa sudah puas (28%). Begitu pula dengan responden mahasiswa, diketahui bahwa mahasiswa tidak puas dengan sistem pengelolaan sampah sebanyak 60%, sedang sebanyak 32% dan puas sebanyak 8%.

Secara umum sivitas akademika menyatakan kurang puas terhadap sistem pengelolaan sampah di UPNVY. Hal tersebut disebabkan karena beberapa alasan, diantaranya fasilitas pengelolaan sampah di kampus yang kurang memadai seperti tempat sampah yang belum terpilah dan tempat penampungan sementara (TPS) sampah yang masih kumuh, serta belum adanya penerapan 3R. Pewadahan sampah di lingkungan UPNVY masih cenderung dicampur kemudian sampah dikumpulkan ke beberapa titik kumpul sampah atau TPS hingga akhirnya diangkut ke TPA. Secara umum sistem pengelolaan sampah di UPNVY masih menerapkan sistem end of pipe dan open dumping. Sistem ini merupakan pilihan yang paling buruk dalam segitiga pengelolaan sampah (Gambar 6).



Gambar 6. Waste Management Hierarchy
(Sumber : EPA, 2016)

Luasan lahan TPA akan semakin bertambah apabila jumlah timbulan sampah yang dibuang ke TPA tidak ditekan atau diturunkan. Selain itu, penimbunan sampah di TPA masih menggunakan sistem open dumping. Kerugian dari sistem open dumping antara lain memicu peningkatan gas rumah kaca seperti CH₄, munculnya sarang penyakit, serta menghasilkan lindi yang dapat mencemari air dan tanah di sekitarnya (Gunamantha, 2010; Setiyono dan Wahyono, 2002). Undang-Undang No. 18 tahun 2008 mewajibkan setiap penghasil sampah untuk mengelola sampah, salah satunya melalui implementasi prinsip 3R untuk menekan jumlah timbulan sampah kampus UPNVY yang dibuang ke TPA.

Secara global, segitiga hierarki pengelolaan sampah (Gambar 6) telah menjadi acuan dan diterapkan dalam perwujudan lingkungan pendidikan bebas sampah oleh berbagai institusi pendidikan. Pengurangan sampah merupakan bentuk pengelolaan yang 3 tingkat lebih baik daripada pembuangan sampah ke TPA dalam hierarki tersebut. Penanganan sampah di UPNVY masih bertumpu pada TPA, yang apabila ditilik lebih jauh seharusnya sebagai salah satu institusi pendidikan UPNVY menjadi pioneer dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik dan ramah lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian ini, pengetahuan dan sikap terhadap sampah yang dimiliki sivitas akademika UPNVY sudah termasuk baik. Namun, karena fasilitas dan sistem pengelolaan sampah yang belum memadai dan belum optimal maka muncul perilaku yang belum sepenuhnya baik. Bentuk optimalisasi dapat berupa peningkatan pengetahuan sivitas akademika mengenai 3R melalui sosialisasi, pengadaan sarana prasarana penunjang yang sesuai dengan kebutuhan persampahan, dan peningkatan keterampilan petugas kebersihan dalam penerapan 3R di Kampus UPNVY.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diperoleh pada penelitian ini adalah:

- Tingkat pengetahuan sivitas akademika di lingkungan UPNVY terhadap sampah cenderung tinggi (72%-99%) meskipun masing-masing responden memiliki latar belakang pendidikan berbeda.
- Sikap sivitas akademika di lingkungan UPNVY terhadap sampah cenderung baik (96%-98%).
- Perilaku sivitas akademika terhadap sampah di kampus cenderung baik untuk dosen (93%) tetapi sedang dan buruk untuk tendik dan mahasiswa.

- Kepuasan sivitas akademika terhadap sistem pengelolaan sampah di UPN VY secara umum tidak puas (49%-77%) hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan dan fasilitas pelayanan pengelolaan di UPN VY masih belum optimal.
- Diperlukan optimalisasi untuk dapat meningkatkan sistem pengelolaan sampah, sebagai upaya mendukung pengetahuan dan sikap sivitas akademika yang secara umum sudah baik sehingga dapat memunculkan perilaku yang baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UPN “Veteran” Yogyakarta karena kegiatan penelitian ini dibiayai sepenuhnya dari hibah penelitian kelembagaan internal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anifa, T., Anward, H. H., dan Erlyani, N. (2017). Perbedaan Perilaku Membuang Sampah Pada Siswa Antara Sebelum dan Sesudah Diberikan Live and Symbolic Modeling. *Jurnal Ecopsy*, 4(2), 96. <https://doi.org/10.20527/ecopsy.v4i2.3850>
- Damanhuri, Enri dan Tri Padmi. (2016). *Pengelolaan Sampah Terpadu*. Penerbit ITB: Bandung.
- DLH. (2017). *Laporan Akhir: Studi Master Plan Pengurangan Sampah di Kota Yogyakarta*.
- EPA. (2016). *Waste Management Hierarchy and Homeland Security Incidents*. <https://www.epa.gov/homeland-security-waste/waste-management-hierarchy-and-homeland-security-incidents> (Diakses: 4 Agustus 2019).
- Gunamantha, M., Fandeli, C., Tandjung, S. D., dan Sarto. (2010). ‘Life Cycle Assessment Pilihan Pengolahan Sampah: Studi Kasus Wilayah Kartamantul Provinsi D.I. Yogyakarta’, *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 17(2), 78-88.
- KLH. (2014). *Kebijakan Pengelolaan Sampah Dalam Penerapan Teknologi Sumber Energi Alternatif Terbaru*. http://www.unescap.org/sites/default/files/Session%202_2_MoE.pdf (Diakses: 2 Agustus 2019)
- Notoatmodjo, S. (2007). *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*. Jakarta: Rineka Cipta.
- N.A, Saputra., & Mulasari, S. (2017). Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Pengelolaan Sampah pada Karyawan di Kampus. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(1), 22–27. <https://doi.org/10.12928/kesmas.v11i1.4212> (Diakses: 4 Agustus 2019)
- Sari, N., & Mulasari, S. A. (2017). Pengetahuan, Sikap Dan Pendidikan Dengan Perilaku Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta. *Jurnal Medika Respati*, 12(April), 1907–3887. Retrieved from <http://eprints.uad.ac.id/8012/1/30-55-1-SM.pdf> (Diakses: 4 Agustus 2019)
- Sunyoto, D. (2012). *Analisis Validitas dan Asumsi Klasik*. Yogyakarta: Gava Media.
- World Bank. (2012). *What a waste special focus: A Global Review of Solid Waste Management No. 15* (Diakses: 2 Agustus 2019)

POTENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL PARA DOSEN UPN VETERAN YOGYAKARTA 2012-2019

Ari Wijayani^{1*} dan Ninik Probosari^{2*}

1, Department of Agrotechnology, Faculty of Agriculture, UPN “Veteran” Yogyakarta

2, Department of Management, Faculty of Economy & Business, UPN “Veteran” Yogyakarta

e-mail: ari.wijayani@upnyk.ac.id

ABSTRACT

The intellectual property potential of UPN Veteran Yogyakarta lecturers is very large when viewed from the amount of research and community service that is funded annually. But not all list the intellectual property potential. Strengthening the center of UPNVY KI is continuously enhanced by improving the human resources of Central KI through patent search training with the latest soft-ware, writing patent descriptions, and training of legal aspects related to KI. The registration of HKI through the UPNVY KI Center from 2012-2019 noted 224 copyrights, 17 industrial design, 2444 trademarks and 11 patents.

Keywords: The intellectual property, copyrights, industrial design, trademarks and patents.

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual merupakan padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. HKI juga merupakan sesuatu yang given dan inheren dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah ke sana. Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah HKI. Informasi dan knowledge merupakan kekayaan intelektual (intellectual property) yang memiliki nilai-nilai moral (moral values), juga memiliki nilai ekonomi (economic values). Oleh karena itu, proses perolehan dan pemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai wujud perlindungan terhadap kekayaan intelektual, mutlak harus didukung, difasilitasi dan dipermudah oleh semua pihak (Ditjen HKI, 2006).

Permasalahan mengenai Hak Kekayaan Intelektual akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Suyanto, 2005). Aspek teknologi juga merupakan faktor yang sangat dominan dalam perkembangan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat

saat ini telah menyebabkan dunia terasa semakin sempit, informasi dapat dengan mudah dan cepat tersebar ke seluruh pelosok dunia. Pada keadaan seperti ini Hak Kekayaan Intelektual menjadi semakin penting (Ditjen HKI, 2006). Hal ini disebabkan Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak monopoli yang dapat digunakan untuk melindungi investasi dan dapat dialihkan haknya.

Perguruan Tinggi (PT) sebagai wahana intelektual sesungguhnya telah memiliki tradisi ilmiah terutama penelitian sebagai perwujudan fungsi Tri Dharma. Selain untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian juga dilakukan dalam rangka menghasilkan inovasi baru guna memecahkan persoalan riil masyarakat dan bangsa. Berbagai upaya dilakukan secara internal oleh masing-masing Perguruan Tinggi. Secara nasional peningkatan budaya dan iklim penelitian banyak mendapatkan dukungan dari berbagai instansi. Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Riset dan Teknologi adalah pihak yang paling banyak melakukan dukungan dengan berbagai skema pendanaan berupa hibah atau insentif riset kepada Perguruan Tinggi.

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. (UPN VY) merupakan salah satu dari lima besar Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta. Didirikan sejak 1958, kini telah memiliki lima fakultas yaitu teknologi mineral, teknologi industri, ekonomi & bisnis, ilmu sosial dan ilmu politik serta pertanian. Proses invensi di UPN VY telah berjalan baik melalui dukungan terhadap tradisi penelitian. Beberapa hasil penelitian telah dipublikasikan dalam tulisan ilmiah di beberapa jurnal (baik nasional maupun internasional) dan prosiding seminar. Ada juga hasil penelitian berupa inovasi yang dapat diadopsi langsung oleh masyarakat. Luaran dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), kategori hak cipta, desain industri, merek dan paten juga telah dihasilkan meski jumlahnya masih sangat terbatas. Kurun waktu lima tahun terakhir hanya ada 11 judul yang didaftarkan hak patennya.

TINJAUAN PUSTAKA

Sentra Kekayaan Intelektual (HKI) UPN Veteran Yogyakarta berdiri pada tahun 2012, dengan sebuah surat keputusan Rektor dengan nama WIMAYARISTEK. Satu langkah maju setelah terbentuknya sentra HKI adalah kesadaran para dosen peneliti untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya, demikian juga masyarakat umum disekitar kampus yang mempunyai usaha kecil ikut serta menyadari pentingnya perlindungan merek dagang dari usaha mereka. Tidak kurang dari 11 paten, 200 hak cipta para dosen sudah didaftarkan melalui sentra HKI dan 2000 lebih merek dagang UKM didaftarkan melalui sentra HKI UPN VY juga. Bertolak dari gambaran umum tersebut, keberadaan sentra HKI di UPN VY merupakan kebutuhan penting dalam aspek pengembangan tradisi ilmiah. Dengan sentra HKI, Perguruan Tinggi dapat mendorong peningkatan proses invensi civitas akademisnya dan berpartisipasi dalam pengembangan masyarakat dan industri dengan temuan baru yang jelas legalitas dan perlindungan hukumnya.

Keberadaan Sentra HKI (Hak Kekayaan Intelektual) memiliki fungsi antara lain mendorong proses invensi atau penemuan hasil karya cipta atau kreatifitas baru, memberikan penguatan legalitas dan perlindungan hukum atas invensi tersebut, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya HKI, mendukung dunia usaha dan industri dengan penyediaan berbagai macam kebutuhan teknologi. Sentra HKI berupaya memberikan pendampingan mengenai legalitas dan perlindungan hukum terhadap inovasi tersebut memungkinkan terjadinya kasus penjiplakan (plagiat) yang merugikan banyak pihak. Manfaat dipatenkannya suatu hasil penelitian akan menjadi eksklusif pada aspek komersialisasi produk HKI-nya, merupakan aset bisnis yang mendatangkan keuntungan finansial, memudahkan dalam

pengembangan pasar, sarana iklan yang bersifat global, merupakan bukti kepemilikan dan dapat dialihkan.

Pengelolaan sentra HKI di UPN VY diharapkan dapat menjadi unit komersial yang menguntungkan melalui layanan pemanfaatan berbagai produk HKI yang dibutuhkan oleh masyarakat dan industri. Pada sisi lain, sentra HKI di UPN VY dapat mendorong perolehan HKI dari berbagai produk budaya dan kreatifitas masyarakat dengan sosialisasi dan bantuan layanan pendaftaran untuk perolehan HKI. Pada akhirnya keberadaan sentra HKI di UPN VY diharapkan mampu mendorong peningkatan peringkat akreditasi institusi dan peningkatan martabat bangsa dan negara di mata

Untuk mendorong peningkatan perolehan HKI di Perguruan Tinggi dibutuhkan peran aktif berbagai pihak dari mulai unsur pimpinan, dosen dan mahasiswa, terlebih lagi komitmen lembaganya untuk memfasilitasi proses perolehan HKI atas berbagai potensi yang dimiliki Perguruan Tinggi tersebut. Pembentukan dan penguatan sentra HKI itu pun telah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi (UU Sisnas Litbangrap Iptek). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai wujud perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual, mutlak harus didukung, difasilitasi dan dipermudah oleh semua pihak. Hal ini tidak saja karena informasi dan knowledge merupakan Kekayaan Intelektual (intellectual property) yang memiliki nilai-nilai moral (moral values), melainkan juga memiliki nilai ekonomi (economic values). HKI merupakan perlindungan hukum sebagai insentif bagi inventor, desainer dan pencipta dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan hasil kreatifitasnya (Utomo, 2010).

Penelitian sebagai salah satu pilar tridharma selain pendidikan dan pengabdian masyarakat, memiliki peran sentral dalam upaya mewujudkan visi UPN VY. Dengan demikian, kegiatan penelitian perlu diselenggarakan untuk menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga, yang menyejahterakan individu dan masyarakat, mendukung pembangunan daerah dan nasional, serta berkontribusi pada pemecahan masalah global. Aktivitas penelitian dosen UPN VY baik dengan menggunakan dana DIPA maupun dana eksternal baik dari Kemenristek Dikti, Pemda, Kementerian2, BUMN maupun yang lainnya telah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (RIP UPN VY, 2018). Indikator kinerja utama penelitian (IKUP) ditentukan oleh luaran atau pemanfaatan hasil-hasil penelitian. Terdapat sembilan jenis luaran penelitian yang selama ini menjadi pijakan aktivitas penelitian dosen, yaitu publikasi ilmiah, sebagai pemakalah dalam pertemuan ilmiah sebagai pemakalah utama (Keynote speaker), HKI, teknologi tepat guna, desain model, dan buku ajar. Dari data yang ada di LPPM UPN VY tahun 2019 untuk jenis Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), hanya ada 10 judul paten yang didaftarkan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 (Ristek, 2018), paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Ayat 1). Hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Undang-undang Paten). Paten diberikan dalam ruang lingkup bidang teknologi, yaitu ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri. Di samping paten, dikenal pula paten sederhana (utility models) yang hampir sama dengan paten, tetapi memiliki syarat-syarat perlindungan yang lebih sederhana. Paten dan paten sederhana di Indonesia diatur dalam Undang-undang Paten (UUP).

Tabel 1. Beberapa Situs alamat Informasi Paten yang dapat diakses

Pemilik	Situs
World Intellectual Property Organization	http://www.wipo.int/ipdl/en/search/pct
Thomson Group	http://www.delphion.com
US patent office	http://www.uspto.gov/patft/index.html
European patent office	http://www.ep.espacenet.com

Setidaknya ada beberapa keuntungan dalam penegakan HKI, yang dapat berpengaruh terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Seperti adanya perlindungan karya tradisional bangsa Indonesia, mencegah pencurian karya lokal yang umumnya masuk kategori paten sederhana dan penemuan-penemuan baru. Adanya masukan pendapatan untuk para penemu/ pencipta. Meningkatkan intensif untuk terus berkarya bagi penemu paten, baik yang dari kalangan pemerintah maupun yang swasta dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi. Di samping itu, sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia se- hingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dihindarkan/dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi. Meningkatkan pemahaman hukum HKI pada aparat hukum dan masyarakat. Purba (2001), menandakan pentingnya pembudayaan HKI dalam masyarakat. Masyarakat harus menyadari bahwa HKI merupakan aset yang secara hukum berada dalam kewenangan penuh pemiliknya. Temuan yang sudah dijamin dengan HKI dalam bentuk paten atau hak cipta-tidak bisa diklaim lagi oleh pihak lain (Suryomurcito, 2003).

METODOLOGI

Desain penelitian ini adalah diskriptif atau eksploratif, untuk menggali data sesuai apa adanya. Populasi penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian dosen UPNVY periode tahun 2012-2019, sedangkan sampel penelitian hasil penelitian yang berpotensi HKI periode tahun 2012-2019 yang diambil secara purposif dengan pertimbangan penelitian yang dijadikan sampel dipilih yang dananya lebih dari dua puluh juta rupiah. Metode pengambilan data dilakukan dengan metode dokumentasi, wawancara, dan pemberian pelatihan atau workshop kepada para dosen yang memiliki hasil penelitian yang berpotensi HKI. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi cek lis untuk analisis tingkat kebaruan (novelity) informasi yang terdapat dalam abstrak hasil penelitian dosen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ditinjau dari jumlah dana penelitian yang terserap di LPPM UPNVY dibandingkan dengan jumlah perolehan perlindungan Hak Paten dan HKI para dosen menunjukkan perbandingan yang tidak sebanding (sangat sedikit). Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa hal, yaitu: (1) minimnya kesadaran peneliti dan pengabdian akan perlindungan HKI atas karyanya, dan (2) keterbatasan dana untuk pengurusan perolehan HKI. Dan (3) ketidaktahuan para dosen dalam pengurusan HKI. Sebetulnya Sentra KI WIMAYARISTEK UPNVY sering menyelenggarakan kegiatan workshop mengenai seluk beluk HKI. Kegiatan tersebut secara rutin dilaksanakan satu kali dalam setiap tahun, namun belum efektif dan belum diikuti secara merata oleh kalangan civitas akademika di setiap fakultas yang ada di UPNVY. Hal ini terbukti dengan data

yang ada di LPPM, tahun 2012-2019 menunjukkan bahwa masih lebih dari 80% peneliti belum mengetahui prosedur pendaftaran paten dan bagaimana membuat draft paten.

Sentra KI perlu lebih diintensifkan, sehingga semakin banyak temuan-temuan baru yang dapat didaftarkan HKI-nya. Dalam menghadapi era globalisasi dituntut adanya proses transformasi dan inventarisasi yang berhubungan dengan informasi teknologi, terlebih di suatu Perguruan Tinggi, karena hal itu dapat digunakan sebagai referensi dan evaluasi kegiatan pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan lainnya. Upaya tersebut merupakan cara tepat untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian yang sudah dilakukan, yang mengakibatkan pemborosan sumber daya dan lebih penting lagi menghindari terjadinya praktik plagiasi. Informasi teknologi juga dapat dijadikan basis pemilihan topik dan evaluasi kegiatan penelitian, sehingga pemanfaatan hasil penelitian dapat dioptimalkan.

Berbagai kegiatan yang relevan dalam rangka untuk meningkatkan jumlah karya para civitas akademika UPN VY termasuk di dalamnya melihat potensi HKI para dosen. Data yang berhasil kami kumpulkan seperti terlihat pada tabel 2.

Tabel 2. Pendaftaran Kekayaan Intelektual di UPN Veteran Yogyakarta yang berasal dari dosen, mahasiswa dan masyarakat umum tahun 2012-2019

Hak Cipta (buah)	Disain Industri (buah)	Merek Dagang (buah)	Paten (buah)
224	17	2444	11

Sumber : data primer Sentra KI WIMAYARISTEK

Tabel 2 menunjukkan bahwa sudah banyak kekayaan intelektual yang didaftarkan melalui Sentra KI WIMAYARISTEK UPN VY. Dari data tersebut jumlah paling banyak adalah merek dagang, yang diperoleh dari para UKM. Untuk dosen di UPN VY baru 11 buah paten yang terdaftar. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan dengan jumlah penelitian dan pengabdian yang dilakukan dosen. Semua bentuk kegiatan di atas dalam rangka untuk merespon WIPO yang menginformasikan bahwa terdapat dua kategori sebuah karya yang dapat diraih oleh penemunya terkait dengan masalah HKI ini, yaitu: (1) hak cipta dan hak-hak terkait (copy right and related rights) dan (2) hak milik perindustrian (industrial property). Hak cipta (copy right) di dalamnya melindungi karya-karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni (seperti: novel, puisi, sandiwara, film, ciptaan musik, lukisan, gambar, fotografi, ukiran, dan karya-karya arsitektur). Sedangkan, hak milik perindustrian (industrial property), misalnya hak atas merek (trade marks), termasuk merek jasa, hak desain industri (industrial designs), hak paten (patents), dan rahasia dagang (undisclosed information, including trade secrets). 11 paten yang telah didaftarkan melalui Sentra KI dapat dirinci sebagai berikut (tabel 3).

Tabel 3. Rincian paten yang didaftarkan melalui Sentra KI WIMAYARISTEK UPN Veteran Yogyakarta yang berasal dari dosen tahun 2012-2019

Fakultas	Paten alat	Paten komposisi bahan
Fak. Pertanian	3	3
Fak. Teknik Industri	1	
Fak. Teknologi Mineral	2	
Fak. Ekonomi & Bisnis	2	

Sumber : data primer Sentra KI WIMAYARISTEK

Sumber daya manusia di lingkungan Perguruan Tinggi merupakan SDM yang terlatih dan terdidik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, seyogyanya sangat berpotensi untuk menghasilkan kekayaan intelektual. Hasil penelitian yang dilakukan di perguruan tinggi perlu mendapat perlindungan hukum, tidak saja karena hasil penelitian tersebut merupakan kekayaan intelektual (intellectua property) yang memiliki nilai moral (moral value), melainkan juga memiliki nilai ekonomi (economic value) perlu dilindungi. Peneliti dan perekayasa yang ada di Perguruan Tinggi diharapkan untuk memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian. Perguruan Tinggi memiliki peran penting sebagai pengembangan untuk menghasilkan penemuan baru di berbagai bidang teknologi. Peningkatan dan perlindungan HKI akan mempercepat pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong perubahan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup manusia yang memberikan kebutuhan masyarakat luas (Hariyani, 2010).

Saran bagi para peneliti dan pengabdi, yaitu: (1) pada saat penyusunan proposal penelitian sudah seharusnya terlintas untuk memikirkan produk penelitian yang layak untuk dipatenkan, (2) pada saat pelaksanaan penelitian atau kegiatan PPM, temuan akhir kegiatan yang memungkinkan untuk di- patenkan perlu diupayakan dengan sebaik-baiknya sehingga memperoleh hasil yang maksimal dan layak untuk dipatenkan, dan (3) mencermati berbagai aturan dan tata cara dalam usulan paten dan sesegera mungkin menyusun draft paten atas karyanya tersebut sebagai produk atau luaran dari hasil penelitian atau pengabdiannya.

Berbagai kegiatan yang relevan dalam rangka untuk meningkatkan jumlah karya para civitas adademika UPNVY termasuk di dalamnya hasil penelitian dan pengabdian adalah sebagai berikut. (1). Sosialisasi Kekayaan Intelektual kepada seluruh civitas akademika UPNVY. Kegiatan sosialisasi Kekayaan Intelektual bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang arti penting perlindungan hak kekayaan intelektual hasil-hasil penelitian atau karya non penelitian yang berpotensi HKI, sasaran kegiatan adalah seluruh civitas akademika UPNVY dan masyarakat luar kampus. (2). Workshop Drafting Paten/ Penulisan Deskripsi Paten. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada para peneliti atau pemilik karya yang akan mendaftarkan hasil penelitian karyanya untuk mendapat perlindungan Hak Paten. (3). Penyusunan Panduan Perolehan Hak Paten/ HKI. Kegiatan ini bertujuan memberikan petunjuk secara tertulis dalam bentuk buku panduan yang berkaitan dengan pemahaman dan proses pengurusan berbagai macam perlindungan HKI. (4). Pengurusan Proses Pendaftaran Hak Paten dan Kepemilikan HKI. Kegiatan ini direncanakan untuk membantu proses pendaftaran Paten/ HKI di Dirjen HKI, termasuk didalamnya prosedur pengisian form pendaftaran. (5). Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Pengelola Sentra HKI. Untuk meningkatkan kemampuan Sumber daya pengelola sentra HKI perlu diikuti dalam pelatihan-pelatihan Telusur Paten dengan perangkat soft- ware terbaru, penulisan deskripsi paten, dan pelatihan aspek-aspek hukum yang berkaitan HKI.

KESIMPULAN

Potensi kekayaan intelektual para dosen UPN Veteran Yogyakarta sangat besar apabila dilihat dari jumlah penelitian dan [engabdian msyarakat yang didanai setiap tahunnya. Akan tetapi belum semuanya mendaftarkan potensi kekayaan intelektual tersebut. Penguatan Sentra KI UPNVY terus ditingkatkan dengan cara peningkatan kemampuan SDM Sentra KI melalui pelatihan-pelatihan telusur paten dengan perangkat soft- ware terbaru, penulisan deskripsi paten, dan pelatihan aspek-aspek hukum yang berkaitan KI.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kami ucapkan kepada LPPM UPN Veteran Yogyakarta yang telah mendanai penelitian ini melalui hibah Penelitian Kelembagaan.

REFERENSI

- Ditjen HKI 2006. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Dilengkapi dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (Bekerja sama dengan EC-ASEAN IPRs Co-operation Programme (ECAP II), Jakarta, ditjen HKI-ECAP II, 2006.
- Hariyani, I. 2010. *Prosedur Mengurus HKI Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,
- Kementrian Riset dan Teknologi. 2018. *Pedoman Insentif Hak Kekayaan Intelektual*.
- Purba, ZU. 2001. *Perlindungan dan Penegakan Hukum HKI*. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Ham RI. Makassar. 20 November 2001.
- Suyanto, AH. 2005. *Peran Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Dunia Pendidikan*. <http://www.asep-hs.web.ugm.ac.id>
- Suryomurcito. 2003. *Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Lembaga Peradilan*. Aktualita HKI. Januari 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 19 Tahun 2002. *Tentang Hak Cipta*.
- Utomo, TS. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta,

PENINGKATAN MUTU AKREDITASI PROGRAM STUDI MELALUI PERCEPATAN WAKTU PENYELESAIAN TUGAS AKHIR DAN KULIAH KERJA PROFESI MAHASISWA

Budiarto, Agus Santosa

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Abstrak

Tujuan Penelitian Menganalisis model penyelesaian Kuliah Kerja Profesi (Magang) dan Tugas Akhir (Skripsi) yang lebih cepat dan singkat guna meningkatkan nilai akreditasi Prodi Agribisnis dengan tetap mengutamakan mutu lulusan. Metode dasar penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif dan metode Survei dalam pelaksanaannya. Teknik analisis data menggunakan Diagram Fishbone, Diagram Gabungan dan Diagram Pohon Keputusan. Hasil penelitian model pengaturan jadwal pelaksanaan seminar proposal dan seminar hasil penelitian serta ujian skripsi ditentukan oleh jurusan. Kuliah kerja profesi (KKP) dibuat dosen pembimbing sekaligus menjadi dosen penguji. Out put yang dihasilkan buku pedoman kuliah kerja profesi, buku pedoman skripsi dan alur pendaftaran KKP, seminar dan ujian skripsi.

Kata kunci : Kuliah Kerja Profesi, Seminar, Skripsi

PENDAHULUAN

Capaian Akreditasi Program Studi suatu Perguruan Tinggi sangat penting guna mempertahankan eksistensi dan penjaminan mutu lembaga pendidikan. Capaian Akreditasi dijadikan tolok ukur awal oleh calon mahasiswa dalam menentukan pilihan saat penerimaan mahasiswa baru. Penilaian masyarakat dalam menilai suatu perguruan tinggi didasarkan mulai status perguruan tinggi negeri dan swasta. Pertimbangan selanjutnya adalah capaian akreditasi program studi yang dimiliki perguruan tinggi bersangkutan.

Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Yogyakarta sejak pertama dibuka tahun 1958 sampai dengan tahun 2016 belum pernah mencapai Akreditasi A. Capaian Akreditasi untuk periode tahun 2013 sampai dengan 2017 masih berada pada Akreditasi B dengan nilai 359. Walaupun hampir mencapai nilai 361 tetapi masih belum tercapai.

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: 1) kejelasan arah visi dan misi program studi pada Standar Satu masih rendah, 2) masih lemahnya Penjaminan mutu pada Standar Dua, 3) Profil mahasiswa dan lulusan pada Standar Ketiga yang masih rendah, 4) Pencapaian prestasi/reputasi dosen (misalnya prestasi dalam pendidikan, penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat) pada Standar Keempat yang masih rendah, 5) Rata-rata lama penyelesaian tugas akhir/skripsi pada Standar Kelima yang masih rendah, 6) Perolehan dan Alokasi Dana perguruan tinggi pada Standar Keenam yang masih rendah, dan 7) Karya dosen dan atau mahasiswa Program Studi yang telah memperoleh/ sedang memproses pencatatan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada Standar Ketujuh yang masih belum ada.

Baru pada Re-akreditasi tahun 2018, Prodi Agribisnis dapat mencapai Akreditasi BAN-PT dengan predikat A dengan nilai 374. Capaian ini berlaku untuk periode Tahun 2018 sampai dengan 2022. Hal yang perlu diperhatikan bahwa walaupun sudah berhasil mencapai Akreditasi A, selisih nilai capaian baru mencapai 13 poin lebih tinggi dari ambang batas

minimal A sebesar 361 poin, sedangkan batas maksimal sebesar 400. Hal ini berarti nilai capaian diharapkan dapat mendekati titik aman supaya capaian Akreditasi A pada Prodi Agribisnis dapat dipertahankan untuk masa yang akan datang. Dalam hal ini nilai capaian Akreditasi A masih harus ditingkatkan sampai dengan di atas 385 poin.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Prodi Agribisnis harus melakukan Evaluasi Capaian Akreditasi yang telah diperoleh sebesar 374 poin. Evaluasi harus dilakukan untuk masing-masing Standar Penilaian Borang Akreditasi. Hal ini diharapkan dapat mengidentifikasi item-item pada masing-masing standar yang masih rendah dan memetakan upaya perbaikan yang mungkin dilakukan sesuai skala prioritas waktu perbaikannya, sehingga untuk item-item yang bisa diperbaiki dalam jangka pendek (satu sampai tiga tahun) harus diprioritaskan. Dengan demikian dapat dipersiapkan untuk meningkatkan Capaian Akreditasi periode tahun 2022 mendatang.

Hasil Evaluasi Capaian Akreditasi Prodi Agribisnis diketahui ada tujuh item yang masih dapat ditingkatkan dalam jangka pendek. Salah satunya adalah rata-rata lama penyelesaian tugas akhir/skripsi yang masih rendah. Lamanya waktu penyelesaian tugas akhir/skripsi akan mengakibatkan beberapa penurunan pada beberapa poin penilaian akreditasi, meliputi: 1) rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik per semester, 2) Pelaksanaan kegiatan pembimbingan akademik, 3) rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir, 4) rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian Tugas Akhir, 5) rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan lamanya waktu penyelesaian tugas akhir/skripsi, antara lain: 1) waktu penyelesaian tugas akhir/skripsi yang cenderung lama, 2) model pengaturan jadwal seminar dan kuliah kerja profesi (KKP) yang belum optimal, 3) model penetapan surat tugas pembimbing dan penelaah untuk tugas akhir/skripsi dan KKP yang lambat, 4) model pelaksanaan bimbingan (antara pembimbing I dan pembimbing II) dalam penyelesaian tugas akhir/skripsi belum efektif dan efisien, 5) antrian jadwal seminar proposal, seminar hasil dan ujian skripsi yang panjang

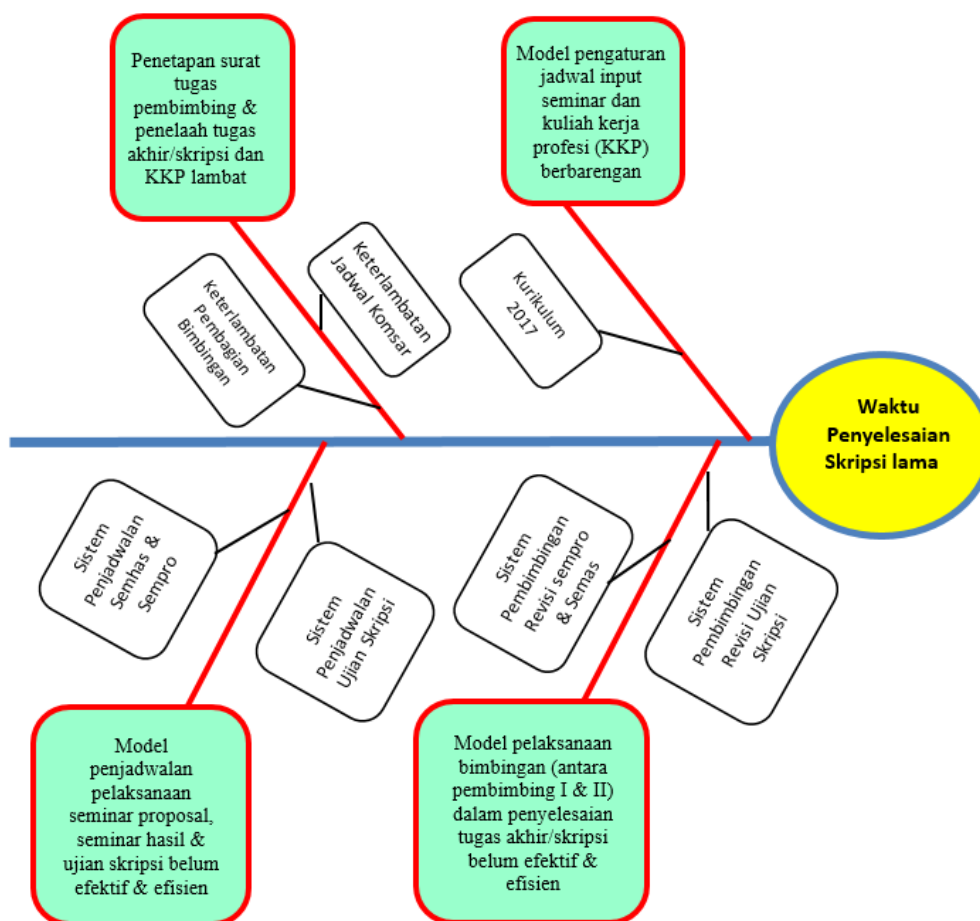
Berdasarkan fenomena tersebut, penulis menganggap penting untuk dapat menjawab permasalahan yang terjadi dengan mengangkat penelitian dengan judul “Peningkatan Mutu Akreditasi Prodi Melalui Percepatan Penyelesaian Tugas Akhir dan Kuliah Kerja Profesi Mahasiswa”.

METODE PENELITIAN

Metode dasar penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 2011). Tujuan dari penelitian deksriptif ini adalah untuk membuat deksripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan antar fenomenal yang diselidiki. Dalam penelitian ini mendeskripsikan mengenai pelaksanaan pengendalian kualitas proses penyelesaian tugas akhir mahasiswa Program studi Agribisnis Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Yogyakarta. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Survai, yaitu: pengamatan atau penyelidikan yang kritis untuk mendapatkan keterangan terhadap sesuatu persoalan tertentu pada lokasi tertentu, atau suatu studi ekstensif yang dipolakan untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan (Daniel, 2002) Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik Purposive Sampling. Teknik Purposive Sampling digunakan untuk menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu dan sumber datanya berasal dari orang yang ahli di bidangnya

(Sugiyono, 2016). Berdasarkan penjelasan tersebut responden yang dilibatkan dalam penelitian ini meliputi Ketua Jurusan Agribisnis, Sekertaris Jurusan Agribisnis, Koordinator Prodi Agribisnis, Dewan Dosen Prodi Agribisnis, Tendik Prodi Agribisnis, dan Pengurus Himpunan dan perwakilan dari mahasiswa.

Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian digunakan tiga alat bantu, yaitu: Diagram Fishbone , Diagram Gabungan dan Diagram Pohon Keputusan.



Gambar 1.

Diagram Fishbone : faktor-faktor penyebab waktu penyelesaian tugas akhir/skripsi yang lama

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model pengaturan jadwal input seminar dan kuliah kerja profesi (KKP) bersamaan, sehingga pembagian waktu penyelesaian kedua kegiatan tersebut saling menggantikan yang berakibat lambatnya penyelesaian kedua kegiatan tersebut , sehingga perlu sosialisasi dan perencanaan penyelesaian kedua proposal tersebut, diutamakan diselesaikan terlebih dahulu proposal KKP dan pelaksanaan lapangan dijadwal minimal per minggu dua kali atau lapangan dilakukan setelah selesai UAS. Untuk seminar proposal skripsi dilaksanakan pada akhir semester sebelum UAS.

Penetapan surat tugas pembimbing dan penelaah untuk tugas akhir/skripsi dan KKP yang masih lambat, sehingga menimbulkan waktu tunggu mahasiswa untuk memulai

bimbingan terlalu lama, kurang lebih dua bulan dari input. Hal ini terkait dengan tim penjaminan mutu, jadwal dipercepat untuk koreksi topik dan penentuan pembimbing dan penelaah bersamaan dengan dimulai kuliah, minggu kedua dan minggu ke empat , sehingga surat tugas pembimbing maksimal satu bulan dari dimulainya perkuliahan.

Model teknis pelaksanaan bimbingan (antara pembimbing I dan pembimbing II) dalam penyelesaian tugas akhir/skripsi belum efektif dan efisien, sehingga total waktu bimbingan untuk pembimbing I dan pembimbing II sangat lama mencapai dua bulan. Perlu diterbitkan standar prosedur pembimbing I dan II dan sosialisasi kepada mahasiswa.

Model penjadwalan pelaksanaan seminar proposal, seminar hasil dan ujian skripsi belum efektif dan efisien, sehingga antrian jadwal seminar proposal, seminar hasil dan ujian skripsi yang panjang, kurang lebih dua bulan. Jadwal dibuat selama lima hari senin sampai dengan jumat .

Out put yang dihasilkan buku pedoman kuliah kerja profesi , buku pedoman skripsi dan alur pendaftaran KKP, seminar dan ujian skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. 2010. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)
- Heizer, Jay dan Barry Render. 2015. Manajemen Operasi: Keberlangsungan dan Rantai Pasokan. Edisi Sebelas. Diterjemahkan oleh: Hirson Kurnia, Ratna Saraswati, David Wijaya. Salemba Empat. Jakarta.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional. Nomor: 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- Narbuko, C dan A. Achmadi. 2001. Metodologi Penelitian. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Nazir, M. 2011. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sudiyono. 2004. Manajemen Pendidikan Tinggi. Rineka Cipta. Jakarta.
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN LAYANAN AKADEMIK PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Hiras Pasaribu, ALP. Yuwidianoro, Siti Rokhimah, Indah Kartika Sandhi, Gita Astyka Rahmanda
hiras.pasaribu@upnyk.ac.id , yuwidianoro@gmail.com , sitirokhimah@upnyk.ac.id
indahkartika@upnyk.ac.id , gitaastika.ga@gmail.com
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that influence the satisfaction of academic services in accounting students of the Faculty of Economics, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. The factors identified were organizational culture, service quality, and the use of information technology. Data was obtained by distributing questionnaires in Accounting Study Program students conducted by a simple random sampling system. Samples were taken at least 10% of the population, as many as 100 people from students who are taking the 4th to 8th semester because these students have often received academic services at the Faculty of Economics and Business UPN "Veteran" Yogyakarta. This research was tested using a correlation test. The results showed that there was a positive and significant influence on organizational culture, service quality, and the use of information technology simultaneously on academic service satisfaction.

Keywords: Governance as Organizational Culture, Service Quality, Information Technology, and Academic Service Satisfaction

LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia. Pendidikan yang ada di Indonesia berjenjang dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia yang telah dituangkan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Penyelenggaraan sampai pada tingkat pendidikan tinggi menjadi indikator kesadaran masyarakat untuk menempuh studi lanjut yang akan memberikan bekal lebih banyak dalam bersaing di kancah regional, nasional maupun internasional.

UPN "Veteran" Yogyakarta merupakan salah satu perguruan tinggi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi di Yogyakarta. Pada tahun 2014, UPN "Veteran" Yogyakarta berubah statusnya dari yang semula merupakan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Perubahan ini memberikan dampak yang besar bagi universitas untuk melakukan pembenahan pelayanan di semua sektor agar mampu

meningkatkan kualitas pelayanan kinerja dan secara berkesinambungan akan mempersiapkan diri dalam persaingan perguruan tinggi di dewasa ini. Upaya perbaikan yang perlu dilakukan seperti perbaikan sarana dan prasarana, pengembangan kurikulum, penyediaan teknologi dan sistem informasi yang mumpuni, serta perluasan kerja sama universitas yang harus didukung dengan tata kelola akademik sebagai budaya organisasi yang kuat.

Tata kelola akademik sebuah lembaga harus menjadi fondasi awal yang kuat sampai pada akhirnya akan mengakar menjadi budaya organisasi yang berhubungan erat dengan efektivitas sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Budaya organisasi berkaitan dengan nilai-nilai yang diyakini, peraturan dan tata perilaku yang menjadi karakteristik seorang atau sekelompok pegawai layanan akademik dalam menangani suatu permasalahan. Pengembangan budaya organisasi pada perguruan tinggi merupakan sebuah upaya yang sangat penting, karena sejalan dengan isu peningkatan kesehatan organisasi perguruan tinggi yang tertuang di dalam dokumen Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003–2010 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Muhammad, 2017). Budaya organisasi tidak bisa hanya menjadi moto belaka, melainkan harus dipahami dan diaplikasikan oleh semua pihak lembaga pendidikan terkait sehingga tercipta pelayanan akademik dengan kualitas yang baik.

Pelayanan akademik yang baik merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan lembaga pendidikan tinggi dalam mengelola kegiatannya terkait dengan pemberian jasa pendidikan yang dapat diidentifikasi melalui kepuasan mahasiswa terhadap lembaga tersebut. Hal ini mengakibatkan pihak lembaga pendidikan perlu melakukan perbaikan mutu layanan dan akademik secara terus-menerus (Qomariah, 2012). Terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) akan memperkuat dorongan semua perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas pelayanan akademik. Susanto (2014) menyatakan bahwa kualitas layanan akademik (*tangible*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, dan *empathy*) secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa, artinya semakin tinggi kualitas pelayanan maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan mahasiswa. Sedangkan, apabila diuji secara parsial, indikator kualitas layanan akademik (*tangible* dan *empathy*) ini yang hanya memberikan pengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa. Berbeda dengan Suanto, Pasaribu dan Kaharudinsyah (2015) menyatakan bahwa kualitas layanan perpustakaan dilihat dari, *responsiveness*, *assurance*, *tangibles*, dan *empathy* berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa, sedangkan *reliability* dan penggunaan teknologi informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan mahasiswa atas layanan perpustakaan.

Keberhasilan sebuah perguruan tinggi tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang ada dalam menunjang kegiatan belajar mengajar maupun lainnya. Seiring perkembangan informasi, keberadaan teknologi informasi di perguruan tinggi dapat meningkatkan layanan dan kepuasan bagi pengguna. Pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan harus dijaga kesesuaiannya dengan fasilitas yang sudah ada, dapat menstimulasikan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memacu usaha peningkatan mutu pendidikan. Kemajuan teknologi yang semakin cepat membuat perguruan tinggi harus memiliki langkah antisipasi melalui kebijakan dan strategi agar tetap dapat bertahan dalam segala bidang. (Aswati et al., 2015). Lemahnya kualitas kompetensi sumber daya manusia dan sikap resistensi terhadap perubahan dapat mengakibatkan minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan layanan akademik (Putra et al., 2014).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dan belum banyaknya penelitian dengan topik ini, peneliti bermaksud untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi

kepuasan layanan akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN "Veteran" Yogyakarta. Penelitian ini mengembangkan dari beberapa penelitian sebelumnya dengan menambahkan variabel penggunaan teknologi dan sistem informasi. Penelitian ini diujikan dengan cara melihat tingkat pengaruh setiap variabel independen secara parsial dan tingkat pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut:

Apakah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kepuasan layanan akademik ?

Apakah kualitas layanan (tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy) berpengaruh positif terhadap kepuasan layanan akademik ?

Apakah penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan layanan akademik ?

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Layanan Akademik

Layanan akademik adalah upaya sistematis pendidikan untuk memfasilitasi peserta didik menguasai isi kurikulum melalui proses pembelajaran sehingga mereka mampu mencapai kompetensi standar yang diterapkan (Rosita et al., 2011). Layanan perguruan tinggi yang dapat diberikan kepada mahasiswa sebagai pemenuhan hak-haknya adalah layanan informasi, layanan sarana dan prasarana, layanan akademik, layanan bimbingan akademik, dan layanan kesejahteraan mahasiswa (Mahmud, 2012).

2. Kepuasan Pelanggan atau Mahasiswa

Pasaribu (2009) mendefinisikan bahwa kepuasan pelanggan adalah perbandingan antara harapan pelanggan dan persepsi pelanggan terhadap apa yang diberikan perusahaan kepada mereka. Hal tersebut selaras dengan definisi yang dikemukakan oleh Tjiptono (2010) bahwa kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respons pelanggan dalam evaluasi ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang ada.

Kuswadi (2004:17) mengatakan bahwa hal-hal yang menentukan puas atau tidak puasnya pelanggan adalah mutu produk atau jasa, mutu pelayanan, harga, waktu penyerahan dan keamanan. Implementasinya pada sektor pendidikan tinggi tercermin pada mutu produk, kemudahan proses administrasi akademik, pengurusan Kartu Rencana Studi (KRS), fleksibilitas bimbingan, kemudahan administrasi surat-menyurat, dan daya tanggap terhadap keluhan mahasiswa.

Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku. Pakpahan (2004) memperkuat argumen tersebut dengan menyatakan bahwa secara mahasiswa cenderung puas terhadap layanan akademik (tatap muka) dan non-akademik (administrasi dan informasi).

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Budaya Organisasi

Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja organisasi, inovasi, stabilitas dan kepuasan kerja (Soejono, 2005; Bashaeyreh's, 2009). Selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chipunza dan Malo (2017), yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara budaya organisasi dan kepuasan kinerja. Berpengaruh positif dan signifikan

mengindikasikan persamaan hasil dengan penelitian yang sama di bidang lain. Adanya keselarasan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut ini:

H1 : Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kepuasan layanan akademik

Kualitas Layanan

Konsep kualitas layanan dalam institusi perguruan tinggi adalah suatu daya tanggap dan realitas dari jasa yang diberikan Institusi perguruan tinggi. Kualitas pelayanan harus dimulai dari kebutuhan Mahasiswa dan berakhir pada persepsi mahasiswa, Kotler (2000). Maisaroh (2003) menyebutkan apabila layanan yang handal dan layanan yang responsif diberikan secara bersama-sama dengan layanan yang meyakinkan, layanan yang empatik, dan layanan penyediaan fasilitas, maka akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepuasan peserta didik. Kualitas pelayanan internal yang semakin baik juga akan mendorong terwujudnya kepuasan pengguna dari pihak eksternal seperti mahasiswa (Pasaribu, 2009; Tjiptono & Diana, 2010; Juhana & Mulyawan, 2015). Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Wahyuningsih et.al. (2013) yang menyimpulkan kualitas layanan yang meliputi bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati memiliki pengaruh secara simultan dan parsial terhadap kepuasan layanan mahasiswa. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut ini:

H2 : Kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan layanan akademik

Penggunaan Teknologi Informasi

Penggunaan sistem informasi dalam pendidikan dan organisasi sangat dibutuhkan guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, daya saing perusahaan di era globalisasi. Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai (Suwardjono, 2008). Oleh karena itu, penyedia informasi wajib memperhatikan relevansi informasi yang disajikan.

Hubungan penggunaan teknologi informasi dengan kepuasan mahasiswa, dibuktikan bahwa semakin tersedianya informasi yang sesuai dari penyedia informasi dapat meningkatkan respon positif atau kepuasan bagi pelanggan (Kusuma, 2014; Pasaribu, 2019). Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut ini:

H3 : Penggunaan teknologi berpengaruh positif terhadap kepuasan layanan akademik

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UPN "Veteran" Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan 3 variabel independen, yaitu Budaya Organisasi (X1), Kualitas Layanan (X2), dan Penggunaan teknologi Informasi (X3), dan 1 variabel dependen yaitu Kepuasan Mahasiswa atas Layanan Akademik. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Strata 1 Program Studi Akuntansi FEB UPN "Veteran" Yogyakarta semester 4 sampai dengan semester 8 TA 2018/2019 sebanyak 910 mahasiswa. Pemilihan populasi menjadi objek penelitian adalah karena mahasiswa sudah banyak menggunakan dan merasakan layanan akademik dan penggunaan teknologi informasi di masa studinya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode simple random sampling dengan ketentuan 10% dari jumlah populasi.

Data penelitian yang dibutuhkan adalah data primer (kuesioner) untuk menilai sampel responden penelitian yang diukur dengan skala Likert (1-5). Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner yang kembali dan memenuhi syarat untuk diolah sebanyak 100 kuesioner. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disusun oleh peneliti dengan pengembangan dari literatur

terkait. Kuesioner untuk variabel budaya organisasi terdiri dari 4 item pertanyaan, variabel kualitas layanan terdiri dari 19 item pertanyaan yang terbagi lagi menjadi 5 indikator (tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy), variabel penggunaan teknologi informasi terdiri dari 4 item pertanyaan, dan variabel kepuasan mahasiswa atas layanan akademik terdiri dari 4 item pertanyaan.

Pengujian hipotesis 1 sampai dengan 3 menggunakan regresi sederhana untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan, pengujian hipotesis 4 menggunakan regresi berganda untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen.

Model Regresi Berganda

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepuasan Layanan Akademik Mahasiswa

a = Konstanta

X₁ = Budaya Organisasi

X₂ = Kualitas Pelayanan

X₃ = Penggunaan Teknologi Informasi

e = eror.

HASIL

Responden pada penelitian ini ialah mahasiswa Prodi Akuntansi FEB UPN Veteran Yogyakarta yang berjumlah 100 mahasiswa. Variabel pada penelitian ini adalah Budaya Organisasi (X₁), Kualitas Layanan (X₂), Penggunaan Teknologi Informasi (X₃), serta Kepuasan Layanan Akademik (Y). Pada analisis statistik deskriptif variabel dependen berupa Kepuasan Layanan Akademik, diperoleh nilai minimum 5, dan nilai maksimum 20. Rata-rata jawaban responden yakni 13,51 dan standar deviasi bernilai 3,338.

Variabel independen pertama dalam penelitian ini ialah budaya organisasi yang memiliki nilai minimum 4, dan nilai maksimum 20. Rata-rata jawaban responden bernilai 15,81 dengan standar deviasi sebesar 4,074.

Variabel independen kedua dalam penelitian ini ialah kualitas layanan yang memiliki nilai minimum 29 dan nilai maksimum 85. Rata-rata jawaban responden bernilai 61,31 dengan standar deviasi sebesar 12,904.

Variabel independen ketiga dalam penelitian ini ialah penggunaan teknologi informasi yang memiliki nilai minimum 5 dan nilai maksimum 20. Rata-rata jawaban responden bernilai 14,27 dengan standar deviasi sebesar 3,567.

Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa, Budaya Organisasi, Kualitas Pelayanan, dan Penggunaan Teknologi Informasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepuasan Layanan Akademik, ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,654. Koefisien determinasi sebesar 0,427 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa Budaya Organisasi, Kualitas Pelayanan dan Penggunaan Teknologi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepuasan Layanan Akademik sebesar 42,7%. Sisanya, Kepuasan Layanan Akademik dipengaruhi oleh faktor yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Pada pengujian hipotesis pertama yakni variabel Budaya Organisasi (X1) dibandingkan dengan Kepuasan Layanan Akademik (Y). Hubungan Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Layanan Akademik ditunjukkan oleh koefisien korelasi sebesar 0,430. Koefisien determinasi sebesar 0,185 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa Budaya Organisasi (X1) berpengaruh positif terhadap Kepuasan Layanan Akademik (Y). Budaya organisasi sangat penting dalam implementasi sistem penjaminan mutu perguruan tinggi (Nugraheni,2016).

Pada pengujian hipotesis kedua yakni variabel Kualitas Layanan (X2) dibandingkan dengan Kepuasan Layanan Akademik (Y). Hubungan Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Layanan Akademik ditunjukkan oleh koefisien korelasi sebesar 0,626. Koefisien determinasi sebesar 0,392 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa Kualitas Layanan (X2) berpengaruh positif terhadap Kepuasan Layanan Akademik (Y). Dengan adanya pemberian layanan yang berkualitas, maka mahasiswa akan merasa puas (Latief, 2015).

Pada pengujian hipotesis ketiga yakni variabel Penggunaan Teknologi Informasi (X3) dibandingkan dengan Kepuasan Layanan Akademik (Y). Hubungan Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Kepuasan Layanan Akademik ditunjukkan oleh koefisien korelasi sebesar 0,607. Koefisien determinasi sebesar 0,368 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa Penggunaan Teknologi Informasi (X3) berpengaruh positif terhadap Kepuasan Layanan Akademik (Y). Kualitas pelayanan akan baik ketika pemanfaatan teknologi informasi semakin baik dilakukan (Sidagambir).

KESIMPULAN.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bawa:

- Budaya Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan layanan akademik,
- Kualitas layanan akademik berpengaruh positif terhadap Kepuasan layanan akademik
- Penggunaan Teknologi informasi berpengaruh terhadap Kepuasan layanan akademik.

Dari kesimpulan ini variabel dominan adalah kualitas layanan akademik., sedangkan pengaruh variabel terendah terhadap kepuasan layanan akademik adalah variabel budaya organisasi

SARAN

Hasil penelitian perlu merekomendasikan bahwa perbaikan budaya kerja organisasi dalam rangka meningkatkan kepuasan pengguna akan layanan akademik yang diberikan. Meningkatkan budaya organisasi seperti pemberian pelatihan pelayanan prima bisa dilakukan kepada pegawai akademika terkait dalam kegiatan pelayanan akademik. Studi banding dengan perguruan tinggi lain juga bisa dilakukan dalam rangka mengamati bagaimana kepuasan layanan akademik dapat tercipta dengan baik.

REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi., 2006, Metode Penelitian: Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta
- Astuti, Windy Fitri Dan Ike Devi Sulistyangingtyas. 2014. Strategi Sosialisasi Budaya Organisasi Kepada Karyawan Pt. Astra International-Tbk Honda Sales Office Region Yogyakarta. Jurnal Ilmu Komunikasi. pp. 1-15.
- Bashayreh, A. M .K. 2009. Organisational culture and job satisfaction: A case study of academic staff at Universiti Utara Malaysia (UUM). [Electronic version]. Unpublished thesis for

- Masters of Human Resources Management, Malaysia: Universiti Utara.
- Bintoro, Udan. 2002. Pengaruh Praktek Manajemen Sumber Daya Manusia terhadap Budaya Organisasi dan Kinerja Perusahaan. Disertasi Universitas Airlangga, Surabaya.
- Chatman, Jennifer and Bersade, 1997. Employee Satisfaction, Factor Associated With Company Performance, *Journal Of Applied Psychology*, February, 29 – 42.
- Cravens, D.W. and Piercy, N.F.2006. *Strategic Marketing*, (8thed.). NY: Mc Graw Hill
- Crispen Chipunza and Bulelwa Malo. 2017. Organizational culture and job satisfaction among academic professionals at a South African university of technology. *Problems and Perspectives in Management*, 15(2), 148-161. doi:10.21511/ppm.15(2).14
- Djokosantoso, Moeljono. 2003. *Budaya Korporat dan Keunggulan Korporasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta
- Fuadi, Arabella Oentari. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Universitas Kristen Petra*.
- Iivari, J. 2005. An empirical test of DeLone-McLean model of information systems success. *The Database for Advances in Information Systems* 36(2), 8–27.
- Jaya, Agam Wie. 2013. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Divisi Sdm Pt Inti Persero; <http://Repository.Widyatama.Ac.Id/Xmlui/Handle/123456789/4417>. Widyatama Repository, Akses Tanggal 15 Maret 2016.
- Juhana, D., & Mulyawan, A. 2015. Pengaruh Kualitas Layanan Jasa Pendidikan Terhadap Kepuasan Mahasiswa Di STMIK Mardira Indonesia Bandung. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*. 9 (1), 1-15.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses dari <https://kbbi.web.id/>
- Kusuma, arief AP. 2014. <http://www.esaunggul.ac.id/article/pemanfaatan-teknologi-informasi-dalam-proses-pengajaran-di-indonesia-2/>
- Kuswadi. 2004. *Cara Mengukur Kepuasan Karyawan*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Kotler, P. 2000. *Marketing management 9th edition*. New Jersey. Prentice Hall International. Inc.
- Laporan Aktifitas Universitas. Diakses di <https://forlap.ristekdikti.go.id/perguruantinggi/detail/RDhEQkQ2MkUtNEJENS00NjRBLTgzRTEtOTBDNTQyQTkzN0M1>, pada 26 Juli 2019.
- Latief, Fitriani.2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Mahasiswa Strata Satu (SI) STIE Nobel Indonesia di Makassar. Diakses pada https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKewj4xuXV6d7jAhUkk48KHZggB4cQFjADegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Ffe-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id%2Findex.php%2Fakmen%2Farticle%2Fdownload%2F72%2F76%2F&usq=AQvVaw1yKebWmf8-DUG6S_58mt09 pada 31 Juli 2019.
- Laudon, Kenneth C., and Jane P. Laudon, 2000. *Organization and Technology in The Networked Enterprise, Management Information System*, Six Edition, International Edition. www.prenhall.com/laudon
- Mahmud, M. 2012. *Manajemen Mutu Perguruan Tinggi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maisaroh, Siti. 2010. *Pengaruh Manajemen Mutu Layanan Terhadap Kepuasan Peserta Didik*. Penelitian Universitas PGRI Yogyakarta.
- Nugraheni, Hermien; Supriyadi; Sadimin.2016. Analisis Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja dan Kepuasan Civitas Akademika Poltekkes Kemenkes Semarang.*Jurnal Kesehatan Gigi Vol. 03, No. 2, Desember 2016*.

- Pakpahan, Sondang Purnamasari. 2004. Persepsi mahasiswa UPBJJ-UT Medan tentang pelayanan akademik dan non-akademik yang diberikan oleh UPBJJ-UT Medan. *Jurnal pendidikan terbuka dan jarak jauh*, vol 5(1): 47-58.
- Pasaribu, Hiras. 2009. Pengaruh Komitmen, Persepsi dan Penerapatan Pilar Dasar Total Quality Management terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Volume 6 (2), Desember 2009.
- Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Diakses di http://kknikemenristekdikti.org/asset/pdf/perpres_no_8_tahun_2012_ttg_kkni.pdf pada 5 Januari 2017
- Poerwanto. 2008. *Budaya Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pratama, Yoga. 2012. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, Depok: Prodi Administrasi Negara, Fisip, UI.(Skripsi).
- Putra, Yoan Santosa dan Eris Dianawati dan Endi Sarwoko. 2014. Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pengguna Jasa Parkir. [Http://ejournal.ukanjuruhan.ac.id](http://ejournal.ukanjuruhan.ac.id). Diakses 9 April 2015.
- Qomariah, N. (2012). Pengaruh Kualitas Layanan dan Citra Institusi terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan (Studi pada Universitas Muhammadiyah Jawa Timur). *Jurnal Aplikasi Manajemen*. 10 (1), 177-187.
- Rivai, Veithzal. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Robbins, Stephen P. dan Timothy A. J. .2013. *Organizational Behaviour*. USA: Pearson Education Inc, edisi kelima belas.
- Rosita, T., Santi D., Susanti, dan Nurhasanah. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Program pascasarjana*. Edisi Kedua, Cetakan Ketiga. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Samosir, Zurni Zahra. 2005. Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Mahasiswa Menggunakan Perpustakaan USU, *Jurnal Studi Perpustakaan dan Informasi*. Vol 1 (1), Juni.
- Saifudin dan Sunarsih. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Az Zarka'*, bol. 8, no. 2 Desember 2016.
- Sekaran, Uma. 2000. *Research Methods for business: A Skill Building Approach*. Singapore: John Wiley & Sons, Inc.
- Sidagambir, Yonathan Purba. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Pelayanan dan Implikasinya Terhadap Kepuasan Wajib Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Majalaya Bandung). *Universitas Komputer Indonesia*. Diakses dari https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/751/jbptunikompp-gdl-yonathanpu-37543-1-unikom_y-l.pdf pada 31 Juli 2019.
- Sobirin, Achmad (2009). *Budaya Organisasi, Pengertian, Makna dan Aplikasi dalam Kehidupan Organisasi*. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN, edisi kedua.
- Soedjono. 2005. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi . *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, Vol. 7 (1), Maret 2005: 22- 47
- Susanto, Hery. 2014. Pengaruh Layanan Akademik Terhadap Kepuasan Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Terbuka Pada Unit Program Belajar Jarak Jauh (Upbjj) Mataram, *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*, Vol. 15, (2), September : 88-98.
- Sutrisno, Edi. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Suardjono. 2008. Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Tjiptono dan Diana. 2010. Total Quality Management, Yogyakarta: Andi Offset.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Diakses di <http://risbang.ristekdikti.go.id/regulasi/uu-12-2012.pdf>, pada 2 Desember 2016
- Wahyuningsih, Tutik dan Sunarto dan Noviani, Leny. 2013. Kepuasan Mahasiswa FKIP UNS atas Kualitas Pelayanan Administrasi Akademik. Jurnal Pendidikan Bisnis dan Ekonomi (BISE) Vol.1 No. 1.
- Wibowo. 2013. Budaya Organisasi. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Yusri Arshad, M. Azrin dan Afiqah, Siti Nor. 2015. The Influence Of Information System Success Factors Towards User Satisfaction In Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Department of Technology Management and Technopreneurship, Universiti Teknikal Malaysia, Melaka, Malaysia E-Mail: ayusri@utem.edu.my. Vol. 10. No. 23. Desember.
- Zeithaml, V. A dan. Bitner, M. J. 2003. Service Marketing (3rd ed.). Tata McGraw Hill. New Delhi.

RESPON MAHASISWA FTM UPN “VETERAN” YOGYAKARTA TERHADAP FASILITAS NON-KURIKULER DITINJAU DARI SURVEI KEPUASAN PARKIR DAN RUANG PUBLIK

Joko Soesilo^{1,2}, Suranto¹, Peter Eka Rosadi¹, Soraya Faranisya², Fajar Puspo Dewi²

(1). Fakultas Teknologi Mineral, UPN “Veteran” Yogyakarta

(2). Pusat Studi Mineral dan Energi, UPN Veteran Yogyakarta

email: j_soesilo@upnyk.ac.id

Abstract

Faculty of Mineral Technology UPN “Veteran” Yogyakarta has quite a number of non-curricular facilities, including parking and public spaces. To find out student’s responses to existing non-curricular facilities, survey of satisfaction of parking and common space was conducted. From the survey results to 448 respondents still did not show a good level of satisfaction. Respondents were of the opinion that Parkir Timur UPN “Veteran” Yogyakarta needs to be studied further, especially the signs and markers of the parking area, internal road access and exit gate selection to Ringroad and Jalan Pintu Selatan UPN. In addition, the existing common space within the Faculty of Mineral Technology is still inadequate, it is necessary to add the common space with good facilities such as tables, chairs, roofs, electrical installation, and internet, so it can be used to maximum learning activities.

Keywords: non-curricular facilities, parking, common space.

PENDAHULUAN

Fasilitas non-kurikuler mahasiswa merupakan salah satu sarana pendukung dalam kegiatan yang berlangsung di kampus. Penelitian mengenai tingkat kepuasan dan kelayakan fasilitas yang terdapat di lingkungan Fakultas Teknologi Mineral UPN “Veteran” Yogyakarta penting dilakukan guna mengetahui seberapa baik fasilitas yang telah ada. Fasilitas yang akan diteliti antara lain tempat parkir dan ruang publik. Hal ini menjadi sangat penting agar kemudian dapat dilakukan upaya-upaya peningkatan fasilitas tersebut. Tentunya penelitian mengenai kelayakan fasilitas non-kurikuler tersebut guna mendukung keamanan, kemudahan dan kenyamanan di lingkungan Fakultas Teknologi Mineral.

Studi mengenai survei dan evaluasi tempat parkir di Parkiran Timur UPN “Veteran” Yogyakarta telah dilakukan oleh BEM Fakultas Teknologi Mineral pada tahun 2018. Ditinjau dari tingkat kejenuhan, fasilitas Parkiran Timur UPN “Veteran” Yogyakarta sudah mampu menampung kendaraan yang akan parkir di area parkir. Akan tetapi, dari hasil pemantauan selama ini dengan daya tampung yang cukup baik masih terlihat beberapa kekurangan, seperti kurang tertatanya area parkir, rambu parkir, keamanan di dalam area parkir, dan permasalahan pada sistem drainase area parkir. Hal-hal tersebut mengakibatkan pengguna kendaraan sembarang dalam memarkirkan kendaraan. Pada akhirnya parkiran terlihat tidak tertata, rawan pencurian motor, dan pada saat musim penghujan terjadi banjir di area parkir. Perlu kajian lebih lanjut agar dapat meningkatkan keefisienan lokasi parkir, sehingga dapat diterapkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi permasalahan di lapangan.

Perbandingan jumlah mahasiswa dengan jumlah ruang publik yang ada di Fakultas

Teknologi Mineral sangat tidak berimbang. Ruang publik di lingkungan Fakultas Teknologi Mineral UPN "Veteran" Yogyakarta memiliki peran sebagai tempat bagi mahasiswa untuk berinteraksi dan menyelesaikan tugas perkuliahan ataupun belajar. Tempat seperti ini sangat dibutuhkan untuk melengkapi aktivitas kerja dan kuliah sehingga ruang publik harus nyaman untuk ditempati dan dapat memenuhi kebutuhan individu yang datang ke tempat tersebut. Untuk itu penelitian ini bermaksud untuk mengetahui persentase tingkat kepuasan pengguna parkir dan ruang publik yang ada di lingkungan Fakultas Teknologi Mineral UPN "Veteran" Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan yakni secara kualitatif dengan menggunakan kuisisioner yang disebar ke mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik di Fakultas Teknologi Mineral UPN "Veteran" Yogyakarta. Kuisisioner dilakukan dengan memberikan sebanyak 23 pertanyaan yang diisi oleh responden. Pertanyaan yang diajukan kemudian disebar melalui online (Google Forms). Hasil akhir yang diperoleh dari kuisisioner kemudian digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan para pengguna terhadap fasilitas parkir dan ruang publik di Fakultas Teknologi Mineral UPN "Veteran" Yogyakarta.

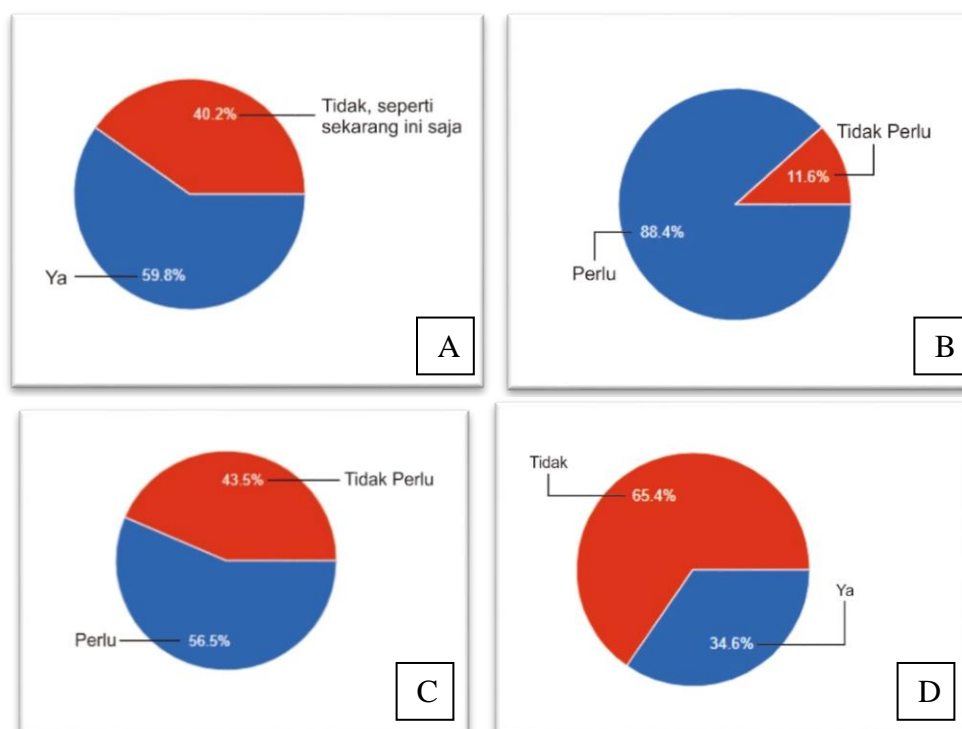
HASIL

Tingkat kepuasan fasilitas non-kurikuler di lingkungan Fakultas Teknologi Mineral UPN "Veteran" dapat diketahui dengan cara menyebarkan kuisisioner melalui online dalam hal ini dengan mengisi Google Forms. Kuisisioner terdiri dari 20 pertanyaan, informasi yang ingin didapatkan dari para responden meliputi (1) Pemisahan pintu masuk/keluar mobil dengan motor/sepeda; (2) Pemilihan pintu keluar dengan menggunakan akses jalan internal di dalam area kampus; (3) Pemisahan pintu keluar menjadi yang dapat mengakses ke Ringroad dan ke Jalan Pintu Selatan UPN; (4) Penggunaan kartu/karcis untuk parkir; (5) Penggunaan mesin parkir untuk keluar dan masuk kendaraan; (6) Sikap yang sebaiknya dilakukan satpam saat kendaraan akan masuk dan keluar; (7) Kondisi tempat parkir di Parkiran Timur UPN/FTM saat ini; (8) Marka dan rambu pada alur parkir mobil/motor; (9) Perbaikan marka dan rambu parkir menjadi lebih luas; (10) Tugas pokok petugas parkir; (11) Daya tampung ruang publik; (12) Kondisi ruang publik yang baik di dalam kampus; (13) Penambahan ruang publik di lingkungan FTM; (14) Pemisahan zona merokok dan bebas asap rokok pada ruang publik; (15) Akses ruang publik hanya untuk mahasiswa FTM; (16) Fungsi ruang publik di lingkungan FTM sebagai tempat belajar dan beraktivitas; (17) Kenyamanan duduk dan belajar di ruang publik; (18) Ketersediaan listrik dan penerangan; (19) Kecepatan internet di lingkungan FTM; dan (20) Biaya berlangganan internet berbayar setiap bulan dan alasannya.

Dari 20 pertanyaan kuisisioner tersebut, peneliti telah mendapatkan masing-masing jawaban dari 448 responden. Hasil yang didapatkan kemudian dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap fasilitas non kurikuler yang ada di lingkungan Fakultas Teknologi Mineral UPN "Veteran" Yogyakarta. Berikut merupakan hasil yang diperoleh:

Pemisahan pintu masuk/keluar mobil dengan motor/sepeda.

Responden diminta untuk menjawab pertanyaan mengenai apakah pintu masuk/keluar mobil dan motor/sepeda perlu dipisahkan. Sebanyak 59,8% responden menjawab perlu pemisahan, sedangkan 40,2% menjawab tidak perlu dilakukan pemisahan pintu masuk/keluar bagi mobil dan motor/sepeda (Gambar 1A.).



Gambar 1A. Chart mengenai perlu tidaknya pemisahan pintu keluar/masuk bagi mobil dan motor.

Gambar 1B. Chart mengenai pemilihan pintu keluar dengan menggunakan akses jalan internal di dalam area kampus.

Gambar 1C. Chart mengenai pemisahan pintu keluar menjadi yang dapat mengakses ke Ringroad dan ke Jalan Pintu Selatan UPN.

Gambar 1D. Chart mengenai seberapa perlu penggunaan kartu/karcis di Parkir Timur UPNYK.

Pemilihan pintu keluar dengan menggunakan akses jalan internal dalam kampus.

Pertanyaan selanjutnya menanyakan tentang seberapa perlu akses jalan internal di dalam area kampus yang memungkinkan memilih pintu keluar. Sebanyak 88,4% responden menyatakan perlu dibuat akses jalan internal, sedangkan 11,6% menyatakan tidak perlu (Gambar 1B.).

Pemisahan pintu keluar ke Ringroad dan atau ke Jalan Pintu Selatan UPN.

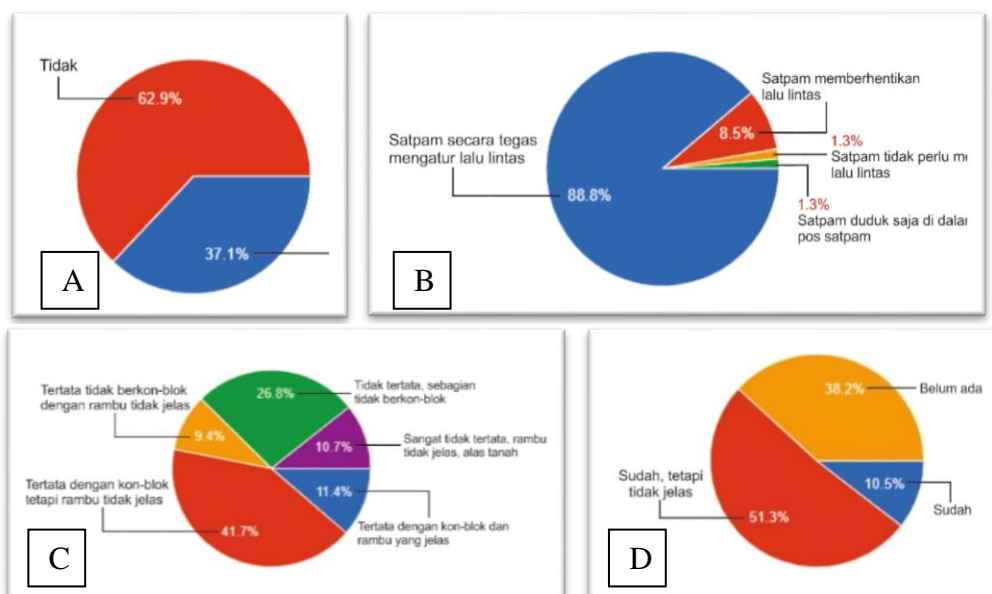
Sebanyak 56,5% responden menyatakan perlu dibuat pintu yang memisahkan akses ke Ringroad dan ke Jalan Pintu Selatan, sedangkan 43,5% menyatakan tidak perlu (Gambar 1C.). Dapat disimpulkan bahwa responden merasa pintu yang menjadi pintu keluar dan masuk saat ini belum memudahkan untuk mengakses jalan alternatif.

Penggunaan kartu/karcis untuk parkir.

65,4% responden menyatakan tidak perlu menggunakan kartu/karcis di Parkiran Timur UPN, sedangkan 34,6% merasa perlu menggunakan kartu karcis (Gambar 1D.).

Penggunaan mesin parkir untuk keluar dan masuk kendaraan.

Responden juga diminta untuk menjawab pertanyaan mengenai perlu atau tidaknya penggunaan mesin parkir untuk keluar dan masuk kendaraan. Sebanyak 62,9% responden menjawab tidak perlu, sedangkan 37,1% menjawab perlu menggunakan mesin parkir (Gambar 2A.).



Gambar 2A. Chart mengenai perlu atau tidaknya penggunaan mesin parkir untuk keluar dan masuk kendaraan.

Gambar 2B. Chart mengenai perlu atau tidaknya penggunaan mesin parkir untuk keluar dan masuk kendaraan.

Gambar 2C. Chart mengenai kondisi tempat parkir di Parkiran Timur UPNYK Condongcatut saat ini.

Gambar 2D. Chart mengenai keberadaan marka dan rambu pada alur parkir mobil/motor.

Sikap yang sebaiknya dilakukan satpam saat kendaraan akan masuk dan keluar.

Responden diminta untuk memilih satu jawaban yang paling tepat mengenai sikap satpam yang sebaiknya dilakukan ketika kendaraan akan masuk dan keluar. Sebanyak 88,8% responden menjawab sebaiknya satpam secara tegas mengatur lalu lintas dan 8,5% responden menjawab sebaiknya satpam memberhentikan lalu lintas, 1,3% berpendapat satpam tidak perlu mengatur lalu lintas, dan 1,3% lainnya menganggap satpam cukup duduk saja di dalam pos (Gambar 2B.).

Kondisi tempat parkir di Parkiran Timur UPNYK Condongcatut saat ini.

Sebanyak 41,7% responden menyatakan bahwa kondisi tempat parkir di Parkiran Timur UPNYK Condongcatut saat ini sudah tertata dengan kon-blok tetapi rambu tidak jelas. 26,8% berpendapat bahwa parkiran tidak tertata dan sebagian tidak berkon-blok. 11,4% berpendapat parkiran telah tertata dengan kon-blok dan rambu yang jelas. 10,7% menganggap parkiran sangat tidak tertata, rambu tidak jelas, alas tanah. Sedangkan sebanyak 9,4% responden menganggap parkiran sudah tertata tidak berkon-blok dengan rambu tidak jelas (Gambar 2C.).

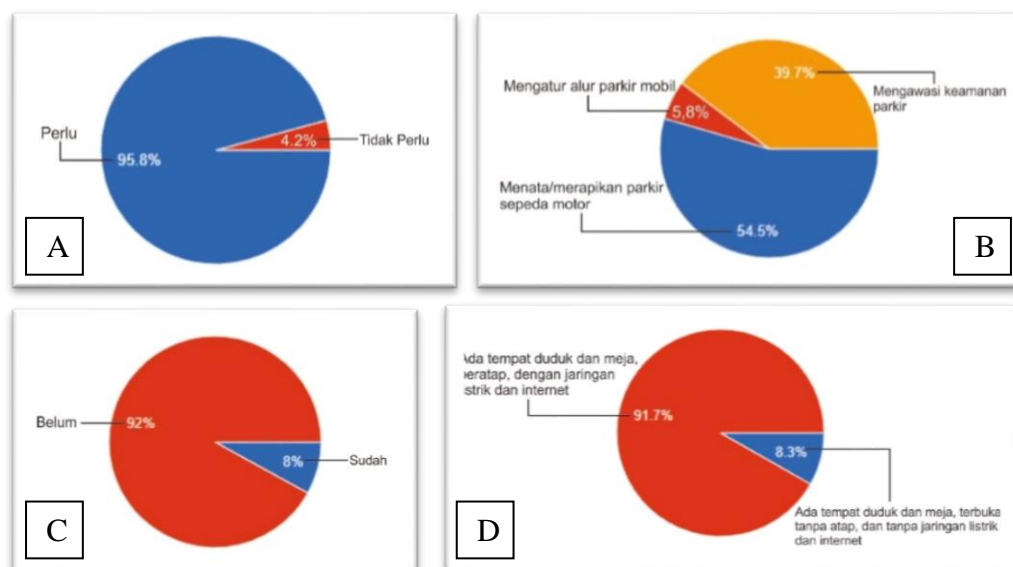
Marka dan rambu pada alur parkir mobil/motor.

51,3% responden menyatakan bahwa marka dan rambu pada alur parkir mobil/motor sudah ada tetapi tidak jelas. 35,2% menyatakan bahwa belum ada, sedangkan 10,5% menyatakan sudah ada marka dan rambu (Gambar 2D.).

Perbaikan marka dan rambu parkir menjadi lebih jelas.

Responden diminta untuk menjawab pertanyaan apakah perlu marka dan rambu parkir diperbaiki lebih jelas. Sebanyak 95,8% menjawab perlu diperbaiki, sedangkan 4,2%

menjawab tidak perlu diperbaiki (Gambar 3A.).



Gambar 3A. Chart mengenai perlu atau tidak marka dan rambu parkir diperbaiki lebih jelas.

Gambar 3B. Chart mengenai tugas pokok petugas parkir.

Gambar 3C. Chart mengenai daya tampung dari ruang public/gazebo di lingkungan Fakultas Teknologi Mineral yang belum memadai.

Gambar 3D. Chart mengenai bagaimana sebaiknya ruang publik/gazebo di dalam kampus.

Tugas pokok petugas parkir.

Sebanyak 54,5% responden menganggap petugas parkir seharusnya mempunyai tugas pokok menata/merapikan parkir sepeda motor. 39,7% beranggapan seharusnya tugas pokok petugas parkir yaitu mengawasi keamanan parkir. Sedangkan 5,8% berpendapat bahwa petugas parkir seharusnya mengatur alur parkir mobil (Gambar 3B.).

Daya tampung ruang publik.

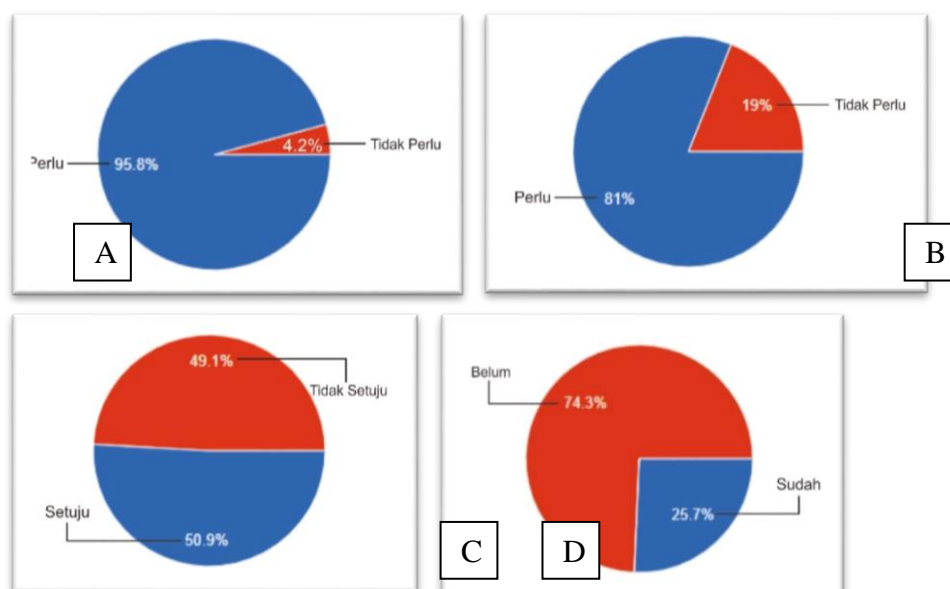
Responden diminta untuk menjawab pertanyaan apakah daya tampung dari ruang publik/gazebo di lingkungan Fakultas Teknologi Mineral sudah memadai. Hasilnya sebanyak 92% responden menjawab bahwa daya tampung belum memadai. Sedangkan 8% menjawab daya tampung ruang publik/gazebo sudah memadai (Gambar 3C.).

Kondisi ruang publik yang baik di dalam kampus.

91,7% responden menjawab bahwa ruang publik di dalam kampus sebaiknya ada tempat duduk dan meja, beratap, dengan jaringan listrik dan internet. Sedangkan 8,3% responden menjawab ruang publik/gazebo sebaiknya ada tempat duduk dan meja, terbuka tanpa atap dan tanpa jaringan listrik serta internet (Gambar 3D.).

Penambahan ruang publik di lingkungan FTM.

Responden diminta untuk menjawab pertanyaan mengenai perlukan ditambah ruang publik/gazebo di lingkungan FTM. Sebanyak 95,8% menjawab perlu ditambah ruang publik/gazebo di lingkungan FTM. Sedangkan 4,2% menjawab tidak perlu ditambah ruang publik/gazebo lagi di lingkungan FTM (Gambar 4A.).



Gambar 4A. Chart mengenai perlunya menambah ruang publik/gazebo di lingkungan FTM.

Gambar 4B. Chart mengenai perlunya memisahkan ruang publik/gazebo untuk zona merokok dan bebas asap rokok.

Gambar 4C. Chart mengenai akses ruang publik/gazebo apakah hanya untuk mahasiswa FTM saja atau tidak.

Gambar 4D. Chart mengenai fungsi ruang publik/gazebo di lingkungan FTM sebagai tempat belajar dan beraktivitas.

Pemisahan zona merokok dan bebas asap rokok pada ruang publik.

Sebanyak 81% responden menganggap perlu dibuat ruang publik/gazebo yang terpisah untuk zona boleh merokok dan bebas asap rokok. Sedangkan 19% menganggap tidak perlu dipisahkan (Gambar 4B.).

Akses ruang publik hanya untuk mahasiswa FTM.

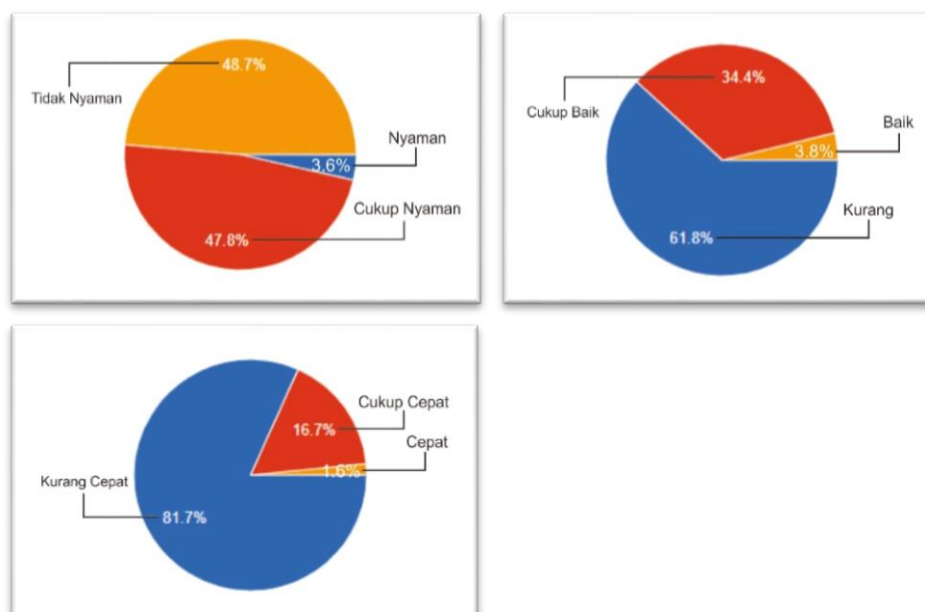
50,9% responden setuju apabila ruang publik/gazebo hanya bisa diakses oleh mahasiswa FTM. Sedangkan 49,1% menyatakan tidak setuju jika hanya mahasiswa FTM yang bisa mengakses (Gambar 4C.).

Fungsi ruang publik di lingkungan FTM sebagai tempat belajar dan beraktivitas.

Sebanyak 74,3% responden berpendapat ruang publik/gazebo yang ada di lingkungan FTM sudah berfungsi dengan baik sebagai tempat belajar dan beraktivitas. 25,5% responden berpendapat bahwa ruang publik/gazebo belum berfungsi dengan baik (Gambar 4D.).

Kenyamanan duduk dan belajar di ruang publik.

Responden yang menjawab kenyamanan duduk dan belajar di gazebo tidak nyaman sebesar 48,7%. 47,8% menjawab ruang publik/gazebo sudah cukup nyaman dan 3,6% menjawab sudah nyaman (Gambar 17.).



Gambar 5A. Chart mengenai kenyamanan duduk dan belajar di ruang publik/gazebo FTM.

Gambar 5B. Chart mengenai ketersediaan listrik dan penerangan.

Gambar 5C. Chart mengenai kecepatan internet di FTM.

Ketersediaan listrik dan penerangan.

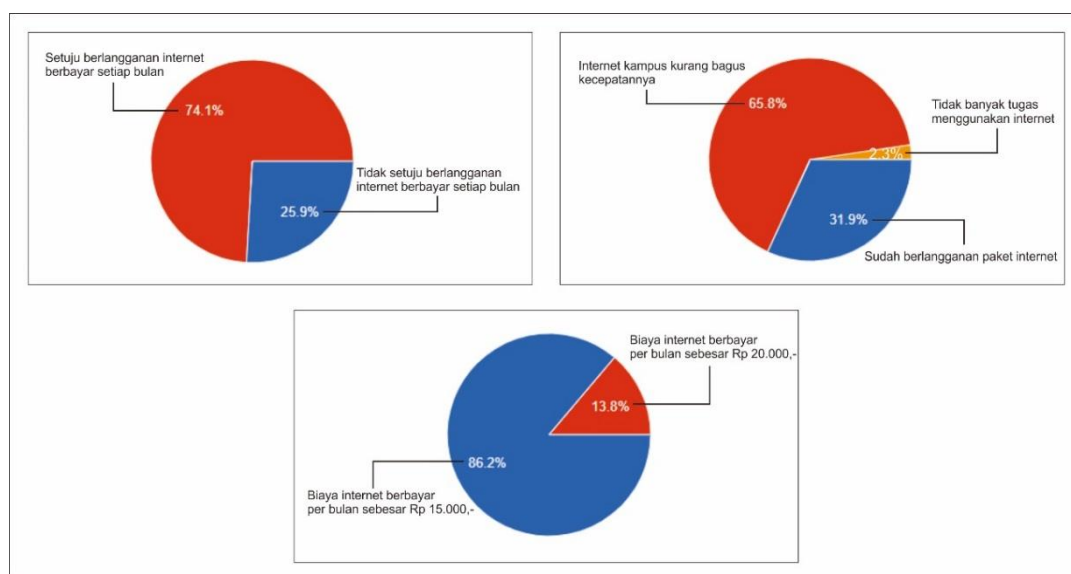
Ketersediaan listrik dan penerangan menurut 61,8% responden masih kurang. 34,4% responden menganggap listrik dan penerangan sudah cukup baik. Sedangkan 3,8% menganggap sudah baik (Gambar 5B.).

Kecepatan internet di lingkungan FTM.

81,7% responden menyatakan bahwa internet di lingkungan FTM kurang cepat. 16,7% responden menganggap kecepatan internet cukup cepat, dan 1,6% menganggap kecepatan internet di lingkungan FTM cepat (Gambar 5C.).

Biaya berlangganan internet berbayar setiap bulan dan alasannya.

Sebanyak 74,1% responden setuju jika berlangganan internet berbayar setiap bulannya, sedangkan 25,9% menyatakan tidak setuju (Gambar 20 (kiri atas)). Selanjutnya responden yang tidak setuju diminta untuk memberikan alasan ketidaksetujuannya, sehingga sebanyak 65,8% responden beralasan bahwa internet kurang bagus kecepatannya. 31,9% memiliki alasan sudah berlangganan paket internet, sedangkan 2,3% beralasan tidak banyak tugas menggunakan internet (Gambar 6 (kanan atas)). Mengenai biaya internet yang dikenakan per bulannya, 86,2% responden setuju jika membayar Rp 15.000,- sedangkan 13,8% setuju jika membayar Rp 20.000,- (Gambar 20 bawah).



Gambar 6. Chart mengenai pendapat berlangganan internet membayar setiap bulan (kiri atas); alasan ketidakstujuan berlangganan internet membayar (kanan atas); dan biaya internet membayar per bulan (bawah).

Berdasarkan hasil respon terhadap kuisisioner yang telah disebar, secara umum dapat disimpulkan bahwa fasilitas Parkir Timur UPN “Veteran” Yogyakarta masih belum memberikan kemudahan dan kenyamanan. Responden menganggap perlu dilakukan pemisahan pintu masuk/keluar bagi mobil dan motor/sepeda, selain itu juga perlu dibuat pemilihan pintu keluar dengan akses jalan internal di dalam area kampus sehingga dapat memilih akses jalan ke Ringroad dan ke Jalan Pintu Selatan UPN “Veteran” Yogyakarta. Responden juga menganggap tidak perlu menggunakan mesin parkir dan kartu/karcis di Parkir Timur UPN “Veteran” Yogyakarta. Untuk memudahkan ketika masuk dan keluar Gerbang Pintu Timur, responden berpendapat bahwa satpam sebaiknya bersikap secara tegas mengatur lalu lintas. Kondisi tempat parkir dianggap sudah tertata dengan sebagian berkon-blok dan sebagian lain tidak, serta rambu parkir yang tidak jelas. Untuk marka sudah ada tetapi tidak jelas sehingga perlu perbaikan marka dan rambu parkir menjadi lebih jelas. Petugas parkir yang ada juga sebaiknya mempunyai tugas pokok menata merapikan parkir sepeda motor dan mengawasi keamanan parkir.

Selanjutnya ruang publik di lingkungan Fakultas Teknologi Mineral UPN “Veteran” Yogyakarta juga dianggap oleh responden belum mempunyai daya tampung yang memadai. Responden berpendapat perlu penambahan ruang publik di Fakultas Teknologi Mineral yang memiliki fasilitas berupa tempat duduk, meja, beratap, dengan jaringan listrik dan internet, serta terpisah bagi zona merokok dan bebas asap rokok. Ruang publik seharusnya boleh diakses oleh siapa saja, dan saat ini belum berfungsi dengan baik sebagai tempat belajar dan beraktivitas. Hal ini dikarenakan ruang publik masih belum cukup nyaman untuk digunakan sebagai tempat belajar, selain itu ketersediaan listrik dan penerangan masih sangat kurang di ruang publik yang ada. Berkaitan dengan ruang publik juga harus difasilitasi dengan koneksi internet. Responden menganggap koneksi internet kampus kurang cepat dan sebagian besar setuju jika berlangganan internet membayar setiap bulannya sebesar Rp 15.000,-. Bagi yang tidak setuju berlangganan internet membayar, responden beralasan bahwa koneksi internet kampus kurang bagus kecepataannya dan sudah berlangganan paket data internet setiap bulannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil respon mahasiswa Fakultas Teknologi Mineral terhadap fasilitas non-kurikuler yang telah ada masih belum menunjukkan tingkat kepuasan yang bagus. Responden berpendapat bahwa Parkir Timur UPN “Veteran” Yogyakarta perlu dikaji lagi terutama mengenai tempat parkir dengan rambu dan marka, serta akses jalan internal dan pemilihan pintu keluar menuju ke Ringroad dan ke Jalan Pintu Selatan UPN. Selain itu ruang publik yang telah ada di lingkungan Fakultas Teknologi Mineral masih belum cukup memadai sehingga perlu penambahan ruang publik dengan fasilitas yang baik berupa meja, kursi, atap, instalasi listrik dan internet, agar dapat digunakan untuk kegiatan belajar dengan maksimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini didanai dengan Hibah Kelembagaan LPPM tahun anggaran 2019. Untuk itu diucapkan terima kasih dan penghargaan. Penghargaan kepada anggota Pengurus BEM FTM 2019 yang bersedia membantu pelaksanaan survey perparkiran.

DAFTAR PUSTAKA

- BEM FTM UPN “Veteran” Yogyakarta Periode 2016-2017. 2018. Laporan Proposal Survey dan Evaluasi Tempat Parkir di Parkiran Timur Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
- Hidayat, Irgan. 2013. Tingkat Kepuasan Parkir Kampus Anggrek Binus University Ditinjau dari Fasilitas Geometri dan Survei Kepuasan Parkir. ComTech Vol. 4 No 1. hal 506-516.

MODEL INTERNALISASI SOFT SKILL BELA NEGARA BAGI MAHASISWA FISIP MELALUI KEGIATAN TERINTEGRATIF DAN BERKELANJUTAN

Machya Astuti Dewi, Asep Saepudin, Muharjono, Indro Herry Mulyanto, Kurnia Arofah
FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta

Abstract

This article is the result of institutional research, which aims to develop a model of internalization of state defense soft skills for FISIP students of UPN "Veteran" Yogyakarta that can graduate with state defense character. In this study, several stages were carried out, namely the first stage in formulating the state defense soft skills derived from the basic values of state defense. The next stage is to arrange the forms of activities carried out starting to be accepted as new students until students graduate. The activities consist of curricular, co-curricular and extra-curricular activities. The third stage is to arrange the stages of internalization of state defense soft skills based on the forms of the activities. The internalization stage begins with the stages of introduction, awareness, reinforcement, actualization and further strengthening. This third stage is a model of internalization of integrated and sustainable state defense soft skills.

Keywords: internalization, soft skills, state defense, integrated, sustainable

PENDAHULUAN

Dalam laporan Kinerja UPN "Veteran" Yogyakarta tahun 2018, target capaian untuk aspek daya saing lulusan, dalam hal ini adalah masa tunggu lulusan, dari target yang ditetapkan pada tahun 2018 selama 6 bulan, capaian kinerjanya pada tahun tersebut baru mencapai 8 bulan. Masa tunggu selama itu dinilai masih terlalu lama bagi lulusan perguruan tinggi. Oleh karenanya perlu ada langkah-langkah strategis ke depan dalam rangka mempersingkat masa tunggu lulusan. Agar langkah strategis yang disusun tepat dan bisa mewujudkan tujuannya, maka perlu ada analisis yang tepat terkait dengan tingkat capaian masa tunggu lulusan UPN "Veteran" Yogyakarta. Ketepatan dalam menemukan penyebab masalah dari masih lamanya masa tunggu lulusan UPN "Veteran" Yogyakarta, menjadi faktor penting dalam penyusunan strategi, program dan kegiatan di masa depan.

Lamanya masa tunggu tersebut sangat terkait dengan kualitas lulusannya. Oleh karena itu, seberapa berkualitas lulusan tersebut akan menentukan seberapa lama masa tenggunya. Berdasarkan hasil penelitian dan juga laporan dari berbagai lembaga pemerintah dan swasta terkait kualitas lulusan perguruan tinggi, ditemukan bahwa faktor utama atau penting tidak diterimanya lulusan perguruan tinggi di lembaga atau perusahaan adalah karena rendahnya kualitas soft skills (aspek emosional dan spriritual/afektif) lulusan perguruan tinggi dibandingkan hard skills (aspek intelektualitas/kognitif).

Disisi lain, proses pembelajaran dan pendidikan di perguruan tinggi masih didominasi oleh proses yang berorientasi pada hard skills, dibandingkan kompetensi soft skills. Seperti yang dikemukakan oleh Ary Ginanjar bahwa program pendidikan hanya berpusat pada kecerdasan akal saja (IQ), padahal yang diperlukan sebenarnya adalah bagaimana mengembangkan kecerdasan emosi seperti ketangguhan, optimism, inisiatif, dan kemampuan

beradaptasi yang kini telah menjadi dasar penilaian baru (Ary Ginanjar, 2005). Oleh karenanya soft skills yang merupakan aspek afektif, perlu dilakukan secara terus menerus dan dijadikan sebagai sebuah kebiasaan, baik dalam kegiatan yang bersifat kurikuler, ko dan ekstra kurikuler. Kebiasaan positif yang terus dilaksanakan secara berkelanjutan, dapat membawa keberhasilan seseorang tanpa batas.

Selain itu, sebagai kampus bela Negara, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor: 21 tahun 2014 tentang Pendirian UPN “Veteran” Yogyakarta, UPN “Veteran” Yogyakarta dalam melaksanakan Tri Dharmanya mengemban amanah untuk menginternalisasikan nilai-nilai bela Negara dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam proses pembelajaran terdapat beberapa mata kuliah yang mendukung internalisasi dalam bidang pendidikan seperti Widyawan Mawar Yasa, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Olah Raga. Selain itu, nilai-nilai bela Negara juga diberikan dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Namun demikian dalam membangun karakter yang diharapkan tercermin dalam setiap sikap dan tindakannya, memerlukan proses yang terintegrasi dan berkelanjutan selama menjadi mahasiswa. Oleh karenanya internalisasi nilai-nilai bela Negara harus dilaksanakan secara terus menerus dalam semua aktivitas atau proses pendidikan mulai diterima sebagai mahasiswa baru hingga diwisuda.

Berdasarkan hal tersebut, maka artikel ini mendeskripsikan model internalisasi soft skills bela Negara yang efektif melalui kegiatan terintegrasi dan berkelanjutan dalam bidang kurikuler, ko kurikuler dan ekstra kurikuler. Pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian masalah tersebut adalah dengan pendekatan pendidikan orang dewasa serta pendekatan integralistik. UNESCO mendefinisikan pendidikan orang dewasa sebagai proses pendidikan yang diorganisasikan isinya, tingkatannya, dan metodenya secara formal maupun nonformal untuk memenuhi kebutuhan yang melengkapi pendidikan dalam rangka meningkatkan kemampuan, memperkaya pengetahuan, mendapatkan keterampilan dan membawa perubahan sikap seseorang sebagai tenaga pembangunan yang mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya (LPPM UNS, 2016). Sedangkan pendekatan integralistik diartikan sebagai sebuah proses pendidikan yang menyeluruh dan terintegrasi, baik dalam kegiatan kurikuler, ko kurikuler maupun ekstra kurikuler.

Dengan dua pendekatan ini, diharapkan proses pembelajaran dan pendidikan dapat menghasilkan sumber daya manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis bertanggung jawab, sesuai dengan tujuan pendidikan yang tercantum dalam UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan kegiatan pendidikan yang berbasis soft skills bela Negara, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kompetensi soft skills mahasiswa.

KAJIAN PUSTAKA

Internalisasi dan Pendidikan Karakter

Internalisasi adalah penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin atau nilai, sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku (Poerwadarminta dalam Acep, 2014). Jadi, internalisasi nilai-nilai adalah sebuah proses atau cara menanamkan nilai-nilai normatif atau nilai-nilai dasar sebuah institusi yang menentukan tingkah laku anggotanya yang diinginkan oleh institusi tersebut.

Internalisasi yang dilakukan secara integrative dan berkelanjutan, dapat membentuk karakter mahasiswa berdasarkan nilai-nilai yang dikembangkan perguruan tinggi.

Kirschenbaum (dalam Titik, 2014) mengemukakan "includating value and morality, modeling value and morality, facilitating value, and morality, skills for value development, and moral literacy." Berdasarkan pengertian tersebut maka pendekatan komprehensif meliputi inkulkasi (inculcation), keteladanan (modeling), fasilitasi (facilitation), dan pengembangan keterampilan (skill-building).

Prochasca & D'Clemente (Zubaedi, 2012, p.28) mengemukakan bahwa dalam perubahan perilaku terdapat lima tahap hingga perilaku tersebut benar-benar terjadi, yaitu: Tahap satu adalah procontemplation, ialah kondisi awal seseorang yang pada dasarnya manusia tidak ingin mengubah perilaku, tahap dua contemplation, yaitu tahapan mempertimbangkan untuk berubah, tahap tiga preparation, yaitu tahapan membuat sedikit perubahan, tahap empat action, yaitu tahapan dimana seseorang mulai terikat pada perilaku baru, dan tahap lima maintenance, yaitu tahapan mempertahankan perilaku baru.

Soft Skills

Soft skill adalah kemampuan teknis yang dimiliki calon pekerja. Kemampuan ini antara lain mencakup penguasaan cara penggunaan suatu alat, pengolahan data, dan pengetahuan-pengetahuan tertentu yang sifatnya teknis. Kemampuan seperti ini umumnya disebut sebagai kemampuan teknis atau hard skill (Manara, 2014). Perkembangan jaman dan revolusi-revolusi dalam dunia industri membuat perusahaan tidak hanya membutuhkan karyawan yang memiliki kemampuan teknis saja. Pekerja dengan kemampuan nonteknis semakin banyak dibutuhkan.

Soft skill atau dalam bahasa Indonesianya sering disebut sebagai keterampilan nonteknis adalah keterampilan yang dimiliki oleh seseorang ketika berhubungan dengan orang lain dan keterampilan untuk mengatur dirinya sendiri agar dapat bekerja secara maksimal (Firdaus, 2017). Soft skill juga dapat diartikan sebagai perilaku personal maupun interpersonal seseorang dalam pengembangan dan pemaksimalan kerja seseorang yang meliputi kepercayaan diri, fleksibilitas, kejujuran dan integritas diri (La France, 2016 dalam Aly, 2017).

Soft skill atau kemampuan nonteknis sulit diukur, namun lebih dijadikan sebagai pertimbangan bagi perusahaan atau organisasi ketika hendak menerima karyawan atau anggota baru (Rusady, 2016). Sementara bagi ... soft skill dan hard skill saling melengkapi dimana hard skill dianggap infrastruktur dan soft skill adalah superstruktur yang dibutuhkan sebagai kelangsungan dan kesuksesan lulusan perguruan tinggi yang akan menghadapi dunia kerja (Rilman, 2013 dalam Wahyuni, 2016).

Penelitian dan kajian mengenai pentingnya soft skill sudah cukup banyak dilakukan di Indonesia. Berikut adalah penelitian-penelitian terkait soft skill di Indonesia diantaranya: Pramuniati (2009), Siti (2013), Widodo (2013), Wagiran (2013), Agung (2014), Wahyuni (2016), Ida (2017), dan Aly (2017). Hasil penelitian dan kajian yang telah dilakukan oleh para peneliti tersebut, umumnya sepakat bahwa pendidikan bermuatan soft skill bagi siswa maupun mahasiswa sangat penting agar mereka siap menghadapi dunia industri. Konsekuensinya, kurikulum dan pendidik harus siap dan peka terhadap perubahan.

Namun demikian, penelitian yang secara khusus membahas jenis-jenis soft skills bela negara belum ada. Oleh karenanya salah satu aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah jenis-jenis soft skills bela negara. Hal ini penting untuk dirumuskan, untuk lebih memudahkan dalam melaksanakan dalam proses pembelajaran khususnya dan pendidikan pada umumnya. Dengan adanya rumusan soft skills bela negara, akan lebih memudahkan dalam melakukan pengukuran ketercapaiannya, utamanya dalam proses pembelajaran.

PEMBAHASAN

Nilai-nilai Dasar Bela Negara

Penjabaran Nilai-nilai dasar Bela Negara ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Nilai Dasar dan Indikator Bela Negara (Ditjen Pothan, 2016)

Nilai Dasar dan Maknanya	Indikator
<p>Cinta Tanah Air:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebanggaan memiliki sumber-sumber kekayaan, kesuburan dan keindahan alam, sehingga senantiasa menjaga dan memeliharanya sepanjang masa. - Mengenal dan memahami tentang: Wilayah nusantara yang terbentang Sabang sampai Merauke dengan baik, Memelihara, melestarikan dan mencintai lingkungannya, Senantiasa menjaga nama baik dan mengharumkan Negara Indonesia di mata dunia dan setiap saat siap berkorban untuk membelanya 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia - Jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia, - Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, - Menjaga nama baik bangsa dan negara, - Memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, dan - Bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia.
<p>Sadar berbangsa dan bernegara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memahami, menghayati serta melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara. - Kesadaran berbangsa dan bernegara ditunjukkan dengan adanya kesadaran tentang: rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia mutlak adanya karena kondisi bangsa dan negara yang majemuk dalam berbagai dimensi; memiliki jiwa besar dan patriotism; mentaati peraturan-peraturan yang ada; serta memiliki kesadaran atas tugas dan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat dan warga negara. 	<ul style="list-style-type: none"> - berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, - menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, - ikut serta dalam pemilihan umum, - berpikir, bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya, dan - berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara.
<p>Yakin pada Pancasila sebagai Ideologi negara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - keyakinan dan kesadaran akan kebenaran Pancasila sebagai ideologi negara. - menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum dan sekaligus sebagai kerangka acuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena Pancasila sebagai dasar negara telah dapat mempersatukan rakyat Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam agama, suku bangsa, bahasa, asal usul keturunan dan tingkat sosial ekonomi. - Nilai-nilai Pancasila dipergunakan dalam penyelesaian konflik, serta mematahkan setiap ancaman, tantangan, hambatan serta gangguan terhadap keutuhan bangsa masih dapat kita atasi bersama berdasarkan kaidah demokrasi Pancasila, yang menjunjung tinggi sifat kekeluargaan dan gotong royong. 	<ul style="list-style-type: none"> - paham nilai-nilai dalam Pancasila, - mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, - menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, - senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, dan - yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara.
<p>Rela berkorban untuk bangsa dan negara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi/golongan dengan mencurahkan perhatian keihlasan tenaga dan pikiran untuk 	<ul style="list-style-type: none"> - bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara, - siap membela bangsa dan negara dari

menyelesaikan tugas, hak dan kewajiban tanpa pamrih, - Rela berkorban waktu, harta, raga maupun jiwa untuk kepentingan nusa dan bangsa.	berbagai macam ancaman, - berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, - gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan, dan yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia
Memiliki kemampuan awal bela negara baik secara fisik maupun psikis: - kemampuan Psikis (Mental) yaitu setiap warga negara dituntut untuk memiliki sikap dan perilaku disiplin, ulet, bekerja keras mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku, percaya akan kemampuan diri sendiri, tahan uji dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan hidup untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. - kemampuan fisik (jasmani) ditunjukkan dengan pribadi yang sehat, tangkas, postur tubuh yang proporsional akan mendukung pula kemampuan psikis.	- Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelegensi. - Senantiasa memelihara jiwa dan raga - Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. - Gemar berolahraga. - Senantiasa menjaga kesehatannya.

Soft Skills Nilai Dasar Bela Negara

Berdasarkan penjelasan Nilai dasar dan indikator bela negara, maka tabel di bawah ini menunjukkan penjabaran dari nilai-nilai dasar bela negara dengan rumusan dan indikator soft skills.

Tabel 3. Nilai-Nilai Dasar Bela Negara, Rumusan dan Indikator Soft Skills Bela Negara

Nilai-Nilai Dasar Bela Negara	Rumusan Soft Skills Bela Negara	Indikator Soft Skills
Cinta Tanah Air	- memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan dimanapun berada, - memiliki jiwa Patriotisme demi kepentingan bangsa dan negara, - menjaga Nama Baik instansi, bangsa dan Negara dimanapun berada, - memiliki kebanggaan terhadap bangsa dan Negara Indonesia.	- Live with integrity skills, - Ethical Skill, - Kejujuran, - Tanggung jawab, dan - Bersih.
Sadar Berbangsa dan Bernegara	- berpartisipasi aktif dalam organisasi, - menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku, - berpikir, bersikap dan berbuat yang terbaik, - menjaga kedaulatan bangsa dan negara	- multicultural/multilingual skills, - cooperation Skills, - interpersonal skills, - adaptive skills, dan - memiliki kepedulian
Yakin Pancasila sebagai Ideologi Negara	- meyakini kebenaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kedaulatan, dan nilai keadilan. - Menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum dan sumber pemersatu bangsa	- communication skills, - conflict management Skills, - negotiation skills, - analyzing skill, dan - listening skills.

	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadikan pancasila sebagai sumber penyelesaian masalah 	
Rela Berkorban bagi Bangsa dan Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Rela berkorban dari apa yang dimiliki untuk kepentingan umum/bangsa/negara - Aktif berpartisipasi dalam pembangunan - Bersedia membantu sesama manusia 	<ul style="list-style-type: none"> - Problem solving skills, - Critical skills, - Creative and innovative thinking skills, - Inspire employees, - Great Sense of Services Skills
Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara baik Fisik maupun Psikis	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kecerdasan emosional dan spriritual - Memiliki kesehatan prima - Memiliki ketangguhan dalam bekerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Passion skills, - Emotional skills, - Spiritual Skills, - Disiplin, - sehat, - Tangguh

Model Internalisasi Soft Skills Bela Negara

Model internalisasi yang dikembangkan meliputi 2 aspek penting yaitu bentuk kegiatan dan tahapan kegiatan.

BENTUK KEGIATAN

Kegiatan Kurikuler

Kegiatan utama dalam proses pendidikan adalah kegiatan kurikuler. Kegiatan kurikuler ini dilakukan setiap saat dengan menggunakan sistem kurikulum yang telah ditentukan program studi. Oleh karenanya proses internalisasi melalui jalur kurikuler ini, merupakan sarana yang efektif dalam membentuk sikap dan karakter bela negara.

Instrument penting dalam proses pembelajaran yang dapat memastikan bahwa proses tersebut telah dilakukan internalisasi nilai-nilai bela negara, maka diperlukan adanya model atau strategi pembelajaran yang sejalan dengan semangat internalisasi tersebut. Model dan strategi pembelajaran tersebut harus dituangkan dalam RPS, yang akan menjadi pegangan dosen pengampu dalam melakukan proses pembelajaran. RPS yang disusun harus mendeskripsikan bagaimana nilai-nilai bela negara itu diinternalisasikan. Oleh karenanya model pembelajaran yang dikembangkan adalah “Model Pembelajaran berbasis Soft Skills Bela Negara”.

Terdapat 2 variabel penting yang harus ada dalam RPS untuk memastikan bahwa internalisasi tersebut dilakukan dan dinilai keberhasilannya. Variabel tersebut adalah:

Model pembelajaran berbasis soft skills bela negara.

Model pembelajaran harus mengarahkan pada pembentukan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai bela negara. Model pembelajaran seperti ini bisa diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu eksakta maupun ilmu social. Model ini tidak dimaknai harus adanya penjelasan tentang konsep-konsep bela negara, namun dalam prosesnya yang mengarahkan kepada soft skills bela negara. Model pembelajaran harus berorientasi kepada mahasiswa atau yang dikenal dengan student center learning (SCL). Ada banyak model pembelajaran yang bisa digunakan untuk melakukan internalisasi soft skills bela negara, diantaranya Problem based learning, Case based learning, Cooperative learning, Competitive Learning

Sistem penilaian berbasis soft skills bela negara

Agar model pembelajaran tersebut efektif mencapai tujuan pembelajaran, maka diperlukan sistem penilaian yang dilakukan sejalan dengan tujuan atau capaian pembelajaran

yang telah ditentukan. Terdapat beberapa sistem penilaian yang dapat digunakan untuk mengukur sikap dan perilaku yang berbasis bela negara, yaitu: Jurnal, lembar penilaian diri, dan penilaian antar teman (Pardi, 2019).

Kegiatan Ko-Kurikuler

Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor: 02/UN62/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Laksana Kemahasiswaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Kegiatan Ko-Kurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam perkuliahan tatap muka oleh mahasiswa, baik di dalam maupun di luar kampus sebagai penunjang tujuan atau capaian pembelajaran dalam kurikulum yang berlaku. Ada beberapa kegiatan ko kurikuler yang penting untuk dilakukan dalam rangka internalisasi soft skills bela negara, yaitu: Pengenalan Kehidupan Kampus Bela Negara (PKK-BN), PA (Pendampingan Agama), Student Camp, ESQ Training, dan Pelatihan Terstruktur (Creativity, Leadership, & Entrepreneur)

Kegiatan Ekstra Kurikuler

Kegiatan Ekstra-kurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam perkuliahan tatap muka oleh Mahasiswa, baik di dalam maupun di luar kampus untuk membantu pengembangan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pimpinan, dosen, mahasiswa, dan organisasi yang berkemampuan dan berwenang di lingkungan universitas. Beberapa kegiatan ekstra kurikuler yang penting dilakukan dalam mendukung internalisasi nilai-nilai bela negara adalah:

Fasilitasi program dan kegiatan organisasi kemahasiswaan berbasis pengembangan soft skills bela negara. Untuk mendukung terinternalisasinya nilai-nilai bela negara bagi mahasiswa, maka diperlukan peran semua pihak, mulai dari pimpinan, dosen, tendik dan mahasiswa. Mahasiswa juga harus diberi ruang, dengan otonomi yang dimilikinya dalam organisasi kemahasiswaan, untuk menyusun program dan kegiatan yang berorientasi pada pengembangan nilai-nilai bela negara. Pimpinan yang memiliki kewenangan dalam mengatur alokasi anggaran, harus memastikan bahwa semua kegiatan baik oleh OK, Fakultas, Biro dan Lembaga, telah mencerminkan nilai-nilai bela negara. Ini bagian proses internalisasi nilai-nilai bela negara dengan cara memberikan dukungan anggaran bagi program yang sejalan dengan pengembangan nilai-nilai bela negara. Hal ini tidak berarti kegiatan yang tidak ada kaitan dengan bela negara tidak didukung, tapi hanya porsinya yang harus lebih kecil daripada anggaran untuk kegiatan yang berbasis nilai-nilai bela negara. Untuk bentuk dan jenis kegiatannya diserahkan kepada mahasiswa.

Penilaian dan pemberian penghargaan bagi organisasi kemahasiswaan yang mengembangkan nilai-nilai bela negara. Untuk lebih menguatkan dan mengukur seberapa besar program-program yang berbasis bela negara dijalankan oleh organisasi kemahasiswaan, maka perlu diadakan evaluasi program dan kegiatan OK melalui pemberian penghargaan bagi organisasi kemahasiswaan yang berhasil menjalankan program yang berbasis nilai-nilai bela negara.

Tahapan Kegiatan Internalisasi

Agar proses internalisasi dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka proses internalisasi melalui berbagai kegiatan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, harus diatur sedemikian rupa, sehingga setiap semester (selama kurang lebih 8 semester) selalu ada kegiatan internalisasi soft skills bela negara. Kegiatan yang terintegratif dan berkelanjutan ini, yang dimulai dari penerimaan mahasiswa baru hingga menjelang lulus sebagai sarjana, dimaksudkan untuk menguatkan nilai-nilai bela negara yang secara sadar dan tidak sadar menjadi bagian dari pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kegiatan yang terintegratif dan berkelanjutan juga dimaksudkan

untuk membangun kebiasaan positif sebagai mahasiswa dan lulusan UPN "Veteran" Yogyakarta sebagai pionir pembangunan yang dilandasi nilai-nilai bela negara.

Terdapat 5 tahapan yang dilakukan dalam melakukan internalisasi nilai-nilai soft skills bela negara, yaitu:

Tahap Pengenalan

Pada tahap pengenalan, kegiatan bersifat ko-kurikuler. Kegiatan yang dilakukan adalah:

- PKK-BN (Pengenalan Kehidupan Kampus Bela Negara)

Kegiatan ini dilakukan pada semester I, ketika calon mahasiswa baru telah diterima sebagai mahasiswa baru UPN "Veteran" Yogyakarta. Pada tahapan ini, dikenalkan nilai-nilai bela negara kepada mahasiswa baru melalui kegiatan PKK-BN. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengenalkan nilai-nilai dasar bela negara dan profil UPN "Veteran" Yogyakarta sebagai kampus yang memiliki ciri khas sebagai kampus bela negara. Materi yang disampaikan dan nilai-nilai soft skills bela negara yang ditanamkan dalam kegiatan ini adalah: Pengetahuan tentang nilai-nilai dasar Bela Negara, Nilai-nilai kedisiplinan, dan Nilai-nilai Ketangguhan.

- Pendampingan Agama Islam dan Agama Non Islam

Kegiatan ini dilakukan pada Semester II. Nilai-nilai yang diinternalisasi adalah: Keimanan, Kepatuhan, Kejujuran, Komitmen, Tanggungjawab, Semangat (Passion) berbuat yang terbaik dan Disiplin.

Tahap Penyadaran

Pada tahap Penyadaran ini, bentuk kegiatan bersifat ko-kurikuler. Kegiatan tersebut meliputi:

- Student Camp

Kegiatan ini dilakukan pada Semester III. Nilai-nilai yang diinternalisasi adalah: Tanggungjawab, Kerjasama, Problem Solving, Kepedulian, Visioner, Disiplin, Adaptasi, Interpersonal

- ESQ Training

Kegiatan ini dilakukan pada Semester IV. Nilai-nilai yang ditanamkan adalah: Kejujuran, Disiplin, Kerjasama, Kepedulian, Tanggung Jawab, Integritas, Etika.

Tahap Penguatan

Tahap penguatan dilakukan dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas melalui penerapan model pembelajaran yang berbasis bela negara. Artinya internalisasi pada tahapan ini dilakukan selama kurang lebih 8 semester, dimulai dari semester 1 hingga semester 8. Proses pembelajaran berbasis soft skills bela negara dapat diberlakukan untuk mata kuliah teori maupun mata kuliah praktek. Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, untuk memastikan model pembelajaran ini dapat mengukur keberhasilannya, maka sistem penilaiannya juga harus berorientasi pada soft skills bela negara dan menggunakan metode yang tepat.

Nilai-nilai soft skills bela negara yang diinternalisasikan dalam proses pembelajaran adalah: communication skills, problem solving, creative, innovative, critical, analyzing skill, dan listening skills.

Tahap Aktualisasi

Kegiatan pada tahapan ini bersifat ekstra kurikuler, dimana ini dilakukan setiap saat oleh organisasi kemahasiswaan di lingkungan FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta. Beberapa

kegiatan dan soft skills bela negara yang dikembangkan adalah:

- Fasilitasi program dan kegiatan organisasi kemahasiswaan berbasis soft skills bela negara, dengan nilai-nilai yang dikembangkan adalah inspire employees, great sense of services skills, creative, dan innovative
- Penilaian dan pemberian penghargaan bagi OK yg mengembangkan bela negara. Kegiatan ini dilakukan setiap akhir tahun untuk melakukan penilaian dan pemberian penghargaan bagi OK yang berprestasi dalam mengembangkan nilai-nilai bela negara.

Tahap Penguatan Lanjutan

Tahap penguatan lanjutan bersifat Kegiatan ko-kurikuler, dimana dilakukan di semester V dan VI dalam bentuk berbagai pelatihan terstruktur. Beberapa kegiatan yang bisa dikembangkan dan nilai-nilai yang diinternalisasi adalah:

- Creativity training dengan nilai-nilai yang dikembangkan adalah: creative, innovative, dan critical
- Leadership training, dengan nilai-nilai yang dikembangkan adalah: multicultural, problem solving, negotiation skills, conflict resolution
- Entrepreneur training, dengan nilai-nilai yang dikembangkan adalah: great sense of services skills, creative, innovative

PENUTUP

Untuk mewujudkan mahasiswa dan lulusan yang memiliki sikap dan perilaku bela negara, perlu melakukan kegiatan yang terstruktur, sistematis dan terintegrasi, selama menjadi mahasiswa. Dengan pola kegiatan seperti itu, akan terbangun kebiasaan, yang sadar atau tidak sadar akan menjadi pola pikir, pola sikap dan pola tindak mahasiswa dan lulusan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penelitian kelembagaan ini dilakukan dalam kerangka membangun sistem kegiatan yang terstruktur, sistematis, berkelanjutan dan terintegrasi. Dengan melakukan kegiatan kurikuler, ko kurikuler dan ekstra kurikuler yang terintegrasi ini, diharapkan lulusan FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta menjadi pionir pembangunan yang dilandasi nilai-nilai bela negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aly, Abdullah. (2017). Pengembangan Pembelajaran Karakter Berbasis Soft Skills Di Perguruan Tinggi. Jurnal Ishraqi, Volume 1 No. 1.
- Firdaus, Ida. (2017). Urgensi Soft Skills Dan Character Building Bagi Mahasiswa. Jurnal TAPIS Vol. 14 No.01
- Hadi, Yulianto, Djoko Suryo, F.X. Sudarsono. 2014. "Dinamika Penanaman Nilai-Nilai Bela Negara Kadet Maguwo dalam Perspektif Historis", Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Volume 2 Nomor 2, 2014
- Hamidah, Siti., Palupi., Sri. (2012). Peningkatan Soft Skills Tanggung Jawab Dan Disiplin Terintegrasi Melalui Pembelajaran Praktik Patiseri. Jurnal Pendidikan Karakter. No 2 tahun 2012.
- Manara, M. Untung. (2014). Hard Skills dan Soft Skills pada Bagian Sumber Daya Manusia di Organisasi Industri. Jurnal Psikologi Tabularasa. Volume 9, No. 1. Hal 37-47
- Nopranto, Agung. (2014). Pengaruh Mata Kuliah Simulasi Proses Akuntansi (MOAL) terhadap Karakteristik Kesiapan Kerja (Soft Skills) Mahasiswa Akuntansi Universitas Bakrie. Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie. Vol 2, No 3 (2014): April 2014
- Pramuniati, Isda. (2009). Integrasi Soft Skills Melalui Learning Revolution Sebagai Upaya

- Peningkatan Kualitas Lulusan Perguruan Tinggi. Jurnal Unimed. No 73.
- Sunarti, Titik, Zamroni, Darmiyati Zuchdi. (2014). “Internalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Karakter Pada Siswa SMP dalam Perspektif Fenomenologis”, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Volume 2 Nomor 2, 2014
- Supriyadi, Acep, Harpani Matnuh, Mitha. 2014. “Internalisasi Nasionalisme dalam Pembelajaran PKn pada Siswa MAN 2 Model Banjarmasin”. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Volume 4. Nomor 8, November 2014.
- Rusady, Fransisca Bestari. (2016). Hubungan Hard Skill, Softskill, Dan Pengalaman Kerja dengan Kinerja Karyawan. Skripsi Program Studi Manajemen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
- Wagiran. (2013). Model Penguatan Soft Skills Dalam Pewujudan Calon Guru Kejuruan Profesional Berkarakter. Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran. Vol 43, No 1: Mei 2013
- Wahyuni, (2016). Pengaruh Hard Skill dan Soft Skill Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar
- Widarto, Pardjono., Widodo, Noto. (2012). Pengembangan Model Pembelajaran Soft Skills Dan Hard Skills Untuk Siswa Smk. Jurnal Cakrawala Pendidikan, November 2012, Th. XXXI, No. 3. Hal. 409-423.

PENGEMBANGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI UPN "VETERAN" YOGYAKARTA

Meilan Sugiarto¹⁾, Sri Woro Ediningsih²⁾, Siswanti³⁾, Herlina Jayadianti⁴⁾, Puji Lestari⁵⁾,
Bambang Wisaksono⁶⁾

LP3M UPN "Veteran" Yogyakarta

msugiarto89@gmail.com

Abstraksi

LP3M sebagai lembaga yang menjalankan fungsi penjaminan mutu di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta telah mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sebagai wujud sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (UU No. 12/2012 dan Permenristekdikti No. 62/2016). Di dalam UU No.12/2012 pasal 54 ayat (4) dijelaskan bahwa Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan non-akademik yang melampaui SN Dikti. Melalui penelitian dan pengembangan (*research and development*) dengan didukung pengumpulan data menggunakan studi literatur dan *focus group discussion* (FGD), Standar SPMI selain dievaluasi dan dikendalikan juga ditingkatkan menjadi 30 standar, termasuk manual dan kebijakan mutunya. Pengembangan tersebut diperlukan untuk mendukung UPN "Veteran" Yogyakarta menjadi salah satu perguruan tinggi yang unggul.

Kata kunci: standar pendidikan tinggi, sistem penjaminan mutu internal, standar mutu, manual mutu, kebijakan mutu.

PENDAHULUAN

Keberadaan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) UPN "Veteran" Yogyakarta secara yuridis mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPN "Veteran" Yogyakarta. Tugas pokok yang dijalankan LP3M adalah melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.

LP3M sebagai lembaga yang menjalankan fungsi penjaminan mutu di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta telah mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sebagai wujud sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016). Penjaminan mutu tersebut dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) standar pendidikan tinggi. Standar pendidikan tinggi yang dimaksud tentunya ditetapkan oleh UPN "Veteran" Yogyakarta dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 54.

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 54 ayat (2) dijelaskan bahwa SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Lebih lanjut, dalam pasal 54 ayat (4) dijelaskan bahwa Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan non-akademik yang

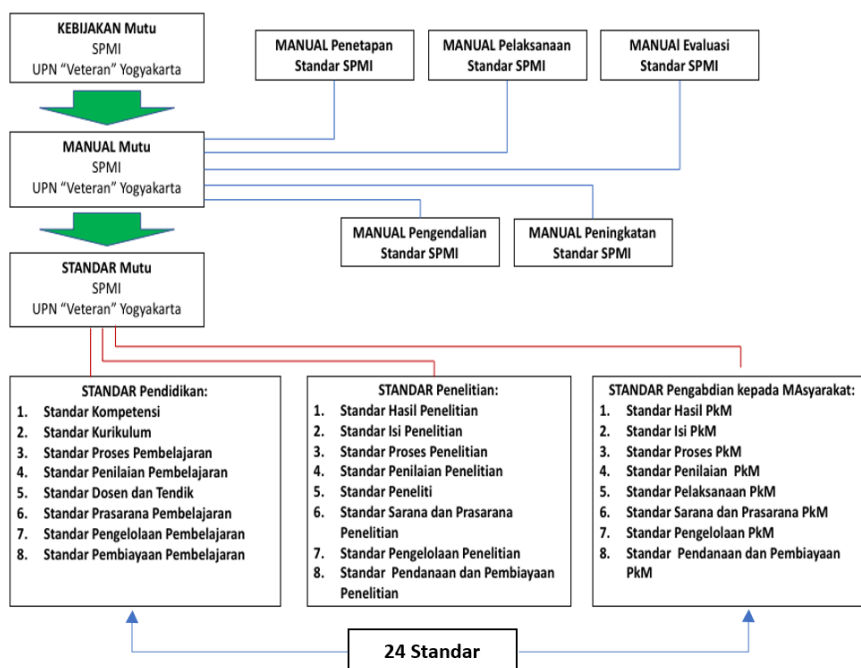
melampaui SN Dikti. Pengembangan terhadap standar SPMI termasuk kebijakan dan manual SPMI UPN “Veteran” Yogyakarta perlu dilakukan. Terutama untuk standar SPMI selain dievaluasi dan dikendalikan juga akan ditingkatkan menjadi 30 standar termasuk di dalamnya standar akademik dan non-akademik.

METODE

Komponen kelembagaan yang dikembangkan melalui penelitian ini adalah: kebijakan, manual, dan standar SPMI UPN “Veteran” Yogyakarta. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sistem (input-proses-output), dimana penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian dan pengembangan (*research and development*) yaitu penelitian yang digunakan untuk menghasilkan atau mengembangkan produk tertentu (Arikunto, 2010). Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan *focus group discussion* (FGD). Sumber data penelitian ini adalah berbagai dokumen penjaminan mutu yang dimiliki LP3M UPN “Veteran” Yogyakarta, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, serta yang berasal dari beberapa nara sumber internal UPN Veteran Yogyakarta. Pengolahan dan analisis data penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

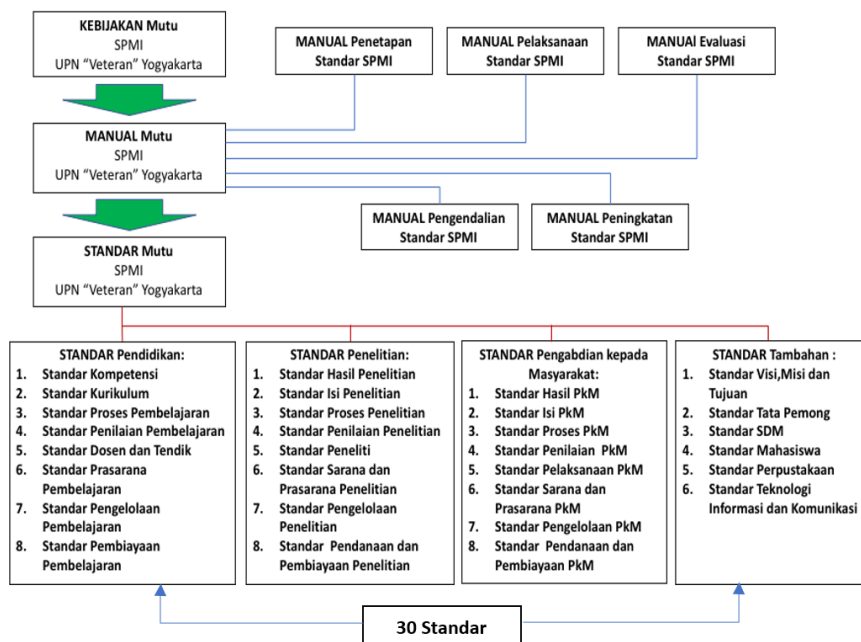
Pada dasarnya Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan dan dilaksanakan UPN “Veteran” Yogyakarta telah terdokumentasi dalam dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UPN “Veteran” Yogyakarta dan sudah mengacu pada SN Dikti yang termuat dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015. Namun, belum melampaui SN Dikti sebagaimana dijelaskan dalam UU No.12/2012 pasal 54 ayat (4) tersebut, yaitu masih berjumlah 24 standar :



Gambar 1.

Struktur Dokumen SPMI UPN “Veteran” Yogyakarta Dengan 24 Standar (Tahun 2017)

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan melalui penelitian kelembagaan yang dilakukan pada tahun 2019 ini, dengan mengacu kebutuhan dan perkembangan UPN “Veteran” Yogyakarta, Statuta, RENSTRA 2015-2019 maupun RPJP 2015-2029, maka standar mutu dikembangkan menjadi 30 standar sebagai berikut:



Gambar 2.

Struktur Dokumen SPMI UPN “Veteran” Yogyakarta Dengan 30 Standar (Tahun 2019)

Pengembangan 24 standar mutu SPMI UPN “Veteran” Yogyakarta menjadi 30 standar dengan memunculkan beberapa standar mutu tambahan yaitu :

- 1) Standar Visi, Misi, dan Tujuan
- 2) Standar Tata Pamong
- 3) Standar SDM
- 4) Standar Mahasiswa
- 5) Standar Perpustakaan
- 6) Standar Teknologi Informasi dan Komunikasi

Seiring dengan perkembangan dunia pendidikan maupun tuntutan lingkungan internal institusi dan lingkungan eksternal, maka jumlah standar akan semakin berkembang. Adanya standar akan mempermudah institusi dalam melakukan audit mutu internal dengan pedoman yang jelas.

PENUTUP

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas atau mutu dari perguruan tinggi yang bersangkutan. UPN “Veteran” Yogyakarta sebagai sebuah perguruan tinggi juga membutuhkan pengembangan standar mutu untuk mendukung SPMI yang diterapkan di perguruan tinggi tersebut.

SPMI UPN “Veteran” Yogyakarta, secara umum sudah mengacu pada SN Dikti yang termuat dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun

2015 dengan jumlah 24 standar hanya mencakup bidang Tridarma Perguruan Tinggi. Mengingat perkembangan perguruan tinggi tersebut maka perlu dikembangkan lagi standar mutunya agar menjadi lebih baik lagi.

Pengembangan standar mutu yang akan diterapkan di UPN "Veteran" Yogyakarta berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan menjadi 30 standar dari semula hanya mencakup 24 standar saja. Beberapa standar mutu yang ditambahkan adalah : 1) Standar Visi, Misi, dan Tujuan; 2) Standar Tata Pamong; 3) Standar SDM; 4) Standar Mahasiswa; 5) Standar Perpustakaan; dan 6) Standar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tidak menutup kemungkinan dalam perjalanannya akan bertambah lagi standar mutu agar semua bidang kerja terstandarisasi dengan baik.

PENGHARGAAN

Terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta yang telah memberikan pendanaan untuk penelitian kelembagaan ini.

REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, 2010.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPN "Veteran" Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

PENGEMBANGAN MODEL OPTIMALISASI PERAN LPPM UPN "VETERAN" YOGYAKARTA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PENELITIAN DOSEN MELALUI SINERGITAS SINTA

Prayudi¹, Hendro Widjanarko²

¹Kapus Perencanaan, Pengembangan & Kerjasama

²Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian bagi Masyarakat

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

prayudi73@gmail.com

Abstract

One problem that is still faced by Indonesia is that the number of students and lecturers is not yet proportional to the number of publications produced. The lack of recognition of research on national children at the global level is partly due to the low global publications of the researchers. Currently the government intensively trying to push up research results to be published on a global (international) level. The published research results are a very important state asset because the level of civilization of a country can be seen from the number of publications produced. So it cannot be denied, and now every country is fighting over each other to get the highest rank in international publications. As of January 2019, from 474 lecturers at UPN "Veteran"s in Yogyakarta, 338 have been registered by SINTA. This means that around 71.3% of the lecturers have registered themselves with the SINTA system. This certainly has an impact on the ranking of SINTA UPN "Veteran"s Yogyakarta which as of March 2019 ranks 124th after previously being ranked 90th. This study aims to develop a model for optimizing the role of LPPM UPN "Veteran"s Yogyakarta in improving the research performance of lecturers through SINTA synergy . This research will be carried out with qualitative methods through literature studies and in-depth interviews with lecturers, chancellors, LPPM chairmen, and the Ministry of Research, Technology and Higher Education. Furthermore, the classification and reduction of data are carried out and make an optimization model of the role of LPPM UPN "Veteran"s Yogyakarta in improving the research performance of lecturers through SINTA synergy. The outputs targeted in the research planned for 3 years are models, documentation of model implementation, policies, scientific articles.

Keyword: SINTA, LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta, research, scientific articles.

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini sedang mengalami permasalahan dimana jumlah perbandingan antara mahasiswa dan jumlah dosen belum sebanding dengan jumlah publikasi yang dihasilkan. Kurang dikenalnya penelitian anak negeri di tingkat global antara lain diakibatkan rendahnya publikasi global para peneliti tersebut. Saat ini pemerintah dengan gencar berusaha mendongkrak hasil-hasil penelitian untuk dapat dipublikasikan di tingkat global (internasional). Hasil penelitian yang dipublikasikan merupakan sebuah aset negara yang sangat penting karena tingkat peradaban sebuah negara dapat dilihat dari jumlah publikasi yang dihasilkan.

Sehingga tidak dapat di pungkiri, dan kini setiap negara saling memperebutkan untuk mendapatkan peringkat tertinggi dalam publikasi internasional.

Menurut Ristekdikti bahwa salah satu penyebabnya adalah rendahnya publikasi global para peneliti tersebut. Berdasarkan inilah maka untuk meningkatkan jumlah publikasi, pemerintahan melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ([Kemenristekdikti](#)) membangun Science and Technology Index yang diberi nama [SINTA](#). [SINTA](#) dibuat guna mewadahi hasil penelitian yang sudah dipublikasikan secara online. Sehingga orang yang dapat berkontribusi di Portal [SINTA](#) adalah para peneliti dan dosen. Dosen juga dianggap sebagai peneliti karena disamping mengajar di kelas, dosen juga melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Sehingga kedua profesi inilah yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan indeks publikasi jurnal ilmiah di negara kita.

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertanggung jawab dalam mengembangkan penelitian di kalangan dosen dan meningkatkan kinerja perguruan tinggi di bidang penelitian. Mengacu pada Rencana strategis yang telah disusun UPN “Veteran” Yogyakarta tahun 2015 – 2019, UPN “Veteran” Yogyakarta mengembangkan rencana strategis tahun 2016 – 2020 dengan masuknya UPN “Veteran” Yogyakarta ke dalam kluster Mandiri Perguruan tinggi. Dalam hal ini LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta diberi wewenang untuk melakukan seleksi proposal penelitian dan evaluasi mandiri.

Pengelolaan SINTA yang banyak berhubungan dengan publikasi luaran penelitian dipercayakan pengelolaannya kepada LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta, khususnya Kapus Perencanaan, Pengembangan dan Kerjasama. Data hingga Januari 2019, dari 474 dosen di UPN “Veteran” Yogyakarta, telah terdaftar SINTA sebanyak 346 dosen. Artinya, sudah sekitar 73,3 % dosen mendaftarkan dirinya ke system SINTA. Meskipun demikian masih terdapat 126 atau sekitar 26,7% dosen yang belum mendaftarkan dirinya ke system SINTA. Hal ini tentu berdampak pada perangkingan SINTA UPN “Veteran” Yogyakarta yang per bulan Maret 2019 berada di urutan 124 setelah sebelumnya sempat berada di urutan 90. Permasalahan lainnya, masih adanya pemahaman bahwa SINTA hanya sekedar prasyarat bagi dosen yang hendak mengajukan proposal penelitian dan pengabdian untuk mendapatkan bantuan dana dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan diatas, permasalahan yang coba dicarikan solusinya adalah sebagai berikut: “Bagaimanakah pengembangan model optimalisasi peran LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta dalam meningkatkan kinerja penelitian dosen melalui sinergitas SINTA?”

KONTRIBUSI PENELITIAN

Pengembangan dan pengintegrasian SINTA dalam rangka meningkatkan kinerja Penelitian Dosen dan LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta akan memberikan kontribusi bagi pengembangan UPN “Veteran” Yogyakarta menjadi universitas riset dalam jangka panjang. Secara rinci, urgensi riset adalah sebagai berikut:

Penelitian ini akan memberikan konsep sekaligus peta jalan yang lebih jelas untuk pengintegrasian dan pemanfaatan SINTA dalam menunjang kinerja penelitian dosen dan LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta.

Mendorong keluarnya kebijakan yang memicu seluruh dosen UPN “Veteran” Yogyakarta untuk mendaftarkan dirinya ke dalam sistem SINTA dan mengembangkan kinerja penelitiannya.

METODE PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998: 15). Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif (Rakhmat, 1998: 24-26) yaitu dengan langkah-langkah berikut ini: (1) Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang menggambarkan mengenai objek penelitian; (2) Mengidentifikasi permasalahan dari penelitian; (3) Menganalisis permasalahan dalam penelitian ini; (4) Menentukan apa yang akan dilakukan dalam menghadapi permasalahan dan melakukan evaluasi dengan belajar dari pengalaman untuk menetapkan rencana dan keputusan selanjutnya.

Penelitian ini dilakukan di UPN “Veteran” Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari objek penelitian, dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari para informan yang meliputi dosen dan ketua lembaga. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mengutip dari sumber-sumber lain seperti literature, dokumentasi dan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan gambaran umum SINTA. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa teknik antara lain: (1) Observasi; (2) Wawancara; dan (3) Studi Pustaka.

Analisis data dilakukan terhadap data baik primer maupun sekunder dimana hasilnya akan disajikan dalam bentuk uraian dan tidak memakai kaidah-kaidah statistic. Penulis kemudian menggabungkan data yang terdapat di lapangan untuk diolah dan disederhanakan lalu disusun secara sistematis untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Analisis data telah dilakukan sejak awal penelitian. Uji kebenaran hipotesis telah dilakukan dengan memperoleh data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Terdapat empat komponen utama yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan.

Uji keabsahan data dilakukan dengan empat teknik triangulasi data yaitu: (1) Triangulasi Data (Data Triangulation); (2) Triangulasi Peneliti (Investigator Triangulation); (3) Triangulasi Metodologis (Methodological Triangulation); (4) Triangulasi Teoritis (Theoretical Triangulation). Melalui teknik Triangulasi Data yang dilakukan sebagai pengembangan validitas data, maka peneliti dalam hal ini membandingkan data-data yang telah diperoleh dari penggunaan teknik yang memiliki sumber data berbeda tersebut. Selanjutnya didapat hasil yang lebih terpercaya dan dapat teruji kebenarannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pengembangan Penelitian UPN “Veteran” Yogyakarta

UPN “Veteran” Yogyakarta sebagai perguruan tinggi yang secara fundamental memiliki nilai, karakter serta semangat kejuangan sesuai dengan filosofi para pendirinya. Sudah sewajarnya dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi lebih difokuskan untuk memajukan kesejahteraan umum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, juga berusaha mencerdaskan kehidupan bangsa melalui semangat disiplin, kejujuran dan kreatifitas. Ada

beberapa hal yang menjadi pertimbangan pentingnya UPN "Veteran" Yogyakarta mengembangkan Penelitian, yaitu:

Pertama, Peluang dan tantangan bagi perguruan tinggi di masa depan untuk dapat berperan aktif baik di tingkat domestik, regional, maupun internasional dalam rangka mendukung tujuan pembangunan nasional, khususnya bidang pendidikan. Arah pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) periode 2015-2019 ditekankan pada daya saing regional, dan periode 2020-2024 ditekankan pada daya saing internasional. Kuatnya arus globalisasi dan perkembangan ekonomi menuntut Bangsa Indonesia memiliki Sumberdaya Manusia (SDM) yang profesional dalam segala bidang. Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Yogyakarta, terpenggil untuk berperan aktif menghadapi tantangan global tersebut, antara lain dengan menempatkan diri sebagai kekuatan intelektual dalam membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang cerdas, tangguh, berkeadaban, dan mempunyai ciri khas bela negara. Hal tersebut sejalan dengan visi pendidikan nasional seperti tertuang dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Kedua, Renstra Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2015-2019 yang memiliki Visi "Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa". Pendidikan tinggi yang bermutu dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang berpengetahuan, terdidik, dan terampil, sedangkan kemampuan iptek dan inovasi dimaknai oleh keahlian SDM dan lembaga litbang serta perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek yang ditunjang oleh pembangunan faktor input (kelembagaan, sumberdaya, dan jaringan). Sementara itu, makna daya saing bangsa adalah kontribusi iptek dan pendidikan tinggi dalam perekonomian yang ditunjukkan oleh keunggulan produk teknologi hasil litbang yang dihasilkan oleh industri/perusahaan yang didukung oleh lembaga litbang (LPNK, LPK, Badan Usaha, Perguruan Tinggi) dan tenaga terampil pendidikan tinggi.

Ketiga, Renstra UPN "Veteran" Yogyakarta 2015-2019 yang memiliki visi menjadi universitas pioner pembangunan yang dilandasi jiwa bela negara di era global. Dan misi di bidang penelitian yaitu meningkatkan kualitas penelitian melalui program terencana, terintegrasi dan berkelanjutan.

Adapun yang menjadi landasan hukum pengembangan penelitian di UPN "Veteran" Yogyakarta adalah:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional ““Veteran”” Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 701).

RENSTRA PENELITIAN

Dalam rangka menunjang pengembangan penelitian di kalangan dosen UPN “Veteran” Yogyakarta, telah mengembangkan rencana strategis penelitian. Renstra Penelitian Universitas Pembangunan Nasional “ “Veteran”” Yogyakarta merupakan kebijakan, pengambilan keputusan, serta payung dalam pengelolaan penelitian tahun 2016-2021. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pengalaman yang cukup panjang yang dilakukan oleh civitas akademik UPN ““Veteran”” Yogyakarta baik karena permintaan dari masyarakat/Pemda/Lembaga lain maupun dari inisiatif para dosen. Pendanaan untuk penelitian kepada masyarakat bersumber dari banyak pihak, seperti pemda, kementerian, BUMN, perusahaan swasta maupun yang bersumber dari UPN ““Veteran”” Yogyakarta. Renstra disusun juga didasarkan atas permasalahan yang dihadapi oleh kelompok masyarakat di suatu wilayah dan rencana kerja pembangunan pemerintah daerah. Tentunya isu global seperti akan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean, pasar bebas dunia, Global Climate Change, kemiskinan, maupun kelaparan juga menjadi acuan penting dalam penyusunan Renstra.

Renstra Penelitian akan memberikan arah sumbangan IPTEK civitas akademik dan meningkatkan peran dari fungsi lembaga serta untuk menghadapi tantangan-tantangan akibat perubahan lingkungan, untuk rentang waktu 2016-2020. Sebagai implementasi atas program strategis dan dalam kerangka menjabarkan serta untuk lebih memastikan sasaran strategis lima tahunan dalam Renstra disusun Rencana Operasional (Renop). Renop terutama berisi sasaran dan program tahunan. Sasaran dan program tahunan berikutnya dijabarkan dalam kegiatan dan anggaran. Kesatuan dari Renstra, Renop, dan Anggaran merupakan perwujudan

implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) yang digunakan Universitas.

SINTA

Perkembangan Publikasi Riset di Indonesia

Tercatat dalam data Kemenristekdikti, perkembangan publikasi Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan sejak tahun 2010 – 2016. Berdasarkan data, pada tahun 2010 hanya tercatat 2.707 publikasi penelitian hingga terus mengalami peningkatan menjadi 3.327 pada tahun 2011, kemudian di tahun 2012 tercatat meningkat menjadi 3.910 publikasi. Pada 2013 mengalami peningkatan kembali hingga 5.123 dan 6.438 di tahun 2014. Dari sebaran subyek penelitian yang ada pun cukup beragam dari berbagai keilmuan.

Selama 4 tahun sejak 2015 hingga 2018, pertumbuhan publikasi internasional Indonesia mencapai 263,27 persen. Publikasi internasional Indonesia pada 2015 mencapai 8.263 artikel ilmiah (peringkat 4 Asia Tenggara). Tahun 2016 jumlah tersebut meningkat 48,79 persen menjadi 12.295 artikel ilmiah (peringkat 4 Asia Tenggara). Pada 2017, publikasi internasional Indonesia meningkat 64,61 persen menjadi 20.239 (peringkat 3 Asia Tenggara, mengalahkan Thailand). Pada 2018, dengan pertumbuhan 48,31 persen, Indonesia akhirnya dapat menduduki peringkat 2 Asia Tenggara, mengalahkan Singapura dengan jumlah publikasi internasional mencapai 30.017. Pada tahun 2019, Indonesia menargetkan menggantikan Malaysia menjadi negara Asia Tenggara dengan jumlah publikasi internasional terbanyak²².

Paten domestik (dalam negeri) yang didaftarkan di Indonesia dibandingkan paten domestik yang didaftarkan di negara-negara ASEAN terus meningkat. Dari peringkat ketiga pada 2015, Indonesia kini menjadi negara di ASEAN dengan paten domestik tertinggi. Pada 2015 paten domestik Indonesia mencapai 1.058 paten (peringkat 3 ASEAN). Pada 2016 paten domestik Indonesia meningkat 43 paten menjadi 1.101 (peringkat ketiga). Pada 2017 peningkatan tajam sekitar 1.100 paten dicatatkan di Indonesia. Totalnya pada 2017, Indonesia mencatatkan paten domestik berjumlah 2.271 (peringkat pertama, mengalahkan Singapura dan Malaysia). Peringkat pertama jumlah paten dalam negeri masih dimiliki Indonesia pada 2018 dengan peningkatan angka paten sekitar 500, yang menjadikan angka paten domestik Indonesia mencapai 2.842 (peringkat pertama).

Dengan meningkatnya pertumbuhan riset di Indonesia menunjukkan bahwa perguruan tinggi, masyarakat, bahkan industri mulai bangkit bersama-sama untuk terus memajukan riset di Indonesia. Peningkatan jumlah publikasi riset internasional Indonesia merupakan pencapaian yang sangat baik. Ditinjau dari segi anggaran, pemerintah telah mengalokasikan anggaran negara untuk riset sebesar 84 persen dari struktur anggaran riset dunia. Dengan adanya Rancangan Undang –Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RUU Sinas Iptek), maka Indonesia dapat menerapkan sistem yang sama untuk pendanaan riset. UU Sinas Iptek nantinya diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi swasta untuk memberikan pendanaan dan berpartisipasi dalam mengembangkan riset di Indonesia dan meningkatkan jumlah publikasi riset baik di tingkat nasional maupun global.

Pendataan, Pengukuran dan Dampak Riset di Indonesia

SINTA (Science and Technology Index) dibuat untuk memudahkan dalam melakukan

²²Harususilo, Yohanes Enggar, "Menjawab Tantangan Pengembangan Riset dan Penelitian Tanah Air (1)" <https://edukasi.kompas.com/read/2019/02/20/09300071/menjawab-tantangan-pengembangan-riset-dan-penelitian-tanah-air-1->

pendataan dan pemetaan terhadap publikasi ilmiah yang dilakukan oleh akademisi dan peneliti di Indonesia. SINTA merupakan pusat indeks kutipan dan kepakaran terbesar di Indonesia berbasis web yang menawarkan akses cepat, mudah dan komprehensif untuk mengukur unjuk kerja peneliti dan institusi berdasarkan jumlah artikel dan kutipan yang dihasilkan. SINTA menyediakan benchmark dan analisis serta identifikasi kekuatan riset setiap institusi, memperlihatkan kolaborasi penelitian serta menganalisis tren penelitian dan direktori pakar²³.

Konten SINTA berasal dari publikasi seluruh akademisi dan peneliti Indonesia di seluruh dunia serta jurnal Indonesia yang sudah terbit secara elektronik serta memiliki profil publikasi dan kutipan dalam pengindeks bereputasi seperti Google scholar dan Scopus. SINTA dikembangkan untuk mengintegrasikan publikasi dan jurnal yang terbit di Indonesia sehingga dapat dipetakan oleh penulis. Hingga Desember 2018 sudah terdata 152.153 penulis dengan 4.577 dan dokumen Google Scholar yang sudah mencakup 1.429.354, 58.748 Scopus, 6.404 Buku dan 2.993 kekayaan intelektual²⁴.

Pengembangan SINTA merupakan upaya Kemenristekdikti dalam meningkatkan kualitas artikel penelitian dan dokumen hasil penelitian sehingga dapat dipublikasikan dalam lingkup yang lebih luas sehingga dapat dijadikan parameter dalam pengukuran kinerja suatu perguruan tinggi. Dampak dari adanya program dan sistem pendukung publikasi ilmiah ini adalah meningkatnya jumlah publikasi internasional Indonesia. Tercatat hingga 25 Desember 2018 pulikasi Ilmiah Indonesia yang terindeks di Scopus sebanyak 28.039 yang merupakan kedua dari Malaysia dengan jumlah 20.457, diikuti Singapura 22.198, Thailand 19.937 dan Vietnam 8.200.25

Integrasi dan Interoperabilitas Data SINTA

SINTA mengintegrasikan data secara interoperabilitas terhadap basis data yang tersebar pada basis data lainnya dalam lingkup nasional maupun internasional. Basis data tersebut kemudian diintegrasikan untuk dapat dipetakan dan diukur sehingga dapat dibuat pemeringkatan terkait kinerja akademisi dan peneliti, institusi maupun jurnalnya. Untuk mempermudah interoperabilitas antar basis data internasional, saat ini Kemenristekdikti bekerjasama dengan beberapa basis data melalui mekanisme API (Automatic Programming Interface) sehingga data publikasi internasional beserta dampaknya dapat diintegrasikan dan disinkronkan setiap saat. Sedangkan untuk lingkup nasional, Kewenangan pendataan buku saat ini berada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) dan pendataan kekayaan intelektual untuk paten, hak cipta merek dan lainnya dilakukan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual (KI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk itu SINTA melakukan integrasi data dengan dirjen KI dan PNRI melalui mekanisme pertukaran API.

Interoperabilitas SINTA terhadap basis data di internal Kemenristekdikti saat ini sudah diintegrasikan dengan beberapa basis data seperti basis data Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) yang merupakan pangkalan data resmi terkait pendataan institusi dan dosen yang terus diperbaharui, SISTER – dibuat oleh Dirjen Sumber Daya Iptek (SDID) – yang merupakan basis data untuk pengajuan kenaikan jenjang jabatan. Basis data internal lainnya seperti ARJUNA yang merupakan kumpulan jurnal yang sudah terakreditasi Kemenristekdikti, Samlitabmas

²³ Dalam “*Bahan sosialisasi kebijakan Pendataan, Pengukuran dan Dampak Riset di Indonesia*”. 2019. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid*

yang merupakan kumpulan proses pengusulan penelitian dan pengabdian masyarakat, dan SAPTO yang merupakan basis data akreditasi program studi, saat ini sudah diintegrasikan dengan SINTA sehingga masing –masing satuan kerja di dalam internal Kemenristekdikti memiliki kewenangan, namun dari sisi pengusul tidak melakukan duplikasi entri data²⁶.

Fitur Baru SINTA 3.0 2019

Setelah diluncurkan dalam Soft Launching SINTA versi 1.0 di Yogyakarta pada akhir Januari 2017, Kemenristekdikti terus melakukan update dan perbaikan platform SINTA. Hal ini merupakan upaya Kemenristekdikti dalam membangun Science and Teknologi Index yang handal dan terpercaya. Dimana nantinya diharapkan dengan adanya sistem index publikasi penelitian ini, jumlah publikasi dan sitasi penelitian di Indonesia terus mengalami peningkatan sehingga mampu menciptakan inovasi serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi dalam penelitian ditingkat global. SINTA memiliki beberapa fungsi untuk menunjang peningkatan jumlah publikasi dan sitasi peneliti Indonesia diantaranya: (1) Mendata publikasi dan sitasi akademisi dan peneliti Indonesia; (2) Menilai kinerja jurnal berdasarkan standar akreditasi dan sitasi; (3) Melihat analisis profil Institusi, Penulis dan Jurnal; (4) SINTA Metrics; (5) Memantau kinerja publikasi dosen dan peneliti.

SINTA saat ini terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan kebutuhan stakeholders serta mengikuti perkembangan dari teknologi, informasi dan komunikasi terkini. Beberapa fitur baru SINTA yang dikembangkan untuk tahun 2019 antara lain²⁷: (1) Pemetaan Kinerja Berbasis Kepakaran; (2) Pemetaan Kinerja Berbasis Program Studi; (3) Pendataan dan Pemetaan Karya Seni; (4) Sistem Informasi Eksekutif untuk Penentu Kebijakan (Dashboard).

Kondisi UPN saat ini dihubungkan dengan SINTA

Seiring dengan tuntutan Kemenristek Dikti yang mensinergikan SINTA dalam aktivitas penelitian dan menjadikannya sebagai pusat indeks sitasi dan kepakaran Indonesia, maka UPN “Veteran” Yogyakarta juga telah mengambil langkah strategis untuk mengakomodasinya. Sebagaimana tujuan pembuatan laman SINTA agar bisa menyediakan benchmark dan analisis, identifikasi kekuatan riset tiap institusi, memperlihatkan kolaborasi penelitian, menganalisis trend penelitian dan direktori pakar, UPN “Veteran” Yogyakarta telah meminta Lembaga Penelitian dan Pengabdian bagi Masyarakat (LPPM) untuk mengoptimalkan pemanfaatan SINTA bagi kepentingan pengembangan penelitian dan identifikasi karya ilmiah dosen. UPN “Veteran” Yogyakarta menyadari bahwa sebagai sebuah perguruan tinggi, maka kinerja penelitian menjadi salah satu tolak ukur utama keberhasilan perguruan tinggi.

Langkah awal yang dilakukan oleh LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta adalah menyediakan satu verifikator, sesuai dengan ketentuan Kemenristek Dikti. Verifikator tersebut diserahkan kepada Kepala pusat perencanaan, pengembangan, dan kerjasama yang bertanggung jawab untuk mengurus SINTA. Salah satu hal utama yang dilakukan adalah verifikasi data dosen dan pemantauan karya ilmiah dosen dalam rangka mendongkrak nilai SINTA yang akan berdampak pada kinerja lembaga UPN “Veteran” Yogyakarta. Untuk memaksimalkan tugas verifikator, kapus perencanaan dan pengembangan kerjasama telah mengikuti pelatihan khusus SINTA yang diadakan oleh Kemenristek Dikti.

Seiring dengan itu, Rektor juga telah mengeluarkan surat edaran yang intinya

²⁶Ibid, hal.6

²⁷Dalam “Bahan sosialisasi kebijakan Pendataan, Pengukuran dan Dampak Riset di Indonesia”. 2019. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, hal.11-13.

mewajibkan semua dosen untuk mendaftarkan dirinya ke dalam system SINTA. Hingga saat ini tercatat sebanyak 367 dosen UPN “Veteran” Yogyakarta yang telah terdaftar dalam system SINTA. Namun masih ada sekitar 107 dosen yang belum mendaftarkan dirinya. Hal ini sebenarnya merupakan kerugian bagi UPN “Veteran” Yogyakarta dikarenakan bisa berdampak pada nilai SINTA UPN “Veteran” Yogyakarta yang tidak tinggi. Sementara saat bersamaan nilai tersebut dibagi dengan jumlah dosen UPN “Veteran” Yogyakarta secara keseluruhan. Konsekuensinya, ranking SINTA UPN “Veteran” Yogyakarta susah untuk tembus ke peringkat yang lebih atas. Saat ini ranking SINTA UPN “Veteran” Yogyakarta berada di kisaran posisi 100 hingga 110. Sebagai sebuah perguruan tinggi negeri baru, posisi ini tentu kurang menguntungkan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah strategi bagaimana mensinergikan SINTA sebagai upaya LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta meningkatkan kinerja penelitian dosen.

Kondisi yang diharapkan, seiring dengan diterapkannya Model Sinergitas SINTA dalam pengembangan penelitian UPN

Dalam upaya meningkatkan kinerja penelitian dosen-dosen UPN “Veteran” Yogyakarta, LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta telah melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Untuk mendorong dosen melakukan penelitian, LPPM melakukan roadshow ke fakultas-fakultas untuk mensosialisasikan agenda penelitian dan pengabdian di kalangan dosen. Saat bersamaan panduan penelitian terbaru juga disiapkan yang mendeskripsikan jenis penelitian dan pengabdian yang bisa dilakukan disesuaikan dengan kepangkatan dosen yang bersangkutan. Salah satu syarat yang ditekankan adalah dosen bisa mengajukan penelitian jika sudah mendaftarkan dirinya di SINTA. Persyaratan ini akan mendorong dosen untuk mendaftarkan dirinya di SINTA. Untuk mengantisipasi jika ada dosen yang bingung dalam mendapatkan akun SINTA, Kepala Pusat Perencanaan, Pengembangan, dan Kerjasama ditugaskan untuk membantu proses pendaftaran tersebut dengan cara menyediakan waktu tertentu bagi dosen untuk berkonsultasi.

Meningkatkan dana penelitian internal. Hal ini akan mendorong lebih banyak dosen yang melakukan penelitian dimana output penelitian diwajibkan berupa artikel jurnal yang diterbitkan di jurnal nasional terindeks terakreditasi dan terindeks SINTA. LPPM juga mendorong para peneliti untuk menerbitkan artikel hasil penelitian di jurnal internasional terindeks bereputasi. LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta mendorong universitas untuk mengalokasikan 10% dari biaya operasional untuk penelitian. Hal ini demi mendorong iklim penelitian yang kuat di kalangan dosen. Jika dosen sudah terbiasa meneliti, maka tuntutan luaran sebagaimana yang ditetapkan oleh Kemenristek Dikti dari sebuah penelitian akan menjadi sebuah kebiasaan. Untuk tahun 2019, LPPM mengalokasikan dana penelitian sebesar 9,8 milyar rupiah. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 4 jenis skema penelitian, yakni penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian kelembagaan, dan penelitian kluster.

Dalam hal ini, yang menjadi target dari LPPM tidak hanya berupa artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional, jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi, tapi juga Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta, Hak Paten, dan Hak Merek. Dimana ini semua wajib dimasukkan ke dalam SINTA dosen yang bersangkutan karena memiliki nilai tersendiri.

LPPM akan mengembangkan sistem informasi berbasis jaringan internet (online) dengan bekerja sama dengan bagian telematika UPN “Veteran” Yogyakarta untuk menghubungkan laman SINTA dengan laman LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta agar terintegrasi. Hal ini dilakukan dengan harapan memudahkan dosen untuk mengakses SINTA. Saat bersamaan, Nilai SINTA UPN juga bisa dilihat oleh semua dosen di laman universitas. Hal ini akan mendorong segenap civitas akademika untuk bersama-sama meningkatkan nilai SINTA lembaga.

KESIMPULAN

Pada prinsipnya UPN “Veteran” Yogyakarta, melalui LPPM, telah mengambil langkah serius untuk meningkatkan kinerja penelitian dosen dengan mensinergikan SINTA. Beberapa upaya telah dilakukan, meski hal ini dirasa belum maksimal. Oleh karena itu, diharapkan seiring dengan disinergikannya SINTA dengan SIMLITABMAS Ristekdikti, LPPM juga mengambil langkah untuk lebih mengoptimalkan SINTA dalam rangka meningkatkan kinerja penelitian Dosen UPN “Veteran” Yogyakarta.

INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP DI PERGURUAN TINGGI

Sadeli, Hastho Joko Nur Utomo, Muhammad Fathi Rauf
Universitas Prmbangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

ABSTRAK

Many new entrepreneurs have a crisis in managing their business, especially in the technology sector. More than 90% of startups are failing. More entrepreneurs are owned by a country will improve the economy and welfare. Higher education as a research institute can commercialize the results of research and help new technology entrepreneurs grow their business through university business incubator. University business incubator can help them through several services, such as skill development service, seed capital, co-working space and network. University business incubator is expected to find and nurture new technology entrepreneurs within the university.

Key Words : University Business Incubator, Technology Entrepreneurship, Start Up

PENDAHULUAN

Revolusi industri 4.0 menuntut adanya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang penciptaan inovasi. Negara-negara maju yang kurang memiliki sumberdaya alam di sisi yang lain mampu mengoptimalkan sumberdaya manusianya secara efektif dan efisien untuk melakukan inovasi teknologi. Inovasi teknologi ini secara makro akan membawa dampak positif yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara banyak ditopang oleh peran wirausaha, terutama di era digital dewasa ini. Oleh karena itu upaya untuk mencetak wirausaha di bidang teknologi memerlukan perhatian khusus. Pemerintah Indonesia mendukung penuh upaya ini dengan menyusun konsep Making Indonesia for 4.0. Upaya merintis bisnis (start up) membutuhkan kerja keras berbagai pihak dan dengan pendekatan yang terintegrasi. Harapan yang dituju ternyata tidak mudah untuk diwujudkan. Hubeis dalam Lupiyoadi (2004) menjelaskan bahwa 80% startup di Indonesia gagal pada tahun pertama. Tingginya angka kegagalan menunjukkan perlu adanya solusi terhadap permasalahan tersebut.

Pemerintah banyak berharap agar dunia pendidikan bisa mengatasi hal ini. Perguruan tinggi dapat diandalkan sebagai human capital yang siap memberikan solusi. Langkah strategi untuk menciptakan wirausahawan teknologi baru di lingkungan universitas adalah melalui pengembangan inkubator bisnis teknologi. Universitas sebagai institusi riset, memiliki hasil riset teknologi yang dapat dikomersilkan dan akan menghasilkan wirausahawan teknologi baru dari lingkungan universitas.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Inkubator Bisnis

Inkubator bisnis pada dasarnya adalah suatu organisasi yang menyediakan infrastruktur serta pelayanan untuk meningkatkan nilai suatu usaha. (Bank Indonesia, 2006)

Menurut Franz Dietrich (2010) Inkubator bisnis adalah suatu organisasi yang mensistematisasi suatu proses untuk membantu pertumbuhan dan suksesnya wirausahawan

baru dengan memberikan pelayanan yang komprehensif dan terintegrasi, yaitu:

- Ruang inkubasi, fasilitas berupa kantor, manufaktur, dan laboratorium yang tersedia secara fleksibel, mudah, fleksibel, dan sementara.
- Common Space, fasilitas ruang umum kepada tenant seperti kantin, lobi, dan ruang pertemuan
- Common services, fasilitas berupa dukungan pelayanan umum seperti peralatan kantor.
- Hands-on Counseling, bantuan konseling secara intens dan khusus.
- Bantuan dalam mencari pembiayaan untuk tenant.

Pola penciptaan wirausahawan baru serta pembinaan wirausahawan melalui inkubasi bisnis dilakukan dengan cara pembinaan di bawah satu atap (in-wall) dan secara pembinaan di luar atap (out-wall). Selanjutnya, kedua pola tersebut disebut sebagai model penciptaan dan pembinaan inkubasi bisnis. Model yang pertama bersifat klasikal, yaitu kegiatan pelatihan, pembuatan produk, maupun kolaborasi antar tenant dilakukan di dalam satu unit gedung.

Sementara, pada model inkubasi yang kedua, kegiatan tidak dilakukan dalam satu atap, melainkan di luar pusat manajemen inkubator. Model ini diimplementasikan kepada bisnis yang sudah berjalan. Hal ini dapat dilakukan karena inkubator bisnis berjalan sebagai konsultan dan pendamping tenant. Kegiatan yang dilakukan berupa memberikan akses mentor dari pihak luar maupun pendanaan kepada tenant.

Jenis inkubator dapat ditemui dengan beragam nama, seperti: Inkubator bisnis, business park, business hub, technology centre dsb. Namun, pada prinsipnya aktivitas yang dilakukan sama. Yaitu proses inkubasi bisnis. Menurut inkubator bisnis dapat dibagi dalam beberapa jenis:

- Public sponsored: merupakan inkubator yang didukung oleh pemerintah untuk meningkatkan lapangan pekerjaan.
- University-related: merupakan inkubator yang mengkomersilkan hasil riset yang layak serta meningkatkan wirausahawan baru dari lingkungan universitas.
- Non-profit sponsored: merupakan inkubator yang didukung dari satu ataupun beberapa komunitas non-profit dengan tujuan non-profit.
- Privately sponsored: merupakan inkubator yang didukung oleh perusahaan swasta dengan tujuan profit. Inkubator ini dinilai yang paling sukses diantara jenis lainnya.

Technology Entrepreneurship

Technology entrepreneurship jika diartikan dalam Bahasa Indonesia menjadi kewirausahaan teknologi yang dapat disimpulkan menjadi pembentukan suatu usaha dengan penerapan teknologi sebagai instrumen dasar maupun pendukung usaha itu sendiri.

Technology entrepreneurship adalah sebuah investasi dalam sebuah proyek yang mengkaitkan dan melibatkan individual dan aset heterogen yang terakait erat dengan pengembangan sains dan teknologi bertujuan untuk membuat dan mendapatkan nilai kepada suatu organisasi (Franz Dietrich, 2010).

Startup

Startup merupakan organisasi yang berdedikasi untuk membuat sesuatu yang baru dibawah kondisi ketidakpastian (Ries, 2011). Startup merupakan organisasi sementara yang dibentuk untuk mencari bisnis model berulang-ulang dan dapat diperbesar. (Steve Blank, 2014).

Terdapat 3 tahap pada startup: 1) problem-solution fit, 2) product-market fit, dan 3) scale (Maurya, 2012). Tahap pertama adalah menentukan masalah yang layak untuk

diselesaikan sebelum menginvestasikan lebih banyak waktu untuk membangun solusi dari masalah tersebut. Selanjutnya adalah mencapai product-market fit, pada fase ini startup perlu memastikan produknya lebih diterima oleh pasar yang lebih luas. Pada tahap scale, startup akan lebih fokus memastikan model bisnis tepat dengan pasar internasional.

Pemikiran lainnya tentang tahap startup adalah berorientasi pertumbuhan yang menekankan tahap awal, tahap pertumbuhan, dan tahap lanjutan. Untuk memahaminya lebih baik berkaitan proses setiap tahap pertumbuhan, terdapat beberapa dimensi: dimensi organisasi, produk, pasar, serta pendanaan. (Tech, 2014)

Dimensi organisasi. Eksistensi, bertahan hidup, sukses, model bisnis berbeda pada tahap awal organisasi. Diikuti dengan perencanaan strategis dan proses pembentukan perusahaan pada tahap pertumbuhan organisasi. Merger, akuisisi, dan initial public offering pada tahap lanjut.

Dimensi produk. Pada tahap awal, konsep dari produk sedang dibuat, prototyping, pivot, percobaan fitur utama serta mencapai minimum viable product. Pada tahap pertumbuhan, pengembangan kapabilitas produksi dan perbaikan. Pada tahap lanjut terjadi diversifikasi produk.

Dimensi pasar. Pada tahap awal terjadi pencarian pasar, kalibrasi pasar, berkembangnya pasar pengguna awal, dan pembentukan kebutuhan. Pada tahap pertumbuhan terjadi penetrasi pasar dan pemasaran masal. Tahap lanjut ditandai diversifikasi dan internasionalisasi pasar.

Dimensi pendanaan. Pada tahap awal, dikenal sebagai tahap semai (seed). Pada tahap pertumbuhan dikenal sebagai series dan pada tahap lanjut dikenal sebagai initial public offering dan exit (bisa berupa akuisisi)

Tabel 1. Tahap Pengembangan Start up Bisnis

	Tahap Awal			Tahap Pertumbuhan	Tahap Lanjut
Organisasi	Eksistensi	Bertahan hidup	Model Bisnis Sukses	Perencanaan strategi, Proses pem	Merger, Akuisisi, IPO
Produk	Konsep	Prototyping, pivoting, test fitur utama	Minimum Viable Product	Pengembangan kapabilitas produksi dan perbaikan.	Diversifikasi
Pasar	Pencarian	Kalibrasi pasar	Konumen awal, pembentukan kebutuhan	Penetrasi, pemasaran masal	Diversifikasi, Internasionalisasi
Pendanaan	Seed			Series	IPO, exit

Inkubator Bisnis Teknologi Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Technopreneurship (Ciputra, 2008) menyebutkan bahwa kampus menjadi bagian penting dalam pembentukan wirausahawan baru dengan alasan berikut:

Kampus adalah terminal utama generasi muda terdidik untuk masuk menjadi tenaga kerja terdidik. Kampus menjadi gerbang sebelum masuk menjadi tenaga kerja. Perguruan Tinggi menjadi tempat terakhir penggemblengan entrepreneur, untuk memastikan lulusannya

menjadi warga negara yang siap dan mampu mengembangkan diri secara mandiri dan akhirnya sejahtera secara ekonomi.

Kampus adalah tempat terbaik untuk melaksanakan pembangunan sumber daya manusia. Setiap orang yang datang ke kampus dan menjadi warga kampus telah memiliki mindset untuk belajar dan mengonsentrasikan sebagian waktu hidupnya untuk belajar dan meningkatkan kualitas dirinya.

Kampus memiliki kelompok sumber daya manusia pendidik, ahli peneliti, yang memiliki keahlian dan komitmen mengembangkan potensi generasi muda. Sebagai seorang peneliti berarti seorang mahasiswa dapat sekaligus melakukan tugasnya sebagaimana tertuang dalam tri dharma perguruan tinggi.

METODE PENELITIAN

Proses penelitian dalam penulisan ini berkaitan dengan pengembangan model pembelajaran dengan inkubator bisnis berbasis IT, oleh karena itu untuk mendapatkan jawaban mendalam mengenai permasalahan yang ada maka desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Pendirian Inkubator Bisnis

Beberapa pertimbangan pendirian Inkubator bisnis terkait dengan hal-hal berikut:

Tujuan dari pembentukan Inkubator Bisnis harus dirumuskan dengan jelas. Tujuan dapat dirumuskan berdasarkan kebutuhan dan hasil yang ingin dicapai agar inkubator dapat menyusun rencana kerja serta target yang ingin dicapai.

Adanya dukungan dana operasional untuk menjalankan aktivitas inkubasi yang memadai. Dana operasional didapatkan sesuai dengan tipe inkubator. Untuk inkubator berorientasi profit, dana operasional didapatkan dari laba inkubator. Sedangkan inkubator berorientasi non-profit mendapatkan sumber dana operasional melalui lembaga induknya.

Sumber daya manusia pengelola yang dimiliki harus sesuai dengan kompetensi dan keahlian. Pengembangan inkubator bisnis teknologi tidak hanya memiliki pemahaman aspek manajemen secara luas serta aspek pendukung seperti perpajakan, akuntansi keuangan, sumber daya manusia, perundang-undangan. Namun penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi. Sumber daya manusia pengelola tidak hanya baik secara teoritis namun harus secara praktik.

Mempunyai kemampuan membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak yang dapat mendukung jasa layanan sebagai sebuah inkubator bisnis. Terutama menyangkut dengan: mentor bisnis, mentor teknologi, permodalan, pemasaran produk, jasa konsultasi hukum, jasa konsultasi keuangan dan lain-lain;

Sumber-sumber inovasi produk, dalam hal ini inkubator bisnis teknologi di perguruan tinggi harus memiliki kedekatan dengan sumber-sumber inovasi. Perguruan tinggi sebagai lembaga riset memiliki banyak hasil riset yang dapat dikomersilkan.

Adanya kebutuhan dari calon wirausahawan teknologi serta wirausahawan teknologi untuk bergabung dalam inkubator bisnis teknologi.

Tahap Pembentukan Inkubator Bisnis

Dalam mempersiapkan pembentukan inkubator bisnis dapat diuraikan melalui beberapa tahapan seperti berikut:

Membentuk tim kerja pendirian inkubator bisnis

Tim dibentuk sebagai penanggung jawab yang dibutuhkan dalam pendirian inkubator bisnis

Penetapan tujuan Inkubator Bisnis

Menetapkan tujuan inkubator bisnis untuk menentukan arah yang jelas. Inkubator bisnis dapat berorientasi profit atau non-profit. Jika berorientasi profit, inkubator bisnis bertujuan dalam peningkatan keuntungan lembaga induknya.

Penetapan sumber-sumber pendanaan

Sumber pendanaan inkubator bisnis akan mengikuti dari tipe inkubator tersebut. Sumber pendanaan dari inkubator bisnis berorientasi profit berasal dari lembaga induknya sedangkan inkubator bisnis berorientasi non-profit berasal dari lembaga/komunitas non-profit. Diluar dari sumbernya, penyandang dana harus memiliki tujuan yang sama dengan pendirian inkubator bisnis.

Penetapan jasa layanan yang dapat diberikan

Dalam menentukan jasa layanan yang dapat diberikan kepada tenant. Inkubator bisnis harus memiliki kurikulum yang komprehensif. Bentuk-bentuk layanan inkubator bisnis ditetapkan berdasarkan kebutuhan yang diperlukan, seperti: perencanaan pengembangan bisnis, perencanaan keuangan, perpajakan dan lain-lain. Jasa layanan tersebut harus diperkenalkan kepada para tenant inkubator agar dapat pahami terutama bagi tenant-tenant baru;

Penetapan kriteria waktu kerjasama inkubasi bisnis

Periode waktu inkubasi tergantung dengan kurikulum yang sudah disusun atau periode pendanaan. Waktu kerjasama dapat beragam. Dari pengalaman penulis waktu kerjasama adalah 6 bulan – 1 tahun.

Pembentukan manajemen Inkubator Bisnis

Manajemen inkubator harus memiliki kemampuan untuk mengevaluasi kelayakan dan mengembangkan suatu usaha menjadi lebih efektif dan efisien dilihat dari teknologi, manajemen pengelolaan maupun pemasaran.

Publikasi Inkubator

Publikasi dilakukan untuk meningkatkan kerjasama antara lembaga terkait.

Seleksi Tenant

Seleksi tenant dapat melalui beberapa cara seperti: seleksi pra-inkubasi, seleksi perencanaan bisnis (business plan), seleksi pitching contest, dsb. Seleksi harus dilakukan secara ketat agar mendapatkan tenant yang prospektif.

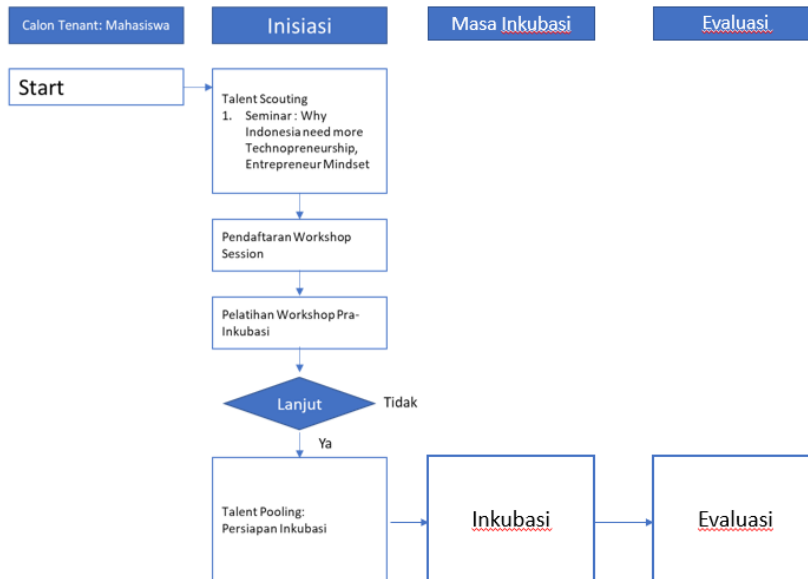
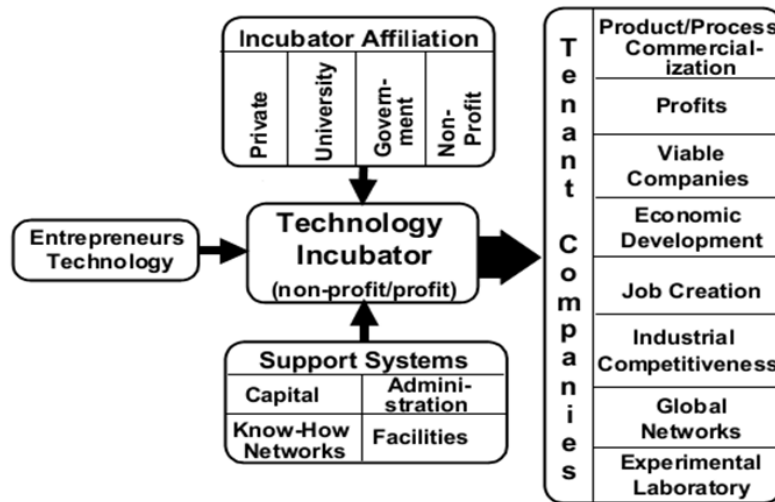
Jejaring kerjasama

Inkubator harus memiliki jejaring kerjasama yang luas untuk mendukung pertumbuhan tenant-nya. Jejaring kerjasa mencakup berbagai lembaga seperti; praktisi, investor, perguruan tinggi, pemerintah, dan lain-lain.

Evaluasi dan melakukan pendefinisian ulang inkubator bisnis

Perlu adanya evaluasi untuk mengkaji kinerja dari inkubator bisnis telah sesuai dengan tujuan yang dibuat.

Model Inkubator dan Kurikulum Inkubator Bisnis Teknologi Perguruan Tinggi
 Model Inkubator yang digunakan merupakan model (Joel Wiggins, 2003)
Gibson & Wiggins Technology Business Incubator Model (2003)



Gambar 1. Proses Start Up Bisnis

Kurikulum Pra-Inkubasi

- Kenapa Indonesia butuh lebih banyak Technopreneur
 Merupakan event berbentuk seminar dalam program pra-inkubasi. Event ini bertujuan mengenalkan ekosistem startup kepada mahasiswa, meningkatkan wawasan serta antusiasme mahasiswa.

- Entrepreneur Mindset
Mahasiswa dibekali mindset entrepreneur dari praktisi bisnis. Event ini berformat seminar.
How to find a good founder
- Workshop Session
Mahasiswa dibekali kemampuan menemukan ide, bisnis model, pasar serta dapat membangun produk serta pitching di depan investor
 - Ideas Exploration
Mahasiswa ditekankan untuk menemukan ide dengan menyelesaikan masalah yang nyata di masyarakat
Design Thinking
Design Thinking merupakan proses menyelesaikan masalah dengan mengutamakan manusia.
 - Understanding Business Model
Mahasiswa ditekankan untuk memahami model bisnis dari ide yang diangkat memiliki business viability
Business Model Canvas
Business Model Canvas merupakan kerangka kerja yang bertujuan mempermudah mempresentasikan business model.
Lean Canvas
Lean Canvas merupakan modifikasi dari business model canvas yang lebih fokus kepada early stage startup.
 - Market Validation
Mahasiswa ditekankan untuk dapat mengukur besar pasar untuk memastikan bahwa ide yang diangkat memiliki market desirability
Mengukur Market (TAM, SAM, SOM)
Validate Market
 - Building a Good Product
Mahasiswa ditekankan untuk dapat membuat minimum viable product dalam waktu singkat menggunakan
 - Product Sprint (Design Sprint)
Design Sprint merupakan metode untuk membuat minimum viable product selama 5 hari.
 - Pitching
Mahasiswa ditekankan untuk dapat pitching didepan investor
How to deliver a good pitch

Kurikulum Inkubasi

- Strategic Growth Planning.
Tenant diberikan pelatihan dalam membuat perencanaan pertumbuhan strategis agar dapat menentukan arah yang jelas bisnisnya.
- Operasi Bisnis
Tenant diberikan pelatihan akuntansi keuangan serta merekrut karyawan.
- Business Development & Marketing Strategy
Tenant diberikan ilmu pengetahuan serta praktik dalam strategi pemasaran serta business development.
- Finansial
Tenant diberikan ilmu pengetahuan tentang perencanaan finansial perusahaan.

- Legal

Tenant diberikan ilmu pengetahuan seputar legal dan diberikan akses untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual serta pengajuan legalitas perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Inkubator bisnis merupakan salah satu alternative strategis dalam mencetak wirausahawan baru di lingkungan universitas.
2. Calon wirausahawan memerlukan penyadaran akan pentingnya berwirausaha
3. Wirausahawan teknologi baru secara umum menemui masalah pada minimnya pengalaman bisnis, belum dapat mengakses teknologi, pasar serta minim permodalan
4. Inkubator bisnis teknologi perguruan tinggi berpotensi besar dalam menghasilkan produk hasil penelitian yang dapat dikomersialisasikan serta mencetak wirausahawan teknologi (technopreneurship) baru dari kalangan mahasiswa.
5. Inkubator bisnis teknologi perguruan tinggi harus memiliki komitmen dari setiap stakeholder. Adanya tenant yang siap diinkubasi, manajemen inkubator yang profesional, tersedianya akses permodalan, kesanggupan inkubator bisnis dalam memberikan fasilitas yang layak serta administrasi yang jelas.

Saran

1. Perlu adanya koordinasi yang komprehensif antar stakeholder. Hal ini agar program yang direncanakan inkubator bisnis dapat berjalan dengan baik.
2. Adanya payung hukum yang jelas dari inkubator bisnis, profesionalisme manajemen inkubator bisnis, serta fasilitas yang memadai agar layanan inkubator dapat tersampaikan dengan baik.
3. Sosialisasi program inkubator bisnis kepada semua pihak di perguruan tinggi agar technology entrepreneurship dapat berkembang di lingkungan kampus.

DAFTAR PUSTAKA

- Bailetti, T. (2012). Technology Entrepreneurship: Overview, Definition, and Distinctive Aspects. *Technology Innovation Management Review*.
- Bank Indonesia. (2006). Kajian Inkubator Bisnis dalam rangka Pengembangan UMKM.
- Ciputra. (2008). *Ciputra Quantum Leap: Entrepreneurship Mengubah Masa Depan Bangsa dan masa Depan Anda*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Franz Dietrich, B. H. (2010). *Development Guidelines for Technology Incubators*. Bonn.
- Joel Wiggins, D. V. (2003). Overview of US incubators and the case of the Austin Technology Incubator. *Int. J. Entrepreneurship and Innovation Management*, 56-66.
- Mahani, S. A. (2015). Tinjauan Model Inkubator Bisnis Rintisan (Bisnis Start Up) di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis: Performa*.
- Maurya, A. (2012). *Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan That Works*. O'Reilly.
- Ries, E. (2011). *The Lean Startup, How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses*. Crown Business.
- Steve Blank, B. D. (2014). *The Startup Owner's Manual: The Step-by-Step Guide for Building a Great Company*. K&S Ranch.
- Tech, R. P. (2014). *Crowdfunding Hardware Startups in Germany*. Retrieved from <https://www.hiig.de/wp-content/uploads/2015/09/0664-file1.pdf>

STUDI PENELUSURAN ALUMNI TEKNIK INDUSTRI UPN “VETERAN” YOGYAKARTA SEBAGAI SARANA INPUT PERBAIKAN BERKELANJUTAN PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

Sadi, Dyah Rachmawati Lucitasari, Muhammad Shodiq Abdul Khannan

Jurusan Teknik Industri FTI Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

E-mail: sadi@upnyk.ac.id, dyah.rachmawati@upnyk.ac.id, shodiq@upnyk.ac.id

Abstract

As a part of educational institution, Industrial Engineering Department of UPN “Veteran” Yogyakarta (UPNVY) should pay more attention to the quality of service to the stakeholder. One of them is the quality of alumni. This research aimed to trace the alumni resulted from the Industrial Engineering Department of UPNVY and conducted by descriptive quantitative method. 87 alumni have been collected through social media, android application and alumni who reported themselves to the Department. Results showed that the alumni have been settled down and work in various sectors. 69% in the manufacturing industries, 7% in mining and gas industries, 5% in telecommunication companies, 6% take their graduate studies, 5% chose to be entrepreneur, 4% automotive, 2% in plantation and the least in banking. The position held by the alumni are officer or staff (59%), head of department (9%), manager (8%), engineer (7%), supervisor (6%), graduate student (6%) and business owners (5%). Business owners or entrepreneur is the smallest part, so it is indicated that the effectiveness of Entrepreneurship subject should be evaluated.

Keywords: industrial engineering, alumni, quality of service, stakeholder

PENDAHULUAN

Latar belakang

Program Studi Teknik Industri Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (UPNVY) sebagai bagian dari institusi pendidikan harus memperhatikan kualitas pelayanan terhadap stakeholder yang dimiliki. Program Studi dinilai mempunyai kualitas yang baik jika input, proses, dan output juga baik. Salah satu poin yang urgen untuk diperhatikan adalah kualitas mutu alumni karena hal ini menjadi ukuran yang bisa dinilai oleh masyarakat luas baik orang tua, calon mahasiswa, dan pengguna alumni. Semakin baik mutu alumni maka kepercayaan masyarakat akan institusi tersebut akan semakin kuat.

Sebuah program studi harus memberikan perhatian pada peran strategis dari para alumni. Alumni menjadi salah satu unsur yang bisa berperan dalam membantu kemajuan program studi. Dalam berbagai kesempatan, peranan alumni dalam memajukan kualitas suatu program studi sering terlupakan. Padahal, alumni merupakan aset penting yang harus dirangkul, dikembangkan dan dikelola dengan baik. Belum semua Perguruan Tinggi menyadari peran strategis alumni ini dan belum secara optimal mengelola data yang terkait untuk kemajuan program studi di Perguruan Tinggi tersebut. Poin yang dinilai pada saat akreditasi salah satunya tentang peran alumni dan data tentang alumni terkait lama waktu mendapatkan pekerjaan, gaji pertama yang diperoleh, dan kepuasan pengguna alumni.

Hasil akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional akan memberikan

gambaran kualitas program studi yang nantinya bisa membantu meningkatkan animo calon mahasiswa untuk mendaftar, kepercayaan orang tua untuk mendaftarkan anaknya kuliah di suatu program studi, pemberian bantuan dana dari eksternal dan kepercayaan dari pengguna alumni untuk merekrut lulusan dari program studi tersebut.

Perumusan Masalah

Bagaimana profil alumni program studi teknik industri saat ini dan perbaikan apa yang harus dilakukan program studi berdasarkan penelusuran alumni yang dilakukan?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah melakukan penelusuran alumni program studi Teknik Industri UPNVY untuk input perbaikan berkelanjutan bagi program studi Teknik Industri.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Program Studi Teknik Industri UPNVY bisa mendapatkan data alumni dengan jumlah yang signifikan sesuai dengan jumlah alumni yang telah dihasilkan.
- Bisa dimanfaatkan oleh program studi yang lain di UPNVY untuk referensi dalam melakukan penelusuran data alumninya di UPN.
- Mahasiswa bisa mengakses data alumni program studi Teknik Industri UPNVY dan menjalin networking dengan alumni yang sudah bekerja.

LANDASAN TEORI

Pengertian Penelusuran alumni

Schomburg (2003) mendefinisikan penelusuran alumni merupakan pendekatan yang memungkinkan institusi pendidikan tinggi memperoleh informasi tentang kekurangan yang mungkin terjadi dalam proses pendidikan dan proses pembelajaran dan dapat merupakan dasar untuk perencanaan aktivitas untuk penyempurnaan di masa mendatang. Informasi yang diberikan oleh lulusan yang berhasil di profesinya diperlukan misalnya informasi tentang pengetahuan dan penampilan yang relevan (hubungan antara pengetahuan terhadap keterampilan dan tuntutan pekerjaan, area pekerjaan, posisi profesi). Selain itu, para lulusan dapat juga diminta untuk menilai kondisi studi yang mereka alami selama mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran. Penelusuran alumni dapat juga digunakan sebagai kegiatan mencari informasi tentang kebutuhan stakeholder terhadap alumni.

Tujuan Penelusuran alumni

Tujuan umum penelusuran alumni adalah mengumpulkan informasi dan masukan yang relevan dari lulusan terkait dengan "learning dan working experience" yang dialami oleh lulusan guna pengembangan Perguruan Tinggi. Menurut Schomburg (2003) tujuan utama dari kegiatan Penelusuran alumni adalah untuk mengetahui/mengidentifikasi kualitas lulusan di dunia kerja.

Tujuan khusus Penelusuran alumni adalah:

- Mengidentifikasi profil kompetensi dan keterampilan lulusan.
- Mengetahui relevansi dari pelaksanaan kurikulum yang telah diterapkan di perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan pengembangan profesional di dalam kompetensi jurusan.
- Untuk mengevaluasi hubungan dari kurikulum dan studi di jurusan sebagai pengembangan keilmuan.
- Sebagai kontribusi dalam proses akreditasi jurusan.

Manfaat Penelusuran alumni

Manfaat penelusuran alumni adalah salah satu hal strategis yang harus dilakukan oleh setiap institusi pendidikan. Setidaknya ada tiga manfaat yang bisa diperoleh dari pelaksanaan kegiatan ini, yaitu:

- Mengetahui stakeholder satisfaction, dalam hal ini lulusan, terkait dengan learning experiences yang mereka alami, untuk dijadikan alat evaluator kinerja institusi.
- Mendapatkan masukan yang relevan sebagai dasar pijakan pengembangan institusi, terkait dengan kemampuan bersaing, kualitas, dan working experiences lulusan yang bisa digunakan untuk menangkap kesempatan dan menanggulangi ancaman ke depan.
- Meningkatkan hubungan lulusan dan almamater, karena apabila dilihat dari pengalaman institusi-institusi pendidikan terkenal, ikatan lulusan dan almamater yang kuat akan banyak membawa banyak manfaat kepada almamater seiring dengan diakuinya kiprah lulusan di masyarakat.

Perbaikan berkelanjutan

Definisi kualitas

Beberapa definisi kualitas menurut ahli sebagai berikut (Nasution, 2001), (Montgomery, 2009):

- Menurut Juran, kualitas adalah kecocokan penggunaan produk (fitness for use) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan.
- Menurut Crosby, kualitas adalah compormance of requirement, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau yang distanda
- Menurut Deming, kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar.
- Menurut Feigenbaum, kualitas adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (full customer satisfacti
- Menurut Garvin, kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen

Total Quality Management

Total Quality Management (TQM) adalah paradigma di dalam manajemen yang dapat memperbaiki kinerja dan efisiensi organisasi. Konsep TQM awalnya muncul di bidang manufaktur namun kemudian bisa diterapkan juga ke dalam bidang yang lain seperti di institusi pendidikan. Melalui pendekatan TQM suatu sistem organisasi terus menerus dapat diperbaiki atau melakukan continous improvement (perbaikan berkelanjutan), (Widyastuti dkk., 2009). Komponen utama TQM menurut Tjiptono dkk. (1996) bisa disajikan di Tabel 1.

Tabel 1. Komponen Utama Total Quality Management

Komponen TQM	Deskripsi
Fokus/Kepuasan Pelanggan	Kualitas didefinisikan sebagai kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan/ekspektasi pelanggan internal dan eksternal.
Manajemen Kualitas Proses	Fokus utama adalah pada sistem operasi/produksi dan pelayanan sebagai bidang kunci pencapaian standar kualitas
Perencanaan Strategik	Semua jajaran dan tingkatan organisasi diperlakukan dan dikaitkan sebagai unit interdependen dalam eksekusi strategi

	perbaikan berkesinambungan secara terpadu untuk mencapai tujuan
Kepemimpinan	Pemimpin bertanggungjawab atas pemberian visi yang mencakup berbagai nilai, tujuan, komitmen jangka panjang dan sistem kualitas organisasi.
Manajemen Sumber Daya Manusia	Organisasi harus mengembangkan partisipasi penuh, keterlibatan, kerja sama tim dan pemberdayaan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kualitas.
Peran Manajer	Peran manajer diarahkan untuk menjalankan sistem dan membantu karyawan agar dapat bekerja lebih baik melalui gaya manajemen baru (coaching) dan pelatihan on the job training.
Informasi dan Analisis	Pengambilan keputusan didasarkan pada fakta nyata tentang kualitas yang diperoleh dari beragam sumber di seluruh jajaran organisasi, dengan menerapkan pendekatan ilmiah.

Penelitian-penelitian terkait

Penelitian terkait dengan penelusuran alumni dan pengembangan sistem informasi sudah banyak dilakukan oleh para peneliti. Puryani dan Nursubiyantoro (2016) mengembangkan sistem penelusuran alumni berbasis web. Fajaryati, dkk. (2018) melakukan penelusuran alumni teknik elektronika D3 Universitas Negeri Yogyakarta sebagai upaya peningkatan mutu penyelenggaraan program studi. Penelitian tersebut menggunakan tahapan Schomburg dalam melakukan tracer study. Lippeveld, et al. (2000) mengembangkan sistem informasi kesehatan. Syahrul (2013) melakukan penelitian sebagai instrumen perbaikan kualitas kinerja organisasi pendidikan secara berkelanjutan (continuous improvement). Sasmito (2017) merancang Desain Sistem Informasi Geografis Industri Kabupaten Tegal dengan penerapan metode Waterfall. Widyastuti, dkk. (2009) meneliti hubungan antara persepsi pengelola akademik tentang Total Quality Management (TQM) dengan pengintegrasian dalam kurikulum pendidikan tinggi di Universitas Negeri Jakarta. Penelitian-penelitian tersebut menjadi acuan dalam penelitian tentang penelusuran alumni di program studi Teknik Industri UPN VY ini.

METODE PENELITIAN

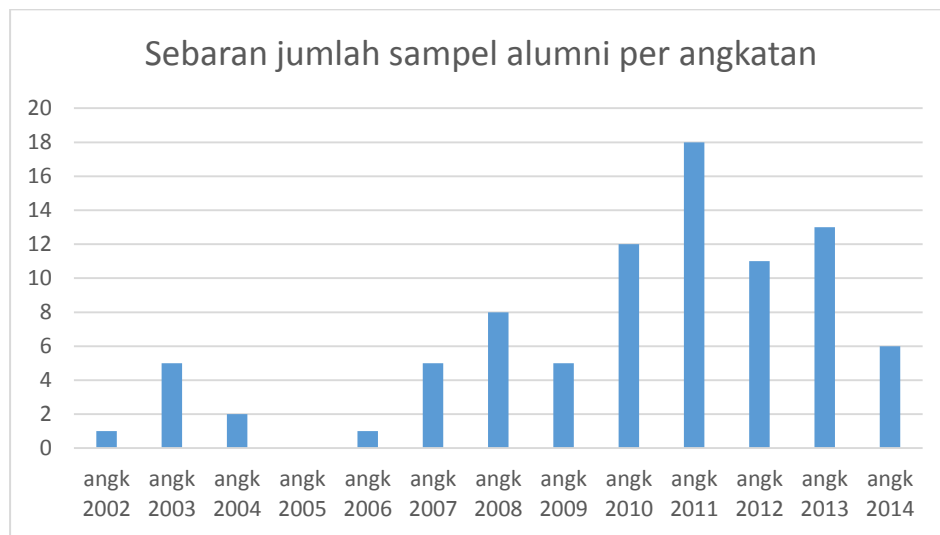
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif. Jumlah alumni yang dikumpulkan adalah sebanyak 87 orang alumni Prodi Teknik Industri UPN VY angkatan 2002 – 2014. Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pencarian data di social media, aplikasi android dan data alumni yang sudah melaporkan diri di program studi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengumpulan data kepada 87 alumni bisa didapatkan informasi sebagai berikut :

Sebaran sampel alumni per angkatan

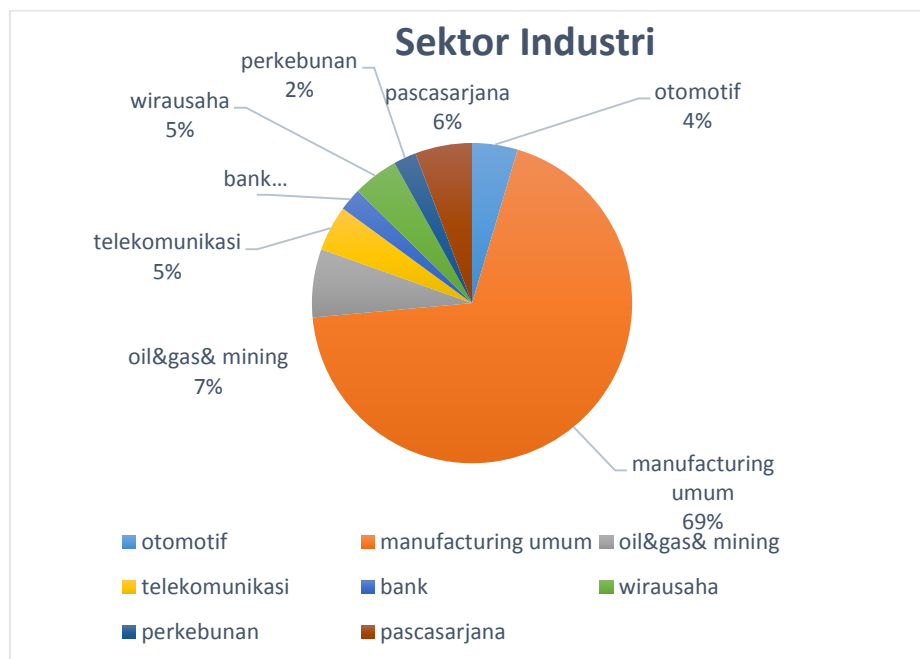
Data alumni yang berhasil dikumpulkan ada sebanyak 87 alumni dengan alumni yang paling banyak adalah alumni dari angkatan 2011 (tahun mulai kuliah di Program Studi Teknik Industri UPN VY adalah tahun 2011) sebanyak 18 lulusan, urutan kedua adalah angkatan 2013 sebanyak 13 lulusan dan angkatan 2010 sebanyak 12 lulusan. Angkatan 2005 dari hasil yang dikumpulkan belum ada data alumni yang masuk.



Gambar 1. Sebaran jumlah sampel alumni per angkatan

Jenis perusahaan tempat bekerja

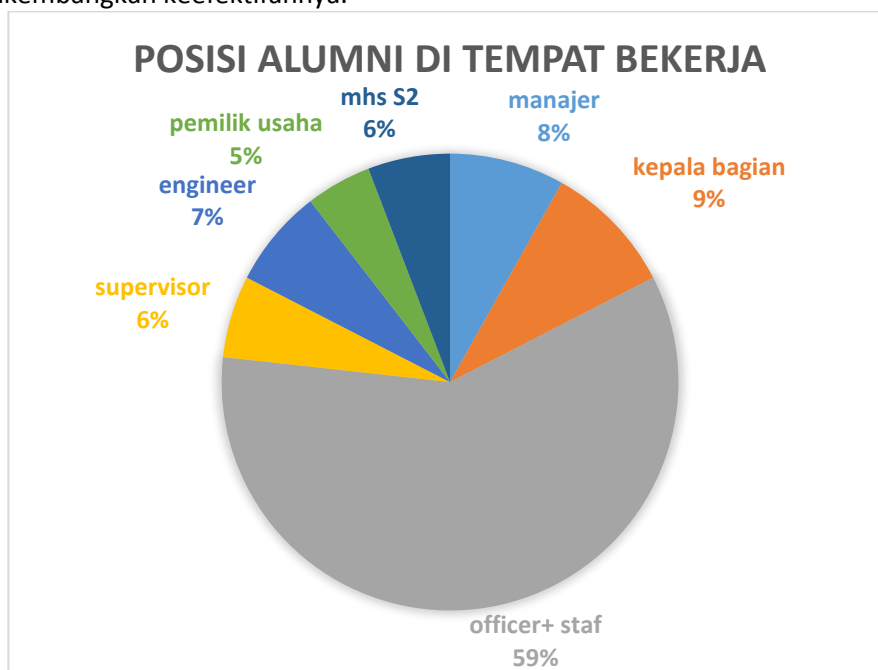
Berdasarkan Gambar 2 bisa dilihat bahwa mayoritas alumni bekerja pada bidang manufaktur sebanyak 69% hal ini menunjukkan bahwa kurikulum di Teknik Industri UPNVY sudah mendukung lulusan untuk bisa diterima di sektor manufaktur. Urutan sektor industri setelah manufaktur umum adalah perusahaan migas dan pertambangan (7%), melanjutkan studi S2 (6%), telekomunikasi (5%), wirausaha (5%), otomotif (4%) perkebunan (2%) dan bank menurut urutan terkecil.



Gambar 2. Sektor tempat alumni bekerja

Posisi pekerjaan

Berdasarkan Gambar 3 bisa dilihat bahwa mayoritas alumni posisi saat di perusahaan adalah bekerja sebagai officer atau staf (59%), diikuti kepala bagian (9%), manajer (8%), engineer (7%), supervisor 6%, mahasiswa S2 (6%), dan pemilik usaha (5%). Pemilik usaha masih menjadi bagian terkecil sehingga hal ini mengindikasikan bahwa mata kuliah kewirausahaan masih perlu dikembangkan keefektifannya.



Gambar 3. Posisi alumni di tempat bekerja

Posisi pekerjaan dan mata kuliah yang terkait yang dimiliki

Posisi pekerjaan alumni dan keterkaitan dengan mata kuliah yang ada di kurikulum Teknik Industri bisa disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Posisi pekerjaan alumni dan kaitan dengan mata kuliah dan sertifikasi

No	Nama Posisi Pekerjaan	Jumlah Alumni	Mata kuliah yang terkait	Sertifikasi terkait
1	Management Trainee	2	semua mata kuliah inti Teknik Industri	-
2	Supply Chain Manager/staff	8	Manajemen Rantai Pasok	Supply Chain Management
3	Planning Scheduling/Dispatching	2	Perencanaan dan Pengendalian Produksi, Penjadwalan Operasi	Master Scheduler
4	Quality Assurance/Quality Control	7	Perencanaan dan Pengendalian Mutu, Audit Mutu	ISO9001:2018, OHSAS, ISO14001
5	Health and Safety	2	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	ahli K3
6	Project Management	1	Manajemen Proyek	Project Management expert
7	Procurement/purchasing	6	(belum ada mata kuliah yang spesifik tentang procurement)	Strategic Procurement

8	Human Resource Manager	8	Manajemen Organisasi Perusahaan	HRM, Public Speaking
9	Sales+Marketing	6	Manajemen Pemasaran (mata kuliah yang dihapus di kurikulum baru)	Sales and Marketing
10	Engineering	6	Perancangan Produk/Menggambar Teknik	Solidworks, Inventor, Solid Edge, Primavera
11	Operation Research	4	Penelitian Operasional	
12	Account Costing, Funding Officer		Analisis Biaya, Ekonomi Teknik, Analisis Kelayakan Industri	
13	Production Planning and Inventory Control (PPIC)	17	Perencanaan dan Pengendalian Produksi	Master Scheduler, SAP, ERP
14	Wirausaha	4	Analisis Kelayakan Industri dan Technopreneurship	

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat disimpulkan bahwa PPIC masih menjadi posisi mayoritas alumni UPNVY di perusahaan (17 lulusan) sehingga mata kuliah ini perlu diperkuat dengan contoh-contoh aplikasi atau hitungan riil yang ada di perusahaan pada saat mahasiswa menempuh mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Produksi, Engineering (Perancangan Produk dan Menggambar Teknik), Perencanaan dan Pengendalian Mutu, Human Resource Management, Supply Chain Management, Engineering (Perancangan Produk dan Menggambar Teknik). Mata kuliah yang perlu dipertimbangkan adalah Manajemen pemasaran, dan materi khusus tentang procurement. Lulusan juga perlu dibekali sertifikasi yang sesuai dengan keahlian yang diperlukan lulusan ketika bekerja di perusahaan.

Sertifikasi yang bisa membantu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan antara lain Supply Chain Management, Master Scheduler, ISO9001:2018, OHSAS, ISO14001, ahli K3, Project Management expert, Strategic Procurement, HRM, Public Speaking, Sales and Marketing, Solidworks, Inventor, Solid Edge, Primavera, Master Scheduler, SAP, ERP. Saat ini Program Studi Teknik Industri baru memiliki satu skema sertifikasi yaitu Perancangan Produk/Menggambar Teknik namun untuk sertifikasi yang lain belum ada. Hal ini bisa menjadi masukan untuk pengambil kebijakan di Jurusan untuk menambahkan sertifikasi tersebut di atas untuk bisa dimiliki oleh lulusan Teknik Industri UPNVY. Selain itu kemampuan public speaking dan negosiasi perlu juga ditambahkan baik melalui tugas-tugas yang dipresentasikan di tiap mata kuliah atau diadakan pelatihan khusus untuk membekali lulusan oleh Job Career Center.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar alumni Teknik Industri UPNVY sudah terserap di bidang industri. Mayoritas alumni bekerja pada bidang manufaktur sebanyak 69% hal ini menunjukkan bahwa kurikulum di Teknik Industri UPNVY sudah mendukung lulusan untuk bisa diterima di sektor manufaktur. Urutan sektor industri setelah manufaktur umum adalah perusahaan migas dan pertambangan (7%), melanjutkan studi S2 (6%), telekomunikasi (5%), wirausaha (5%), otomotif (4%) perkebunan (2%) dan bank menurut urutan terkecil. Mayoritas alumni posisi saat di perusahaan adalah bekerja sebagai officer atau staf (59%), diikuti kepala bagian (9%), manajer (8%), engineer (7%), supervisor 6%, mahasiswa S2 (6%), dan pemilik usaha (5%). Pemilik usaha masih menjadi bagian terkecil sehingga hal ini

mengindikasikan bahwa mata kuliah kewirausahaan masih perlu dikembangkan keefektifannya. Mata kuliah yang perlu diperkuat adalah mata kuliah PPIC, Perencanaan dan Pengendalian Mutu, Human Resource Management, Supply Chain Management, Engineering (Perancangan Produk dan Menggambar Teknik). Mata Kuliah yang perlu dipertimbangkan adalah Manajemen Pemasaran, dan materi khusus tentang procurement. Lulusan juga perlu dibekali sertifikasi yang sesuai dengan keahlian yang diperlukan lulusan ketika bekerja di perusahaan.

Saran

Penelitian ini masih menggunakan sampel yang terbatas dan masih bisa terus dilanjutkan dengan penambahan jumlah alumni yang didata sebagai bagian perbaikan berkelanjutan di program studi Teknik Industri UPN VY.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajaryati, N., Santoso, D., Waluyanti, dan Baiti, A. A., 2018, Studi Penelusuran Alumni Teknik Elektronika D3 Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Program Studi, ELINVO(Electronics, Informatics, and Vocational Education), May,3(1), hal. 25-30.
- Tjiptono, F. dan Diana, A., 1996, Total Quality Management, Andi Offset, Yogyakarta.
- Lippeveld, T., Sauerborn, R. and Bodart, C., 2000, "Design and Implementation Of Health Information Systems", World Health Organization, Geneva
- Montgomery, D.C., 1997, Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley & Sons, Inc., USA
- Nasution, 2001, Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management), Ghalia Indonesia, Jakarta
- Puryani, dan Nursubiyantoro, E., 2016, Perancangan sistem penelusuran alumni (tracer study) Berbasis web, Jurnal OPSI, Vol 9 No 2 Desember hal.85-92
- Syahrul, 2013, Penelitian sebagai instrumen perbaikan kualitas kinerja organisasi pendidikan secara berkelanjutan (continuous improvement), Jurnal Al-Ta'dib, Vol. 6 No. 1 Januari-Juni
- Schomburg, H., 2003, Handbook for Graduate Tracer Study. Moenchebergstrasse Kassel, Germany: Wissenschaftliches Zentrum für Berufs- und Hochschulforschung, Universität Kassel
- Sasmito, G. W., 2017, Penerapan Metode Waterfall Pada Desain Sistem Informasi Geografis Industri Kabupaten Tegal, Jurnal Informatika:Jurnal Pengembangan IT (JPIT) , Vol. 2, No. 1, hal 6 – 12.
- Sofiyanti, 2014, Perancangan Sistem Informasi Manajemen Layanan Jasa Teknologi Dan Kerjasama Di Lembaga DEF, Journal of Information Systems, Vol. 10, Issue 2, hal 97 – 104.
- Widyastuti, U., Sumiati, A., dan Maisaroh, 2009, Hubungan antara persepsi pengelola akademik tentang Total Quality Management (TQM) dengan pengintegrasinya dalam kurikulum pendidikan tinggi di Universitas Negeri Jakarta, Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 6 Nomor 2, November, hal 177-191

PROFIL LULUSAN DAN KORELASI ANTARA TOEFL DAN INDEKS PRESTASI KOMULATIF LULUSAN DENGAN MASA TUNGGU PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

Sri Rahayu Budi Hastuti, I Ketut Nama, UPN Veteran Yogyakarta
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Abstract

This research identifies the profile of graduates of the UPN "Veteran" Yogyakarta Economic Development Study Program. The subjects of this study were all alumni of the Yogyakarta Veterans' UPN Economic Development Study Program who graduated from 2014 to 2019 (at the time of the research) which were scattered in various cities. Data obtained through questionnaires to alumni online and interviews. The profile of graduates in research includes the waiting period for graduates to get a job, graduate profession, graduate income, ways to obtain employment, the relationship between study programs and graduate professions, barriers faced in obtaining employment. While the correlation is being done for the variable waiting period for alumni to get a job with Toefl and Student Achievement Index.

The results showed that most graduates / alumni could get their first job in less than 4 months (51.32%). In terms of types of professions, most of the alumni of the Development Economics study program work as employees of private companies (57.89%). As for the alumni income level, most of the monthly income is IDR 2,000,000-IDR 4,000,000 (51.32%). Most of the alumni are of the opinion that there is a fairly close relationship between the field of study with the alumni profession (44.74%). Furthermore, most of the alumni of the Development Economics Study Program found jobs by internet or online (31.58%). The obstacles faced in obtaining employment were 53.95% due to lack of foreign language skills. The relationship between Toefl and the waiting period of -0,431 and the relationship between the CPI and the waiting period of -0,153. Thus the relationship is less strong.

Keywords: waiting period, profession, income, how to get a job

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu upaya untuk mewujudkan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dan memiliki keterampilan yang diperlukan. Pendidikan tinggi merupakan suatu bentuk penyiapan tenaga kerja dengan membimbing peserta didik dan memberi bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar dapat berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja pada peserta didik. Pendidikan merupakan instrumen utama dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga makin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh oleh seseorang, semakin tinggi juga kualitas yang diharapkan dimiliki oleh seseorang tersebut (Asmuni, 2014).

Setelah menamatkan masa studinya, lulusan membutuhkan waktu untuk dapat mendapatkan pekerjaan atau yang dikenal sebagai pengangguran friksional. Pengangguran

Friksional ini terjadi akibat adanya kesenjangan waktu dan informasi, serta kondisi geografis yang terjadi antara pihak lowongan kerja dan pencari kerja (Dongoran et al, 2016). Fenomena pengangguran friksional ini berlangsung tergantung dari berapa lama seorang lulusan mendapatkan suatu pekerjaan setelah mereka menyelesaikan masa studinya di perguruan tinggi. Fenomena pengangguran friksional ini tidak dapat dihindari sebab setiap tahunnya lulusan perguruan tinggi menghasilkan lulusan-lulusan yang untuk mendapatkan suatu pekerjaan akan membutuhkan waktu tunggu (Asmuni, 2014).

Permasalahan di atas merupakan permasalahan berkaitan dengan demand dan supply tenaga kerja. Tuntutan dunia kerja terhadap lulusan perguruan tinggi semakin berat. Pada masa sebelumnya, tuntutan dunia kerja lebih menitik beratkan pada knowledge skills, tetapi saat ini selain memperhatikan knowledge skills dunia kerja juga mempertimbangkan communication skills, leadership skills, teamwork skills, dan attitude. Alasan utamanya adalah banyak data empirik yang menunjukkan bahwa keberhasilan karyawan tidak hanya ditentukan oleh knowledge skills, melainkan communication skills, leadership skills, teamwork skills, dan attitude-nya (Sudaryanto dan Ayliaawati, 2007).

Sementara itu pada sisi supply, angkatan kerja dan penduduk yang bekerja yang berkualitas masih terbatas. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas melalui pendidikan di perguruan tinggi. Akan tetapi pembelajaran di perguruan tinggi tanpa diikuti dengan penyediaan sarana prasarana yang memadai, hanya akan menghasilkan jumlah lulusan yang terus meningkat tetapi kurang dalam hal kualitas (Handayani, 2015).

Salah satu ukuran tercapai atau tidaknya visi dan misi program studi terlihat dari keberhasilan alumni dalam mengembangkan profesinya di masyarakat. Keberadaan alumni merupakan bagian integral dari institusi pendidikan. Melalui profil alumni (lulusan), masyarakat menilai dan membuktikan kualitas sebuah institusi pendidikan. Melalui kiprah dan

kontribusi alumni pula, citra dan masa depan perguruan tinggi dipertaruhkan. Keberadaan, kontribusi dan peran alumni Program studi sangat penting dilacak dan didata karena beberapa alasan berikut. Pertama, keberhasilan alumni di masyarakat adalah keberhasilan program. Sebaliknya kegagalan mereka juga tidak dapat dilepaskan dari kegagalan program studi. Dengan mengetahui “kisah sukses” dan “kisah gagal” mereka saat berkiprah di masyarakat, maka program studi akan mendapat informasi, masukan dan motivasi untuk lebih dapat meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat mempersiapkan calon lulusan secara lebih profesional dan lebih berbasis kebutuhan atau tuntutan masyarakat. Selanjutnya riset ini akan mengidentifikasi profil lulusan Program Studi Ekonomi Pembangunan UPN “Veteran” Yogyakarta.

KAJIAN LITERATUR

Standar Kompetensi Lulusan

Istilah kompetensi merujuk pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan peserta didik setelah mengalami suatu proses pembelajaran. Standar Kompetensi adalah suatu ukuran kompetensi yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses dalam satuan pendidikan tertentu. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian dan keterampilan untuk hidup mandiri. Selanjutnya standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat

yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan

Manfaat utama SKL ini adalah:

- 1) Sebagai batas kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan;
- 2) Sebagai rujukan untuk penyusunan standar-standar pendidikan lainnya;
- 3) Sebagai arah peningkatan kualitas pendidikan secara mendasar dan holistik pada jenjang pendidikan

Standarisasi Sistem Pendidikan Tinggi

Pendidikan menempati posisi yang sangat penting pada era global ini karena investasi paling strategis adalah investasi sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan. Peran pendidikan pada era ini, antara lain, adalah menyiapkan sumberdaya manusia dalam rangka memenuhi tantangan modernitas dan tuntutan global. Dari sisi inilah pendidikan dinilai sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup manusia, ketika mampu mengadakan suatu perubahan yang berarti bagi kehidupan masyarakat, terutama melalui lulusannya. Dengan demikian, pendidikan harus memiliki visi dan misi yang jauh ke depan dan mempunyai orientasi yang relevan dengan dinamika perkembangan IPTEKS (ilmu pengetahuan, teknologi dan seni) dan tuntutan zaman.

Dalam proses perkembangan sejarah pendidikan, manusia menciptakan bentuk-bentuk peradaban kehidupan yang bersifat dinamis. Oleh karena itu, di satu sisi, antara pendidikan dan masyarakat terjadi proses saling pengaruh mempengaruhi (interaktif), dan di sisi lain, pendidikan sebagai pendobrakterhadap keterbelakangan cita-cita masyarakat. Melalui lulusannya pendidikan memberi kontribusi penting bagi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa.

Lulusan sebuah perguruan tinggi tidak dapat dipisahkan dari standar mutu pendidikan yang telah diundang-undangkan. Mengenai mutu pendidikan ini, pasal 1 ayat 17 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa "Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia". Mengenai kriteria minimal standar nasional pendidikan ini terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana. Untuk mencapai mutu yang standar dari pendidikan itu bukan hanya unsur tenaga kependidikan; yakni dosen tetapi bagaimana pengelolaan perguruan tinggi itu atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan; yang dapat dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.

Badan standarisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan inilah yang harus disiapkan oleh pemerintah; sehingga mutu pendidikan itu memiliki kriteria minimal yang senantiasa harus dipenuhi oleh pengelola pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Strategi itu lazimnya dikaitkan dengan perubahan, sehingga menjadi strategi perubahan. Mengenai strategi mutu pendidikan berarti bagaimana mutu pendidikan itu harus dirubah dengan strategi yang tepat. Mengenai strategi perubahan itu ditujukan agar organisasi menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuannya.

Dalam rangka inilah diperlukan usaha untuk merubah organisasi dengan memperhatikan berbagai faktor yang terkait. Indrawijaya mengemukakan bahwa: "Usaha para manajer untuk memperbaiki atau merubah organisasi pada masa yang lampau lebih banyak dipusatkan pada perubahan : (1) subsistem teknologi; (2) subsistem

manajerial; atau (3) subsistem manusia. Melakukan perubahan itu memang tidak mudah, karena itu perlu disusun perencanaan yang matang, sehingga dihasilkan rencana, program dan kebijakannya secara tepat untuk selanjutnya dilakukan penerapan secara konsisten.

Relevansi Pendidikan Tinggi: Link & Match

Sebagai usaha sistematis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka Kementerian Pendidikan Nasional telah menetapkan empat kebijakan pokok dalam bidang pendidikan, yaitu (1) pemerataan dan kesempatan; (2) relevansi pendidikan dengan pembangunan; (3) kualitas pendidikan; dan (4) efisiensi pendidikan. Khusus untuk perguruan tinggi akan lebih diutamakan membahas mengenai relevansi pendidikan dengan pembangunan yang dalam langkah pelaksanaannya dikenal dengan keterkaitan dan kesepadanan (link and match).

Hanya dengan pengetahuan yang mendalam tentang apa yang dibutuhkan pembangunan tersebut, pendidikan akan dapat lebih mencapai hasil sesuai dengan misi, visi dan fungsinya. Upaya menciptakan keterkaitan dan kesepadanan tersebut mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi kegiatan pendidikan (proses belajar mengajar), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam Dharma Pendidikan, perlu dievaluasi relevansi program dan jurusan yang ada dalam kebutuhan pembangunan, dalam arti apakah sumber daya manusia yang dihasilkan dapat diserap oleh kegiatan perekonomian dan pembangunan.

Sumber daya manusia sebagai salah satu faktor produksi selain sumber daya alam, modal, entrepreneur untuk menghasilkan output. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka semakin meningkat pula efisiensi dan produktivitas suatu negara. Sejarah mencatat bahwa negara yang menerapkan paradigma pembangunan berdimensi manusia telah mampu berkembang meskipun tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Penekanan pada investasi manusia diyakini merupakan basis dalam meningkatkan produktivitas faktor produksi secara total. Tanah, tenaga kerja, modal fisik bisa saja mengalami diminishing return, namun ilmu pengetahuan tidak.

Penyerapan lulusan perguruan tinggi ini sampai sekarang masih menjadi perdebatan, karena adanya perbedaan dalam pendekatan terhadap pemahaman sosok alumni. Sedikitnya ada dua pendekatan mengenai hal tersebut, yaitu: pendekatan dari dunia kerja dan pendekatan kalangan perguruan tinggi. Pendekatan pertama menyatakan bahwa lulusan perguruan tinggi tidak mampu bekerja sebagaimana yang diinginkan dunia kerja, karena keahlian yang dimiliki masih jauh dari harapan. Pendekatan ini menginginkan lulusan perguruan tinggi itu harus memiliki keterampilan kerja (skill) yang memadai dan siap untuk bekerja. Kalangan perguruan tinggi sebenarnya telah tanggap dan merespon akan hal itu, sehingga disiapkan berbagai sarana dan prasarana, seperti komputerisasi; laboratorium, bengkel kerja dan pusat data. Namun pada kenyataannya dalam membentuk keahlian itu tidaklah memadai dan tidak menyebar secara merata di setiap perguruan tinggi. Pendekatan kedua menyatakan bahwa sesuai dengan tujuan pendidikan, perguruan tinggi berupaya mewujudkan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kecakapan dan keterampilan kerja (skill) itu memang tidak identik, keterampilan merupakan bagian dari kecakapan yang bisa dimiliki oleh calon ekonom. Pada pendekatan kedua ini memang, tujuan pendidikan itu tidak disiapkan hanya untuk siap kerja, tetapi jauh lebih luas, yakni menyangkut pembentukan peserta didik menjadi manusia seutuhnya dan keterampilan merupakan hal yang

penting yang dapat dimiliki oleh seseorang. Pendidikan sebagai suatu proses, pertama, mengenal adanya raw-input dan instrumental input. Raw input merupakan peserta didik sedangkan instrumental input terdiri dari: gedung, perpustakaan, pedoman akademik, dosen, kurikulum, metode dan lain-lain. Kedua, raw input dan instrumental input masuk dalam proses, yang ini akan memakan waktu delapan (8) semester. Ketiga, output (hasil didik) yang sesuai dengan kriteria institusi dan siap untuk masuk kedalam persaingan sumber daya manusia. Dalam hal ini, dosen merupakan instrumen yang sangat menentukan keberhasilan proses pendidikan, karena dari dosenlah transfer ilmu dilakukan kepada peserta didik.

METODE PENELITIAN

1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah keseluruhan lulusan/alumni Program Studi Ekonomi Pembangunan UPN "Veteran" Yogyakarta yang lulus pada tahun 2014 sampai dengan 2019 (saat penelitian dilakukan) yang tersebar di berbagai kota. Hal ini berarti subyek penelitian adalah populasi lulusan/alumni Program Studi Ekonomi Pembangunan UPN "Veteran" Yogyakarta yang lulus pada rentang waktu tersebut. Berdasar data base dari fakultas Ekonomi dan Bisnis pada rentang waktu tersebut jumlah yang lulus dari Program studi Ekonomi Pembangunan sebanyak 302 orang. Dikarenakan dari jumlah lulusan/alumni tersebut tidak diketahui berapa yang sudah bekerja, maka jumlah tersebut dianggap sebagai Populasi.

Dengan menggunakan metode Slovin (Algifari, 2013) untuk menentukan besarnya sampel penelitian, maka dengan rumus yang digunakan diperoleh hasil sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{N(E)^2 + 1} = \frac{302}{302(0,1)^2 + 1} = 75,12$$

Dengan N=302 orang, E (taraf signifikansi) = 10%, maka dihasilkan jumlah sampel minimal (n) = 75,12 orang dan dibulatkan menjadi 76 orang. Selanjutnya agar lulusan/alumni bersedia memberikan data dan keterangan yang perlukan, maka kuesioner dikirimkan kepada alumni melalui online dan juga yang melalui wawancara.

2. Variabel Penelitian dan Metode Penelitian

Variable penelitian akan mencakup masa tunggu lulusan/alumni program studi Ekonomi Pembangunan untuk mendapatkan pekerjaan, profesi lulusan, pendapatan lulusan dengan profesi atau pekerjaan yang ditekuninya, cara memperoleh pekerjaan, hubungan antara program studi dengan profesi lulusan dan hambatan yang dihadapi lulusan dalam memperoleh pekerjaan. Masa tunggu lulusan adalah waktu yang diperlukan lulusan Program Studi Ekonomi Pembangunan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama kali. Satuan masa tunggu adalah bulan. Selanjutnya masa tunggu lulusan dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu lulusan dengan masa tunggu kurang dari 4 bulan, dan lulusan dengan masa tunggu 4-8 bulan dan lulusan dengan masa tunggu lebih dari 8 bulan.

Adapun profesi alumni merujuk pada pekerjaan/mata pencaharian pokok yang menjadi sumber pendapatan utama bagi alumni dan keluarganya, dan tidak memasukkan pekerjaan sambilan. Profesi alumni mencakup profesi sebagai PNS/TNI-POLRI, Karyawan BUMN, Karyawan Perusahaan swasta, Wiraswasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan profesi Lainnya. Sementara itu, variabel lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara alumni memperoleh pekerjaan. Cara memperoleh pekerjaan terdiri atas : melalui iklan di koran/majalah/brosur, melamar ke perusahaan tanpa mengetahui lowongan yang ada, pergi ke bursa/pameran kerja, mencari lewat internet/online, menghubungi ke Kemenakertrans/Disnakertrans, memperoleh informasi dari jurusan/fakultas/universitas, memperoleh informasi dari keluarga/saudara/teman, dan lainnya.

Selanjutnya pendapatan alumni merujuk pada pendapatan per bulan yang diterima berkenaan dengan pekerjaan pokok bukan pekerja sambilan. Pendapatan alumni dikelompokkan menjadi pendapatan per bulan kurang dari Rp2.000.000, pendapatan per bulan sebesar Rp2.000.000-Rp4.000.000, pendapatan per bulan Rp4.000.001-Rp6.000.000, dan pendapatan per bulan lebih dari Rp6.000.000. Adapun variabel hubungan antara bidang studi dan profesi merujuk pada kesesuaian antara bidang studi dengan profesi pokok yang ditekuni alumni bukan profesi sambilan. Hubungan antara bidang studi dan profesi dikelompokkan menjadi hubungan yang sangat erat, erat, cukup erat, kurang erat, dan tidak ada hubungan sama sekali. Hambatan yang dihadapi lulusan merupakan kendala yang harus dihadapi ketika mencari pekerjaan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Dari sisi deskriptif, penelitian ini akan memuat gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tentang profil lulusan. Melalui penelitian deskriptif ini diperoleh gambaran proporsi/persentase kondisi alumni dari sisi masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan, profesi lulusan, pendapatan lulusan, cara memperoleh pekerjaan, hubungan antara program studi dengan profesi lulusan Program Studi Ekonomi Pembangunan, dan hambatan yang harus dihadapi ketika mencari pekerjaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Profil lulusan program studi Ekonomi Pembangunan

a) Masa Tunggu lulusan Untuk Memperoleh Pekerjaan Pertama

Dari tabel 1, sebagian besar lulusan/alumni Program Studi Ekonomi Pembangunan bisa memperoleh pekerjaan pertama dalam waktu kurang dari 4 bulan. Secara rata-rata lulusan Program Studi Ekonomi Pembangunan memiliki masa tunggu selama 4,4 bulan. Secara keseluruhan sejumlah 39 orang (51,32%) lulusan bisa memperoleh pekerjaan pertama kurang dari 4 bulan. Sementara itu sejumlah 28 orang (36,84%) lulusan bisa memperoleh pekerjaan pertama dalam rentang waktu 4-8 bulan. Hanya 9 orang (11,84%) lulusan yang mendapatkan pekerjaan pertama lebih dari 8 bulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masa tunggu lulusan Program Studi Ekonomi Pembangunan yang menjadi responden relatif pendek.

Tabel 1. Masa Tunggu Lulusan Memperoleh Pekerjaan

Masa tunggu	Masuk saat PTS		Masuk saat PTN		Total	
	Jml (Orang)	Persentase (%)	Jml (Orang)	Persentase (%)	Jml (Orang)	Persentase (%)
< 4 bulan	22	38.60	17	89.47	39	51.32
4-8 bulan	26	45.61	2	10.53	28	36.84
> 8 bulan	9	15.79	0	0.00	9	11.84
Jumlah	57	100.00	19	100.00	76	100.00

UPN “Veteran” Yogyakarta pernah mengalami perubahan status dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pada Oktober 2014. Selanjutnya apabila diperinci menurut status mahasiswa sebelum lulus, maka lulusan UPN yang masuknya saat masih PTS (angkatan sebelum 2015) untuk mendapatkan pekerjaan pertama rata-rata masa tunggu 5,14 bulan dan saat sudah PTN (angkatan 2015) untuk mendapatkan pekerjaan pertama masa tunggu rata-rata hanya 2,2 bulan. Lulusan yang masuk UPN saat berstatus PTS memperoleh pekerjaan kurang dari 4 bulan sejumlah 22 orang (38,60%), 4-8 bulan sebanyak 26 orang (45,61%) dan lebih dari 8 bulan sebanyak 9 orang (15,79%). Sedangkan lulusan yang

masuk UPN saat berstatus PTN memperoleh pekerjaan kurang dari 4 bulan sejumlah 17 orang (89,47%), 4-8 bulan sebanyak 2 orang (10,53%) dan tidak ada yang memperoleh pekerjaan lebih dari 8 bulan. Dengan demikian lulusan yang masuk UPN saat sudah PTN mampu memperoleh pekerjaan pertama lebih cepat dari pada mahasiswa PTS (angkatan sebelum 2015). Hal ini mengindikasikan adanya input calon mahasiswa PTN yang lebih baik dan proses perkuliahan yang baik juga.

b) Profesi Lulusan/Alumni

Dari tabel 2, sebagian besar Lulusan/alumni program studi Ekonomi Pembangunan berprofesi sebagai karyawan perusahaan swasta yaitu sebesar 44 orang (57,89). Sementara itu sejumlah 3 orang (3,95%) berprofesi PNS/TNI-POLRI, sebanyak 7 orang (9,21%) sebagai karyawan BUMN. Adapun alumni yang berprofesi sebagai wiraswasta sejumlah 8 orang (10,53%), yang bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat sejumlah 2 orang (2,63%) dan 12 orang (15,79%) memiliki profesi lainnya. Profesi lainnya ini antara lain sebagai peneliti, surveyor dan lain-lain.

Mengingat banyaknya alumni yang memiliki profesi sebagai karyawan swasta, maka diperlukan perubahan desain mata kuliah (kurikulum) yang mampu menopang peran alumni untuk berkiprah di tempat kerjanya. Selanjutnya perlu diperkuat mata kuliah yang berkaitan dengan kewirausahaan mengingat sejumlah 8 orang (10,53%) alumni memilih pekerjaan menjadi wiraswasta.

Profesi	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
PNS/TNI/POLRI	3	3.95
Karyawan Perusahaan Swasta	44	57.89
Karyawan BUMN	7	9.21
Wiraswasta	8	10.53
Lembaga Swadaya Masyarakat	2	2.63
Lainnya	12	15.79
Jumlah	76	100.00

Tabel 2. Profesi Alumni

c) Pendapatan Alumni

Dari tabel 3, besaran pendapatan alumni per bulan yang berasal dari pekerjaan pokok terbentang dari pendapatan kurang dari Rp2.000.0000, Rp2.000.0000-Rp4.000.000, Rp4.000.001-Rp6.000.000 dan lebih dari Rp6.000.0000. Sebagian besar alumni Ekonomi Pembangunan dari pekerjaannya memperoleh pendapatan per bulan antara Rp2.000.0000-Rp4.000.000 yaitu sejumlah 39 orang (51,32%), selanjutnya alumni dengan pendapatan per bulan sebesar Rp4.001.000-Rp6.000.000 sebanyak 24 orang (31,58%), yang pendapatannya kurang dari Rp2.000.000 sebanyak 10 orang (13,16%) dan yang memperoleh pendapatan lebih dari Rp6.000.0000 per bulan hanya 3 orang (3,95%).

Berdasar besaran pendapatan alumni, maka sebagian besar alumni memiliki pendapatan kurang dari Rp4.000.000 per bulan. Tinggi rendahnya pendapatan biasanya terkait dengan tingkat upah. Sementara itu tingkat upah dipengaruhi oleh produktivitas. Untuk itu perlu diperbaiki desain kurikulum dengan memberikan lebih banyak keterampilan kepada mahasiswa agar pada saatnya bisa bekerja dengan cara yang profesional. Selain itu perubahan desain kurikulum juga diarahkan untuk meningkatkan porsi mata kuliah yang banyak terkait dengan bidang kerja alumni.

Tabel 3. Pendapatan Alumni per bulan

Pendapatan per bulan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Kurang dari Rp.2.000.000	10	13.16
Rp.2.000.000-Rp.4.000.000	39	51.32
Rp.4.000.001-Rp.6.000.000	24	31.58
Lebih dari Rp.6.000.000	3	3.95
Jumlah	76	100.00

d) Cara memperoleh pekerjaan

Dari tabel 4, sebagian besar alumni memperoleh pekerjaan melalui informasi dari internet/iklan online yaitu sebanyak 24 orang (31,58%), selanjutnya pergi ke bursa bursa/pameran kerja sebesar 15 orang (19,74%), kemudian melalui iklan/Koran dan memperoleh informasi dari jurusan/fakultas/universitas memiliki jumlah yang sama masing-masing sebanyak 12 orang (15,79%). Adapun lulusan/alumni yang memperoleh pekerjaan dengan melamar ke perusahaan tanpa mengetahui ada tidaknya lowongan sebesar 8 orang (10,53%). Alumni yang memperoleh pekerjaan menghubungi Kemenakertran/Dinakertran juga memiliki jumlah yang sama masing-masing sebanyak 2 orang (2,63%).

Faktor terpenting dalam hal memperoleh pekerjaan adalah informasi. Pada jaman millennial ini peran teknologi informasi melalui segala sesuatu yang bersifat on line sangat mendominasi. Sementara itu peran keluarga/sudara/ teman dalam memberikan informasi tentang lapangan kerja juga tidak kalah penting. Untuk itu program studi dapat mendorong peningkatan penggunaan teknologi informasi agar lulusan lebih terbiasa dengan segala informasi yang bersifat online. Satu hal yang tidak kalah penting adalah penguatan hubungan dan peran ikatan alumni dalam pemberian informasi tentang lapangan kerja.

Tabel 4. Cara Memperoleh Pekerjaan bagi Alumni

Cara Memperoleh Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Melalui iklan di koran/majalah	12	15.79
Melamar langsung ke perusahaan	8	10.53
Pergi ke bursa/pameran kerja	15	19.74
Mencari lewat internet/online	24	31.58
Menghubungi Kemenakertran/Disnakertran	2	2.63
Memperoleh informasi dari jurusan/Fak/Univ	1	1.32
Memperoleh informasi dari keluarga/teman	12	15.79
Lainnya	2	2.63
Jumlah	76	100.00

e) Hubungan Bidang Studi Dengan Profesi

Tabel 5, menunjukkan bahwa sebagian besar alumni menyatakan bahwa bidang studi Ekonomi Pembangunan memiliki keterkaitan dengan profesi alumni. Sejumlah 34 orang (44,74%) alumni menyatakan bahwa terdapat hubungan yang cukup erat antara bidang studi dan profesi alumni. Sementara itu jumlah alumni yang menyatakan terdapat hubungan antara bidang studi dan profesi yang erat sebanyak 9 orang (11,84%). Adapun jumlah alumni yang

menyatakan hubungan sangat erat antara bidang studi dan profesi sebesar 4 orang (5,26%), sebanyak 13 orang (17,11%) menyatakan hubungan kurang erat dan 16 orang (20 %) menyatakan tidak ada hubungan sama sekali. Kurang dan tidak adanya hubungan sama sekali antara program Studi dengan profesi, diduga karena lulusan/alumni tidak memilih-milih jenis profesi. Dalam kondisi pasar tenaga kerja yang ditandai dengan adanya pasokan pekerja (labor surplus), maka tenaga kerja tidak memiliki banyak pilihan. Jumlah pencari kerja jauh melebihi jumlah lowongan kerja yang tersedia. Untuk itu pekerja akan menerima apapun jenis profesi yang ada. Pilihan ini jauh lebih baik daripada pekerja menolak bidang profesi yang tersedia (walaupun mungkin tidak sesuai dengan bidang studi yang ditekuni) daripada menanggung resiko menjadi penganggur.

Tabel 5. Hubungan Bidang Studi dengan Profesi

Hubungan Bidang Studi dengan Profesi	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Sangat Erat	4	5.26
Erat	9	11.84
Cukup Erat	34	44.74
Kurang Erat	13	17.11
Tidak sama sekali	16	21.05
Jumlah	76	100.00

f) Hambatan yang dihadapi lulusan dalam mencari pekerjaan

Tabel 6, menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan/alumni menyatakan bahwa dalam memperoleh pekerjaan menghadapi hambatan kemampuan bahasa asing yang kurang yaitu sebesar 41 orang (53,59%), kemudian sebanyak 22 orang (28,95%) merasa tidak ada hambatan, selanjutnya sebanyak 10 orang (13,16%) merasa kepercayaan diri kurang dan ada 3 orang (3,95%) yang menyatakan bahwa cara berkomunikasi menjadi hambatan. Mengingat banyak alumni merasa bahwa hambatan kemampuan bahasa asing (khususnya bahasa inggris) kurang, maka bahasa asing perlu sebagai bahasa pengantar dalam kuliah.

Tabel 6. Hambatan yang dihadapi lulusan/alumni dalam memperoleh pekerjaan

Hambatan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Tidak ada hambatan	22	28.95
Kepercayaan diri	10	13.16
Kemampuan bahasa asing	41	53.95
Cara berkomunikasi	3	3.95
Jumlah	76	100.00

2. Korelasi antara Toefl dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan Masa Tunggu lulusan

Nilai korelasi (r) berkisar antara 1 sampai -1, nilai semakin mendekati 1 atau -1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat, sebaliknya nilai mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan searah (variable bebas naik maka variable tidak bebas juga naik) dan nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik (variable bebas naik maka variable tidak bebas turun atau sebaliknya). Nilai koefisien korelasi antara Toefl dengan Masa Tunggu menunjukkan nilai sebesar -0,431. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel dengan arah negatif (berlawanan), yang berarti apabila nilai Toefl naik maka masa tunggu untuk memperoleh pekerjaan menjadi lebih pendek dan sebaliknya apabila nilai Toefl turun, maka masa tunggu untuk mendapatkan

pekerjaan menjadi lebih panjang/lama. Nilai koefisien korelasi sebesar -0,431 menunjukkan hubungan antara Toefl dengan masa tunggu memperoleh pekerja termasuk kategori sedang. Hal ini wajar mengingat kesuksesan seorang lulusan untuk mendapatkan pekerjaan bergantung pada banyak faktor. Faktor Toefl hanya salah satu faktor yang berkaitan erat dengan masa tunggu.

Nilai koefisien korelasi antara Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan Masa Tunggu menunjukkan nilai sebesar -0,153. Hal ini menunjukkan hubungan antara kedua variabel dengan arah negatif (berlawanan), yang berarti apabila IPK naik maka masa tunggu untuk mendapatkan pekerjaan menjadi lebih pendek dan sebaliknya apabila IPK turun, maka masa tunggu untuk mendapatkan pekerjaan menjadi lebih panjang/lama. Nilai koefisien korelasi sebesar -0,153 menunjukkan hubungan antara IPK dengan masa tunggu memperoleh pekerjaan termasuk kategori lemah. Hal ini wajar mengingat faktor IPK biasanya hanya sebagai syarat administratif dalam melamar pekerjaan.

Hubungan antara Toefl dan IPK dengan masa tunggu tidak termasuk kategori kuat karena panjang pendeknya masa tunggu lulusan juga bergantung pada jenis pekerjaan yang diinginkan. Terdapat jenis pekerjaan yang memiliki persyaratan kerja yang relatif mudah sehingga masa tunggu pendek. Akan tetapi ada juga sejumlah pekerjaan memerlukan proses rekrutmen yang berjenjang dan panjang sehingga masa tunggu menjadi lebih lama walaupun lulusan yang melamar pekerjaan tersebut memiliki nilai Toefl dan IPK yang tinggi.

Tabel 7. Korelasi antara Masa tunggu dengan Toefl dan IPK

		MASTUNG	TOEFL	IPK
MASTUNG	Pearson Correlation	1	-.431**	-.153
	Sig. (2-tailed)		.000	.187
	N	76	76	76
TOEFL	Pearson Correlation	-.431**	1	.108
	Sig. (2-tailed)	.000		.354
	N	76	76	76
IPK	Pearson Correlation	-.153	.108	1
	Sig. (2-tailed)	.187	.354	
	N	76	76	76

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Masa tunggu untuk mendapatkan pekerjaan pertama bagi lulusan program studi Ekonomi Pembangunan rata-rata relatif singkat yaitu hanya 4,4 bulan. Sebagian besar lulusan/alumni Program Studi Ekonomi Pembangunan bisa mendapatkan pekerjaan pertama dalam waktu kurang dari 4 bulan. Dari sisi jenis profesi, sebagian besar alumni program studi Ekonomi Pembangunan berprofesi sebagai karyawan perusahaan swasta. Adapun berdasar tingkat pendapatan alumni, maka sebagian besar pendapatan per bulan sebesar Rp2.000.000-Rp4.000.000. Kesesuaian antara bidang studi dengan profesi/pekerjaan, maka sebagian besar lulusan/alumni Program Studi Ekonomi Pembangunan berpendapat bahwa terdapat keterkaitan yang cukup erat antara bidang studi dengan profesi alumni. Selanjutnya sebagian besar lulusan/alumni Program Studi Ekonomi Pembangunan memperoleh pekerjaan melalui internet/iklan online. Hambatan lulusan/alumni dalam memperoleh pekerjaan sebagian besar karena kemampuan bahasa asing yang kurang.

Saran

Mengingat banyaknya alumni yang memiliki profesi sebagai karyawan swasta, maka diperlukan perubahan desain mata kuliah (kurikulum) yang mampu menopang peran alumni untuk berkiprah di tempat kerjanya. Selanjutnya perubahan desain mata kuliah juga diarahkan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan alumni. Untuk menopang upaya alumni dalam memperoleh pekerjaan, perlu dilakukan penguatan hubungan dan peran ikatan alumni dalam pemberian informasi tentang lapangan kerja. Mengingat juga bahwa hambatan lulusan/alumni dalam memperoleh pekerjaan sebagian besar karena kemampuan bahasa asing yang kurang, maka perlu ada bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam pelaksanaan perkuliahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari, 2013. Statistika Induktif Untuk Ekonomi dan Bisnis, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Asmuni, 2014. Pengembangan Soft Skill Dan Karakter Mahasiswa ,Materi Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (OSPEK) Mahasiswa Baru STKIP PGRI Jombang Tahun Akademi 2014/2015,
- Faisal R. Dongoran, Khairul Nisa, Marni Sihombing, Lusita Devi Purba, 2016. Analisis Jumlah Pengangguran dan Ketenagakerjaan Terhadap keberadaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kotamedan, Jurnal Edutech Vol. 2 No. 2 : 59-72
- Handayani, 2015. Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi Di Indonesia Dengan Kebutuhan Tenaga Kerja Di Era Global, Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 10 (1): 53-64
- Sudaryanto dan Aylilianawati, 2007. Sudaryanto, Y. & Aylilianawati. 2007. Penerapan Collaborative Learning pada Pembelajaran Matakuliah Proses Industri Kimia. Proceeding of the Research and Studies VI: Teaching Grant I. Technological and Professional Skills Development Sector Project. Ditjen Dikti, Depdiknas.
- Sudjimat, D.A. 2010. Pengembangan Model Pendidikan Soft Skill melalui Pembelajaran pada Program Studi Pendidikan Teknik Mesin FT UM. Jurnal Teknologi dan Kejuruan, 33 (2): 133-142.
- Sutrisno dan Adjib Karjanto, 2014. Peningkatan Soft Skill dan Prestasi Belajar Mahasiswa Pada Matakuliah Metodologi Penelitian Melalui Pembelajaran Model Learning Community Teknologi dan Kejuruan, Vol. 37(1): 25-38

ANALISIS PENGUATAN INTERNAL PENELITIAN PERGURUAN TINGGI

Sri Suryaningsum

Kapus Penelitian LP2M UPN “Veteran” Yogyakarta

Email: srisuryaningsum@upnyk.ac.id

PENDAHULUAN

Artikel ilmiah ini merupakan analisis terhadap kinerja penelitian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta periode 2014 sd 2019. Analisis ini penting karena bermanfaat untuk membuat strategi penelitian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta di masa mendatang. Analisis dilakukan berbasis akuntansi keperilakuan, teori organisasi, dan manajemen strategi. Hal ini sesuai dengan Handoko (1996), Handoko (2001), Suryaningsum (2008) Suryaningsum (2017), Suryaningsum dan Suharyadi (2018). Penelitian menjadi tugas pokok seorang dosen dan menjadi salah satu penilaian perguruan tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh seluruh civitas akademik suatu perguruan tinggi akan menjadikan perguruan tinggi tersebut dikenal masyarakat luas.

Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi membagi klasifikasi perguruan tinggi menjadi empat tingkatan kategori, yaitu tingkat Binaan, tingkat Madya, tingkat Utama, dan tingkat Mandiri. Klasifikasi ini memiliki dampak terhadap skema penelitian yang boleh dilakukan oleh perguruan tinggi.

Klasifikasi Penelitian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sendiri pada tahun 2014 adalah termasuk klasifikasi Madya. Pada tahun 2015 adalah tahapan penting bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta dalam rangka pencapaian meraih klasifikasi Mandiri. Tahun 2015 adalah tahun transisi bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, pada tahun tersebut semua serba terbatas dari segi pendanaan, termasuk dari sisi pendanaan penelitian internal.

Keterbatasan pendanaan penelitian internal ini tidak menjadi halangan karena dilandasi semangat tinggi untuk segera keluar dari masa transisi. Strategi Road show sosialisasi skema penelitian eksternal di semua jurusan program studi menjadi pilihan dan menjadi prioritas utama program Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. Program ini menjadi sangat efektif karena Pusat penelitian dan Pengembangan LPPM UPNVY mencakupi lima bidang yaitu Bidang Ekonomi, Bidang Pertanian, Bidang Teknologi Mineral, Bidang Fisipol, dan Bidang Teknik Industri. Hasil kinerja 2015 ini menjadi dasar penilaian klasifikasi penelitian tahun 2016. UPNVY menjadi Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki prestasi membanggakan. Awal tahun 2016 meraih Klasifikasi Mandiri dari Kemenristekdikti. Klasifikasi tertinggi dalam bidang penelitian perguruan tinggi. Urutan klasifikasi penelitian perguruan tinggi adalah Mandiri, Utama, Madya dan Binaan.

Klasifikasi penelitian Mandiri ini memberikan dampak positif bagi UPNVY secara keseluruhan. Secara keseluruhan peringkat UPNVY pada tahun 2015 berada di peringkat 1089 dari seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia, menjadi ke peringkat 80 pada tahun 2016, dan meningkat lagi menjadi peringkat 40 pada tahun 2017. Raihan keseluruhan total nilai ini juga tidak lepas dari prestasi penelitian yang telah diraih pada tahun 2016. Kinerja tahun 2016 menjadi dasar penilaian ranking keseluruhan pada tahun 2017. UPNVY sebelumnya berada

dalam klaster 4 (klaster Perguruan Tinggi kecil yang hampir dieliminasi), tahun 2017 masuk dalam klaster 2. Dan sejak itu pula, animo calon mahasiswa melonjak tajam, dari yang sebelumnya sekitar berjumlah 13.000-an mahasiswa menjadi 51.000 calon mahasiswa pada 2017 lalu. UPNVY menjadi universitas dengan nilai masuk tertinggi SBMPTN berada dalam urutan ke-8 kelompok Soshum dan urutan ke-9 kelompok Saintek pada tahun 2017 dan tahun seterusnya. Ini adalah hal yang luar biasa, mengingat UPNVY baru mengikuti 3 kali SBMPTN terhitung sejak tahun 2015. UPNVY menjadi universitas pilihan favorit lulusan SMA/SMK. Hal ini sesuai dengan Suryaningsum (2017) dan (2018).

Paper ini akan mendeskripsikan perkembangan kinerja penelitian dan strategi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPNVY pada periode 2014 sd 2018 dan periode 2019 sd 2020. Pembagian periode ini penting karena 2014 sd 2018 adalah memiliki nilai perjuangan (2014 dan 2015), masa tonggak sejarah klasifikasi Mandiri (2016), masa memanen (2017 dan 2018), dan periode 2019 sd 2020 adalah masa berjuang lebih keras karena persaingan kinerja penelitian perguruan tinggi lainnya semakin tinggi.

KAJIAN TEORI

Strategi harus mempertimbangkan lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal dilakukan dengan menganalisis Lingkungan External, meliputi mengidentifikasi arah trend dalam hal ini analisis lingkungan sosial ekonomi, sosial budaya, teknologi, politik, hankam yang akan mempengaruhi untuk masa yang akan datang, kemudian analisis pasar, komunitas, kompetitor, supplier, kebijakan makro dan mikro pemerintah. Hal ini sesuai dengan David (2015), Pramudyo (2010).

Menganalisis lingkungan internal, meliputi kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki, situasi lingkungan kerja, asset penunjang aktifitas, dan kapabilitas lainnya.

Selanjutnya adalah langkah dalam memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi. Memformulasikan Strategi merupakan proses pengembangan perencanaan jangka panjang untuk mencapai tujuan perusahaan yang efektif dan efisien melalui analisa peluang dan ancaman dari lingkungan berdasarkan kekuatan dan kelemahan perusahaan meliputi Visi dan Misi. Memiliki visi dan misi jangka pendek dan panjang perusahaan. Tujuan dan arah strategi perusahaan, Tujuan tersebut harus dapat diterjemahkan baik dari sisi waktu, kualitas, dan kuantitas.

Mengimplementasikan Strategi yang mencakupi Strategi Korporasi dan strategi bisnis. Dalam hal strategi korporasi mencakupi Mengaplikasikan brand image perusahaan yang telah terbangun menjadi peluang bisnis yang dapat menjadi revenue bagi perseroan, Mengembangkan usaha melalui kerjasama dengan mitra strategis dengan prinsip sinergi dan saling menguntungkan, dan Memperluas jaringan pendanaan melalui penciptaan prospek-prospek usaha yang menarik dan mampu direalisasikan.

Dalam hal Strategi Bisnis mencakupi Melaksanakan seluruh transaksi perusahaan dengan sistem administrasi yang akuntabel dan aman, menciptakan produktifitas yang optimal, Melakukan diversifikasi usaha yang menguntungkan, Memfasilitasi komunikasi bisnis yang lebih transparan dan optimal yang memberikan nilai tambah dan manfaat bagi setiap pelaku atau anggota, dan mengembangkan teknologi yang tepat guna melalui terciptanya sistem yang efektif secara ekonomi sehingga menciptakan perkembangan bagi perusahaan.

Dalam hal bidang SDM dan Organisasi mencakupi Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional, mengembangkan kemampuan perusahaan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dengan melakukan Pendidikan dan Pelatihan yang berkesinambungan, Melatih dan mengembangkan mitra-mitra profesional yang

diperlukan dalam setiap aktifitas perusahaan, menciptakan sistem promosi dan mutasi yang sesuai dengan keahlian dan orang yang tepat pada bidangnya, dan menciptakan struktur organisasi mampu mendukung seluruh fungsi kinerja perusahaan yang bersih dan tidak terbatas dalam pengembangan usahanya.

Evaluasi dan Pengendalian mencakupi proses pengawasan terhadap seluruh aktivitas perusahaan apakah sudah berjalan sesuai dengan perencanaan dan strategi yang dipilih, melalui metode analisa perbandingan kondisi pencapaian aktual dibandingkan dengan perencanaan awal. Metode Laporan analisa ini bisa diterapkan dalam periode mingguan, bulanan, dan tahunan, agar segala penyimpangan dapat dievaluasi dan diperbaiki kinerjanya sehingga diharapkan apa yang telah direncanakan dapat berjalan dengan semestinya.

METODA PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April hingga Agustus 2019. Berlokasi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Objek yang dianalisis dalam penelitian ini antara lain adalah perkembangan penelitian di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Pada penelitian ini digunakan pendekatan analisis kualitatif, sehingga dapat menjelaskan fenomena yang ada dengan mendalam.

Data yang terdapat di penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa informasi langsung dari pelaku peneliti dan pemonev penelitian di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dash board kinerja penelitian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta.

Metode yang digunakan untuk memperoleh data tersebut antara lain melalui observasi secara langsung pada objek yang diteliti. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi dinamika penelitian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta.

Hasil observasi baik primer maupun sekunder akan dilakukan dua pembahasan, yaitu kondisi penelitian 2014 sampai 2018 dan strategi penelitian 2019 sampai 2019.

PEMBAHASAN

Pembahasan dalam artikel ini akan dilakukan dua hal, yaitu pada perioda 2014 sd 2018 dan perioda 2019 sd 2020. Pembagian perioda ini penting karena 2014 sd 2018 adalah memiliki nilai perjuangan (2014 dan 2015), masa tonggak sejarah klasifikasi Mandiri (2016), masa memanen (2017 dan 2018), dan perioda 2019 sd 2020 adalah masa berjuang lebih keras karena persaingan kinerja penelitian perguruan tinggi lainnya semakin tinggi.

Perioda 2014 diawali dengan penancangan visi dan misi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UPNVY. Visi dan misi ini sangat penting dalam hal melangkah. Melangkah di perioda 2014 diawali dengan persiapan juga mengikuti ISO 2008. Visi tersebut adalah menjadi LPPM unggul dan mandiri dalam pengembangan dan implementasi IPTEK, yang diakui dalam skala nasional maupun internasional dilandasi nilai disiplin kejuangan dan kreativitas.

Sedangkan misi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UPNVY adalah sebagai berikut :

- Secara terprogram dan berkesinambungan mendorong kegiatan penelitian sebagai sarana untuk pengembangan diri dan komunitas.
- Menjadikan kegiatan penelitian sebagai sarana untuk menjawab tantangan dan permasalahan IPTEK yang berkembang di masyarakat dan lingkungan

- Berperan aktif dalam pengembangan dan penetapan ilmu dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat.
- Menjadikan kegiatan penelitian sebagai sarana bagi tenaga akademik untuk menetapkan keparakarannya agar IPTEK yang dikembangkannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, aparat pemerintah, dan pengambilan keputusan.

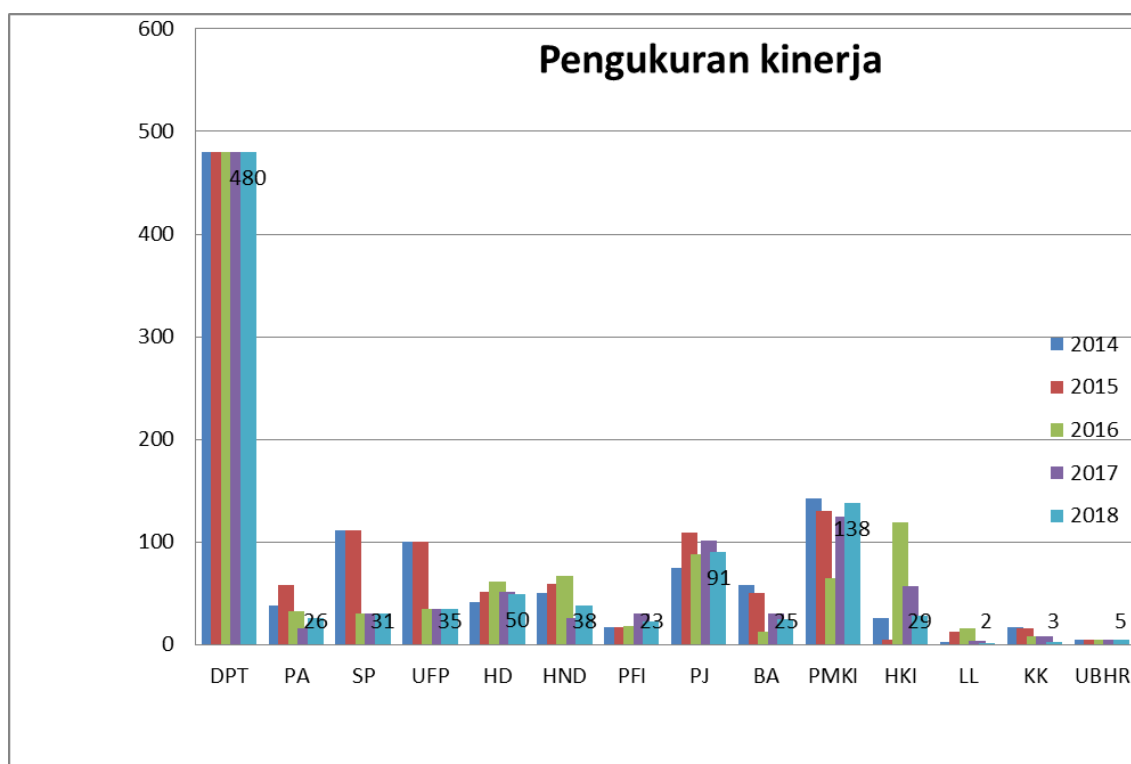
Pada tahun 2015 adalah tahapan penting bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta dalam rangka pencapaian meraih klasifikasi Mandiri. Tahun 2015 adalah tahun transisi bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, pada tahun tersebut semua serba terbatas dari segi pendanaan, termasuk dari sisi pendanaan penelitian internal. Keterbatasan pendanaan penelitian internal ini tidak menjadi halangan karena dilandasi semangat tinggi untuk segera keluar dari masa transisi. Strategi Road show sosialisasi skema penelitian eksternal di semua jurusan program studi menjadi pilihan dan menjadi prioritas utama program Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. Program ini menjadi sangat efektif karena Pusat penelitian dan Pengembangan LPPM UPN VY mencakupi lima bidang yaitu Bidang Ekonomi, Bidang Pertanian, Bidang Teknologi Mineral, Bidang Fisipol, dan Bidang Teknik Industri. Hasil kinerja 2015 ini menjadi dasar penilaian klasifikasi penelitian tahun 2016. UPN VY menjadi Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki prestasi membanggakan. Awal tahun 2016 meraih Klasifikasi Mandiri dari Kemenristekdikti. Klasifikasi tertinggi dalam bidang penelitian perguruan tinggi. Urutan klasifikasi penelitian perguruan tinggi adalah Mandiri, Utama, Madya dan Binaan. Hasil Capaian Kinerja Penelitian 2014 sd 2018 terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 1. Kinerja Penelitian 2014 sd 2018

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Dosen Perguruan Tinggi	480	480	480	480	480
Peneliti Asing	39	59	33	16	26
Staf Pendukung	112	112	31	31	31
Unit Fasilitas Penunjang	101	101	35	35	35
Hibah Ditlitabmas	42	52	62	52	50
Hibah Non Ditlitabmas	51	60	67	26	38
Penyelenggara Forum Ilmiah	17	17	18	31	23
Publikasi Jurnal	75	110	88	102	91
Buku Ajar	59	51	13	31	25
Pemakalah Forum Ilmiah	143	131	65	125	138
Hak Kekayaan Intelektual'	26	5	120	57	29
Luaran lain	3	13	16	4	2
Kontrak Karya	17	16	9	8	3
Unit Bisnis Hasil Riset	5	5	5	5	5
Total	1170	1212	1042	1003	976

Sumber: dashboard Kinerja Penelitian, Simlitabmas Kemeristekdikti yang diunduh April 2019

Dari tabel di atas, maka dibuatlah grafik seperti di bawah ini.



Penjelasan pembahasan dari Hasil Capaian Kinerja Penelitian 2014 sd 2018, Dosen Perguruan Tinggi yang berjumlah 480 dari tahun 2014 sd 2018 perlu peningkatan yang disesuaikan, karena dosen PT UPNVY relatif tidak muda lagi, perlu peremajaan untuk kepentingan organisasi. Peneliti Asing yang berjumlah 39 pada tahun 2014, berjumlah 59 pada tahun 2015, berjumlah 33 pada tahun 2016, berjumlah 16 pada tahun 2017, berjumlah 26 pada tahun 2018. Kategori untuk hal ini perlu peningkatan dan perlu stabil.

Staf Pendukung yang berjumlah 112 pada tahun 2014, berjumlah 112 Kategori untuk hal ini perlu pada tahun 2015, berjumlah 31 pada tahun 2016, berjumlah 31 pada tahun 2017, berjumlah 31 pada tahun 2018 hasil verifikasi 2016 Relatif stabil. Unit Fasilitas Penunjang yang berjumlah 101 pada tahun 2014, berjumlah 101 pada tahun 2015, berjumlah 35 pada tahun 2016, berjumlah 35 pada tahun 2017, berjumlah 35 pada tahun 2018 hasil verifikasi 2016 Relatif stabil. Hibah Ditlitabmas yang berjumlah 42 pada tahun 2014, berjumlah 52 pada tahun 2015, berjumlah 62 pada tahun 2016, berjumlah 52 pada tahun 2017, berjumlah 50 pada tahun 2018 Relatif stabil. Hibah Non Ditlitabmas yang berjumlah 51 pada tahun 2014, berjumlah 60 pada tahun 2015, berjumlah 67 pada tahun 2016, berjumlah 26 pada tahun 2017, berjumlah 38 pada tahun 2018. Tahun 2019 penelitian penelitian internal.

Penyelenggara Forum Ilmiah yang berjumlah 17 pada tahun 2014, berjumlah 17 pada tahun 2015, berjumlah 18 pada tahun 2016, berjumlah 31 pada tahun 2017, berjumlah 23 pada tahun 2018 perlu ditingkatkan. Publikasi Jurnal yang berjumlah 75 pada tahun 2014, berjumlah 110 pada tahun 2015, berjumlah 88 pada tahun 2016, berjumlah 102 pada tahun

2017, berjumlah 91 pada tahun 2018. Kategori untuk hal ini perlu percepatan peningkatan pula.

Buku Ajar yang berjumlah 59 pada tahun 2014, berjumlah 51 pada tahun 2015, berjumlah 13 pada tahun 2016, berjumlah 31 pada tahun 2017, berjumlah 25 pada tahun 2018 perlu percepatan peningkatan. Pemakalah Forum Ilmiah yang berjumlah 143 pada tahun 2014, berjumlah 131 pada tahun 2015, berjumlah 65 pada tahun 2016, berjumlah 125 pada tahun 2017, berjumlah 138 pada tahun 2018 perlu percepatan peningkatan.

Hak Kekayaan Intelektual yang berjumlah 26 pada tahun 2014, berjumlah 5 pada tahun 2015, berjumlah 120 pada tahun 2016, berjumlah 57 pada tahun 2017, berjumlah 29 pada tahun 2018 perlu percepatan peningkatan. Luaran lain yang berjumlah 3 pada tahun 2014, berjumlah 13 pada tahun 2015, berjumlah 16 pada tahun 2016, berjumlah 4 pada tahun 2017, berjumlah 2 pada tahun 2018 perlu percepatan peningkatan.

Kontrak Karya yang berjumlah 17 pada tahun 2014, berjumlah 16 pada tahun 2015, berjumlah 9 pada tahun 2016, berjumlah 8 pada tahun 2017, berjumlah 3 pada tahun 2018 perlu percepatan peningkatan. Unit Bisnis Hasil Riset yang berjumlah 5 pada tahun 2014, berjumlah 5 pada tahun 2015, berjumlah 5 pada tahun 2016, berjumlah 5 pada tahun 2017, berjumlah 5 pada tahun 2018 perlu percepatan peningkatan.

Total capaian 1170 pada tahun 2014, 1170 pada tahun 2015, 1042 pada tahun 2016, 1003 pada tahun 2017, 976 pada tahun 2018. Secara keseluruhan kinerja penelitian pada tahun 2018 perlu segera percepatan peningkatan.

Strategi Penelitian 2019 dan 2020

Tahun 2019 dengan 112 hibah internal batch 1 dan batch ke 2 yang sedang direncanakan kurang lebih sama dengan besarnya nilai batch 1 (pada saat dibuat artikel ini, batch ke 2 sedang dirancang), maka bukan tidak mungkin akan tercapai luaran yang meningkat tiga kali lipat. Hal ini sangat bergantung dari pemonev internal yang memiliki tugas mengarahkan dan membimbing peneliti-peneliti agar mendapatkan luaran sebanyak minimal lima luaran untuk kegiatan 1 penelitian. Luaran tersebut mencakupi artikel terpublikasi, makalah yang diseminarkan, buku ajar atau referensi, hak cipta, dan rekayasa sosial atau rekayasa produk. Pemonev harus konsisten melakukan monitoring evaluasi capaian. Monitoring evaluasi dilaksanakan sebanyak tiga kali, yaitu monitoring evaluasi pertama lebih ke arah pembimbingan ataupun pengarahan penelitian dan capaiannya. Monitoring evaluasi kedua lebih ke arah memonitor dan menilai hasil capaian penelitiannya. Monitoring evaluasi ketiga menilai hasil capaian penelitiannya.

Dengan dua batch penelitian ini, yang memiliki siklus periode penelitian yang berbeda, yaitu batch pertama berlangsung April sampai dengan akhir Oktober, dan batch kedua yang berlangsung Oktober sampai dengan April maka akan diperoleh capaian luaran penelitian yang berlangsung terus-menerus tidak terputus, artinya batch pertama menghasilkan luaran artikel terpublikasi, makalah yang diseminarkan, buku ajar atau referensi, hak cipta, dan rekayasa sosial atau rekayasa produk pada sekitar bulan Agustus sampai dengan akhir Oktober. Batch kedua menghasilkan luaran artikel terpublikasi, makalah yang diseminarkan, buku ajar atau referensi, hak cipta, dan rekayasa sosial atau rekayasa produk pada sekitar bulan Januari sampai dengan akhir April. Untuk artikel terpublikasi yang publikasinya tergantung jurnal masing-masing penerbit akan bisa dihasilkan sepanjang bulan sekitar Agustus tahun 2019 sampai Agustus 2020, dan tergantung penerbitan jurnalnya. Dapat dikatakan bahwa skema penelitian internal yang jumlahnya hampir lebih dari 2 kali lipat tahun 2018 akan menjadikan

suatu lompatan keberhasilan capaian luaran penelitian bagi UPNVY. Hal ini berarti akan tercapai di akhir April 2020 setidaknya artikel terpublikasi sekitar 200, makalah yang diseminarkan sekitar 200, buku ajar atau referensi sekitar 200, hak cipta sekitar 200, dan rekayasa sosial atau rekayasa produk sekitar 200.

Dapat disimpulkan penguatan internal dalam bidang penelitian akan menghasilkan nilai yang bagus untuk pengembangan budaya meneliti di masing-masing peneliti. Dampak lainnya adalah pengkayaan ilmu untuk peneliti yang juga sebagai dosen. Pengkayaan ilmu ini merupakan bekal yang bagus bagi peneliti yang juga sekaligus dosen untuk bekal mengajar yang akan berdampak positif pada pengkayaan ilmu juga kepada mahasiswa yang diajarnya. Hal lain yang sangat berdampak positif adalah pengkayaan pengalaman bagi mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan Penelitian Yang Dilakukan Oleh Dosen.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini adalah bahwa klasifikasi kategori penelitian Mandiri yang diraih oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta adalah berkat kerja keras seluruh civitas akademika. Masa transisi yang dialami khususnya pada tahun 2015 merupakan semangat bersama untuk segera keluar dari masa transisi tersebut. Masa transisi tersebut menghasilkan kinerja yang luar biasa yaitu mampu menghasilkan klasifikasi Mandiri pada tahun 2016. Klasifikasi yang diperoleh pada tahun 2016 adalah berdasar pada penilaian kinerja penelitian tahun 2015. Strategi yang dilaksanakan pada tahun 2015 Strategi Road show sosialisasi skema penelitian eksternal di semua jurusan program studi menjadi pilihan dan menjadi prioritas utama program Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta. Program ini menjadi sangat efektif karena Pusat penelitian dan Pengembangan LPPM UPNVY mencakupi lima bidang yaitu Bidang Ekonomi, Bidang Pertanian, Bidang Teknologi Mineral, Bidang Fisipol, dan Bidang Teknik Industri.

Tahun 2016 meraih Klasifikasi Mandiri dari Kemenristekdikti. Klasifikasi tertinggi dalam bidang penelitian perguruan tinggi. Urutan klasifikasi penelitian perguruan tinggi adalah Mandiri, Utama, Madya dan Binaan.

Tahun 2017 dan tahun 2018 adalah saatnya seluruh civitas akademika merasanya masa melakukan penelitian desentralisasi. dan perioda 2019 sd 2020 adalah masa berjuang lebih keras karena persaingan kinerja penelitian perguruan tinggi lainnya semakin tinggi.

Penelitian ini perlu dikembangkan dengan menganalisis kondisi eksternal. Dengan menganalisis kondisi eksternal maka akan dihasilkan suatu kajian yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- David, Fred. R. David, Forest R. Pearson Education. Inc. 2015. Strategic Management.
- Fidowaty, T dan Kurniati, Poni Sukaesih. 2015. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Dosen Unikom. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi (JIPSi) Vol. V No. 2. Halaman 65-76
- Handoko, T. Hani. Dalam wawancara oleh Usahawan. 1996. Rancang Ulang Struktur Organisasi. Usahawan. April, No.04 Thn XXV
- Handoko, T. Hani. 2001. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE
- Kurniati, Poni Sukaesih. Tatik Fidowaty. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. Volume VII No. 2/ Desember 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Penelitian Dosen Universitas Komputer Indonesia
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2007. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Pramudyo, Anung. 2010. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Dosen Negeri Dipekerjakan Pada Kopertis Wilayah V Yogyakarta. *Jurnal Bisnis Teori & Implementasi*.
- Prawirosentono, Suryadi. 2008. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE.
- Ocky Karna Radjasa. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. Kemenristek Dikti. *Strategi Peningkatan Kluster Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*
- Simanjuntak. 2011. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI
- Sulastri. T. 2007. Hubungan Motivasi beprestasi dengan Kinerja Dosen. *Jurnal Fakultas Ekonomi: Optimal*. Vol 1 No.1.
- Suryaningsum, Sri. 25 Juni 2017. *Lintas Medika*. Pemimpin Tangguh UPN VY Prof. Doktor Sari Bahagiarti Kusumayudha, M.Sc. : Sukses Melewati Masa Transisi dan Meraih Prestasi Gemilang. <http://www.lintasmedika.com/2018/06/pemimpin-tangguh-upnvy-sukses-melewati-masa-transisi-dan-meraih-prestasi-gemilang/>
- Suryaningsum, Sri. Suharyadi, Heru. 2018. *Memorandum Akhir Jabatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Periode 2014-2018* Prof. Doktor Sari Bahagiarti Kusumayudha, M.Sc.
- Suryaningsum, Sri. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia* Vol. Vi No. 1 – Tahun 2008 Hal. 63–74. *Perspektif Struktur Organisasi (Tinjauan Sebagai Pengubah Perilaku)*.
- Wirawan. 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia, Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.

FASILITAS APLIKASI WEB DAPAT MEMBANGUN SUASANA AKADEMIK UNTUK MENCIPTAKAN WORD OF MOUTH MAHASISWA PRODI MAGISTER MANAJEMEN

Wisnalmawati, Istiana Rahatmawati, Purbudi Wahyuni

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

E_mail: wisnalupnyk@gmail.com

Abstract.

Pentingnya fasilitas internet di perguruan tinggi karena fasilitas aplikasi web dapat mempermudah mahasiswa mencari informasi yang berkaitan dengan pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1. menganalisis pengaruh fasilitas aplikasi konten web terhadap word of mouth. 2. Fasilitas aplikasi memengaruhi Word of Mouth dimediasi oleh suasana akademik. Unit Analisis penelitian ini adalah Magister Manajemen. Responden penelitian adalah mahasiswa Magister Manajemen, jumlahnya 100 mahasiswa FEB University Pembangunan Nasional teknik analisis yang digunakan adalah Structural Equation Model (SEM) with PLS Program. Hasil penelitian ini menunjukkan 1. Tidak ada pengaruh fasilitas aplikasi web terhadap word of mouth. 2. Fasilitas aplikasi memengaruhi Word of Mouth dimediasi oleh suasana akademik. Kebaruan penelitian ini adalah menciptakan suasana akademik sehingga dapat meningkatkan worth of mouth mahasiswa. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan model perilaku konsumen. Pelatihan fasilitas aplikasi Web memudahkan penyimpanan soft data untuk tujuan akreditasi dan mempercepat kelulusan mahasiswa yang berkualitas sehingga dapat menciptakan suasana akademik yang kondusif sehingga berdampak kepada Word of Mouth positif.

Keywords: Fasilitas aplikasi Web, suasana akademik, Word of Mouth

PENDAHULUAN

Word of mouth adalah berbicara positif atau negatif tentang produk atau jasa pada pihak lain Kanuk (2010). Word of mouth dapat diungkapkan melalui tatap muka atau dengan media sosial. Word of mouth akan membantu promosi produk atau jasa pada pihak lain secara efisien Engel (1996). Prodi Magister Manajemen dengan adanya penataan kembali statuta tentu dengan peralihan-peralihan seperti itu tentu terjadi pergeseran-pergeseran struktur organisasi akan berdampak pada tugas administrasi. Magister manajemen dulu dikelola oleh Kaprodi, sekretaris, dan beberapa tenaga administrasi, sekarang magister Manajemen di kelola oleh Ketua jurusan dengan dibantu oleh Koordinator prodi. Dengan kondisi ini akan terjadi peralihan fungsi dalam penegelolaan Magister Manajemen. Beberapa penataan yang belum diharapkan seperti penataan tenaga administrasi, fasilitas berbasis web belum terwujud sampai saat ini sehingga menyulitkan dalam pemantauan administrasi sehingga masih dilakukan secara manual.

Berkaitan dengan Word of mouth mahasiswa ketika melakukan pendaftaran mahasiswa baru harus datang langsung ke Magister manajemen, padahal sekarang sudah zaman IT, pengurusan surat menyurat masih dilakukan secara manual, munculnya Word of

mouth mahasiswa sering menanyakan tentang pendaftaran mahasiswa baru, pengurusan administrasi sehingga sering bercerita magister manajemen masih menggunakan cara-cara manual. Dampak Word of mouth negatif mahasiswa menyebabkan Magister Manajemen peminatnya akan rendah.

Masalah-masalah yang sering disampaikan oleh mahasiswa adalah lemahnya Wi-Fi di Magister Manajemen sehingga sulit mengerjakan tugas-tugas menggunakan internet. Internet merupakan kebutuhan hal yang penting bagi mahasiswa. Pendaftaran mahasiswa baru yang masih dilakukan manual. Kesulitan bagi pendaftar dari luar daerah. Selain itu Magister manajemen telah mempunyai fasilitas-fasilitas fisik seperti ruangan kelas, ruangan belajar sudah baik.

Dalam mendukung keberhasilan capaian prodi tentu tidak terlepas dari fasilitas yang tersedia, baik berbentuk fisik maupun non fisik yang berkaitan dengan teknologi seperti penyediaan Wifi, e-journal, e-learning, dalam menunjang proses belajar mengajar. Prodi sudah seharusnya menyediakan fasilitas aplikasi dan pelayanan berbasis teknologi yang memegang peranan sangat penting dalam dunia pendidikan. Fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh perguruan tinggi tidak sepenuhnya mendukung proses belajar mahasiswa. Selama ini mahasiswa Magister Manajemen tetap diminati oleh calon mahasiswa dengan mencapai kouta yang telah ditentukan.

Fasilitas-fasilitas Aplikasi akan membangun suasana yang menyenangkan dalam proses belajar mengajar. Sehingga akan mendorong mahasiswa dan dosen berkarya. Suasana akademik belum memperlihatkan seperti yang diharapkan tentu, agar tercipta suasana yang nyaman belajar di kelas. Suasana akademik berkaitan dengan kondisi ruangan kelas, suasana belajar mengajar menggunakan fasilitas aplikasi, tersedia fasilitas sesuai tuntutan zaman, aplikasi-aplikasi untuk memudahkan dalam penyimpanan dan perawatan data mahasiswa dalam bentuk digital. Untuk itu maka diperlukan adanya fasilitas aplikasi agar suasana akademik tercipta dan dapat menciptakan word of mouth positif.

Mengingat pentingnya fasilitas aplikasi dan membangun suasana akademik yang menyenangkan tentu berdampak pada word of mouth positif sehingga perlu dikaji secara ilmiah dengan melakukan riset.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- Menganalisis fasilitas aplikasi Web berpengaruh langsung terhadap Word of Mouth.
- Menganalisis fasilitas aplikasi Web memengaruhi Word of Mouth dimediasi oleh suasana akademik.

Kajian Literatur

Perilaku konsumen dibagi dua perilaku pembeli individu dan perilaku pembeli bisnis. Pembelianbisnis adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh organisasi formal untuk menetapkan kebutuhan akan barang dan jasa yang perlu dibeli serta mengidentifikasi, mengevaluasi dan memilih di antara alternatif merek dan pemasok. (Kotler, 2008); Kanuk (2010). Penelitian ini memfokuskan pada perilaku individu yaitu mahasiswa Magister Manajemen.

Word of mouth merupakan perilaku konsumen yang bercerita positif atau merekomendasikan tentang sesuatu kepada pihak lain dalam membeli suatu produk atau jasa tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari sering seseorang menyampaikan informasi dari teman, keluarga atau kelompok tertentu dalam membeli produk atau jasa.

Fasilitas adalah segala sesuatu yang bersifat fisik maupun material, misalnya dengan tersedianya perlengkapan belajar di kelas, alat-alat peraga pengajaran, buku pelajaran,

perpustakaan, berbagai perlengkapan pratikum dan segala sesuatu yang menunjang terlaksananya proses belajar mengajar. Aplikasi Web harus mencerminkan Konten Web yang menarik. Konten berkaitan untuk mengatur dan mengelola konten yang jelas dan membuat kemudahan pencarian informasi- informasi dan isi yang berkualitas.

Hubungan Fasilitas Aplikasi terhadap Word of Mouth

Tetteh, Godson A. (2018) menjelaskan indikator fasilitas yaitu perpustakaan universitas memiliki sumber daya akademik yang memadai, universitas memiliki auditorium, ruang konferensi yang memadai, universitas memiliki fasilitas medis yang memadai Infrastruktur kampus terpelihara dengan baik. Kim, Yun-Hee (2018) menjelaskan indikator word of mouth yaitu ingin memastikan bahwa orang lain mengetahui manfaat kuliah, akan merekomendasikan manajemen kepada anggota keluarga, akan merekomendasikan pada teman-teman pribadi

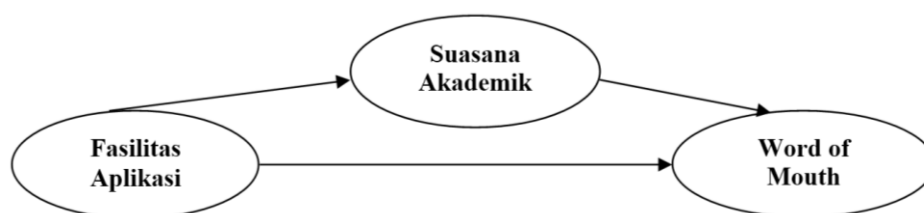
- Hubungan Fasilitas dengan suasana

Menurut Assael (2006) fasilitas dapat memengaruhi perilaku konsumen, kaitan dengan word of mouth adalah merupakan perilaku yang dilakukan secara spesifik. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Talukder, Md Shamim (2018).

- Hubungan Suasana dengan word of mouth

Menurut (Engel, 1996) menjelaskan Suasana dapat memengaruhi perilaku konsumen dalam berperilaku, word of mouth merupakan suatu perilaku konsumen. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Sumaedi.et.al (2012)

Kerangka konseptual



Gambar 1. kerangka konseptual

HIPOTESIS

- Fasilitas aplikasi web berpengaruh terhadap word of mouth mahasiswa
- Menganalisis fasilitas aplikasi web berpengaruh terhadap Word of Mouth dimediasi oleh suasana akademik

METODE

Unit Analisis penelitian ini adalah mahasiswa Magister Manajemen. Jumlah responden adalah 100 mahasiswa Magister Manajemen UPN "Veteran" Yogyakarta. Pengujian hipotesis dilakukan dengan model of Structural Equation Modelling with PLS (Partial Least Square) untuk menguji pengaruh variabel.

Tabel 1. Variabel dan indikator penelitian

Variabel	Definision Operasional Variable	Indicator/item	Loading Factor
Word of mouth Engel (1996); Kim, Yun-Hee. (2018); Talukder, Md Shamim (2018)	Ingin memastikan bahwa orang lain mengetahui manfaat kuliah, akan merekomendasikan prodi magister manajemen kepada anggota keluarga, akan merekomendasikan pada teman-teman pribadi.	- Ingin memastikan bahwa orang lain mengetahui manfaat kuliah,	0,735
		- Akan merekomendasikan prodi Magister manajemen kepada anggota keluarga,	0,910
		- Akan merekomendasikan pada teman-teman pribadi	0,919
Fasilitas content website Engel (1996); Sumaedi.et.al (2012); Talukder, Md Shamim (2018)	Fasilitas aplikasi yang disediakan untuk penerimaan mahasiswa baru, penyimpanan data yang memadai dan kemudahan administrasi berbasis digital.	- Prodi Magister memiliki Fasilitas content website yang jelas dalam penerimaan mahasiswa baru.	0,790
		- Prodi Magister memiliki Fasilitas aplikasi penyimpanan data mahasiswa yang memadai	0,903
		- Prodi Magister manajemen memiliki fasilitas aplikasi untuk memudahkan administrasi berbasis digital	0,917
Suasana Akademik Engel (1996); Sumaedi.et.al (2012); Talukder, Md Shamim (2018)	Suasana akademik prodi magister manajemen menawarkan keserasian proses belajar, suasana kesenangan, suasana kenyamanan belajar dan suasana kegembiraan bersama dosen dan teman-teman	- Prodi Magister menawarkan keserasian proses belajar	0,848
		- Prodi Magister manajemen menawarkan kesenangan belajar	0,894
		- Prodi Magister Manajemen menciptakan suasana kenyamanan belajar	0,802
		- Prodi Magister Manajemen menciptakan suasana kegembiraan bersama dosen teman-teman.	0,761

Sumber; Data primer yang diolah

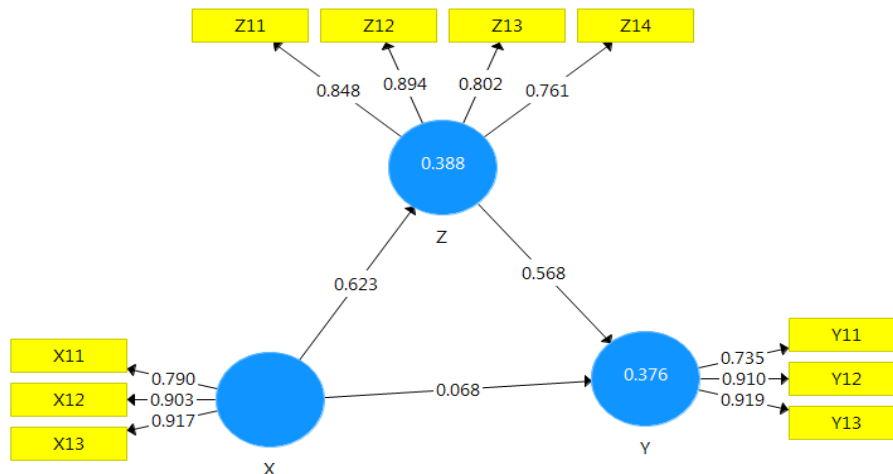
Dalam penelitian dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Nilai $r > 0,3$ maka item-item penelitian dikatakan valid. Jika nilai alpha cronbach $> 0,8$ dinyatakan reliabel.

HASIL RISET DAN DISKUSI

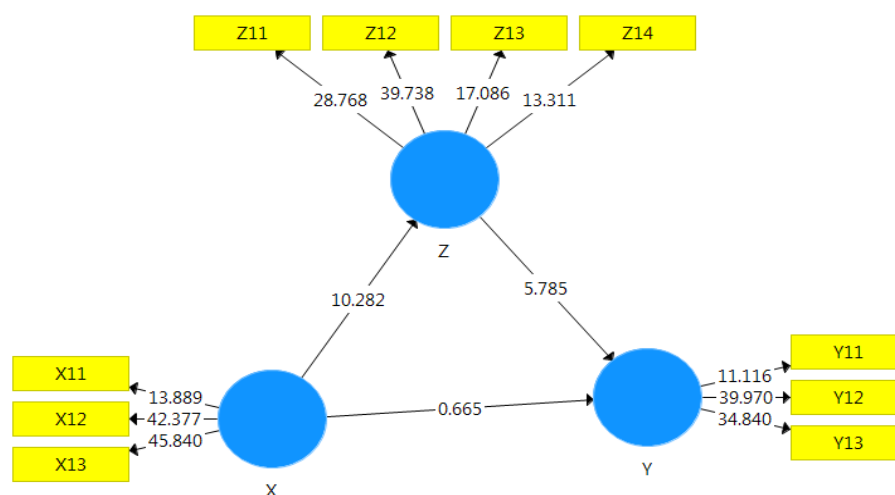
Indicator/item	Mean
- Prodi Magister manajemen memiliki Fasilitas aplikasi yang jelas dalam penerimaan mahasiswa baru.	3,4900
- Prodi Magister manajemen memiliki Fasilitas aplikasi penyimpanan data mahasiswa yang memadai.	3,7500
- Prodi Magister manajemen memiliki fasilitas aplikasi untuk memudahkan administrasi berbasis digital.	3,6700
- Prodi Magister manajemen menawarkan keserasian proses belajar.	4,0600
- Prodi Magister manajemen menawarkan kesenangan belajar.	4,0600
- Prodi Magister manajemen menciptakan suasana kenyamanan belajar.	4,1000
- Prodi Magister manajemen menciptakan suasana kegembiraan bersama dosen teman-teman.	4,1600
- Ingin memastikan bahwa orang lain mengetahui manfaat kuliah.	4,0900
- Akan merekomendasikan prodi Magister manajemen kepada anggota keluarga.	4,0900
- Akan merekomendasikan pada teman-teman pribadi.	4,0900

Sumber; Data primer yang diolah

Hasil penelitian dengan menggunakan PLS adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Algoritma



Gambar 3. Bootstrapping

PEMBAHASAN

Berdasar hasil olah data dapat dibahas pengujian pengujian tentang pengaruh antar variabel yaitu sebagai berikut.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis : anteseden variabel word of mouth. Ada dua pengujian sebagai berikut:

1. Pengujian hipotesis pertama; fasilitas Aplikasi Web memengaruhi word of mouth
 Pengujian hipotesis 1; Berdasar gambar 4.1 menunjukkan fasilitas web secara langsung tidak memengaruhi word of mouth, koefisien jalurnya = 0,068, (P-value = 0,5000. Fasilitas Aplikasi web tidak berpengaruh secara signifikan terhadap word of mouth (H1 tidak terbukti). Dengan kata lain fasilitas aplikasi web berkaitan dengan fasilitas aplikasi yang disediakan untuk penerimaan mahasiswa baru, penyimpanan data yang memadai dan kemudahan administrasi berbasis digital. Hal ini tidak berpengaruh terhadap word of mouth. Penelitian ini tidak mendukung teori dan penelitian terdahulu yaitu Assael (2006); Talukder, Md Shamim (2018). Alasan fasilitas aplikasi tidak memengaruhi word of mouth mahasiswa, semua itu hal yang sudah biasa didapat oleh mahasiswa dilakukan sistem manual mahasiswa tetap bicara positif karena yang dituntut oleh mahasiswa dalam proses belajar di Magister Manajemen adalah suasana akademik yang kondusif. Fasilitas Aplikasi web penting untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif sehingga akan tercipta word of mouth positif.
2. Pengujian hipotesis kedua ; Suasana akademik sebagai mediasi diantara pengaruh fasilitas aplikasi Web terhadap word of mouth

Pengujian hipotesis ; Untuk menentukan suasana akademik sebagai mediasi atau tidak dapat diperhatikan jalur masing-masing variabel . Dalam hal ini pengaruh fasilitas aplikasi web tidak berpengaruh langsung secara signifikan, otomatis suasana akademik dalam model merupakan mediasi sehingga suasana akademik merupakan variabel penting yan perlu diciptakan di magister manajemen. Terbukti suasana akademik harus diciptakan sehingga dapat menciptakan word of mouth mahasiswa. Suasana akademik berkaitan dengan keserasian proses belajar, suasana kesenangan, suasana kenyamanan belajar dan suasana kegembiraan bersama dosen dan teman-teman.

3. Determination Coefficient (R square)

Suasana akademik (R21) = 0,388

Word of mouth (R22) = 0,376

Q2 predictive relevance

$$Q2 = 1 - (1 - R21)(1 - R22)$$
$$= 1 - (1 - 0,388)(1 - 0,376)$$
$$= 1 - (0,612)(0,624)$$
$$= 0,6118$$

Q2 = 61,18 %, yang mana fasilitas Aplikasi web mempunyai kontribusi 61,18 % terhadap word of mouth mahasiswa, Sisanya sebesar 38,82 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dapat dideteksi oleh model PLS

KESIMPULAN

- Fasilitas Aplikasi aplikasi web tidak berpengaruh langsung terhadap Word of Mouth mahasiswa fasilitas aplikasi web dapat meningkatkan suasana akademik yang kondusif.
- Fasilitas Aplikasi web memengaruhi Word of Mouth dimediasi oleh suasana akademik.

SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa fasilitas aplikasi web tidak berpengaruh langsung terhadap Word of mouth, tetapi Fasilitas aplikasi web berpengaruh terhadap Word of mouth dimediasi oleh suasana akademik. fasilitas aplikasi web yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru, penyimpanan data yang memadai dan kemudahan administrasi berbasis digital. Suasana akademik berkaitan dengan Suasana akademik prodi magister manajemen menawarkan keserasian proses belajar, suasana kesenangan, suasana kenyamanan belajar dan suasana kegembiraan bersama dosen dan teman-teman dapat meningkatkan word of mouth mahasiswa.

Kontribusi teori adalah untuk mengembangkan teori perilaku konsumen khususnya fasilitas aplikasi web dapat meningkatkan suasana akademik sehingga berdampak pada Word of mouth mahasiswa. Kontribusi praktis bagi magister manajemen untuk menyusun strategi dalam membangun suasana akademik untuk meningkatkan word of mouth yaitu dengan upaya menciptakan keserasian proses belajar, dengan menerapkan kurikulum yang berbasis KKNi yaitu dengan menerapkan level 8 artinya mahasiswa mampu menciptakan sesuatu dalam proses belajar sehingga menghasilkan output yang jelas mengikuti seminar-seminar dan dapat sebagai penyaji artikel, menciptakan suasana kesenangan dalam mengerjakan tugas-tugas tanpa ada tekanan, menciptakan suasana kenyamanan belajar dalam ruang kelas dan suasana kegembiraan bersama dosen dan teman-teman dapat meningkatkan word of mouth mahasiswa.

Suasana akademik berkaitan dengan Kontribusi bagi penelitian selanjutnya yaitu penelitian dapat dikembangkan dengan menambahkan variabel baru yang belum diteliti, seperti menambahkan kepuasan tentang fasilitas fisik. Yang dimiliki oleh Magister manajemen.

REFERENCES

- Abdella, G. M., Hamouda, A. M., & A. B. A.-S. (2017). Modeling of student academic achievement in engineering education using cognitive and non-cognitive factors. *Journal of Applied Research in Higher Education Emerald Publishing Limited* 2050-

7003.

- Blackwell, E. J., & Miniard, P. W. (1996). *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Jilid 1 Edisi Keenam, Binarupa Aksara.
- Brown, I. T. (2002). Individual and Technological Factors Affecting Perceived Ease of Use of Web based Learning Technologies in Developing Country. *The Electronic Journal on Information System in Developing Countries*, 1-15.
- Handoko, H., & DH, B. S. (2000). *Manajemen Pemasaran dan Analisis Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Edisi Satu, BPF UGM.
- Hanson, W. (2000). *Pemasaran Internet*. Salemba Empat.
- Hendry, & Assael. (2001). *Consumer Behavior and Marketing Action*, Massachusetts, Publishing Company.
- Kortam, W., Elshamouby, T. H., & Eldegwy, A. (2018). How sociable is your university brand? An empirical investigation of university social augmenters' brand equity. *International Journal of Educational Management*, 32, 912-930.
- Liu, W., Guo, L. M., & Zhang, M. H. (2017). Understanding relationships among customer experience, engagement, and word-of-mouth intention on online brand communities. *The perspective of service ecosystem*, 27, 839-857.
- Lou, G. T. (Dec 1999). Consumer's (1999) trust in a Brand and the Link to Brand Loyalty. *Journal of Market – Focused Management*, 4, 341.
- Musso, M., Cicotto, P. P., & Pinna, R. C. (2018). The effects of students University identification on student's extra role behaviours and turnover intention. *The TQM Journal*, 30, 458-475.
- Park, M.-C., & Cheong, J. H. (2005). Mobile Internet Acceptance in Korea. *Internet Research*, 15, 125-140.
- Rahman, Z., & Yadav, M. (2018). The influence of social media marketing activities on customer loyalty. *A study of e-commerce industry Journal*, 25, 3882-3905.
- Santos, B. D., AF, S., & Raghav Rao, H. (1998). Marketing and the Internet. *Communications of the acm Volume*, 41, 34-43.
- Shehnaz. (2018). *Business Process Management Journal Emerald Publishing Limited*.
- Tetteh, G. A. (2018). Evaluating university leadership performance using Lean Six Sigma framework. *International Journal of Lean Six Sigma*, 2040-4166.
- Welke, R., & Olsen, T. (2018). Managerial challenges to realizing IT shared services in a public university. *Transforming Government: People, Process and Policy Emerald Publishing Limited*.